PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

P RKPD

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

SALINAN

BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUTON TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,(tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 183);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024 Nomor 196);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024 Nomor 193);
28. Peraturan Bupati Buton Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025.

Pasal I

Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Buton Nomor 19 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024 Nomor 519) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. Bab I : Pendahuluan
    b. Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenan
    c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
    d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
    e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
    f. Bab VI : Penutup
(3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
    a. latar belakang;
    b. maksud dan tujuan;
    c. dasar hukum penyusunan;
    d. dasar pertimbangan perubahan; dan
    e. sistematika penulisan.
(4) Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari program/kegiatan sampai dengan triwulan II;
(5) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat:
    a. kondisi perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025;
    b. prospek perekonomian Daerah;
    c. arah kebijakan ekonomi Daerah; dan
    d. arah perubahan kebijakan keuangan Daerah.

(6) Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2024.
(7) Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan dan lokasi kegiatan.
(8) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat kesimpulan dan harapan berkenaan dengan pelaksanaan perubahan RKPD tahun 2025.
(9) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 19 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

LA ODE SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 550

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196810051994011002

DAFTAR ISI

		Halaman
Daftar Isi		i
Daftar Tabel		ii
Daftar Gambar		iii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-8
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-9
	1.4.1. Maksud	I-9
	1.4.2. Tujuan	I-9
	1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD	I-10
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
	2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
	2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
	2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-17
	2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II-30
	2.1.1.4 Demografi	II-31
	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-34
	2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-34
	2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-43
	2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-55
	2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib	II-55
	2.1.3.2 Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib (Non Dasar)	II-78
	2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	II-111
	2.1.3.4 Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan	II-121
	2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-125
	2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-125
	2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-127
	2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-128
	2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-130
	2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-132
	2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-134
	2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-134
	2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-141

BAB. III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025... III-1
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) III-1
3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi III-5
3.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita ... III-7
3.1.4. Indeks Ketimpangan (Gini Ratio) III-8
3.1.5. Laju Inflansi III-9
3.1.6. Kemiskinan III-10
3.1.7. Indeks Pembanguanan Manusia (IPM) III-11
3.1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) III-16
3.1.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja..... III-17
3.2. Prospek Perekonomian Daerah III-18
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-22
3.4. Arah Perubahan Kebijkan Keuangan Daerah III-25
3.4.1. Kebijakan Pendapatan Daerah III-26
3.4.2. Kebijkan Belanja Daerah III-29
3.4.3. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah III-33

BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-12
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional IV-12
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 ..... IV-20
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2025 IV-21
4.2.4. Kebijakan Pembangunan Daerah Dengan Pendekatan Substansi Secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial IV-42
4.2.5. Kebijakan Penanganan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem IV-43
4.2.6. Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting IV-50

BAB. V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB. VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1

BAB. VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Tahun 2024	II-3
Tabel 2.2	Jumlah Desa/Kelurahan Pada Masing-masing Kecamatan Tahun 2025	II-4
Tabel 2.3	Jarak ke Ibukota Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Tahun 2024	II-4
Tabel 2.4	Batas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Tahun 2024	II-5
Tabel 2.5	Letak Astronomis Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton Tahun 2024	II-5
Tabel 2.6	Tinggi Wilayah Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Tahun 2024	II-6
Tabel 2.7	Potensi Energi dan Sumber Daya Air Di Kabupaten Buton .	II-10
Tabel 2.8	Keadaan Iklim di Kabupaten Buton Tahun 2024	II-12
Tabel 2.9	Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Buton Tahun 2024	II-15
Tabel 2.10	Volume Produksi Ikan Kabupaten Buton Tahun 2020 - 2024	II-24
Tabel 2.11	Kinerja Sektor Pertanian Kabupaten Buton Tahun 2020 - 2024	II-25
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Buton Pada Tahun 2020 s/d Tahun 2024	II-31
Tabel 2.13	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Buton Pada Tahun 2024	II-32
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020 s/d Tahun 2024	II-33
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020 s/d Tahun 2024	II-33
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024	II-33
Tabel 2.17	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Buton Tahun 2019 s/d Tahun 2024 (milyar Rupiah)	II-35
Tabel 2.18	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (milyar Rupiah)	II-36
Tabel 2.19	Distribusi PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 s/d Tahun 2024	II-37
Tabel 2.20	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (Persen)	II-38
Tabel 2.21	PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024	II-40
Tabel 2.22	Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024	II-43

Tabel 2.23	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II-44
Tabel 2.24	Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024	II-48
Tabel 2.25	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024.....	II-55
Tabel 2.26	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024	II-57
Tabel 2.27	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024	II-58
Tabel2.28	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Kabupaten Buton Tahun 2024	II-58
Tabel 2.29	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pecapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Buton Tahun 2024.....	II-59
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024.....	II-61
Tabel 2.31	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Kabupaten Buton Tahun 2024	II-63
Tabel 2.32	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Buton Tahun 2024.....	II-64
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024	II-67
Tabel 2.34	Capaian Indikator Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Tahun 2024	II-68
Tabel 2.35	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Tahun 2024.....	II-69
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024.....	II-70
Tabel 2.37	Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Buton.....	II-71
Tabel 2.38	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buton Tahun 2024	II-72
Tabel 2.39	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Tahun 2024.....	II-73
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Kunci Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024	II-74
Tabel 2.41	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibunlinmas Kabupaten Buton Tahun 2024.....	II-75

Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024 ..... II-76
Tabel 2.43 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial Kabupaten Buton Tahun 2024 ..... II-77
Tabel 2.44 Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Buton Tahun 2024 .. II-78
Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024 ..... II-79
Tabel 2.46 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Buton Tahun 2024 ..... II-80
Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d2024 ..... II-82
Tabel 2.48 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tahun 2024 ..... II-83
Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-85
Tabel 2.50 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan Kabupaten Buton Tahun 2024 ..... II-86
Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2022 ..... II-86
Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tahun 2023 s/d 2024 ..... II-87
Tabel 2.53 Capaian Indikator Kinerja Kunci Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tahun 2024 ..... II-89
Tabel 2.54 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-91
Tabel 2.55 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tahun 2024 ..... II-92
Tabel 2.56 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-93
Tabel 2.57 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Tahun 2024 ..... II-94
Tabel 2.58 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-95
Tabel 2.59 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Tahun 2024 ..... II-96
Tabel 2.60 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-97
Tabel 2.61 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan Kabupaten Buton Tahun 2024 ..... II-98

Tabel 2.62 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2022 ..... II-99
Tabel 2.63 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Tahun 2023 s/d 2024 ..... II-99
Tabel 2.64 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024..... II-101
Tabel 2.65 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buton Tahun 2024 ..... II-101
Tabel 2.66 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024..... II-103
Tabel 2.67 Jumlah Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Buton 2024..... II-103
Tabel 2.68 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-104
Tabel 2.69 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun 2024..... II-105
Tabel 2.70 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-105
Tabel 2.71 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Kabupaten Buton Tahun 2024 ..... II-106
Tabel 2.72 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten Buton Tahun 2024 ..... II-107
Tabel 2.73 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-107
Tabel 2.74 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan Kabupaten Buton Tahun 2024 ..... II-108
Tabel 2.75 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-109
Tabel 2.76 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-110
Tabel 2.77 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buton Tahun 2024..... II-111
Tabel 2.78 Capaian Kinerja Urusan dan Indikator Kunci Bidang Perikanan Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024..... II-112
Tabel 2.79 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-113
Tabel 2.80 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata Kabupaten Buton Tahun 2024 ..... II-114
Tabel 2.81 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024..... II-115
Tabel 2.82 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Kabupaten Buton Tahun 2024 ..... II-117
Tabel 2.83 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024 ..... II-118
Tabel 2.84 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdangan Kabupaten Buton Tahun 2024 ..... II-118

Tabel 2.85	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Buton Tahun 2024	II-119
Tabel 2.86	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian Kabupaten Buton Tahun 2024	II-120
Tabel 2.87	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024	II-121
Tabel 2.88	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Transmigrasi Kabupaten Buton Tahun 2024	II-121
Tabel 2.89	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024	II-123
Tabel 2.90	Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024	II-123
Tabel 2.91	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Buton Tahun 2024	II-124
Tabel 2.92	Peranan PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 s/d 2024	II-126
Tabel 2.93	Kondisi Infrastruktur Jalan, Perumahan, Irigasi dan Perhubungan Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024	II-128
Tabel 2.94	Capaian Indikator Pelayanan Perizinan Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024	II-129
Tabel 2.95	Capaian Indikator Pelayanan Perizinan Kabupaten Buton Tahun 2021 s/d 2024	II-129
Tabel 2.96	Penduduk 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2024	II-130
Tabel 2.97	Penduduk 15 Tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024	II-131
Tabel 2.98	Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2024	II-132
Tabel 2.99	Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Buton	II-142
Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (miliar rupiah)	III-2
Tabel 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020 s/d Tahun 2024 Kabupaten Buton (miliar rupiah)	III-3
Tabel 3.3	Peranan PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 s/d Tahun 2024	III-5
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (Persen)	III-7
Tabel 3.5	PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024	III-8
Tabel 3.6	Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024	III-11
Tabel 3.7	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (dalam 000 Rp)	III-15

Tabel 3.8	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024	III-17
Tabel 3.9	Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 (dalam juta rupiah)	III-28
Tabel 3.10	Realisasi dan Taget Belanja Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 (dalam juta rupiah)	III-33
Tabel 3.11	Realisasi dan target Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 (dalam juta)	III-34
Tabel 3.12	Realisasi dan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Buton Tahun 2025	III-35
Tabel 4.1	Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2025	IV-4
Tabel 4.2	Penyelarasan Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran Pembangunan Kabupaten Buton	IV-5
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Buton Pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025	IV-10
Tabel 4.4	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Buton	IV-22
Tabel 4.5	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2025	IV-26
Tabel 4.6	Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Buton	IV-29
Tabel 4.7	Program Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025	IV-43
Tabel 4.8	Program Urusan Perangkat Daerah Berdasaarkan Mandat Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025	IV-47
Tabel 4.9	Program Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025	IV-51
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2025	VI-1
Tabel 6.2	Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buton Tahun 2025	VI-2
Tabel 6.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025	VI-3

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.2	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya	I-9
Gambar 2.1	Peta Adminstrasi Kabupaten Buton	II-3
Gambar 2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Tahun 2024 (persen)	II-32
Gambar 2.3	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buton dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 (persen)	II-39
Gambar 2.4	Perkembangan Indeks Ketimpangan (Gini Ratio) Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024	II-40
Gambar 2.5	Perbandingan Indeks Ketimpangan (Gini Ratio)Kabupaten Buton dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2023 s/d Tahun 2024	II-41
Gambar 2.6	Pergerakan Inflasi Tahunan Kota Baubau dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 s/d Tahun 2024	II-42
Gambar 2.7	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Buton dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024	II-43
Gambar 2.8	Perkembangan IPM Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024	II-44
Gambar 2.9	Perbandingan IPM Kabupaten Buton dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024	II-45
Gambar 2.10	Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024	II-46
Gambar 2.10	Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024	II-46
Gambar 2.11	Perbandingan AHH Kabupaten Buton dengan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2024	II-47
Gambar 2.12	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024	II-48
Gambar 2.13	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d tahun 2024	II-49
Gambar 2.14	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Buton tahun 2020 s/d Tahun 2024	II-50
Gambar 2.15	Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Buton dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024	II-50
Gambar 2.16	Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024	II-51
Gambar 2.17	Perkembangan Stunting Kabupaten Buton Berdasarkan Hasil SSGI Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2021 s/d 2024	II-51
Gambar 2.18	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024	II-53

Gambar 2.19	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024 ……	II-54
Gambar 2.20	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 ……....	II-54
Gambar 2.21	Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024 ……....	II-56
Gambar 2.22	Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024 ……	II-127
Gambar 2.23	Komposisi Penduduk Kabupaten Buton Berdasarkan Kelompok Usia pada Tahun 2024 ……..	II-131
Gambar 3.1	Perkembangan Indeks Ketimpangan (Gini Ratio) Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024 ……..	III-9
Gambar 3.2	Pergerakan Inflansi Tahunan Kota Baubau dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 s/d Tahun 2024 ……	III-10
Gambar 3.3	Perkembangan IPM Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024 ……	III-11
Gambar 3.4	Perbandingan IPM Kabupaten Buton dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 ……...	III-12
Gambar 3.5	Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024 ……	III-12
Gambar 3.6	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024 ……..	III-14
Gambar 3.7	Perkembangan Rata-rata lama Sekolah Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024 ……...	III-14
Gambar 3.8	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024 ……	III-17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUTON TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu dilakukan penyesuaian. Pemerintah Kabupaten Buton telah menetapkan Peraturan Bupati Buton Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton pada tahun 2025. Namun karena munculnya beberapa permasalahan serta perkembangan dan dinamika dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perubahan RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, meliputi : a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; dan/atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025; Evaluasi pelaksanaan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk mengukur sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan untuk mengindentifikasi kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS. Dokumen Perubahan RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton tahun 2025-2029 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025, RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah RKPD Kabupaten Buton tahun 2024 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Buton, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan perunahan RKA Perangkat Daerah tahun 2025

RKPD tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Buton Nomor 53.a Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024, dan berdasarkan pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyesuaian belanja wajib dan mengikat pada OPD, pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, penyesuaian asumsi ekonomi makro atas capaian beberapa indikator makro pada tahun 2025, penyesuaian pembayaran pokok dan bunga pinjaman, serta kesesuaian peraturan perundang-undangan terbaru, yaitu adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1317 Tahun 2023 merupakan pemutahiran terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menggantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Oleh sebab itu perlu disusun perubahan terhadap RKPD tahun 2025 dengan mempertimbangkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi, penyesuaian target pendapatan di tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2025, dan adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun 2024 dimana terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang dapat dijabarkan penggunaannya pada perubahan APBD tahun 2025. Implikasinya adalah diperlukan penyesuaian target pendapatan, target belanja dan target pembiayaan, perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan/subkegiatan berserta pagu indikatifnya, pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, atau antar subkegiatan, penambahan atau pengurangan subkegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, lokasi, dan kelompok sasaran, serta adanya perubahan kerangka ekonomi

daerah dan kebijakan keuangan daerah. Selain itu perubahan RKPD tahun 2025 juga memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton tahun 2025-2029.

Perubahan RKPD tahun 2025 selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) dan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) tahun 2025 yang akan akan disepakati bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUA-PPASP tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 dilandasi atas dasar hukum sebagaimana berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

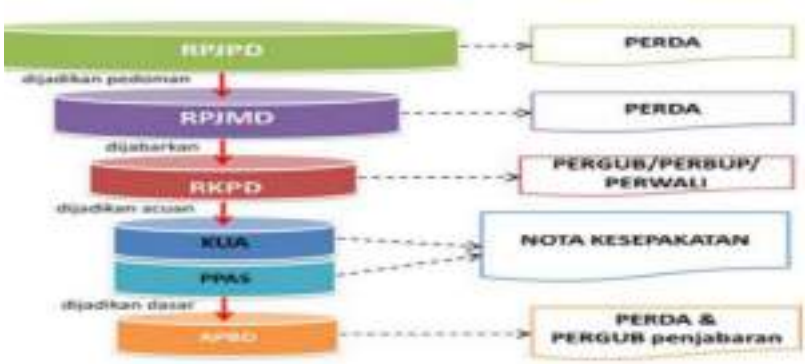
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
25. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor …… Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;
29. Peraturan Daerah Nomor …….Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025;
30. Peraturan Bupati Buton Nomor …….. Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Tahun 2025-2029
31. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Buton tahun 2025 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2025 dengan tetap berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan Renstra. Dokumen Perubahan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), yang nanti menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun renja dan RKA serta DPA Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Buton tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain dan saling berhubungan dengan pola hubungan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Kabupaten Buton tahun 2025 memuat tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2025 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Buton tahun 2025-2029;
2. Perubahan RKPD Kabupaten Buton tahun 2025, memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025;
3. Perubahan RKPD Kabupaten Buton tahun 2025 memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Buton tahun tahun 2015-2035;
4. Perubahan RKPD Kabupaten Buton tahun 2025 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyempurnakan dokumen perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025.
5. Perubahan RKPD Kabupaten Buton tahun 2025 menjadi pedoman/dasar penyusunan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan (PPASP) sebagai acuan dalam proses penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBDP) Kabupaten Buton tahun anggaran 2025.



Gambar 1.2
ubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Buton tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, provinsi dan daerah, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buton tahun 2025-2029

1.4.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Buton tahun 2025 adalah:

a. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun anggaran 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD tahun anggaran 2025 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025;
b. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

c. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2025;

1.5 Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD

Sistematika penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Buton tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan; memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Perubahan RKPD

BABII Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan; memuat hasil pelaksanaan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Buton sampai dengan triwulan II tahun 2025

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta kerangka pendanaan keuangan daerah

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; memuat visi, misi, tujuan, sasaran, prioritas pembangunan daerah tahun 2024

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; memuat program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, dan lokasi kegiatan

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; memuat target kinerja utama dan indikator kinerja daerah tahun 2025

BAB VII Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Buton merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara yuridis, Kabupaten Buton sebagai daerah otonomi, resmi berdiri berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822). Sejak pemekaran Kota Baubau pada tahun 2001, ibukota Kabupaten Buton dipindahkan ke Pasarwajo. Akses menuju Pasarwajo bagi masyarakat Buton harus melalui Kota Baubau terlebih dahulu karena belum ada akses langsung dari wilayah Buton ke Pasarwajo. Kemudian pada tahun 2016 pusat pemerintahan Kabupaten Buton sebagian besar wilayahnya terletak di Pulau Buton yang merupakan pulau terbesar di luar pulau induk Kepulauan Sulawesi.

Pada tahun 2014, Kabupaten Buton dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan. Kabupaten Buton sendiri terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yang terbagi lagi atas 83 (delapan puluh tiga) desa dan 12 (dua belas) kelurahan.

Analisis gambaran umum kondisi daerah tentang kondisi geografi dan demografi, indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, penelaahan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah tersaji sebagai berikut :

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah, mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten/kota/ kecamatan/desa dan kelurahan.

2.1.1.1 Karakteristrik Lokasi dan Wilayah

a. Letak Geografis

Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki sisi strategis utamanya dalam memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan

pembangunan daerah. Penjabaran aspek geografi akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Buton baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga klimatologi wilayah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Buton.

Apabila ditinjau berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Buton memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara dan Laut Banda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Baubau dan Selat Buton
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton Selatan dan Laut Banda

b. Administrasi dan Luas Wilayah

Karateristik lokasi dan wilayah merupakan gambaran dasar dari kondisi geografis Kabupaten Buton. Memiliki wilayah daratan seluas ± 168.443 Ha atau 1.647,87 Km^2, dan wilayah perairan laut seluas ± 1.058,11 Km^2, dimana pada tahun 2014 mengalami pemekaran menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan, sehingga kecamatan di Kabupaten Buton yang semula berjumlah 21 (dua puluh satu) kecamatan, menjadi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu :

- Kecamatan Lasalimu
- Kecamatan Lasalimu Selatan
- Kecamatan Pasarwajo
- Kecamatan Siontapina
- Kecamatan Wolowa
- Kecamatan Wabula
- Kecamatan Kapontori

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Buton



Sumber: RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km^2)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1	Lasalimu	Kamaru	318,90	19,35
2	Lasalimu Selatan	Ambuau Indah	147,01	8,92
3	Siontapina	Kumbewaha	248,81	15,10
4	Pasarwajo	Pasarwajo	300,13	18,21
5	Wolowa	Wolowa	94,55	5,74
6	Wabula	Wabula	66,11	4,01
7	Kapontori	Watumotobe	472,36	28,66
Jumlah			1.647,87	100,00

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka, 2025

Kecamatan yang paling luas wilayahnya secara berturut-turut adalah Kecamatan Kapontori dengan luas 472,36 km^2, Kecamatan Lasalimu 319,65 km^2 dan Kecamatan Pasarwajo dengan luas 300,97 km^2, menyusul Kecamatan Siotapina dengan luas 248,81 km^2 serta kecamatan Wolowa dengan luas 94,55 km^2 atau masing-masing 28,66 persen, 19,35 persen, 18,21 persen, 15,10 persen dan 5,74 persen terhadap total luas wilayah Kabupaten Buton. Sedangkan wilayah yang paling kecil adalah Kecamatan Wabula dengan luas wilayah 66,11 km2 atau 4,01 persen dari total luas wilayah Kabupaten Buton.

Jumlah desa/kelurahan, jarak ke ibukota kabupaten, batasan wilayah dan letak astronomis pada masing-masing kecamatan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Desa/Kelurahan Pada Masing-masing Kecamatan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Banyaknya		
			Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Lasalimu	Kamaru	14	1	15
2	Lasalimu Selatan	Ambuawu	16	0	16
3	Siontapina	Matanauwe	11	0	11
4	Pasarwajo	Pasarwajo	13	9	22
5	Wolowa	Wolowa	7	0	7
6	Wabula	Wabula	7	0	7
7	Kapontori	Mataumpana	15	2	17
	Jumlah Desa / Kelurahan		83	12	95

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka 2025.

Pada tabel di atas, tampak bahwa jumlah desa dan kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pasarwajo (13 desa dan 9 kelurahan), menyusul Kecamatan Kapontori (15 desa dan 2 kelurahan), Kecamatan Lasalimu Selatan (16 desa), Kecamatan Lasalimu (14 desa dan 1 kelurahan), Kecamatan Siotapina (11 desa), sedangkan yang paling sedikit desa/kelurahan adalah Kecamatan Wabula dan Wolowa masing-masing hanya 7 desa tanpa kelurahan. Kecamatan Pasarwajo memiliki kelurahan paling banyak (9), menyusul Kecamatan Kapontori (2), dan Kecamatan Lasalimu (1). Dari 7 kecamatan yang ada terdapat 4 kecamatan yang tidak mempunyai kelurahan, hanya status desa.

Tabel 2.3
Jarak ke Ibukota Kabupaten Buton
Menurut Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1	Lasalimu	88,39
2	Lasalimu Selatan	56,50
3	Siontapina	44,26
4	Pasarwajo	7,57
5	Wolowa	16,28
6	Wabula	22,80
7	Kapontori	132,13

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.4
Batas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton
Tahun 2024

No.	Kecamatan	Batas			
		Utara	Selatan	Timur	Barat
1	Lasalimu	Kab. Buton Utara dan Laut Banda	Kec. Siotapina, Kec. Lasalimu Selatan dan Kec. Wolowa	Kec. Lasalimu Selatan dan Laut Banda	Kec. Kapontori
2	Lasalimu Selatan	Kec. Lasalimu dan Laut Banda	Kec. Siotapina dan Laut Banda	Laut Banda	Kec. Lasalimu dan Kec. Siotapina
3	Siontapina	Kec. Lasalimu dan Kec. Lasalimu Selatan	Kec. Wolowa dan Laut Flores	Kec. Lasalimu Selatan dan Laut Flores	Kec. Lasalimu dan Kec. Wolowa
4	Pasarwajo	Kec. Kapontori dan Kec. Wolowa	Kec. Wabula dan Kab. Buton Selatan	Laut Flores	Kota Baubau dan Kab. Buton Selatan
5	Wolowa	Kec. Kapontori dan Kec. Lasalimu	Laut Flores dan Kec. Pasarwajo	Kec. Lasalimu Selatan dan Kec. Siotapina	Kec. Kapontori dan Kec. Pasarwajo
6	Wabula	Kec. Pasarwajo	Kab. Buton Selatan dan Laut Flores	Laut Flores	Kab. Buton Selatan
7	Kapontori	Kab. Buton Utara	Kota Baubau dan Kec. Pasarwajo	Kec. Lasalimu dan Kec. Wolowa	Selat Buton

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka, 2025

Tabel 2.5
Letak Astronomis Menurut Kecamatan di Kabupaten Buton
Tahun 2024

No.	Kecamatan	Lintang Selatan	Bujur timur
1	Lasalimu	$5^0$6’ - $5^0$18’	$122^0$8’ - $122^0$50’
2	Lasalimu Selatan	$5^0$14’ - $5^0$21’	$123^0$0’ - $123^0$13’
3	Siontapina	$5^0$15’ - $5^0$26’	$122^0$55’ - $123^0$9’
4	Pasarwajo	$5^0$19’ - $5^0$33’	$122^0$44’ - $122^0$54’
5	Wolowa	$5^0$15’ - $5^0$26’	$122^0$49’ - $122^0$59’
6	Wabula	$5^0$31’ - $5^0$39’	$122^0$47’ - $122^0$54’
7	Kapontori	$5^0$3’ - $5^0$21’	$122^0$40’ - $122^0$53’
	Buton	$5^0$3’ - $5^0$39’	$122^0$8’ - $123^0$13’

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2025

c. Bentuk Wilayah dan Topografi

❖ Topografi

Kondisi topografi tanah daerah Kabupaten Buton pada umumnya memiliki

permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit-bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan relatif rendah, ada yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 M di atas permukaan laut (Mdpl), kemiringan tanah mencapai 40^0. Dimana sebagian besar wilayah Kabupaten Buton (44,94%) berada pada kelas lereng 41%-60%, dan wilayah yang berada pada lahan yang datar (lereng<2%) hanya mencapai 2,41% luas wilayah.

❖ **Ketinggian Tempat**

Ketinggian tempat dan kontur merupakan informasi yang menyajikan data interval pembagian ketinggian tempat di Kabupaten Buton. Data ini berisi informasi tentang kisaran ketinggian tempat di Kabupaten Buton, beserta titik-titik ketinggian yang terdapat pada setiap lokasi. Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut, sebagian besar wilayah Kabupaten Buton (46,79%) berada pada ketinggian 0-115 mdpl. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berada daerah dataran yang umumnya merupakan wilayah bagian pesisir. Titik ketinggian tertinggi berada pada 808 mdpl laut.

Tabel 2.6
Tinggi Wilayah Kabupaten Buton
Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Lasalimu	0-462
2	Lasalimu Selatan	0-346
3	Siontapina	0-462
4	Pasarwajo	0-808
5	Wolowa	0-808
6	Wabula	0-577
7	Kapontori	0-808

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka, 2025

❖ **Geomorfologi**

Pulau Buton mempunyai susunan geologi lebih kompleks dari pada Pulau Muna, yang terdiri atas batuan malihan redimen Mesozoikum, sediment tersier, endapan sungai dan batuan ultrabasik (Sikumbang dan Sanyoto, 1981). Batuan malihan meliputi formasi Mukino dan Lakanasai. Batuan sedimen Mesozoikum dibagi menjadi 4 formasi yaitu : formasi Winto, Ogena, Rumu dan Tobelo. Batuan sedimen tersier menutupi sebagian besar Pulau Buton yang terdiri dari tiga formasi yaitu:

formasi Tondo, Sampolakosa dan Wapulaka. Endapan sungai, pantai dan rawa terdiri dari pasir, lanau dan lempung menempati daerah Kuala dan Teluk. Batuan ultrabasik terdiri dari peridotit, serpentinit dan peridotit terserpentinitkan. Selain batuan ultrabasik terdapat pula batuan diorit yang menerobos batuan sedimen Mesozoikum. Batuan muda yang diterobos oleh diorit ádalah formasi Tobelo, terdapat dihulu S. Rumu.

❖ **Landform**

Kabupaten Buton dibedakan kedalam 7 satuan *landform* utama, yaitu : dataran aluvium, dataran pantai (*marin*), dataran piedmont, teras marin, batu gamping terembu angkatan, sistem perbukitan dan sistem pegunungan.

- **Dataran Aluvium (A)**

Landform ini terdiri dari : dataran banjir (*floodplain*), pelembahan/ cekungan (*basin*), pelembahan sungai (*valley*), dan teras sungai. Penyebarannya terdapat di sepanjang jalar aliran sungai termasuk daerah meander, pelembahan dan cekungan yang terdapat diantara perbukitan serta di daerah-daerah bagian bawah pada wilayah bergelombang dan dataran piedmont. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, terletak pada ketinggian 2-360 m di atas permukaan laut(dpl). Bahan yang menyusun landform ini umumnya berupa bahan endapan aluvium.

- **Dataran Pantai (B)**

Landform ini terletak di sepanjang pantai dengan ketinggian 0-15 mdpl. Bentuk wilayahnya datar sampai agak berombak, meliputi dataran pantai datar, pesisir pantai (beaches) laguna dan daerah pasang surut (tidalflat, swamps/maersh). Bahan yang menyusun landform ini berasal dari bahan endapan marin.

- **Dataran Piedmont (P)**

Landform ini terdiri dari dataran, piedmont dan peneplain yang merupakan daerah kaki perbukitan yang tersusun dari berbagai jenis batuan seperti batu pasir, batu sabak, batu ultrabasik, batu gamping dan sedimen marintak terinci. Bentuk wilayah hampir datar sampai bergelombang pada ketinggian 2-300 mdpl.

- **Teras Pantai (T)**

Landform ini merupakan teras laut yang terbentuk pada jaman kuarter sampai tersier dan tersusun dari bahan sedimen laut yang umumnya tidak kukuh (*unconsolidated*). Bentuk wilayah datar agak tertoteh sampai hillock pada ketinggian antara 10-280 mdpl.

- **Batu Gamping Terumbu Angkatan/*Coral Reefs* (C)**

  Landform ini merupakan daerah angkatan dari karang laut; dan terdapat secara dominan di Pulau Muna dan Pulau Buton. Daerahnya berombak, berbukit-bukit kecil sampai belerang terjal.

- **Perbukitan (H)**

  Landform ini terdiri dari perbukitan: angkatan, lipatan, sebagian patahan dan intrusi, berupa perbukitan-perbukitan rendah (*hillocks dan hills*). Batuan yang menyusun landform ini terdiri dari batu gamping, napal, batu pasir, skis, filit, ultrabasik,dan sedimen marin tak terinci. Bentuk wilayahnya berbukit dengan lereng agak curam sampai sangat curam, pada ketinggian tempat 10-700 mdpl.

- **Pegunungan (M)**

  Landform ini terdiri dari pegunungan : angkatan, lipatan dan intrusi. Batuan yang menyusun *landform* ini terdiri dari batu kapur, batuan skis dan ultrabasik. Bentuk wilayahnya bergunung dengan lereng curam sampai sangat curam, pada ketinggian tempat 600-2.000 mdpl.

d. Geologi

- **Struktur Geolog**

  Daerah Buton disusun oleh kelompok batuan *Mesozoikum* berumur Trias hingga Kapur Atas bahkan hingga *Paleosen* dan kelompok batuan *Kenozoikum* berumur Tersier dan Kuarter. Kelompok batuan *Mesozoikum* terdiri atas Formasi Winto, Formasi Ogena, Formasi Rumu dan Formasi Tobelo. Kelompok batuan sedimen yang termasuk batuan Kenozoikum kemudian menutupi sebagian besar P. Buton yang terdiri atas Fomasi Tondo, Formasi Sampolakosa dan Formasi Wafulaka yang diendapkan pada Miosen Awal hingga Pliosen Akhir-Plistosen (Gambar2.2). Formasi tondo dan formasi Sampolakosa merupakan tempat endapan aspal di Pulau Buton Sumber aspal yang terdapat didalam kedua formasi tersebut diduga berasal dari Formasi Winto (Trias) dan dianggap sebagai formasi pembawa bitumen padat.

  Peristiwa tektonik yang terjadi pada Anjungan Tukang besi-Buton menyebabkan terjadinya struktur lipatan yang terdiri dari antiklin da nsinklin, serta struktur sesar yang terdiri dari sesarnaik, sesarnormal dan sesargeser mendatar. Umumnya struktur berarah Timur Laut-Barat Daya di Buton Selatan, kemudian berarah Utara-Selatan di Buton Tengah, dan Utara-Barat laut hingga Selatan-Tenggara di Buton Utara. Peristiwa tektonik yang terjadi berulang-ulang menyebabkan batuan-batuan yang

berumur lebih tua mengalami beberapa kali aktifitas struktur, sehingga batuan tua umumnya ditemukan dengan kemiringan lapisan yang relatif tajam.

Tektonik yang terjadi di daerah Buton dimulai sejak pra-Eosen, dimana pola tektoniknya sukar ditentukan disebabkan oleh seluruh batuannya telah mengalami beberapa kali perlipatan dan pensesaran. Gerak tektonik utama yang membentuk pola struktur hingga sekarang diperkirakan terjadi pada Eosen-Oligosen yang membentuk struktur imbrikasi berarah Timur laut-Barat Daya. Tektonik ini menyebabkan terjadinya sesar mendatar antara Buton Utara dan Buton Tengah sepanjang Bubu-Matewe yang diperkirakan berhubungan dengan sesar mendatar Palu-Koro. Kegiatan tektonik berikutnya terjadi antara Pliosen-Plistosen yang mengakibatkan terlipatnya batuan pra-Pliosen. Kegiatan tektonik terakhir terjadi sejak Plistosen dan masih berlangsung hingga saat ini. Tektonik ini mengakibatkan terangkatnya P. Buton dan P. Muna secara perlahan.

- **Litologi**

  Secara litologi Kabupaten Buton cukup bervariasi, hal ini dapat dilihat dari perbedaan antara Pulau Buton, Pulau Muna dan Pulau Kabaena yang secara geografi mempunyai jarak yang relatif dekat satu dengan lainnya, namun memperlihatkan kondisi geologi yang sangat berbeda. Pulau Kabaena tersusun oleh batuan periodotit, sekis, batu gamping, rijang dan lempung merah dengan struktur geologi yang sangat rumit. Pulau Buton disusun oleh batuan klastika gunung api bersifatan desit, berumur Trias yang tertindih oleh batuan serpih, napal, lanau dan batu pasir berumur Jura yang kaya moluska dan tidak diketemukan di daratanSulawesi. Batuan lainnya yang lebih muda terdiri dari molasa berumur Miosen serta batu gamping terumbu yang berumur Kuarter. Pulau Muna diapit oleh Pulau Kabaena dan Pulau Buton tersusun oleh batu gamping terumbu dengan gerakan naik yang dapat diamati dari adanya undak-undak pesisir pantai yang sangat baik. Perbedaan kondisi geologi seperti ini dapat memberikan kesimpulan bahwa Pulau Buton bukan merupakan bagian dari Sulawesi Timur daratan (Sumantri *dkk*,1986).

e. Hidrologi dan Sumber Daya Air

Kabupaten Buton memiliki beberapa sungai besar yang terdapat dibeberapa kecamatan. Sungai-sungai tersebut pada umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sumber tenaga, irigasi dan kebutuhan rumah, seperti sungai Winto dan Tondo di Kecamatan Pasarwajo, Sungai Malaoge, Tokulo, dan Sungai Wolowa di Kecamatan Lasalimu.

Sungai-sungai utama yang terdapat di Kabupaten Buton memiliki pola drainase sungai yang hampir seragam yaitu pola paralel dan subparalel. Data debit air sungai hanya beberapa yang tersedia. Beberapa sungai keadaan aliran airnya tergolong cukup dan dapat dimanfaatkan untuk air irigasi dan pembangkit listrik tenaga air (Mini dan Mikro Hidro). Dengan banyaknya sungai dan anak sungai yang tersebar di Buton maka terdapat beberapa titik potensial untuk dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) baik mikro hidro maupun pembangkit listrik mini hidro.

Sungai yang tergolong besar di Kabupaten Buton adalah sungai Winto Winning dengan debit 12,3 m^3/detik yang terdapat di Pasarwajo yang dapat membangkitkan listrik dengan perkiraan kapasitas 1.600 KW. Kemudian sungai Tondo/Kabungka (Wolowa-Siontapina) dengan debit 4,7m^3/detik dengan perkiraan kapasitas 367 KW. Untuk mengetahui potensi energi dan sumber daya air dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Potensi Energi dan Sumber Daya Air Di Kabupaten Buton

No	Jenis Unsur	Cadangan (Ton, Ha)	Kandungan/ Kadar	Letak/Lokasi	Ket.
1	Thermo Dinamika (Panas Bumi)	Spekulatif Potensial (Sp)	201-400 Mwe	Kabungka Kec. Pasarwajo, Lawele Kec.Lasalimu	Belum Terukur, belum dimanfaatkan
2	Sungai Winto Winning	Kap. 1600 Kw	12,3 M3/dtk	Winning Kec. Pasarwajo	
3	Sungai Tondo	Kap.367 Kw	4,7 M3/dtk		Belum dikelola
4	Sungai Umalaoge			Ds Lasalimu Kec. Lasalimu Selatan	Belum dikelola
5	Sungai Lambusamngo, Sungai wakalambe			Ds Lambusango, Wakalambe Kec. Kapontori	Irigasi Sawah
6	7 Sumber Mata Air, 3 Mata Air Diturap,2 Mata Air selam			Kec. Pasarwajo	Sda
7	2 Sumber Mata			Kec. Wolowa	Sda

No	Jenis Unsur	Cadangan (Ton, Ha)	Kandungan/ Kadar	Letak/Lokasi	Ket.
	Air, 1 Mata Air di Turap				
8	3 Sumber Mata Air			Kec. Lasalimu Selatan	Sda
9	4 Sumber Mata Air, 1 Air terjun			Kec. Lasalimu	Sda
10	5 Sumber Mata Air, 1 mata Air Diturap			Kec. Kapontori	Sda

f. Kondisi Iklim

Kabupaten Buton merupakan wilayah dengan iklim tropis basah. Hal ini ditunjukkan oleh curah hujan yang bervariasi sepanjang tahun dengan total mencapai 2.839 mm/tahun. Kelembaban udara rata-rata tergolong tinggi, berkisar antara 75,7% hingga 89,3%. Suhu tahunan di Kabupaten Buton relatif hangat, dengan rata-rata 26,3°C hingga 28,6°C, sementara suhu maksimum dapat mencapai 33,8°C pada musim kemarau. Selain itu, perbedaan antar musim tidak terlalu terlihat, kecuali periode sedikit hujan dan banyak hujan. Curah hujan yang tinggi yang terjadi di Kabupaten Buton merupakan anugrah, karena air hujan ini memiliki fungsi utama dalam menjaga siklus air di wilayah ini. Dengan siklus air yang baik, maka berbagai manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Buton. Manfaat tersebut antara lain adalah terairinya lahan-lahan pertanian, tersimpannya cadangan air yang dapat digunakan di musim kemarau, terjaga kelangsungan hidup makhluk hidup di wilayah ini, tersedianya sumber air minum, terjaganya kesuburan tanah, terjaganya kelestarian hutan dan dapat berfungsinya sarana transportasi air bagi mobilisasi manusia dan barang.

Kondisi iklim di Kabupaten Buton menurut Schmidtand Ferguson (1951), merupakan wilayah dengan tipe hujan cukup bervariasi yaitu tipe B, C dan D. Sedangkan menurut klasifikasi Koppen, wilayah Kabupaten Buton mempunyai tipe iklim Am yaitu iklim hujan tropis yang dicirikan adanya satu atau lebih bulan kering nyata (<60mm/bulan) menyebar di sebagian besar daratan Pulau Buton bagian selatan mempunyai tipe hujan C dan D, sedangkan bagian tengah Pulau Buton memiliki tipe iklim B dan C. Sedangkan Pulau Muna mempunyai tipe hujan D, kecuali sekitar Lasehao yang mempunyai tipe

hujan B.

Keadaan musim di Kabupaten Buton pada umumnya sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia dimana mempunyai dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi diantara bulan Desember sampai dengan bulan April. Pada saat tersebut, angin darat bertiup dari Benua Asia serta Lautan Pasifik banyak mengandung uap air. Musim kemarau terjadi antara bulan Juli dan September, pada bulan-bulan tersebut angin timur yang bertiup dari Benua Australia sifatnya kering dan kurang mengandung uap air. Khusus pada bulan April dan Mei di daerah Kabupaten Buton arah angin tidak menentu, demikian pula dengan curah hujan, sehingga pada bulan-bulan ini dikenal sebagai musim pancaroba.

Tabel 2.8
Keadaan Iklim di Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Bulan	Rata- rata Suhu (°C)	Rata-rata Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Jumlah Curah Hujan	Penyinaran Matahari (jam)
1	Januari	28,2	85	3,2	1.011,60	393	3,8
2	Februari	27,8	86,9	3	1.013,00	277	4,7
3	Maret	27,7	88,3	2,9	1.012,30	314	3,6
4	April	27,5	89,3	2,6	1.011,20	292	4,1
5	Mei	27,4	87,2	2,5	1.012,00	350	4,3
6	Juni	26,7	85,7	2,5	1.013,50	261	4,5
7	Juli	26,3	82,3	3,3	1.015,00	227	4,7
8	Agustus	26,7	75,7	3,3	1.009,30	51	6,4
9	September	27,5	77	3,4	1.008,10	90	5,7
10	Oktober	28,6	76,4	3,5	1.007,70	29	6,2
11	November	28,1	84,6	3	1.006,20	222	4,9
12	Desember	27,7	87,6	3,5	1.005,20	333	2,6

Sumber: Kabupaten Buton Dalam Angka, 2025

g. Penggunaan lahan

(1) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang (kesesuaian lahan) bagi kawasan budidaya (khususnya pertanian, perkebunan, peruntukan lahan pesisir seperti tambak, dan lain-lain) dilakukan berdasarkan informasi sistem lahan dan unit lahan pada survey-survei sebelumnya.

Penekanan dari analisis kesesuaian lahan adalah untuk mendapatkan kesesuaian bagi pengembangan aktivitas serta komoditas yang ditetapkan. Keluaran dari analisis ini adalah berupa peluang-peluang yang meliputi kapasitas lahan yang

dapat dikembangkan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan tersebut untuk masing-masing jenis aktivitas atau komoditas.

Menurut UU No 26 Tahun 2007, Permen PU No 16 Tahun 2009 dan Rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Buton 2023-2043, dalam rencana pola ruang kawasan budidaya dibedakan atas:

1) Kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas 53.066 Ha atau 31,50% dari luas wilayah Kabupaten Buton, terdiri atas :
   a. Kawasan Hutan Produksi tetap (HP) ditetapkan seluas 52.898 Ha atau 99,68% dari luas kawasan hutan produksi, meliputi : Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina, Wolowa;
   b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) ditetapkan seluas 168 Ha atau 0,32% dari luas kawasan hutan produksi, meliputi : Kecamatan Kapontori dan Lasalimu.
2) Kawasan Pertanian dengan luas 56.185 Ha atau 33,36% dari luas wilayah Kabupaten Buton, terdiri atas :
   a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan seluas 2.980 Ha atau 5,30 dari luas kawassan pertanian, meliputi : Kecamatan Kapontori, Lasalimu Selatan dan Siotapina.
   b. Kawasan Hortikultura dengan luas 12.086 Ha atau 21,51% dari luas kawasan pertanian, yang meliputi : Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan dan Siotapina.
   c. Kawasan Perkebunan dengan luas 41.119 Ha atau 73,19% dari luas kawasan pertanian, yang meliputi : Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina, Wabula dan Wolowa.
   d. Pada kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat Kawasan Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan dengan luas 2.363 Ha yang terdapat di seluruh kecamatan.

      Kawasan pertanian lahan pangan berkelanjutan meliputi wilayah yang memiliki hamparan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Kawasan Pertambangan dan Energi dengan luas 4.352 Ha atau 2,58% dari luas wilayah Kabupaten Buton untuk pertambangan batubara, yang meliputi : Kecamatan Pasarwajo dan Wolowa.

   Untuk Kawasan Pertambangan Batuan meliputi kawasan yang memiliki potensi pertambangan batuan, dapat berupa izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan, dan wilayah usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

4) Kawasan peruntukan Industri dengan luas 1.543 Ha atau 0,92% dari luas wilayah Kabupaten Buton, yang meliputi : Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Pasarwajo dan Wabula.

5) Kawasan Pariwisata dengan luas 129 Ha atau 0,08% dari luas wilayah Kabupaten Buton yang meliputi : Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina, Wabula dan Wolowa.

6) Kawasan Permukiman dengan luas 7.004 Ha atau 4,19% dari luas wilayah Kabupaten Buton, terdiri atas :

   a. Kawasan permukiman perkotaan dengan luas 2.248 Ha atau 32,09% dari luas wilayah permukiman, meliputi : Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina, Wabula dan Wolowa.
   b. Kawasan permukiman perdesaan dengan luas 4.756 Ha atau 67,90% dari luas wilayah permukiman, meliputi : Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina, Wabula dan Wolowa.

9) Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan luas 4 Ha, terdiri atas :

   a. KORAMIL 1413-2 di Kecamatan Pasarwajo
   b. KORAMIL1413-3 di Kecamatan Kapontori
   c. KORAMIL 1413-13 di Kecamatan Lasalimu
   d. Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Buton di Kecamatan Pasarwajo
   e. Kepolisian Sektor (POLSEK) di setiap kecamatan

10) Kawasan Transportasi dengan luas 19 Ha meliputi Kecamatan Pasarwajo.

(2) Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Di Kabupaten Buton, tidak semua jenis kawasan lindung ada

sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Permen PU No 16 Tahun 2009.

Dalam Rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Buton Tahun 2023-2043, Kawasan Lindung atau Zona Lindung meliputi :

1) Badan Air, dengan luas kurang lebih 97 Ha
2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan luas kurang lebih 12.546 Ha atau 7,45% dari luas wilayah Kabupaten Buton, meliputi : Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina dan Wabula.
3) Zona perlindungan setempat dengan luas 1.095 Ha atau 0,65% dari luas wilayah Kabupaten Buton, meliputi : Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina, Wabula dan Wolowa.
4) Kawasan Konservasi dengan luas 28.368 Ha atau 16,84% dari luas wilayah Kabupaten Buton, terdiri atas :
   a. Cagar alam dengan luas 812 Ha atau 2,86% dari luas kawasan konservasi, meliputi : Kecamatan Kapontori dan Lasalimu
   b. Suaka Margasatwa dengan luas 27.556 Ha atau 97,14% dari luas kawasan konservasi, yang meliputi : Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Pasarwajo dan Wolowa.
5) Kawasan Ekosistem Mangrove dengan luas 155 Ha atau 0,09% dari luas wilayah Kabupaten Buton, meliputi : Kecamatan Kapontori, Lasalimu Selatan, Pasarwajo dan Wabula.
6) Kawasan rawan bencana, meliputi :
   a. Kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang;
   b. Kawasan rawan bencana longsor tingkat sedang.
7) Kawasan Sempadan, meliputi : Sempadan pantai

Secara rinci kawasan hutan lindung di Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Buton Tahun 2024

SK_465	HECTARES	LUAS	KELILING	LOKASI
HL	149.61408280500	1483309.766	12688.193	Desa Kamaru
HL	227.06749300200	2269434.500	18311.338	Desa Nambo
HL	19.33986243140	193398.624	3461.415	Desa Wangu-wangu

SK_465	HECTARES	LUAS	KELILING	LOKASI
HL	118.91848782300	1189184.878	5742.522	Desa Todanga
HL	2326.71982180000	23267198.218	33886.283	Desa Todanga
HL	392.19356388600	3918723.378	32307.889	Desa Suandala, Desa Togu Mangura, Desa Sribatara
HL	34.74345046550	341796.051	3284.206	Desa Kamaru
HL	268.28040597100	2659736.859	19800.985	Desa Kakenauwe, Desa Wagari, Desa Benteng, Desa Lawele
HL	15.85342327550	156688.643	3248.179	Desa Bonelalo
HL	194.25931917800	1932350.850	15314.360	Desa Bonelalo, Desa Lasembangi
HL	361.99000352600	3580694.963	21738.333	Desa Wasuamba
HL	19.00719562900	165530.784	4317.129	Desa Lasalimu, Desa Umalaoge
HL	329.07096520100	3289235.789	14116.465	Desa Kinapani, Desa Umalaoge, Desa Mopaano
HL	528.37431932200	5283743.193	10511.191	Desa Sumber Sari, Desa Siomanuru, Desa Wajah Jaya, Desa Kinapani Makmur
HL	60.58387841430	581014.928	4026.967	Desa Mopaano
HL	669.52527904400	6651171.975	37837.476	Desa Mega Bahari, Desa Karya Jaya, Desa Kumbewaha
HL	3041.50454459000	30415045.446	31492.336	Desa Wasuemba
HL	10161.95436150000	58615762.287	78311.544	Desa Todanga
HL	144.36262805500	1443626.281	9035.300	Desa Todanga
HL	263.10481879000	2631048.188	19850.089	Desa Todanga
HL	221.24993242000	2212499.324	8921.806	Desa Todanga

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buton Tahun 2024

(3) Kawasan Strategis

Kawasan strategis kabupaten (KSK), terdiri atas :

1) Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas
   a. Kawasan ekonomi khusus Lasalimu
   b. Kawasan strategis pertanian di Kecamatan Lasalimu Selatan
   c. Kawasan minapolitan di Kecamatan Pasarwajo
2) Kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
   a. Kawasan strategis suaka margasatwa Lambusango
   b. Kawasan strategis cagar alam Kakenauwe

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Pusat-Pusat Kegiatan

Dalam Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton Tahun 2023-2043, pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Buton direncanakan terbagi atas :

1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan yang terletak di Kawasan perkotaan Pasarwajo.
2) Pusat pelayanan kawasan (PPK) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan kegiatan skala kecamatan dan/atau desa-desa di sekitarnya, yang terletak di Kamaru Kecamatan Lasalimu dan Ambuau Indah Kecamatan Lasalimu Selatan.
3) Pusat pelayanan lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terletak di Matanauwe Kecamatan Siotapina, Mataumpana Kecamatan Kapontori, Wolowa Kecamatan Wolowa, dan Wabula di Kecamatan Wabula.

b. Potensi Sumber Daya Alam dan Daerah

Pemerintah daerah dalam merencanakan pengembangan wilayah memerhatikan potensi wilayah, ruang serta keterkaitan dengan wilayah disekitarnya. Pengembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh pengembangan infrastruktur serta tarikan oleh pasar (Kelengkapan fasilitas) dari dalam maupun luar wilayah. Selain mendekati keramaian pengembangan wilayah juga akan memperhatikan faktor penghambat seperti kawasan bencana dan kawasan lindung.

Kabupaten Buton merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah khususnya pada sektor pertanian (perikanan, perkebunan, tanaman pangan), sektor pertambangan, dan sektor pariwisata, dan sektor industri. Potensi tersebut dapat dilihat dari kinerja kontribusi sektor pada struktur perekonomian Kabupaten Buton (Kontribusi terhadap PDRB), potensi ketersediaan sumber daya, infrastruktur dan kebijakan pemerinah pada masing-masing sektor.

Berdasarkan kondisi alamnya, maka Kabupaten Buton memiliki 2 (dua) jenis komoditas unggulan, yakni : ASPAL dan PERIKANAN LAUT. Keberadaan aspal Buton yang telah dieksplorasi dan dieksploitasi sejak zaman Belanda merupakan tempat kedua di dunia atas temuan adanya aspal alam setelah TRINIDAD. Sedangkan menurut kondisi Kabupaten

Buton sebagai hamparan pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut lepas dan pertemuan arus Utara-Selatan, mengakibatkan daerah ini sangat kaya dengan potensi perikanan laut.

- **Potensi Pertambangan**

1. Aspal Alam Buton

Potensi pertambangan dapat dilihat dari kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang mampu berkontribusi signifikan terhadap PDRB Kabupaten Buton, dan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar selama periode 5 tahun terakhir, yaitu pada angka 41,34% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Buton. Potensi pertambangan Kabupaten Buton hingga tahun 2024 masih didominasi oleh ASPAL.

Sebagaimana diketahui Pulau Buton merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang memiliki aspal alam dan telah dieksplorasi sejak seratus tahun yang silam. Sabuk aspal alam Buton (Asbuton) terhampar dari kawasan bagian selatan sampai bagian utara Kabupaten Buton dengan cadangan deposit sekitar 662.960.267 Ton tersimpan pada hamparan seluas 376.537.850 m2 dengan kadar aspal yang terkandung dalam Asbuton bervariasai dengan kadar antara 15 persen sampai 50 persen dan yang sudah dieksplorasi baru asbuton dari deposit Kabungka dengan kadar bitumen 20 persen, dan deposit Lawele dengan kadar bitumen 35 persen. Dari eksplorasi yang dilakukan di Wilayah Lawele Kecamatan Lasalimu pada 132 titik pengeboran diperoleh hasil ketebalan asbuton berkisar antara 9 m-45 m atau ketebalan rata-rata 29,88 m dengan tebal tanah penutup 0-17 m atau rata-rata tebal tanah penutup 3,47 m pada luas daerah sebaran deposit asbuton sekitar 1,5 juta m2.

Pulau Buton merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang memiliki aspal alami. dan sebagai penghasil alam terbesar didunia yang berupa batuan beraspal *(rock asphalt*) dikenal dengan isitilah Asbuton (Aspal Buton). Aspal buton untuk pertama kali ditemukan oleh seorang geolog Belanda yang bernama W.H. Hetzel pada tahun 2024. Sumber daya Asbuton sebesar 694.317.154 ton dan cadangan 43.909.963 ton telah dieksplorasi sejak seratus tahun yang silam. Asbuton terbentuk dari endapan ganggang dan biota yang bercampur dengan batulempung membentuk batuan induk didalam cekungan di dasar laut. Keunggulan asbuton yaitu titik lembeknya lebih tinggi dari aspal minyak dan ketahanan stabilitsa asbuton yang cukup tinggi membuatnya tahan terhadap panas dan menjadi tidak mudah meleleh, sehingga dapat meningkatkan daya tahan, hasil ekstraksi asbuton memiliki sifat fisik yang lebih dari aspal minyak terutama kelekatan dan stabilitas.

Sabuk aspal alam Buton terhampar dari kawasan bagian selatan sampai bagian utara Kabupaten Buton dengan cadangan deposit sebesar 662.960.267 ton tersimpan pada hamparan seluas 376.537.850 m2 dengan kadar aspal yang terkandung dalam Asbuton bervariasai dengan kadar antara 15 persen sampai 50 persen dan yang sudah dieksplorasi baru asbuton dari deposit Kabungka dengan kadar bitumen 20 persen, dan deposit Lawele dengan kadar bitumen 35 persen. Dari eksplorasi yang dilakukan di Wilayah Lawele Kecamatan Lasalimu pada 132 titik pengeboran diperoleh hasil ketebalan asbuton berkisar antara 9 m-45 m atau ketebalan rata-rata 29,88 m dengan tebal tanah penutup 0-17 m atau rata-rata tebal tanah penutup 3,47 m pada luas daerah sebaran deposit asbuton.

Berdasarkan data Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Juni 2023 menunjukkan terdapat 24 izin usaha pertambangan aspal tahap kegiatan operasi produksi di Kabupaten Buton. Dimana salah satu daerah di Indonesia yang telah menggunakan aspal buton adalah Provinsi Jawa Tengah dan aspal buton juga telah diekspor ke negara China. Saat ini industry aspal buton sudah difasilitasi sertifikasi TKDN dengan nilai TKDN produk asbuton olahan antara 30-50 persen. Dimana menurut Permenperin Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, barang dengan nilai TKDN diatas 40 persen masuk dalam kategori barang wajib pakai. Dalam hal ini asbuton sudah masuk kategori wajib pakai, sehingga diharapkan adanya dukungan kebijakan dari pemerintah yang dapat mendorong pergerakan sektor pertambangan utamanya aspal buton. Manakala sektor pertambangan dalam hal ini aspal bergerak maka dapat dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan bergerak cepat karena pertambangan memberi kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya pada pergerakan ekonomi daerah.

2. Mangan

Cadangan mangan Kabupaten Buton sekitar 2.000 Ha yang terdapat di Desa Kumbewaha Kecamatan Siontapina Sampai pada saat ini, perusahaan yang melaksanakan kegiatan eksplorasi bahan galian Mangan (Mn), yaitu PT. Malindo Baramurni. Mangan yang ada di Kabupaten Buton berupa tipe Psilomelane (Ba, H2O2 Mn3O10).

3. Nikel

Sumber daya mineral berupa nikel seluas 16.000 Ha dengan kandungan/kadar berkisar 0,5 – 2,47% yang berada di Kecamatan Kapontori. Telah mulai dieksplorasi oleh PT. Bumi Buton Delta Mega.

4. Batu Gamping dan Marmer

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Buton khususnya yang berada di Pulau Buton dan Pulau Muna disusun oleh batuan yang didominasi oleh batu gamping dan sebagian telah mengalami proses metamorfosa/malihan menjadi MARMER, banyak dijumpai peta Formasi WAPULAKA, Formasi SAMPOLAKOSA, Formasi TONDO, Formasi TOBELO dan Formasi RUMU, dan seluruh daratan Pulau Muna.

Khusus tentang MARMER dapat dijumpai pada Formasi OGENA, sedangkan asosiasi fosfat, gipsum dan anhidrit diperkirakan banyak berasosiasi dengan endapan batu gamping tersebut diatas. Demikian pula halnya dengan KALSIT sebagai bahan obat-obatan, kecantikan dan pasta gigi banyak dijumpai berasosiasi dengan endapan batu gamping.

Cadangan Batu Gamping yang terdapat pada Kecamatan Wabula, sampai saat ini belum dilakukan esplorasi tapi merupakan perkiraan.

5. Cekungan Minyak dan Gas Bumi

Pulau Buton dan Pulau Muna merupakan salah satu Blok Cekungan MIGAS yang ada di kaki Jazirah Tenggara Sulawesi, yang telah di ekplorasi oleh pihak PERTAMINA bekerja sama dengan South East Asia Oil dan Gas Company sejak tahun 1969. Kemudian Indonesia Gult Oil Company pada tahun 1970 juga telah melakukan pengeboran MIGAS di 3 (tiga) titik yaitu; BALE-15, BULU-15, dan SAMPOLAKOSA- 15.

Berdasarkan BUTON BLOCK BOUNDARY dapat diketahui bahwa sumur BULU – 15 berlokasi di Lasalimu dan Lasalimu Selatan. Pertanyaannya mengapa sampai pada saat ini belum ada aktivitas eksploitasi, ternyata sesuai dengan penjelasan pihak PERTAMINA bahwa cekungan MIGAS yang ada di Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Muna berada pada kedalaman lebih dari 6.000 m dari permukaan tanah, sementara teknologi pengeboran MIGAS saat ini baru mencapai kedalaman kurang dari 5.000 m. Demikian maka potensi MIGAS yang terdapat di Kabupaten Buton merupakan cekungan energi masa depan menyusul kemajuan TEKNOLOGI di bidang MIGAS.

6. Potensi Geothermal (Panas Bumi)

Persoalan energi listrik di seluruh Indonesia saat ini sudah mencapai tahap kritis yang sangat mengkhawatirkan, demikian pula halnya dengan power supply energi listrik di Kabupaten Buton yang sangat terbatas. Pada hakekatnya di Kabupaten Buton ternyata tersimpan di dalam perut bumi suatu potensi ENERGI LISTRIK yang dapat dibangkitkan dari energi GEOTHERMAL atau PANAS BUMI.

Pada saat ini diketahui terdapat 5 (lima) titik potensi energi panas bumi (geothermal) yaitu; Kalende, Kanale, Wonco, yang berjarak sekitar 65 km dari Kota BauBau, Rongi sekitar 20 km dari Kota Baubau, dan Kabungka sekitar 50 km dari Kota Baubau. Kelima lokasi tersebut diatas telah dilakukan pengamatan lapangan, dan diperoleh data manifestasi lapangan PANAS BUMI sebagai berikut :

1) Berada pada pinggiran kali, yang diduga sebagai zona patahan yang memotong reservoir panas bumi.
2) Sumber air menghasilkan bauh belerang (SO2, H2S).
3) Temperatur 40 – 75 °C.
4) Mengeluarkan uap air

Jika potensi energi panas bumi ini dapat dieksploitasi, maka dapat mendukung penyediaan ENERGI LISTRIK untuk :

1) Suplai kebutuhan energi listrik untuk pertambangan aspal PT. SARANA KARYA, industri pengolahan aspal ekstraksi yang akan dilakukan oleh INVESTOR yang diperkirakan membutuhkan energi listrik sebesar ± 45 MW.
2) Dapat mensuplai kebutuhan listrik di daratan Kabupaten Buton sebesar ± 15 MW, Kabupaten Muna ± 7 MW.
3) Bisa mensuplai kebutuhan energi panas bumi untuk industri sektor pertanian (pangan, perkebunan, dan perikanan) untuk pengeringan atau pengawetan hasil pertanian dan perikanan tersebut.

   Total potensi panas bumi di Kabupaten Buton (Sampolawa = 5 MW, Kabungka = 10 MW, Wonco = 5 MW, Kaongke-ongke = 5 MW, Kanale = 5 MW, dan Kapontori = 10 MW).

7. Potensi Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Salah satu persyaratan terjadinya Investor Found adalah tersedianya energi listrik. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara telah menginventarisasi potensi sungai-sungai yang dapat dikembangkan untuk PLTA di Kabupaten Buton, yaitu :

1. Sungai Ngkari-Ngkari dengan debit = 0,35 m3/detik, kapasitas = 10.500,00 KW.
2. Sungai Winto – Winning dengan debit = 12,30 m3/detik, kapasitas = 1.600,00 KW.
3. Sungai Tondo Kabungka dengan debit = 4,68 m3/detik, kapasitas = 367,00 KW.
4. Sungai Lakaritsu dengan debit = 0,27 m3/detik, kapasitas = 17,00 KW.
5. Sungai Langkowal dengan debit = 0,28 m3/detik, kapasitas = 13.050,00 KW.

Demikian keberadaan sumberdaya air dan sumberdaya panas bumi diatas dapat dikembangkan untuk menopang kebutuhan pasok energi listrik prioritas bagi pengembangan kawasan industri di Kabupaten Buton

- **Potensi Sumber Daya Pesisir dan Laut**

  Potensi perikanan tergambar dari luas perairan Kabupaten Buton sebesar 1.058,11 Km dengan panjang garis pantai kurang lebih 262.955 Km. Potensi perikanan tangkap Kabupaten Buton (WPP 714) sebesar 788.939 ton/tahun. Sedang potensi perikanan budidaya sebesar 356.133,3 ton/tahun dengan luas lahan budidaya sebesar 8.147 Ha. Dari 95 desa dan kelurahn di Kabupaten Buton, terdapat 67 desa dan kelurahan pesisir (70,53%). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Buton merupakan wilayah maritim yang sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan, terutama perikanan tangkap melalui pengembangan kawasan minapolitan atau juga kawasan sentra perikanan terpadu untuk mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dalam mendukung ekonomi maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Kepulauan Buton. Wilayah perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan wisata bahari, karena disamping hasil ikan dan hasil laut lainnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah.

  Data Dinas Perikanan Kabupaten Buton menunjukkan bahwa potensi perikanan tangkap Kabupaten Buton (WPP 714) sebesar 788.939 ton/tahun dan perikanan budidaya sebesar 356.133,3 ton/tahun dengan luas lahan budidaya 8.147 Ha. Dimana terdapat 67 desa dan kelurahan pesisir atau 70,53% dari 95 desa dan kelurahan di Kabupaten Buton. Pada sisi jumlah SDM nelayan, nelayan penuh sebanyak 2652 orang, nelayan sambilan utama sebanyak 1.385 orang, dan jumlah Nelayan Sambilan Tambahan berjumlah 487 orang jumlah rumah tangga perikanan tangkap sebanyak 3.679 RTP, jumlah rumah tangga perikanan budidaya sebanyak 399 RTP, jumlah pengolah ikan sebanyak 80 orang, dan jumlah pemasar ikan sebanyak 604 orang.

  Beberapa jenis ikan hasil perairan laut Kabupaten Buton yang banyak ditangkap oleh nelayan di daerah ini antara lain Tongkol, Layang Bonggol, Cakalang, Layang Biru, Teri, Tuna Sirip Kuning. Disamping ikan, juga terdapat hasil laut lainnya seperti Teripang, Agar-Agar, Japing-Japing, Lola, Mutiara dan lainnya, yang semuanya ini dapat menunjang perekonomian di daerah ini.

Dukungan infrastruktur sektor perikanan terdapat 2 pelabuhan pendaratan ikan di Kecamatan Lasalimu dan Pasarwajo. Namun saat ini pelabuhan pendaratan ikan yang beroperasi hanya di Kecamatan Pasarwajo. Sarana pendukung lain produksi perikanan tangkap terdapat cold storage di 3 desa wilayah Kecamatan Pasarwajo, yaitu Desa Dongkala (500 Ton), Desa Holimombo (150 Ton), Desa Wasaga (100 Ton), pabrik es PPI Pasarwajo, ice storage PPI Kamaru, bangsal pengolahan tuna loin, bangunan air blast freezer (ABF), bangunan dan infrastruktur pendukung pabrik pengolahan rumput laut di Kecamatan Kapontori.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh ahli kelautan Indonesia dan luar negeri menunjukkan bahwa pulau Buton memiliki potensi perairan untuk wisata bahari yang sangat indah bila dibandingkan dengan daerah- daerah wisata bahari lainnya di Indonesia. Adapun potensi sumber daya pesisir dan laut Kabupaten Buton antara lain :

- Perikanan laut hasil tangkapan

  Produksi perikanan tangkap selama tiga tahun terakhir cenderung menurun. Pada tahun 2021 produksi perikanan tangkap sebesar 26.465 ton, dan pada tahun 2022 mencapai 28.341 ton, namun pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan dimana produksi hanya mencapai 26.613 ton dan 19.317 ton. Salah satu faktor jumlah trip yang tidak optimal karena musim yang tidak menentu.

- Perikanan budidaya laut

  Produksi perikanan budidaya selama tiga tahun terakhir juga cenderung menurun. Pada tahun 2021, produksi perikanan budidaya sebesar 4.096 Ton, dan pada tahun 2022 mencapai 4.276 ton (4.277), namun pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan hanya mencapai 1.789 ton sama halnya di tahun 2024 yang hanya mencapai 1.909. Permasalahan utama menurunnya produksi perikanan budidaya yaitu adanya aktivitas pertambangan nikel di wilayah Kecamatan Kapontori sehingga berdampak pada kualitas air dan lingkungan budidaya menjadi tercemar, akibatnya sebagian besar masyarakat pembudidaya ikan maupun pembudidaya rumput laut menjadi tidak produktif dan beralih profesi, seperti diketahui bahwa wilayah potensi usaha perikanan budidaya terbesar di Kabupaten Buton adalah teluk Kapontori.

  Meskipun produksi perikanan menunjukkan penurunan, namun produksi olahan perikanan menunjukan trend peningkatan dimana pada tahun 2021, produksi olahan perikanan sebesar 1.513 ton, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 2.253 ton di tahun 2023 mencapai 3.098 ton dan di tahun 2024 sebesar 2.787 ton

Tabel. 2.10
Volume Produksi Ikan Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

Jenis Komoditi	Volume Produksi Ikan (Ton)					Total
	2020	2021	2022	2023	2024	
Ikan Pelagis Kecil & Pelagis Besar	18.344	19.011	20.307	11.165	14.010	82.837
Ikan Demersal & Ikan Karang	7.196	6.769	7.201	3.803	4.792	29.761
Jenis ikan lainnya	689	683	832	409	513	3.126

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Buton, 2020-2024

- Potensi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

Kabupaten Buton merupakan daerah agraris, hal ini dapat ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh lahan yang ada di Kabupaten Buton, 52,51 persen atau seluas 6,443 hektar yang digunakan untuk usaha pertanian, yaitu untuk tegal/kebun, ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan/hutan rakyat, perkebunan rakyat.

Potensi pertanian dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah maupun potensi dari ketersediaan lahan (pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) dan infrastruktur pendukungnya. Dimana sektor pertanian merupakan sektor terbesar kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian yang memberi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Buton selama periode 5 tahun terakhir, yaitu pada angka 21,66%. Selain data kontribusi terhadap PDRB, potensi sektor pertanian dapat juga terlihat dari data tenaga kerja, dimana berdasarkan data BPS pada tahun 2023, menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha paling besar di Kabupaten Buton masih didominasi oleh sektor pertanian, yaitu sebanyak 43,6%.

Kabupaten Buton memiliki potensi pengembangan pertanian tanaman pangan yang cukup baik antara lain untuk komoditas padi sawah, padi ladang, jagung, kacang kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau.

Pada tahun 2024 produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya sama dengan tahun 2023 yakni sebesar 36,61 ton/Ha , bila dibandingkan dengan produktivitas tahun 2022 yang hanya mencapai sebesar 8,08 ton/Ha. Begitu pula produksi perkebunan tahun 2024 juga mengalami jumlah produksi yang sama dengan tahun 2023 yakni sebesar 2.566 ton bila dibandingkan capaian pada tahun 2022 hanya sebesar 1.439 ton. Peningkatan produksi komoditas perkebunan disebabkan antara lain bertambahnya luas tanam, adanya program kegiatan peremajaan tanaman

perkebunanan, intensifikasi serta perluasan tanaman perkebunan yang dilakukan oleh petani sehingga tanaman yang tidak produktif dapat diganti dengan tanaman baru yang dapat menghasilkan produksi yang lebih banyak serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengolahan tanah dan pemupukan yang berimbang.

Pada tahun 2024 terjadi penurunan produksi daging ternak sebesar 118.750 kg angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 132.100 kg. Penurunan produksi daging ternak ini disebabkan kurangnya pemotongan ternak besar terutama sapi dan kambing di Kabupaten Buton.

Berdasarkan potensi sumber daya (lahan dan kawasan tangkapan), dukungan infrastruktur dan kebijakan pemerintah, maka potensi tersebut dapat disajikan secara spasial sebagai berikut :

a. Potensi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan seluas 2.980 Ha meliputi Kecamatan Kapontori, Lasalimu Selatan dan Siotapina.
b. Potensi pengembangan kawasan pertanian tanaman hortikultura seluas 12.086 Ha meliputi Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan dan Siotapina.
c. Potensi pengembangan lahan perkebunan seluas 41.119 Ha meliputi kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina, Wabula dan Wolowa
d. Potensi pengembangan peternakan dengan ketersediaan padang pengembalaan seluas + 719 Ha meliputi Kecamatan Siotapina, Pasarwajo, dan Kapontori

Tabel. 2.11
Kinerja Sektor Pertanian Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Tanam Komoditas Utama Tanaman Pangan (Ha)					
	Padi	2.287	2.110	1538	1.829	-
	Jagung	1.830	991	821	795	1.126
	Ubi Kayu	522	204	130	106,3	159
2	Luas Panen Komoditas Utama Tanaman Pangan (Ha)					
	Padi	2.287	2.110	1.538	1.774	1.676
	Jagung	1.031	823	495	643	694,6
	Ubi Kayu	304	259	171	208	164
3	Jumlah Produksi Komoditas Utama Tanaman Pangan (Ton)					
	Padi	6.419	7.578	5.852	6.430	6.041
	Jagung	2.751	2.666	1.047	1.292	1.494
	Ubi Kayu	8.544	6.587	5.779	5.791	4.210
4	Jumlah Produktivitas Komoditas					

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
	Utama Tanaman Pangan (Ton/Ha)					
	Padi	3	4	4	4	3,6044
	Jagung	26	32	21	20,11	21.52
	Ubi Kayu	281	254	338	278,54	256,69
5	Luas Tanam Komoditas Utama Tanaman Perkebnuan (Ha)					
	Kakao	2.412	2.142	1.726	1.301	
	Jambu Mete	6.224	6.181	6.024	5.925	
	Kelapa Dalam	2.621	2.644	2.811	2.798	
6	Jumlah Produksi Komoditas Utama Tanaman Perkebnuan (Ton)					
	Kakao	346,69	446,39	170,17	40,85	
	Jambu Mete	3.020,03	331,21	460,16	1.005,03	
	Kelapa Dalam	1.818,35	2.376.57	2.649,33	2.993,49	
7	Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Tanaman Perkebnuan (Ton/Ha)					
	Kakao	0,27	0,46	0,3	0,12	
	Jambu Mete	0,67	0,074	0,12	0,22	
	Kelapa Dalam	1,10	1,38	1,49	1,62	
8	Jumlah Produksi Daging Ternak (Kg)					
	Daging Sapi	81.472	81.592	102.546	102.546	71.547
	Daging Ayam	10.839	11.000	12.968	1.268	4.593
	Daging Ayam Ras Pedaging	21.213	24.100	25.650	25.650	2.106
9	Jumlah Populasi Ternak (Ekor)					
	Sapi	12.812	13.591	13.977	5.004	5.357
	Kambing	11.900	12.657	12.700	4.216	4.670
	Babi	170	379	477	64	93
	Ayam Buras	360.504	380.781	381.656	50.553	53.268
	Ayam Ras Pedaging	15.800	3.780	19.200	7.136	7.492
	Itik	13.649	13.699	14.137	739	775
	Itik Manila	2.443	2.032	2.470	295	309

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Buton, 2020-2024

- **Potensi Pariwisata dan Budaya**

Potensi pariwisata di Kabupaten Buton tersebar di seluruh wilayah (Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina, Wabula dan Wolowa). Obyek wisata unggulan di Kabupaten Buton adalah wisata bahari, dengan jumlah desa wisata sebanyak 31 desa dan kelompok sadar wisata sebanyak 31 kelompok.

Terletak di jalur Wallacea yang kaya akan flora dan fauna, Buton memiliki potensi beragam ekosistem, sehingga menjadi tempat penelitian menarik bagi upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekoturism.

Potensi wisata lainnya yang terletak di Kecamatan Kapontori adalah wisata pulau pendek dan pulau panjang, pantai kapontori, pantai walinda, spot diving pulau pendek, uwe kancusu, danau biru/ndawundawuna, danau wambilau, gua liangkamoi, gua langole, gua wakole togo, gua wisata, gua wambilau, air terjun lapangan, air bendung, dan padang kuku.

Selain dikenal sebagai penghasil aspal terbesar di Indonesia, Kabupaten Buton juga memilki sejuta daya tarik pada alam laut dan hutannya, serta kaya akan budaya dan tradisi yang unik dan eksotik. Terletak di jalur Wallacea yang kaya akan flora dan fauna, Buton memiliki potensi beragam ekosistem, sehingga menjadi tempat penelitian menarik bagi upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekoturism. Beberapa obyek wisata yang ada di Kabupaten Buton dan menarik dikunjungi antara lain :

a. Suaka Margasatwa Lambusango dan cagar alam Kakenauwe Kec. Kapontori. Merupakan hutan hujan tropis yang belum tersentuh,dan menjadi rumah bagi spesies endemik seperti anoa, macaque, tersius, kuskus dan beberapa jenis burung. Saat ini sumber daya alam yang eksotis ini pengelolaannya menjadi tanggung jawab Operation Wallacea. Pengunjung dapat mencapai hutan lindung tersebut dengan menggunakan minibus lokal selama satu setengah jam.

   Potensi wisata lainnya yang terletak di Kecamatan Kapontori adalah wisata pulau pendek dan pulau panjang, pantai kapontori, pantai walinda, spot diving pulau pendek, uwe kancusu, danau biru/ndawundawuna, danau wambilau, gua liangkamoi, gua langole, gua wakole togo, gua wisata, gua wambilau, air terjun lapangan, air bendung, dan padang kuku.

b. Kawasan Pantai Koguna. Merupakan kawasan pantai yang terletak di Kecamatan Lasalimu Selatan dengan luas arealnya berada pada hutan produksi sebesar 1.071 Ha, luas APL di pesisir pantai sebesar 3,6 Ha dengan panjang pantai 9,5 km, pada kawasan ini terdapat pula obyek wisata danau udang merah seluas 0,2 Ha, batu terbelah seluas 0,3 Ha. Obyek wisata lainnya yang dapat dikunjungi di Kecamatan Lasalimu Selatan adalah permandian topa, wacu kambo, la gusi gusi, danau togomotonu, gua langalu, spot diving pantai koguna, togo matonu, dan permandian sangi wa ode.

c. Kecamatan Wabula sebagai kawasan pengembangan pariwisata memiliki berbagai potensi wisata alam dan wisata bahari. Akses menuju lokasi wisata sangat mudah dengan jarak tempuh $\pm$ 24 km dari ibukota kabupaten.

Beberapa potensi wisata di Kecamatan Wabula adalah kawasan Kali Topa, Pantai Wabula, Lakongkomali/Tj. Pamali, Pantai Lahunduru, Permandian Watobura, Kampung Bajo, Pantai Wasampela, dan spot diving Wabula Wasuemba.

d. Kawasan *dive centre* Pasarwajo, yang terletak di pusat ibukota kabupaten memiliki beragam keunikan keanekaragaman hayati. Obyek wisata lainnya adalah pantai banabungi, pantai kancinaa, pantai kasosona, pantai wasaga, pantai kumbawakole/muara kali winto, gua wandingi, gua larumusu, air terjun kohau-hauna, permandian air panas wining, permandian air panas kaongke-ongkea, permandian wajo, kali winto/permandian puto dan jembatan kekinian kaongke-ongkea.

e. Obyek wisata yang juga sangat menarik untuk dikunjungi di kecamatan Wolowa yaitu air terjun kalata, air terjun wacumapu, pantai wasuni, pantai sangia wa ode, pantai kampoila/pantai pasir hitam, sokoa dan spot diving sokoa.

Obyek wisata di kecamatan Siotapina yaitu permandian baluwu, permandian sangia manuru, spot diving sangia manuru.

f. Berbagai potensi pariwisata tersebut juga didukung oleh potensi budaya berupa peninggalan sejarah, hal ini dapat dilihat terdapat berbagai peninggalan sejarah antara lain benteng kamaru, benteng lawalangke, benteng togomatonu di kecamatan Lasalimu, benteng ambuau, benteng kondala, benteng batukombei, benteng togo boneo, benteng kopea, benteng labuae, makam syeh salim di kecamatan Lasalimu Selatan, benteng yang terdapat di Kecamatan Siotapina, Wabula, Wolowa, dan Kapontori.

g. Dalam rangka peningkatan promosi wisata budaya Pemerintah Kabupaten Buton telah mengagendakan pelaksanaan pesta adat dibeberapa wilayah yang sarat akan nilai budaya dan rutin dilaksanakan sepanjang tahun..

h. Kabupaten Buton selain memilki sejuta daya tarik pada alam laut dan hutannya, juga memiliki beragam wisata budaya dan sejarah serta tradisi yang unik dan eksotik, diantaranya ritual pikoelaliwu, ritual maata, ritual cikaa, kandea-kandea, dhole-dhole, benteng takimpo, benteng kantolobea, ritual adat tutura Benteng Takimpo, Benteng Keraton Lasalimu, makam Oputa Yikoo, makam Raja Muale, Badili Koholimombono, Benteng Wasuemba, dan cagar budaya yang sampai saat ini sudah ada 19 situs cagar budaya yang dilestarikan.

Adapun cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Buton yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Buton meliputi:

1. Benteng Liwu Kondowa di Kecamatan Pasarwajo;
2. Benteng Holimombo di Kecamatan Pasarwajo;
3. Benteng Kambula Bulana di Kecamatan Pasarwajo;
4. Benteng Kantolobea di Kecamatan Pasarwajo;
5. Benteng Wakole di Kecamatan Pasarwajo;
6. Benteng Takimpo Lipuogena di Kecamatan Pasarwajo;
7. Benteng Wasuemba di Kecamatan Wabula;
8. Benteng Koncu Wabula di Kecamatan Wabula;
9. Benteng Wacu Kotoru di Kecamatan Wabula;
10. Benteng Liwu di Kecamatan Wabula;
11. Benteng Kumbewaha di Kecamatan Siotapina
12. Benteng Keraton Lasalimu di Kecamatan Lasalimu Selatan;
13. Lokasi Kampung Lama Kombeli di Kecamatan Pasarwajo;
14. Badili Takimpo di Kecamatan Pasarwajo.
15. Makam Rajamulae (Sangia Igola) di Kecamatan Kapontori;
16. Badili Koholimombono di Kecamatan Wabula;
17. Badili Wasuemba di Kecamatan Wabula;
18. Badili Wabula di Kecamatan Wabula;
19. Liwuto Ampodo (Pulau Pendek) di Kecamatan Kapontori;

Posisi Kabupaten Buton yang berdekatan dengan Kabupaten Wakatobi, memberikan peluang bagi Kabupaten Buton menjadi daerah penyangga pengembangan pariwisata nasional di Kabupaten Wakatobi, yang dapat memberi peluang bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton. Selain itu, posisi Kabupaten Buton yang terletak di jalur Wallacea yang kaya akan flora dan fauna, menjadikan Buton memiliki potensi beragam ekosistem, sehingga menjadi tempat penelitian menarik bagi upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekoturism. Namun selama periode 5 tahun terakhir, sektor pariwisata belum menunjukan sebagai sektor unggulan dari capaian kontribusi terhadap PDRB. Hal ini terlihat dari lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang hanya mampu berkontribusi sebesar 0,12% pada tahun 2024, angka menunjukkan trend fluktuatif dan cenderung menurun.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

1. Kawasan Rawan Bencana Alam Kabupaten Buton, meliputi :

A. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Potensi gerakan tanah yang umum dikenal sebagai longsor di daerah ini muncul oleh karena beberapa faktor, antara lain:

- Batuan pembentuk lereng berupa klastika kasar yang terutama terdiri dari breksi, konglomerat. Batuan yang telah lapuk menjadi lempung pasiran hingga pasir lempungan, berwarna abu-abu, mengandung kerikil, bersifat porous, dengan ketebalan 3-4 m dan di bagian bawahnya dapat menjadi bidang gelincir gerakan tanah.
- Adanya pemotongan hampir tegak pada tebing jalan, tanpa adanya terastering, sehingga menyebabkan tingginya gaya dorong tanah untuk bergerak mencari keseimbangan baru.
- Adanya bidang lemah yaitu kontak antara tanah yang melapuk dengan batuan dasar yang berupa bidang luncur.

  Hasil analisis peta menunjukkan wilayah berpotensi longsor di Kabupaten Buton dibagi kedalam empat kelas, yakni (1) wilayah bahaya longsor I atau sangat tinggi, (2) wilayah bahaya longsor II atau tinggi, (3) wialayah bahaya longsor III atau sedang, dan (4) wilayah dengan potensi longsor rendah.

Wilayah potensi longsor kategori 2 di Kabupaten Buton relatif kecil yaitu di bagian tengah pulau, sedangkan wilayah zona 3 (sedang) merupakan wilayah paling sedikit, sepanjang patahan yang membatasi antara landform perbukitan di bagian tengah dengan dataran di sepanjang pesisir. Berdasarkan peta tersebut maka umumnya wilayah Kabupaten Buton berada dalam zona relative aman dari segi tanah longsor, meskipun daerah-daerah dengan kemiringan di atas 45% tetap memiliki resiko longsor. Kemiringan yang besar merupakan daerah yang potensial terhadap terjadinya gerakan tanah/batuan. Wilayah ini dijumpai di Desa Ambuau Indah Kecamatan Lasalimu Selatan, Desa Wakaokili Kecamatan Pasarwajo, dan Desa Lambusango Kecamatan Kapontori.

B. Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Kawasan Rawan Banjir

Banjir bukan merupakan masalah serius di Kabupaten Buton, namun perlu diwaspadai, sejalan dengan semakin berkurangnya tutupan lahan bagian hulu DAS. Kejadian banjir ditentukan oleh:

- Morfologi dan Geologi DAS

- Kondisi tutupan lahan DAS
- Resapan (Lokal)
- Intensitas Curah Hujan

Kawasan berpotensi banjir di Kabupaten Buton terdapat di Desa Ambuau Indah Kecamatan Lasalimu Selatan, Kinapani Makmur dan Desa Mataompana di Kecamatan Kapontori.

Sedangkan kawasan rawan gelombang pasang terutama disepanjang pesisir terdapat di Desa Banabungi, Kel. Wasaga, Kancinaa, Kel. Kahulungaya Kecamatan Pasarwajo; Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan, Desa Sampuabalo Kecamatan Siotapina, Desa Wasuemba, Wabula, Wasampela dan Holimombo di Kecamatan Wabula. lain itu terdapat pula dataran yang berpotensi banjir seperti daerah dataran Kapontori, dan dataran Kecamatan Lasalimu.

2.1.1.4. Demografi

Informasi tentang kependudukan sangat strategis dan sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan karena sasaran utama dari pembangunan adalah kesejahteraan penduduk. Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah tidak dapat memecahkan masalah kependudukan seperti besarnya jumlah penduduk dan tidak meratanya penyebaran penduduk.

Penduduk Kabupaten Buton pada tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebanyak 122.024 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 60.874 jiwa dan perempuan sebanyak 61.150 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 2023-2024 sebesar 0,81 persen. Pada tahun 2024 Kecamatan Pasarwajo masih merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling banyak sebesar 46.485 jiwa. Sedangkan Kecamatan Wabula merupakan daerah yang dengan jumlah penduduk paling sedikit sebesar 6.791 jiwa, diikuti Kecamatan Wolowa sebesar 6.923 jiwa.

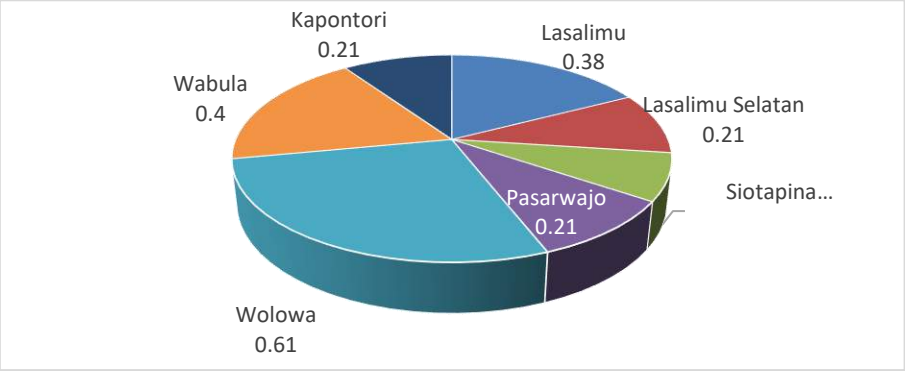
Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Buton Pada Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Kecamatan	Penduduk /Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Lasalimu	12.869	12.597	12.850	13.235	13.363
2	Lasalimu Selatan	15.748	15.429	15.716	15.939	16.077
3	Siotapina	16.628	15.977	16.399	16.769	16.900
4	Pasarwajo	45.518	45.323	46.107	45.959	46.485
5	Wolowa	6.514	6.312	6.462	6.793	6.923
6	Wabula	6.523	6.345	6.494	6.813	6.791
7	Kapontori	15.168	15.057	15.325	15.365	15.485

No.	Kecamatan	Penduduk /Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah	118.968	117.040	119.353	120.873	122.024

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buton
Menurut Kecamatan Tahun 2024 (persen)



Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2025

Bila itu dilihat dari tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Buton masih tergolong jarang bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Sulawesi Tenggara. Kepadatan penduduk Kabupaten Buton pada tahun 2024 meningkat menjadi 82,6 per km^2 dari tahun 2023 sebesar 73,35 per km^2. Rendahnya tingkat kepadatan penduduk di Buton disebabkan wilayah Buton relatif luas, dimana banyak dari wilayahnya merupakan daerah yang tidak bisa dihuni karena merupakan hutan, perbukitan, dan lainnya. Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan, Kecamatan Pasarwajo merupakan daerah terpadat penduduknya dimana pada tahun 2024 kepadatan penduduknya sebesar 154,45 per km^2. Sebaliknya Kecamatan Lasalimu dan Kecamatan Kapontori merupakan daerah paling jarang penduduknya dengan tingkat kepadatan penduduk masing-masing hanya sekitar 41,81 per km^2 dan 32,88 per km^2.

Tabel 2.13
Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Buton Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas (km^2)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk per km^2
1	Lasalimu	318,90	13.363	41,81
2	Lasalimu Selatan	147,01	16.077	109,36
3	Siotapina	248,81	16.900	67,92
4	Pasarwajo	300,13	46.485	154,45
5	Wolowa	94,55	6.923	73,22
6	Wabula	66,11	6.791	104,04
7	Kapontori	472,36	15.485	32,88

No.	Kecamatan	Luas (km^2)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk per km^2
	Jumlah	**1.647,87**	**122.024**	**82,6**

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Berdasarkan Data SIAK
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk (jiwa)	119.185	119.427	119.896	120.873	122.024
	- Laki-laki (jiwa)	60.348	60.334	60.241	60.547	60.874
	- Perempuan (jiwa)	58.837	59.093	59.655	60.326	61.150
2	Sex ratio (%)	102,57	102,10	100,98	100,41	99,54
3	Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,60	0,27	0,51		
4	Kepadatan penduduk (jiwa/km^2)	119.185	119.427	119.896	120.873	73,10

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 -2024

Berdasarkan data pada SIAK, penduduk terbanyak menurut kecamatan tahun 2024 berada di Kecamatan Pasarwajo.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Berdasarkan Data SIAK
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Kecamatan	Penduduk (jiwa)					
		2020	2021	2022	2023	2023	2024
1	Lasalimu	45.688	45.544	45.409	13.235	13.235	13.363
2	Lasalimu Selatan	15.400	15.405	15.420	15.939	15.939	16.077
3	Siotapina	12.917	12.973	13.151	16.769	16.769	16.900
4	Pasarwajo	15.918	15.909	15.856	45.959	45.959	46.485
5	Wolowa	16.326	16.480	16.645	6.793	6.793	6.923
6	Wabula	6.466	6.447	6.577	6.706	6.813	6.791
7	Kapontori	6.456	6.489	6.539	6.709	15.365	15.485
	Jumlah	118.262	119.185	119.427	119.896	120.873	122.024

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 -2024

Sementara itu, penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Buton tahun 2024 berdasarkan data BPS dan data SIAK dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Kelompok Umur	BPS			DISDUKCAPIL		
		Laki-laki*	Perempuan*	Jumlah*	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	5,45	5,20	10,65	5.451	5.203	10.654
2.	5-9	6,60	6,32	12,92	6.601	6.326	12.927
3.	10-14	6,67	6,27	12,94	6.677	6.268	12.945
4.	15-19	6,28	6,26	12,54	6.280	6.264	12.544

No.	Kelompok Umur	BPS			DISDUKCAPIL		
		Laki-laki*	Perempuan*	Jumlah*	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
5.	20-24	5,26	5,82	11,08	5.263	5.824	11.087
6.	25-29	4,95	4,88	9,84	4.959	4.885	9.844
7.	30-34	4,16	4,23	8,39	4.161	4.230	8.391
8.	35-39	4,45	4,33	8,78	4.453	4.334	8.787
9.	40-44	3,79	3,89	7,93	3.797	3.896	7.693
10.	45-49	3,26	3,09	6,36	3.269	3.099	6.368
11.	50-54	2,99	2,92	5,92	3.997	2.929	5.926
12.	55-59	2,18	2,28	4,47	2.182	2.288	4.470
13.	60-64	1,61	1,91	3,53	1.617	1.915	3.532
14.	65-69	1,28	1,34	2,63	1.289	1.349	2.638
15.	70-74	0,85	0,89	1,75	858	892	1.750
16.	> 75	1,02	1,44	2,40	1.020	1.448	2.468
	Jumlah	60,87	61,15	122,02	60.874	60.320	122.024

Sumber : Buton Dalam Angka Tahun 2025; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024
*Keterangan : *) Dalam satuan ribu*

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat merupakan indikator kinerja pembangunan yang dapat dilihat dari kesejahteraan dan pemerataan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, penyediaan tanah, ketenagakerjaan serta fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Untuk melihat aspek kesejahteraan dan pemerataan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain :

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Setiap kebijakan pembangunan akan selalu menimbulkan *multiplier effect* yang sangat luas dan menyangkut kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan memiliki produktivitas yang tinggi, sehingga secara akumulatif akan mempengaruhi kondisi perekonomian wilayah. Kondisi tersebut secara makro tercermin dari tinggi rendahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama perkembangan ekonomi suatu daerah yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.

Secara makro besaran PDRB pada tahun 2024 yang diukur atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha mengalami peningkatan sebesar Rp. 234,61 atau 0,95 persen dari Rp. 5.062.66 milyar pada tahun 2023, dan Rp 5.297,27 milyar pada tahun 2024. Keadaan ini menggambarkan adanya peningkatan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Buton. Berdasarkan harga konstan 2010 menurut Lapangan Usaha, angka PDRB

harga konstan 2010 menurut Lapangan Usaha juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 99,18 atau 0,97 persen dari Rp. 3.101,74 milyar rupiah pada tahun 2023 menjadi Rp. 3.200,92 Milyar di Tahun 2024. Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 menurut lapangan usaha dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Buton Tahun 2019 s/d Tahun 2024 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021*	2022**	2023**	2024**
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	769.97	805.72	948.67	1.029,86	1.147,35
Pertambangan & Penggalian	1.479.48	1.563.69	1.832.98	2.092,93	1.830,42
Industri Pengolahan	94.50	101.86	114.86	104.22	132,41
Pengadaan Listrik& Gas	1.57	1.715,6	1.91	2.05	2,35
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	16.08	16.44	17.18	18.91	19,46
Konstruksi	244.30	263.80	263.88	262.92	325,26
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	486.60	532.03	619.65	697.71	819,85
Transportasi & Pergudangan	30.84	31.98	37.46	40.82	47,17
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5.00	5.11	5.86	6.03	6,51
Informasi & Komunikasi	11.01	11.31	12.41	12.67	14,98
Jasa Keuangan & Asuransi	25.32	28.98	32.57	35.74	35,76
Real Estate	19.27	19.51	20.95	22.05	22,87
Jasa Perusahaan	0,68	0,70	0,80	0,91	0,98
Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	369.66	376.63	376.76	406.61	530,96
Jasa Pendidikan	206.95	217.76	243.08	262.61	287,70
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	33.76	36.42	38.15	38.98	42,14
Jasa Lainnya	21.73	22.63	24.79	27.64	31,08
PDRB	**3.816.73**	**4.036.29**	**4.591.95**	**5.062.66**	**5.297,27**

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 -2024
*Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara*

Tabel 2.18
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021*	2022**	2023**	2024**
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	528.91	546.57	609.33	629.52	646,78
Pertambangan & Penggalian	1.111.47	1 111 53	1.167.83	1.197.82	1.113,32
Industri Pengolahan	67.40	69.71	74.38	65.45	76,49
Pengadaan Listrik& Gas	1.49	1.61	1.71	1.80	1,95
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	12.67	12.91	13.04	14.21	14,21
Konstruksi	165.97	177.11	166.65	159.91	184,46
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	350.74	378.74	413.64	442.71	495,01
Transportasi & Pergudangan	26 57	27.31	29.12	28.92	31,73
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3.71	3.77	4.22	4.25	4,47
Informasi & Komunikasi	11.15	11.48	12.56	13.06	14,46
Jasa Keuangan & Asuransi	16.76	18.14	18.66	19.96	18,87
Real Estate	15.24	15.39	15.81	16.30	16,71
Jasa Perusahaan	0.50	0.51	0.55	0.59	0,63
Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	260.36	262.43	261.03	277.69	342,70
Jasa Pendidikan	158.02	164.23	174.22	180.24	187,69
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	25.66	27.46	28.32	28.38	29,99
Jasa Lainnya	17.79	18.22	19.43	20.90	21,46
PDRB	**2.774.41**	**2.847.09**	**3.010.49**	**3.101.74**	**3.200,92**

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024
*Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara*

Pada sisi lain, besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur ekonomi Buton didominasi 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor,

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, dan konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Buton.

Tabel 2.19
Distribusi PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 s/d Tahun 2024

Lapangan Usaha	2020	2021*	2022**	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	20,17	19,96	20,77	20,71	*21,66*
Pertambangan & Penggalian	38,76	38,74	38,74	39,35	*34,55*
Industri Pengolahan	2,48	2,52	2,51	2,13	2,50
Pengadaan Listrik& Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,42	0,41	0,37	0,38	0,37
Konstruksi	6,40	6,54	5,88	5,30	*6,14*
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	12,75	13,18	14,09	14,74	*15,48*
Transportasi & Pergudangan	0,81	0,79	0,82	0,83	0,89
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12
Informasi & Komunikasi	0,29	0,28	0,27	0,26	0,28
Jasa Keuangan & Asuransi	0,66	0,72	0,72	0,73	0,68
Real Estate	0,51	0,48	0,46	0,44	0,43
Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	9,69	9,33	8,29	8,24	*10,02*
Jasa Pendidikan	5,42	5,40	5,37	5,32	5,43
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,88	0,90	0,84	0,79	0,80
Jasa Lainnya	0,57	0,56	0,56	0,60	0,59
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024
*Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara*

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Buton pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 perbaikan kondisi ekonomi masih terus berlangsung sehingga kegiatan perekonomian lebih lancar dibandingkan tahun 2023. Nilai PDRB Buton pada tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha, mencapai 3.200,92 milyar rupiah. Angka tersebut naik dari 3.3.101,74 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,20 persen.

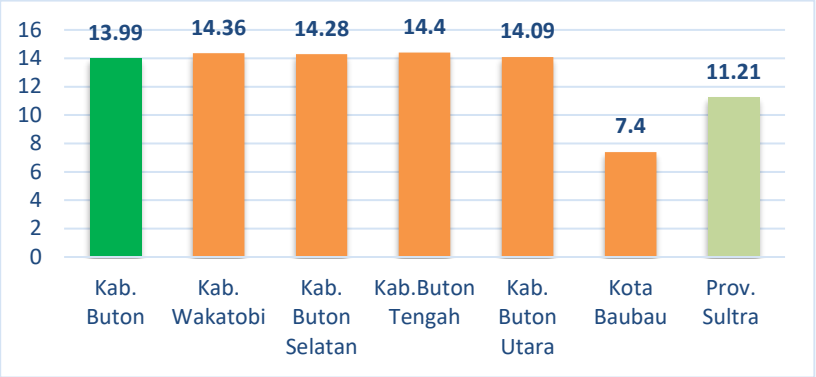
Tabel 2.20
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (Persen)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022*	2023**	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,79	3,34	11,48	3,31	2,83
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,24	0,01	5,07	2,57	-5,73
3	Industri Pengolahan	-2,53	3,43	6,69	-11,99	16,88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,21	7,93	6,44	5,23	8,31
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,72	1,88	1,05	8,99	-0,01
6	Konstruksi	-2,97	6,71	-5,90	-4,04	17,93
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,37	7,98	9,21	7,03	6,86
8	Transportasi dan Pergudangan	-2,54	2,76	6,63	-0,68	9,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,13	1,71	11,88	0,68	5,16
10	Informasi dan Komunikasi	9,38	2,97	9,40	3,99	10,73
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,92	8,22	2,85	7,00	-5,83
12	Real Estate	0,98	0,99	2,76	3,09	2,50
13	Jasa Perusahaan	-2,34	0,42	8,53	7,90	5,46
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,52	0,79	-0,53	6,38	23,41
15	Jasa Pendidikan	4,25	3,93	6,08	3,46	4,13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,67	7,02	3,13	0,21	5,65
17	Jasa Lainnya	-0,66	2,41	6,68	7,57	1,20
	Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestik Bruto	**-0,49**	**2,62**	**5,74**	**3,03**	**3,20**

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2024
*Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara*

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitarnya dimana Kabupaten Buton berada pada urutan keenam terendah (3,20 persen) setelah Kabupaten Buton Tengah (3,32 persen),Kabupaten Buton Utara (3,68 persen), Kota Bau-Bau (4,36 persen), Kabupaten Wakatobi (4,77 persen), dan Kabupaten Buton Selatan (4,84 persen). Kabupaten Buton masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gambar 2.3
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buton dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 (Persen)



Sumber : Provinsi Sulawesi Tenggaa Dalam Angka Tahun 2025

c. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Buton atas dasar harga konstan tahun 2019 mengalami pertumbuhan positif di atas 3 persen. Namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar - 11,69 persen kemudian kembali tumbuh positif pada tahun 2021. Pada tahun 2019 PDRB per kapita ADHB tercatat sebesar 37,70 juta rupiah, angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 33,26 juta rupiah per kapita lalu naik menjadi 34,62 juta rupiah per kapita pada tahun 2021. Pada tahun 2023, angka PDRB per kapita ADHB sebesar 42,11 juta rupiah dan ADHK sebesar 25,80 juta rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.21
PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

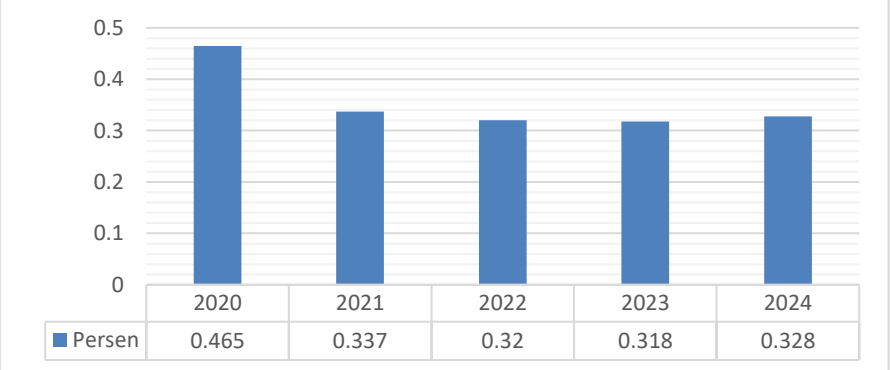
Uraian		Tahun				
		2020	2021	2022*	2023**	2024
1	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					
	- ADHB	3.816,73	4.036,29	4.591,95	5.062,66	5.297,27
	- ADHK	2,774,41	2.847,09	3.010,49	3.101,74	3.200,92
2	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
	- ADHB	33,26	34,62	38,78	42,11	43,41
	- ADHK	24,18	24,42	25,42	25,80	26,23
3	Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	-11,69	0,99	4,10	1,49	……
4	Jumlah Penduduk (orang)	114.746	116.604	118.413	120.211	122.024
5	Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)	12,70	1,62	1,55	1,52	…….

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2024
*Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara*

d. Indeks Ketimpangan (Gini Ratio)

Indeks ketimpangan atau gini ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini ratio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, koefisien gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Gambar 2.4
Perkembangan Indeks Ketimpangan (Gini Ratio) Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

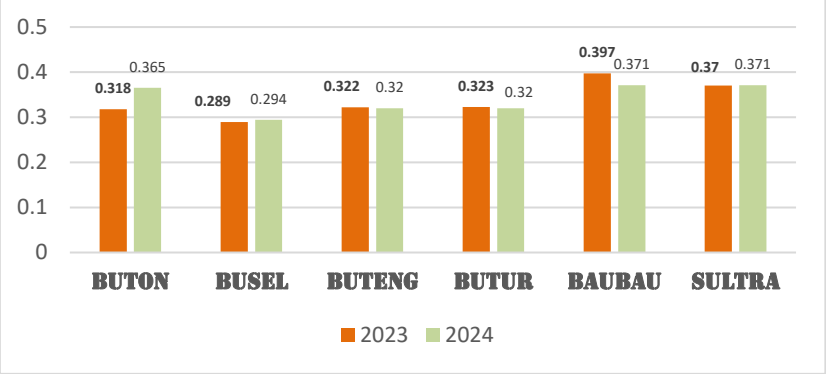


Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2025

Secara umum, terjadi penurunan indeks Gini dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Buton. Nilai tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 0,465 dan terus menurun hingga mencapai 0,318 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan menjadi 0,365. Capaian ini menjadikan Kabupaten Buton tetap berada dalam kategori ketimpangan sedang, yang menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dari para pemangku kepentingan untuk memastikan pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan di masyarakat.

Jika dibandingkan dengan kabupaten kota sekitar, pada tahun 2024 Kabupaten Buton berada pada peringkat ke tiga setelah Kota Baubau Kondisi ini menunjukkan adanya gap yang lebih kecil antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah.

Gambar 2.5
Perbandingan Indeks Ketimpangan (Gini Ratio) Kabupaten Buton dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2023 s/d Tahun 2024



Sumber : Gini Ratio Prov. Sultra Menurut Kab/Kota Tahun 2023-2024

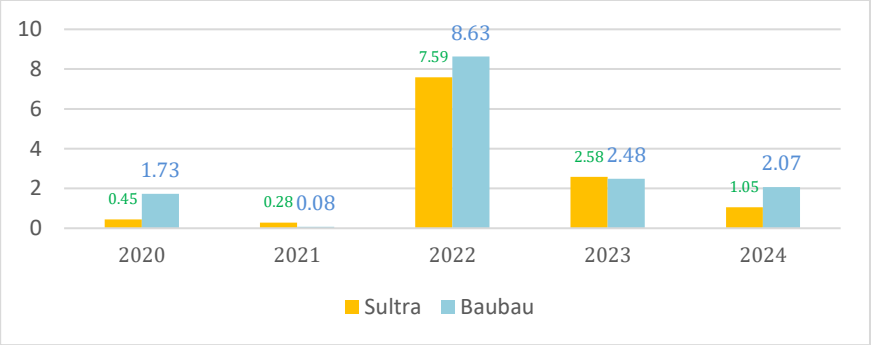
e. Laju Inflasi

Inflasi yang tinggi merupakan salah satu fenomena dalam perekonomian yang dapat menekan daya beli masyarakat dan menurunkan pendapatan rill masyarakat. Inflasi dapat di lihat dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Dalam beberapa tahun terakhir inflasi Propinsi Sulawesi Tenggara cenderung berada di atas rata-rata inflasi sulawesi tenggara dan nasional. Hal ini tentu saja berdampak negatif pada jalannya roda perekonomian. Laju inflasi propinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu tahun 2019-2022 cenderung mengalami ketidakstabilan yang ditunjukkan dengan fluktuasi laju inflasi pada tingkat Nasional.

Inflasi di Kabupaten Buton (pendekatan Kota Baubau) tahun 2020 mencapai nilai tertinggi sebesar 1.73 persen. Angka inflasi tersebut bahkan lebih tinggi dari inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara (0.45 persen). Pada tahun 2021, inflasi mengalami penurunan menjadi

sebesar 0,08 persen, lebih rendah dari inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,28 persen, sedangkan pada akhir Desember 2022 inflasi Kota Baubau meningkat 8,65 persen, lebih tinggi dari capaian provinsi sebesar 7,59 persen akibat adanya kemahalan harga-harga barang yang disebabkan karena kurangnya produksi serta rantai distribusi yang terganggu, dan pada Desember 2023 terjadi inflasi kota Baubau (yoy) sebesar 2,48 persen lebih rendah dari inflasi provinsi pada nopember 2023 sebesar 2,58 persen. Dan Pada Desember 2024 terjadi inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 1,05 persen lebih rendah dari Inflasi di Kota Baubau sebesar 2,07 persen

Gambar 2.6
Pergerakkan Inflasi Tahunan Kota Baubau dan
Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 s/d Tahun 2024



Sumber : BPS Prop. Sultra Tahun 2025

f. Kemiskinan

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buton cenderung mengalami fluktuasi selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020 - 2024). Pada tahun 2019 tercatat sebesar 13,67 persen menurun pada tahun 2020 menjadi 13,21 persen. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin meningkat kembali menjadi 14,25 ribu jiwa atau meningkat 13,925 persen. Kemudian untuk tahun 2022 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan walaupun tidak signifikan menjadi 13,61 ribu jiwa atau 13,27 persen, dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 14,15 ribu jiwa atau bertambah menjadi 13,77 persen dan di tahun 2024 meningkat Gambaran perkembangan indikator kemiskinan di Kabupaten Buton dapat di lihat pada tabel berikut :

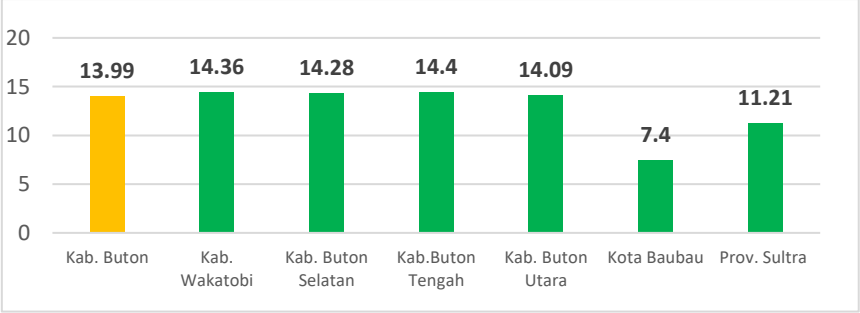
Tabel 2.22
Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

Uraian		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	262.541	270.212	279.627	300.183	313.831
2	Jumlah penduduk miskin (Ribu Jiwa)	13,68	14,25	13,61	14,15	14,41
3	Persentase penduduk miskin (Persen)	13,21	13,92	13,27	13,77	13,99

Sumber : Prov. Sultra Dalam Angka Tahun 2025

Meskipun tingkat kemiskinan Kabupaten Buton pada tahun 2024 (13,99 persen) mengalami peningkatan dari capaian tahun 2023 (13,77 persen), namun tingkat kemiskinan tersebut masih berada pada urutan kedua teratas dalam penurunan kemiskinan setelah Kota Baubau (7,40 persen). Secara lengkap perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Buton dengan daerah sekitar dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.7
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Buton
dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024



Sumber : Sultra Dalam Angka Tahun 2025

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

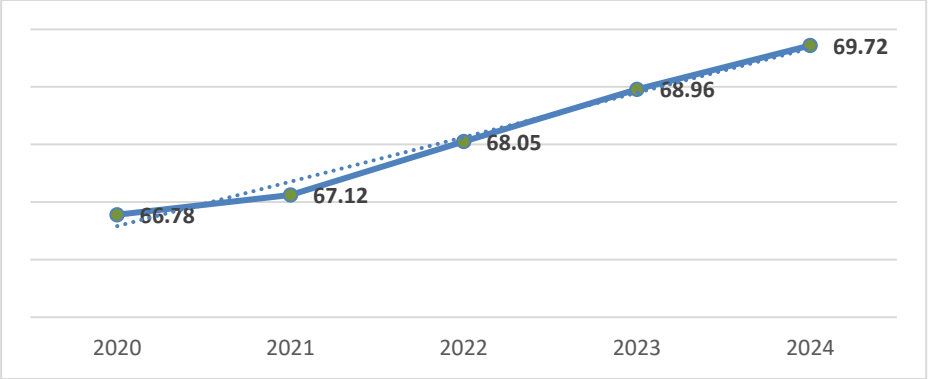
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak.

Secara umum nilai IPM Kabupaten Buton selama lima tahun terakhir belum menunjukkan peningkatan yang begitu signifikan. Angka IPM, tahun 2020 mencapai 65,78, tahun 2021 mencapai 67,12, hingga tahun 2022 IPM Kabupaten Buton mencapai 68,05 ,

tahun 2023 mencapai 68,96. Dan tahun 2024 mencapai 69,72 Apabila dibandingkan empat daerah sekitar, Buton berada pada peringkat ketiga setelah Kota Baubau dan Kabupaten Buton Utara.

Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Berikut perkembangan IPM Kabupaten Buton tahun 2020 – 2024.

Gambar 2.8
Perkembangan IPM Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

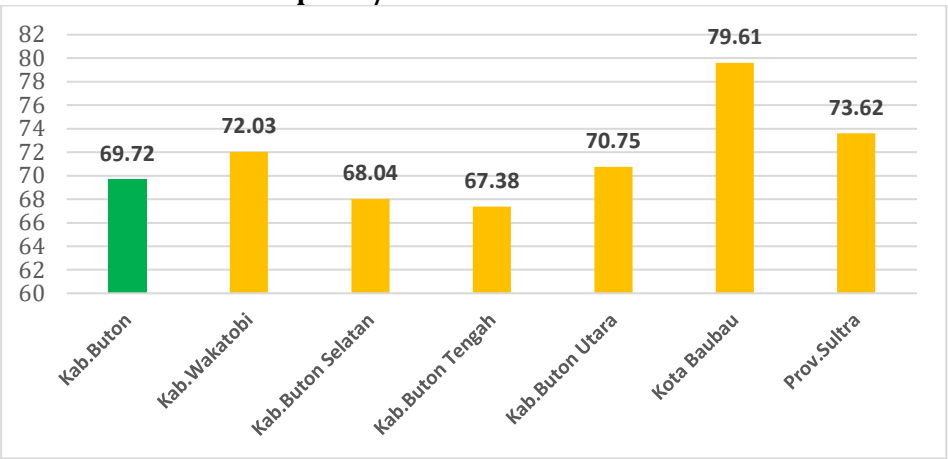


Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.23
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya Kabupaten Buton
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
IPM	**-**	**66,78**	**67,12**	**68,05**	**68,96**	**69,72**
Indeks Pendidikan	-	63,9	64,6	66,05	66,85	67,35
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,71	7,92	8,25	8,49	8,63
Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	13,75	13,76	13,87	13,88	13,89
Indeks Kesehatan	-	76,97	77,20	77,31	77,48	77,65
Usia Harapan Hidup	Tahun	68,25	68,39	68,46	68,56	70,47
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Ribu Rp/ Org/Tahun	7.307	7.324	7.594	7.995	8.401

Gambar 2.9
Perbandingan IPM Kabupaten Buton dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024



Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2025

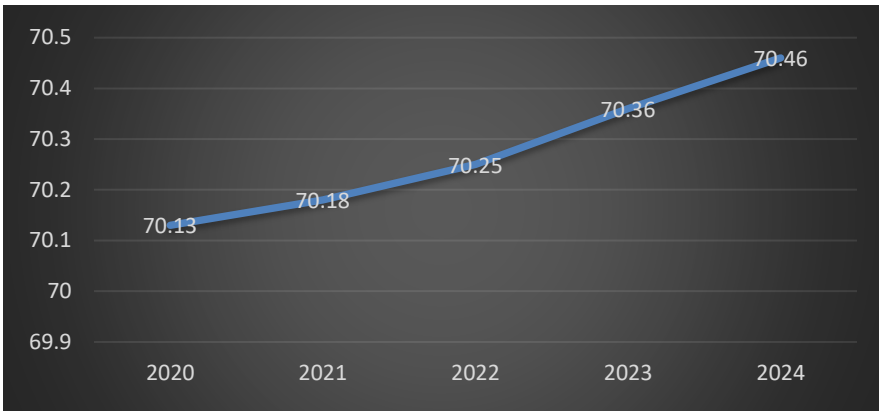
Berdasarkan grafik di atas menunjukkan Kabupaten Buton memiliki IPM keempat terendah apabila dibandingkan daerah sekitarnya yang mana Kota Baubau (79,61, Kabupaten Wakatobi (72,03), dan Kabupaten Buton Utara (70,75), Kabupaten Buton masih berada dibawah Provinsi Sulawesi Tenggara

Gambaran indikator pembentuk IPM Kabupaten Buton secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini :

1. Angka Harapan Hidup

Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan angka harapan hidup. Angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Perkembangan angka harapan hidup Kabupaten Buton selama tahun 2020 -2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.10
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024



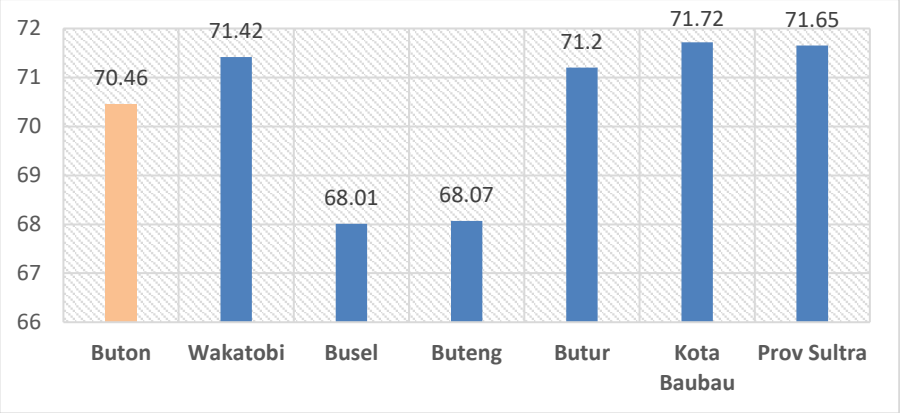
Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2.10 di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir (2020 s/d 2024) AHH Kabupaten Buton cenderung mengalami pertumbuhan setiap tahunnya Dari indikator usia harapan hidup, terlihat bahwa derajat kesehatan masyarakat mengalami peningkatan secara simultan, dimana usia harapan hidup masyarakat pada tahun 2020 sebesar 70,13 tahun meningkat hingga menjadi 70,46 tahun di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2024 akan memiliki harapan untuk hidup hingga berusia 70-71 tahun

Meningkatnya angka harapan hidup tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya cakupan layanan kesehatan masyarakat yang semakin membaik, ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai, petugas kesehatan yang kompeten dan kesadaran masyarakat akan kesehatan yang terus meningkat, dan hal ini pula mengindikasikan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Namunpun demikian pelayanan kesehatan masih harus terus ditingkatkan, mengingat AHH Kabupaten Buton masih berada pada urutan ketiga terendah apabila dibandingkan dengan daerah sekitarnya dan dibawah capaian provinsi. Berikut perbandingan AHH Kabupaten Buton dengan daerah sekitarnya :

Gambar 2.11
Perbandingan AHH Kabupaten Buton dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024



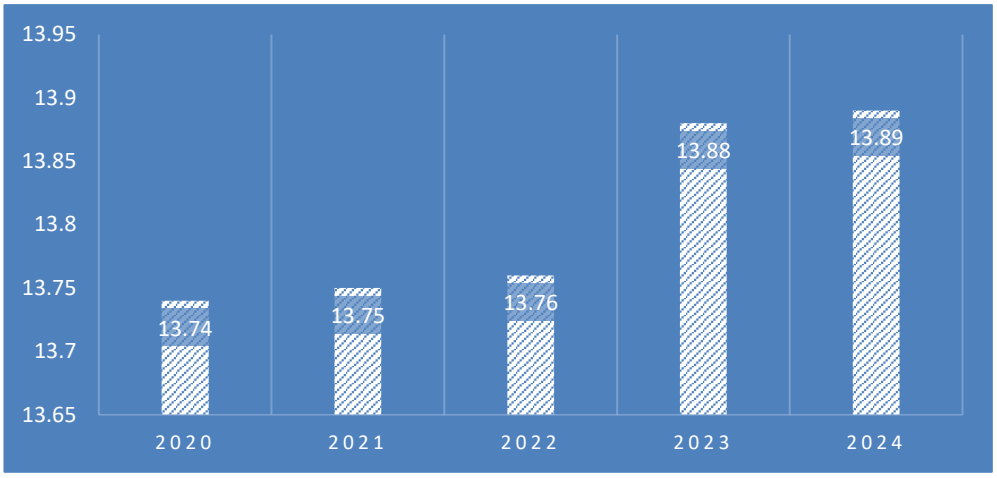
Sumber : BPS Prop. Sultra Tahun 2025

2. Angka Harapan Lama Sekolah

Sesuai dengan publikasi terbaru BPS Kabupaten Buton, angka melek huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung Koefisien Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sudah tidak relevan. Sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah satunya menggunakan angka harapan lama Sekolah (HLS). HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka HLS Kabupaten Buton selama periode 2020-2024 menunjukan peningkatan sebesar 0,15 persen.

Gambar 2.12
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024



Sumber : BPS. IPM Kab. Buton Tahun 2025

3. Angka rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan. Peningkatan rata-rata lama sekolah terjadi di Kabupaten Buton dimana pada tahun 2020 angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,71 tahun dan meningkat menjadi 8,63 tahun. Capaian ini mengindikasikan bahwa masyarakat berumur 25 tahun ke atas memiliki rata-rata lama sekolah hingga mengenyam pendidikan SMP kelas tiga (selama 8,63 tahun).

Tabel 2.24
Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

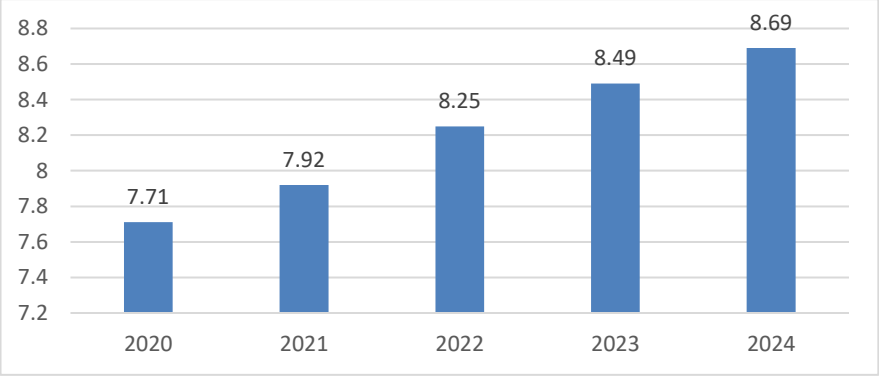
Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,71	7,92	8,25	8,49	8,63
Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	13,75	13,76	13,87	13,88	13,89

Sumber: BPS Provinsi Sulwesi Tenggara, 2021-2025, diolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton jauh di atas rata-rata lama sekolah dimana pada tahun 2024 memiliki capaian 13,89 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang memasuki usia sekolah (7 tahun) memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan hingga 13-14 tahun lamanya. Capaian pendidikan ini tentu menjadi rapor positif bagi pembangunan SDM di Kabupaten Buton melalui peningkatan pendidikan masyarakat.

Pada grafik di bawah ini digambarkan rata-rata lama sekolah Kabupaten Buton dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

Gambar 2.13
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024



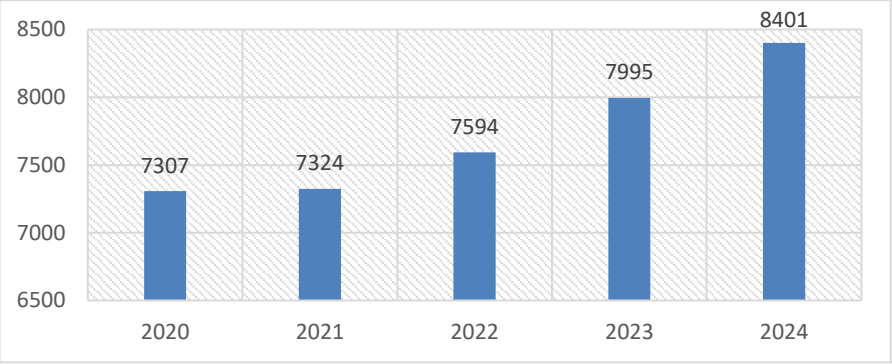
Sumber : BPS-IPM Kab. Buton Tahun 2025

Berdasarkan gambar 2.13 di atas terlihat bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Buton mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 berada di angka 7,71 terus meningkat di tahun 2021 menjadi 7,92 dan pada tahun 2024 sesuai dengan data terbaru naik hingga angka 8,69. Hal ini mengindikasikan bahwa minat dan tingkat kemauan untuk bersekolah cukup tinggi. Diharapkan dengan terus naiknya angka rata-rata lama sekolah ini, mampu mencetak SDM yang unggul dan berkualitas.

4. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita merupakan salah satu pembentuk dalam pencapaian IPM dari sisi standar hidup yang layak. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Gambar 2.15 menunjukkan pengeluaran per kapita Kabupaten Buton dari Tahun 2020 hingga 2024 pengeluaran perkapita Kabupaten Buton berada pada nilai Rp. 7.307 juta pertahun dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 8.401 juta per tahun.

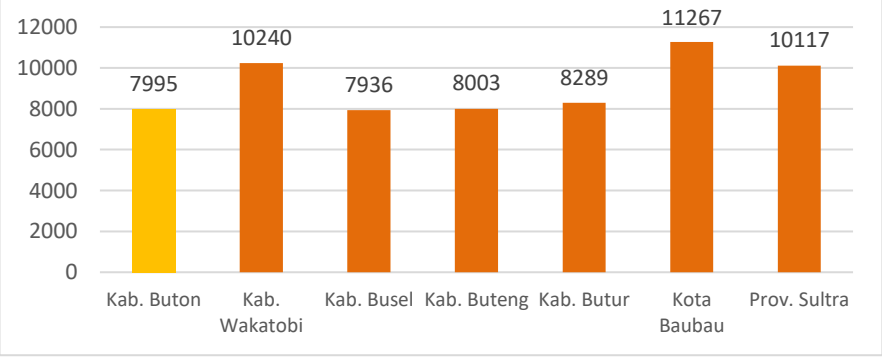
Gambar 2.14
Pengeluaran Perkapita Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024



Sumber : BPS-IPM Kab. Buton Tahun 2025

Pengeluaran perkapita Kabupaten Buton bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya pada tahun 2024 masih tergolong rendah, berada pada urutan kelima terendah, setelah Kota Baubau, Kabupaten Wakatobi, Buton Utara, dan Buton Tengah, dan masih berada dibawah capaian Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gambar 2.15
Perbandingan Pengeluaran per kapita Kabupaten Buton dengan
Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

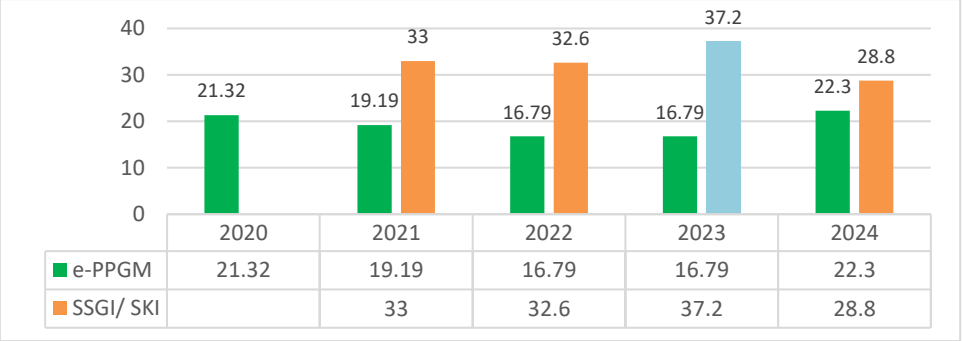


Sumber : BPS Prov. Sultra Tahun 2024

a. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada rumah tangga 1000 HPK. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga setelah lahir, akan tetapi nanti tampak stunting setelah bayi berusia 2 tahun. Dengan demikian, usia 1000 HPK dan merupakan masa emas yang sangat penting mendapat perhatian baik dari aspek nutrisi maupun kesehatan lingkungan sekitar rumah tangga. Stunting disebabkan oleh berbagai faktor, dimana tidak hanya gizi buruk tetapi juga faktor-faktor penyebab langsung dan tidak langsung lainnya. Perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Buton dapat dilihat pada gambar berikut berikut :

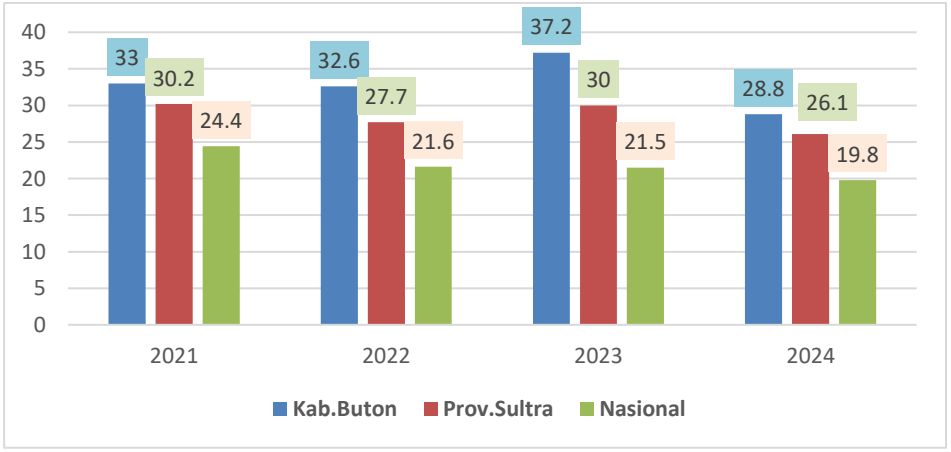
Gambar 2.16
Prevalensi Stunting Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024



	2020	2021	2022	2023	2024
e-PPGM	21.32	19.19	16.79	16.79	22.3
SSGI/ SKI		33	32.6	37.2	28.8

Sumber : e-PPGBM dan SSGI Dinas Kesehatan Kab. Buton Tahun 2020 -20

Gambar 2.17
Prevalensi Stunting Kabupaten Buton berdasarkan Hasil SSGI Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2021 s/d 2024



Sumber : SSGI 2021-2024

Grafik pada Gambar 2.17 di atas menunjukkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Buton selama lima tahun terus mengalami penurunan baik pengukuran yang dilakukan melalui aplikasi elektronik-pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau e-PPGM maupun yang dilakukan melalui survei status gizi Indonesia atau SSGI, prevalensi stunting di Kabupaten Buton masih terbilang tinggi dari rata-rata angka propinsi dan nasional. Meskipun demikian pemerintah daerah terus berupaya agar prevalensi stunting di Kabupaten Buton dapat ditekan melalui intevensi kebijakan pemerintah daerah melalui Upaya Percepatan Penanganan Stunting yang melibatkan semua elemen baik Forkopimda, pemerintah daerah, instansi vertikal BUMN, BUMD, Swasta, KADIN, seluruh ASN lingkup Pemda Buton, Camat, Kepala Desa dan Lurah, Puskesmas, Ormas, Tokoh Masyarakat, PKK, Organisasi Wanita dan seluruh masyarakat dengan langkah-langkah konkrit yang dilakukan diantaranya identifikasi anak stunting dan keluarga beresiko stunting by name by address, pemberian tablet tambah darah, bantuan bibit tanaman dan pemanfaatan pekarangan, kampanye massif cegah stunting hingga ke desa-desa, meningkatkan intesitas koordinasi lintas sektoral melalui tim percepatan penurunan stunting (TPPS) sehingga angka stunting di Kabupaten Buton dapat menurun dan mencapai target nasional.

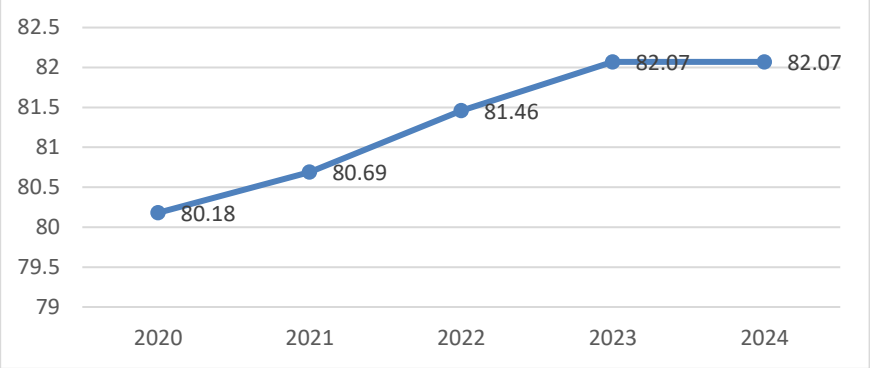
Percepatan Penurunan stunting menjadi prioritas strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Adapun pencapaian persentase anak balita dengan kondisi stunting di Kabupaten Buton mengalami fluktuasi di setiap tahunnya hingga mencapai persen 22,3 pada tahun 2024. Meskipun begitu, penurunan stunting harus tetap diupayakan. Intervensi dimulai sejak masa kehamilan, dengan memastikan ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup, pemeriksaan kehamilan rutin, dan edukasi mengenai pola makan sehat. Setelah bayi lahir, penting untuk memastikan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama, diikuti dengan MP-ASI yang bergizi seimbang, serta pemantauan pertumbuhan secara berkala.

b. Indeks Pembangunan Gender

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada lampiran huruf H pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan bahwa daerah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah daerah Kabupaten/Kota, demikian halnya ditegaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Buton menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2020-2024 dari sebesar 80,18 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 82,07 persen pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kabupaten Buton tergolong baik. Secara rinci dapat dilihat di gambar di bawah ini :

Gambar 2.18
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024



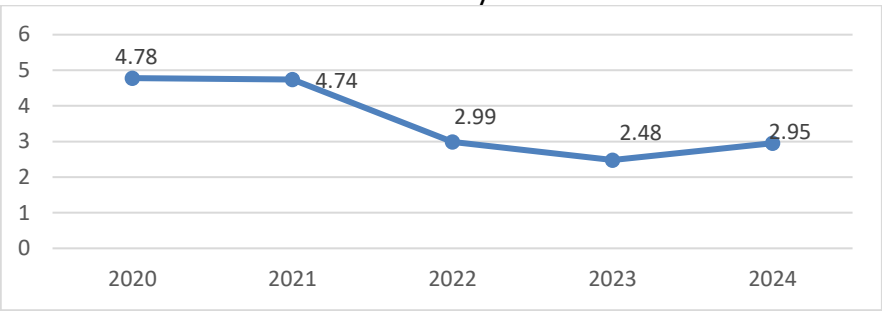
Sumber : BPS Prop. Sultra Tahun 2024

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran didefinisikan sebagai persentase penduduk angkatan kerja yang belum bekerja terhadap angkatan kerja itu sendiri. Angkatan kerja mencakup penduduk yang belum mendapat pekerjaan tetapi siap untuk bekerja (menganggur) dan penduduk yang sudah mendapat pekerjaan (bekerja). TPT menunjukkan banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Semakin tinggi TPT berarti semakin banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

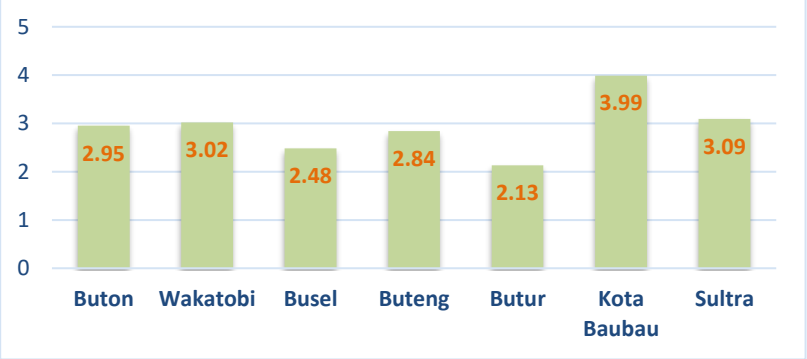
Berdasarkan data BPS menunjukkan TPT Kabupaten Buton dari tahun 2020 sampai 2024 cenderung fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2024 TPT Kabupaten Buton sebesar 2,95 persen, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang/jasa sebanyak 2 sampai 3 diantaranya merupakan pengangguran. Meskipun angka TPT Kabupaten Buton cenderung moderat, tetapi kondisi tersebut tetap diperlukan perhatian dalam menyikapi kondisi pengangguran tersebut. Khususnya mulai tahun 2020, semenjak adanya pandemi Covid-19 menyebabkan angka pengangguran di Kabupaten Buton meningkat dengan sebab terhentinya berbagai aktivitas ekonomi, namun secara perlahan kondisi ini cukup membaik pada tahun 2024.

Gambar 2.19
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d 2024



Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2.20
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024



Sumber : BPS Prov. Sultra Tahun 2024

Berdasarkan grafik 2.20 menunjukkan bahwa Kabupaten Buton memiliki TPT yang cukup rendah (2,95 persen) dan berada pada urutan keempat tertinggi dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024, dan berada dibawah capaian Provinsi Sulawesi Tenggara (3,09 persen).

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja di suatu daerah. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. TPAK merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Semakin tinggi nilai TPAK nya semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja didalam pasar kerja.

Tabel 2.25
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024

Kegiatan Utama	2020	2021	2022	2023	**2024**
Penduduk Usia Kerja	69.965	70.577	70.672	84.320	86.344
Angkatan Kerja	45.712	45.467	54.660	57.920	59.806
- *Bekerja*	43.528	43.313	53.023	56.483	58.042
- *Pengangguran*	2.184	2.154	1.637	1.437	1.764
Bukan Angkatan Kerja	24.253	15.110	16.012	26.650	26.538
- *Sekolah*	5.820	4.760	3.824	7.366	9.060
- *Mengurus Rumah Tangga*	14.463	17.000	10.165	15.661	13,945
- *Lainnya*	3.970	3.350	2.023	3.623	3.533
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,34	64,42	77,34	68,49	69,26
Tingkat Pengangguran (%)	4.78	4,74	2,99	2,48	2,95

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2024

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aspek pelayanan umum digunakan sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan, sebagai berikut :

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.1.3.1. 1. Pelayanan Urusan Wajib Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintah yang harus di selenggarakan oleh pemerintah daerah Karena berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap kebutuhan masyarakat. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kabupaten Buton memang mengalami perbaikan sejak pemekaran dari Kabupaten Buton, namun masih perlu adanya peningkatan terutama sarana prasarana penunjang kebutuhan dasar kehidupan masyarakat seperti Pendidikan, kesehatan, aksesibilitas wilayah, penyediaan perumahan yang layak, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat hingga sosial. Berikut indikator kinerja hasil pembangunan daerah yang merupakan gambaran pelayanan urusan wajib pemerintah hingga saat ini.

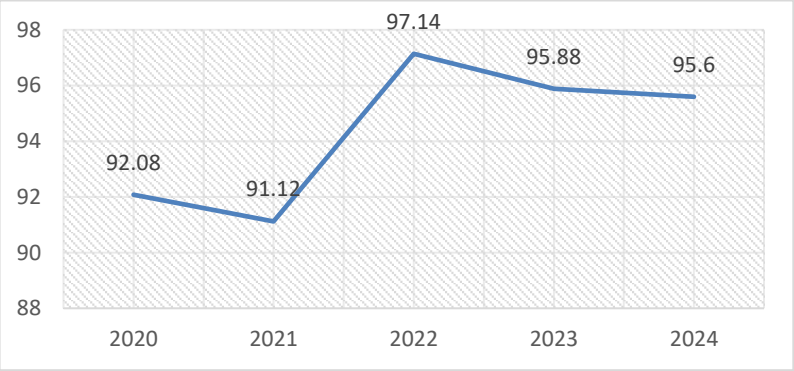
1. Urusan Pendidikan

- **Angka Melek Huruf**

Salah satu indikator output penting dari pendidikan adalah angka melek huruf dewasa. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun

ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Standar UNDP minimal 0 persen dan maksimal 100 persen. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Buton telah mencapai di atas 100 persen. Sejak ahun 2020 hingga tahun 2022, AMH penduduk usia 15 tahun keatas cenderung berfluktuasi. Tercatat pada tahun 2020 posisi 92,08 persen dan tahun 2021 kembali menurun menjadi 91,12 persen namun pada tahun 2022 kembali naik menjadi 97,14 persen , kemudian terjadi penurunan di tahun 2023 menjadi 95,88 persen. Begitupula di tahun 2024 sebesar 95,6 persesn . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini

Gambar 2.21
Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024



Sumber : BPS Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2024

- **Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Perkembangan capaian Angka Partisipasi Kasar menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Buton sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, diperlihatkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.26
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d 2024

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	**2024**
1	SD/MI	112,63	114,03	113,71	114,00	106,91
2	SMP/MTs	86,74	88,39	80,08	85,85	81,96
3	SMA/MA	98,71	96,70	97,09	93,47	98,81

Sumber : BPS Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2029 s/d 2024

Berdasarkan tabel 2.26 menunjukkan bahwa APK kelompok umur 7-12 tahun Kabupaten Buton selama tahun 2020 s/d 2024 cenderung berfluktuasi dimana di tahun 2020 sebesar 112,63 dan meningkat di tahun 2021 menjadi 114,03 dan kembali menurun di tahun 2022 menjadi 113,71 dan di tahun 2023 kembali naik menjadi 114,00, namun di tahun 2024 kembali menurun sebesar 106,91. Hal ini berarti bahwa seluruh anak usia 7-12 tahun telah menikmati pendidikan. Tingginya angka partisipasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, dan ketersediaan infrastruktur berupa sarana prasarana sekolah yang menunjang proses belajar mengajar.

- **Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan.

Tabel 2.27
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d 2024

No.	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	**2024**
1	SD/MI	98,60	99,85	99,30	99,41	98,44
2	SMP/MTs	80,08	80,25	78,91	73,93	71,17
3	SMA/MA	69,11	69,78	70,47	64,24	76,20

Sumber : BPS Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2024

Secara umum dalam rentang tahun 2020 s/d 2024, perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Buton cenderung berfluktuasi, yaitu APM SD/MI masing-masing 98,60 (2020); 99,85 (2021); 99,30 (2022); 99,41 (2023); 98,44 (2024) dan APM SMP/MTs masing-masing 80,08 (2020); dan 80,25 (2021); 78,91 (2022); 73,93 (2023). Peningkatan APM ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah pada jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dan SMA/MA.

Capaian indikator kinerja kunci dan capaian layanan dasar urusan pemerintahan bidang pendidikan dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Kabupaten Buton
Tahun 2024

No	**Indikator Kinerja**	Satuan	Target Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	100	67,44
2.	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	100	47,96
3.	Iklim Keamanan SD	%	88,63	72,11
4.	Iklim Kebhinekaan SD	%	89,75	73,48
5.	Iklim Inklusivitas SD	%	79,49	56,54
6.	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	100	51,34
7.	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	100	40,86
8.	Tingkat partisispasi warga negara usia 13-15 tahun yang bertisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	75,17	87,38
9.	Iklim Keamanan SMP	%	83,55	71,46
10.	Iklim Kebinekaan SMP	%	79,53	75,14
11	Iklim Inklusivitas SMP	%	79,46	58,6
12.	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	100	62,04
13.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	100	57,41

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Buton Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.28 menunjukkan capaian kinerja bidang pendidikan masih ada yang berada dikisaran 40- 60 persen, yaitu Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional, Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional dan Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV, Iklim Inklusivitas SMP, Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional. Hal ini sejalan dengan capaian rapor pendidikan Kabupaten Buton tahun 2024, yang menunjukkan kemampuan literasi pada tingkat SD dan SMP berada pada kategori rendah, sedangkan kemampuan numerasi SD masih kategori sedang dan kemampuan numerasi SMP masih kategori kurang. Secara umum indikator kinerja kunci bidang pendidikan rata-rata capaian lebih tinggi dari tahun 2024 sebesar 67,83 persen.

Disamping itu urusan pendidikan sebagai urusan wajib pelayanan dasar melaksanakan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dimana berdasarkan tabel 2.22 menunjukkan dari 16 indikator urusan pendidikan, terdapat 3 indikator pelayanan dasar (SPM), yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Dari tiga layanan dasar tersebut, layanan dasar pendidikan kesetaraan hanya mencapai 19,80 persen lebih rendah dibanding capaian SPM tahun 2023 yang mencapai 59,53 persen dan rata-rata capaian SPM bidang pendidikan sebesar 68,64 persen.

Tabel 2.29
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Buton Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Rea-lisasi	Capaian
1.	Pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100	90,98	90,98
2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100	19,80	19,80

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Rea-lisasi	Capaia n
3.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	95,15	95,15
	Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan				**68,64**

Sumber : aplikasi e-SPM Bangda Kemendagri Tahun 2024

2. Urusan Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat juga diukur antara lain dengan indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBa).

Capaian indikator AKI dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan trend yang fluktuatif naik dan turun, dimana pada tahun 2020 AKI Kabupaten Buton sebesar 348,6 per 100.000 kelahiran hidup , meningkat 500,31 per 100.000 KH di tahun 2021, pada tahun 2022 menjadi 405 per 100.000 kelahiran dan pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan sebesar 284,3 per 100.000 kelahiran dan 202,63per 100. 000 Kelahiran hidup.

Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) cenderung fluktuatif selama kurun waktu 2020- 2024, dimana pada tahun 2020 AKB sebesar 12,64 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian ditahun 2021 meningkat menjadi 15, per 1000 Kelahiran Hidup sampai di Tahun 2022 angka tersebut Kembali menurun sebesar 12,60 persen, namun ditahun 2023 dan 2024 kembali meningkat masing-masing 19,43 dan 22,75 per 1.000 kelahiran hidup . AKABA selama kurun waktu 2020 – 2024 juga mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2020 Angka Kematian Bayi sebesar 4,36 per 1.000 kelahiran hidup dan terus meningkat sampai dengan tahun 2024 sebesar 26,85 per 1.000 kelahiran hidup. Pencapaian ketiga indikator kesehatan tersebut dari tahun 2020- 2024 menunjukan perlunya perbaikan kinerja kesehatan pada tujuan ketiga SDGs, yaitu menjamin kehidupan yang sehat, peningkatan kesejahteraan bagi seluruh penduduk. Ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Buton juga menunjukkan peningkatan. Rasio dokter per satuan penduduk mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 rasio dokter per 1.000 penduduk sebesar 0,65 meningkat menjadi 19,40 per 1.000 penduduk pada tahun 2023,

namun kembali menurun di tahun 2024 sebesar 0,65 per 1000 penduduk. Adapun persentase puskesmas terakreditasi sebesar 100 persen. Secara lengkap capaian kinerja dibidang kesehatan dapat dilihat pada beberapa indikator berikut :

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka kematian balita / AKABA (per 1.000 KH)	per 1.000 KH	4,36	20,8	0,35	22,75	26,85
2.	Menurunnya angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	12,64	15,5	12,6	19,43	22,75
3.	Jumlah kematian bayi / AKB	Kasus	29	35	28	41	45
4.	Jumlah kelahiran hidup	Jiwa	2295	2260	2.219	2.110	1.974
5.	Jumlah kematian ibu maternal	Kasus	8	12	9	6	5
6.	Angka incidence rate (IR) DBD per 100.000 pddk	per 100.000 pddk	10,77	0	7’8	19,45	86,86
7.	ODHA yang aktif minum ARV	%	100	100	58	59,38	75
8.	Jumlah balita gizi kurang	Orang	1019	1127	1.624	557	891
9.	Jumlah balita gizi buruk	Orang	249	215	110	156	101
10.	Angka kematian ibu melahirkan	per 100.000 klhrn	348,6	500,31	405	284,3	202,63
11.	Persentase anak balita dengan stunting (pendek dan sangat pendek)	%	22,31	21,32	19,22	16,79	21,32
12.	Rasio posyandu per satuan balita	per 100	1,5	1,7	2	60	1,74
13.	Persentase posyandu aktif	%	65,1	81,1	89,7	98,86	100
14.	Rasio puskesmas per satuan penduduk	per 1.000	0,14	0.12	0,15	0,15	0,15
15.	Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk	per 1.000	0,01	0.01	0,009	0,010	0,010
16.	Rasio dokter per 1.000 satuan penduduk	per 1.000	0,65	0.16	0,53	19,40	0,36
17.	Rasio tenaga paramedis per 1.000	per 1000	9,01	5.43	11	9,06	3,8

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	satuan penduduk	pddk					
18.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	20,61	34.3	44	74,59	96
19.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	93,3	60.3	86,8	90	62,8
20.	Cakupan kelurahan universal child immunization (UCI)	%	80	70.53	81,1	64,21	50,5
21.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
22.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	1,42	2.13	3,28	3,28	45,59
23.	Cakupan kunjungan bayi	%	65,7	74.8	95,2	79,54	
24.	Cakupan puskesmas yang representative	Unit	14	14	15	15	15
25.	Cakupan puskesmas pembantu yang representative	%	36,14	34.74	2,81	57,14	93,33
26	Rumah Sakit	Unit	1	1	1	1	1
27.	Puskesmas	Unit	14	14	15	15	15
28.	Posyandu	Unit	175	175	175	175	175
29.	Polindes	Unit	12	15	12	12	12
30.	Tenaga medis (dokter)	Orang	66	19	86	76	44
31.	Tenaga keperawatan	Orang	342	319	396	464	466
32.	Tenaga kebidanan	Orang	298	316	383	468	451
33.	Tenaga kefarmasian	Orang	46	55	62	72	73
34.	Tenaga kesehatan lainnya	Orang	234	295	293	404	500
35.	Klinik/praktek dokter Bersama	Unit	0	1	2	1	1
36.	Praktek dokter/bidan PNS	Unit	8	5	8	4	4
37.	Persentase Pustu terhadap desa/kelurahan	%	31,58	34,74	33,6	36,84	46,31
38.	Persentase SPM yang diterapkan	%	100	100	100	64,32	72,26
39.	Cakupan kunjungan pasien rawat jalan	%	23,9	30.92	50,6	55,78	49,4
40.	Persentase jumlah puskesmas dan pustu	%	52,27	57.14	80,85	70	93,33

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	yang resperesentatif						
41	Cakupan kunjungan lansia	%	19,2	22.23	48,8	52,24	72,5
42.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	%	35,71	50	95	66,67	95,56
43.	Persentase ketersediaan alkes di puskesmas	%	71,43	71.43	80	60,65	66,67
44.	Jumlah temuan kasus obat dan makanan	Kasus	1	0	0	0	0
45.	Cakupan sosialisasi kesehatan masyarakat	%	100	100	100	100	100
46.	Cakupan desa/kelurahan siaga aktif	%	93,68	41.05	57	57	70
47.	Cakupan pembinaan pengembangan lingkungan sehat	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Tahun 2020-2024

Pengukuran kinerja tahun 2024 juga dilakukan pada capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang kesehatan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Kabupaten Buton
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja 2024
1	Penurunan Prevalensi Stunting (Lintas K/L)	**%**	16,79	21,32
2	Penemuan Kasus TBC	**%**	63,76	57,8
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 KH	284	203
4	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	%	93,33	100
5	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	100	100
6	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	%	33,3	33,3
7	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.	%	73,33	93,33
8	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar.	%	75	75
9	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah TT	0.091	0.091

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja 2024
10	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	%	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Buton Tahun 2024

Dinas Kesehatan Kabupaten Buton sebagai Perangkat daerah pengampu bidang urusan Kesehatan melaksanakan perhitungan SPM dengan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Dari 12 jenis layanan yang ada, belum terdapat pelayanan yang memenuhi target indikator dari SPM, dengan rata-rata capaian kinerja SPM bidang urusan kesehatan sebesar 64,39 persen. Dimana indikator capaian pelayanan dasar yang capaiannya masih dibawah 50 persen adalah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan penderita DM, dan pelayanan kesehatan penderita hypertensi. Oleh sebab itu perlu adanya intervensi kebijakan melalui program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan pada sektor Kesehatan.

Tabel 2.32
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Buton Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Rea-lisasi	Capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	45,9	60,17
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	62,7	67,8
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	68,6	91,96
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	74,5	58,5
5.	Pelayanan kesehatan pada	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang	100	41,4	38,36

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Rea-lisasi	Capaian
	usia pendidikan dasar	mendapatkan pelayanan kesehatan			
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	20,8	57,44
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	72,5	52,54
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	46,02
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara pen-derita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang Mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	41,83
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (OGDJ)	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	82,89
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	79,9	96,6
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang Melemahkan daya tahan tubuh anusia (*Human Immunodeficien cy Virus)*	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficienc y Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	92,3	78,62
Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan					64,394

Sumber : aplikasi e-SPM Bangda Kemendagri Tahun 2024

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum di Wilayah Kabupaten Buton sangat penting dalam menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, dan bidang-bidang lainnya. Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih/air minum, drainase dan lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan data SK Jalan tahun 2017, total panjang jalan yang terbangun selama beberapa tahun terakhir sebesar 482.270 km, dengan total panjang jalan teraspal dengan kondisi mantap sampai tahun 2024 sebesar 219,765 km atau 45,57 persen dan kondisi tidak mantap sebesar 215,75 km atau 44,74 persen, dengan persentase kondisi saluran drainase kondisi baik menunjukan perkembangan yang meningkat setiap tahunnya. Tahun 2019 sebesar 44,69 persen, sampai dengan tahun 2024 meningkat menjadi 85 persen.

Dalam mendukung kegiatan sektor pertanian, Kabupaten Buton memiliki luas irigasi yang sampai tahun 2023 sebesar 1.197 Ha yang terdiri dari irigasi primer sebesar 5.456,7 M, irigasi sekunder sebesar 29.342 M, dan irigasi tersier sebesar 18.120,3 dengan persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sampai tahun 2024 sebesar 66 persen.

Dalam pemenuhan air minum diukur dengan persentase rumah tangga pengguna air minum yang pada tahun 2019 sebesar 80 persen mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 98,81 persen. Demikian pula dengan pemenuhan sanitasi yang layak menunjukkan angka yang fluktuasi dari 93, 63 persen pada tahun 2019 naik menjadi 99,39 persen pada tahun 2023, namun Kembali turun di tahun 2024 menjadi 94,38 persen

Untuk mewujudkan kualitas konstruksi bangunan yang baik, Dinas Pekerjaan Umum terus melakukan peningkatan kapasitas bagi jasa konstruksi di daerah yang diukur dari jumlah sertifikasi tenaga konstruksi yang pada tahun 2023 sebanyak 31 orang, berdasarkan kondisi tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebanyak 193 orang, sedangkan di tahun 2024 pelaksanaan sertifikasi tenaga konstruksi tidak ada disebabkan karena kegiatan tersebut di batalkan oleh Balai Pelatihan tenaga konstruksi

Pada capaian urusan penataan ruang yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah, diukur dengan indikator ketersediaan dokumen RTRW, dimana Kabupaten Buton telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015-2035, dan saat

ini dokumen RTRW Kab. Buton sedang dalam proses revisi yang penetapannya menunggu penetapan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2024 Kabupaten Buton juga telah menyelesaikan penyusunan dokumen RDTR kawasan industri Lasalimu dengan pendampingan dari Kementerian ATR BPR.

Secara lengkap capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Buton tahun 2020–2024 dapat dilihat pada beberapa indikator berikut :

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Panjang jalan kabupaten	Km	482,270	482,270	482,270	482,270	482,270	482,270
2.	Poros jalan kabupaten :							
	- Kondisi Baik	Km	152,542	169,080	186,879	202,99	203,99	219,765
	- Kondisi Rusak Sedang	Km	56,529	35,120	34,385	32,11	32,12	29,6
	- Kondisi Rusak Ringan	Km	57,749	9,890	62,67	54,07	54,07	17,6
	- Rusak Berat	Km	215,450	268,180	198,32	193,1	192,10	215,75
3.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	31,63	35,06	34,39	48,75	48,96	45,57
4.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	M/org	4,06	4,05	4,04	4,02	4,00	3,96
5.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	44,69	54,69	69,69	78,60	82,51	85
6.	Jaringan irigasi primer	M	11,637	5,456.7	5,456.7	5,456.7	5,456.7	5,456.7
7.	Jaringan sekunder	M	49,955	29,342	29,342	29,342	29,342	29,342
8.	Jaringan tersier	M	26,449	18,120.3	18,120.3	18,120.3	18,120.3	18,120.3
9.	Luas irigasi kabupaten	Ha	1,319	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197
10.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	73,3	74	72,6	75	65,6	66
11.	Persentase RT pengguna air minum	%	80	80,92	85,75	86,16	91,88	98,81
12.	Rumah tangga	%	93,63	94,5	95,6	95,86	99,39	94,38

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	bersanitasi							
13.	Jumlah sertifikasi tenaga konstruksi	Org	193	-	105	50	31	Batalkan oleh Balai Pelatihan
14.	Jumlah sosialisasi informasi jasa konstruksi	Keg.	1	1	1	1	1	1
15.	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	60	56	30	9	13	8
16.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	Dokumen	1	1	1	1	1	1
17.	Tersedianya RDTR	Dokumen	1	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buton Tahun 2020 - 2024

Pada tahun 2024 juga dilakukan pengukuran capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Berdasarkan lima indikator, terdapat dua indikator yang capainnya masih sangat rendah, yaitu rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dengan capaian sebesar 0 orang dan rasio kepatuhan IMB kab/kota sebesar 8 persen. Secara lengkap capaian indikator kinerja kunci tesebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Ha	870	869
2	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	99,45	94,38
3	Rasio Kepatuhan IMB kab/kota	%	35	8
4	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	72,04	51,62
5	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	org	100	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buton Tahun 2024

Disamping itu pula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga melaksanakan fungsi pelayanan minimal sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan sesuai Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan data aplikasi e-SPM Bangda Kemendagri menunjukkan capaian SPM bidang pekerjaan umum pada tahun 2024 rata-rata capaian SPM sebesar 100 persen dengan dua jenis layanan dasar, yaitu penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic, dengan masig-masing capaian 100 persen.

Tabel 2.35
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	100
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100	100	100
Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum					100

Sumber : aplikasi e-SPM Bangda Kemendagri Tahun 2024

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar. Capaian kinerja perumahan dan perumahan Kabupaten Buton dapat dilihat dari beberapa capaian indikator selama empat tahun terakhir.

Penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buton menunjukan perkembangan cenderung meningkat. Tahun 2019 jumlah rumah tidak layak huni sebesar 8.001 unit rumah menurun pada tahun 2024 sebesar 7.363 unit rumah atau dengan kata lain jumlah rumah layak huni meningkat dari 13.842 unit rumah tahun 2019 menjadi 17.506 unit rumah di tahun 2024 atau ada kenaikan dari 63,37 persen di tahun 2019 menjadi 70,39 persen di tahun 2024 Peningkatan jumlah rumah layak huni menjadi perhatian dalam capaian indikator SDGs tujuan kesebelas yaitu menjadikan kota yang inklusif, aman

tangguh dan berkelanjutan. Selain itu, indikator SDGs tujuan kesatu pada indikator persentase cakupan pelayanan air minum dari tahun 2019–2024 menunjukan capaian stabil dan selalu berada di atas 70 persen. Kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Buton sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten ButonTahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah	Unit	22.937	24.869	24.869	24.869	24.869
2	Jumlah rumah layak huni	Unit	13.842	15.111	17.205	17.402	17.506
3	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	8.001	7.826	7.664	7.467	7.397
4	Persentase rumah layak huni	%	63,37	65,88	69,18	69,97	70,26
45	Persentase rumah tidak layak huni	%	36,63	34,12	30,82	30,03	28,99
6	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani	Ha	4,48	-	-	2.01	0,87
7	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha	Ha	74,5			79,18	79,18
8	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	%	6	-	-	0,78	0,89
9	Bantuan perumahan BSPS	Unit	450	390	103	65	188
10	*Backlog*	Unit	5.642	4.816	3.506	3.506	3.485
11	Jumlah perumahan yang dibangun oleh pengembang	Unit	0	0	0	0	0
12	Persentase rumah tangga pengguna air minum	%	37,22	48,31	56,14	65,13	70,90
13	Jumlah RT pengguna listrik	RT	20.025	20.888	21.031	21.254	21.608
14	Persentase RT pengguna listrik	%	87,30	83,99	85,60	86,34	88,50
15	Rasio tempat pemakaman umum per 1.000 penduduk	Per 1000 pddk	62,26	62,26	50	50	50
16	Jumlah kawasan taman kota dan lingkungan permukiman yang terkelola	Kwsn	6	6	6	5	5
17	Cakupan perbaikan perumahan korban bencana	%	100	100	100	10	85

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	alam/sosial						

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukma Kab. Buton Tahun 2019-2024

Tabel 2.37
Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Buton

No.	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Kel/ Desa	Kec.	Tingkat kekumuhan
1	Barangka	4,71	Barangka	Kapontori	Kumuh ringan
2	Boneatiro	11,85	Boneatiro	Kapontori	Kumuh ringan
3	Wakangka	6,14	Kel. Wakangka	Kapontori	Kumuh ringan
4	Watumotobe	6,84	Kel. Watumotobe	Kapontori	Kumuh ringan
5	Bonelalo	4,3	Bonelalo	Kapontori	Kumuh ringan
6	Kamaru	9,7	Kel. Kamaru	Lasalimu	Kumuh ringan
7	Lasembangi	2,01	Lasembangi	Lasalimu	Kumuh ringan
8	Lawele	6,71	Lawele	Lasalimu	Kumuh ringan
9	Talaga Baru	4,17	Talaga Baru	Lasalimu	Kumuh ringan
10	Kabawakole	10,5	Kabawakole	Pasarwajo	Kumuh ringan
			Kancinaa	Pasarwajo	
11	Bahari Makmur	4,98	Bahari Makmur	Siotapina	Kumuh ringan
12	Kumbewaha	3,43	Kumbewaha	Siotapina	Kumuh ringan
13	Bajo Bahari	4,48	Bajo Bahari	Wabula	Kumuh ringan
14	Wabula	10,13	Wabula	Wabula	Kumuh ringan
			Wabula 1	Wabula	
15	Wasampela	4,24	Wasampela	Wabula	Kumuh ringan
16	Balimu	5,26	Balimu	Lasalimu Selatan	Kumuh ringan
17	Wolowa	4,27	Wolowa	Wolowa	Kumuh ringan
18	Dawanawajo I	34,13	Saragi	Pasarwajo	Kumuh ringan
			Wakoko	Pasarwajo	
19	Dawanawajo II	21,2	Pasarwajo	Pasarwajo	Kumuh ringan
			Kambulabulana	Pasarwajo	
20	Dawanawajo III	20,89	Takimpo	Pasarwajo	Kumuh ringan
			Kombeli	Pasarwajo	
			Awainulu	Pasarwajo	
			Laburunci	Pasarwajo	
21	Dawanawajo IV	10,29	Wagola	Pasarwajo	Kumuh ringan
22	Dawanawajo V	28,46	Dongkala	Pasarwajo	Kumuh ringan
			Kondowa	Pasarwajo	
23	Wagari	1,79	Wagari	Lasalimu	Kumuh Ringan

No.	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Kel/ Desa	Kec.	Tingkat kekumuhan
24	Wasuamba	3,08	Wasuamba	Lasalimu	Kumuh ringan
25	Benteng (Ds. Bajo)	1,53	Benteng	Lasalimu	Kumuh ringan
26	Benteng (Ds. Lapuli)	1,95	Benteng	Lasalimu	Kumuh ringan
	Total Luas Kumuh	227,04			
	Total Luas Kumuh Kewenangan Kabupaten	79,59			
	Total Luas Kumuh Kewenangan Provinsi	42,77			
	Total Luas Kumuh Kewenangan Pusat	104,68			

Sumber : SK Bupati Buton No. 11 Tahun 2022 (Hasil Review Dinas Perumahan dan Kawasan Permukan Kab. Buton 2024)

Pengukuran kinerja tahun 2024 juga dilakukan pada capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dimana capaian indikator kinerja kunci secara umum masih sangat rendah. Dari tiga indikator, hanya satu indikator yang capaianya diatas 50 persen, yaitu jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU dengan capaian 97 persen. Sedangkan persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani baru mencapai 0,87 persen. Hal ini diperlukan adanya intervensi kebijakan melalui program dan kegiatan sehingga penanganan kawasan permukiman kumuh dapat lebih optimal. Secara lengkap capaian indikator kinerja kunci bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja
1	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	0,87
2	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	97
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)	%	29,61

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukma Kab. Buton 2024

Disamping itu urusan perumahan merupakan urusan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam Permendagri Nomor 59

Tahun 2021 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) salah satunya terkait SPM Urusan Perumahan dan Permukiman dan sesuai dengan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada 2 jenis pelayanan dasar, yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dengan rata-rata capaian sebesar 42,50 persen.

Tabel 2.39
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	66,67	66,67
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	0,00	0,00
Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman					33,33

Sumber : aplikasi e-SPM Bangda Kemendagri Tahun 2024

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas.

Dalam rangka menjangkau pengendalian keamanan, patroli juga dilaksanakan oleh petugas Satpol PP di 7 wilayah kecamatan. Patroli dilakukan dalam ragka penegakan perda untuk mendukung kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, sehingga terwujud masyarakat yang tertib.

Pembinaan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dilaksanakan dengan berbagai kegiatan. Penanganan terhadap unjuk rasa dan konflik sosial juga terlaksana dengan baik yaitu 100% tertangani.

Selain keamanan dan ketertiban, hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kenyamanan masyarakat adalah penanganan bencana. Jenis bencana yang kemungkinan terjadi di Kabupaten Buton adalah bencana kebakaran, banjir, longsor dan angin puting beliung. Oleh karena itu kesiapsiagaan bencana perlu menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh masyarakat Kabupaten Buton. Capaian kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Buton dapat dilihat pada beberapa indikator di bawah ini :

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Kunci Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Buton
Tahun 2020 S/d 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	36,59	45,45	NA	100	100
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	114,29	NA	77,7	70
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	NA	NA	2.790	63	100
4.	Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	94,56	NA	NA	7,80	0,05
5.	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	NA	NA	2.790	893	NA
6.	jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	NA	NA	2.790	NA	100
7.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	%	NA	10	40	86.67	14,29

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kebakaran						
8.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	NA	32	25	29	45

Sumber : Satpolpp Kab. Buton, Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Buton, BPBD Kab. Buton Tahun 2020-2024

Pada pengukuran capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat menujukkan dari indikator, terdapat 1 indikator yang capaiannya masih nol, yaitu Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Belum tercapainya indikator ini disebabkan Kabupaten Buton baru merencanakan kegiatan penyusunan dokumen kebencanaan di tahun 2024 dan masih sementara dalam proses penyelesaian. secara lengkap capaian indikator kinerja kunci bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Adapun capaian SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang diampu oleh 3 (tiga) perangkat daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rata-rata capaian sebesar 82,12 persen, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Urusan Trantibunlinmas Kabupaten Buton Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	100	71,64	71,64
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	90	90
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	90	90

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	96	96
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	100	63	63
Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Trantibunlinmas					82,12

Sumber : aplikasi e-SPM Bangda Kemendagri Tahun 2024

6. Urusan Sosial

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang dapat dilihat dari capaian kinerja urusan sosial dari beberapa indikator berikut :

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahtraan sosial (PPKS)	Orang	125	99.838	97.672	93.507	84.330
2.	Jumlah partisipasi potensi sumber kesejahtraan sosial (PSKS)	Orang	153	152	90	219	123
3.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	KK	7.154	7.665	8.783	8.739	8..98
4.	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	43,77	45,28	50,24	51,41
5.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	13,68	53,65	48,41	58,91	76,48
6.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia	%	2,21	2,57	9.45	1,44	1,44

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial						

Sumber : Dinas Sosial Kab. Buton Tahun 2020-2024

Berdasarkan pada pengukuran capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang social, dari lima indikator terdapat satu indikator yang capaiannya masih sangat rendah, yaitu persentase KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan diharapkan pada tahun 2025 dapat meningkat dari tahun sebelumnya melalui intervensi progam dan kegiatan pada perangkat daerah teknis. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.43
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial
Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja
1.	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100	90
2.	Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100	100
3.	Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100	100
4.	Jumlah PM yang Meningkat Pendapatannya	orang	200	147
5.	Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	0,37	0,20

Sumber : Dinas Sosial Kab. Buton Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota juga diatur melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, Urusan Sosial sesuai SPM Sosial yaitu :

Tabel 2.44
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Urusan Sosial Kabupaten Buton Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	91,33	91,33
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	85,50	85,50
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	91,63	91,63
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis ang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	100	100
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	95,08	95,08
Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial					92,71

Sumber : aplikasi e-SPM Bangda Kemendagri Tahun 2024

Di Kabupaten Buton untuk bidang urusan sosial sudah melaksanakan 5 urusan SPM, yaitu yang terkait dengan rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi social dasar anak terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten. Secara rata-rata capaian SPM bidang social mencapai 92,71 persen

2.1.3.2. Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib (Non Dasar)

1. Urusan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja *(man power)* adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Di Indonesia dipakai batasan umur 10 tahun. Tenaga kerja adalah jumlah seluruh

penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Ketenagakerjaan termasuk salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs, yaitu, Target dunia yang ingin dicapai yaitu Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Pada indikator SDGs tujuan kedelapan untuk meningkatkan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh yaitu tingkat pengangguran terbuka, pada tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami penurunan dari 4,78 ditahun 2020 menjadi 2,92 persen di tahun 2024. Begitu pula dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dalam kurun waktu tahun 2020–2024 juga fluktuatif dan cenderung menurun pada kisaran antara 105,16 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 69,29 persen pada tahun 2024.

Capaian indikator urusan tenaga kerja Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari beberapa indikator berikut ini :

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Buton
Tahun 2020 /d Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	105,16	64,42	77,34	68,49	69,26
2	Tingkat pengangguran terbuka	%	4.78	4,74	2,07	1,04	2,94
3	Berusaha sendiri	%	26,88	30,57	32,74	27,02	23,99
4	Berusaha dibantu buruh tak tetap	%	21,28	18,94	14,66	19,23	13,06
5	Berusaha dengan buruh tetap	%	3,09	3,14	4,60	2,07	1,87
6	Buruh/karyawan	%	35,03	31,56	20,53	25,78	37,14
7	Pekerja bebas	%	1,04	1,13	3,91	3,12	1,56
8	Pekerja keluarga	%	14,23	12,25	25,59	17,05	19,33

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2020 - 2024

Pada pengukuran capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang tenaga kerja pada tahun 2023 menunjukkan, dari 14 IKK rata-rata masih kategori rendah. bahkan terdapat 2 indikator yang capaiannya 0 persen, yaitu Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja dan Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia, yang disebabkan tidak adanya perusahaan yang melaporkan kegiatan informasi pasar kerja serta terbatasnya penganggaran untuk pelaksanaan sosialisasi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia. Selain itu indikator persentase tenaga kerja bersertifikat juga masih sangat rendah hanya mencapai 6,15 dari target 20,16 persen. Hal ini diperlukan adanya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan ketenagakerjaan daerah, agar bonus demografi yang akan dihadapi nantinya dapat memberi dampak positif bagi pembangunan daerah. Secara lengkap capaian IKK urusan tenaga kerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	20,16	6,15
2	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	13,00	63,12
3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PB/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	54	85,71
4	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	56,41	42,68
5	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%	18,18	NA
6	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	110	100
7	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	110	100
8	Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja	Orang	1704	1108
9	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	423	473
10	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	%	18,18	NA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja
11	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	100	NA
12	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD	%	23	NA
13	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	Laporan	2	0
14	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia	Orang	21	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Buton Tahun 2024

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, selama kurun waktu 2019–2024 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan keberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Capaian indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2019–2023, IPG pada tahun 2019 sebesar 79,82 persen naik menjadi sebesar 82,07 persen pada tahun 2023. Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) diberbagai bidang pembangunan yang secara terus menerus dilakukan pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender. Dimana fokus utama pembangunan pemberdayaan perempuan yang dilakukan adalah pendekatan pembangunan manusia berdasarkan kesetaraan gender dengan mempertimbangkan perbedaan aspirasi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Buton masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Buton tahun 2023 menunjukkan kasus pelecehan anak dibawah umur sebanyak 18 kasus mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 sebanyak 6 kasus, dan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 30 kasus dan meningkat dibanding capaian tahun 2022 sebanyak 2 kasus. dan Untuk capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Buton masih pada level inisiasi

dengan skor 435,62. Perkembangan capaian kinerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel berikut :

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks pembangunan gender	%	80,18	80,69	81,46	82,07	82,07
2	Indeks pemberdayaan gender	%	71,41	68,21	70,51	70,37	76.77
3	Persentase OPD yang menerapkan PPRG dalam perencanaan dan penganggaran	%	2,78	41,66	55,56	55,56	55,56
4	Persentase kelembagaan PUG	%	5,56	5,56	25	42,86	42,86
5	Proporsi pejabat perempuan di lingkungan Pemda	Org	164	213	201	380	106
6	Rasio KDRT	Nilai	0,008	0,015	0,008	0,355	0,355
7	Jumlah kekerasan terhadap perempuan per tahun	Kasus	2	6	2	30	5
8	Jumlah kekerasan terhadap anak per tahun	Kasus	14	3	6	18	28
9	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	100	100	100
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan yang penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
11	Jumlah angkatan kerja perempuan	Org	19.025	19.110	23.528	24.021	24.508
12	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Org	1.494	1.445	1.851	2.375	2.669
13	Jumlah kasus KDRT	Kasus	-	4	2	10	3

Sumber : BPS Prov. Sultra Tahun 2024; Dinas P3A Kab. Buton, Tahun 2020 - 2024

Pada tahun 2024 juga dilakukan pengukuran capaian indikator kinerja kunci (IKK) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dari 9 IKK terdapat 3 IKK yang mencapai 100 persen, yaitu persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten, Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif dan Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif Capaian ini tidak menggambarkan terselesaikannya kasus pada perempuan dan anak, karena indikator tersebut hanya menggambarkan jumlah kasus yang dilaporkan dan ditangani tapi tidak berdampak pada penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga perlu adanya upaya pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk memilih hidup yang layak. Secara lengkap capaian IKK urusan perempuan dan perlindungan anak tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.48
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja
1	Persentase ARG	%	3.05	0,25
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	25,38	8,18
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100
5	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,471	0,518
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	52,25	52,25
7	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100
8	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya	Nilai	500	663,48
9	Nilai Kab/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	500	745,15 *

Sumber : Dinas P3A Kab. Buton, Tahun 2024

2. Urusan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat untuk dapat hidup dan berkembang dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan,

Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu : (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Berkaitan dengan ketersediaan pangan Kabupaten Buton, Ketersediaan energi per kapita tahun 2024 sebesar 2.020 /kapita/hari, dan ketersediaan protein per kapita sebesar 58,74 gram/kapita/hari. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Buton pada sisi ketersediaan energi telah memenuhi standar, sedangkan ketersediaan protein belum memenuhi standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2013, yang telah merekomendasikan ketetapan angka kecukupan energi di tingkat konsumsi per kapita sebanyak 1.078,69 kkal dan protein 1.401,12 gram per hari.

Berkaitan dengan kualitas konsumsi pangan, Skor pola pangan harapan di Kabupaten Buton menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Skor PPH selama tahun 2020 - 2024 cenderung naik walaupun tidak terlalu signifikan dari sebesar 70,40 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 78,30 persen pada tahun 2024. Kondisi ini juga mengindikasikan kinerja indikator persentase pola pangan harapan SDGs pada Tujuan kedua Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan belum maksimal.

Berkaitan dengan keamanan pangan, Pemerintah Kabupaten Buton secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat. Namun demikian walaupun capaiannya telah 100 persen namun perlu tetap dilakukan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan secara lebih maksimal , walaupum mencapai

100 persen pada tahun 2024, angka tersebut sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 100 persen. Capaian kinerja urusan pangan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Regulasi ketahanan pangan	Regulasi	-	-	1	1	1
2	Persentase skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	%	70,40	65,50	84,84	68,40	78,30
3	Ketersediaan pangan utama	Kg/kp/thn	2998,90	2141,10	4055,0	4763,63	4115,20
4	Ketersediaan energi per kapita	Kkal/kapita/hari	1.901,6	1.876,9	1.974	1.518	2020
5	Ketersediaan protein per kapita	Gram/kapita/hari	55,8	54,1	57,3	58,74	58,74
6	Jumlah konsumsi beras	Kg/kap/thn	118,5	99,50	101,70	113,5	99,80
7	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan daerah	%	100	100	100	100	100
8	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar	%	100	100	100	100	0

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buton Tahun 2020 - 2024

Pada pengukuran capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang pangan tahun 2024 menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) mencapai 57,29 persen. Untuk indicator Daerah Rentan Rawan Pangan tergambar dari persentase daerah rentan rawan pangan hanya mencapai 8,42 persen. Berikut capaian IKK bidang pangan tahun 2024.

Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan
Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja
1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	57,29
2	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	Ton	27,5
3	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	0
4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	8,42

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buton Tahun 2024

4. Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya pemeliharaan lingkungan disebabkan karena pada umumnya menganggap bahwa sumber daya alam akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas dan secara cuma-cuma.

Kewenangan pemerintah daerah urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan ingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Buton tahun 2020- 2024 dapat dilihat pada beberapa indikator berikut :

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022
1	Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	%	45,63	66,75	73,45
2	Pencemaran status mutu air	%	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Capaian		
			2020	2021	2022
3	Rasio jumlah kegiatan/usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan	%	64,94	67,06	64.75
4	Jumlah perusahaan yang dinilai pengelolaan lingkungan hidupnya	Peru-sahaan	29	70	0
5	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL & SPPL	%	20,62	40,96	20,99
6	Cakupan pelayanan pencegahan pencemaran air terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL & SPPL	%	0,51	0,4	0
7	Cakupan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	%	100	100	100
8	Terpantaunya kualitas air sungai dan laut sesuai standar	%	100	100	100
9	Persentase penegakan hukum lingkungan	%	10,60	30	86
10	Tersedianya informasi status kerusakan lahan	Laporan	1	1	1
11	Cakupan penyelenggaraan sistem informasi lingkungan	%	38,10	100	100
12	Cakupan pelayanan pencegahan pencemaran air dan udara	%	0	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buton, Tahun 2020-2022

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton
Tahun 2023 s/d Tahun 2024

NO	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	Capaian Tahun 2023 (%)	Realisasi	Capaian Tahun 2024(%)
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023		Tahun 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*11*	*8*	*11*
1	Cakupan dokumen Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)(%)	%	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan aliran Sungai yang di restorasi (%)	%	25	50	25	100	50	100
3	Persentase Sampah yang terkelola (%)	%	39,6	41,60	43,01	109	43,15	104

NO	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	Capaian Tahun 2023 (%)	Realisasi	Capaian Tahun 2024(%)
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023		Tahun 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*11*	*8*	*11*
4	Persentase ketaatan pelaku usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan / PPLH (%)	%	70	75	57,25	82	80	107
5	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3 (%)	%	30	33	30,43	101	25	76
6	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola (%)	%	75	80	75	100	102	128
7	Cakupan aksi mitigasi, adaptasi dan penguatan kelembagaan masyarakat yang dilaksanakan (%)	%	25	50	25	100	51,72	103,44
8	Persentase kasus pengaduan lingkungan hidup yang diterselesaikan (%)	%	100	100	100	100	100	100
9	Persentse lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan lingkungan hidup (%)	%	33	50	33	100	50	100
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	73,16	73,48	77,03	105	79,9	105
12	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	53,35	53,45	55	103	55	103
13	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	92	92,11	94,73	103	94,73	103
14	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Nilai	82,04	83,16	82,13	100	82,13	99
15	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten Buton	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
16	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton	-	154	159	154	100	154	97
18	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten Buton	-	1	1	0	0	0	0

NO	Indikator	Satuan	Target		Realisasi	Capaian Tahun 2023 (%)	Realisasi	Capaian Tahun 2024(%)
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023		Tahun 2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*8*	*11*	*8*	*11*
19	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	-	1	1	0	0	0	0
20	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten Buton yang ditangani (%)	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab Buton 2023-2024

Pada tahun 2024 juga dilakukan pengukuran capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.53
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	NA	68.45	70,04	77,03	79,9
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	31,12	35,60	42,82	43,01	43,15
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	73,71	63,09	93,40	31,82	52,17

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buton, Tahun 2024

Berdasarkan data capaian tahun 2024 di atas menunjukkan capaian IKK urusan lingkungan hidup belum menunjukkan kinerja yang baik. Dari tiga indikator terdapat dua indikator yang capaiannya dibawah 60 % yaitu Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota dan Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota. Sedangkan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang dikonersi dengan rumus baru mencapai 79,9 poin.

Pengukuran IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH digunakan untuk menilai kinerja perbaikan kualitas lingkungan hidup, juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH ditentukan dari empat komponen indikator kinerja kunci, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah telah melaksanakan tiga (3) program strategis nasional, yaitu pemutakhiran data penduduk, pemberian NIK dan penerapan e-KTP melalui pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil termasuk perekaman e-KTP yang dilakukan secara massal yang bertujuan agar semua tercatat dalam database kependudukan sebagai acuan dasar perencanaan pembangunan.

Dalam upaya tertib administrasi kependudukan, Kabupaten Buton giat melakukan upaya meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencatatkan dokumen kependudukan. Persentase penduduk ber KTP di Kabupaten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan capaian kinerja, pada tahun 2020 rasio kepemilikan kartu keluarga sebesar 93,31 persen naik menjadi 99,5 persen pada tahun 2024, begitu juga dengan rasio kepemilikan KTP pada tahun 2020 sebesar 99,60 persen namun menurun menjadi 97,93 persen di tahun 2024. Rasio kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun juga

menunjukkan angka yang fluktuatif yang cenderung meningkat dengan capaian dari 95,17 % di tahun 2020 menjadi 98,49 persen tahun 2024. Adapun Kinerja penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buton dapat dilihat pada capaian beberapa indikator berikut :

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio kepemilikan kartu keluarga	%	93,31	95,25	95,75	99,5	99,5
2	Rasio jumlah kepemilikan KTP	%	99,60	99,30	98,27	99	97,93
3	Rasio pasangan berakte Nikah	%	30,93	42,89	47,57	52,9	56,40
4	Persentase kepemilikan akta kelahiran 0 -18 Tahun	%	95,17	103,59	97,80	98,12	98,49
5	Rasio kepemilikan akta kelahiran	%	48,25	51,96	53,36	52,2	56,74
6	Jumlah penduduk yang telah memiliki e-KTP	Jiwa	77.179	78.368	78.368	78.099	78,46
7	Jumlah penduduk yang memiliki KK	Jiwa	28.803	30.789	31.239	26.966	26.966
8	Akta nikah	Jiwa	15.179	21.431	24.011	26.830	5.640
9	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada/ tdk	Ada	Ada	Ada	Tidak	Tidak
10	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
11	Jumlah penduduk di kabupaten menurut kelompok umur	Ada/Tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Buton, Tahun 2020 - 2024

Capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.55
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja
1	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	98,35	98,49
2	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	45,41	100
3	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	99,78	100
4	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan	%	100	100
5	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	%	50,06	61,05
6	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	30	1,34
7	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Dokumen	2	2

Sumber : Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Buton, Tahun 2024

Tabel 2.55 menunjukkan dari 7 indikator, terdapat 4 indikator dengan capaian antara 90-100 persen yakni Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun, Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan, Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan, dan Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan, kemudian terdapat 1 indikator dengan capaian diatas 60 persen dan 2 indikator dengan capaian dibawah 60 persen, yaitu indikator persentase kepemilikan indentitas kependudukan digital sebesar 1,34 persen dan jumlah data profil kependudukan yang disusun (2 dokumen),

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Peningkatan pelayanan umum bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan emerintahan desa meliputi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan secara efektif dan efisien melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan manajerial pemerintahan desa/kelurahan, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat desa/kelurahan, dan peningkatan sarana prasarana kelembagaan dan pengembangan regulasi desa/kelurahan.

Semangat otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi gerbang pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemekaran daerah. Terbentuknya beberapa daerah otonomi baru di Sulawesi Tenggara merupakan peluang yang sangat baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan terbentuknya daerah otonomi baru dapat pula meningkatkan kinerja pemerintah daerah mulai di tingkat kabupaten/kota hingga di tingkat desa/kelurahan. Terbentuknya pemerintahan daerah baru berarti terbaginya lembaga pemerintahan dibawahnya.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel berikut :

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	PKK aktif	PKK	102	102	102	100	100
2	Persentase kelompok binaan PKK	%	60.18	100	10	100	100
3	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100
4	Posyandu aktif	Unit	176	176	176	165	165
5	Persentase posyandu aktif	%	100	100	100	94,29	94,29
6	Persentase aparatur pemerintah desa yang terlatih	%	62.12	24,85	100	0	0
7	Persentase BUMdes aktif	%	91,57	91,57	91,57	94	94
8	Jumlah kelompok pemanfaatan TTG	Klp	15	20	7	1	1
9	Cakupan binaan lembaga adat	Lembaga adat	83	83	83	83	83
10	Persentase lembaga pemberdayaam masyarakat aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Buton Tahun 2020m- 2024

Capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0,03	0
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0,91	2,41
3	Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	Desa	83	83

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Buton Tahun 2024

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berbagai Upaya pembangunan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam rangka pengendalian jumlah penduduk baik alami maupun migrasi serta meningkatkan capaian indikator Keluarga Berencana.

Indikator yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton dalam pengendalian penduduk antara lain adalah jumlah anak dalam keluarga. Selama kurun waktu 2020-2024 rata-rata jumlah anak dalam keluarga fluktuatif dari 2,16 orang tahun 2020 menjadi 2,48 orang pada tahun 2024. Kondisi ini perlu dipertahankan agar tidak kembali naik dan menyebabkan ledakan jumlah penduduk yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat kedepan.

Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Buton mengalami fluktuatif, pada tahun 2020 peserta KB aktif sebesar 72,17 persen turun menjadi 56,8 persen pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 67,46 persen dan turun Kembali menjadi 63,81 di tahun 2024. Rasio akseptor KB meningkat Kembali di tahun 2024 sebesar 63,81 persen bila dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar 14,18 persen. Selain itu, indikator SDGs tujuan kelima persentase usia perempuan PUS kurang dari 20 tahun, menunjukan hal yang fluktuatif dan kecenderungan menurun dari 4,88 persen di tahun 2020 menjadi 1,21 persen di tahun 2022, kemudian mengalami peningkatan sebesar

27,03 persen di tahun 2023, dan Kembali menurun menjadi 0,57 persen di tahun 2024. hal tersebut dilatarbelakangi dengan semakin meningkatnya pemahaman perempuan terkait pernikahan usia muda. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2,15	4,06	2,83	3,00	2,48
2	Rasio akseptor KB	%	16,46	48,90	25,88	14,18	63,81
3	Cakupan peserta KB aktif	%	72,17	80,06	56,8	67,46	63,81
4	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	%	15.84	7,46	8,56	10,6	0
5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	%	70,57	48,90	54,8	28,63	2,6
6	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	%	4,88	27,38	1,21	27,03	0,57
8	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	18,43	14,64	20,1	13,49	24,1
9	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	72,17	50,78	13,5	51,14	63,81
10	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB	%	76,38	58,11	58,11	100	101,05
11	Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	%	79,2	46,79	79,20	60	100
12	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	%	79,06	38,35	30,65	73,29	98,94
13	Pusat pelayanan sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	14,28	171	4,77	100,00	100,00
14	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/ mahasiswa	%	71,21	553	85,71	357,14	58,70
15	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan pernagkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	29,47	100

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
16	Rasio petugas pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa dan kelurahan	%	1	100	100	100	98,95
17	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	92,31	34,00	62,5	67	90
18	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan stadarisasi pelayanan	%	92,31	100	100	100	100
20	Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPKS)	Klpk	22	22	22	32	7
21	Jumlah kampung KB	Kampung KB	22	22	22	57	95

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Buton Tahun 2020 – 2024

Pada tahun 2024 capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja
1	Peresentase pemakaian kontrasepsi Modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	46,69	100
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	61,56	59,92
3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	rata-rata	17	28,4
4	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	kelahiran	2	2,6
5	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	63,75	53,3
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,3	12,0

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Buton Tahun 2024

8. Urusan Perhubungan

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peranan penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat keterhubungan antarwilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Transportasi juga mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi.

Wilayah laut yang luas dan panjangnya garis pantai memberi peluang pengembangan prasarana perhubungan laut yang mengoneksikan wilayah-wilayah sekitarnya. Sejak tahun 2019 sampai saat ini jumlah pelabuhan yang terbangun dan terehabilitasi sebanyak 29 pelabuhan yang terdiri atas 20 pelabuhan rakyat, 1 pelabuhan penyeberangan, 3 pelabuhan lokal, 1 pelabuhan regional, 1 pelabuhan transmigrasi, 2 pelabuhan khusus, 1 pelabuhan studi dengan jumlah terminal yang tersedia sebanyak 1 terminal type B yang terbangun pada tahun 2022 melalui dana APBD propinsi.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelabuhan rakyat	Unit	20	20	20	20	20
2	Jumlah pelabuhan penyebrangan	Unit	1	1	1	1	1
3	Jumlah pelabuhan lokal	Unit	1	1	1	1	1
4	Jumlah pelabuhan regional	Unit	1	1	1	1	1
5	Jumlah pelabuhan transmigrasi	Unit	1	1	1	1	1
6	Jumlah pelabuhan khusus	Unit	2	2	2	2	2
7	Jumlah pelabuhan study	Unit	1	1	1	1	1
8	Jumlah terminal type B	Unit	-	-	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Buton Tahun 2020 - 2024

Pada capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang perhubungan tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.61
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan
Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja
1	Kinerja lalulintas kabupaten/kota	Ratio	0,14	0,18
2	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Rasio	0,78	1
3	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	%	2,56	2,23
4	Jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang Tersertifikasi	Orang	10	3
5	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	Unit	544	25
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	%	100	60

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Buton Tahun 2024

Data di atas menunjukan rasio kinerja lalulintas kab/kota masih sangat rendah sebesar 0,18, Demikian pula konektivitas simpul trasnportasi kab/kota masih sangat rendah hanya sebesar 1 , Rasio konektivitas simpul transportasi kabupaten/kota merupakan perbandingan antara jumlah desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan transportasi dengan total jumlah desa/kelurahan di kabupaten/kota tersebut. Rasio ini mengukur sejauh mana wilayah suatu kabupaten/kota terhubung oleh jaringan transportasi, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian. sehingga diperlukan optimalisasi kegiatan pengawasan angkutan dalam trayek maupun pengelolaan yang baik terhadap jaringan trayek yang ada di Kabupaten Buton. Adapun jumlah trayek angkutan darat sebanyak 16 trayek, dengan jumlah armada angkutan kota sebanyak 42 unit dan angkutan desa sebanyak 9 unit, dan angkutan antar kota dalam provinsi sebanyak 31 unit. Sedangkan untuk angkutan laut, yaitu : Pelabuhan Lasalimu Kec. Lasalimu jumlah trayek sebanyak 1 (Lasalimu-Wanci) dengan jumlah armada 2 unit (bergantian), Pelabuhan Banabungi terdapat 3 unit kapal melayani tol laut (jadwal tentatif), Pelabuhan Kamaru tedapat 1 unit kapal melayani trayek Kamaru-Wanci.

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pelayanan dalam urusan komunikasi dan informatika cukup memegang peranan yang penting dalam upaya penyebarluasan informasi maupun efisiensi dalam komunikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi yang akurat dan benar, dan tidak

menyesatkan yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik kecuali selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan

Berkaitan dengan Pelayanan dalam urusan komunikasi dan informatika sesuai pula dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika. Adapun gambaran tentang perkembangan pelayanan pada urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada beberapa indikator berikut ini :

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2020	2021	2022
1	Persentase ketersediaan jaringan telekomunikasi	%	67,27	78,00	78,18
2	Rasio OPD dan kecamatan yang akses jaringan internet	%	57,78	97,15	77,79
3	Persentase OPD yang memiliki website resmi	%	36,84	158,33	55,26
4	Persentase aduan masyarakat	%	76,92	89,74	66,67
5	Jumlah muatan berita/informasi yang terpublikasikan	Berita	1.535	1.256	1.679
6	Website milik pemerintah daerah	Ada/ Tdk	Ada	Ada	Ada
7	Media massa (cetak & elektronik) dalam publikasi daerah	Buah	22	30	29

Sumber : Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Buton Tahun 2020-2022

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton
Tahun 2023 s/d Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	2023		2024	
			Target	Capaian Kinerja	Target	Capaian Kinerja
1.	Persentase layanan Publik yang di selenggarakan secara online dan terintegrasi	%	24,44	73,33		
2.	Persentase layanan SPBE yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%				
3.	Presentase ketersediaan data sektoral berbasis metadata	%				
4.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	22,22	66,67	40	55,55

No.	Indikator	Satuan	2023		2024	
			Target	Capaian Kinerja	Target	Capaian Kinerja
5.	Presentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	%	24,44	73,33	44,44	90,01
6.	Presentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian kabupaten Buton	%	15,56	58,33	37,78	47,06
7.	Prensentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	24,44	73,33	44,44	55
8	Presentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs website yang sesuai standart	%	46,67	87,51	64,44	72,42
9	Presentase survey statistik sektoral yang dilakukan	%	95,24	95,24	80	33,33

Sumber : Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Buton Tahun 2023-2024

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Buton pada tahun 2024 sebanyak 95 unit mengalami penurunan dibanding tahun 2022 sebanyak 127 koperasi. Namun kondisi di tahun 2024 mengalami penambahan jumlah koperasi aktif dari jumlah tahun 2023 yang hanya berjumlah 90 unit . Dari koperasi yang ada, persentase koperasi aktif pada tahun 20234 mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Buton hanya sebesar 49,48 persen namun mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya yang hanya 43,51 persen

Jumlah usaha mikro kecil dan menengah menunjukkan angka dengan kecenderungan meningkat dari sebanyak 1.709 unit pada tahun 2020 menjadi 5.876 unit di tahun 2024. Capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Buton dapat dilihat pada beberapa indikator berikut :

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase koperasi aktif	%	100	100	100*	43,51	49,48
2	Jumlah koperasi	Unit	120	123	127*	90	95
3	Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	1.709	3.594	4.750	5.482	5.876
4	Persentase peningkatan SHU	%	0,07	0,8	0,04	0,05	0,05
5	Persentase peningkatan UMKM	%	8,4	8,4	5,97	8,66	10,7
6	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Unit	744	547	893	902	902

*Sumber : * = Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2023; Dinas Koperasi, UMKM Kab. Buton Tahun 2020-2024*

Pada tahun 2024 juga dilakukan pengukuran capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.65
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	29,27	10,53
2	Meningkatanya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	3,86	0
3	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	3	0
4	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	3	0
5	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	3	0,10
6	Pertumbuhan Wirausaha	%	2	0

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM Kab. Buton Tahun 2024

11. Urusan Penanaman Modal

Urusan penanaman modal merupakan urusan pelayanan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2024 jumlah pelayanan

perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas PTSP Kabupaten Buton sebanyak 2.446 terdiri atas perizinan melalui OSS RBA sebanyak 1.604 dan Non OSS sebanyak 1.060 dengan lama rata-rata waktu pelayanan perizinan 1-7 hari tergantung pada jenis izin yang diterbitkan sesuai standar pelayanan dan SOP prosedur OSS pada Dinas PTSP Kab. Buton.

Sementara itu dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan terciptanya pelayanan perizinan yang terintegrasi bagi masyarakat, pemerintah daerah telah membuka mall pelayanan publik (MPP) yang dipusatkan di kompleks perkantoran Takawa, dan telah melakukan penandatangan MOU dengan beberapa Dinas/Instansi terkait yang melaksanakan pelayanan pada MPP dan pada tahun 2024, baru beberapa pelayanan yang dilaksanakan pada MPP diantaranya pelayanan perizinan, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perbankan, pelayanan pajak dan retribusi, dan pelayanan oleh Samsat dikarenakan penyediaan sarana dan prasarana pada MPP belum maksimal. Pada tahun 2023 juga telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Mal Pelayanan Publik Pada Dinas Penanama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton, dan MPP Kabupaten Buton telah diresmikan oleh Kementerian PAN dan RB RI pada tanggal 24 Juni 2024.

Peningkatan iklim pelayanan perizinan dan penanaman modal perlu pula didukung dengan regulasi pelayanan perizinan dan penanaman modal. Sampai tahun 2021 regulasi terkait pelayanan perizinan yang diterbitkan sebanyak 2 regulasi, yaitu : (i) Peraturan Bupati Buton Nomor 25 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayananan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton, (ii) Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2015 tentang Standar Operasional, Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.

Pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang berkualitas tercermin dari pengukuran yang dilaksanakan oleh OMBUDSMAN RI dengan nilai 65,92, pengukuran kinerja oleh Badan Koordinasi Penanaman

Modal dengan nilai 68.494. Untuk capaian indeks kepuasan masyarakat atas layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 sebesar 87,12 persen. Adapun beberapa indikator capaian pelayanan perizinan dan penanaman modal tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Lama proses perizinan	Hari	2	1	1	1	1
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	13	17	2	20	24
3	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda	1	1	1	2	1
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	Milyar	10,044	16,216	33*	1,009*	1,26*
5	Jumlah perusahaan	Peru-sahaan	223	267	11	41	24

Sumber : Dinas PM dan PTSP Kab. Buton, Tahun 2020-2024
* (data dalam persen)

Tabel 2.67
Jumlah Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Buton 2024

No	Jenis Izin	Jumlah yang Dikeluarkan	Ket.
1.	Perizinan berusaha	1.604	OSS RBA
2	Izin penyelenggaraan satuan pendidikan formal	3	Non OSS
3	Izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal	6	Non OSS
4	Izin kerja tenaga Kesehatan	1	Non OSS
5	Izin praktek tenaga kerja Kesehatan	331	Non OSS
6	Izin praktek tenaga pelayanan veteriner	1	Non OSS
7	Persetujuan bangunan gedung (PBG)/IMB	9	Non OSS
8	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)	1	Non OSS
9	Izin penelitian/survey kegiatan ilmiah	481	Non OSS
11.	Surat Keterangan Rencana Kota (KRK)	9	Non OSS
	Jumlah	2.446	

Sumber : Dinas PM dan PTSP Kab. Buton, Tahun 2024

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu urusan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut dapat diukur dari beberapa indikator yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah organisasi pemuda	Orga-nisasi	198	190	623	28	39
2	Persentase peran masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100
3	Jumlah organisasi olahraga	Orga-nisasi	32	42	34	27	27
4	Jumlah kegiatan kepemudaan	Keg.	5		5	3	4
5	Jumlah kegiatan olahraga	Keg.	0	0	5	18	20
	Lapangan olahraga :	Unit					
6	- Sepak Bola	Unit	0	0	3	0	0
7	- Bola Voley	Unit	2	0	4	0	0
8	- Bulutangkis	Unit	0	0	0	0	0
9	- Basket	Unit	0	0	1	0	0
10	- Futsal	Unit	0	0	5	0	5
11	- Lapangan Tenis	Unit	0	0		0	0
12	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	%	0,83	100	76	76	76
13	Jumlah prestasi olah raga	Org	0	0	26	0	0
14	Cakupan pelatih bersertifikat	%	0,39	100	31	23	57

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Buton Tahun 2020 - 2024

Pada capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.69
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja
1	Tingkat parrtisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	12	11
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	53	10,71
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	90	3
4	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	%	88	93

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Buton Tahun 2024

Pada data di atas menunjukkan rata-rata capaian indiakator kepemudaan dan olah raga masih rendah khususnya pada tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi masih sangat rendah sebesar 11 persen, sehingga perlu adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan peran pemuda dalam pembangunan.

13. Urusan Statistik

Urusan statistik di Kabupaten Buton selain ditangani oleh Badan Pusat Statistik, berdasarkan kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton. BPS memberikan layanan berupa sistem data informasi dan statistik Kabupaten Buton berbasis internet yang dapat diakses melalui website BPS, antara lain Kabupaten Buton dalam angka dan Buku PDRB Kabupaten/kota yang tersedia setiap tahun. Capaian Kinerja Urusan statistik Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.70
Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Buku "Kota/Kabupaten Dalam Angka"	Ada/ Tdk Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku "PDRB Kota/Kabupaten"	Ada/ Tdk Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kab. Buton Tahun 2020 - 2024

Pada capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang statistik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.71
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik
Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%		24,44
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%		24,44

Sumber : Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Buton Tahun 2024

Berdasarkan data di atas menunjukkan penggunaan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah pada tingkat OPD masih belum maksimal, yang tergambar dari capaian tingkat persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah baru mencapai 24,44 persen. Oleh sebab itu perlu penguatan data pada setiap OPD dan optimalisasi satu data Indonesia

14. Urusan Persandian

Kebijakan urusan pemerintah dibidang persandian sangat penting sesuai Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada perangkat Daerah Bidang Persandian dalam menangani pengamanan informasi dan pola hubungan komunikasi persandian antar perangkat daerah. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang persandian dapat dilihat dari indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah, dimana pada tahun 2020 sebesar 10,53 persen hingga tahun 2024 (Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian, 2020-2024). Meskipun capaian tersebut menunjukkan peningkatan namun masih dalam kategori rendah, sehingga diperlukan upaya-upaya yang lebih intens dalam meningkatkan capaian kinerja persandian di Kabupaten Buton. Betikut ini Capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang persandian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian
Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	50	22,22
2	Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Org	1	1
3	Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi	Org	2	2
4	Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi	Org	3	3

Sumber : Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Buton Tahun 2024

15. Urusan Kebudayaan

Urusan Bidang kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan dan pengembangan program/kegiatan yang berkaitan dengan kesenian, cagar budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya. Capaian kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :

Tabel 2.73
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	1	0	0	0	0
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	1	1	36	39	39
3	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Unit	23	10	2	3	3
4	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	89,03	18,82	2,24	4	
5	Jumlah Pembinaan kelompok seni budaya/sanggar budaya	Klp	0	29	179	29	29
6	Persentase ketersediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya	%	100	100	100	100	100
7	Persentase ikon	%	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	buton yang berbasis budaya						
8	Jumlah kebudayaan yang dikembangkan untuk pariwisata	Unit	15	15	15	15	15
9	Jumlah lembaga adat yang berperan dalam pembangunan budaya	Unit	56	56	56	56	56

Sumber : Dinas Kebudayaan Kab. Buton Tahun 2020- 2024

Pada capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.74
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan
Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja
1	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	14	10
2	Terlestarikannya cagar budaya	%	19	19
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	0	0
4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	0	0
5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	0	0
6	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	0	0
7	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	14	10
8	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	0	0
9	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0	0

Sumber : Dinas Kebudayaan Kab. Buton Tahun 2024

Terlihat pada tabel di atas memberikan gambaran kinerja urusan kebudayaan belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Dimana dari 9 indikator yang ada , tidak ada satu pun indicator yang mencapai 100. Hanya terdapat 3 Indikator yang mencapai lebih dari 10 persen. Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan, Terlestarikannya cagar budaya dan Persentase

Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan, oleh sebab itu perlu adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan kebudayaan daerah melalui berbagai kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

16. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dengan demikian garis besar kegiatan perpustakaan adalah pengelolaan koleksi, sementara garis besar kearsipan meliputi penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan (kronologis).

Dibidang perpustakaan selama tahun 2020 hingga 2024 masih dibutuhkan upaya yang maksimal dari pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga capaian kinerja per tahun bidang perpustakaan semakin meningkat. Capaian kinerja yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.75
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perpustakaan	Unit	2	2	2	2	2
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Org	942	1.311	6.050	8.202	7.557
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	283	147	1.500	305	764
4	Jumlah koleksi	Eksemp.	286	147	1.500	305	764
5	Jumlah judul buku	Judul	238	108	750	173	382

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Buton Tahun 2020- 2024

Berdasarkan data tabel di atas kunjungan di perpustakaan selama lima tahun terakhir tahun 2020 – 2024 menunjukkan trend peningkatan, walaupun di tahun 2024 jumlah kunjungan hanya mencapai 7.557 orang saja. Jumlah ini sedikit lebih rendah bila di bandingkan jumlah kunjungan di tahun 2023 yang mencapai 8.202 orang yang kemungkinan bisa disebabkan perkembangan

tekhnologi yang pesat dan kemudahan akses informasi digital, selain itu rendahnya minat baca yang rendah juga berkontribusi pada penurunan kunjungan

Selain itu capaian kinerja yang mengalami peningkatan di tahun 2024 adalah jumlah Judul Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah. Dukungan sarana dan parasarana perpustakaan sangat mempengaruhi peningkatan indikator kinerja urusan perpustakaan.

Pada bidang Urusan Kearsipan, penerapan pengelolaan arsip secara baku menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020 sebesar 57,89 persen atau terdapat 16 OPD dari 45 OPD yang menerapkan arsip secara baku dan terus meningkat menjadi 84,45 persen pada tahun 2024 atau naik menjadi 38 OPD. Peningkatan tersebut belum diikuti oleh jumlah SDM yang memiliki kompetensi pengelola kearsipan, dimana selama tahun 2020 – 2024 baru 1 orang yang memiliki kompotensi kearsipan sehingga peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan perlu menjadi perhatian pada tahun-tahun mendatang. sedangkan pelestarian naskah kuno daerah selama tahun 2020-2024 menunjukkan trend peningkatan dari 40 persen tahun 2020 menjadi 80 persen pada tahun 2024. Secara lengkap capaian kinerja pelayan kearsipan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.76
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengelolaan arsip secara baku	%	57,89	78,95	78,95	84,45	84,45
2	Jumlah SDM pengelola kearsipan	Org	0	0	1	1	1
3	Persentase naskah kuno daerah yang lestari dan terselamatkan	%	60	80	80	80	80

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Buton Tahun 2020-2024

Pada capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.77
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja
	Urusan Perpustakaan		
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	64,92/2
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	62,71/ 1,685
	Urusan Kearsipan		
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	%	50
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	0

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Buton Tahun 2024

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

(1) Urusan Kelautan dan Perikanan

Potensi dari sector perikanan yang ada di Kabupaten Buton adalah perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Secara umum capaian kinerja sektor perikanan menunjukkan peningkatan. Produksi perikanan tangkap dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 26.231 ton, namun ditahun 2022 meningkat menjadi 28.341 ton, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 15.380 ton dan di tahun 2024 kembaili naik menjadi 19.317 ton, Demikian juga produksi perikanan budidaya fluktuatif yang cenderung meningkat, pada tahun 2020 sebesar 3,738 ton, kemudian di tahun 2023 terus mengalami penurunan produksi hingga mencapai 1.789 ton., namun ditahun 2024 kembali meningkat sebesar 1908,86 ton

Pada tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Buton selama tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2020 tingkat konsumsi ikan sebesar 76,88 kg/perkapita, tahun 2021 mencapai 78,42, tahun 2022 mencapai 80,59 namun pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 76 kg/perkapita dan di tahun 2024 meningkat Kembali sebesar 80,5

kg/perkapita . Capaian pada urusan perikanan dapat dilihat pada beberapa indikator kinerja urusan dan indikator kinerja kunci berikut :

Tabel 2.78
Capaian Kinerja Urusan dan Indikator Kinerja Kunci Bidang Perikanan Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi perikanan tangkap	Ton	26,231	26.465,27	28,341	15.380	19.317
2	Produksi perikanan budidaya	Ton	3,738	4.096	4.176	1.789	1908,86
3	Konsumsi ikan Daerah	Kg/Perkapita	76,88	78,42	80,59	75,88	80,5
4	Pendapatan nelayan	Rp	3.120.000	2.958.000	3.050.000	3.090.000	3.073.000
5	Pendapatan pembudidaya	Rp	3.065.000	2.900.000	2 947.000	3.000.000	2.169.000
6	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	2.346	1.513	1.891	2.963	2.787

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Buton Tahun 2020-2024

(2) Urusan Pariwisata

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat Kabupaten Buton bahkan bagi negara sekalipun, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/segi yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja.

Beberapa event promosi pariwisata telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dalam upaya mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Buton. Namun ada beberapa event yang tidak dapat terlaksana beberapa tahun terakhir sebagai dampak dari pandemi covid-19. Adapun event-event promosi yang telah dilaksanakan diantaranya : (i) Festival budaya tua (2018-2019); (ii) Deep extreme (2018-2019); (iii) Gebyar wisata dan budaya nusantara (2018-2019); (iv) Halo sultra (2018-2019, 2021); (v) HUT TMII (2018-2019); (vi) Wakatobi wafe (2018-2019).

Sementara itu dalam menunjang sektor pariwisata daerah, selama kurun waktu 2020-2024 telah banyak terbentuk desa wisata yang menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 20 desa wisata pada tahun 2020 meningkat menjadi 35 desa wisata di tahun 2024 Demikian pula dengan kelompok sadar wisata yang meningkat dari 15 kelompok di tahun 2020 menjadi 35 kelompok di tahun 2024

Kabupaten Buton saat ini telah masuk menjadi salah satu destinasi pariwisata nasional karena terdapat beberapa obyek wisata unggulan baik wisata budaya maupun wisata alam. Adapun capaian kinerja pariwisata berdasarkan pengukuran dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.79
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kunjungan wisata	Org	49.392	60.146	53.806	57.495	61.850
2	Wisatawan nusantara	Org	49.347	60.142	53.763	57.258	15.717
3	Wisatawan mancanegara	Org	45	4	620	237	153
4	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Jam	24	5	10	0	0
5	Persentase destinasi pariwisata unggulan yang dikelola	%	60	79	100	48,39	40
6	Persentase promosi budaya untuk mendorong pariwisata melalui website, media cetak dan elektronik	%	83,33	50,00	88,89	88,89	100
7	Persentase kelompok sadar wisata yang dibina	%	53,33	60,00	80	10	10
8	PAD sektor pariwisata	Rp Juta	42,986	90.621	153,31	335,79	444,79
9	Jumlah kawasan wisata yang dibenahi dan dikembangkan	Unit	2	3	3	3	3
10	Jumlah desa wisata	Desa	16	16	25	31	35
11	Jumlah kelompok sadar wisata	Klpk	15	15	25	31	35

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Buton Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024 juga dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang pariwisata sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.80
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata
Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja
1	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Orang	15717
2	Rasio PDB Pariwisata	%	0.12
4	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	29,75
5	Tingkat hunian akomodasi	%	6,92
7	Kontribusi sektor wisata terhadap PAD	%	0,95

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Buton Tahun 2024

Pada tabel di atas menunjukkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dan PDB Kabupaten Buton tahun 2024 masih sangat rendah dibawah 1 persen. Olehnya itu perlu optimalisasi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Buton secara terintegrasi, mengingat posisi strategis wilayah Kabupaten Buton sebagai penyangga kawasan strategis pariwisata nasional Wakatobi, sehingga diharapkan pengembangan pariwisata di Kab. Wakatobi akan berdampak pada pariwisata Kab. Buton dan memberi multiplier effect bagi perekonomian daerah.

(3) Urusan Pertanian

Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar bagi PDRB di Kabupaten Buton. Sebagian besar penduduk Kabupaten Buton bermata pencaharian sebagai petani. Produksi pertanian Kabupaten Buton dalam kurun waktu 2020 – 2024 fluktuatif yang cenderung menurun, pada tahun 2020 sebesar 22.168 ton menurun menjadi 14.769 ton pada tahun 2024. Penurunan produksi pertanian diakibatkan terjadinya el nino dan adanya perubahan musim dan cuaca, serta serangan hama dan penyakit tanaman. Namun produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal menunjukkan trend peningkatan, pada tahun 2020 sebesar 9,67 ton/ha meningkat menjadi 36,61 ton/ha pada tahun 2024

Secara rinci capaian indikator urusan pertanian Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi pertanian	Ton	22.168	11.704	15.312	14.769	14.769
2	Produksi perkebunan	Ton	2.494	1.823	1.439	2.566	2.566
3	Produtivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya ton per hektar	Ton	9,67	16,3	8,08	36,61	36,61
4	Produksi tanaman pangan :						
	- Padi sawah	Ton	6.419	7.578	5.852	6.919	6.041
	- Padi ladang	Ton	4,567	4.567	4,567		
	- Jagung	Ton	2,751	2.666	1.047,2	1.628	1.494
	- Kedelai	Ton	39	28	44.05	52	57
	- Kacang tanah	Ton	195	89	44.37	52	80
	- Kacang hijau	Ton	89	27	18.40	30	35
	- Ubi kayu	Ton	8,544	6,587	5.779	4.793	4.210
	- Ubi jalar	Ton	1.377	2,170	918.45	786	788,14
	- Cabe	Ton	218	665	131,1	154,19	148,809
	- Bawang merah	Ton	42.30	71,4	38,7	10,83	6,366
5	Produksi perkebunan:	Ton					
	- Kakao	Ton	1,74	1.76	6.10	19,45	40,85
	- Jambu mete	Ton	1,472	3.31	4.60	1.005,03	1.005,028
	- Kelapa	Ton	1.021	1.818	1.428	1.472	2.993,48
	Populasi ternak :	Ekor					
	- Sapi	Ekor	12.933	13.591	14,037	116.259	5.357
	- Kambing	Ekor	11,900	12.657	16,431	13.578	4.690
	- Babi	Ekor	162	379	477	523	93
	- Ayam buras	Ekor	360,504	380.781	1,080	532.686	53.268
	- Ayam ras pedaging	Ekor	15,800	17.450	19,100	19.340	7.492
	- Itik/bebek	Ekor	13.649	14.137	14,575	16.975	1.084
6	Produksi daging ternak :	Kg			132,100		
	- Produksi daging ternak sapi	Kg	81,472	81.592	81,700	116.259	71.547
	- Produksi daging kambing	Kg	10,839	10.978	11,000	13.578	4.593
	- Produksi	Kg	1,671	1.890	2,000	7.200	674

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	daging babi						
	- Produksi daging ayam ras pedaging	Kg	21,213	24.026	24,500	26.897	2.106
	- Produksi daging itik/bebek	Kg	7,856	12.984	12,990	13.331	-
7	Persentase status kesehatan ternak	%	100	99,50	100	100	100
8	Rasio jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan pemerintah	%	35	35,12	40	11	
9	Rasio jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian	%	40	40,32	35	11	
10	Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	%	15	15	45	30	47
11	Rasio jumlah penyuluh pertanian terhadap jumlah kelompok tani	%	7	6,7	5,04	9,7	5,04
12	Rasio produk pertanian primer yang dipasarkan	%	20	20	65	50	
13	Terbangunnya jalan usaha tani mendukung tanaman pangan	Km	9,273	9,658	6,935	4,123	
14	Rehabilitasi JUT	Km	0	2	1	1,600	1,725
15	Jalan produksi mendukung perkebunan	Km	0	0	0	10,450	
16	Irigasi air yanah dangkal	Unit	0	10	0	5	

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
17	Dam parit	Unit	0	9	0	0	
18	Embung	Unit	0	1	0	2	
19	Alsintan	Unit	10	6	14	5	

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Buton Tahun 2020 – 2024

Pada capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang pertanian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.82
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian
Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton	36,61
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	100
3	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	100
4	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	Ha	
5	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	%	100
6	Jumlah Produksi Padi	Ton	6.041
7	Jumlah Produksi Kedelai	Ton	57
8	Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)	Ton	4.998
9	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Kg	97.323

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Buton Tahun 2024

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengelolaan sektor pertanian sebagai salah satu sektor unggulan daerah belum memberikan hasil yang maksimal. Hal ini tergambar dari capaian indikator kinerja urusan pertanian, sehingga diperlukan adanya optimalisasi pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas melalui intervensi program dan kegiatan yang saling terintegrasi.

(4) Urusan Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.

Tabel 2.83
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan	Juta Rp	496.604,7	532.027,4	619.649,4	697.711,6	819.850,1
2	Jumlah pasar	Unit	23	23	32	47	47

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka bila dilihat dari nilai dan kontribusi sektor perdagangan terhadap struktur PDRB ADHB Kabupaten Buton selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dari 496.604,7 juta rupiah pada tahun 2020 meningkat menjadi 819.850,1 juta rupiah di tahun 2024. Hal ini menunjukkan kegiatan perekonomian di daerah terus bergerak maju dan mulai munculnya usaha-usaha perdagangan baru, seiring dengan meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan berupa pasar yang tersebar di 7 wilayah kecamatan. Dimana pada tahun 2020 jumlah pasar sebanyak 23, dan naik menjadi 47 pasar di tahun 2024, terdiri dari pasar umum sebanyak 32 unit dan pasar ikan sebanyak 15 unit.

Adapun capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang perdagangan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.84
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan
Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesui dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	23,56
2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	73,42

Sumber : Dinas Perdagangan Kab. Buton Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.84 menunjukkan tingkat persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan baru mencapai 23,56 persen. Hal ini menuntut adanya upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan dan kemudahan terhadap layanan perizinan bagi pelaku-pelaku usaha didaerah

dengan tetap memperhatikan syarat-syarat teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dengan persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang capaiannya cukup tinggi yakni sebesar 73,42 persen.

(5) Urusan Perindustrian

Urusan perindustrian merupakan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan urusan pihan tersebut dapat diukur dari beberapa indikator yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.85
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Industri	Juta Rp	94.504,2	101.859,9	114.860,2	104.216,8	132.419,7
2	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	2,48	2,52	2,50	2,56	2,2
3	Jumlah industri inti pengolahan khas daerah	Industri	88	306	658	855	972
4	Pertumbuhan industri	%	20.17	7,19	11,27	3,02	18,62
5	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	2.61	7,45	8,55	8,55	11,62
6	Jumlah IKM	IKM	2,099	1.073	1.152	1.230	1.463
7	Tenaga kerja industri	Org	3.648	3.764	2.347	2.494	3,994
8	Nilai investasi industri	(000 Rp)	1,331,155	1.475.155.000	13.265.275.000	15.487.275.000	105.141.599.630
9	Nilai produksi industri	(000 Rp)	13.738.905,5	20.564.600.000	8.573.598.000	8.646.598.000	188.885.530.000
10	Jumlah sentra-sentra industri	Unit	1	1	1	0	0
11	Persentase jumlah IKM yang dibina	%	5.47	2,0	96,81	96,81	80

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024;
Dinas Perindustrian Kab. Buton Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel 2.85 di atas menunjukkan nilai persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap struktur PDRB Kabupaten Buton selama beberapa tahun terakhir menunjukkan trend yang fluktuatif namun ditahun 2024 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2019 sebesar 2,44 Persen meningkat hingga tahun 2021 sebesar 2,52 persen, namun pada tahun 2022 mengalami perlambatan, dan meningkat kembali pada tahun 2023 sebesar 2,56 persen, namun di tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 2,2 persen, jumlah industri kecil menengah meningkat sebanyak 1.463 dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebanyak 1.230 di tahun 2023. Peningkatan ini tidak telepas dari upaya pemerintah melalui dinas teknis untuk terus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok IKM yang ada di Kabupaten Buton. Adapun capaian kinerja tahun 2024 yang diukur dengan indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.86
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian
Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Capaian Kinerja
1	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pengembangan industri dalam RIPIN yang di tetapkan dalam RPIP	%	100	100
2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	97
3	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Orang	2.556	3.994
4	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rupiah	15.874.456.875	10.514.159.963
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0
6	Tersedianya informasi industri	%	85	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Capaian Kinerja
	secara lengkap dan terkini			
7	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/ Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri	%	1,38	1,57

Sumber : Dinas Perindustrian Kab. Buton Tahun 2024

(6) Urusan Transmigrasi

Kinerja urusan transmigrasi dapat dilihat dari indikator jumlah kawasan transmigrasi yang selama tahun 2020-2024 sebanyak 1 (satu) kawasan dan jumlah KK transmigrasi selama tahun 2020-2024 berjumlah 170 (seratus tujuh puluh) KK, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.87
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kawasan transmigrasi	Unit	1	1	1	1	1
2	Jumlah KK transmigrasi	KK	170	170	170	170	170

Sumber : Dinas Transmigrasi Kab. Buton Tahun 2020 - 2024

Capaian kinerja tahun 2024 juga diukur dengan indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang transmigrasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.88
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Transmigrasi
Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kwsn	1	1
2	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Kwsn	1	1
3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	SP	1	1

Sumber : Dinas Transmigrasi Kab. Buton Tahun 2024

2.1.3.4. Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan

Urusan perencanaan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan;
b. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten untuk terarahnya perencanaan pembangunan daerah;
d. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dengan pihak swasta dan luar daerah;
e. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah;
f. Pengevaluasian dan Pengkajian serta perumusan hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
g. Pengkoordinasian data dan informasi pembangunan daerah;
h. Penyeleggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga;
i. Pengkoordinasian, evaluasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan, urusan bersama dan dekonsentrasi serta sumber-sumber pembiayaan lainnya;
j. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah;
k. Penandatanganan surat/naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenagannya; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan amanat

kedua undang-undang tersebut, pemerintah Kabupaten Buton menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Pada tahun 2024 setiap daerah menyusun dokumen RPJPD 2025-2045 dan dokumen RPJMD 2025-2029. Penyusunan RPJPD Kabupaten Buton tahun 2025-2045 telah selesai. Saat ini Pemerintah Kabupaten Buton juga sedang menyusun RPJMD 2025-2029. Sedangkan dokumen KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD telah disusun pada tahun 2023.

Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan :

Tabel 2.89
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/ Tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen RPJMD Teknokratik 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/ Tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/ Tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BAPPEDA Kab. Buton Tahun 2020 s/d 2024

2. Urusan Keuangan

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Buton tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel berikut ini :

Tabel 2.90
Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PAD yang dihasilkan	M Rp.	32,59	37,37	36,38	36,84	36,84
2	Persentase peningkatan proporsi PAD dibandingkan total pendapatan	%	4,10	4,45	7,28	5,03	5,03

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase kenaikan PAD	%	12,35	14,57	-2,64	1,25	
4	Opini BPK terhadap laporan keuangan	opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Persentase SILPA terhadap APBD	%	6,83	6,26	13,86	14,05	6,56
6	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	93,88	93,61	18,76	24,18	
7	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	87,69	89,45	10	16,38	
8	Rasio efisiensi belanja terhadap APBD	%	69,56	8,48	10,72	86	93
9	Penetapan APBD	Tepat Wkt/ Tdk Tepat Wkt	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : BAPENDA dan BKAD Kab. Buton Tahun 2020 - 2024

Pada pengukuran capaian kinerja indikator kunci urusan perencanaan dan keuangan tahun 2024 dapat dilihat berikut :

Tabel 2.91
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Buton Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja
1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	13,1	16
2	Rasio PAD	%	119	5
3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer espenditures)	%	75,5	64
4	Opini laporan keuangan	Opini	WTP	100

Sumber : BKAD Kab. Buton Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan masih cukup besar dimana target yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Buton hanya sebesar 13,1 persen namun capaian berada di 16 persen terlihat bahwa tingkat ketergantungan pada anggaran transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi. Hal ini tergambar dari rasio PAD yang relative masih sangat rendah sebesar 5 persen saja, Hal ini sekaligus

menggambarkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu perlu upaya pemerintah untuk terus menggali sumber-sumber PAD yang ada dan mempercepat implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat menuntut suatu daerah untuk memiliki keunggulan posisional daerah. Keunggulan ini sangat ditentukan oleh adanya penguatan daya saing daerah. Dengan begitu, diperlukan penguatan daya saing yang mampu mengakselerasi pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Guna memberikan gambaran tentang daya saing daerah, akan disajikan analisis dan identifikasi terkait kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/ infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat digambarkan dari peranan sektor-sektor unggulan dalam menopang perekonomian daerah. Sesuai potensi wilayah, Kabupaten Buton memiliki sektor unggulan yang menjadi core bisnis dalam perekonomian daerah, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, perikanan. Peranan sektor-sektor ini mampu menggerakan sektor-sektor ekonomi lainnya. Hal ini tergambar dari struktur perekonomian Kabupaten Buton yang selama lima tahun terakhir didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, yaitu pertambangan dan penggalian; pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran disusul dengan lapangan usaha reparasi mobil, dan sepeda motor; administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan social; serta konstruksi dan jasa pendidikan.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Buton tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 34,55 persen. Pertumbuhan ekonomi pada kategori pertambangan dan penggalian mengalami fluktuasi selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya lapangan usaha sector pertanian, kehutanan dan perikanan di tahun 2024 sebesar 21,66 persen. Peranan terbesar ketiga didukung oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,48 persen. Berikutnya lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial sebesar 10,02 persen. Kemudian lapangan usaha konstruksi, dan lapangan usaha jasa

pendidikan sebesar 6,14 persen. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 6 persen. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Buton.

Tabel 2.92
Peranan PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 s/d Tahun 2024

Lapangan Usaha	2020	2021*	2022**	2023**	2024**
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	20,17	19,96	20,66	20,34	21,66
Pertambangan & Penggalian	38,76	38,74	39,92	41,34	34,55
Industri Pengolahan	2,48	2,52	2,50	2,06	2,50
Pengadaan Listrik& Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,42	0,41	0,37	0,37	0,37
Konstruksi	6,40	6,54	5,75	5,19	6,14
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	12,75	13,18	13,49	13,78	15,48
Transportasi & Pergudangan	0,81	0,79	0,82	0,83	0,89
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12
Informasi & Komunikasi	0,29	0,28	0,27	0,25	0,28
Jasa Keuangan & Asuransi	0,66	0,72	0,71	0,71	0,68
Real Estate	0,51	0,48	0,46	0,44	0,43
Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	9,69	9,33	8,20	8,24	10,02
Jasa Pendidikan	5,42	5,40	5,37	5,32	5,43
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,88	0,90	0,84	0,79	0,80
Jasa Lainnya	0,57	0,56	0,56	0,60	0,59
PDRB	100	100	100	100	100

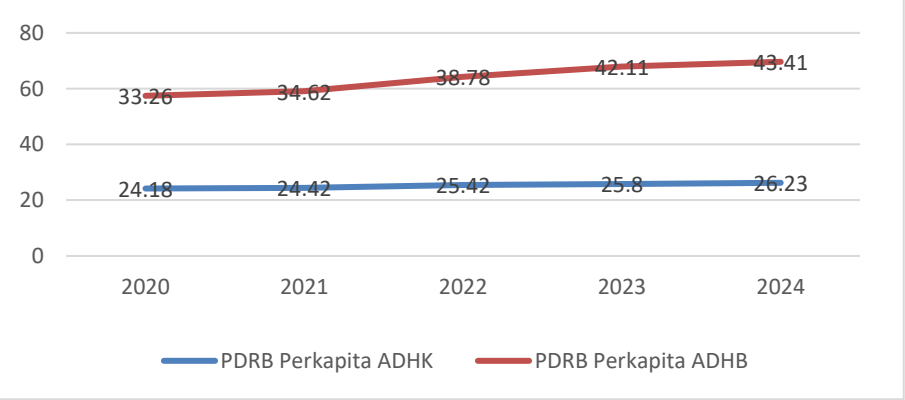
Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024
*Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara*

Indkator lain yang dapat menggambarkan kemampuan ekonomi daerah adalah PDRB per kapita yang menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi

sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita Kabupaten Buton dalam kurun waktu 2020 hingga tahun 2024 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 33,26 juta rupiah, secara terus menerus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 sebesar 43,41 juta rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada gmbar di bawah ini :

Gambar 2.22
Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d 2024



Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab Buton Tahun 2024

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur memiliki peran sentral dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini bukan sekadar jaringan jalan, jembatan, listrik, air bersih, atau telekomunikasi, tetapi juga fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perkembangan yang berkelanjutan. Peran infrastruktur dalam pembangunan daerah tidak dapat diabaikan. Infrastruktur yang kuat dan berkualitas memberikan pondasi yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dengan mengukur indeks infrastruktur wilayah pada tahun 2024 sebesar 29,26 persen. Selain itu analisis fasilitas wilayah/infrastruktur juga dilakukan terhadap indikator-indikator : jalan. perumahan, irigasi dan perhubungan.

Tabel 2.93
Kondisi Infrastruktur Jalan, Perumahan, Irigasi dan Perhubungan
Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
A	**Jalan**						
1	- Kondisi Baik	Km	169,080	186,879	202,99	203,99	219,765
2	- Kondisi Rusak Sedang	Km	35,120	34,385	32,11	32,12	29,16
3	- Kondisi Rusak Ringan	Km	9,890	62,67	54,07	54,07	17,6
4	- Rusak Berat	Km	268,180	198,32	193,1	192,10	215,75
5	Persentase Rumah Tangga Pengguna air minum	%	48,31	56,14	65,13	70,90	76,56
B	**Perumahan**						
1	Persentase RT pengguna listrik	%	87,30	83,99	85,60	86,34	88,50
2	Persentase rumah layak huni	%	65,88	69,18	69,97	71,00	70,39
3	Persentase rumah tidak layak huni	%	34,12	30,82	30,03	28,99	29,61
C	**Irigasi**						
1	Jaringan irigasi primer	M	5,456.7	5,456.7	5,456.7	5,456.7	5,456.7
2	Jaringan sekunder	M	29,342	29,342	29,342	29,342	29,342
3	Jaringan tersier	M	18,120.3	18,120.3	18,120.3	18,120.3	18,120.3
4	Luas irigasi kabupaten	Ha	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197
D	**Perhubungan**						
1	Jumlah pelabuhan rakyat	Unit	20	20	20	20	20
2	Jumlah pelabuhan penyebrangan	Unit	1	1	1	1	1
3	Jumlah pelabuhan lokal	Unit	1	1	1	1	1
4	Jumlah pelabuhan regional	Unit	1	1	1	1	1
5	Jumlah terminal type B	Unit	-	-	1	1	1

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

- **Perizinan**

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perizinan

usaha. Pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton terus berupaya memperbaiki sistem pelayanan perizinan dengan tujuan dalam rangka memberikan kemudahan-kemudahan bagi calon investor agar dapat mendukung iklim usaha yang ada di daerah. Berikut capaian pelayanan perizinan dan realisasi investasi di Kabupaten Buton :

Tabel 2.94
Capaian Indikator Pelayanan Perizinan Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Lama proses perizinan	Hari	2	1	1	1	1
2	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda	1	1	1	2	1

Sumber: Dinas PM dan PTSP Kab. Buton Tahun 2020 - 2024

Bila dilihat dari tingkat realisasi investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Buton mengalami penurunan selama periode tahun 2021-2024 sebagaimana pada table berikut :

Tabel 2.95
Capaian Indikator Pelayanan Perizinan Kabupaten Buton
Tahun 2021 s/d Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah realisasi investasi nasional (PMDN/PMA)	341.071.000.000	262.121.531.722	106.574.470.652	133.015.679.126

Sumber: Dinas PM dan PTSP Kab. Buton Tahun 2021-2024

- **Angka Kriminalitas**

Angka kriminalitas merupakan cerminan kondisi keamanan dan ketertiban di suatu daerah. Semakin rendah angka kriminalitas suatu wilayah maka akan semakin baik iklim investasinya. Angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Buton menunjukkan tren penurunan secara konsisten selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah kasus kriminalitas yang berhasil ditangani tercatat sebanyak 59 kasus. Jumlah ini terus menurun menjadi 49 kasus pada tahun 2021, kemudian 48 kasus di tahun 2022, 47 kasus pada 2023, dan kembali turun menjadi 46 kasus pada tahun 2024. Penurunan

ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat, serta efektivitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Buton. Meskipun demikian, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak kriminal tetap perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas sosial dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

- **Kualitas Tenaga Kerja**

Salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk bekerja adalah dengan melihat tingkat pendidikan yang ditamatkan. Dilihat dari faktor tersebut, tingkat pendidikan penduduk bekerja di Kabupaten Buton pada tahun 2024 sebagian besar masih memiliki ijazah SD ke bawah. Hal ini juga dapat menggambarkan bahwa penduduk dengan pendidikan rendah lebih mudah masuk ke pasar kerja dikarenakan kebanyakan mereka cenderung tidak memilih-milih jenis pekerjaan dan bersedia masuk ke pasar kerja informal dibanding mereka yang berpendidikan menengah atau tinggi.

Tabel 2.96
Penduduk 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2024

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
1.	SD/MI	19.337	302	19.639	7.819
2.	SMP/MTs	8.278	0	8.278	7.906
3.	SMA/SMK/MA	19.225	1.222	20.447	9.295
4.	Perguruan Tinggi	11.202	240	11.442	1.518
	Jumlah	58.042	1.764	59.806	26.538

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2025

Tercatat pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Buton mencapai 122.024 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,81 persen. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut di atas, maka komposisi kependudukan Kabupaten Buton terdiri atas 61.160 jiwa adalah wanita, dan 60.874 jiwa adalah laki laki, dan diketahui bahwa penduduk usia 0-14 tahun (36.529 jiwa atau 29,93 persen), usia produktif 15-64 tahun (78.642 jiwa atau 64,44 persen), serta hanya terdapat (6.853 jiwa atau 5,6 persen) usia diatas 65 tahun (usia lanjut).

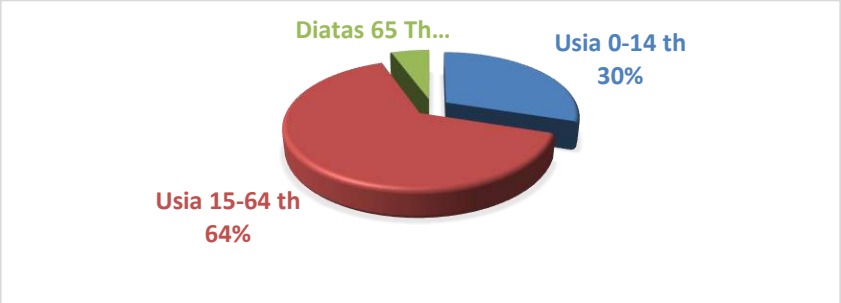
Sementara itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja di suatu daerah. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. TPAK merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Semakin tinggi nilai TPAK nya semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja didalam pasar kerja.

Tabel 2.97
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024

Kegiatan Utama	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Kerja	66.027	69.965	70.577	70.672	84.570	85.144
Angkatan Kerja	43.210	45.712	45.467	54.660	57.920	59.806
- *Bekerja*	42.654	43.528	43.313	53.023	56.483	58.042
- *Pengangguran*	556	2.184	2.154	1.637	1.437	1.764
Bukan Angkatan Kerja	22.817	24.253	15.110	16.012	26.650	25.338
- *Sekolah*	5.712	5.820	4.760	3.824	7.366	3.060
- *Mengurus Rumah Tangga*	14.392	14.463	17.000	10.165	15.661	13.945
- *Lainnya*	2.713	3.970	3.350	2.023	3.623	3.533
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64,44	65,34	64,42	77,34	68,49	69,26
Tingkat Pengangguran (%)	1,29	4.78	4,74	2,99	2,48	2,95

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2.23
Komposisi Penduduk Kabupaten Buton Berdasarkan Kelompok Usia pada Tahun 2024



Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan Gambar di atas, persentase jumlah penduduk usia produktif sangat mendominasi jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Buton, maka di daerah ini tersedia cukup besar jumlah tenaga kerja sebagai modal bergeraknya roda pembangunan daerah. Keadaan tenaga kerja ini akan terus mengalami perubahan

seiring dengan perubahan demografi, dimana keadaan tenaga kerja di Kabupaten Buton pada tahun 2024 terdapat 59.806 jiwa angkatan kerja yang terdiri dari 58.042 orang sebagai bekerja dari berbagai tingkatan pendidikan dan 1.764 orang menganggur.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Hasil evaluasi ini merupakan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing perangkat daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Evaluasi yang dilakukan meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian indikator kinerja program tahun lalu sebagaimana terlampir.

Sedangkan capaian indikator kinerja utama sebagaimana termuat dalam dokumen RPD tahun 2023-2026 untuk pelaksanaan tahun ketiga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.98
Capaian Kinerja Indikator Sasaran
Tahun 2024

Sasaran 1					
Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	3,8	2,83	74,47
2	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian	%	0,2	-5,73	-2,865
2	Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	7,85	6,86	87,38
Sasaran 2					
Terkelolanya SDA berwawasan lingkungan					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks kualitas air	Nilai	53,45	62,5	116,93
2	Indeks kualitas udara	Nilai	87,48	94,99	108,58
3	Indeks kualitas tutupan tanah	Nilai	81,99	81,89	99,87
Sasaran 3					
Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kesehatan					

1	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,79	13,89	100,72
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,53	8,63	101,17
3	Angka harapan hidup	Tahun	69,58	70,47	101,27
Sasaran 4					
Menurunnya angka kemiskinan daerah					
1	Angka kemiskinan	%	12,82	13,99	87,59
2	Pendapatan perkapita	Juta rupiah	28,90	43,41	150,20
3	Pengeluaran perkapita	Ribu rupiah	7.375	8.401	113,91
4	Gini ratio	Nilai	0,33	0,318	100,60
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,97	2,95	125,69
Sasaran 5					
Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Kategori kabupaten layak anak	Nilai(Kategori)	350,00	745	212,85
2	Indeks pembangunan gender	%	81,22	82,07	101,04
3	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	%	98,51	10,71	10,87
4	Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional	%	100	8,82	8,82
Sasaran 6					
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai (Kategori)	71	63,52	89,43
2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100
3	Indeks kepuasan masyarakat	%	25	91,10	364,4
Sasaran 7					
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang)	%	83,13	72,42	87,11
Sasaran 8					
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	62,65	100	166
Sasaran 9					
: Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase penyelesaian tindak kejahatan	%	57,86	45,74	79,05
	Persentase ormas aktif	%	100	52,63	52,63
Sasaran 10					
: Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata					

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks infrastrukur wilayah	%	30,48	29,26	95,99
Sasaran 11					
Meningkatnya ketersediaan kwasan ruang terbuka hijau					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Rasio elektrifikasi	%	94	98,01	104,26

Sumber : LAKIP Kab. Buton Tahun 2024 dan LAKIP OPD Tahun 2024

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Buton berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Buton. Permasalahan ini nantinya akan menjadi bagian dari bahan untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan khususnya program dan kegiatan pembangunan agar tepat sasaran.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buton pada tahun 2025 masih diperhadapkan pada berbagai permasalahan atau isu-isu strategis pada beberapa sektor, yang diperkirakan masih memberi pengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di tahun 2026. Oleh sebab itu, secara umum permasalahan pembangunan atau isu-isu strategis daerah Kabupaten Buton dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Transformasi Ekonomi Berbasis Hilirisasi

   Kabupaten Buton saat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan ekonomi yang memerlukan perhatian dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi daerah. Salah satu indikator yang menggambarkan kondisi ini adalah rendahnya LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Kabupaten Buton, yang menempatkannya pada peringkat terendah di antara Kabupaten/Kota di Pulau Buton pada tahun 2024.

   Selain itu, kontribusi PDRB Kabupaten Buton terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara hanya mencapai 2,79%, mencerminkan keterbatasan kontribusi daerah terhadap perekonomian provinsi. Meskipun demikian, Kabupaten Buton memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang cukup besar, yang seharusnya dapat dijadikan sebagai modal utama dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

   Potensi SDA yang dimiliki Kabupaten Buton, terutama di sektor perikanan, pertanian, dan kelautan, masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu hambatan utama

adalah terbatasnya infrastruktur pengolahan dan pemasaran yang dapat meningkatkan daya saing produk- produk lokal. Akibatnya, sebagian besar hasil alam yang diproduksi di Kabupaten Buton hanya dijual dalam bentuk mentah tanpa adanya proses hilirisasi yang dapat menambah nilai dan manfaat ekonomi yang lebih besar. Hal ini menyebabkan potensi ekonomi daerah tidak tergali secara optimal, sehingga berdampak pada terbatasnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kontribusi sektor pengolahan yang relatif rendah dan ketergantungan yang tinggi pada sektor ekstraktif, Kabupaten Buton menghadapi tantangan besar dalam menciptakan perekonomian yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, penguatan hilirisasi sektor-sektor unggulan daerah perlu menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton.

2. Belum Optimalnya Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola

   Kabupaten Buton menghadapi tantangan dalam upaya memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, yang tercermin dalam rendahnya skor Indeks Reformasi Birokrasi yang masih berada pada angka 54,6 dengan kategori CC pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi di daerah ini belum berjalan dengan optimal. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, reformasi birokrasi diharapkan dapat memperbaiki sistem pengelolaan administrasi publik, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas di semua level pemerintahan. Namun, realitas menunjukkan bahwa perbaikan yang diperlukan masih sangat mendalam, dengan indikator reformasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan dan praktik di lapangan.

   Selain itu, rendahnya capaian Indeks Inovasi Daerah yang hanya mencapai 44,29 pada tahun 2024 semakin memperburuk gambaran mengenai kelemahan birokrasi yang ada di Kabupaten Buton. Inovasi daerah berfungsi sebagai katalisator dalam mengoptimalkan berbagai potensi lokal dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Namun, dengan rendahnya indeks ini, Kabupaten Buton menghadapi kesulitan dalam mengembangkan kebijakan dan program yang dapat merespons perubahan dinamika sosial-ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Minimnya inovasi dalam pemerintahan juga berkontribusi pada terhambatnya pencapaian pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan efisien.

Salah satu penyebab utama dari belum optimalnya reformasi birokrasi dan inovasi di Kabupaten Buton adalah adanya hambatan struktural dalam sistem pemerintahan. Proses birokrasi yang belum sepenuhnya transparan dan efisien, serta kurangnya integrasi antara sektor-sektor terkait, mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Hal ini juga tercermin dalam kurangnya dorongan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam memanfaatkan teknologi dan inovasi yang ada untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Selain itu, kurangnya pengawasan dan evaluasi yang sistematis terhadap kinerja aparatur juga memperburuk kualitas tata kelola yang ada.

Tantangan lain yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berkompeten dalam bidang teknologi, manajemen, dan pemerintahan publik. Tanpa adanya pelatihan yang berkesinambungan serta dukungan dalam meningkatkan kualitas SDM di lingkungan pemerintahan, proses reformasi birokrasi tidak dapat berjalan efektif. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya daya saing Kabupaten Buton dalam menerapkan kebijakan berbasis teknologi dan informasi yang dapat mempermudah pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.

3. Belum optimalnya upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah

   Kabupaten Buton menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, yang sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam (SDA) yang dikelola di tingkat pusat. Meskipun memiliki potensi SDA yang melimpah, seperti sektor pertambangan, kelautan, dan pertanian, pengelolaan dan pemanfaatannya sangat bergantung pada kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembatasan dalam pengambilan dan pemanfaatan SDA ini mempengaruhi fleksibilitas daerah dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi secara optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menciptakan tantangan dalam memaksimalkan potensi yang ada untuk membiayai pembangunan daerah yang berkelanjutan.

   Selain itu, rendahnya tingkat inovasi dalam mengembangkan sektor pendapatan baru juga menjadi hambatan dalam mencapai kemandirian fiskal. Kabupaten Buton masih menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan industri pengolahan lokal atau sektor pariwisata berbasis potensi daerah yang dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD. Oleh karena itu, diperlukan dorongan untuk mengembangkan inovasi

yang dapat mengoptimalkan potensi lokal, menciptakan peluang ekonomi baru, dan memperkuat kapasitas daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskalnya. Tanpa adanya penguatan di sektor-sektor tersebut, Kabupaten Buton akan terus menghadapi kesulitan dalam mencapai kemandirian fiskal yang optimal untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan

4. Masih Kurangnya Pembangunan SDM yang Unggul

   Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul merupakan fondasi penting dalam mendorong kemajuan daerah. Namun, hingga tahun 2024, Kabupaten Buton masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek ini. Rata-rata lama sekolah (RLS) yang baru mencapai 8,63 tahun menempatkan Kabupaten Buton di peringkat ke-11 se-Sulawesi Tenggara, masih di bawah capaian provinsi. Begitu pula dengan angka harapan hidup (UHH) yang tercatat sebesar 68,67 tahun, berada di peringkat ke-14 dari seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut, dan jauh tertinggal dari capaian provinsi yang mencapai 71,67 tahun. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan hal serupa, dengan nilai 69,72 dan berada di peringkat ke-12 se-Sulawesi Tenggara.

   Tantangan ini diperkuat oleh struktur angkatan kerja yang sebagian besar masih didominasi oleh penduduk berpendidikan dasar atau bahkan tidak menyelesaikan pendidikan formal. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa mayoritas angkatan kerja di Kabupaten Buton hanya menamatkan pendidikan setingkat Sekolah Dasar ke bawah, termasuk yang tidak lulus atau tidak pernah mengenyam pendidikan. Meskipun angka melek huruf Kabupaten Buton tercatat sebesar 95,88% pada tahun 2023 dan berada di peringkat ke-8 se- Sultra, capaian ini masih sedikit di bawah rata-rata provinsi, yang menandakan perlunya upaya tambahan dalam meningkatkan kualitas literasi masyarakat secara menyeluruh.

   Untuk menghadapi persoalan ini, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam pembangunan SDM, baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan. Peningkatan kualitas pendidikan perlu didukung dengan pemerataan akses terhadap layanan pendidikan yang bermutu, penguatan kompetensi tenaga pengajar, serta perluasan program pelatihan dan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Di sisi lain, sektor kesehatan juga perlu ditingkatkan melalui penguatan layanan dasar dan edukasi masyarakat. Dengan penguatan kapasitas SDM yang berkelanjutan, Kabupaten Buton akan memiliki fondasi yang lebih kokoh dalam mengakselerasi pembangunan daerah secara lebih inklusif dan berdaya saing.

5. Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan Masyarakat Buton

Masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Buton menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi. Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga permasalahan pokok yang menjadi akar dari tingginya angka kemiskinan tersebut. Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya daya beli masyarakat

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Buton pada tahun 2024 tercatat sebesar 13,99 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebesar 11,21 persen. Capaian ini menempatkan Kabupaten Buton pada posisi ke-6 tertinggi dalam tingkat kemiskinan di provinsi, menandakan masih kuatnya persoalan kerentanan ekonomi di wilayah ini. Selain itu, tingkat pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Buton hanya mencapai Rp.8.401 ribu per tahun, menjadikannya sebagai daerah dengan pengeluaran terendah kelima di Sulawesi Tenggara. Rendahnya pengeluaran ini mencerminkan keterbatasan pendapatan rumah tangga yang berimbas pada kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan bergizi, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keterbatasan daya beli merupakan salah satu faktor yang memperkuat lingkaran kemiskinan di Kabupaten

Ketahanan pangan yang lemah dan ketergantungan terhadap pasokan luar daerah

Ketahanan pangan di Kabupaten Buton menunjukkan kondisi yang belum stabil. Pada tahun 2024, produksi beras lokal hanya mampu memenuhi sekitar 32 persen dari kebutuhan konsumsi masyarakat di wilayah tersebut. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi sendiri ini menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, yang berisiko meningkatkan ketidakstabilan harga dan ketersediaan bahan pangan, terutama di saat terjadi gangguan logistik. Lebih jauh lagi, pada tahun 2023, tercatat sekitar 15,63 persen desa di Kabupaten Buton dikategorikan sebagai desa rawan pangan, menandakan adanya ketimpangan akses terhadap bahan pangan antarwilayah. Lemahnya ketahanan pangan ini memperburuk kondisi kerentanan masyarakat miskin yang bergantung pada stabilitas pasokan bahan pangan untuk kebutuhan sehari-hari.

Struktur ekonomi yang belum produktif dan dominasi sektor informal Struktur ekonomi Kabupaten Buton masih didominasi oleh sektor informal, khususnya dari pertanian tanaman pangan dan perikanan tangkap tradisional. Sebagian besar penduduk miskin menggantungkan hidupnya pada sektor-sektor ini, yang produktivitasnya rendah dan sangat bergantung pada musim serta fluktuasi harga pasar. Di sektor perikanan,

sebagian besar hasil tangkapan dijual dalam bentuk mentah tanpa melalui proses pengolahan lanjutan yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi. Hal ini menyebabkan pendapatan masyarakat tetap rendah dan tidak stabil. Minimnya pengembangan industri berbasis lokal serta kurangnya diversifikasi sumber ekonomi mempersempit peluang mobilitas sosial ekonomi masyarakat, membuat mereka sulit keluar dari jebakan kemiskinan struktural yang telah berlangsung lama.

6. Ancaman Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup serta Potensi Kebencanaan yang Tinggi

   Ancaman degradasi lingkungan hidup dan tingginya potensi kebencanaan di Kabupaten Buton menjadi salah satu permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam arah pembangunan berkelanjutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Buton pada tahun 2023 tercatat sebesar 83,45, yang masih berada dalam kategori sedang, menunjukkan adanya tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Aktivitas ekonomi yang masih sangat bergantung pada sektor pertambangan, yang menyumbang kontribusi terbesar terhadap struktur PDRB daerah, berimplikasi pada kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air, degradasi tanah, serta peningkatan risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Hal ini menandakan bahwa aspek keberlanjutan lingkungan belum sepenuhnya menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah.

   Pengelolaan sampah dan limbah juga masih menjadi tantangan, di mana Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah baru mencapai 39,60% pada tahun 2023, dan persentase tempat pembuangan sampah per satuan penduduk berada pada angka 73,45%. Belum optimalnya penerapan Gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, memperburuk kondisi lingkungan dan menambah beban pada sistem pengelolaan bencana. Sementara itu, dari sisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), tercatat bahwa 22% indikator belum mencapai target dan 21% belum dilaksanakan, yang mengindikasikan perlunya penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi risiko bencana. Dalam konteks tersebut, Kabupaten Buton perlu mendorong transformasi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam tetapi juga mengedepankan prinsip keberlanjutan. Rehabilitasi lingkungan pasca-tambang, peningkatan kualitas pengelolaan sampah, serta perlindungan kawasan hutan dan pesisir merupakan langkah krusial yang perlu diakselerasi. Selain itu, penting untuk mendorong diversifikasi ekonomi daerah ke

sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan seperti pertanian berkelanjutan, perikanan tangkap dan budidaya yang bertanggung jawab, serta pengembangan ekowisata. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan kesiapsiagaan bencana akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem pembangunan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

7. Adanya ancaman penurunan implementasi nilai kebudayaan dalam kegiatan bermasyarakat di kalangan generasi muda

   Ancaman terhadap penurunan implementasi nilai-nilai kebudayaan di kalangan generasi muda Kabupaten Buton menjadi isu strategis yang perlu segera mendapatkan perhatian. Berdasarkan data, terjadi penurunan signifikan terhadap persentase pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya, dari 89,03% pada tahun 2020 menjadi hanya 4% pada tahun 2023. Penurunan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya upaya pelindungan warisan budaya, tetapi juga menunjukkan adanya potensi pudarnya identitas lokal yang selama ini menjadi bagian penting dari karakter masyarakat Buton. Minimnya pelestarian tersebut berpotensi memperlemah keterikatan generasi muda terhadap nilai-nilai tradisi, norma sosial, dan kekayaan budaya yang menjadi bagian dari jati diri daerah.

   Kondisi ini turut diperparah oleh indikator sosial lainnya, seperti rendahnya tingkat penyelesaian kejahatan yang hanya mencapai 48,37% di tahun 2023 menjadikan Kabupaten Buton sebagai peringkat kedua terbawah di Sulawesi Tenggara dalam hal ini. Hal ini mencerminkan belum optimalnya sistem sosial dan keamanan yang seharusnya menjadi ruang tumbuh bagi nilai- nilai budaya dan ketertiban di tengah masyarakat. Di sisi lain, turunnya persentase wirausaha muda dari 9% pada tahun 2023 menjadi 7% pada tahun 2024 juga menandakan adanya penurunan semangat inovasi dan kemandirian generasi muda, yang sesungguhnya dapat menjadi motor pelestarian budaya melalui pendekatan kreatif dan adaptif, seperti ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

   Upaya pelestarian nilai budaya perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui kebijakan pelindungan cagar budaya, tetapi juga melalui pendidikan karakter, revitalisasi tradisi, hingga pembinaan komunitas budaya dan ekonomi kreatif di kalangan pemuda. Pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan perlu memperkuat peran institusi pendidikan, sanggar seni, dan organisasi kepemudaan

sebagai ruang pewarisan nilai-nilai budaya yang produktif. Dengan pendekatan kolaboratif, transformasi nilai budaya lokal

8. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan

   Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Buton tercermin dari berbagai indikator fisik dan spasial, salah satunya adalah masih tingginya persentase jalan rusak berat yang mencapai 43,27% pada tahun 2024. Kondisi ini menghambat konektivitas antarwilayah serta distribusi pelayanan publik yang merata. Selain itu, hingga saat ini Kabupaten Buton belum memiliki wajah ibukota yang representatif di Pasarwajo. Sebagai pusat pemerintahan, Pasarwajo semestinya hadir sebagai wajah daerah yang mampu mencerminkan kemajuan pembangunan, tata kota yang rapi, serta mendukung aktivitas pemerintahan dan perekonomian lokal secara terintegrasi. Ketiadaan ruang kota yang terencana secara optimal di Pasarwajo juga berdampak pada rendahnya daya tarik investasi dan citra daerah.

   Di sisi lain, upaya perbaikan permukiman dan lingkungan hidup juga masih menemui tantangan. Penurunan kawasan kumuh pada tahun 2024 baru mencapai 5,34%, yang menunjukkan bahwa kualitas lingkungan permukiman belum mengalami perubahan signifikan. Bahkan, 28,99% rumah di Kabupaten Buton masih tergolong tidak layak huni pada tahun 2023, mencerminkan masih tingginya jumlah penduduk yang belum menikmati standar hunian yang memadai. Ketimpangan kualitas infrastruktur dasar ini turut mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, terutama pada wilayah-wilayah pinggiran dan pelosok desa.

   Maka dari itu, dibutuhkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya fokus pada pemerataan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek tata ruang, estetika kawasan, dan pelayanan publik yang inklusif. Penataan Pasarwajo sebagai ibukota daerah perlu didorong agar mampu menjadi pusat pertumbuhan baru yang terintegrasi, sekaligus memperkuat fungsi-fungsi strategis pemerintahan dan perekonomian. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam perencanaan infrastruktur yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan di Kabupaten Buton.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan selalu diiringi oleh permasalahan pembangunan baik permasalahan global maupun permasalahan khas di setiap daerah. Hal

tersebut menjadi perlu sebagai bahan untuk melakukan berbagai antisipasi maupun minimalisasi dampak negatif dari permasalahan pembangunan meskipun dalam realitanya permasalahan pembangunan terkadang tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu atau dua periode pembangunan saja.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah. Berdasarkan capaian kinerja dari setiap urusan pemerintahan konkuren pada gambaran umum kondisi daerah, terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.99
Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Buton

Pendidikan	Angka partisipasi sekolah semakin rendah di setiap kenaikan jenjang pendidikan
	Tingkat RLS rendah
	Ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan masih belum maksimal
	Belum optimalnya Standarisasi sekolah ramah anak, baik bangunan maupun tenaga pengajar
	Peserta didik kurang dapat menentukan minat dan bakatnya
	Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kualifikasi dan kompetensi
	Tata kelola kelembagaan belum optimal
	Belum adanya informasi dan transparansi terkait bantuan pendidikan
Kesehatan	Tingginya prevalensi stunting dan gizi buruk
	Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Balita
	Belum meratanya fasilitas dan pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat
	Belum optimalnya informasi dan promosi puskesmas ramah anak
	Kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan belum optimal
	Belum optimalnya standardisasi dan jaminan pelayanan kesehatan keluarga untuk menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu, khususnya masyarakat miskin
	Belum optimalnya Profesionalisme pengelolaan manajemen dan sistem informasi kesehatan
Pariwisata	Belum optimalnya sarana prasarana pendukung destinasi wisata yang berkelanjutan (sustainable tourism)
	Belum optimalnya pengembangan daya saing melalui potensi unggulan daerah
	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan

	destinasi wisata
	Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif pada potensi produk unggulan daerah
	Belum adanya wadah promosi produk unggulan daerah baik fisik maupun digital
	Belum optimalnya pengembangan pariwisata melalui potensi desa wisata (community based tourism)
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Masih rendahnya persentase koperasi aktif
	Belum optimalnya keaktifan dan pemenuhan regulasi koperasi
	Kurangnya pemasaran produk secara digital
	Masih kurangnya permodalan, kapasitas usaha, hingga pemasaran UMKM
	Belum optimalnya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat karena ketersediaan UKM dan IKM yang belum optimal
	Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan peran UMKM
Penanaman Modal Daerah	Belum optimalnya kondusivitas iklim investasi daerah
	Belum efektifnya fasilitas/insentif penanaman modal yang diberikan kepada pelaku usaha
	Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha berbasis IT
	Belum optimalnya pengendalian/pengawasan penanaman modal
	Belum Optimalnya Kualitas Layanan Publik kepada masyarakat melalui pemanfaatan mal pelayanan publik
	Masih rendahnya realisasi nilai investasi PMA/PMDN
Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya peningkatan kualitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan
	Tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan relatif rendah
	Pembatasan urusan perikanan yang dibatasi karena kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan provinsi
	Rendahnya hilirisasi produk perikanan sebagai peningkatan nilai tambah komoditas
	Maraknya aktivitas penangkapan ikan dengan cara-cara merusak (destructive fisihing) serta penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan
Pertanian	Belum optimalnya produktivitas pertanian
	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertanian
	Belum optimalnya mekanisasi pertanian dan peningkatan SDM pertanian
	Rendahnya hilirisasi produk pertanian dan perkebunan sebagai upaya peningkatan nilai tambah komoditas
	Belum adanya pengembangan pertanian berbasis pariwisata (agrowisata)

Perdagangan	Belum optimalnya pengelolaan pasar tradisional/pasar rakyat
	Belum optimalnya pengendalian harga dan barang kebutuhan pokok
	Masih terbatasnya jaringan pemasaran produk unggulan Buton ke tingkat regional, nasional maupun internasional
	Belum optumalnya pengawasan perdagangan dan peningkatan iklim usaha perdagangan
Perindustrian	Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industri berbasis produk unggulan daerah
	Pertambangan dalam perindustrian masih mendominasi, perlu diversifikasi
	Masih kurangnya produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standardisasi, tersertifikasi dan ijin resmi
	Keterbatasan sarana prasarana produksi produk potensi/unggulan daerah
	Terdapat ketimpangan segmentasi pasar aspal pada beberapa perusahaan. Terdapat industri yang tidak memiliki segmentasi pasar dan dibarengi perusahan yang memiliki keterbatasan produksi.
	Diperlukan perhatian pada industri mebel
	Industri pengolahan aspal belum dikembangkan secara optimal
	Pembinaan dan pemberdayaan kelompok industri kecil menengah yang belum optimal
Tenaga Kerja	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal untuk mengurangi angka pengangguran
	Belum optimalnya penangana konflik tenaga kerja yang mampu melibatkan mediator
	Belum optimalnya sistem informasi ketenagakerjaan
	Adanya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kualifikasi Dunia Usaha dan Dunia Industri
Transmigrasi	Belum memadainya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi
	Belum optimalnya penggunaan lahan untuk pelayanan transmigrasi
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembaruan data kependudukan
	Belum termanfaatkannya data kependudukan secara optimal baik oleh pemerintahan maupun masyarakat luas
Statistik	Minimnya ketersediaan data yang up to date sebagai bahan penyusunan perencanaan maupun monitoring evaluasi pembangunan daerah
	Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Buton
Kearsipan	Belum optimalnya layanan dan pengelolaan kearsipan di perangkat daerah
Persandian	Belum optimalnya jaringan keamanan data dan informasi pemerintahan

Sekretariat Daerah	Belum optimalnya sinergitas kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah
	Belum optimalnya penataan organisasi dan tata kelola sebagai implementasi reformasi birokrasi
	Terdapat permasalahan wewenang yang menjadi kendala potensi daerah seperti aspal dan perikanan.
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
Sekretariat DPRD	Belum optimalnya tata kelola kesekretariatan DPRD dalam meningkatkan capaian kinerja Anggota Dewan
	Minimnya sarana dan prasarana
Perencanaan Pembangunan	Belum optimalnya integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan
	Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Bappeda
	Belum optimalnya sinergitas antar perangkat daerah dan lintas sektor
Keuangan Daerah	Belum optimalnya kemandirian fiskal dalam membiayai pelaksanaan pembangunan
	Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan penganggaran, pengelolaan anggaran hingga evaluasi
	Belum optimalnya akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
Pendapatan	Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
	Belum maksimalnya penggalian potensi sebagai sumber pendapatan daerah
	Belum optimalnya sarana prasarana
Kepegawaian	Pengembangan karir ASN belum sepenuhnya menggunakan penilaian kinerja
	Penempatan pegawai belum sesuai kompetensi dan kualifikasi ASN
	Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan kualitas berbasis kebutuhan
Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan kompetensi fungsional dan manajerial ASN melalui pelatihan baik lintas OPD maupun struktural
Riset dan Inovasi	Belum optimalnya kualitas penelitian dan pengembangan berbasis inovasi dan IT
	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang ada
	Belum optimalnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
	Belum adanya perencanaan dalam inovasi pembangunan
Pengawasan	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
	Belum optimalnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Unsur Kewilayahan	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga

(Kecamatan)	keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
	Masih rendahnya kualitas lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan penguatan warga, khususnya kelompok rentan
	Belum optimalnya pelayanan publik, administrasi kependudukan, perijinan, hingga ketersediaan data dan informasi level kecamatan dan desa/kelurahan
	Belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam peningkatan ekonomi makro Kabupaten Buton
Kepemudaan dan Olahraga	Minimnya pembinaan dalam meningkatkan daya saing pemuda dalam pembangunan
	Masih minimnya prestasi keolahragaan, khususnya pada tingkat provinsi atau nasional
	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dan keolahragaan
	Belum adanya sentra keolahragaan
	Belum optimalnya instrumen pengukuran kinerja kepemudaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya peran, partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, khususnya dalam mendukung ekonomi keluarga
	Masih terdapat pernikahan dini dan kekerasan seksual
	Terdapat kasus bullying di lingkungan pendidikan
	Belum optimalnya wadah untuk mendukung kelompok gender yang terpinggirkan seperti ibu-ibu yang tidak bekerja
	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk belum optimalnya pemenuhan hak anak
	Belum optimalnya implementasi kabupaten layak anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya program pengendalian penduduk dan KB di masyarakat
	Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas kesejahteraan keluarga
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat
	Kurangnya kolaborasi antar pemerintah daesa
	Belum adanya payung hukum terkait hukum adat
	Belum optimalnya upaya kemandirian desa melalui kegiatan ekonomi yang produktif
Perpustakaan	Masih rendahnya minat baca masyarakat
	Minimnya ketersediaan perpustakaan desa
	Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan perpustakaan daerah
	Minimnya sarana prasarana perpustakaan
Sosial	Pelayanan rehabilitasi sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih kurang, khususnya masyarakat miskin
	Belum optimalnya cakupan perlindungan dan jaminan

	sosial PMKS/PPKS
	Belum optimalnya data sasaran kemiskinan
Pangan	Masih adanya daerah rawan pangan
	Minimnya sarana prasarana penyimpanan cadangan pangan
	Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi seimbang dan aman
Lingkungan Hidup	Potensi Kerusakan Lingkungan sebagai dampak eksploitasi Sumber Daya Alam yang berlebihan dan tidak sesuai prosedur
	Belum adanya dorongan lebih lanjut terkait inovasi lingkungan melalui perencanaan yang tepat
	Belum optimalnya penetapan regulasi terkait kebijakan pengelolaan perlindungan lingkungan hidup
	Kualitas dan kuantitas penanganan sampah dan sanitasi yang belum optimal
	Belum optimalnya sarana prasarana yang memadai dan berkelanjutan (tepat guna)
	Belum optimalnya mitigasi, adaptasi, dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan
	Belum optimalnya regulasi tentang pengelolaan persampahan
	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Masih adanya pelanggaran PERDA dan belum optimalnya penegakan PERDA
	Banyak desa di pesisir yang belum memiliki keamanan bencana (early warning system)
	Belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana, khususnya bencana kebakaran
	Belum optimalnya sarana prasarana kebencanaan
	Belum optimalnya kajian dan perencanaan dalam mendukung pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan infrastruktur yang belum merata baik infrastruktur perkotaan, infrastruktur antarwilayah, maupun infrastruktur pada kawasan-kawasan strategis
	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan publik terkait pekerjaan umum seperti air minum bersih, sanitasi, hingga drainase
	Belum optimalnya drainase terkait sumur resapan
	Ketersediaan irigasi yang belum memadai sehingga belum dapat maksimal menunjang kegiatan pertanian di daerah
	Aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau dengan baik
	Belum tertatanya representasi ibu kota Pasarwajo
	Belum optimalnya penataan ruang publik
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum optimalnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau serta

	penanganan kawasan kumuh
	Belum optimalnya pemenuhan dan kelayakan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman
	Pemenuhan sarana prasarana umum di kawasan permukiman masih belum optimal seperti layanan air bersih, jalan lingkungan dll
Perhubungan	Belum optimalnya layanan perhubungan, khususnya pada kawasan potensial pembangunan perekonomian
	Belum optimalnya sarana prasarana perlengkapan jalan
	Belum tersedianya Terminal tipe C
	Belum tersedianya prasarana dan sarana Pengujian Kendaraan bermotor yang tersertifikasi
	Belum optimalnya angkutan umum sebagai sarana transportasi
Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya layanan dan jangkauan jaringan telekomunikasi
	Belum optimalnya teknologi informasi untuk menunjang digitalisasi dan inovasi pemberdayaan.
	Aplikasi e-government belum optimal penggunaan dan pemanfaatannya
	Belum optimalnya implementasi kelompok informasi masyarakat
	Belum optimalnya peran perangkat daerah dalam meningkatkan literasi digital masyarakat
Pertanahan	Belum optimalnya kelengkapan administrasi pertanahan, khususnya daerah yang jauh dari pusat pemerintahan
Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingginya potensi penurunan kualitas pemahaman ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
	Belum optimalnya pendidikan politik yang baik di masyarakat
	Belum optimalnya penanganan konflik sosial
Kebudayaan	Pelestarian warisan budaya tak benda belum optimal
	Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan serta partisipasi seni budaya masyarakat
	Mulai terkikisnya nilai luhur kebudayaan daerah terutama daerah perkotaan
	Belum optimalnya penanaman nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat
	Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana kebudayaan dan kesenian
Penanaman Modal Daerah	Belum optimalnya kondusivitas iklim investasi daerah
	Belum efektifnya fasilitas/insentif penanaman modal yang diberikan kepada pelaku usaha
	Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha berbasis IT
	Belum optimalnya pengendalian/pengawasan penanaman modal
	Belum Optimalnya Kualitas Layanan Publik kepada

	masyarakat melalui pemanfaatan mal pelayanan publik
	Masih rendahnya realisasi nilai investasi PMA/PMDN
Perikanan	Belum optimalnya peningkatan kualitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan
	Tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan relatif rendah
	Pembatasan urusan perikanan yang dibatasi karena kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan provinsi
	Rendahnya hilirisasi produk perikanan sebagai peningkatan nilai tambah komoditas
	Maraknya aktivitas penangkapan ikan dengan cara-cara merusak (destructive fisihing) serta penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan
Pertanian	Belum optimalnya produktivitas pertanian
	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertanian
	Belum optimalnya mekanisasi pertanian dan peningkatan SDM pertanian
	Rendahnya hilirisasi produk pertanian dan perkebunan sebagai upaya peningkatan nilai tambah komoditas
	Belum adanya pengembangan pertanian berbasis pariwisata (agrowisata)

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**595,199,248,677**		**297,029,733,879**		**197,069,750,492**		**43,667,768,754**		**43,667,768,754**		**340,697,502,633**		**57.24**	**Dinas Pendidikan**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**198,000,000**		**77,453,400**		60,590,800				-		77,453,400		39.12	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	24,000,000	1 Dokumen	14,177,960	2 Dokumen	15,748,000				-		14,177,960		59.07	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dok	24,000,000	1 Dokumen	9,385,960	1 Dokumen	6,721,000		6,691,000.00		6,691,000		16,076,960		66.99	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dok	24,000,000	1 Dokumen	9,437,460	1 Dokumen	6,721,000				-		9,437,460		39.32	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 dok	24,000,000	1 Dokumen	10,709,260	1 Dokumen	7,206,800		7,206,800.00		7,206,800		17,916,060		74.65	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 dok	24,000,000	1 Dokumen	10,680,960	1 Dokumen	7,011,000				-		10,680,960		44.50	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dok	24,000,000	1 Laporan	10,509,960	1 Laporan	10,977,000		10,947,000.00		10,947,000		21,456,960		89.40	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dok	54,000,000	3 Laporan	12,551,840	3 Laporan	6,206,000		6,036,000.00		6,036,000		18,587,840		34.42	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan Daerah**	**100%**	**589,084,248,677**		**295,523,411,044**		**196,614,193,907**		**43,661,368,754**		**43,661,368,754**		**339,184,779,798**		**57.58**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	588,786,248,677	1796 Orang/ Bulan	295,322,406,164	1796 Orang/ Bulan	196,553,507,907		43,661,368,754		43,661,368,754		338,983,774,918		57.57	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 dok	250,000,000	12 Dokumen	180,010,000	12 Dokumen	48,160,000				-		180,010,000		72.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	24,000,000	5 Laporan	11,836,920	5 Laporan	6,386,000				-		11,836,920		49.32	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	24,000,000	1 Laporan	9,157,960	1 Laporan	6,140,000				-		9,157,960		38.16	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	1	420,000,000	0	-						-		-		0.00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	30,000,000	0	-						-		-		0.00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	230,000,000	0	-						-		-		0.00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 dok	30,000,000	0	-						-		-		0.00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	130,000,000	0	-						-		-		0.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1**	**2,435,000,000**	**0**	**747,182,348**		**166,064,000**				**-**		**747,182,348**		**30.69**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	82,000,000	0	-		3,776,000				-		-		0.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	0	-						-		-		0.00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	8,000,000	0	-						-		-		0.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	180,000,000	12 Paket	52,623,070	1 Paket	15,218,000		1,500,000.00		1,500,000		54,123,070		30.07	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	110,000,000	2 Paket	13,050,000	2 Paket	4,489,000		846,300.00		846,300		13,896,300		12.63	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	150,000,000	12 Dokumen	21,500,000	12 Dokumen	6,000,000				-		21,500,000		14.33	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan tamu	4 Laporan	130,000,000	12 Laporan	16,604,300	12 Laporan	5,721,000		733,000.00		733,000		17,337,300		13.34	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1,750,000,000	300 Laporan	643,404,978	100 Laporan	130,860,000				-		643,404,978		36.77	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**1,535,000,000**	**0**	**126,003,000**		**27,110,000**				**-**		**126,003,000**		**8.21**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	0	-						-		-		#DIV/0!	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		700,000,000	0	-						-		-		0.00	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	200,000,000	0	-						-		-		0.00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	320,000,000	10 Unit	126,003,000	3 Unit	27,110,000				-		126,003,000		39.38	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		195,000,000	0	-						-		-		0.00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit AC	-	0	-						-		-		#DIV/0!	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		120,000,000	0	-						-		-		0.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**843,000,000**	**0**	**387,183,627**		**122,642,600**				-		**387,183,627**		**45.93**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	45,000,000	348 Laporan	12,982,000	300 Laporan	6,000,000		1,000,000.00		1,000,000		13,982,000		31.07	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	200,000,000	12 Laporan	35,580,227	12 Laporan	8,000,000		1,839,900.00		1,839,900		37,420,127		18.71	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	18,000,000	0	-						-		-		0.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	580,000,000	12 Laporan	338,621,400	12 Laporan	108,642,600		15,200,000.00		15,200,000		353,821,400		61.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	1	684,000,000	0	168,500,460		79,149,185		6,400,000		6,400,000		174,900,460		25.57	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		-	0	0						-		168,500,460		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	434,000,000	5 Unit	168,500,460	5 Unit	79,149,185		6,400,000.00		6,400,000		#REF!		#REF!	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-	0	-						-		-		#DIV/0!	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		40,000,000	0	-						-		-		0.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,000,000	0	-						-		-		0.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	70,000,000	0	-						-		-		0.00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	40,000,000	0	-						-		-		0.00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	0	-						-		-		#DIV/0!	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0	-						-		-		#DIV/0!	
II	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**angka partisipasi kasar (APK) SD/ MI/ Paket A**	**116,13**	**312,583,454,290**	**0**	**145,711,879,337**		**54,833,669,000**				**-**		**145,711,879,337**		**46.62**	**Dinas Pendidikan**
		angka partisipasi murni (APM) SD/ MI/ Paket A	100	-	0	-						-		-		#DIV/0!	
		angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/ Paket B	99,11	-	0	-						-		-		#DIV/0!	
		angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B	85.02	-	0	-						-		-		#DIV/0!	
		Proporsi Anak yang terlayani PAUD	61,95	-	0	-						-		-		#DIV/0!	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	15.98	-	0	-						-		-		#DIV/0!	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Persentase pengelolaan Pendidikan sekolah dasar**	100	151,305,423,347	0	78,936,535,786		33,266,110,000				-		78,936,535,786		52.17	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		6,000,000,000	1 Unit	99,740,000						0		99,740,000		1.66	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			4 Ruang	1,655,010,500						0		1,655,010,500		#DIV/0!	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	14	-	3 Ruang	2,533,535,000	1 Ruang	68,250,000				0		2,533,535,000		#DIV/0!	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	20	5,500,000,000	6 Ruang	2,058,255,000	1 Ruang	42,000,000				0		2,058,255,000		37.42	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10	2,000,000,000	3 Ruang	634,702,000	1 Ruang	68,250,000				0		634,702,000		31.74	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10	-	10 Unit	1,836,042,500	8 Unit	1,312,500,000				0		1,836,042,500		#DIV/0!	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		8,000,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	30	6,400,000,000	3 Ruang	1,229,367,000						0		1,229,367,000		19.21	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7	600,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	8,000,000,000	0	-	1 Ruang	178,500,000				0		-		0.00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	2,000,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10	890,423,347	0	-						0		-		0.00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat		2,400,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	40 paket	1,000,000,000	4 paket	2,051,900,000	1 Paket	510,000,000				0		2,051,900,000		205.19	
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		900,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15	2,000,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		5,600,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	8,000,000,000	0	-	5 Orang	250,000,000				0		-		0.00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	3,800,000,000	3 Paket	5,258,054,000	1 Paket	5,785,520,000				0		5,258,054,000		138.37	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	121	240,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	121	500,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	600,000,000	0	-		144,770,000				0		-		0.00	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		4,000,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	3,200,000,000	5 Orang	25,000,000						0		25,000,000		0.78	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	121	400,000,000	122 Satuan Pendidikan	2,218,839,392	122 Satuan Pendidikan	1,129,190,000				0		2,218,839,392		554.71	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	121	64,000,000,000	122 Satuan Pendidikan	28,440,814,894	122 Satuan Pendidikan	14,776,980,000		6,933,964,144		6933964144		35,374,779,038		55.27	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	121	400,000,000	0	-		150,000,000				0		-		0.00	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						100,000,000								#DIV/0!	
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan						100,000,000								#DIV/0!	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						9,900,000								#DIV/0!	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan						100,000,000								#DIV/0!	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi						690,000,000								#DIV/0!	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						46,000,000								#DIV/0!	
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5	3,375,000,000	8 Ruang	5,073,282,000		-				0		5,073,282,000		150.32	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	7	8,000,000,000	0	6,989,356,700	6 Ruang	1,848,000,000				0		6,989,356,700		87.37	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					2 Unit	249,375,000								#DIV/0!	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1,500,000,000	0	18,832,636,800	0	-				0		18,832,636,800		1255.51	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan						1,100,000,000								#DIV/0!	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						4,606,875,000								#DIV/0!	
	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	50 unit	2,000,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Presentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah pertama**	99,11	127,121,954,753	0	55,079,959,051		16,192,500,000				0		55,079,959,051		43.33	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		1,000,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			1 Ruang	619,290,000						0		619,290,000		#DIV/0!	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		-	8 Ruang	8,328,536,090	1 Ruang	299,250,000				0		8,328,536,090		#DIV/0!	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	20	3,000,000,000	7 Ruang	3,135,973,000		-				0		3,135,973,000		104.53	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4	2,000,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	25	1,000,000,000	8 Ruang	10,240,843,000		-				0		10,240,843,000		1024.08	
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	4	2,351,954,753	0	-						0		-		0.00	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		8,000,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun		4,000,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 unit	-	4 Ruang	1,407,270,500	1 Unit	210,000,000				0		1,407,270,500		#DIV/0!	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat		2,000,000,000	10 Ruang	1,704,825,000						0		1,704,825,000		85.24	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25	1,800,000,000	0	7,762,919,850	8 Ruang	756,000,000				0		7,762,919,850		431.27	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	2,000,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		12,000,000,000	0	-						0		-		0.00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	3,500,000,000	1 Ruang	553,406,000		-				0		553,406,000		15.81	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	1,000,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat		3,800,000,000	0	-	1 Ruang	378,000,000				0		-		0.00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2,000,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		-	0	-	1 Unit	52,500,000				0		-		#DIV/0!	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat		-	0	-	1 Ruang	52,500,000				0		-		#DIV/0!	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	1,500,000,000	4 Ruang	1,199,590,000	1 Unit	315,000,000				0		1,199,590,000		79.97	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		-	0	-	1 Paket	840,000,000				0		-		#DIV/0!	
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia		2,000,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	30	1,000,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1,200,000,000	0	-	5 Orang	250,000,000				0		-		0.00	
	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik		7,000,000,000	5 Paket	122,198,000						0		122,198,000		1.75	
	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	3,000,000,000	2 Paket	1,759,776,000	3 Paket	3,580,710,000				0		1,759,776,000		58.66	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	5,000,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	49	600,000,000	0	-						0		-		0.00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		270,000,000	0	-	1 Keg.	62,400,000				0		-		0.00	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		200,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	49	3,000,000,000	5 Orang	25,000,000						0		25,000,000		0.83	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	49	1,000,000,000	51 Satuan Pendidikan	341,477,000	52 Satuan Pendidikan	303,910,000				0		341,477,000		34.15	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	12	44,000,000,000	51 Satuan Pendidikan	15,868,950,261	52 Satuan Pendidikan	7,261,330,000				0		15,868,950,261		36.07	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5	400,000,000	0	-	104 Orang	100,000,000		3,723,363,661		3723363661		3,723,363,661		930.84	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 ruang	2,000,000,000	0	2,009,904,350	2 Ruang	567,000,000				0		2,009,904,350		100.50	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	1,500,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1,000,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					104 Orang	75,000,000								#DIV/0!	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						9,900,000								#DIV/0!	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan					104 Orang	33,000,000								#DIV/0!	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi					7 Komunitas	300,000,000								#DIV/0!	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						21,000,000								#DIV/0!	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan						725,000,000								#DIV/0!	
	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		3,000,000,000	0	-						0		-		0.00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**	61,95	32,916,076,190	0	9,489,578,200		3,879,644,000				0		9,489,578,200		28.83	
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	10	6,000,000,000	3 Ruang	578,529,000						0		578,529,000		9.64	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10	4,000,000,000	0	930,713,000	2 Unit	420,000,000				0		930,713,000		23.27	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	1,600,000,000	2 Ruang	1,429,799,000		-				0		1,429,799,000		89.36	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1,000,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan		863,923,810	0	-						0		-		0.00	
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	100 paket	1,500,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	4,000,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	8,000,000,000	0	148,760,000		-				0		148,760,000		1.86	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	2,000,000,000	3935 Peserta Didik	6,217,827,400		-		1,284,950,000		1284950000		7,502,777,400		375.14	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	20 Satuan Pendidikan	80,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	114 Satuan Pendidikan	200,000,000	135 Satuan pendidikan	183,949,800	135 PAUD	68,145,000				0		183,949,800		91.97	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	114 Satuan Pendidikan	1,200,000,000	0	-	135 PAUD	2,549,205,000				0		-		0.00	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		-	0	-	135 PAUD	50,000,000				0		-		#DIV/0!	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						22,500,000								#DIV/0!	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan						100,000,000								#DIV/0!	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah						312,054,000								#DIV/0!	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia					2 Paket	357,740,000								#DIV/0!	
	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara		2,472,152,380	0	-						0		-		0.00	
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**Presentase Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	0,16	1,240,000,000	0	2,205,806,300		1,495,415,000				0		2,205,806,300		177.89	
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun		-	1 Ruang	463,500,000						0		463,500,000		#DIV/0!	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia		-	1 paket	98,000,000						0		98,000,000		#DIV/0!	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia		-	0	-						0		-		#DIV/0!	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			980 Peserta didik	887,476,400		-		551,260,000		551260000		1,438,736,400		#DIV/0!	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	9 Satuan Pendidikan	40,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		-	10 Satuan Pendidikan	224,799,900		-				0		224,799,900		#DIV/0!	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		-	0	-	12 Satuan Pendidikan	1,428,840,000				0		-		#DIV/0!	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						16,575,000								#DIV/0!	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan						50,000,000								#DIV/0!	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang melaksanakan proses belajar	Satuan Pendidikan	1,200,000,000	0	532,030,000		-				0		532,030,000		44.34	
III	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan kurikulum muatan lokal**	**75**	**2,320,500,000**	**0**	**100,000,000**		**-**				**0**		**100,000,000**		**4.31**	**Dinas Pendidikan**
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	0	1,550,000,000	0	100,000,000						0		100,000,000		6.45	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	10 dokumen	-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		800,000,000	10 Eks.	100,000,000						0		100,000,000		12.50	
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia		750,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	10 orang	-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	**Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal**	0	770,500,000	0	-						0		-		0.00	
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	10 dok	-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun		270,500,000	0	-						0		-		0.00	
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia		500,000,000	0	-						0		-		0.00	
IV	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar**		**6,961,500,000**	**0**	**-**		**58,080,000**				**0**		**-**		**0.00**	**Dinas Pendidikan**
		Persentase guru PAUD, TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik		-	0	-						0		-		#DIV/0!	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	0	6,961,500,000	0	-		58,080,000				0		-		0.00	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		2,961,500,000	0	-		58,080,000				0		-		0.00	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		4,000,000,000	0	-						0		-		0.00	
V	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Satuan Pendidikan yang telah memiliki izin operasional**	**100**	**2,320,500,000**	**0**	**-**		-				**0**		**-**		**0.00**	**Dinas Pendidikan**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**		1,185,500,000	0	-		-				0		-		0.00	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		385,500,000	0	-						0		-		0.00	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		800,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**		1,135,000,000	0	-		-				0		-		0.00	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		325,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		400,000,000	0	-						0		-		0.00	
	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		410,000,000	0	-						0		-		0.00	
Rata-rata capaian Kinerja (%)						-											
Predikat Kinerja						-		-									
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program				Rp 919,385,202,967		Rp 442,841,613,216		Rp 251,961,499,492		Rp 43,667,768,754		Rp 43,667,768,754		Rp 486,509,381,970		Rp 108	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya motivasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan sesuai dengan visi dan misi

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Kendala keterlambatan pencairan pada Dana DAK

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan juknis dan ketetapan yang telah ditentukan

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : lebih mengoptimalkan kinerja serta sumber daya dalam pencapaian tujuan sasaran

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**		**152,345,682,932**		**56,631,123,184**		**66,276,582,458**	**-**	**16,754,732,847.00**	**-**	**16,754,732,847.00**		**71,523,720,815.00**	0	46.95	**Dinas Kesehatan**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah**	95%	669,753,585.00		31,388,000		78,608,000	-	-	-	-		31,388,000.00	-	4.69	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	107,753,125.00	100	3,974,000		29,455,000	-	-	-	-		3,974,000.00	-	3.69	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	86,202,500.00	100	3,939,000		7,517,000	-	-	-	-		3,939,000.00	-	4.57	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	86,202,500.00	100	3,974,000		6,520,000	-	-	-	-		3,974,000.00	-	4.61	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	107,753,125.00	100	3,974,000		6,855,000	-	-	-	-		3,974,000.00	-	3.69	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	107,753,125.00	100	3,974,000		6,913,000	-	-	-	-		3,974,000.00	-	3.69	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	107,753,125.00	100	7,614,000		7,450,000	-	-	-	-		7,614,000.00	-	7.07	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	66,336,085.00	100	3,939,000		13,898,000	-	-	-	-		3,939,000.00	-	5.94	
															#DIV/0!		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	100%	136,715,232,704.65		48,217,608,543		63,324,726,562	26.16	16,529,754,921	26.16	16,529,754,921.00		64,747,363,464.00	-	47.36	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	646	136,015,598,101.08	100	47,944,479,543		63,198,586,562	26.16	16,529,754,921	26.16	16,529,754,921.00		64,474,234,464.00	-	47.40	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	317,059,353.57	100	255,950,000		104,400,000	-	-	-	-		255,950,000.00	-	80.73	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	67,880,625.00	100	330,000		-	-	-	#DIV/0!	-		330,000.00	-	0.49	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	67,880,625.00	100	330,000		-	-	-	#DIV/0!	-		330,000.00	-	0.49	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	110,509,375.00	100	7,614,000		15,170,000	-	-	-	-		7,614,000.00	-	6.89	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	67,880,625.00	100	5,240,000		-	-		#DIV/0!	-		5,240,000.00	-	7.72	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16	68,424,000.00	100	3,665,000		6,570,000	-	-	-	-		3,665,000.00	-	5.36	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	1	1,168,806,250.00		35,490,000		4,350,000	-	-	-	-		35,490,000.00	-	3.04	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7	33,125,000.00	100	330,000		-	-	-	#DIV/0!	-		330,000.00	-	1.00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	113,812,500.00	100	12,330,000		-	-	-	#DIV/0!	-		12,330,000.00	-	10.83	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	8	160,337,500.00	100	4,500,000		2,100,000	-	-	-	-		4,500,000.00	-	2.81	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	61,525,000.00	100	4,500,000		2,100,000	-	-	-	-		4,500,000.00	-	7.31	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26	360,337,500.00	100	4,500,000		-	-	-	#DIV/0!	-		4,500,000.00	-	1.25	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15	207,625,000.00	100	4,830,000		-	-	-	#DIV/0!	-		4,830,000.00	-	2.33	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	232,043,750.00	100	4,500,000		150,000	-	-	-	-		4,500,000.00	-	1.94	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Umum**	1	1,914,232,414.91		470,445,870		199,998,000	469.87	36,978,880.00	####	36,978,880.00		507,424,750.00	-	26.51	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	24,031,250.00	100	1,495,000		7,870,000	-		-	-		1,495,000.00	-	6.22	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	129,303,750.00	100	82,260,950		-	-		#DIV/0!	-		82,260,950.00	-	63.62	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	41,000,000.00	100	0		-	-	-	#DIV/0!	-		-	-	-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	167,556,313.01	100	13,400,000		3,482,000	-		-	-		13,400,000.00	-	8.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	24,031,250.00	100	22,000,000		1,800,000	-	-	-	-		22,000,000.00	-	91.55	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8	215,506,250.00	100	44,988,764		1,200,000	-		-	-		44,988,764.00	-	20.88	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	1,312,803,601.90	100	306,301,156		185,646,000	19.92	36,978,880.00	19.92	36,978,880.00		343,280,036.00	-	26.15	
									-								
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	1	1,305,076,727.52		5,739,726,000		-	-	-	#DIV/0!	-		5,739,726,000.00	-	439.80	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	514,014,227.52	-	-		-	-	-	#DIV/0!	-		-	-	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	711,093,750.00	100	5,705,200,000		-	-	-	#DIV/0!	-		5,705,200,000.00	-	802.31	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	79,968,750.00	100	34,526,000		-	-	-	#DIV/0!	-		34,526,000.00	-	43.17	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemrintah Daerah**	1	9,802,831,250.00		1,865,825,346		2,641,608,696	-	187,999,046.00	####	187,999,046.00		191,689,176.00	-	1.96	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	24,031,250.00	100	8,040,000		2,169,000	-	-	-	-		8,040,000.00	-	33.46	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	1,140,800,000.00	100	175,984,130		248,460,000	2.94	7,299,046.00	2.94	7,299,046.00		183,283,176.00	-	16.07	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	58,000,000.00	100	366,000		-	-	-	#DIV/0!	-		366,000.00	-	0.63	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	8,580,000,000.00	100	1,681,435,216		2,390,979,696	7.56	180,700,000.00	7.56	180,700,000.00		1,862,135,216.00	-	21.70	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	1	769,750,000.00		270,639,425		27,291,200	-	-	-	-		270,639,425.00	-	35.16	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70	164,000,000.00	100	-		22,291,200	-	-	-	-		-	-	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50	133,250,000.00	100	154,400,000		-	-		#DIV/0!	-		154,400,000.00	-	115.87	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	71,250,000.00	100	4,650,000		5,000,000	-	-	-	-		4,650,000.00	-	6.53	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	401,250,000.00	100	111,589,425		-	-	-	#DIV/0!	-		111,589,425.00	-	27.81	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
II	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)**	**0.944**	###############		**49,037,604,822**		**85,435,869,309**	**-**	**5,272,962,010.00**	#####	**5,272,962,010.00**		**54,414,927,832.00**	-	30.43	**Dinas Kesehatan**
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	0.92												-		
		Insidensi tuberculosis (TB)	0.613												-		
		Persentase pelayanna kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi kejadian luar biasa (KLB)	1												-		
		Persentase tercapainya indikator standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan	0.9												-		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Puskesmas Terakrediatasi**	100	70,551,465,441.00		24,264,547,298		50,486,529,309	-	-	#DIV/0!	-		24,368,908,298.00	-	34.54	
		Persentase Rumah dinas yang represntatif	0.63												-		
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	4	18,408,597,931.00	100	-		25,393,272,000	-	-	-	-		-	-	-	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	4	1,000,000,000.00	100	12,450,066,630		5,613,343,309	-	-	-	-		12,450,066,630.00	-	1,245.01	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	8	3,400,000,000.00	100	-		600,000,000	-	-	-	-		-	-	-	
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana,Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	15	300,000,000.00	100	5,240,000		4,648,000	-	-	-	-		5,240,000.00	-	1.75	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5	24,090,117,510.00	100	6,348,708,422		8,000,000,000	-	-	-	-		6,348,708,422.00	-	26.35	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	10	3,155,000,000.00	100	1,320,548,090		-	-	-	#DIV/0!	-		1,320,548,090.00	-	41.86	
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	4	385,250,000.00	100	-		-	-	-	#DIV/0!	-		-	-	-	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7	528,000,000.00	100	-		-	-	-	#DIV/0!	-		-	-	-	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10	8,305,000,000.00	100	1,964,124,500		4,599,742,000	-	-	-	-		1,964,124,500.00	-	23.65	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8	2,000,000,000.00	100	81,256,860		148,146,000	-	-	-	-		81,256,860.00	-	4.06	
	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	4	7,728,750,000.00	100	2,089,732,796		6,125,278,000	-	-	-	-		2,089,732,796.00	-	27.04	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	3	945,750,000.00	100	-		-	-	-	#DIV/0!	-		-	-	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	5592	305,000,000.00	100	4,870,000		2,100,000	-	-	-	-		4,870,000.00	-	1.60	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan ke Fasilitas Kesehatan	0	817,500,000.00	100	104,361,000			-	-	#DIV/0!	-		104,361,000.00	#DIV/0!	12.77	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Cakupan Kunjungan Rawat inap**	1	104,586,778,601.15		24,064,429,004		34,138,817,000.00	-	5,241,053,100.00	#DIV/0!	5,241,053,100.00		29,305,482,104.00	-	28.02	
		Persentase Cakupan Rujukan	1														
		Cakupan Penanggulangan masalah kesehatan melalui P3K	100														
		Cakupan Kemitraan Pelayanan Kesehatan	100														
		Cakupan Angka Bebas Jentik (ABJ)	95														
		Presentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar	100														
		Persentase Puskesmas Yang terakreditasi	93														
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1882	604,825,000.00	100	3,314,865,000		4,109,988,000	-	-	-	-		3,314,865,000.00	-	548.07	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2472	1,410,475,000.00	100	421,364,400		605,916,000	-	-	-	-		421,364,400.00	-	29.87	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2616	530,568,750.00	100	6,238,000		18,740,000	-	-	-	-		6,238,000.00	-	1.18	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12648	428,068,750.00	100	6,340,000		22,050,000	-	-	-	-		6,340,000.00	-	1.48	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumla Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2333	542,550,000.00	100	26,078,850		22,050,000	-	-	-	-		26,078,850.00	-	4.81	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18205	530,568,750.00	100	6,760,000		12,100,000	-	-	-	-		6,760,000.00	-	1.27	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendpatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1997	554,531,250.00	100	6,070,000		18,740,000	-	-	-	-		6,070,000.00	-	1.09	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2549	349,531,250.00	100	18,970,000		5,840,000	-	-	-	-		18,970,000.00	-	5.43	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	770	313,587,500.00	100	5,470,000		13,350,000	-	-	-	-		5,470,000.00	-	1.74	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	118	325,568,750.00	100	4,870,000		11,210,000	-	-	-	-		4,870,000.00	-	1.50	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita \uberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	365	373,493,750.00	100	9,970,000		19,790,000	-	-	-	-		9,970,000.00	-	2.67	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	13	530,568,750.00	100	11,920,000		19,150,000	-	-	-	-		11,920,000.00	-	2.25	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4	284,312,500.00	100	370,000		448,000	-	-	-	-		370,000.00	-	0.13	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	355,625,000.00	100	2,501,741,500		2,173,361,000	-	-	-	-		2,501,741,500.00	-	703.48	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	170,587,500.00	100	150,000		2,470,000	-	-	-	-		150,000.00	-	0.09	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4	213,375,000.00	100	250,370,000		2,470,000	-	-	-	-		250,370,000.00	-	117.34	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	213,375,000.00	100	293,441,000		192,210,000	-	-	-	-		293,441,000.00	-	137.52	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4	117,800,000.00	100	22,500,000		4,870,000	-	-	-	-		22,500,000.00	-	19.10	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	500,000,000.00	100	370,000		900,000	-	-	-	-		370,000.00	-	0.07	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	118	227,450,000.00	100	300,000		600,000	-	-	-	-		300,000.00	-	0.13	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8	213,305,000.00	100	150,000		3,900,000	-	-	-	-		150,000.00	-	0.07	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4	251,000,000.00	100	2,971,117,100		3,043,058,000	-		-	-		2,971,117,100.00	-	1,183.71	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4	29,415,000,000.00	100	11,207,517,200		17,805,896,000	22.95	4,086,053,100.00	22.95	4,086,053,100.00		15,293,570,300.00	-	51.99	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1807	132,250,000.00	100	370,000		-	-	-	#DIV/0!	-		370,000.00	-	0.28	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	4	176,250,000.00	100	-		3,260,000	-	-	-	-		-	-	-	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4	62,190,923,601.15	100	2,044,249,940		5,852,023,000	19.74	1,155,000,000.00	19.74	1,155,000,000.00		3,199,249,940.00	-	5.14	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	233,750,000.00	100	692,513,016		174,427,000	-	-	-	-		692,513,016.00	-	296.26	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	15	3,127,437,500.00	100	204,350,298		-	-		#DIV/0!	-		204,350,298.00	-	6.53	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4	165,000,000.00	100	36,002,700		-	-	-	#DIV/0!	-		36,002,700.00	-	21.82	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	5592	105,000,000.00	100	-		-	-	-	#DIV/0!	-		-	-	-	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Persentase Tersusunnya Profil Kesehatan**	100	3,653,560,874.00		708,628,520		810,523,000	3.94	31,908,910.00	#DIV/0!	31,908,910.00		740,537,430.00	-	20.27	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			100	-		-	-	-	#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	-	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4	3,653,560,874.00	100	708,628,520		810,523,000	3.94	31,908,910.00	3.94	31,908,910.00		740,537,430.00	-	20.27	
	Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan			100	-		-	-	-	#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	-	
III	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar**	**100**	**3,480,750,000.00**		**827,804,000**		**670,111,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**827,804,000.00**	**-**	**23.78**	**Dinas Kesehatan**
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Cakupan Tenaga Kesehatan Yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)**	100	2,095,710,000.00		823,304,000		4,200,000	-	-	-	-		823,304,000.00	-	39.29	
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4	1,036,020,525.00	100	1,246,000		2,100,000	-	-	-	-		1,246,000.00	-	0.12	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta TindakLanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4	1,059,689,475.00	100	822,058,000		2,100,000	-	-	-	-		822,058,000.00	-	77.58	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Presentase puskesmas dengan 5 Jenis SDMK**	1	1,385,040,000.00		4,500,000		665,911,000	-	-	-	-		4,500,000.00	-	0.32	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4	1,385,040,000.00	100	4,500,000		665,911,000	-	-	-	-		4,500,000.00	-	0.32	
IV	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Cakupan kefarmasian memenuhi standar**	**1**	**4,641,000,000.00**		**216,832,800**		**378,517,000**	**-**	**-**	#####	**-**		**216,832,800.00**	-	4.67	**Dinas Kesehatan**
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.															
	Pemberian Izin Apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal,Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Cakupan Apotek.Toko Obat yang memiliki izin**	**100**	**2,361,262,500.00**		**211,732,800**		**376,417,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**211,732,800.00**	-	8.97	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4	2,361,262,500.00	100	211,732,800		376,417,000	-	-	-	-		211,732,800.00	-	8.97	
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	**Persentase tempat pengelolaan pangan(TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar**	**100**	**1,488,487,500.00**		**5,100,000**		**2,100,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**5,100,000.00**	-	0.34	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	4	1,488,487,500.00	100	5,100,000		2,100,000	-	-	-	-		5,100,000.00	-	0.34	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Presentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yg memenuhi syarat**	**82.5**	**791,250,000.00**		**0**		**-**	**-**	**-**	#####	**-**		**-**	-	-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4	791,250,000.00	100	-		-	-	-	#DIV/0!	-		-	-	-	
									-								
V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)**	**100**	**6,961,499,998.88**		**24,916,250**		**33,320,000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**24,916,250.00**	-	0.36	**Dinas Kesehatan**
	Advokasi, Pemberdayaan,Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Germas**	100	1,659,062,500.00		370,000		20,850,000	-	-	-	-		370,000.00	-	0.02	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1,659,062,500.00	100	370,000		20,850,000	-	-	-	-		370,000.00	-	0.02	
	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Cakupan Desa/Kelurahan STBM**	1	3,462,881,248.88		24,179,000		10,000,000	-	-	-	-		24,179,000.00	-	0.70	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	1,867,256,248.88	100	970,000		5,500,000	-	-	-	-		970,000.00	-	0.05	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	6474	1,595,625,000.00	100	23,209,000		4,500,000	-	-	-	-		23,209,000.00	-	1.45	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Desa/Kelurahan STBM**	100	1,839,556,250.00		367,250		2,470,000	-	-	-	-		367,250.00	-	0.02	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	1,839,556,250.00	100	367,250		2,470,000	-	-	-	-		367,250.00	-	0.02	
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program				################	-	##############	-	################		**346,220,737,847.11**		**346,220,737,847.11**	-	**346,220,737,847.11**	-		

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah*	**100%**	**93,554,195,305**	**100%**	**46,872,801,835**	**100%**	**25,060,033,287**	**100%**	**3,492,780,398**	**100%**	**3,492,780,398**	**100%**	**50,365,582,233**	**100%**	**54%**	**Bid. Sekretariat**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**28,250,000**	**1 Tahun**	**28,250,000**	**100%**	**28,250,000**		-				-			**Bid. Sekretariat**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	6,000,000	5 dok	6,000,000	5 dok	6,000,000	-	-							
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dok	3,000,000	5 dok	3,000,000	5 dok	3,000,000	-	-							
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dok	3,000,000	5 dok	3,000,000	5 dok	3,000,000	-	-							
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 dok	3,000,000	10 dok	3,000,000	10 dok	3,000,000	-	-							
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 dok	3,000,000	10 dok	3,000,000	10 dok	3,000,000	-	-							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	5,500,000	5 dok	5,500,000	5 dok	5,500,000	-	-							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dok	4,750,000	5 dok	4,750,000	5 dok	4,750,000	orang/ bulan	-							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi keuangan*	**100%**	**82,955,692,305**	**1 Tahun**	**41,391,458,909**	**100%**	**18,160,033,287**	-	**3,492,780,398**		**41,391,458,909**		**49.90**			**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*	150 orang/ bulan	76,349,179,550	orang/ bulan	38,377,108,664	orang/ bulan	17,113,033,287	278	3,492,780,398		3,492,780,398		**41,869,889,062**		**55%**	**Bid. Sekretariat**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi keuangan*	**100%**		**1 Tahun**												
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kegiatan yang dialkukan*	orang/ Kegiatan		orang/ Kegiatan		orang/ Kegiatan										
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	orang/ bulan	823,347,792	orang/ bulan	3,975,000	orang/ bulan							-			**Bid. Sekretariat**
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	*Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan*	2 Unit	823,347,792	14 Unit	0	2 Unit	-				-					**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	25 dok	2,488,483,310	14 dok	**3,103,315,537**	14 dok	**1,047,000,000.00**						-			**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	*Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan*	12 dok	6,606,512,755	12 dok	3,014,350,245	12 dok	1,047,000,000.00				-		**3,014,350,245**		**46%**	**Bid. Sekretariat**
	Peningkatan Pelayanan BLUD	***Cakupan Pelayanan BLUD***	**5 lap**	**10,598,503,000**	**2 dok**	**5,481,342,926**	**2 dok**	**6,900,000,000**		-		**5,481,342,926**		**10,962,685,852**			**Bid. Sekretariat**
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	10,598,503,000	1 Unit Kerja	17,383,374,803	1 Unit Kerja	6,900,000,000				-		**17,383,374,803**		**164%**	**Bid. Sekretariat**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Peneliharaan Barang Milik Daerah*	100%														

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung kantor yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin (Unit)*	1 Unit		2 Unit	59,901,150											
II	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	*Persentase capaian pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat*	**25%**	**17,016,994**	**100%**	**-**	**100%**	**1,500,000,000**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**0%**	**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	***Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP***	**100%**	**17,016,994**	**100%**	**0**	**100%**	**1,500,000,000**	**0**	**0**		**0**		**-**		**0%**	**Bid. Sekretariat**
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	*Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000*	1 unit	0	100%	4,124,219,911	100%										
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit*	4 unit	0			48 dok							-			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang direhabilitasi*	1 unit														
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	17,016,994	0%	0	1 Unit	1,500,000,000		-				-			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	4 Unit							-				-			
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	13 unit														
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman diFasilitas Kesehatan	Jumlah Obat , bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, Vaksin, makanan dan minuman yang disediakan	100 Jenis		100 Jenis	999,582,968	100 Jenis		-	-	-			-			**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	**100%**	**50,000,000**		**349,259,338**											
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dok	50,000,000	4 Dok	349,259,338		700,000,000									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I						
1	2	3	4		5		6		7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**6,100,113,191**		**4,543,754,681**	**100**	**#REF!**		**1,006,563,694**	**0**	**1,006,563,694**	**0.00**	**17**	DINAS PUPR
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90**	**99,500,000**	**57**	**75,528,000**	**100**	**#REF!**	**9**	**11,633,200**	**9**	**0**	**9.75**	**0**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa Perangkat Daerah	10	14,000,000.00	10	18,053,000	10	#REF!							
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	17,000,000.00	10	14,160,000	10	#REF!	7	9,997,200	7	9,997,200	70.60	59	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	18,000,000.00	10	10,737,000	10	#REF!			0	0	0.00	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	18,000,000.00	10	2,888,000	10	14,653,000							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Penyusunan LAKIP)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	16,000,000.00	10	10,830,000	10	9,997,200			0	0	0.00	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	16,500,000.00	7	18,860,000	7	10,712,000	1	1,636,000				#REF!	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**4,216,000,000**	**71**	**3,294,095,674**	**70**	**3,243,636,529**	**20**	**949,303,694**	20	**949,303,694**	**20.49**	**23**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	3,500,000,000.00	49	3,028,224,474	50	3,022,465,329	15	909,763,694	15	909,763,694	31.35	26	
	Pelaksanaaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10	700,000,000.00	10	264,071,200	10	221,171,200	1	39,540,000	1	39,540,000	14.97	6	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	16,000,000.00	12	1,800,000	10	0							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**126,000,000**	**70**	**68,626,950**	**60**	**516,600**			0	**0**	**0.00**	**0**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	30,000,000.00											
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50	60,000,000.00	50	62,715,000	0	0							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	12,000,000.00	20	5,911,950	20	516,600			0	0	0.00	0	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	12,000,000.00			20	0							
	Bimbingan Teknis Inplementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	12,000,000.00			0	0							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**667,000,000**	**76**	**470,638,138**	**76**	**210,645,491**	**4**	**25,221,400**	**4**	**25,221,400**	**4.07**	**4**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	12,000,000.00	1	1,995,000	1	3,033,000	0.4	755,000	0	755,000	37.84	6	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	150,000,000.00	5	25,915,000	5	16,300,000							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	35,000,000.00	0	-		0							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	35,000,000.00	10	30,000,000	10	9,028,000	2	4,794,000					
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	25,000,000.00	20	27,198,000	20	7,193,639	3	3,929,800	3	3,929,800	14.45	16	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	25,000,000.00	10	19,000,000	10	10,000,000	1	1,500,000	1	1,500,000	7.88	6	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	25,000,000.00	0	-									
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	360,000,000.00	30	366,530,138	30	165,090,852		14,242,600	0	14,242,600	0.00	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**142,000,000**	**1**	**446,600,000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0.00**	**0**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	30,000,000.00	1	446,600,000	0	0			0	0	0.00	0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	55,000,000.00											
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	57,000,000.00											
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100**	**79,613,191**	**167**	**27,849,900**	**100**	**25,993,866**	**27**	**4,441,000**	**27**	**4,441,000**	**26.64**	**6**	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	4,613,191.00	150	12,499,700	150	6,799,866	53	4,441,000	53	4,441,000	35.53	96	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	25,000,000.00	10	12,350,200	12	19,194,000			0	0	0.00	0	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	15,000,000.00	7	3,000,000	0	0							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	35,000,000.00											
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**770,000,000**	**19**	**160,416,019**	**100**	**211,305,200**	**2**	**15,964,400**	2	**15,964,400**	**1.84**	**2**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	215,000,000.00	9	90,781,050	10	43,305,200	2	15,964,400	2	15,964,400	15.09	7	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	215,000,000.00			5	50,000,000							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10	215,000,000.00	10	69,634,969	4	118,000,000							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	125,000,000.00	0	-	1	0	0	0					
II	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur wilayah sungai kewenangan kabupata/kota**	**82**	**1,857,350,000**	**100**	**3,952,365,867**	**100**	**21,782,637,000**			0	**0**	**0.00**	**0**	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**310,000,000**		0		**21,767,637,000**							
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1	310,000,000.00		0									
	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang dibangun					0.5	21,767,637,000							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I						
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1,547,350,000**	**2**	**3,952,365,867**	**100**	**15,000,000**			**0**	**0**	**0.00**	**0**	
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.0	-	1	2,259,501,617	0.5	-			0	0	0.00	0	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan					1	15,000,000							
	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	1	112,350,000.00	0	0									
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2	1,050,000,000.00	1	1,692,864,250	0.5								
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi					1								
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukiman	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara					0.5								
	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	155,000,000.00											
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.5	230,000,000.00		0									
III	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Cakupan SPAM dalam kondisi baik**	**75**	**2,288,924,330**		**7,120,700,000**		**200,000,000**							
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**2,288,924,330**	**0**	**7,120,700,000**	**0**	**200,000,000**							
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1	95,000,000.00			1	200,000,000							
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2.5	620,000,000.00	2	7,120,700,000									
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	250,000,000.00											
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	120	755,000,000.00											

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I						
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1	118,924,330.00			500								
	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	5	450,000,000.00											
IV	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional**	**100**	**184,627,433**											
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**184,627,433**											
	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	15	184,627,433.00											
V	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah**	**71**	**3,969,674,225**		**6,022,196,100**		**3,708,880,000**				**0**			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**3,969,674,225**	**0**	**6,022,196,100**	**100**	**3,708,880,000**			**0**	**0**	**0.00**	**0**	
	Penyediaan Sub Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	322	3,699,674,225.00	457	6,022,196,100	200	3,708,880,000			0	0	0.00	0	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1	270,000,000.00								0	0.00	0	
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase panjang drainase kondisi baik**	**48**	**1,300,701,049**		**0**		**0**							
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1,300,701,049**	**0**	**0**	**0**	**0**							
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	200	580,000,000.00											
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun					1	-							
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1	90,000,000.00											
	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	4	630,701,049.00		0									
VII	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase luas permukiman yang tertata**	**79**	**510,813,600**				**1,400,000,000**							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I						
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**510,813,600**	**0**		**0**	**1,400,000,000**							
	Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	2	263,813,600.00			0	0							
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	122,000,000.00											
	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	125,000,000.00											
	Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat di Kawasan Strategis Kab./Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar					200	1,400,000,000							
VIII	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Kepatuhan IMB**	**83**	**363,000,000**		**0**									
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Cakupan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**		**363,000,000**		**0**									
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Gedung Workshop	2	363,000,000.00		-									
	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					-									
IX	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungannya**	**80**	**1,325,676,000**		**1,879,802,790**		**0**							
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1,325,676,000**	**0**	**1,879,802,790**	**0**	**0**							
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1	84,676,000.00	1	1,879,802,790	1	-							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I						
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1	1,181,000,000.00											
	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1	60,000,000.00	0		1								
X	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap**	**86.01**	**40,031,995,640**		**25,017,688,558**		**#REF!**							
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**50.16**	**40,031,995,640**	**16**	**25,017,688,558**	**14**	**#REF!**							
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	20	33,000,000,000	4.7	6,965,132,558	5	#REF!							
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1	1,500,000,000	11.4	18,052,556,000	5	#REF!							
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1	721,781,665				-							
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4	4,300,001,116		0	4	#REF!							
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1,000	510,212,859											
XI	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio tenaga operator/teknisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi**	**100**	**226,274,525**		**130,000,000**		**15,000,000**				**0**			
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**100**	**135,000,000**	**30**	**100,000,000**	**30**	**0**							
	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan			1	100,000,000		-							
	Pelatihan Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	100	135,000,000	30	100,000,000	30	-							
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**45,000,000**	**0**		**30**	**0**							
	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30	45,000,000			30	0							
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	**Cakupan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**100**	**46,274,525**	**2**	**30,000,000**	**100**	**15,000,000**			**0**	**0**	**0.00**	**0**	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahaan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I						
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	1	46,274,525.00	2	30,000,000		15,000,000							
XII	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang**	**60**	**491,447,526**		**128,000,000**	**100**	**415,000,000**							
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Cakupan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**100**	**136,552,474**	**3**			**400,000,000**							
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1	136,552,474.00											
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	0	0			1	400,000,000							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**354,895,052**		**128,000,000**		**0**							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	3	177,447,526.00	3	98,000,000	0	0							
	Koordinasi dan Singkronisasi Penyusunan RRTR Kab./Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	3	177,447,526.00	3	30,000,000	0	0							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		0		**48,892,507,996**		**15,000,000**							
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0	-	3	98,000,000	5	15,000,000							
	JUMLAH			**58,650,597,519**	**83**	**48,794,507,996**	#REF!	**#REF!**	1.7	**1,006,563,694**		**1,006,563,694**			

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi capaian kinerja Renstra perangkat daerah Tahun lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah tahun berjalan (tahun 2025 yang dievaluasi.		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Unit perangkat daerah penanggung gjawab
									I		II						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	**Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Kab/Kota**		**80,668,075,180**		**8,651,458,012**	**431**	**21,046,908,618**									PERKIM
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**12,295,506,906**		**2,164,046,292**	**208**	**3,012,339,212**	29	**425,440,132**			29	425,440,132	29	3.46	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**100**	**153,000,000**		**35,286,150**	**60**	**38,409,000**	**24**	**15,159,680**			24	15,159,680	24	9.91	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	29,000,000	5	6,409,000.00	10	6,409,000.00	10	6,160,000					-	-	PERKIM
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	19,000,000	5	4,499,750.00	10	5,000,000.00	9	4,499,879			9	4,499,879	45	23.68	PERKIM
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20	19,000,000	5	4,442,000	10	5,000,000.00							-	-	PERKIM
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	36	19,000,000	10	4,498,000.00	5	5,000,000.00	4	4,499,801			4	4,499,801	12	23.68	PERKIM
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	36	19,000,000	10	4,499,000.00	10	5,000,000.00							-	-	PERKIM
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	20,000,000	5	4,998,000.00	5	5,000,000.00							-	-	PERKIM
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40	28,000,000	10	5,940,400.00	10	7,000,000.00					-	-	-	-	PERKIM
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**100**	**6,795,349,749**		**1,553,697,251**	**50**	**1,836,736,152**	**9**	**332,455,281**			9	332,455,281	9	4.89	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29-Apr	6,377,869,749	23	1,484,483,251.00	23	1,736,616,152.00	4	322,235,281			4	322,235,281	4	5.05	PERKIM
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28	360,480,000	12	58,589,000.00	12	85,120,000.00	3	10,220,000			3	10,220,000	11	2.84	PERKIM

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi capaian kinerja Renstra perangkat daerah Tahun lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah tahun berjalan (tahun 2025 yang dievaluasi.		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Unit perangkat daerah penanggung jawab
									I		II						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20	19,000,000	1	3,587,000.00	5	5,000,000.00							-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	19,000,000	18	3,500,000.00	5	5,000,000.00							-	-	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20	19,000,000	5	3,538,000.00	5	5,000,000.00							-	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**100**	**893,000,000**		**4,033,000**	**12**	**90,000,000**	**-**	**0**			-	-	-	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16	280,000,000			1	50,000,000							-	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	5,000,000	5	4,033,000.00	5	5,000,000.00					-	-	-	-	PERKIM
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16	190,000,000			6	35,000,000							-	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	132	418,000,000											-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**100**	1,493,870,187		**156,144,650**	**23**	**280,536,060**	**2**	**26,657,069**			2	26,657,069	2	1.78	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	15,120,000	1	1,000,000.00	1	3,000,000	0.25	500,000			0	500,000	2	3.31	PERKIM
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	56,000,000	1		1	15,000,000							-	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	70,000,000	1	1,931,360.00	1	15,000,000							-	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	56,229,000	1	23,673,440.00	1	15,000,000	1	4,760,414			1	4,760,414	6	8.47	PERKIM
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	60,521,187	12	16,639,850.00	1	10,000,000	1	2,389,194			1	2,389,194	6	3.95	PERKIM
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16	57,000,000	1		12	15,000,000							-	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	1,119,000,000	3	112,900,000.00	3	202,536,060	3	19,007,461			3	19,007,461	6	1.70	PERKIM

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi capaian kinerja Renstra perangkat daerah Tahun lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah tahun berjalan (tahun 2025 yang dievaluasi.		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Unit perangkat daerah penanggung jawab
									I		II						
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16	60,000,000	1		3	5,000,000	3						-	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**100**	**698,000,000**		**17,598,000**	**14**	**295,000,000**		-			-	-	-	-	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan													#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	16	105,000,000			1	200,000,000							-	-	
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	18	48,000,000			5								-	-	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16	320,000,000			3	45,000,000							-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	105,000,000	3	11,762,000.00	3	35,000,000.00					-	-	-	-	PERKIM
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	30,000,000											-	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	90,000,000	2	5,836,000.00	2	15,000,000.00							-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**32**	**1,552,400,000**		**294,117,321**	**26**	**338,700,000**	**3.374**	**43,948,458**				43,948,458	-	2.83	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	6,800,000	12	7,700,000.00	12	1,700,000.00	3	500,000			3	500,000	75	7.35	PERKIM
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	120,000,000	12	18,752,521.00	12	30,000,000.00	1	3,248,458			1	3,248,458	32	2.71	PERKIM
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	24,000,000			1	7,000,000							-	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	1,401,600,000	1	267,664,800.00	1	300,000,000.00	1	40,200,000			1	40,200,000	25	2.87	PERKIM
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**709,886,970**		**103,169,920**	**23**	**132,958,000**	**1**	**7,219,644**			**1**	**7,219,644**	1	1.02	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	635,886,970	15	103,169,920.00	15	98,000,000.00	1	7,219,644			1	7,219,644	2	1.14	PERKIM

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi capaian kinerja Renstra perangkat daerah Tahun lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah tahun berjalan (tahun 2025 yang dievaluasi.		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Unit perangkat daerah penanggung jawab
									I		II						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	9	8,000,000	3			16,458,000							-	-	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara													#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	60,000,000			5	15,000,000							-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	6,000,000			3	3,500,000							-	-	
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang terkena relokasi program pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**100**	**5,904,741,051**		**86,486,520**	**13**	**430,000,000**							-	-	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**100**	**66,000,000**		**25,247,000**	**1**	**30,000,000**							-	-	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	12,000,000	**1**	25,247,000	**1**	30,000,000							-	-	
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	4	12,000,000											-	-	
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	4	12,000,000											-	-	
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	4	12,000,000.00											-	-	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi capaian kinerja Renstra perangkat daerah Tahun lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah tahun berjalan (tahun 2025 yang dievaluasi.		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Unit perangkat daerah penanggung jawab
									I		II						
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	4	12,000,000.00											-	-	
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	2	6000000											-	-	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1												-	#DIV/0!	
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi													#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**100**	**5,838,741,051**		**60,247,000**	**13**	**350,000,000**							-	-	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	36	1,610,000,000	5	35,000,000.00	10	200,000,000.00					-	-	-	-	
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail *Engineering Design* (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail *Engineering Design* (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota													#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota													#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	115	1,800,142,451	2	25,247,000.00	3	150,000,000.00							-	-	
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	75	2,428,598,600											-	-	
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Cakupan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**100**												-	#DIV/0!	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi capaian kinerja Renstra perangkat daerah Tahun lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah tahun berjalan (tahun 2025 yang dievaluasi.		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Unit perangkat daerah penanggung jawab
									I		II						
	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota													#DIV/0!	#DIV/0!	
	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					1								#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Cakupan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**100**			**26,239,520**		**50,000,000**							-	#DIV/0!	
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun													#DIV/0!	#DIV/0!	
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1	50,000,000	1	26,239,520.00	1	50,000,000.00		5,214,180			-	5,214,180	-	10.43	
III	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 100 Ha yang ditangani**	**100**	**3,420,417,000**		**342,800,000**	**10**	**864,747,876**							-	-	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Cakupan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**		35,000,000											#DIV/0!	-	
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	4	35,000,000											-	-	
	Penyusunan/*Review* /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Te*review* /Terlegalisasi													#DIV/0!	#DIV/0!	
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1				**1**								-	#DIV/0!	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Cakupan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**100**	**3,385,417,000**		**342,800,000**	**10**	**864,747,876**							-	-	
	Penyusunan Rencana Tapak *(Site Plan)* dan *Detail Engineering Design* (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (*Site Plan*) dan *Detail Engineering Design* (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh													#DIV/0!	#DIV/0!	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi capaian kinerja Renstra perangkat daerah Tahun lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah tahun berjalan (tahun 2025 yang dievaluasi.		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Unit perangkat daerah penanggung jawab
									I		II						
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	140	2,437,217,000	15	342,800,000.00	10	864,747,876.00							-	-	
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	23	913,200,000											-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	28	35,000,000											-	-	
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi													#DIV/0!	#DIV/0!	
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun													#DIV/0!	#DIV/0!	
IV	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Proporsi Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau**	**100**	**14,861,173,219**		**-**	**100**	**3,874,600,290**							-	-	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**		**14,861,173,219**				**3,874,600,290**							#DIV/0!	-	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	724	14,737,060,319			10	3,874,600,290.00							-	-	
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4	124,112,900											-	-	
V	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana sarana dan utilitasb bumum (PSU)**	**100**	**44,186,237,004**		**6,058,125,200**	**100**	**12,865,221,240**							-	-	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Cakupan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**100**	**44,186,237,004**		**6,058,125,200**	**30**	**12,865,221,240**							-	-	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	4	3,737,048,013	1	330,357,000	10	300,000,000.00					-	-	-	-	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode Tahun 2023 s/d 2026		Realisasi capaian kinerja Renstra perangkat daerah Tahun lalu (2024)		Target kinerja dan anggaran Renja perangkat daerah tahun berjalan (tahun 2025 yang dievaluasi.		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Unit perangkat daerah penanggungjawab
									I		II						
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang fungsi Hunian	24	36,358,883,351	20	5,727,768,200	20	12,565,221,240.00	**1**	8,400,000			1	8,400,000	4	0.02	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12	45,000,000			-	-							-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman		8	50,000,000											-	-	
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	1	32,084,400											-	-	
	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Jumlah Rumah Penerima Manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik	884	3,963,221,240											-	-	
			3,073	**80,668,075,180**	**228**	**8,651,458,012**	**500**	**21,046,908,618**	**20**	**849,334,764**			20	849,334,764	0.66	1.05	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

NO	Jenis Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)/ Sub Kegiatan (sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra PD Tahun 2026		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian kinerja dan Realisasi anggaran Tahun 2025				Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		OPD Penanggung Jawab
									Tw 1		Tw 2						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100	5,202,352,443	100	3,049,074,179	100	2,669,725,964	100	944,937,268			200	1,631,702,719	-	31.36	Sekretariat
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	100	64,500,000	100	33,705,000	100	20,942,427	-	-			-	-	-	0.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	13,000,000	5	4,937,000	5	3,904,427	0	-			-	-		0.00	Sekretariat
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA SKPD	5	8,000,000	5	4,518,000	5	2,625,000					-	-	-	0.00	Sekretariat
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA P SKPD	5	8,000,000	5	4,728,000	5	2,625,000					-	-	-	0.00	Sekretariat
	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	12	8,000,000	12	4,923,000	12	2,225,000	0	-			-	-	-	0.00	Sekretariat
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	12	7,500,000	12	5,323,000	12	2,625,000					-	-	-	0.00	Sekretariat
	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Lakip SKPD	3	10,000,000	3	4,763,000	3	4,513,000	0	-			-	-	-	0.00	Sekretariat
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah	3	10,000,000	3	4,513,000	3	2,425,000	0	-			-	-	-	0.00	Sekretariat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan pelayanan administrasi keuangan**	100	3,426,309,181	100	2,698,815,229	100	2,477,600,783	100	914,937,268			200	1,536,932,719	2		Sekretariat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43	3,347,309,181	43	2,623,799,229	43	2,456,740,783	43	914,937,268			86	1,521,122,719	2	45.44	Sekretariat
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	2	45,000,000	2	65,520,000	2	15,810,000	0	-			2	15,810,000	1	35.13	Sekretariat
	Pelaksanaan dan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	2	20,000,000		-							-	-	-	0.00	Sekretariat
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD	2	7,000,000	2	4,748,000	2	2,525,000					-	-	-	0.00	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	2	7,000,000	2	4,748,000	2	2,525,000					-	-	-	0.00	Sekretariat
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	100	28,200,000	100	16,260,000	100	10,680,000					-	-	-		
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD	2	10,000,000		-							-	-	-	0.00	
	Penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah SKPD	2	18,200,000	2	16,260,000	2	10,680,000					-	-	-	0.00	Sekretariat
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100	376,668,170	100	7,373,000	100	13,525,000					-	-	-		
	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1	15,000,000		-							-	-	-	0.00	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapanya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapanya	2	173,668,170	1	-		10,500,000					-	-	-	0.00	Sekretariat
	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2	8,000,000	2	7,373,000	2	3,025,000					-	-	-	0.00	Sekretariat
	Pendidikan dap pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2	100,000,000		-							-	-	-	0.00	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2	80,000,000		-		-					-	-	-	0.00	
	Administrasi umum perangkat daerah	**Cakupan Administrasi umum Perangkat Daerah**	100	476,560,439	100	168,636,950	100	76,822,754	100	30,000,000			200	44,770,000	2	9.39	
	Penyediaan komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2	15,000,000	2	2,710,000	2	-					-	-	-	0.00	Sekretariat
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	90,000,000	5	19,164,000	5	-					-	-	-	0.00	Sekretariat
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	15,000,000	5	4,875,000	5	2,037,754					-	-	-	0.00	Sekretariat
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	5	15,000,000	5	1,440,000	5	-					-	-	-	0.00	Sekretariat
	Fasilitasi kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2	40,000,000	2	11,100,000	2	-					-	-	-	0.00	Sekretariat
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5	301,560,439	5	129,347,950	5	74,785,000	5	30,000,000			10	44,770,000	2	14.85	Sekretariat
	Pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100	391,614,653		17,981,000	100	-					-	-	-	0.00	
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	2	80,000,000		-							-	-	-	0.00	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1	181,614,653		-							-	-	-	0.00	
	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	4	40,000,000	0	17,981,000	4	-					-	-	-	0.00	Sekretariat
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4	90,000,000		-							-	-	-	0.00	
	Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100	38,500,000	100	10,197,600	100	4,861,000	-	-			100	2,100,000	1	5.45	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	10	4,000,000	10	1,207,000	10	-					-	-	-	0.00	Sekretariat
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	5	10,000,000	5	8,036,000	5	4,861,000					5	2,100,000	1	21.00	Sekretariat
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	9,500,000		-							-	-	-	0.00	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5	15,000,000	5	954,600	5	-					-	-	-	0.00	Sekretariat
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100	400,000,000	100	96,105,400	100	65,294,000	-	-			100	47,900,000	1	11.98	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya	4	250,000,000	4	90,180,000	4	65,294,000	0	-			4	47,900,000	1	19.16	Sekretariat
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinan	4	40,000,000		-							-	-	-	0.00	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4	30,000,000	4	5,925,400	4	-					-	-	-	0.00	Sekretariat
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4	80,000,000		-	1	-					-	-	-	0.00	
II	**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase penyelesaian pelanggaran perda/ perkada, persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan (k3), Jumlah petugas Linmas per 10.000 penduduk**	100	4,954,996,821	100	2,894,395,500	100	1,989,066,296	100	449,964,000			200	1,090,164,000	2	22.00	
	Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	**Cakupan gangguan ketentramam dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kab/ Kota**	100	4,497,854,256	100	2,841,775,500	100	1,976,766,296	100	449,964,000			200	1,090,164,000	2	24.24	

	Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah laporan gangguan trantibum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	10	1,400,200,000	10	967,992,200	10	1,042,951,896	10	244,764,000			20	550,764,000	2	39.33	Bid. Ops
	Penindakan atas gangguan Ketentraman dan ketertiban umum Berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	jumlah laporan gangguan trantibum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	10	100,000,000	10	10,000,000	10	-					-	-	-	0.00	Bid. Ops
	Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum serta perlindungan masyarakat tingkat Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan trantibum dan perlindungan masyarakat tingkat Kab/ Kota	2	100,000,000		-							-	-	-	0.00	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka trantibum	2	1,300,200,000	2	906,292,200	2	921,014,400	2	205,200,000			4	539,400,000	2	41.49	Bid. Linmas
	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM	Jumlah SDM sat Pol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	5	1,360,000,000	5	917,318,700	5	-	0	-			-	-	-	0.00	Bid. Linmas
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	2	130,000,000	2	26,310,000	2	7,050,000					-	-	-	0.00	Bid. Penmas
	Pengadaan dan pemeliharaan saran dan prasarana trantibum	Jumlah sarana dan prasarana trantibum yang tersedia	2	50,000,000	2	6,884,400	1	-					-	-	-	0.00	Bid. Linmas
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang telah di buat	2	7,454,256	2	6,978,000	2	5,750,000					-	-	-	0.00	Bid. Ops
	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Lporan penyediaan layanan dampak penegakkan perda dan perkada yang terlayani	1	50,000,000		-							-	-	-	0.00	
	Penegakan Peraturan Daerah Kab/ Kota dan peraturan Bupati/ Walokota	**Cakupan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota**	100	347,142,565	100	52,620,000	100	12,300,000	-	-			-	-	-	0.00	
	Sosialisasi Penegakkan Perda dan Perbub/ Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakkan perda/perkada kepada masyarakat	2	107,503,870		-							-	-	-	0.00	
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati/ Walikota	2	120,000,000	2	26,310,000	2	7,050,000					-	-	-	0.00	Bid. Perda
	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan pelaksanaan Penanganan atas pelanggaran Perda dan perkada sesuai SOP	2	119,638,695	2	26,310,000	2	5,250,000					-	-	-	0.00	Bid. Perda
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kab/ Kota	**cakupan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kab/Kota**	100	110,000,000									-		-		
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS penegak perda	1	110,000,000	0								-		-	0.00	
								Rata-rata capaian Kinerja (%)	29.94				58.42				
								Predikat Kinerja	Sangat Rendah		Sangat Rendah		Rendah				
		Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program		10,157,349,264		5,943,469,679		4,658,792,260		1,394,901,268		######		2,721,866,719			
														Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh Program		58.42	
														Predikat Kinerja dari seluruh Program		Rendah	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Koordinasi dan kerja sama antar Bidang di Satuan Polisi Pamong Praja yang baik.																	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang kinerja dan minimnya alokasi anggaran Satuan Polisi Pamong praja.																	
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi dengan Bidang dan Instansi yang lain dalam hal pemenuhan capaian target.																	
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja OPD tahun berikutnya : Meningkatkan alokasi dana, fasilitas serta sarana dan prasarana penunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.																	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**2,917,816,768**	**100 %**	**2,031,449,106**	**100 %**	**1,978,354,368**	**100**	**565,457,444**	**100**	**565,457,444**	**100 %**	**2,596,906,550**	**## %**	**18.02**	**BPBD**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 %**	**35,787,700**	**100 %**	**22,879,700**	**100 %**	**8,964,000**	**100**	**2,988,000**	**100**	**2,988,000**	**100 %**	**25,867,700**	**## %**	**5.08**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	5,040,000	5 Dok	3,079,000	5 Dok	2,988,000				-	5 Dok	3,079,000	## Dok	0.61	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	5,040,000	5 Dok	3,021,000						-	5 Dok	3,021,000	## Dok	0.60	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	5,040,000	5 Dok	3,021,000						-	5 Dok	3,021,000	## Dok	0.60	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15 Dok	5,040,000	5 Dok	3,858,350						-	5 Dok	3,858,350	## Dok	0.77	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15 Dok	5,040,000	5 Dok	3,858,350						-	5 Dok	3,858,350	## Dok	0.77	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap.	5,040,000	5 Lap.	3,021,000	5 Lap.	2,988,000	5	2,988,000	5	2,988,000	10 Lap.	6,009,000	## Lap.	1.19	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap.	5,547,700	5 Lap.	3,021,000	5 Lap.	2,988,000				-	5 La	3,021,000	## Lap.	0.54	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**1,542,719,172**		**1,693,049,006**		**1,791,072,497**		**496,939,444**		**496,939,444**		**2,189,988,450**		**3.41**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Org	1,495,652,736	25 Org	1,665,887,006	25 Org	1,771,192,497	25	491,379,444	25	491,379,444	50 Or	2,157,266,450	## Org	1.44	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dok	37,434,436	3 Dok	21,120,000	3 Dok	19,880,000	1	5,560,000	1	5,560,000	4 Dok	26,680,000	## Dok	0.71	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap.	4,816,000	5 Lap	3,021,000						-	5 Lap.	3,021,000	## Lap.	0.63	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Lap.	4,816,000	5 Lap	3,021,000						-	5 Lap.	3,021,000	## Lap.	0.63	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**71,000,000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	

	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3	Unit	12,000,000		-						-	-	Pa	-	-	Paket	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50	Paket	35,000,000		-						-	-	Pak	-	-	Paket	-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25	Org	12,000,000															
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	Org	12,000,000															
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**492,840,896**		**216,442,310**		**136,395,000**		**40,115,000**		**40,115,000**			**256,557,310**			**4.97**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4,235,000	1	Paket	2,000,000	1 Paket	2,138,000	1	2,138,000	1	2,138,000	2	Paket	4,138,000	##	Paket	0.98	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	70,000,000		-	1	Paket	26,300,000	1	26,275,000		26,275,000	-	Pak	26,275,000	-	Paket	0.38	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	5,000,000													-		-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	10,000,000	1	Paket	6,600,000	1 Paket	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	2	Pa	12,600,000	##	Paket	1.26	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3,630,000	1	Paket	2,000,000	1 Paket	3,577,000	1	3,577,000	1	3,577,000	2	Pak	5,577,000	##	Paket	1.54	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yang Disediakan	5	Dok	15,120,243	5	Dok	2,125,000	5 Dok	2,125,000	5	2,125,000	5	2,125,000	10	Dok	4,250,000	##	Dok	0.28	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47	Lap.	380,055,653	50	Lap.	203,717,310	50 Lap.	96,255,000					50	Lap.	203,717,310	##	Lap.	0.54	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dok	4,800,000															-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**401,390,000**		**-**		**-**		**-**		**-**			**-**			**-**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-		-						-							
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-		-						-							
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Paket	165,000,000		-						-							-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Paket	165,000,000																
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	32,670,000																
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	38,720,000																
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**89,859,000**		**53,301,690**		**15,798,871**		**12,508,871**		**12,508,871**			**65,810,561**			**3.68**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75	Lap.	2,376,000	50	Lap.	2,016,000	50 Lap.	2,230,000	50	2,230,000	50	2,230,000	###	La	4,246,000	##	Lap.	1.79	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Lap.	43,560,000	3	Lap.	35,763,690	3 Lap.	1,560,000				-	3	Lap.	35,763,690	##	Lap.	0.82	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Lap.	19,965,000															-	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Lap.	23,958,000	5	Lap.	15,522,000	5	Lap.	12,008,871	4	10,278,871	4	10,278,871	9	Lap.	25,800,871	##	Lap.	1.08	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**284,220,000**			**45,776,400**			**26,124,000**		**12,906,129**		**12,906,129**			**58,682,529**			**0.88**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	32,670,000																	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	66,550,000	2	Unit	45,776,400	2	Unit	26,124,000	1	12,906,129	1	12,906,129	3	Unit	58,682,529	##	Unit	0.88	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	20,000,000																	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	Unit	165,000,000																	
II	**Program Informasi Dan Komunikasi Publik**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah**			**4,308,815,321**			**1,450,360,835**			**1,058,000,000**		**243,630,000**		**243,630,000**			**1,016,815,835**			**6.88**	
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan																				
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrsi																				
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**4,308,815,321**			**1,450,360,835**			**1,058,000,000**		**243,630,000**		**243,630,000**			**1,016,815,835**			**6.88**	
	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	30	Lap.	500,000,000	30	Lap.	660,500,000	30	Lap	690,000,000	30	615,000,000	30	615,000,000	60	Lap	1,275,500,000	##	Unit	2.55	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyaraka	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	15	Komunitas	178,000,000	10	Komunita	16,675,000	15	Komunitas	50,000,000			-	-	10	Komu	16,675,000	##	Unit	0.09	
	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	5	Lap.	150,000,000	5	Lap.	9,475,000						-	-	5	Lap	9,475,000	##	Unit	0.06	
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	8	Permohonan	2,000,000,000	8	Permohon	449,955,000	8	Permohon	75,000,000	4	33,630,000	4	33,630,000	12	Perm	483,585,000	##	Unit	0.24	
	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100	%	65,000,000	100	%	2,652,000						-	-	###	%	2,652,000	##	Unit	0.04	
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	30	Rekomendasi	65,000,000	20	Rekomendasi	28,497,535						-	-	20	Rekom	28,497,535	##	Unit	0.44	
	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100	%	370,000,000	100	%	52,104,400						-	-	###	%	52,104,400	##	Unit	0.14	

	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	3 Media	600,000,000	3 Media	199,950,000	3 Media	33,000,000			-	-	3 Media	199,950,000	## Unit	0.33	
	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	3 Dok	50,815,321	3 Dok	10,380,000					-	-	3 Do	10,380,000	## Unit	0.20	
	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	15 Konten	80,000,000	2100 Konten	8,400,000	15 Konten	210,000,000	15	210,000,000	15	210,000,000	### Kon	218,400,000	## Unit	2.73	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/ pelatihan	100 Org	250,000,000	50 Org	11,771,900					-	-	50 Org	11,771,900	## Unit	0.05	
III	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Persenyase OPD yang memiliki aplikasi informatika terintegrasi**		**373,191,770**		**322,340,880**		**1,986,280,000**		**5,964,200**		**-**		**328,305,080**		**11.54**	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	**Cakupan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**67,406,770**		**132,891,580**		**-**		**-**		**-**		**132,891,580**		**1.97**	
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Des	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dok	67,406,770	1 Dok	132,891,580					-	-	1 Dok	132,891,580	## Unit	1.97	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**305,785,000**		**189,449,300**		**1,986,280,000**		**5,964,200**		**5,964,200**		**195,413,500**		**9.57**	
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	2 Aplikasi	33,275,000	2 Aplikasi	89,325,600					-	-	2 Aplika	89,325,600	## Unit	2.68	
	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	1 Dok	6,655,000	1 Dok	3,523,000					-	-	1 Do	3,523,000	## Unit	0.53	
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2 Lap.	25,620,000	2 Lap.	6,000,000					-	-	2 Lap	6,000,000	## Unit	0.23	
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dok	12,810,000	1 Dok	3,800,000	1 Dok	7,000,000			-	-	1 Dok	3,800,000	## Unit	0.30	
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	5 Dok	9,982,500	5 Dok	4,842,800					-	-	5 Dok	4,842,800	## Unit	0.49	
	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dok	25,620,000	1 Dok	15,200,000					-	-	1 Dok	15,200,000	## Unit	0.59	
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dok	9,982,500	1 Dok	4,842,800					-	-	1 Do	4,842,800	## Unit	0.49	
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	43 Aplikasi	6,655,000	43 Aplikasi	3,523,000					-	-	43 Aplikasi	3,523,000	## Unit	0.53	
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	43 Aplikasi	12,810,000	43 Aplikasi	3,800,000					-	-	43 Aplika	3,800,000	## Unit	0.30	

	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	15 Dok	25,620,000	15 Dok	10,314,000					-	-	15 Dok	10,314,000	## Unit	0.40	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	2 Unit	12,810,000	2 Unit	3,690,000					-	-	2 Unit	3,690,000	## Unit	0.29	
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	25 PD	16,637,500	20 PD	4,275,000	25 PD	1,979,000,000	0.08	5,964,200	0.08	5,964,200	20 PD	10,239,200	## Unit	0.62	
	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	17 Lay.	19,965,000	17 Lay.	7,500,000					-	-	17 Lay	7,500,000	## Unit	0.38	
	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	5 Dok	25,620,000	5 Dok	7,215,000					-	-	5 Dok	7,215,000	## Unit	0.28	
	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	7 Prog	12,810,000	7 Prog	3,690,000					-	-	7 Prog	3,690,000	## Unit	0.29	
	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dok	25,620,000	1 Dok	10,110,100					-	-	1 Dok	10,110,100	## Unit	0.39	
	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	5 Aplikasi	6,655,000	5 Aplik	3,523,000					-	-	5 Apl	3,523,000	## Unit	0.53	
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	38 PD	16,637,500	38 PD	4,275,000	3 PD	280,000			-	-	38 PD	4,275,000	## Unit	0.26	
IV	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektroal**	**Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**		**291,781,677**		**-**		**149,479,304**		**7,800,000**		**7,800,000**		**7,800,000**		**0.23**	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	**Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**		**291,781,677**		**-**		**149,479,304**		**7,800,000**		**7,800,000**		**7,800,000**		**0.23**	
	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	4 Org	33,275,000	4 Org			48,410,304		7,800,000	-	7,800,000	4 Org	7,800,000	## Unit	0.23	
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 %	66,550,000	100 %						-	-	### %	-	## Unit		
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 %	33,567,677	100 %		100 %	101,069,000			-	-	### %	-	## Unit	-	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	5 Dok	93,170,000	5 Dok						-	-	5 Dok	-	## Unit	-	
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	5 Dok	65,219,000	5 Dok						-	-	5 Dok	-	## Unit	-	
V	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah**		**146,409,927**		**98,169,000**		**14,302,000**		**2,197,000**		**2,197,000**		**100,366,000**		**3.15**	

	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**106,479,927**		**48,714,000**		**13,252,000**		**2,197,000**		**2,197,000**		**50,911,000**		**1.91**	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	5 Dok	23,957,927	5 Dok	15,730,000	5 Dok	6,820,000			-	-	5 Dok	15,730,000	## Unit	0.66	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	10 Dok	29,282,000	10 Dok	18,210,000	10 Dok	2,409,000	4	909,000	4	909,000	14 Dok	19,119,000	## Unit	0.65	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Lap.	26,620,000	6 Lap.	5,774,000	6 Lap.	975,000			-	-	6 Lap	5,774,000	## Unit	0.22	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	12 OPD	26,620,000	12 OPD	9,000,000	7 OPD	3,048,000	3	1,288,000	3	1,288,000	15 OPD	10,288,000	## Unit	0.39	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	**Cakupan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota**		**39,930,000**		**49,455,000**		**1,050,000**		**-**		**-**		**49,455,000**		**1.24**	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	7 OPD	39,930,000	7 OPD	49,455,000	7 OPD	1,050,000			-	-	7 OPD	49,455,000	## Unit	1.24	
Rata-rata Capaian Kinerja																		
Predikat Kinerja																		
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program				**8,038,015,463**		**3,902,319,821**		**5,186,415,672**		**825,048,644**		**819,084,444**		**4,050,193,465**		**39.83**	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																**39.83**	
Predikat Kinerja dari seluruh Program (Program 1 s.d. Program 5)																	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya kemauan yang kuat bagi para pegawai Dinas Sosial dalam menjalankan tugas yang diemban dan saling membantu dalam proses pencapaian kinerja SKPD																	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : kurangnya anggaran																	
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : anggaran bisa di realisasikan sesuai RAB																	
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : kerjasama antar perencana Dinas dan Bapeda																	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9=5+8		10=9/4x100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**11,605,022,181**	**100%**	**5,244,816,430**	**100%**	**4,547,862,425**		**706,520,891**		**706,520,891**		**1,641,809,832**		**14.15**	**Sekretariat**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**130,465,440**	**100%**	**49,997,250**	**100%**	**32,542,400**	**29%**	**5,374,000**	**22%**	**5,374,000**	**61%**	**79,569,650**	**50.31**	**60.99**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 dok	11,907,000	14 Dok	5,669,650	6 Dok	2,970,000	-	-	-	-	14 Dok	5,669,650	50%	47.62	
	Koordinasi dan Penyusunan dan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dok	11,907,000	6 Dok	6,173,000	3 Dok	2,970,000	-	-		-	6 Dok	9,143,000	50%	76.79	
	Koordinasi dan Penyusunan dan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dok	11,907,000	6 Dok	6,165,900	3 Dok	2,970,000	-	-		-	6 Dok	9,135,900	50%	76.73	
	Koordinasi dan Penyusunan dan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	60 Dok	13,856,220	30 Dok	5,808,000	15 Dok	3,456,200	-			-	30 Dok	9,264,200	50%	66.86	
	Koordinasi dan Penyusunan dan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	60 Dok	13,856,220	15 Dok	5,774,900	15 Dok	3,456,200	-	-	-	-	15 Dok	9,231,100	25%	66.62	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD-SKPD	12 Dok	11,907,000	6 Dok	5,610,900	3 Dok	2,970,000	3 Dok	2,520,000	3 Dok	2,520,000	6 Dok	8,580,900	50%	72.07	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 lap	55,125,000	18 lap	14,794,900	9 lap	13,750,000	3 dok	2,854,000	6 lap	2,854,000	24 lap	28,544,900	50%	51.78	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**7,189,088,241**	**100%**	**4,152,561,488**	**100%**	**1,875,200,525**	**14%**	**654,092,891**	**28%**	**654,092,891**	**100%**	**725,881,157**	**36%**	**31%**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjanan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 org/bulan	6,996,662,241	44 org/bulan	4,068,062,215	25 org/bulan	1,824,347,525	25 org/bulan	654,092,891	25 org/bulan	654,092,891	70 org/bulan	654,092,891	74%	9%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 dok	115,260,000	12 dok	61,810,000	12 dok	30,855,000	-	-	-	-	12 dok	61,810,000	25%	54%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192 Dok	21,696,000	48 dok	7,503,000	48 dok	5,808,000	-	-	-	-	48 dok	7,503,000	25%	35%	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	20,640,000	3 Dok	2,475,266	3 dok	5,280,000	-	-	-	-	3 Dok	2,475,266	25%	12%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Lap	11,610,000	6 lap	7,000,750	3 Lap	2,970,000		-	-	-	6 lap	7,000,750	50%	60%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	96 Lap	11,610,000	48 lap	5,710,257	24 Lap	2,970,000	-		-	-	48 lap	5,710,257	50%	49%	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dok	11,610,000		-	2 Lap	2,970,000	-			0	-	-	-	0%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**59,535,000**	**20%**	**4,501,000**	**100%**	**14,850,000**					**14%**	**4,501,000**	**4%**	**5%**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dok	11,907,000			2 Dok	2,970,000									
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	48 Dok	11,907,000			12 Dok	2,970,000									
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	28 Lap	11,907,000			7 Lap	2,970,000									
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 lap	11,907,000	2 lap	4,501,000	2 lap	2,970,000					2 lap	4,501,000	25%	38%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48 lap	11,907,000			12 lap	2,970,000									
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**104,247,500**	**25%**	**76,742,000**	**100**	**54,247,500**					**25%**	**76,742,000**	**8%**	**25%**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit	-			-	-					-	-			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket	50,000,000	50 Paket	72,153,000	-	-					50 Paket	72,153,000	17%	100%	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dok	3,307,500	12 Dok	4,589,000	6 Dok	3,307,500					12 Dok	4,589,000	50%	100%	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dok	2,970,000			3 Dok	2,970,000					-	-			
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dok	2,970,000			3 Dok	2,970,000					-	-			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	15,000,000			2 org	15,000,000					-	-			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	15,000,000			2 org	15,000,000					-	-			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	15,000,000			2 org	15,000,000					-	-			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**893,696,000**	**100**	**463,310,225**	**100**	**229,392,000**		**17,660,485**		**17,660,485**		**462,516,110**		**202%**	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4,300,000	3 Paket	1,604,600	3 Paket	1,100,000									
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	21,500,000	6 paket	31,256,625	3 Paket	5,500,000					6 paket	31,256,625	42%	100%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	21,500,000	3 Paket	6,600,000	3 Paket	5,500,000									
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 paket	25,800,000	24 paket	14,404,400	12 paket	6,600,000	4 paket	-	8 paket	-	32 paket	14,404,400	67%	56%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 paket	11,868,000	24 paket	7,346,300	12 paket	3,036,000	4 paket	536,550	4 paket	536,550	28 paket	7,882,850	58%	66%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	11,868,000	3 dok	2,760,000	3 dok	3,036,000									
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	10,750,000			3 paket	2,750,000									
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 lapora	12,900,000	6 lap	5,250,000	12 lapora	3,300,000									
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 laporan	731,000,000	70 lap	391,848,300	35 laporan	187,000,000	7 lap	17,123,935	14 lap	17,123,935	84 lap	408,972,235	60.0	56%	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48 dok	11,610,000			12 dok	2,970,000									
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48 dok	30,600,000	12 dok	2,240,000	12 dok	8,600,000									
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**2,166,000,000**	**100**	**72,416,000**	**100**	**1,821,000,000**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**26,016,000**			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	80,000,000				-									
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	1,811,000,000			2 unit	1,776,000,000									
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	35,000,000	10 Unit	26,016,000	5 Unit	15,000,000					10 Unit	26,016,000	50%	74%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	15,000,000			2 Unit	5,000,000									
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	8 Unit	20,000,000			2 Unit	5,000,000									
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	8 Unit	20,000,000			1 Unit	5,000,000									
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	60,000,000			-	-									
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50,000,000			-	-									
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	75,000,000	1 Unit	46,400,000	1 Unit	15,000,000									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**440,500,000**	**75%**	**237,190,400**	**100%**	**440,500,000**	**75%**	**17,548,000**	**38%**	**17,548,000**	**75%**	**254,738,400**	**44%**	**63%**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 lap	1,500,000			12 lap	1,500,000									
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192 lap	9,000,000	72 lap	28,117,000	48 lap	9,000,000	10 lap	2,398,000	32 lap	2,398,000	104 lap	30,515,000	54%	100%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 lap	5,000,000	11 lap	4,740,000	5 lap	5,000,000	2 lap	450,000	2 lap	450,000	13 lap	5,190,000	65%	100%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 lap	425,000,000	24 lap	204,333,400	12 lap	425,000,000	3 lap	14,700,000	3 lap	14,700,000	27 lap	219,033,400	56%	52%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**621,490,000**	**14%**	**188,098,067**	**71%**	**80,130,000**	**14%**	**11,845,515**	**14%**	**11,845,515**	**14%**	**11,845,515**	**13%**	**13%**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	220,000,000	10 unit	188,098,067	10 unit	55,000,000	3 unit	11,845,515	3 unit	11,845,515	10 unit	199,943,582	**90%**	**90.9%**	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 unit	10,750,000			7 unit	2,750,000									
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	10,750,000			7 unit	2,750,000									
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7 unit	10,750,000			7 unit	2,750,000									
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	4 unit	50,640,000			2 unit	16,880,000									
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	4 unit	159,300,000			-	-									
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	159,300,000		-	-	-	-			0		0			
II	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota**	**100%**	**2,190,792,991**	**2021%**	**710,959,300**	**100%**	**587,694,096**	**-**	**44,750,000**		**44,750,000**		**751,684,300**		**34%**	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota**	**100%**	**1,090,072,991**	**40%**	**645,055,000**	**100%**	**290,094,096**	**10%**	**43,600,000**	**20%**	**43,600,000**	**30%**	**684,630,000**	**30%**	**63%**	
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	8 Dok	31,872,000	3 Dok	585,450,000	2 Dok	8,760,000	1 dok	43,600,000	1 dok	43,600,000	4 Dok	629,050,000	50%	100%	**Bid. Pencegahan**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	48 lap	49,680,000	18 lap	34,855,000	12 lap	14,400,000				-	18 lap	34,855,000	38%	70.16	**Bid. Operasi**
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dok	31,480,000		-	3 dok	8,400,000		-	1 dok	-	1 dok	-	8%	-	**Bid. Operasi**
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Dok	27,840,000	-	-	3 dok	7,200,000		-	-	-	-	-		-	**Bid. Operasi**
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12 Dok	27,840,000	-	-	3 dok	7,200,000		-	-	-	-	-		-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	12 unit	142,400,000	6 unit	20,725,000	3 unit	42,000,000		-		-	6 unit	20,725,000	50%	14.55	**Bid. Sarpras**
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	36 orang	301,600,000	3 orang	4,025,000	3 orang	78,000,000		-	-	-	-	-		-	**Bid. Pencegahan**
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	2 Desa/Kel	232,000,000		-	1 desa/kel	60,000,000		-		-		-		-	
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dok	215,200,991		-	3 dok	56,334,096			0	-		-		0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	100 Keluarga	30,160,000		-	25 kel	7,800,000		-		-		-		-	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**Persentase Dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**100%**	**60,320,000**	**-**	**-**	**100%**	**15,600,000**		**-**		**-**		**-**		**-**	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	28 Dok	30,160,000		-	7 dok	7,800,000		-	-	-	-	-		-	
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	28 Dok	30,160,000		-	7 dok	7,800,000		-		-		-		-	
	Investigasi Kejadian Kebakaran	**Persentase Dokumen Investigasi Kejadian Kebakaran**	**100%**	**69,600,000**	**100**	**14,690,000**	**100%**	**18,000,000**	**25%**	**1,150,000**	**25%**	**1,150,000**	**63%**	**15,840,000**	**63%**	23%	**Bid. Operasi**
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	4 Dok	69,600,000	8 dok	14,690,000	1 Dok	18,000,000	1 Dok	1,150,000	1 dok	1,150,000	1 dok	15,840,000	25%	23%	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan Kebakaran yang dilaksanakan**	**100%**	**417,600,000**	**67%**	**51,214,300**	**100%**	**108,000,000**		**-**		**-**		**51,214,300**		12%	**Bid. Pencegahan**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100 orang	139,200,000	50 orang	31,311,800	25 orang	36,000,000		-	-	-	50 orang	31,311,800	**50%**	22.49	
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	8 Desa/Kel	139,200,000	6 Desa/Kel	19,902,500	2 Desa/Kel	36,000,000		-		-	6 Desa/Kel	19,902,500	75%	14.30	
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 dok	139,200,000	-	-	1 dok	36,000,000		-	-	-	-	-		-	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	**Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**100%**	**553,200,000**	**-**	**-**	**-**	**156,000,000**		**-**	-	-	-	-		**-**	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 lap	124,200,000	-	-	3 Lap	36,000,000		-	-	-	-	-		-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	4 dok	87,800,000		-	1 dok	24,000,000		-		-		-		-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	2 unit	235,200,000		-	2 lap	30,000,000		-		-		-		-	-
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	8 lap	106,000,000	-	-	2 unit	66,000,000		-	-	-	-	-		-	
						-		#REF!									
													Rata-rata capaian Kinerja (%)		#REF!		
														Predikat Kinerja		Rendah	
	Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program			#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!	
	Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh Program (Program 1 s.d. Program 11)																
	Predikat Kinerja dari seluruh Program (Program 1 s.d. Program 11)																
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya kemauan yang kuat bagi para pegawai Dinas Sosial dalam menjalankan tugas yang diemban dan saling membantu dalam proses pencapaian kinerja SKPD																	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : kurangnya anggaran																	
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : anggaran bisa di realisasikan sesuai RAB																	
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : kerjasama antar perencana Dinas dan Bapeda																	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester I s.d II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I								
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9=5+8		10=9/4 x100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan**	**100%**	**8,813,475,029**	**100%**	**1,772,623,120**	**100%**	**2,297,846,323**	**20.72%**	**437,783,253**	**20.72%**	**437,783,253**	**100%**	**2,210,406,373**	**100%**	**25.08**	**Dinas Sosial**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	**Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**100%**	**116,000,000**	**100%**	**14,723,500**	**100%**	**28,000,000**	**30.38%**	**9,000,000**	**30.38%**	**9,000,000**	**100%**	**23,723,500**	**100%**	**20.45**	**Dinas Sosial**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja SKPD	4 dok	20,000,000	1 dok	2,376,000	1 dok	4,000,000	0 dok	150,000	0 dok	150,000	1 dok	2,526,000	5 dok	12.63	Dinas Sosial
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunya RKA-SKPD	4 dok	16,000,000	1 dok	2,497,000	1 dok	4,000,000	1 dok	5,010,000	1 dok	5,010,000	1 dok	7,507,000	5 dok	46.92	Dinas Sosial
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunya Perubahan RKA-SKPD	4 dok	16,000,000	0 dok	-	1 dok	4,000,000	0 dok	-	0 dok	-	1 dok	-	5 dok	-	Dinas Sosial
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunya DPA-SKPD	4 dok	16,000,000	1 dok	2,660,000	1 dok	4,000,000	1 dok	1,240,000	1 dok	1,240,000	2 dok	3,900,000	5 dok	24.38	Dinas Sosial
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunya Perubahan DPA-SKPD	4 dok	16,000,000	0 dok	-	1 dok	4,000,000	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	-	5 dok	-	Dinas Sosial
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	4 Lap	16,000,000	1 Lap	3,587,000	1 lap	4,000,000	1 lap	1,150,000	1 lap	1,150,000	2 lap	4,737,000	10 dok	29.61	Dinas Sosial
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen SOP SKPD dan Jumlah Data	4 Lap	16,000,000	1 Lap	3,603,500	1 lap	4,000,000	1 lap	1,450,000	1 lap	1,450,000	2 lap	5,053,500	6 dok	31.58	Dinas Sosial
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah laporan kinerja dan keuangan**	**100%**	**7,134,513,455**	**99.34%**	**1,413,637,640**	**100%**	**1,858,021,920**	**19.25%**	**397,342,253**	**19.25%**	**397,342,253**	**100%**	**1,810,979,893**	**100%**	**25.38**	**Dinas Sosial**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/B	6,939,909,455	1 tahun	1,367,731,640	1 tahun	1,809,370,920	3 bulan	397,342,253	3 bulan	397,342,253	14 bulan	1,765,073,893	14 bulan	25.43	Dinas Sosial
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Admnistrasi	1 dok	162,604,000	12 bulan	42,240,000	12 bulan	40,651,000	0 dok	-	0 dok	-	12 bulan	42,240,000	12 bulan	25.98	Dinas Sosial
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah dokumen Penatausahaan dan	1 dok	-	0 bulan	-	12 bulan	-	0 dok	-	0 dok	-	12 bulan	-	12 bulan	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1 Lap	16,000,000	0 dok	-	1 dok	4,000,000	0 dok	-	0 dok	-	7 dok	-	7 dok	-	Dinas Sosial
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera	1 Lap	16,000,000	1 dok	3,666,000	1 dok	4,000,000	0 dok	-	0 dok	-	5 dok	3,666,000	5 dok	22.91	Dinas Sosial
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada**	**100%**	**8,000,000**	**100%**	**-**	**100%**	**4,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**Dinas Sosial**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya jasa honorarium penatausahaan keuangan dan	0 Lap	8,000,000	0 dok	-	1 dok	4,000,000	0 dok	-	1 tahun	-	0 dok	-	1 tahun	-	Dinas Sosial
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian**	**100%**	**170,961,500**	**100%**	**13,625,000**	**100%**	**43,000,000**	**7.74%**	**-**	**7.74%**	**-**	**100%**	**13,625,000**	**100%**	**7.97**	**Dinas Sosial**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	125,000,000	40 psg	9,800,000	40 psg	35,000,000	0 psg	-	0 psg	-	0 psg	9,800,000	33 psg	7.84	Dinas Sosial
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1 dok	16,000,000	0 dok	3,825,000	1 dok	4,000,000	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	3,825,000	5 dok	23.91	Dinas Sosial
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dok	8,000,000	0 dok	-	0 dok	4,000,000	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	-	Dinas Sosial
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang	1 Lap	21,961,500	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	Dinas Sosial
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sumber daya Aparatur yg mengikuti Bimtek	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	3 orang	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani**	**100%**	**743,204,714**	**98.75%**	**165,754,980**	**100%**	**195,274,403**	**32.74%**	**14,958,000**	**32.74%**	**14,958,000**	**100%**	**180,712,980**	**100%**	**24.32**	**Dinas Sosial**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3 Paket	91,000,000	1 Paket	16,550,100	1 Paket	28,000,000	0 Paket	-	0 Paket	-	1 Paket	16,550,100	1 Paket	**18.19**	Dinas Sosial
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1 Paket	1,500,000	0 Paket	-	0 Paket	-	1 Paket	8,760,000	1 Paket	8,760,000	0 Paket	8,760,000	0 Paket	**584.00**	Dinas Sosial
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	48,000,000	12 bulan	8,887,400	12 bulan	12,000,000	1 Paket	3,000,000	1 bulan	3,000,000	12 bulan	11,887,400	12 bulan	24.77	Dinas Sosial
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	2 Paket	34,807,500	1 Paket	4,800,000	6 bulan	9,075,000	1 paket	1,000,000	1 paket	1,000,000	12 bulan	5,800,000	12 bulan	16.66	Dinas Sosial
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1 dok	53,040,000	1 paket	4,770,000	3 bulan	14,520,000	1 dok	-	1 dok	-	12 bulan	4,770,000	12 bulan	8.99	Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester I s.d II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I								
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	19,719,070	0 Lap	-	0 Lap	9,859,535	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	Dinas Sosial
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1 Lap	470,338,144	5 Lap	125,413,680	5 Lap	115,619,868	1 lap	548,000	1 lap	548,000	1 tahun	-	1 tahun	-	Dinas Sosial
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	1 dok	24,800,000	1 orang operator	5,333,800	1 orang operator	6,200,000	3 bulan	1,650,000	3 bulan	1,650,000	1 orang operator	6,983,800	1 orang operator	28.16	Dinas Sosial
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani**	**100%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**#DIV/0!**	**Dinas Sosial**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	0 unit	-	1 unit		0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 unit	-	1 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	0 unit	-	1 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani**	**100%**	**144,400,000**	**78.02%**	**17,569,300**	**100%**	**36,100,000**	**20.63%**	**3,498,000**	**20.63%**	**3,498,000**	**100%**	**21,067,300**	**100%**	**14.59**	**Dinas Sosial**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	4,800,000	1 lap	1,320,000	1 lap	1,200,000	0 Lap	-	0 Lap	-	12 bulan	1,320,000	12 bulan	27.50	Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 Lap	74,000,000	1 lap	14,289,300	1 lap	18,500,000	1 lap	3,498,000	1 lap	3,498,000	12 bulan	17,787,300	12 bulan	24.04	Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	1 Lap	8,000,000	1 Lap	1,960,000	1 lap	2,000,000	0 lap	-	0 lap	-	12 bulan	1,960,000	12 bulan	24.50	Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Lap	57,600,000	0 Lap	-	1 Lap	14,400,000	0 Lap	-	0 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	Dinas Sosial
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani**	**100%**	**496,395,360**	**98.59%**	**147,312,700**	**100%**	**133,450,000**	**25.23%**	**12,985,000**	**25.23%**	**12,985,000**	**100%**	**160,297,700**	**100%**	**32.29**	**Dinas Sosial**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	13 unit	30,000,000	10 unit	3,583,010	13 unit	7,500,000	0 unit	-	0 unit	-	13 unit	3,583,010	13 unit	11.94	Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	20,000,000	0 unit	-	4 unit	5,000,000	0 unit	-	0 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	Dinas Sosial
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	17 unit	446,395,360	14 unit	143,729,690	17 unit	120,950,000	13 unit	12,985,000	13 unit	12,985,000	12 bulan	156,714,690	12 bulan	35.11	Dinas Sosial
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**16,170 KK**	**1,529,400,000**	**16,170 KK**	**17,427,000**	**16,170 KK**	**414,000,000**	**46.75%**	**-**	**46.75%**	**-**	**16,170 KK**	**17,427,000**	**16,170 KK**	**1.14**	**Dinas Sosial**
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	**PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**100%**	**954,400,000**	**97.95%**	**-**	**100%**	**256,500,000**	**0%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**Dinas Sosial**
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas	331 Keluarga	954,400,000	0 KK	-	284 KK	256,500,000	0 KK	-	1 tahun	-	0 KK	-	0 KK	-	Dinas Sosial
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya	0 Keluarga	-	0 KK	-	1 tahun	-	0 KK	-	1 tahun	-	0 KK	-	0 KK	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Pengumpulan Sumbungan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	#DIV/0!	**Dinas Sosial**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	0 dok	-	0 dok		0 dok		0 dok		0 dok		0 dok		0 dok	#DIV/0!	**Dinas Sosial**
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	**PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**100%**	**575,000,000**	**100%**	**17,427,000**	**100%**	**157,500,000**	**46.75%**	**-**	**46.75%**	**-**	**100%**	**17,427,000**	**100%**	**3.03**	**Dinas Sosial**
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3 orang	90,000,000	0 orang	-	3 orang	25,000,000	0 orang	-	3 orang	-	3 orang	-	3 orang	-	Dinas Sosial
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	7 TKSK	140,000,000	26 org	17,427,000	7 TKSK	37,500,000	0 orang	-	7 TKSK	-	7 TKSK	17,427,000	7 TKSK	12.45	Dinas Sosial
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya	0 Keluarga	-	1 tahun	-	1 tahun	-	0 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang	4 Lembaga	260,000,000	1 tahun	-	1 tahun	75,000,000	0 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	Dinas Sosial
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan	2 Sertifikat	85,000,000	1 tahun	-	1 tahun	20,000,000	0 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	Dinas Sosial
III	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN**	**Persentase Warga Negara Migran Akibat Korban**	**0%**		**0%**		**0%**		**0%**		**0%**		**0%**		**0%**		**Dinas Sosial**
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak	**Persentase Pemulangan Warga Negara Migran**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**Dinas Sosial**
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	0 WNM	-	0 WNM	-	0 WNM	-	0 WNM	-	0 WNM	-	0 WNM	-	0 WNM	-	Dinas Sosial
IV	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang direhabilitasi**	**5.09%**	**1,740,280,967**	**40%**	**45,618,225**	**4.45%**	**432,069,757**	**0%**	**2,642,000**	**0.00%**	**2,642,000**	**4.45%**	**48,260,225**	**4.45%**	**2.77**	**Dinas Sosial**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	**Persentase PMKS yang direhabilitasi**	**5.09%**	**1,740,280,967**	**40%**	**45,618,225**	**4.45%**	**432,069,757**	**0%**	**2,642,000**	**0.00%**	**2,642,000**	**4.45%**	**48,260,225**	**4.45%**	**2.77**	**Dinas Sosial**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester I s.d II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I								
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan	200 Orang	664,676,331	151	23,048,000.00	200 orang	167,069,757	0 orang	-	1 Tahun	-	1 Tahun	23,048,000	1 Tahun	3.47	Dinas Sosial
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan	100 Orang	327,000,000	0 orang	-	150 orang	85,000,000	0 orang	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	Dinas Sosial
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan	100 Orang	495,500,000	24 orang	22,570,225	100 orang	145,000,000	0 orang	-	1 Tahun	-	1 Tahun	22,570,225	1 Tahun	4.56	Dinas Sosial
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	0 Orang	-	0 orang	-	1 Tahun	-	0 orang	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan	100 Orang	55,000,000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga	110 Orang	63,104,636	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	453 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	Dinas Sosial
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran,	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor	0 Orang	-	0 orang	-	1 Tahun	-	0 orang	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang ynng Mendapatkan Akses ke	0 Orang	-	0 orang	-	1 Tahun	-	0 orang	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data	400 Orang	135,000,000	0 orang	-	50 orang	35,000,000	1 dok	2,642,000	1 tahun	2,642,000	1 tahun	2,642,000	1 tahun	1.96	Dinas Sosial
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	0 Orang	-	0 orang	-	1 tahun	-	0 orang	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	0 Orang	-	0 orang	-	1 tahun	-	0 orang	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	0 Orang	-	0 orang	-	1 tahun	-	0 orang	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	**Persentase PMKS yang direhabilitasi**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**#DIV/0!**	**Dinas Sosial**
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	0 orang	-	0 orang	-	1 tahun	-	0 orang	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan	0 orang	-	0 orang	-	1 tahun	-	0 orang	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan	0 orang	-	0 orang	-	1 tahun	-	0 orang	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan	0 orang	-	0 orang	-	1 tahun	-	0 orang	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan	0 orang	-	0 orang	-	1 tahun	-	0 orang	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan	0 orang	-	0 orang	-	1 tahun	-	0 orang	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial	0 orang	-	0 orang	-	1 tahun	-	0 orang	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran,	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan	0 orang	-	0 orang	-	1 tahun	-	0 orang	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke	0 orang	-	0 orang	-	1 tahun	-	0 orang	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	0 orang	-	0 orang	-	1 tahun	-	0 orang	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	0 orang	-	0 orang	-	1 Tahun	-	0 orang	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	1 Tahun	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan	0 orang	-	0 orang	-	1 tahun	-	0 orang	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	#DIV/0!	Dinas Sosial
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ddan Kerjasama	0 dok	-	0 orang	-	1 tahun	-	0 dok	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	#DIV/0!	Dinas Sosial
V	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase ditang dalam OPD yang dilayani**	**100%**	**1,607,639,351**	**100%**	**220,980,200**	**100%**	**473,339,514**	**0%**	**26,455,947**	**0.00%**	**26,455,947**	**100%**	**247,436,147**	**100%**	**15.39**	**Dinas Sosial**
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**Persentase Anak-Anak Terlantar yang terjangkau,**	**100%**	**125,000,000**	**-**	**-**	**-**	**35,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Dinas Sosial**
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan	20 anak	20,000,000	0 anak	-	20 anak	5,000,000	0 anak	-	20 anak	-	20 anak	-	20 anak	-	Dinas Sosial
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang mendapatkan Rujukan	20 anak	20,000,000	0 anak	-	20 anak	5,000,000	0 anak	-	20 anak	-	20 anak	-	20 anak	-	Dinas Sosial
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	30 anak	85,000,000	0 anak		30 anak	25,000,000	0 anak	-	30 anak	-	30 anak	-	30 anak	-	Dinas Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	**Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan**	**100%**	**1,482,639,351**	**100%**	**220,980,200**	**100%**	**438,339,514**	**0%**	**26,455,947**	**0.00%**	**26,455,947**	**100%**	**247,436,147**	**100%**	**16.69**	**Dinas Sosial**
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	47330 KK	507,679,956	0 KK	-	47330	153,339,514	66129 jiwa	26,455,947	-	26,455,947	1 tahun	26,455,947	1 tahun	5.21	Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester I s.d II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I								
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan	1 tahun	195,000,000	95 desa/ keluraha	150,808,000	95 org	55,000,000	-	-	95 org	-	1 tahun	150,808,000	1 tahun	77.34	Dinas Sosial
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang	1 Tahun	574,959,395	136 Klrg	70,172,200	136 Klrg	170,000,000	-	-	136 Klrg	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	Dinas Sosial
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan	1 Tahun	205,000,000	-	-	50 Klrg	60,000,000	-	-	-	-	1 Tahun	-	1 Tahun	-	Dinas Sosial
VI	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase yang memperoleh bantuan**	**100%**	**3,337,563,422**	**100%**	**-**	**100%**	**1,371,479,594**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**Dinas Sosial**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	**Persentase yang memperoleh bantuan**	**100%**	**3,175,015,477**	**100%**	**-**	**100%**	**1,322,479,594**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**Dinas Sosial**
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan	1 tahun	1,070,015,477	0 orang	-	200 orang	452,479,594	-	-	-	-	1 tahun	-	1 tahun	-	Dinas Sosial
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan	1 tahun	810,000,000	0 orang	-	150 orang	350,000,000	-	-	-	-	1 tahun	-	1 tahun	-	Dinas Sosial
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 tahun	725,000,000	0 orang	-	2 tempat	300,000,000	-	-	-	-	1 tahun	-	1 tahun	-	Dinas Sosial
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan	1 tahun	265,000,000	0 orang	-	50 orang	100,000,000	-	-	-	-	1 tahun	-	1 tahun	-	Dinas Sosial
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan	1 tahun	305,000,000	0 orang	-	50 orang	120,000,000	-	-	-	-	1 tahun	-	1 tahun	-	Dinas Sosial
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	**Persentase yang memperoleh bantuan**	**100%**	**162,547,945**	**100%**	**-**	**100%**	**49,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**Dinas Sosial**
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi,	1 Kampung	72,000,000	0 kampung	-	2 kampung	22,000,000	-	-	-	-	1 tahun	-	1 tahun	-	Dinas Sosial
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi,	1 tahun	90,547,945	0 orang	-	45 orang	27,000,000	-	-	-	-	1 tahun	-	1 tahun	-	Dinas Sosial
														Rata-rata capaian Kinerja (%)		**14.82**	
														Predikat Kinerja		Rendah	
	Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program			**17,028,358,768**		**2,056,648,545**		**4,988,735,188**		**466,881,200**		**466,881,200**		**2,523,529,745**		**14.82**	
	Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh Program (Program 1 s.d. Program 11)																
	Predikat Kinerja dari seluruh Program (Program 1 s.d. Program 11)																

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Anggaran dan Anggaran RPD dan RENSTRA Tahun 2026		Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		OPD Penanggung jawab
1	2	3		4		5		6		7		8=7		9=5+8		10=9/4 * 100%		11
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayanai administrasi perkantorannya**	**Persen**	**100%**	**6,238,336,554**	**100%**	**1,636,678,340**	**100%**	**1,699,100,767**	**46.10%**	**351,850,259**	**46,1%**	**351,850,259**	**#VALUE!**	**1,988,528,599**	**#VALUE!**	**31.88**	**Bid. Sekretariat**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**126,365,209**	**100%**	**23,296,000**	**100%**	**24,507,000**	**60.00%**	**14,640,000**	**60.00%**	**14,640,000**	**160%**	**37,936,000**	**160.00**	**30.02**	**Bid. Sekretariat**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	9	3,831,647	2	4,660,000	9	7,067,000		-		-	**2**	**4,660,000**	**22**	**121.62**	**Bid. Sekretariat**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	3	3,500,000	2	4,660,000	4	4,360,000	**3**	**3,660,000**	3	3,660,000	**5**	**8,320,000**	**167**	**237.71**	**Bid. Sekretariat**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dok	3	3,500,000	2								**2**	**0**	**67**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok	15	3,500,000	14	4,660,000	20	4,360,000	**18**	**3,660,000**	18	3,660,000	**32**	**8,320,000**	**213**	**237.71**	**Bid. Sekretariat**
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dok	15	3,500,000	14								**14**	**0**	**93**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD-SKPD	Lap	3	3,500,000	2	4,660,000	9	4,360,000	7	3,660,000	7	3,660,000	**9**	**8,320,000**	**300**	**237.71**	**Bid. Sekretariat**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	9	3,500,000	2	4,656,000	9	4,360,000	7	**3,660,000**	7	3,660,000	**9**	**8,316,000**	**100**	**237.60**	**Bid. Sekretariat**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Ketepatan Waktu menyelesikan laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**persen**	**25%**	**1,123,000,000**	**25%**	**1,258,688,650**	**25%**	**1,390,399,167**	**5.82%**	**324,010,259**	**5.82%**	**324,010,259**	**31%**	**1,582,698,909**	**123**	**140.93**	**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Asn	org/bln	17	1,102,000,000	17	1,215,788,650	17	1,348,099,167	17	324,010,259	17	324,010,259	**34**	**1,539,798,909**	**200**	**139.73**	**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	3	3,500,000	3	34,440,000	3	34,440,000					**3**	**34,440,000**	**100**	**984.00**	**Bid. Sekretariat**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Anggaran dan Anggaran RPD dan RENSTRA Tahun 2026		Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		OPD Penanggung jawab
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dok	48	3,500,000	48								**48**	**0**	**100**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	dok	3	3,500,000	3								**3**	**0**	**100**	**-**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	lap	3	3,500,000	3	3,800,000							**3**	**3,800,000**	**100**	**108.57**	**Bid. Sekretariat**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteram SKPD	*Lap*	24	3,500,000	24	4,660,000	26	4,360,000					**24**	**4,660,000**	**100**	**133.14**	**Bid. Sekretariat**
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*dok*	3	3,500,000	4		4	3,500,000					**4**	**0**	**133**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***dok***	3	**21,000,000**	3		3	**4,200,000**					**3**	**0**	**100**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dok	3	3,500,000	3	0	3	4,200,000					**3**	**0**	**100**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dok	3	3,500,000									**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Lap	3	3,500,000	3								**3**	**0**	**100**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	3	3,500,000	3								**3**	**0**	**100**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	3	3,500,000	3								**3**	**0**	**100**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	3	3,500,000	3								**3**	**0**	**100**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	***Persen***	100%	**96,000,000**	100%	12,600,000					***100%***	-	**200%**	**12,600,000**	**200**	**13.13**	**Bid. Sekretariat**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Anggaran dan Anggaran RPD dan RENSTRA Tahun 2026		Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		OPD Penanggung jawab
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	30	5,000,000									**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	30	30,000,000	30	12,600,000					*30*	-	**60**	**12,600,000**	**200**	**42.00**	**Bid. Sekretariat**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Dok*	1	5,000,000	2								**2**	**0**	**200**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Dok*	2	3,000,000									**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja pegawai	*Dok*	3	5,000,000									**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	*Orang*	1	40,000,000									**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	*Orang*	30	5,000,000									**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Bimbingan Tekhnis Implementasi Perturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan	*Orang*	1	3,000,000									**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**140,275,000**	**100%**	**183,642,590**	**100%**	**155,487,500**			**35,9%**	**-**	**#VALUE!**	**183,642,590**	**#VALUE!**	**130.92**	**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Paket	2	5,000,000	2								**2**	**0**	**100**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peraltan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	10,000,000									**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket bahan logitistik kantor	Paket	5	10,000,000									**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logitistik kantor	Paket	5	10,000,000	5	10,014,000	8	4,600,000			3	-	**8**	**10,014,000**	**160**	**100.14**	**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	5	5,000,000	5	6,580,350	10	2,672,500			2	-	**7**	**6,580,350**	**140**	**131.61**	**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dok	5	5,500,000	5								**5**	**0**	**100**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah paket Bahan/ Material yang disediakan	Paket	9	2,500,000									**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitsa kunjungan tamu	Lap	15	5,000,000	15	9,280,000	15	6,000,000			4	-	**19**	**9,280,000**	**127**	**185.60**	**Bid. Sekretariat**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Anggaran dan Anggaran RPD dan RENSTRA Tahun 2026		Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		OPD Penanggung jawab
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraa rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	17	78,275,000	17	157,768,240	17	142,215,000			6	-	**23**	**157,768,240**	**135**	**201.56**	**Bid. Sekretariat**
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis SKPD	Dok	20	5,000,000									**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dok	3	4,000,000	3								**3**	**0**	**100**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100%**	**45,000,000**	**100%**	**106,979,500**	**100%**	**73,421,600**	18%	**13,200,000**	18%	**13,200,000**	**118%**	**120,179,500**	**118**	**267.07**	**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	20	3,000,000	20	8,004,000	20	3,000,000			9	-	**29**	**8,004,000**	**145**	**266.80**	**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	**Lap**	1	30,000,000	3	16,223,900	1	6,000,000			**2**	-	**5**	**16,223,900**	**500**	**54.08**	**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Lap**	10	10,000,000			12	8,520,000					**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	**Lap**	5	2,000,000	5	82,751,600	6	55,901,600	**3**	**13,200,000**	**3**	13,200,000	**8**	**95,951,600**	**160**	**4,797.58**	**Bid. Sekretariat**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100%**	**48,500,000**	**1**	**51,471,600**	**100%**	**51,085,500**			47.3%	**-**	**147%**	**51,471,600**	**147**	**106.13**	**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	**unit**	2	10,000,000		51,471,600					**1**	-	**1**	**51,471,600**	**50**	**514.72**	**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya	**unit**	5	5,000,000	5		5	51,085,500					**5**	**0**	**100**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinana Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	**unit**	1	500,000									**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	**unit**	1	5,000,000									**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	**unit**	1	6,000,000									**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetal lainnya yang Dipelihara	**unit**	1	1,000,000									**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang Dipelihara	**unit**	1	1,000,000									**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Sekretariat**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Anggaran dan Anggaran RPD dan RENSTRA Tahun 2026		Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		OPD Penanggung jawab
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharan/ Direhabilitasi	**unit**	1	10,000,000									**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Sekretariat**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	*Unit*	1	10,000,000									**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Sekretariat**
II	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja**	***Persen***	**18,09%**	**52,980,856**									**0%**	**0**	**#VALUE!**	**-**	
	PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK)	**Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro**	***dok***	1	**52,980,856**									**0%**	**0**	**-**	**-**	
	Penyusunan rencana tenaga kerja makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	***dok***	2	26,490,428									**0**	**0**	**-**	**-**	
	Penyusunan rencana tenaga kerja mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	***Perusahaan***	2	26,490,428									**0**	**0**	**-**	**-**	
III	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan**	**Persen**	**0.37%**	**755,000,000**	**0.003**	**299,726,600**	**0.37%**	**300,000,000**			**0.30%**	**-**	**0.60%**	**299,726,600**	**162**	**39.70**	**Bid. Penempatan Tenaga Kerja**
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n**	**Orang**	144	**638,000,000**	**128**	**145,032,604**	**192 orang**	**300,000,000**			**144**	**-**	**272**	**145,032,604**	**189**	**22.73**	**Bid. Penempatan Tenaga Kerja**
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Orang	144	362,000,000	96	105,000,000	155	245,000,000			16	-	**112**	**105,000,000**	**78**	**29.01**	**Bid. Penempatan Tenaga Kerja**
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepatakan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas instruktur dan Peningkatan sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada tahun n	Lemabaga	5	63,000,000	2	40,032,604	2	55,000,000			2	-	**4**	**40,032,604**	**80**	**63.54**	**Bid. Penempatan Tenaga Kerja**
IV	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja/ Pencari Kerja yang Ditempatkan difasilitasi**	Persen	**45%**	**144,100,000**	**0.4**	**39,243,000**	50%	**30,000,000**			-	**11,519,400**	**40%**	**50,762,400**	**89**	**35.23**	**Bid. Penempatan Tenaga Kerja**
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah/Kota	**Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelayanan kerja**	Orang	**15**	**67,000,000**	**25**	**21,026,200**	10	**12,660,000**			7	**-**	**32**	**21,026,200**	**213**	**31.38**	**Bid. Penempatan Tenaga Kerja**
	Penyadiaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang Mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	Orang	7	20,000,000									**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Penempatan Tenaga Kerja**
	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Orang	7	20,000,000			8	12,660,000			7	-	**7**	**0**	**100**	**-**	**Bid. Penempatan Tenaga Kerja**
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Orang	2	1,000,000	2	21,026,200					7	-	**9**	**21,026,200**	**450**	**2,102.62**	**Bid. Penempatan Tenaga Kerja**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Anggaran dan Anggaran RPD dan RENSTRA Tahun 2026		Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		OPD Penanggung jawab
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Jumlah data dan Informasi yang Dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online**	dok	**4**	**14,000,000**	**3**	**18,216,800**	8	**17,340,000**	**5**	**11,519,400**	5	11,519,400	**8**	**29,736,200**	**200**	**212.40**	**Bid. Penempatan Tenaga Kerja**
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	2	6,000,000	3	18,216,800	3	17,340,000	**1**	**11,519,400**	1	11,519,400	**4**	**29,736,200**	**200**	**495.60**	**Bid. Penempatan Tenaga Kerja**
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan**	orang	21	**30,000,000**	21							**-**	**21**	**0**	**100**	**-**	**Bid. Penempatan Tenaga Kerja**
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan kompetensinya	Orang	21	10,000,000	21								**21**	**0**	**100**	**-**	**Bid. Penempatan Tenaga Kerja**
V	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang menerapakan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah, terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	Persen	**54.55**	**68,952,000**	**63,64%**	**38,634,100**	59.09%	**30,000,000**			30,1%	**-**	**#VALUE!**	**38,634,100**	**#VALUE!**	**56.03**	**Bid. Pembinaan Hubungan Industrial**
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam Satu (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perusahan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online**	Perusahaan	25	**24,452,000**	**22**	**19,893,500**	**22 Perusahaa n**	**15,000,000**			8	**-**	**30**	**19,893,500**	**120**	**81.36**	**Bid. Pembinaan Hubungan Industrial**
	Pengeseahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP *Online*	perusahaan	25	7,000,000	**22**	**19,893,500**	30 perusahaan	**15,000,000**			8	-	**30**	**19,893,500**	**120**	**284.19**	**Bid. Pembinaan Hubungan Industrial**
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	dok	3	8,952,000								-	**0**	**0**	**-**	**-**	**Bid. Pembinaan Hubungan Industrial**
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perselisihan yang Dicegah**	Perkara	**0**	**44,500,000**	**0**	**18,740,600**	**0**	**15,000,000**			**-**	**-**	**0**	**18,740,600**	**0**	**42.11**	**Bid. Pembinaan Hubungan Industrial**
	Pencegahan Perselisihan Hubungan industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	perkara	0	Rp 8,500,000	0	18,740,600	0 perkara	15,000,000			0	-	**0**	**18,740,600**	**0**	**220.48**	**Bid. Pembinaan Hubungan Industrial**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Anggaran dan Anggaran RPD dan RENSTRA Tahun 2026		Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		OPD Penanggung jawab
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	0	9,500,000	0								**0**	**0**	**0**	**0**	**Bid. Pembinaan Hubungan Industrial**
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	asosiasi dan sertifikat pekerja	2	8,500,000									**0**	**0**	**0**	**0**	**Bid. Pembinaan Hubungan Industrial**
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lemabaga	3	8,500,000									**0**	**0**	**0**	**0**	**Bid. Pembinaan Hubungan Industrial**
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persen	100%	9,500,000									**0**	**0**	**0**	**0**	**Bid. Pembinaan Hubungan Industrial**

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Tareget Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (DPA Awal 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
									I		II						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10=8+9		11=(10/7x100%)		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA***	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100**	**2,962,543,745**	**94**	**1,897,720,278**	**100**	**1,885,353,832**	**42.30**	**797,535,794**			**42**	**797,535,794**	**42**	**42**	**DP3A**
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan perencanaan dan evaluasi KinerjaPerangkat Daerah**	**100**	**64,000,000**	**100**	**26,293,000**	**100**	**48,019,000**	**68.4**	**32,848,000**			**68**	**32,848,000**	**68**	**68**	**DP3A**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pereangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	10	8,000,000	10	3,034,000		9,458,000	51.6	4,879,000			**52**	4,879,000	**516**	**52**	DP3A
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	10	8,000,000	10	3,210,000		4,804,000	100	4,804,000			**100**	4,804,000	**1,000**	**100**	DP3A
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10	8,000,000	10	2,985,000		5,038,000					**-**	-	**-**	**-**	DP3A
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	8,000,000	10	3,053,000		5,303,000	100	5,303,000			**100**	5,303,000	**1,000**	**100**	DP3A
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	8,000,000	10	3,304,000		5,554,000					**-**	-	**-**	**-**	DP3A
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerjadan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	8,000,000	10	3,399,000		5,420,000	100	5,420,000			**100**	5,420,000	**1,000**	**100**	DP3A
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Perangkat Daeah	10	16,000,000	10	7,308,000		12,442,000	100	12,442,000			**100**	12,442,000	**1,000**	**100**	DP3A
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100**	2,146,816,756	**88.88**	**1,655,742,328**	10	**1,575,689,832**	**43.5**	**685,607,494**			**44**	**685,607,494**	**44**	**44**	**DP3A**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 org	2,084,816,756	21	1,649,204,328	20	1,565,190,832	43.8	685,607,494			**44**	685,607,494		**44**	DP3A
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12	11,000,000									**-**		**-**		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	100	11,000,000									**-**		**-**		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi	10	8,000,000									**-**		**-**		

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Tareget Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (DPA Awal 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
									I		II						
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	8,000,000	10 lap	2,978,000		5,078,000					-	-	-	-	DP3A
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen bahan tanggapan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemeriksaan	10	8,000,000									-		-		
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	8,000,000	10	3,560,000		5,421,000					-	-	-	-	DP3A
	Penyusunan Pelaporan Analisis prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	8,000,000									-		-		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**100**	**40,000,000**									-		-		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10	8,000,000									-		-		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	8,000,000									-		-		
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5	8,000,000									-		-		
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daearah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20	8,000,000									-		-		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	30	8,000,000									-		-		
													-				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**123,000,000**	99.87	**3,923,000**	**100**	**5,996,000**		-			-	-	-	-	
	"Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	"Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	2	25,000,000									-		-		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelngkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta atribut Kelengkapan	2	60,000,000									-	-	-		DP3A
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	8000000	10	3,923,000	10	5,996,000					-	-	-		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	30000000									-		-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	362000000	**100**	**63,443,300**	**100**	**56,670,000**	66.4	**37,617,800**			**66**	**37,617,800**	**66**	**66**	**DP3A**

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Tareget Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (DPA Awal 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
									I		II						
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	45000000	6	4,544,500		4,544,500	64.4	2,928,000			**64**	2,928,000	**644**	**64**	DP3A
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di Sediakan	2	7000000									-	-	-		
	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang disediakan	5	40000000		9,041,000		8,835,150	53.2	4,699,400			**53**	**4,699,400**	**1,064**	**53**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	5	25000000			5	350					-	-	-	-	DP3A
	Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	15000000									-	-	-		DP3A
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	30000000	12lap	5,100,000		5,060,000	85.2	4,310,000			**85**	4,310,000	**710**	**85**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	200,000,000	12	44,757,800		38,230,000	67.2	25,680,400			**67**	25,680,400	**672**	**67**	
	Pengadaan barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**CakupanPengadaan barang Milik daerah**	**100**			**65,352,000**		**32,241,050**		-			-	-	-		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan											-	-			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan											-				
	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						350					-	-			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan						26,390,000					-				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						350					-	-			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana Prasarana pendukung Gedung Kantor Lainnya				65,352,000		5,850,350	0.0				-				
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	100	61,950,000	100	**8,653,650**	**100**	**28,570,350**	35.1	**10,023,800**			**35**	**10,023,800**	**35**	**35**	**DP3A**
	Penyedia jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	6,300,000									-	-	-		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedikan	1	4,200,000									-	-	-		DP3A
	Penyedia jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	3,150,000				350					-		-		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	48,300,000	5	8,653,650		28,570,000	35.1	10,023,800			**35**	10,023,800	**702**	**35**	

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Tareget Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (DPA Awal 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
									I		II						
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	164,776,989	100	**74,313,000**	100	**138,167,600**	22.8	**31,438,700**			**23**	31,438,700	**23**	**23**	DP3A
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	110,250,000	12	68,493,000		118,046,400	22.4	26,450,000			**22**	26,450,000	**187**	**22**	DP3A
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	42,000,000									-		-		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	12,526,989	12	5,820,000	12	20,121,200	24.8	4,988,700			**25**	4,988,700	**207**	**25**	**DP3A**
II	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)**	55.56	**258,419,640**	100	**39,917,850**	69.44	**39,879,200**	6.7	**2,682,000**			**7**	**2,682,000**	**12**	**7**	**DP3A**
	Pelembagaan Pengarusutamaan (PUG) pada Lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/ Kota	**Cakupan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	100	**105,519,640**	96.78	**34,649,850**	100	**39,730,200**	6.8	**2,682,000**			**7**	**2,682,000**	**7**	**7**	**DP3A**
	Koordinasi dan Singkronisasi perumusan Kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	22,500,000	1	**3,926,000**	1	16,530,000					-	-	-	-	DP3A
	Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender(PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	23,019,640	1	18,041,000	1	12,088,200	22.2	**2,682,000**			**22**	2,682,000	**2,219**	**22**	
	Advokasi kebijakan dan Pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termaksud Perencana Pembangunan Resposif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	36	30,000,000	36	6,918,850	10	6,312,000					-	-	-	-	DP3A

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Tareget Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (DPA Awal 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
									I		II						
	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab.Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termaksud Perencana Pembangunan Resposif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	36	30,000,000	36	5,764,000	36	4,800,000					-	-	-	-	DP3A
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	**Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota**	**100**	46,900,000	**10**	**5,268,000**	**10**	**84,000**		**-**			-	-	-	-	**DP3A**
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	22,000,000	1	5,268,000	1	60,000					-	-	-	-	
	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	36	24,900,000			36	24,000					-	-	-	-	DP3A
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	**Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota**	**100**	106,000,000		**-**	**100**	**65,000**					-	-	-		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1	37,000,000			1	28,000					-	-	-		
	Peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20	37,000,000			20	6,000					-	-	-		
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	32,000,000			2	31,000					-		-		

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Tareget Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (DPA Awal 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
									I		II						
III	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Korban kekerasan Terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan komprehensif pada Lembaga Layanan (Dinas/UPTD PPA di Daerah)**	**100**	**733,178,000**	**100**	**13,740,000**	**100**	**261,915,000**		**-**			**-**	-	**-**	**-**	**DP3A**
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/Kota	**Cakupan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/Kota**	**100**	**224,000,000**		**13,740,000**		**-**		**-**			**-**	-	**-**		**DP3A**
	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	81,000,000	1	7,300,000							**-**	-	**-**		DP3A
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	36	143,000,000	36	6,440,000							**-**	-	**-**		DP3A
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota**	**100**	190,000,000		**-**		**261,915,000**		**-**			**-**	-	**-**		
	Penyediaan Layanana Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20	95,000,000									**-**	-	**-**		DP3A
	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	95,000,000				261,915,000					**-**	-	**-**		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	319,178,000				**-**		**-**			**-**	-	**-**		

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Tareget Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (DPA Awal 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
									I		II						
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia sarana prasarana layanan bagi Perempuan Korban kekerasan kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	77,599,000									-	-	-		
	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga penyedia Layanan Penanganan Bagi perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20	65,500,000									-	-	-		
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	20	86,079,000									-		-		
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	90,000,000									-		-		
IV	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Kebijakan keluarga yang Ditindak lanjuti**	**100**	547,801,267	**99.79**	**274,930,000**	**100**	**438,682,050**	45.7	**200,528,300**			**46**	200,528,300	**46**	**46**	**DP3A**
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	208,650,057		**-**	**100**	**172,426,350**		**-**			**-**	-	**-**	**-**	**DP3A**
	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	36	70,000,000			36	**350**					**-**	-	**-**		
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	75,000,000			1	95,377,000					**-**	-	**-**	**-**	DP3A

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Tareget Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (DPA Awal 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
									I		II						
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	63,650,057			1	77,049,000					-	-	-	-	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	249,901,210	**100**	**274,930,000**	**100**	**266,255,350**	75.3	**200,528,300**			**75**	200,528,300	**75**	**75**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1	71,401,210			1	35,476,350					-		-	-	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200	89,250,000	50	274,930,000		132,402,000	77.2	102,151,300			**77**	102,151,300	**39**	**77**	DP3A
	Penguatan Jejaring Antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	89,250,000			1	98,377,000	100.0	98,377,000			**100**	98,377,000	**10,000**	**100**	DP3A
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**100**	89,250,000		**-**	100	**350**					-		-	-	
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	10	89,250,000			3	350					-		-	-	
V	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Perangkat Daerah Yang Mengembangkan Sistem Informasi Gender dan Anak**	**100**	477,968,997	**92**	**306,874,800**	**100**	**179,942,000**	44.9	**80,850,000**			**45**	**80,850,000**	**45**	**45**	**DP3A**

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Tareget Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (DPA Awal 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
									I		II						
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	477,968,997	**92**	**306,874,800**	**100**	**179,942,000**	44.9	**80,850,000**			**45**	80,850,000	**45**	**45**	**DP3A**
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	50	402,429,809	50	272,345,800	50	164,940,000	49.0	80,850,000			**49**	80,850,000	**98**	**49**	DP3A
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data dikewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	10	75,539,188	10	34,529,000		15,002,000	0				**-**	-	**-**	**-**	DP3A
VI	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK**	**Persentase Kelembagaan Pelayanan Pemenuhan Hak Anak (Forum Anak kabupaten/Kota, Forum anak Kecamatan, Forum anak Kelurahan) yang Terbentuk**	**100**	365,716,800	**96**	**415,218,510**	**100**	**638,215,550**	5.408486208	**34,517,800**			**5**	**34,517,800**	**5**	**5**	**DP3A**
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	80%	115,000,000	100	**340,925,450**	100	**207,165,000**	10.23387155	**21,201,000**			**10**	21,201,000	**1,279**	**10**	DP3A
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10	60,000,000	100	219,651,100		42,120,000	0				**-**	-	**-**	**-**	DP3A
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	55,000,000		121,274,350		165,045,000	12.84558757	21,201,000			**13**	21,201,000	**1,285**	**13**	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100**	250,716,800	**94.79**	**74,293,060**	**100**	**431,050,550**	3.08938244	**13,316,800**			**3**	**13,316,800**	**3**	**3**	**DP3A**
	Penyedia layanan Peningatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40	65,000,000			40	**173,385,000**					**-**	-	**-**	**-**	

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Tareget Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (DPA Awal 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
									I		II						
	Koordinasi Dan Singkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	60,000,000			1	**350**					**-**		**-**	**-**	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	60,000,000			1	85,447,000					**-**	-	**-**	**-**	
	Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	65,716,800	99	74,293,060	1	172,218,200	7.732516076	13,316,800			**8**	13,316,800	**773**	**8**	DP3A
VII	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan**	**100**	62,289,700	**27.09**	**91,411,000**	**100**	**1,670,023,000**					**-**	-	**-**	**-**	**DP3A**
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	17,000,000		**-**		**131,959,000**		**-**			**-**	-	**-**		DP3A
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	36	8,500,000									**-**	-	**-**		DP3A
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	8,500,000	1								**-**				
	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah Kegiatan Pencegahan KTA Terpadu											**-**				
	Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM Yang Memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA						131,959,000					**-**	-			
	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakn Perlindungan Khusus Anak ditingkat kab/Kota											**-**				

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Tareget Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (DPA Awal 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
									I		II						
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85%	45,289,700	16	**91,411,000**	100	**1,499,478,000**		-			-		-	-	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	11,025,000									-		-		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	8	22,714,700													
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	8	11,550,000									-				
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota											-				
	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksana Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA					66,524,000											
	Koordinasi pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapat Layanan	8		8	24,887,000		1,499,478,000					-		-	-	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%		63	-		**38,586,000**					-		-		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota											-				

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Tareget Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (DPA Awal 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
									I		II						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota											-				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota											-				
	Penguatan jejaring Antar lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan AMPK											-	-			
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah Penyedia Layanan Yang Terlatih dan Mendapatkan Sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK						38,586,000									
	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang Memperoleh Bntuan Khusus															
				5,407,918,149		3,039,812,438		5,114,010,632	21.82462991	1,116,113,894		-	22	1,116,113,894			
Rata-rata capaian kinerja (47%)																	
Predikat kinerja									Rendah								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Terlaksasnya Program dan Kegiatan sesuai waktu yang telah ditetapkan dan kerja sama antara bidanga-bidang terkait																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja: karena Program dan Kegiatan dilakasanakan Pada triwulan III dan IV																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: meningkatkan Kinerja dan Kerjasama ASN pada masing-masing bidang agar Program dan kegiatan terlaksanana dengan baik sehingga mencapai target yang telah ditentukan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD Tahun berikutnya: Kebutuhan yang telah diusulkan oleh para pemangku kepentingan (masyarakat) dan bidang-bidang terkait pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat terwujudkan																	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 sd 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2025)					Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
									I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Tingkat Realisasi (%)					
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9=8/6*100	10=5+8		11=10/4*100		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN		**98.95**	**11,299,348,539**	**98.00**	**3,466,338,803**	**100**	**1,644,569,385**	**#DIV/0!**	**385,177,035**	**#DIV/0!**	**385,177,035**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**3,851,515,838**	**#DIV/0!**	**34.09**	Dinas Ketahanan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi**	**100**	**7,174,518,478**	**100.00**	**3,151,209,895**	**100**	**1,412,721,460**	**#DIV/0!**	**385,177,035**	**#DIV/0!**	**385,177,035**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**3,536,386,930**	**#DIV/0!**	**49.29**	Dinas Ketahanan
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**	**100**	**164,500,000**	**100**	**34,287,485**	**100**	**16,611,550**	**42.86**	**8,868,300**	**42.86**	**8,868,300**	**42.86**	**142.86**	**43,155,785**	**185.71**	**26.23**	Dinas Ketahanan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40	23,500,000	20	5,012,650	10	7,099,900	-	-	-	-	-	20.00	5,012,650	20.00	21.33	Dinas Ketahanan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun (Dokumen)	40	23,500,000	20	4,910,200	10	150,000	-	-	-	-	-	20.00	4,910,200	20.00	20.89	Dinas Ketahanan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun (Dokumen)	40	23,500,000	20	4,906,100	10	358,000	-	-	-	-	-	20.00	4,906,100	20.00	20.88	Dinas Ketahanan
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun (Dokumen)	40	23,500,000	20	4,780,400	10	2,976,900	10.00	2,956,900	10.00	2,956,900	100.00	30.00	7,737,300	40.00	32.92	Dinas Ketahanan
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun (Dokumen)	40	23,500,000	20	4,833,550	10	95,350	-	-	-	-	-	20.00	4,833,550	20.00	20.57	Dinas Ketahanan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40	23,500,000	20	4,910,950	10	2,971,900	10.00	2,971,900	10.00	2,971,900	100.00	30.00	7,882,850	40.00	33.54	Dinas Ketahanan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD dan SOP SKPD yang tersusun (Dokumen)	40	23,500,000	20	4,933,635	10	2,959,500	10.00	2,939,500	10.00	2,939,500	100.00	30.00	7,873,135	40.00	33.50	Dinas Ketahanan Pangan
	Rata-rata capaian kinerja (%)						10									**28.57**	**26.23**	Dinas Ketahanan Pangan
	Predikat kinerja						10									**T**	**SR**	Dinas Ketahanan Pangan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**5,146,399,262**	**100**	**2,390,651,104**	**100**	**1,216,947,285**	**26.67**	**338,745,183**	**26.67**	**338,745,183**	**26.67**	**126.67**	**2,729,396,287**	**153.33**	**53.04**	Dinas Ketahanan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN DKP (Bulan)	48	4,837,711,311	24	2,297,182,656	12	1,170,162,385	3.00	335,115,983	3.00	335,115,983	25.00	27.00	2,632,298,639	30.00	54.41	Dinas Ketahanan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pengelola keuangan (Orang/Thn)	32	160,000,000	16	84,480,000	8	40,624,000	-		8.00	-	100.00	24.00	84,480,000	32.00	52.80	Dinas Ketahanan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	4	25,000,000	-	-			-				#DIV/0!			-		Dinas Ketahanan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah laporan Akhir Tahun yang tersusun (Dokumen) dan jumlah	20	100,000,000	10	4,524,224	5	3,649,200	5.00	3,629,200	5.00	3,629,200.00	100.00	15.00	8,153,424	20.00	8.15	Dinas Ketahanan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang tersusun	20	23,687,951	10	4,464,224	5	2,511,700	-	-	-	-	-	10.00	4,464,224	10.00	18.85	Dinas Ketahanan
	Rata-rata capaian kinerja (%)					-										**23.00**	**33.55**	Dinas Ketahanan
	Predikat kinerja					-										**T**	**R**	Dinas Ketahanan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat**	**100**	**46,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#VALUE!**	**-**	**-**	**-**	**-**	Dinas Ketahanan
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	12	22,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Ketahanan
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	20	23,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Ketahanan
	Rata-rata capaian kinerja (%)															**-**	**-**	Dinas Ketahanan
	Predikat kinerja															**-**	**-**	Dinas Ketahanan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**218,591,919**	**100**	**8,149,871**	**100**	**2,394,700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.00**	**8,149,871**	**100.00**	**3.73**	Dinas Ketahanan
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Displin Pegawai	Jumlah mesin /kartu absensi yang diadakan (unit)	4	25,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketahanan
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapanny yang diadakan	75	75,000,000	15	-	15	-	-	-	-	-	-	15.00	-	15.00	-	Dinas Ketahanan
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen ANJAB BKP yang tersusun (Dokumen) dan jumlah	60	70,591,919	30	8,149,871	15	2,394,700	-	-	-	-	-	30.00	8,149,871	30.00	11.55	Dinas Ketahanan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus	5	16,000,000	=	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Ketahanan
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	15,000,000	=	-		-					#DIV/0!			-		Dinas Ketahanan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bintek Peraturan Perundang-	4	17,000,000	1	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	1.00	-	1.00	-	Dinas Ketahanan

Rata-rata capaian kinerja (%)					0	-										**15.33**	**3.85**	Dinas Ketahanan Pangan
Predikat kinerja					0	-										**SR**	**R**	Dinas Ketahanan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**776,989,189**	**100**	**429,039,948**	**100**	**97,289,000**	**14.58**	**32,386,852**	**14.58**	**32,386,852**	**14.58**	**114.58**	**461,426,800**	**129.17**	**59.39**	Dinas Ketahanan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4	18,500,000	-	-	1	-			-	-	-			-		Dinas Ketahanan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	4	42,500,000	-	16,650,000		-			-	-	#DIV/0!			-		Dinas Ketahanan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor (Bulan)	48	66,500,000	24	27,101,569	12	12,509,000	2.00	2,184,000	2.00	2,184,000	16.67	26.00	29,285,569	28.00	44.04	Dinas Ketahanan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan (Paket)	4	28,000,000	2	12,013,850	1	3,490,000	-	-	-	-	-	2.00	12,013,850	2.00	42.91	Dinas Ketahanan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4	16,989,189	2	7,440,000	1	3,000,000	2.00	1,000,000	1.00	1,000,000.00	100.00	3.00	8,440,000	4.00	49.68	Dinas Ketahanan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	16,500,000	2	4,800,000	1	3,600,000				-	-			-		Dinas Ketahanan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas koordinasi dan pertemuan (kali)	110	579,000,000	50	356,234,529	30	74,690,000	3.00	29,202,852	3.00	29,202,852	10.00	53.00	385,437,381	56.00	66.57	Dinas Ketahanan
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah tenaga pelaksana sistem pemerintahan berbasis elektronik	4	9,000,000	2	4,800,000	2	-	-	-	-	-	-	2.00	4,800,000	2.00	53.33	Dinas Ketahanan
Rata-rata capaian kinerja (%)																**18.40**	**51.31**	Dinas Ketahanan
Predikat kinerja																**ST**	**ST**	Dinas Ketahanan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**100**	**325,000,000**	**100**	**24,847,000**	**100**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**24,847,000**	**#DIV/0!**	**7.65**	Dinas Ketahanan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan (Unit)	1	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Ketahanan
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (Unit)	2	40,000,000	2	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	2.00	-	2.00	-	Dinas Ketahanan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	12	100,000,000	2	24,847,000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	2.00	24,847,000	2.00	24.85	Dinas Ketahanan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau	2	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Ketahanan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	2	15,000,000	-	-	-	-	-				#DIV/0!			-	-	Dinas Ketahanan
Rata-rata capaian kinerja (%)					0											**2.00**	**12.42**	Dinas Ketahanan
Predikat kinerja					0											**ST**	**R**	Dinas Ketahanan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**100**	**138,500,000**	**100**	**125,277,350**	**100**	**29,965,925**	**8.33**	**1,751,700**	**8.33**	**1,751,700**	**8.33**	**108.33**	**127,029,050**	**116.67**	**91.72**	Dinas Ketahanan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim (Bulan)	48	40,000,000	24	7,380,000	12	1,800,000	-	-	-	-	-	24.00	7,380,000	24.00	18.45	Dinas Ketahanan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	48	50,000,000	24	23,957,750	12	9,500,000	3.00	1,751,700	3.00	1,751,700	25.00	27.00	25,709,450	30.00	51.42	Dinas Ketahanan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia (Bulan)	48	48,500,000	24	93,939,600	12	18,665,925	-	-	-	-	-	24.00	93,939,600	24.00	100.00	Dinas Ketahanan
Rata-rata capaian kinerja (%)						-										**26.00**	**56.62**	Dinas Ketahanan
Predikat kinerja						-										**ST**	**ST**	Dinas Ketahanan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan**	100	**358,538,108**	**100**	**138,957,137**	**100**	**49,513,000**	**16.67**	**3,425,000**	**16.67**	**3,425,000**	**16.67**	**116.67**	**142,382,137**	**133.33**	**39.71**	Dinas Ketahanan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan dinas yang dibiayai STNKnya (Unit dan Jumlah	4	310,000,000	2	136,957,137	1	49,513,000	1.00	3,425,000	**1.00**	3,425,000	100.00	1.00	140,382,137	2.00	45.28	Dinas Ketahanan
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel (Unit)	10	15,000,000	0	-		-					#DIV/0!			-		Dinas Ketahanan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	10	27,000,000	2	2,000,000	5	-			-	-	-			-		Dinas Ketahanan
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin	1	6,538,108	1	-		-		-	-	-	#DIV/0!	1.00	-	1.00	-	Dinas Ketahanan
Rata-rata capaian kinerja (%)						-										**1.50**	**22.64**	Dinas Ketahanan
Predikat kinerja						-										**R**	**ST**	Dinas Ketahanan
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI	**Angka Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)**	**2160**	591,973,176		-	**2400**	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketahanan
		Angka Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)	**26.26**				**35.01**						-			-		Dinas Ketahanan
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung	**Cakupan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh**	**100**	591,973,176		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketahanan
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah bangunan lumbung pangan yang terbangun (Unit)	1	446,000,000		-		-		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Ketahanan
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah bangunan lantai jemur yang terbangun (Unit)	1	36,583,080		-		-		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Ketahanan
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian	Jumlah pembangunan pusat-pusat pengelolaan hasil produksi pangan	1	35,000,000		-		-		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	Dinas Ketahanan
	Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Infrastruktur	Jumlah kunjungan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	3	32,390,096		-	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketahanan
	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan	Jumlah rencana kebutuhan infranstruktur dan sumber daya	2	42,000,000		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketahanan

Rata-rata capaian kinerja (%)																**-**	**-**	Dinas Ketahanan
Predikat kinerja																**-**	**-**	Dinas Ketahanan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	**Persentase Keluarga Berisiko Stunting yang Mendapatkan**	**1.23**	**2,634,491,457**	**1.91**	**247,449,158**	**1.23**	**194,871,725**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.91**	**247,449,158**	**1.91**	**9.39**	Dinas Ketahanan
		Konsumsi Energi Per Kapita (kkal/kap/hari)	**1956**		**1780.60**		**1916**				**-**							Dinas Ketahanan
		Konsumsi Protein Per Kapita (gr/kap/hari)	**55.7**		**84.80**		**54.90**				**-**							Dinas Ketahanan
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	**Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau**	**100**	**492,926,416**	**100**	**172,006,400**	**100**	**118,951,350**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.00**	**172,006,400**	**100.00**	**34.89**	Dinas Ketahanan
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan	Jumlah. Data Ketersediaan energi dan protein (Neraca Bahan	4	36,736,126	2		1	-	-	-	-	-	-	2.00	-	2.00	-	Dinas Ketahanan
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemanfaatan Pekarangan dan Penanganan stunting di Desa	4	48,000,000	2	3,482,400			-	-	-	-	#DIV/0!	2.00	3,482,400	2.00	7.26	Dinas Ketahanan
	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi	Jumlah Advokasi dan bimbingan cadangan pangan yang dilahasilkan	4	47,000,000	2	4,600,000	1	2,437,000	-	-	-	-	-	2.00	4,600,000	2.00	9.79	Dinas Ketahanan
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Penyediaan data dan informasi pasokan dan harga	4	45,690,290	2	3,283,000	1	-	-	-	-	-	-	2.00	3,283,000	2.00	7.19	Dinas Ketahanan
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi	Jumlah penguatan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	4	50,500,000	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketahanan
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat	Jumah Lemabaga Usaha dan Toko Tani yang dikembangkan					1	-										Dinas Ketahanan
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	14	265,000,000	5	56,043,000	4	79,350,000	-		-		-			-		Dinas Ketahanan
Rata-rata capaian kinerja (%)																**2.67**	**8.08**	Dinas Ketahanan
Predikat kinerja																**ST**	**ST**	Dinas Ketahanan
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan				0	17,218,100	3	8,378,850	-		-		-			-		Dinas Ketahanan
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan				0	87,379,900	3	28,785,500	-		-		-			-		Dinas Ketahanan
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan	**Cakupan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan**	**100**	**1,568,190,849**	**4**	**18,995,608**	**100**	**70,476,075**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18,995,608**	**-**	**1.38**	Dinas Ketahanan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	4	43,190,849	0	-		-					-			-		Dinas Ketahanan
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	1	150,000,000	0	-		-					#DIV/0!			-		Dinas Ketahanan
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi/pertemuan yang	196	1,375,000,000	0	18,995,608	29	70,476,075	-	-	-	-	-	-	18,995,608	-	1.38	Dinas Ketahanan
Rata-rata capaian kinerja (%)																**-**	**1.38**	Dinas Ketahanan
Predikat kinerja																**SR**	**SR**	Dinas Ketahanan
	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal	**Cakupan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan**	**100**	**46,374,192**	**100**	**-**		**3,649,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.00**	**-**	**100.00**	**-**	Dinas Ketahanan
	Koordinasi dan Singkronisasi Penentuan Harga Minimum	Jumlah Penetapan harga minimum (Laporan) dan Jumlah yang	4	46,374,192	0	-	1	3,649,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketahanan
Rata-rata capaian kinerja (%)																**-**	**-**	Dinas Ketahanan
Predikat kinerja																**SR**	**SR**	Dinas Ketahanan
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	**Cakupan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi**	**100**	**527,000,000**	**100**	**56,447,150**	**100**	**1,795,300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	Dinas Ketahanan
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	4	45,000,000			1	-			-	-	-			-		Dinas Ketahanan
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	10	438,000,000	2	56,447,150			-	-	-	-	#DIV/0!			-		Dinas Ketahanan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi	4	44,000,000			1	1,795,300				-	-	-		-		Dinas Ketahanan
Rata-rata capaian kinerja (%)																**-**	**-**	Dinas Ketahanan
															Predikat Kinerja	**-**	**-**	Dinas Ketahanan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Persentase Daerah Rawan Pangan**	**7.37**	**698,873,908**	**11.64**	**59,717,700**	**26.32**	**21,622,200**		**-**	**-**	**-**	**-**	**11.64**	**59,717,700**	**11.64**	**8.54**	Dinas Ketahanan
	Cakupan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan	**Cakupan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan**	**100**	**345,000,000**	**100**	**43,046,900**	**100**	**20,249,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.00**	**43,046,900**	**100.00**	**12.48**	Dinas Ketahanan
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan	Jumlah lokasi rawan pangan yang ditetapkan (laporan), Jumlah hasil	4	345,000,000	2	43,046,900	1	20,249,000	-	-	-	-	-	2.00	43,046,900	2.00	12.48	Dinas Ketahanan
Rata-rata capaian kinerja (%)																**2.00**	**12.48**	Dinas Ketahanan
Predikat kinerja																**ST**	**SR**	Dinas Ketahanan
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan	**Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan**	**100**	**353,873,908**	**100**	**16,670,800**	**100**	**1,373,200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.00**	**16,670,800**	**100.00**	**4.71**	Dinas Ketahanan
	Koordinasi dan Singkronisasi Penanganan Kerawanan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	4	172,671,650	1	16,670,800	0	-	-	-	-	-	#DIV/0!	1.00	16,670,800	1.00	9.65	Dinas Ketahanan
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan	4	181,202,258	0	-	1	1,373,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketahanan
Rata-rata capaian kinerja (%)																**0.50**	**4.83**	Dinas Ketahanan
Predikat kinerja																**ST**	**SR**	Dinas Ketahanan

	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Tingkat Keamanan Pangan**	**96.67**	**199,491,520**	**100.00**	**7,962,050**		**15,354,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**100.00**	**7,962,050**	**100.00**	**3.99**	Dinas Ketahanan
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	**Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan**	**100**	**199,491,520**	**100**	**7,962,050**	**100**	**15,354,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.00**	**7,962,050**	**100.00**	**3.99**	Dinas Ketahanan
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar	Jumlah sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat (Kali), jumlah	4	32,000,000	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketahanan
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	4	29,300,000				-	-	-			-			-		Dinas Ketahanan
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	4	26,933,320				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketahanan
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	4	26,258,200				15,354,000	-	-			-			-		Dinas Ketahanan
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu	Jumlah penyediaan peralatan dan bahan pengawasan keamanan	4	85,000,000	1	7,962,050	1	-	-	-	-	-	-	1.00	7,962,050	1.00	9.37	Dinas Ketahanan

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegitan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun pada (2023-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi kinerja Pada Triwula I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9=(5+8)		11=(10/4)x100%		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	% (K)	%(Rp)	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**9,477,334,157**	**100**	**1,844,445,977**	**100**	**2,047,428,451**	**100**	**436,542,137**	**100**	**436,542,137**	**300**	**2,280,988,114**		**24**	**Sekretariat**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**98,549,082**	**100**	**44,834,000**	**100**	**180,606,850**	**100**	**1,000,000**	**100**	**1,000,000**	**300**	**45,834,000**		**47**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	10,043,124	2	9,931,000	3	2,618,250	0	0	0	-	2	9,931,000		99	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	15,721,388	1	5,163,000	1	2,626,650	0	0	0	-	1	5,163,000		33	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	15,250,326	1	5,906,000	1	2,891,000	0	0	0	-	1	5,906,000		39	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	17,751,825	1	5,911,000	1	2,617,950	0	0	0	-	1	5,911,000		33	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	12,146,657	1	5,976,000	1	2,351,000	0	0	0	-	1	5,976,000		49	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	12,839,791	1	5,965,000	1	5,565,000	0	0	0	-	1	5,965,000		46	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	14,795,972	1	5,982,000	1	11,937,000	1	1,000,000	1	1,000,000	3	6,982,000		47	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0	-	0	-	2	150,000,000									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**7,418,980,538**	**100**	**1,526,565,547**	**100**	**1,618,099,801**	**100**	**411,032,137**	**100**	**411,032,137**	**300**	**1,937,597,684**		**26**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	7,292,835,838	24	1,447,467,547	24	1,568,714,151	24	408,342,137	24	408,342,137	72	1,855,809,684		25	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	47,011,200	1	5,073,000	1	2,467,000	0	0	1	-	2	5,073,000		11	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	49,008,960	1	51,840,000	1	25,920,000	0	0	1	-	2	51,840,000		106	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	15,874,541	1	11,099,000	1	4,138,650	0	-	0	-	1	11,099,000		70	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1	14,250,000	1	11,086,000	1	16,860,000	1	2,690,000	1	2,690,000	3	13,776,000		97	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100**	**18,099,900**	**0**	**-**	**100**	**4,263,000**	**0**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**		**0**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	18,099,900	0	-	1	4,263,000	0	0	1	-	1	0		0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegitan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun pada (2023-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi kinerja Pada Triwula I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**417,719,498**	**100**	**7,941,000**	**100**	**4,435,000**	**0**	**-**	**100**	**-**	**200**	**7,941,000**		**2**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	15,745,057	1	7,941,000	1	4,435,000	0	-	1	-	2	7,941,000		50	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	231,699,441	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0		0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	170,275,000	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0		0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**460,896,098**	**100**	**154,979,900**	**100**	**47,572,000**		**5,906,000**	**100**	**5,906,000**	**200**	**160,885,900**		**35**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	227,409	1	-	0	-	0	0	0	-	1	0		0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	27,163,773	1	8,536,000	1	5,002,000	1	1,831,000	1	1,831,000	3	10,367,000		38	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	2,791,097	1	850,000	0	-	0	0	0	-	1	850,000		30	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	6,683,040	1	-	0	-	0	0	0	-	1	0		0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	424,030,779	1	145,593,900	1	42,570,000	1	4,075,000	1	4,075,000	3	149,668,900		35	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**442,097,586**	**0**	**-**	**100**	**79,691,000**	**0**	**-**	**100**	**0**	**100**	**0**		**0**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	30,000,000	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0		0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	352,000,000	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0		0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	18,500,000	0	-	14	59,691,000	0	-	2	-	2	0		-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	41,597,586	0	-	1	20,000,000	0	0	0	-	0	0		0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**298,929,099**	**100**	**64,065,530**	**100**	**66,400,800**	**100**	**5,000,000**	**100**	**5,000,000**	**300**	**69,065,530**		**23**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5,846,400	1	1,200,000	1	1,200,000	1	240,000	1	240,000	3	1,440,000		25	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	74,917,143	1	14,140,730	1	16,476,000	1	1,560,000	1	1,560,000	3	15,700,730		21	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	24,360,000	1	0	0	-	0	0	0	-	1	0		0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	193,805,556	1	48,724,800	1	48,724,800	1	3,200,000	1	3,200,000	3	51,924,800		27	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**322,062,355**	**100**	**46,060,000**	**100**	**46,360,000**	**100**	**13,604,000**	**100**	**13,604,000**	**300**	**59,664,000**		**19**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	297,702,355	13	46,060,000	15	46,360,000	13	13,604,000	13	13,604,000	39	59,664,000		20	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegitan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun pada (2023-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi kinerja Pada Triwula I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	24,360,000	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0		0	
II	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase ketersediaan dokumen instrumen perencanaan lingkungan**	**100**	**832,631,802**	**100**	**295,331,200**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**100**	**0**		**0**	**Bidang Penaatan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup**
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Cakupan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**100**	**832,631,802**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1	681,872,746	0		0	-	0	0	0	-	0	0		0	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	0	150,759,056	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0		0	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**			**100**	**295,331,200**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**0**	**100**			**#DIV/0!**	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun			2	295,331,200	0	-	0	0	0	-	2	295,331,200		#DIV/0!	
III	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Air (IKA)**	**53.65**	**875,105,634**	**53.65**	**51,429,200**	**53.65**	**38,304,000**	**53.65**	**1,000,000**	**53.65**	**1,000,000**	**200**	**52,429,200**		**6**	**Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	**92.33**		**92.33**		**92.33**		**92.33**		**92.33**						
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	**85.4**		**85.4**		**85.4**		**85.4**		**85.4**						
		Presentase kelompok kampung iklim yang terbentuk	**4.21**		**4.21**		**4.21**		**4.21**		**4.21**						
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Cakupan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**100**	**480,904,767**	**100**	**22,369,200**	**100**	**24,512,000**		**1,000,000**		**1,000,000**	**100**	**23,369,200**		**5**	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	48,879,338	1	4,084,000	1	2,212,000	0	0	0	-	1	4,084,000		8	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	330,352,211	1	4,227,000	1	7,900,000	1	1,000,000	1	1,000,000	3	5,227,000		2	
	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	umlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1	101,673,218	8	14,058,200	8	14,400,000	0	0	0	-	8	14,058,200		14	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Cakupan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**100**	**82,750,188**	**100**	**11,589,000**	**100**	**4,823,000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100**	**11,589,000**		**14**	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	82,750,188	2	11,589,000	1	4,823,000	0	0	0	-	2	11,589,000		14	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Cakupan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**100**	**311,450,680**	**100**	**17,471,000**	**100**	**8,969,000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100**	**17,471,000**		**6**	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1	311,450,680	**2**	17,471,000	1	8,969,000	0	0	0	-	2	17,471,000		**6**	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegitan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun pada (2023-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi kinerja Pada Triwula I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Presentase RTH dalam kondisi baik**	**86**	**403,311,747**	**86**	**16,968,000**	**100**	**65,814,000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**86**	**16,968,000**		**4**	**Bidang Penaatan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup**
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	100	**403,311,747**	100	16,968,000.00	100	**65,814,000**	0	-	0	-	**100**	16,968,000		4	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	60,610,101	0		0	0	0	0	0	-	0	0		0	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	6	342,701,646	1	16,968,000	3	65,814,000	0	0	0	-	1	16,968,000		5	
V	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan**	**36**	**200,967,390**	**36**	**4,110,000**	**100**	**1,887,000**	**0**	**0**	**0**	**-**	**36**	**4,110,000**		**2**	**Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas**
	Penyimpanan sementara Limbah B3	**Cakupan Penyimpanan sementara Limbah B3**	**100**	**36,844,022**	**100**	**4,110,000**	**100**	**1,887,000**		**-**	**0**	**-**	**100**	**4,110,000**		**11**	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	36,844,022	9	4,110,000	1	1,887,000	0	0	0	-	9	4,110,000		11	
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**164,123,369**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**		**0**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1	164,123,369	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0		0	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup**	**13.09**	**298,231,668**	**13.09**	**14,083,000**	**100**	**13,200,000**	**100**	**1,000,000**	**100**	**1,000,000**	**213**	**15,083,000**		**5**	**Bidang Penaatan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup**
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**298,231,668**	**100**	**14,083,000**	**100**	**13,200,000**	**100**	**1,000,000**	**100**	**1,000,000**	**300**	**15,083,000**		**5**	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	88,202,822	22	1,960,000	1	2,012,000	0	0	0	-	22	1,960,000		2	
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1	33,600,000	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegitan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun pada (2023-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi kinerja Pada Triwula I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	1	176,428,846	22	12,123,000	1	11,188,000	1	1,000,000	1	1,000,000	24	13,123,000		7	
VII	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase Lembaga MHA yang mendapatkan Pengakuan Keberadaan MHA**	**100**	**121,200,000**	**100**	**3,884,000**	**100**	**1,862,000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100**	**-**		**0**	**Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas**
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	**Cakupan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**100**	**60,600,000**	**100**	**3,884,000**	**100**	**1,862,000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**100**	**-**		**0**	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	60,600,000	1	3,884,000	1	1,862,000	0	0	**0**	-	1	3,884,000		**6**	
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	**Cakupan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**100**	**60,600,000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**		**0**	
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1	60,600,000	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		0	
VIII	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH**	**57**	**1,586,278,580**	**57**	**4,460,000**	**100**	**9,106,000**	**100**	**1,000,000**	**100**	**1,000,000**	**257**	**5,460,000**		**0**	**Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas**
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**1,586,278,580**	**100**	**4,460,000**	**100**	**9,106,000**	**100**	**1,000,000**	**100**	**1,000,000**	**300**	**5,460,000**		**0**	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	5	1,586,278,580	1	4,460,000	1	9,106,000	1	1,000,000	1	1,000,000	3	5,460,000		0	
IX	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentse Sekolah Adiwiyata**	**13**	**154,656,000**	**13**	**4,627,000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**200**	**4,627,000**		**199**	**Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas**
		Persentase lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten	**67**		**67**												
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**154,656,000**	**100**	**4,627,000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**100**	**4,627,000**		**3**	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegitan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun pada (2023-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi kinerja Pada Triwula I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1	154,656,000	1	4,627,000	0	-	0	0	0	-	1	4,627,000		0	
X	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**	**100**	**343,840,000**	**100**	**2,159,000**	**100**	**1,134,000**		**-**	**0**	**-**	**100**	**2,159,000**		**0**	**Bidang Penaatan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup**
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**100**	**343,840,000**	**100**	**2,159,000**	**100**	**1,134,000**		**-**	**0**	**-**	**100**	**2,159,000**		**1**	
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1	145,843,600	100	2,159,000	1	1,134,000	0	0	0	-	100	2,159,000		1	
	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administrsai yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	197,996,400	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		0	
XI	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah tertangani**	**45.6**	**6,601,307,449**	**45.6**	**1,553,800,000**	**100**	**2,240,714,500**	**45.6**	**294,185,000**		**294,185,000**	**91**	**4,107,000**		**0**	**Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3**
		Persentase cakupan area pelayanan kebersihan	**22**		**22**				**22**								
	Pengelolaan Sampah	**Cakupan Pengelolaan Sampah**	100	**6,601,307,449**	100	**1,553,800,000**	**100**	**2,240,714,500**		**294,185,000**	**100**	**294,185,000**	**200**	**4,107,000**		**0**	
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.274	4,470,863,393	0	-			0	-	0	-	0	0		0	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5	15,987,781	3	4,107,000	5	1,676,500	0	0	0	-	3	4,107,000		26	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	64,974,000	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0		-	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	13	2,049,482,275	0	-	0	0	0	0		-	0	0		-	
	Penyusunan rencana, kebiajakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				-	0	0	0	0		-	0	0		#DIV/0!	
	Pengoperasian dan pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				-	0	0	0	0		-	0	0		#DIV/0!	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegitan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun pada (2023-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi kinerja Pada Triwula I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung
	Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada kondisi Khusus yang ditangani				-	0	0	0	0		-	0	0		#DIV/0!	
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan			6565	693,900,000	5,691	702,600,000	0	107,400,000	3531	107,400,000	10,096	801,300,000		#DIV/0!	
	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				-	0	0	0	0		-	0	0		#DIV/0!	
	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik			17	212,032,000	19	756,638,000	15	103,285,000	15	103,285,000	47	315,317,000		#DIV/0!	
	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah			20	569,400,000	22	570,000,000	22	76,400,000	22	76,400,000	64	645,800,000		#DIV/0!	
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainya sesuai denganperaturan perundangan	Jumlah sampah yang ditangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainya sesuai dengan peraturan perundanga				-	0	0	0	0	0	-	0	0		#DIV/0!	
	Pengurangan sampah melalui pendaur ulang sampah	Jumlah sampah yang didaur ulang				-	0	0	0	0		-	0	0		#DIV/0!	
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang ditangani melalui proses pemilahan dan pengolahan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			6565	74,361,000	5,691	209,800,000	3531	7,100,000	3531	7,100,000	13,627	81,461,000		#DIV/0!	
			20,894,864,427		**3,795,297,377**		**4,419,449,951**		**733,727,137**		**733,727,137**		**2,385,931,314**				
													17				
													Sedang				

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ... (akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Rensdtra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran Tahun (n-1) 2024		Capaian Kinerja dan Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8=7*		*9=5+8*		*10=13/5*100%*		*11*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**7,630,935,234**	**100%**	**1,649,905,151**	**100%**	**1,593,698,344**		**326,200,889**	**7%**	**326,200,889**	**1**	1,976,106,040	**1**	26%	DISDUKCAPIL
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**68,662,426**	**100%**	**7,772,926**	**100%**	**15,740,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**1**	7,772,926	**1**	11%	DISDUKCAPIL
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**4**	**9,781,000**	1	1,100,500	1	3,807,000	0	**-**	-	-	**1**	1,100,500	**0**	11%	DISDUKCAPIL
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**22**	**9,782,000**	1	1,080,500	10	2,110,000	0	**-**	-	-	**1**	1,080,500	**0**	11%	DISDUKCAPIL
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**22**	**9,702,000**	1	1,000,500	10	2,397,000	0	**-**	-	-	**1**	1,000,500	**0**	10%	DISDUKCAPIL
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	**22**	**10,201,926**	1	1,500,426	10	1,670,000	0	**-**	-	-	**1**	1,500,426	**0**	15%	DISDUKCAPIL
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	**22**	**9,702,000**	1	1,000,500	10	1,447,000	0	**-**	-	-	**1**	1,000,500	**0**	10%	DISDUKCAPIL
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**22**	**9,702,000**	1	1,000,500	10	2,129,000	0	**-**	-	-	**1**	1,000,500	**0**	10%	DISDUKCAPIL
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**20**	**9,791,500**	5	1,090,000	5	2,180,000	0	**-**	-	-	**5**	1,090,000	**0**	11%	DISDUKCAPIL
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**4,798,251,660**	**100%**	**1,126,928,438**	**100%**	**1,306,566,294**	**34%**	**326,200,889**	34%	326,200,889	**1**	1,453,129,327	**1**	30%	DISDUKCAPIL
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**120**	**4,617,434,456**	30	1,096,827,864	30	1,262,023,294	15	326,200,889	15	326,200,889	**45**	1,423,028,753	**0**	31%	DISDUKCAPIL
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**20**	**128,959,000**	5	20,600,000	5	20,400,000	0	**-**	-	-	**5**	20,600,000	**0**	16%	DISDUKCAPIL
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**8**	**31,600,000**	2	7,500,000	2	17,040,000	0	-	-	-	**2**	7,500,000	**0**	24%	DISDUKCAPIL
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**12**	**8,547,254**	3	1,000,574	3	3,105,000	0	-	-	-	**3**	1,000,574	**0**	12%	DISDUKCAPIL
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**16**	**11,710,950**	4	1,000,000	4	3,998,000	0	-	-	-	**4**	1,000,000	**0**	9%	DISDUKCAPIL
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**66,600,000**	**100%**	**14,400,000**	**100%**	**6,356,800**	**0%**	**-**	0%	-	**1**	14,400,000	**1**	22%	DISDUKCAPIL
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**16**	**66,600,000**	4	14,400,000	4	6,356,800	0	-	-	-	**4**	14,400,000	**0**	22%	DISDUKCAPIL

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**CakupanAdministrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1,000,792,046**	**100%**	**148,114,046**	**100%**	**217,363,250**	0%	**-**	0%	-	**1**	148,114,046	**1**	15%	DISDUKCAPIL
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**4**	**104,610,000**	1	10,870,000	1	120,946,000	0	**-**	-	-	**1**	10,870,000	**0**	10%	DISDUKCAPIL
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**4**	**9,000,000**	1	1,000,000	1	14,347,250	0	-	-	-	**1**	1,000,000	**0**	11%	DISDUKCAPIL
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**16**	**863,836,046**	4	133,675,046	4	82,070,000	1		1	-	**5**	133,675,046	**0**	15%	DISDUKCAPIL
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**34,080,000**	**100%**	**7,900,000**	**100%**	**6,372,000**	**0%**	**-**	0%	-	**1**	7,900,000	**1**	23%	DISDUKCAPIL
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**4**	**5,700,000**	1	1,050,000	1	372,000	0	-	-	-	**1**	1,050,000	**0**	18%	DISDUKCAPIL
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**4**	**28,380,000**	1	6,850,000	1	6,000,000	0	-	-	-	**1**	6,850,000	**0**	24%	DISDUKCAPIL
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**96,280,000**	**100%**	**22,070,000**	**100%**	**41,300,000**	**0%**	**-**	0%	-	**1**	22,070,000	**1**	23%	DISDUKCAPIL
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	**8**	**45,280,000**	2	10,070,000	2	22,450,000	0	-	-	-	**2**	10,070,000	**0**	22%	DISDUKCAPIL
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**4**	**51,000,000**	1	12,000,000	1	18,850,000	0	-	-	-	**1**	12,000,000	**0**	24%	DISDUKCAPIL
II	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan pelayanan dokumen kependudukan**	**80%**	**2,308,844,778**	**80%**	**497,488,640**	**85%**	**165,172,966**	**0%**	**-**	0%	-	**-**	497,488,640	**1**	22%	DISDUKCAPIL
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**100%**	**773,742,042**	**100%**	**165,938,640**	**100%**	**30,052,000**	**0%**	**-**	0%	-	**1**	165,938,640	**1**	21%	DISDUKCAPIL
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**8**	**773,742,042**	2	165,938,640	2	30,052,000	0	-	-	-	**2**	165,938,640	**0**	21%	DISDUKCAPIL
	Penataan Pendaftaran Penduduk	**Cakupan Penataan Pendaftaran Penduduk**	**4**	**931,183,135**	**100%**	**208,000,000**	**100%**	**121,800,966**	**0%**	**-**	0%	-	**1**	208,000,000	**0**	22%	DISDUKCAPIL
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	**8**	**931,183,135**	2	208,000,000	2	121,800,966	0	-	-	-	**2**	208,000,000	**0**	22%	DISDUKCAPIL
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**100%**	**146,600,000**	**100%**	**35,000,000**	**100%**	**13,320,000**	**0%**	-	0%	-	**1**	35,000,000	**1**	24%	DISDUKCAPIL
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	**8**	**146,600,000**	2	35,000,000	2	13,320,000	0	-	-	-	**2**	35,000,000	**0**	24%	DISDUKCAPIL
III	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur**	**98%**	**930,825,391**	**97,79%**	**200,565,695**	**97,79%**	**29,304,000**	**#REF!**	**#REF!**	200%		**1**	200,565,695	**1.02**	22%	DISDUKCAPIL
	Pelayanan Pencatatan Sipil	**Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**100%**	**540,000,000**	**100%**	**115,000,000**	**100%**	**11,304,000**	**0%**	-	0%	-	**1**	115,000,000	**1**	21%	DISDUKCAPIL
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	**12**	**540,000,000**	3	115,000,000	3	11,304,000	0	-	-	-	**3**	115,000,000	**0**	21%	DISDUKCAPIL
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**100%**	**115,000,000**	**100%**	**23,000,000**	**100%**	**18,000,000**	**0%**	-	0%	-	**1**	23,000,000	**1**	20%	DISDUKCAPIL

	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	**4**	**115,000,000**	1	23,000,000	1	18,000,000	0	-	-	-	**1**	23,000,000	**0**	20%	DISDUKCAPIL
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data**	**100%**	**248,935,154**	**100%**	**53,319,800**	**100%**	**18,000,000**				-	**1**	53,319,800	**1**	21%	DISDUKCAPIL
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100%**	**161,761,754**	**100%**	**35,000,000**	**100%**	**18,000,000**									
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	**Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan**	**400%**	**81,100,000**	**100%**	**18,500,000**	**100%**	**18,000,000**									
V	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase tersedianya profile kependudukan sesuai peraturan**	**100%**	**21,598,560**	**100%**	**4,703,640**	**100%**	**2,931,000**	**0%**	-	0%	-	**1**	4,703,640	**1**	22%	DISDUKCAPIL
	Penyusunan Profil Kependudukan	**Cakupan Penyusunan Profil Kependudukan**	**100%**	**21,598,560**	**100%**	**4,703,640**	**100%**	**2,931,000**	**0%**	-	0%	-	**1**	4,703,640	**1**	22%	DISDUKCAPIL
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	**8**	**21,598,560**	2	4,703,640	2	2,931,000	**0**	-	-	-	**2**	4,703,640	**0**	22%	DISDUKCAPIL
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program			100%	11,141,139,117	100%	2,405,982,926	100%	1,809,106,310	13%			**0**	**0.00%**	**1,535,338,895**	**0.00%**	**13.78%**	-
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh Program									13%			**0.00%**					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton																	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus kepemilikan dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil																	
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Pengusulan penambahan SDM yang Kompeten Perlunya Pelatihan atau Diklat Service Exelent Front Liner terutama untuk petugas pelayanan yang langsung berhubungan masyarakat																	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023).		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PERANGKAT DAEARAH 2023	80%	#REF!	100%	2,052,901,296	80%	1,722,162,475	28%		28%	393,803,089	128%	50,440,654	160%	#REF!	DPMD
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten DPMD 2024	100%	#REF!	100%	25,220,327	100%	25,035,450	6%		6%	-	106%	25,220,327	106%	#REF!	DPMD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	3	#REF!	1	3,976,550	3	2,981,000				-	1	3,976,550	33%	#REF!	DPMD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	37,084,339	2	2,904,000	2	3,001,500				-	2	2,904,000	100%	8%	DPMD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	3,558,377	1	3,246,900	2	3,558,000				-	1	3,246,900	50%	91%	DPMD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	4,357,920	1	3,834,596	1	4,180,650	1		1	-	2	3,834,596	200%	88%	DPMD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	4,710,886	1	3,261,200	1	4,167,300				-	1	3,261,200	100%	69%	DPMD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersedia (Dokumen)	1	7,884,432	1	3,327,800	1	2,438,000	1		1	-	2	3,327,800	200%	42%	DPMD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	7,687,988	1	4,669,281	1	4,709,000				-	1	4,669,281	100%	61%	DPMD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	#REF!	97%	1,584,059,135	100%	1,487,007,025	30%		30%	383,435,589	127%	1,967,494,724	127%	#REF!	DPMD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten DPMD 2024	12	1,757,041,215	12	1,546,621,384	12	1,430,921,025	3	383,435,589	3	383,435,589	15	1,930,056,973	125%	110%	DPMD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	\CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PERANGKAT DAEARAH 2023	9	45,101,249	9	29,217,400	9	50,040,000	2		2	-	11	29,217,400	122%	65%	DPMD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjagan ASN	1	4,750,572	1	3,999,651	1	3,212,000				-	1	3,999,651	100%	84%	DPMD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	4,909,313	2	4,220,700	1	2,834,000				-	2	4,220,700	200%	86%	DPMD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023).		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	7,708,629	100%	3,248,900	100%	4,190,000	100%		100%	367,500	200%	3,616,400	200%	46.91%	DPMD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan (OB)	1	7,708,629	9	3,248,900	1	4,190,000	1		1	-	10	3,248,900	1000%	42%	DPMD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	96,634,617	100%	10,365,554	100%	704,000	38%		38%	-	138%	10,365,554	138%	10.73%	DPMD
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	\CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PERANGKAT DAEARAH 202	2	39,270,000	0		-						0	-	0%	0.00%	DPMD
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	19	16,830,000	20	6,800,000	-					-	20	6,800,000	105%	40.40%	DPMD
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	4,098,766	1	3,565,554	1	704,000	38%		38%	-	1	3,565,554	138%	86.99%	DPMD
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	5,666,100	0		1						0	-	0%	0.00%	DPMD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	19,493,650	0	-	-						0		0%	0.00%	DPMD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	5,666,100	0	-	1						0		0%	0.00%	DPMD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	5,610,000	0	-	-						0		0%	0.00%	DPMD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	#REF!	100%	268,885,500	100%	128,171,000	12%		12%	-	112%	268,885,500	112%	#REF!	DPMD
															#DIV/0!		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	12	14,781,185	12	5,482,000	12	1,335,000	14%		14%	-	12	5,482,000	101%	37%	DPMD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Perealatan Rumah Tangga yang tersedia	1	5,721,650	0		1					-	0	-	0%	0%	DPMD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023).		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	6,529,204	1	5,196,000	1	4,003,000				-	1	5,196,000	100%	80%	DPMD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	1,664,314	0		1						0	-	0%	0%	DPMD
	Peyedia Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang disediakan	1	#REF!	1	5,480,000	1	500,000				-	1	5,480,000	100%	#REF!	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	#REF!	12	248,604,000	12	115,570,000	3		3	-	15	248,604,000	125%	#REF!	DPMD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	2,288,660	1	1,576,600	1	1,763,000				-	1	1,576,600	100%	69%	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	118,577,717	9	2,546,900	3	5,000,000				-	9	2,546,900	300%	2%	DPMD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	#REF!	100%	13.558.000	100%	-					100%	#VALUE!	100%	#VALUE!	DPMD
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	16,643,136	0	-							0		0%	0%	DPMD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	#REF!	1	364,720,927	13	13.558.000	1	-				-	13	#VALUE!	1300%	#VALUE!	DPMD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	357,020,927	100%	99,103,880	100%	62,355,000	22%		22%	-	122%	99,103,880	122%	28%	DPMD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim (Surat)	1	2,773,856	300	5,420,500	1	1,659,000				-	300	5,420,500	30000%	195%	DPMD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, air dan listrik yang terbayarkan (Bulan)	12	6,934,640	12	6,000,000	12						12	6,000,000	100%	87%	DPMD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Unit)	7	5,778,867	7	3,750,000	7					-	7	3,750,000	100%	65%	DPMD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	#REF!	23	90,843,998	20	83,933,380	23	60,696,000	17	11,400,000	17	-	37	83,933,380	100%	92%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023).		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	#REF!	100%	47,975,000	100%	14,700,000	23%		23%	10,000,000	123%	46,480,500	123%	#REF!	DPMD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	5,500,000	1	6,880,500	1	14,700,000		9,715,374			1	6,880,500	100%	125.10%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	#REF!	12	#REF!	12	39,600,000	12		3		3	-	15	39,600,000	125%	#REF!	DPMD
	#REF!	#REF!	1	#REF!			1						0	-	0%	#REF!	
	#REF!	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	43,810,914									0	-	0%	0.00%	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	6,600,000	0		1						0	-	0%	0.00%	DPMD
II	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang menyelenggarakan Administrasi pemerintahan Desa sesuai UU Desa No.6 tahun 2014 (Desa)	85%	6,600,000	100%	5,750,580	100%	2,342,000					100%	5,750,580	118%	87%	DPMD
	Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa	100%	6,055,348	100%	5,750,580	100%	2,342,000					100%	5,750,580	100.00%	94.97%	DPMD
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah administrasi desa yang terbina (Desa)	83	26,952,502	83	3,571,000	83	1,079,000					83	3,571,000	100.00%	13.25%	DPMD
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah administrasi desa yang terbina (Desa)	83	26,962,502	83	2,179,580	83	1,263,000					83	2,179,580	100.00%	8.08%	DPMD
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah administrasi desa yang terbina (Desa)	83	15,659,550	0		83						0	-	0.00%	0.00%	DPMD
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Swadaya Masyarakat Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat (Jumlah Kegiatan Swadaya)	85%	15,814,400	100%	2,716,100	100%	850,000					100%	2,716,100	117.65%	17.17%	DPMD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023).		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	100%	15,814,400	100%	2,716,100	100%	850,000					100%	2,716,100	100.00%	17.17%	DPMD
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	#REF!	83	#REF!	0		83						0	-	0.00%	#REF!	DPMD
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/kota	#REF!	83	#REF!	0		83						0	-	0.00%	#REF!	DPMD
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	83	7,576,400	83	2,716,100	83	850,000		300,000			83	2,716,100	100.00%	35.85%	DPMD
IV	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/kota	85%	3,000,000	100%	1,066,091,564	100%	1,150,931,000	100%		100%	659,123,040	100%	2,791,306,168		117.65%	DPMD
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	100%	5,238,000	100%	1,066,091,564	100%	1,150,931,000				329,561,520	100%	1,395,653,084	100.00%	26644.77%	DPMD
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Desa yang menyelengarakan adminitrasi pemerintahan	83	1,735,389,238	83		83	54,983,000		3,643,826		-	83	-	100.00%	0.00%	DPMD
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	#REF!	83	1,735,389,238	0		-						0	-	0.00%	0.00%	DPMD
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	83	9,022,562	83		83						83	-	100.00%	0.00%	DPMD
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	83	5,350,000	83	963,050,960	83	1,010,581,000	83	329,561,520		329,561,520	83	1,292,612,480	100.00%	24160.98%	DPMD
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	83	4,497,459			-						0	-	0.00%	0.00%	DPMD
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Desa	83	1,376,937,128			83						0	-	0.00%	0.00%	DPMD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023).		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah administrasi desa yang terbina (Desa)	83	8,560,000	0		83						0	-	0.00%	0.00%	DPMD
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	83	5,510,500			83						0	-	0.00%	0.00%	DPMD
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	#REF!	#REF!	8,859,035	0	1,367,400	55	25,958,000				-	0	1,367,400	#REF!	15.44%	DPMD
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	#REF!	10,509,191	95	15,962,750	1		16			-	95	15,962,750	#REF!	151.89%	DPMD
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	10	231,189,067	0		83	6,629,000		329,000			0	-	0.00%	0.00%	DPMD
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pengangakatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	5,965,316	0		-						0	-	0.00%	0.00%	DPMD
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1	11,330,000	0		1						0	-	0.00%	0.00%	DPMD
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang dilatih dalam manajemen permusyawaratan desa	83	5,500,000	0		-						0	-	0.00%	0.00%	DPMD
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah DokumenHasil Pengelolaan Aset Desa	83	2,433,707	0		-						0	-	0.00%	0.00%	DPMD
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	#REF!	1	5,350,000	0		-						0	-	0.00%	0.00%	DPMD
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1	20,790,159	2	85,710,454	1	52,780,000	1			-	2	85,710,454	200.00%	412.26%	DPMD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023).		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	76%	5,350,000	100%	932,471,243	100%	390,456,600	80%		80%	204,650,807	180%	1,137,122,050	236.84%	21254.62%	DPMD
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	76%	18,235,116	100%	932,471,243	100%	390,456,600	80%		80%	204,650,807	180%	1,137,122,050	236.84%	6235.89%	DPMD
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat	83	2,916,020,323	83	367,250	83					-	83	367,250	100.00%	0.01%	DPMD
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	#REF!	83	#REF!	83	146,900	83					-	83	146,900	100.00%	#REF!	DPMD
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	#REF!	83	#REF!	83	75,009,988	83	65,100,000				-	83	75,009,988	100.00%	#REF!	DPMD
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	70,000,000			1					-	0	-	0.00%	0.00%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023).		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	#REF!	1	#REF!	1	12,817,000	1					-	1	12,817,000	100.00%	#REF!	DPMD
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	#REF!	1	#REF!	1	94,108,000	1		1		1	-	2	94,108,000	200.00%	#REF!	DPMD
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	1	#REF!	0		1						0	-	0.00%	#REF!	DPMD
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	#REF!	1	2,396,020,323	10	750,022,105	1	325,356,600	1	16,778,000	1	204,650,807	11	954,672,912	1100.00%	39.84%	DPMD
	#REF!	#REF!	83	50,000,000			83						0	-	0.00%	0.00%	
			100%	3,728,030,916	100%	4,059,930,783	100%	3,266,742,075	36%	755,163,309	36%	1,257,576,936	1	3,987,335,552	136%	106.96%	DPMD
																38%	
																rendah	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

NO.	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indiakator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 S/D 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (total)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024								
									I								
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9=5+8		10 = 9/4x100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**14,199,143,231**	**100**	**2,856,025,084**	**100**	**2,960,391,181**	**35**	**1,032,000,849**	**35**	**1,032,000,849**	**100**	**3,888,025,933**	**100**	**27**	DISHUB
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**155,330,000**	**100**	**35,275,000**	**100**	**35,805,000**	**0**	**-**	**0**	**0**	**100**	**35,275,000**	**100**	**23**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40	20,260,000	10	5,225,000	10	4,145,000				0	10	**5,225,000**	25	**26**	
			40									0		-		**#DIV/0!**	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	40	19,300,000	10	4,300,000	10	3,530,000	0		0	0	10	**4,300,000**	25	**22**	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	40	19,460,000	10	4,460,000	10	3,160,000				0	10	**4,460,000**	25	**23**	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	40	19,460,000	10	4,460,000	10	3,160,000	0		0	0	10	**4,460,000**	25	**23**	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	40	19,460,000	10	4,460,000	10	3,230,000				0	10	**4,460,000**	25	**23**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	40	19,112,000	10	4,092,000	10	3,810,000				0	10	**4,092,000**	25	**21**	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	40	38,278,000	10	8,278,000	10	14,770,000	0		0	0	10	**8,278,000**	25	**22**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pelayanan dan laporan administrasi keuangan**	**100**	**12,372,434,366**	**100**	**2,653,090,404**	**100**	**2,609,202,035**	**39**	**1,010,799,299**	**39**	**1,010,799,299**	**100**	**3,663,889,703**	**100**	**30**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	48	12,040,240,466	12	2,582,569,804	12	2,538,092,035	3	1,006,579,299	3	1,006,579,299	15	**3,589,149,103**	31	**30**	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Bulan)	48	293,969,900	12	62,312,000	12	63,840,000	3	4,220,000	3	4,220,000	15	**66,532,000**	31	**23**	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			*#REF!*								0	0	-			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan Dokumen keuangan akhir tahun SKPD		*#REF!*								0	0	-			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (calk)	*Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD*		*#REF!*								0	0	-			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dokumen)	40	19,112,000	10	4,111,600	10	3,635,000				0	10	**4,111,600**	25	22	

NO.	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indiakator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 S/D 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (total)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dokumen)	40	19,112,000	10	4,097,000	10	3,635,000				0	10	**4,097,000**	25	21	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100**	**156,704,000**	**100**	**4,112,000**	**100**	**3,496,400**			**0**	**0**	**100**	**4,112,000**	**100**	**3**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	10,000,000				350				0		-			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	120	85,592,000				350				0	0	-	0	0	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	50	21,112,000	10	4,112,000	10	3,495,000			0	0	**10**	**4,112,000**	20	19	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	20,000,000				350				0		-			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4	20,000,000				350				0		-			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**100**	**655,902,355**	**100%**	**109,373,080**	**100**	**87,353,500**	**24**	**21,201,550**	**24**	**21,201,550**	**25**	**130,574,630**	25	20	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	36	3,007,000			12	10,000				0		-			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	48	20,717,687	12	5,382,000	12	10,000,000			0	0	**12**	**5,382,000**	25	26	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	48	14,630,550	12	2,400,000	12	3,400,300			0	0	**12**	**2,400,000**	25	16	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48	52,000,000	12	10,000,000	12				0	0	**12**	**10,000,000**	25	19	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	82	565,547,118	12	91,591,080	20	73,943,200	6	21,201,550	6	21,201,550	**18**	**112,792,630**	22	20	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan barang milik daerah**	**100**	**183,500,000**	**100**	**-**	**100**	**172,750,700**		**-**		-	**100**	**-**	100	0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	90,000,000			1	22,750,000				-		-			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	21,500,000			1	350				-	**0**	-	0	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	28	72,000,000			1	150,000,350				0	**0**	-	0	0	
	Lainnya	Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	30,000,000								0	**0**	-	0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**100**	**49,168,000**	**100**	**9,599,800**	**100**	**8,924,000**		**-**	**0**	0	**100**	**9,599,800**	**100**	**20**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2000	7,348,000	500	940,000	500	924,000			0	0	500	940,000	25	13	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	30,660,000	12	7,659,800	12	6,000,000			0	0	12	7,659,800	25	25	

NO.	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indiakator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 S/D 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (total)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024								
									1								
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	48	9,160,000	12	1,000,000	12	1,000,000				0	12	1,000,000	25	11	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	24	2,000,000			12	1,000,000				0		-			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**100**	**626,104,510**	**100**	**44,574,800**	**100**	**42,859,546**		**-**	**0**	**0**	**100**	**44,574,800**	**100**	**7**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	326,104,510	6	44,574,800	6	42,859,546			0	0	6	44,574,800	25	14	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	200	280,000,000								0		0			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	4	20,000,000								0		0			
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Perlengkapan Jalan Kabupaten yang Terpasang**	**100**	**23,603,871,375**	**100**	**193,111,900**	**100**	**3,338,990,463**	**1**	**42,300,000**	**1**	**42,300,000**	**100**	**235,411,900**	**100**	**1**	DISHUB
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Ideal**	**100**	**173,099,200**	**100**	**133,012,800**	**100**	**172,571,000**		**28,200,000**	**0**	**28,200,000**	**100**	**161,212,800**	**100**	**93**	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	40,000,000				350				0		0			
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kiota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)						350				0		0			
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	48	569,158,776								0		0			
	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kiota							350				0		0			
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kiota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)						350				0		0			
	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kiota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	58	133,099,200	47	133,012,800	47	172,569,600	47	28,200,000	47	28,200,000	94	161,212,800	162	121	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota**	**100**	**15,618,121,175**	**100**	**25,753,300**	**100**	**3,164,379,613**	**0**	**14,100,000**	**0**	**14,100,000**	**100**	**39,853,300**	**100**	**0**	
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	940	13,042,125,424	148	15,980,000	148	534,359,263				0	148	15,980,000			
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia. *Tersedianya APILL yang diadakan Tersedianya Cermin Cekung yang diadakan Tersedianya Deliniator yang didakan*	100	2,575,995,751	12	9,773,300	12	2,368,102,350	0		0	0	12 - -	9,773,300 - -	12	0	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)					12	241,992,000	3	14,100,000		14,100,000	-	14,100,000			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)					12	19,926,000				0		-			
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**Persentase pengelolaan terminal tipe C**	**100**	**7,560,000,000**	**100%**	**0**	**100**	**700**				**0**		-			

NO.	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indiakator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 S/D 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (total)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024								
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Terbangun (Unit)	7	810,000,000								0	0	0			
	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal Tipe C yang Terbangun (Unit)	12	6,750,000,000								0		0		**0%**	
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi fasilitas Utama dan Fasilitas Penumpang	Jumlah Terminal tipe C yang Terbangun yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang (Unit)						700				0		0		**#DIV/0!**	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase kepemilikan KIR angkutan umum**	**100**	**60,798,000**	**100%**	**8,277,000**	**100**	**2,037,050**		**-**	**0**	**0**	**1**	**8,277,000**	**0**	**0%**	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2104	46,024,000	30	6,777,000	1	350			0	0	**30**	**6,777,000**	0	0%	
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor wajib Uji (Laporan)						2,036,000				0		0			
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)						350				0		0			
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laopran Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	48	14,774,000	12	1,500,000	12	350				0	12	1,500,000	25	10	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Rasio Izin Trayek**						**350**				**0**		**0**			
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						350				0		0			
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Rasio izin trayek**	**100**	**128,799,000**	**100**	**14,438,800**	**100**	**1,050**		**-**		**0**	**100**	**14,438,800**	**100**	**11**	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1032	63,779,000	16	3,743,000		350				0		3,743,000			
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	65,020,000	2	10,695,800	2	350				0	2	10,695,800	50	16	
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)						350				0		0			
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							**350**				**0**		**0**			
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota							350				0		0			

NO.	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indiakator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 S/D 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (total)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024								
									I								
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Rasio izin trayek**	**100**	**63,054,000**	**100**	**11,630,000**	**100**	**350**		**-**	**0**	**0**	**100**	**11,630,000**	**100**	**18**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	48	63,054,000	12	11,630,000	12	350			0	0	12	11,630,000	25	18	
III	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Pelabuhan Dalam Kondisi Baik**	**100**	**143,020,606**	**100**	**16,321,600**	**100**	**1,750**		**-**	**0**	**0**	**100**	**16,321,600**	**100**	**11**	DISHUB
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	**Jumlah Terminal/ Dermaga/ Pelabuhan Laut**						**1,400**				**0**		**0**			
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun						350				0		0			
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara						350				0		0			
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal						350				0		0			
	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia						350				0		0			
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	**Jumlah Terminal/ Dermaga/ Pelabuhan Laut**	**100**	**143,020,606**	**100**	**16,321,600**	**100**	**350**		**-**	**0**	**0**	**100**	**16,321,600**	**100**	**11**	
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun (Unit)	284	143,020,606	30	16,321,600		350			0	0	30	16,321,600	11	11	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)										0	0	0			
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)										0	0	0			

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9=5+8		10=9/4 x100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**2,917,816,768**	**100 %**	**2,031,449,106**	**100 %**	**1,978,354,368**	**100 %**	**565,457,444**	**100 %**	**565,457,444**	**100 %**	**2,596,906,550**	**100 %**	**18.02**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 %**	**35,787,700**	**100 %**	**22,879,700**	**100 %**	**8,964,000**	**100 %**	**2,988,000**	**100 %**	**2,988,000**	**100 %**	**25,867,700**	**100 %**	**5.08**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	5,040,000	5 Dok	3,079,000	5 Dok	2,988,000				-	5 Dok	3,079,000	1.00 Dok	0.61	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dok	5,040,000	5 Dok	3,021,000						-	5 Dok	3,021,000	1.00 Dok	0.60	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dok	5,040,000	5 Dok	3,021,000						-	5 Dok	3,021,000	1.00 Dok	0.60	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15 Dok	5,040,000	5 Dok	3,858,350						-	5 Dok	3,858,350	0.33 Dok	0.77	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15 Dok	5,040,000	5 Dok	3,858,350						-	5 Dok	3,858,350	0.33 Dok	0.77	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap.	5,040,000	5 Lap.	3,021,000	5 Lap.	2,988,000	5 Lap.	2,988,000	5 Lap.	2,988,000	10 Lap.	6,009,000	2.00 Lap.	1.19	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap.	5,547,700	5 Lap.	3,021,000	5 Lap.	2,988,000				-	5 Lap.	3,021,000	1.00 Lap.	0.54	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**1,542,719,172**		**1,693,049,006**		**1,791,072,497**		**496,939,444**		**496,939,444**		**2,189,988,450**		**3.41**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Org	1,495,652,736	25 Org	1,665,887,006	25 Org	1,771,192,497	25 Org	491,379,444	25 Org	491,379,444	50 Org	2,157,266,450	2.00 Org	1.44	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dok	37,434,436	3 Dok	21,120,000	3 Dok	19,880,000	1 Dok	5,560,000	1 Dok	5,560,000	4 Dok	26,680,000	1.33 Dok	0.71	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap.	4,816,000	5 Lap	3,021,000						-	5 Lap.	3,021,000	1.00 Lap.	0.63	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Lap.	4,816,000	5 Lap	3,021,000						-	5 Lap.	3,021,000	1.00 Lap.	0.63	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**71,000,000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	12,000,000		-						-	- Paket	-	- Paket	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	35,000,000		-						-	- Paket	-	- Paket	-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Org	12,000,000													
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Org	12,000,000													
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**492,840,896**		**216,442,310**		**136,395,000**		**40,115,000**		**40,115,000**		**256,557,310**		**4.97**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,235,000	1 Paket	2,000,000	1 Paket	2,138,000	1 Paket	2,138,000	1 Paket	2,138,000	2 Paket	4,138,000	2.01 Paket	0.98	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70,000,000		-	1 Paket	26,300,000	1 Paket	26,275,000		26,275,000	- Paket	26,275,000	- Paket	0.38	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5,000,000											-	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	1 Paket	6,600,000	1 Paket	6,000,000	1 Paket	6,000,000	1 Paket	6,000,000	2 Paket	12,600,000	2.00 Paket	1.26	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,630,000	1 Paket	2,000,000	1 Paket	3,577,000	1 Paket	3,577,000	1 Paket	3,577,000	2 Paket	5,577,000	2.03 Paket	1.54	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yang Disediakan	5 Dok	15,120,243	5 Dok	2,125,000	5 Dok	2,125,000	5 Dok	2,125,000	5 Dok	2,125,000	10 Dok	4,250,000	2.00 Dok	0.28	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Lap.	380,055,653	50 Lap.	203,717,310	50 Lap.	96,255,000					50 Lap.	203,717,310	1.06 Lap.	0.54	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dok	4,800,000												-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**401,390,000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-		-						-					
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-		-						-					
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	165,000,000		-						-				-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Paket	165,000,000													
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	32,670,000													
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	38,720,000													
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**89,859,000**		**53,301,690**		**15,798,871**		**12,508,871**		**12,508,871**		**65,810,561**		**3.68**	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75 Lap.	2,376,000	50 Lap.	2,016,000	50 Lap.	2,230,000	50 Lap.	2,230,000	50 Lap.	2,230,000	100 Lap.	4,246,000	1.33 Lap.	1.79	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap.	43,560,000	3 Lap.	35,763,690	3 Lap.	1,560,000				-	3 Lap.	35,763,690	1.07 Lap.	0.82	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Lap.	19,965,000												-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Lap.	23,958,000	5 Lap.	15,522,000	5 Lap.	12,008,871	4 Lap.	10,278,871	4 Lap.	10,278,871	9 Lap.	25,800,871	1.86 Lap.	1.08	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**284,220,000**		**45,776,400**		**26,124,000**		**12,906,129**		**12,906,129**		**58,682,529**		**0.88**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	32,670,000													
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	66,550,000	2 Unit	45,776,400	2 Unit	26,124,000	1 Unit	12,906,129	1 Unit	12,906,129	3 Unit	58,682,529	1.50 Unit	0.88	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	20,000,000													
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	165,000,000													
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah**		**4,308,815,321**		**1,450,360,835**		**1,058,000,000**		**243,630,000**		**243,630,000**		**1,016,815,835**		**6.88**	
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan															
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrsi															
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**4,308,815,321**		**1,450,360,835**		**1,058,000,000**		**243,630,000**		**243,630,000**		**1,016,815,835**		**6.88**	
	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	30 Lap.	500,000,000	30 Lap.	660,500,000	30 Lap	690,000,000	30 Lap	615,000,000	30 Lap	615,000,000	60 Lap	1,275,500,000	2.00 Unit	2.55	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyaraka	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	15 Komunitas	178,000,000	10 Komunitas	16,675,000	15 Komunitas	50,000,000			- Komunitas	-	10 Komunitas	16,675,000	0.67 Unit	0.09	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	5 Lap.	150,000,000	5 Lap.	9,475,000					- Lap	-	5 Lap	9,475,000	1.00 Unit	0.06	
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	8 Permohonan	2,000,000,000	8 Permohonan	449,955,000	8 Permohonan	75,000,000	4 Permohonan	33,630,000	4 Permohonan	33,630,000	12 Permohonan	483,585,000	1.50 Unit	0.24	
	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 %	65,000,000	100 %	2,652,000					- %	-	100 %	2,652,000	1.00 Unit	0.04	
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	30 Rekomendasi	65,000,000	20 Rekomendasi	28,497,535					- Rekomendasi	-	20 Rekomendasi	28,497,535	0.67 Unit	0.44	
	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 %	370,000,000	100 %	52,104,400					- %	-	100 %	52,104,400	1.00 Unit	0.14	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	3 Media	600,000,000	3 Media	199,950,000	3 Media	33,000,000			- Media	-	3 Media	199,950,000	1.00 Unit	0.33	
	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	3 Dok	50,815,321	3 Dok	10,380,000					- Dok	-	3 Dok	10,380,000	1.00 Unit	0.20	
	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	15 Konten	80,000,000	2100 Konten	8,400,000	15 Konten	210,000,000	15 Konten	210,000,000	15 Konten	210,000,000	### Konten	218,400,000	#### Unit	2.73	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/ pelatihan	100 Org	250,000,000	50 Org	11,771,900					- Org	-	50 Org	11,771,900	0.50 Unit	0.05	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	**Persenyase OPD yang memiliki aplikasi informatika terintegrasi**		**373,191,770**		**322,340,880**		**1,986,280,000**		**5,964,200**		**-**		**328,305,080**		**11.54**	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	**Cakupan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**67,406,770**		**132,891,580**		**-**		**-**		**-**		**132,891,580**		**1.97**	
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Des	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dok	67,406,770	1 Dok	132,891,580					- Dok	-	1 Dok	132,891,580	1.00 Unit	1.97	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**305,785,000**		**189,449,300**		**1,986,280,000**		**5,964,200**		**5,964,200**		**195,413,500**		**9.57**	
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	2 Aplikasi	33,275,000	2 Aplikasi	89,325,600					- Aplikasi	-	2 Aplikasi	89,325,600	1.00 Unit	2.68	
	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	1 Dok	6,655,000	1 Dok	3,523,000					- Dok	-	1 Dok	3,523,000	1.00 Unit	0.53	
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2 Lap.	25,620,000	2 Lap.	6,000,000					- Lap	-	2 Lap	6,000,000	1.00 Unit	0.23	
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dok	12,810,000	1 Dok	3,800,000	1 Dok	7,000,000			- Dok	-	1 Dok	3,800,000	1.00 Unit	0.30	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	5 Dok	9,982,500	5 Dok	4,842,800					- Dok	-	5 Dok	4,842,800	1.00 Unit	0.49	
	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dok	25,620,000	1 Dok	15,200,000					- Dok	-	1 Dok	15,200,000	1.00 Unit	0.59	
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dok	9,982,500	1 Dok	4,842,800					- Dok	-	1 Dok	4,842,800	1.00 Unit	0.49	
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	43 Aplikasi	6,655,000	43 Aplikasi	3,523,000					- Aplikasi	-	43 Aplikasi	3,523,000	1.00 Unit	0.53	
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	43 Aplikasi	12,810,000	43 Aplikasi	3,800,000					- Aplikasi	-	43 Aplikasi	3,800,000	1.00 Unit	0.30	
	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	15 Dok	25,620,000	15 Dok	10,314,000					- Dok	-	15 Dok	10,314,000	1.00 Unit	0.40	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	2 Unit	12,810,000	2 Unit	3,690,000					- Unit	-	2 Unit	3,690,000	1.00 Unit	0.29	
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	25 PD	16,637,500	20 PD	4,275,000	25 PD	1,979,000,000	0.08 OPD	5,964,200	### PD	5,964,200	20 PD	10,239,200	0.80 Unit	0.62	
	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	17 Lay.	19,965,000	17 Lay.	7,500,000					- Lay	-	17 Lay	7,500,000	1.00 Unit	0.38	
	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	5 Dok	25,620,000	5 Dok	7,215,000					- Dok	-	5 Dok	7,215,000	1.00 Unit	0.28	
	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	7 Prog	12,810,000	7 Prog	3,690,000					- Prog	-	7 Prog	3,690,000	1.00 Unit	0.29	
	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dok	25,620,000	1 Dok	10,110,100					- Dok	-	1 Dok	10,110,100	1.00 Unit	0.39	
	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	5 Aplikasi	6,655,000	5 Aplikasi	3,523,000					- Aplikasi	-	5 Aplikasi	3,523,000	1.00 Unit	0.53	
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	38 PD	16,637,500	38 PD	4,275,000	3 PD	280,000			- PD	-	38 PD	4,275,000	1.00 Unit	0.26	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektroal	**Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**		**291,781,677**		**-**		**149,479,304**		**7,800,000**		**7,800,000**		**7,800,000**		**0.23**	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	**Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**		**291,781,677**		**-**		**149,479,304**		**7,800,000**		**7,800,000**		**7,800,000**		**0.23**	
	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	4 Org	33,275,000	4 Org			48,410,304		7,800,000	- Org	7,800,000	4 Org	7,800,000	1.00 Unit	0.23	
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 %	66,550,000	100 %						- %	-	100 %	-	1.00 Unit		
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 %	33,567,677	100 %		100 %	101,069,000			- %	-	100 %	-	1.00 Unit	-	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	5 Dok	93,170,000	5 Dok						- Dok	-	5 Dok	-	1.00 Unit	-	
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	5 Dok	65,219,000	5 Dok						- Dok	-	5 Dok	-	1.00 Unit	-	
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	**Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah**		**146,409,927**		**98,169,000**		**14,302,000**		**2,197,000**		**2,197,000**		**100,366,000**		**3.15**	
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**106,479,927**		**48,714,000**		**13,252,000**		**2,197,000**		**2,197,000**		**50,911,000**		**1.91**	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	5 Dok	23,957,927	5 Dok	15,730,000	5 Dok	6,820,000			- Dok	-	5 Dok	15,730,000	1.00 Unit	0.66	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	10 Dok	29,282,000	10 Dok	18,210,000	10 Dok	2,409,000	4 Dok	909,000	4 Dok	909,000	14 Dok	19,119,000	1.40 Unit	0.65	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Lap.	26,620,000	6 Lap.	5,774,000	6 Lap.	975,000			- Lap	-	6 Lap	5,774,000	1.00 Unit	0.22	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	12 OPD	26,620,000	12 OPD	9,000,000	7 OPD	3,048,000	3 OPD	1,288,000	3 OPD	1,288,000	15 OPD	10,288,000	1.25 Unit	0.39	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	**Cakupan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota**		**39,930,000**		**49,455,000**		**1,050,000**		**-**		**-**		**49,455,000**		**1.24**	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	7 OPD	39,930,000	7 OPD	49,455,000	7 OPD	1,050,000			- OPD	-	7 OPD	49,455,000	1.00 Unit	1.24	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan I	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Rata-rata capaian Kinerja (%)									39.83	
Predikat Kinerja dari seluruh Program (Program 1 s.d. Program 5)										
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya kemauan yang kuat bagi para pegawai Dinas Sosial dalam menjalankan tugas yang diemban dan saling membantu dalam proses pencapaian kinerja SKPD										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : kurangnya anggaran										
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : anggaran bisa di realisasikan sesuai RAB										
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : kerjasama antar perencana Dinas dan Bapeda										

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ... (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun (n-1) 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025.		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*12*		*13=6+12*		*14=13/5*100%*		*15*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase OPD Yang Dapat di layani Adm Perkantoran**	**100%**	**8,952,147,320**	**100%**	**2,048,844,603**	**100%**	**2,101,098,678**			**0%**	**0**	**50%**	**2,048,844,603**	**50%**	**0.23**	**Dinas Koperasi dan UKM**
	Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**132**	**130,000,000**	**33**	**58,476,950**	**33**	**27,000,000**			**-**	**0**	**33**		**25%**	**-**	**Dinas Koperasi dan UKM**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perankat Daerah	Tersusunnya renja SKPD	20	18,999,750	5	10,499,750	5	4,000,000			-	0	**5**		**25%**	-	Dinas Koperasi dan UKM
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Tersusunya RKA (Eksemplar)	20	18,749,500	5	6,499,500	5	4,000,000			-	0	**5**		**25%**	-	Dinas Koperasi dan UKM
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahanRKA - SKPD	Jumlah RKA Perubahan SKPD	20	17,749,700	5	6,749,700	5	3,500,000			-	0	**5**		**25%**	-	Dinas Koperasi dan UKM
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	Penyusunan Dokumen DPA	20	16,849,500	5	5,599,500	5	4,000,000			-	0	**5**		**25%**	-	Dinas Koperasi dan UKM
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Penyusunan Dokumen perubahan DPA	20	16,349,500	5	6,749,550	5	3,500,000			-	0	**5**		**25%**	-	Dinas Koperasi dan UKM
	Tersusunnyan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase jumlah laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	20	20,415,750	5	9,915,750	5	4,000,000			-	0	**5**		**25%**	-	Dinas Koperasi dan UKM
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya LPPD (Dokumen)	12	20,886,300	3	12,463,200	3	4,000,000			-	0	**3**		**25%**	-	Dinas Koperasi dan UKM
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**144**	**6,928,399,282**	**32**	**2,918,856,904**	**32**	**1,682,598,678**	**15**	**338,195,621**	**15**	**338,195,621**	**47**	**3,257,052,525**	**33%**	**0.47**	**Dinas Koperasi dan UKM**
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	88	6,730,703,782	18	2,895,861,404	18	1,633,998,678	15	338,195,621	15	338,195,621	**33**	3,234,057,025	**38%**	**0.48**	Dinas Koperasi dan UKM
	Penyediaan administrasi jasa pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16	110,790,000	4	18,990,000	4	30,000,000	-			0		18,990,000	**0%**	**0.17**	Dinas Koperasi dan UKM
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8	19,005,500	2	-	2	4,000,000	-			0		0	**0%**	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16	16,200,000	4	-	4	3,500,000	-			0		0	**0%**	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	4	16,200,000	1	-	1	3,600,000	-			0		0	**0%**	-	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	8	18,600,000	2	-	2	4,000,000	-			0		0	**0%**	-	
	Penyusunan pelaporan keuangan Bulanan Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4	16,900,000	1	4,005,500	1	3,500,000	0			0	**1**	4,005,500	**25%**	**0.24**	Dinas Koperasi dan UKM
	Administrasi barang milik daerah pada perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi barang milik daerah pada perangkat Daerah**	**40**	**55,000,000**	**10**	**7,600,000**	1	**3,500,000**	1		1	**0**	**11**	**7,600,000**	**28%**	**0.14**	**Dinas Koperasi dan UKM**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	8	5,500,000	2	-	1	500,000	0%				**2**	0	**25%**	-	

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ... (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun (n-1) 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025.		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengamanan Barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan barang milik daerah SKPD	8	5,500,000	2	-	1	500,000	0%				**2**	0	**25%**	-	
	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	4	7,500,000	1	-	1	500,000	0%				**1**	0	**25%**	-	
	Pembinaan, pengawasan, dan Pengendalian daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	4	9,500,000	1	-	1	500,000	0%				**1**	0	**25%**	-	
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4	9,500,000	1	-	1	500,000	0%				**1**	0	**25%**	-	
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4	9,500,000	1	7,600,000	1	500,000	0		1	0	**2**	7,600,000	**50%**	**0.80**	Dinas Koperasi dan UKM
	Pemanfaatan Barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKPD	8	8,000,000	2	-	1	500,000	0				**2**	0	**25%**	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**48**	**96,000,000**	**12**	**27,999,750**	**12**	**21,000,000**	**0**		**11**	**0**	**23**	**27,999,750**	**48%**	**0.29**	**Dinas Koperasi dan UKM**
	Peningkatan sarana dan Prasarana disiplin Pegawai	Pengadaan Mesin Absensi	4	3,500,000	1	5,000,000	1	1,000,000	0		1	0	**2**	5,000,000	**50%**	**1.43**	Dinas Koperasi dan UKM
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	4	63,000,000	1	-	1	15,000,000	0		1	0	**2**	0	**50%**	-	Dinas Koperasi dan UKM
	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Anjab	8	6,500,000	2	2,999,750	2	1,000,000	0		5	0	**7**	2,999,750	**88%**	**0.46**	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	8	5,500,000	2	-	2	1,000,000	0				**2**	0	**25%**	-	
	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8	6,500,000	2	-	2	1,000,000	-		1	0	**3**	0	**38%**	-	Dinas Koperasi dan UKM
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	8	5,500,000	2	-	2	1,000,000	-		1	0	**3**	0	**38%**	-	Dinas Koperasi dan UKM
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	8	5,500,000	2	20,000,000	2	1,000,000	-		2	0	**4**	20,000,000	**50%**	**3.64**	Dinas Koperasi dan UKM
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**156**	**1,300,000,000**	**49**	**277,500,000**	**49**	**305,000,000**	**7**		**65**	**0**	**114**	**277,500,000**	**73%**	**0.21**	**Dinas Koperasi dan UKM**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	24	7,000,000	12	2,000,000	12	1,500,000	0		12	0	**24**	2,000,000	**100%**	**0.29**	Dinas Koperasi dan UKM
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantoer	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24	101,000,000	2	71,000,000	2	15,000,000	2		12	0	**14**	71,000,000	**58%**	**0.70**	Dinas Koperasi dan UKM
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah barang cetakan dan penggadaan	4	21,000,000	12	7,450,000	12	5,000,000	0		12	0	**24**	7,450,000	**600%**	**0.35**	Dinas Koperasi dan UKM
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	8	6,500,000	2	2,400,000	1	500,000	0		12	0	**14**	2,400,000	**175%**	**0.37**	Dinas Koperasi dan UKM

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ... (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun (n-1) 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025.		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80	1,151,000,000	20	205,000,000	20	280,000,000	5		2	0	**22**	205,000,000	**28%**	**0.18**	Dinas Koperasi dan UKM
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	8	6,500,000	0		1	1,500,000	0		0	0	**0**	0	**0%**	**-**	
	Dukungan Pelaksanaan Sistim Pemerintah berbasis Eloktronik pada SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	8	7,000,000	1	5,600,000	1	1,500,000	0		15	0	**16**	5,600,000	**200%**	**0.80**	Dinas Koperasi dan UKM
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Darah	**CakupanPenyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Darah**	**60**	**332,748,038**	**1**	**20,000,000**	**1**	**40,000,000**	**2**		**2**	**0**	**3**	**20,000,000**	**5%**	**0.06**	**Dinas Koperasi dan UKM**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Donas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20	250,000,000	0	-	1	30,000,000	0		1	0	**1**	0	**5%**	**-**	Dinas Koperasi dan UKM
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	40	82,748,038	1	20,000,000		10,000,000	0		1	0	**2**	20,000,000	**5%**	**0.24**	Dinas Koperasi dan UKM
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**156**	**55,000,000**	**27**	**159,304,524**	**27**	**11,000,000**	**19**		**27**	**0**	**54**	**159,304,524**	**35%**	**2.90**	**Dinas Koperasi dan UKM**
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	48	9,000,000	12	1,200,000	12	1,000,000	0		12	0	**24**	1,200,000		**0.13**	Dinas Koperasi dan UKM
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	34,000,000	3	4,004,524	3	8,000,000	0		2	0	**5**	4,004,524	**42%**	**0.12**	Dinas Koperasi dan UKM
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48	6,500,000	12	3,000,000	12.	1,000,000	0		12	0	**24**	3,000,000	**50%**	**0.46**	Dinas Koperasi dan UKM
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	5,500,000	12	151,100,000	12.	1,000,000	0		8	0	**20**	151,100,000	**42%**	**27.47**	Dinas Koperasi dan UKM
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**76**	**55,000,000**	**9**	**36,219,079**	**9**	**11,000,000**	**2**		**8**	**0**	**17**	**36,219,079**	**22%**	**0.66**	**Dinas Koperasi dan UKM**
	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	32	28,000,000	8	24,719,079	8	6,000,000	1		6	0	**14**	24,719,079	**44%**	**0.88**	Dinas Koperasi dan UKM
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	40	18,000,000	0		0	4,000,000	0				**0**	0	**0%**	**-**	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	9,000,000	1	6,500,000	1	1,000,000	1		2	0	**3**	6,500,000	**75%**	**0.72**	Dinas Koperasi dan UKM
II	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Presetase KoperasiAktif**	**16%**	**895,214,733**	**100 %**	**30,000,000**	**100 %**	**6,000,000**	**0%**		**0%**	**0**	**0%**	**30,000,000**	**100 %**	**0.03**	**Dinas Koperasi dan UKM**
	Penertiban Izin Usaha Simpan Pinjam	**Cakupan Penertiban Izin Usaha Simpan Pinjam**	**20**	**450,000,000**	**20**	**30,000,000**	**25**	**3,000,000**	**0**		**15**	**0**	**35**	**30,000,000**	**175%**	**0.07**	**Dinas Koperasi dan UKM**

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ... (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun (n-1) 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025.		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha simpan pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangu nan Koperasi	20	450,000,000	20	30,000,000	25	3,000,000	0		15	0		30,000,000	**0%**	**0.07**	Dinas Koperasi dan UKM
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota**	**20**	**445,214,733**				**3,000,000**	0					**0**	**0%**	**-**	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	Jumlah Kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	20	445,214,733				3,000,000	0				**#DIV/0!**	**0**	**#DIV/0!**	**-**	
III	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKASAAN KOPERASI**	**PRESESNTASE JUMLAH KOPERASI**	**21.95%**	**309,654,946**	**100%**	**85,000,000**	**100%**	**76,393,760**	**100%**		**100%**	**0**	**100%**	**85,000,000**	**456%**	**0.27**	**Dinas Koperasi dan UKM**
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah/Kabupaten /Kota	**Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah/Kabupaten /Kota**	**8**	**309,654,946**	**2**	**85,000,000**	**1**	**76,393,760**	**1**		**2**	**0**	**200%**	**85,000,000**	**25%**	**0.27**	**Dinas Koperasi dan UKM**
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	4	150,000,000	1	25,000,000	1.	38,000,000	1.		1	0	**100%**	25,000,000	**25%**	**0.17**	Dinas Koperasi dan UKM
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	4	159,654,946	1	60,000,000	1	38,393,760	1		1	0	**100%**	60,000,000	**25%**	**0.38**	Dinas Koperasi dan UKM
IV	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota**	**21.95%**	**283,103,321**	**100%**	**85,000,000**	**100%**	**72,742,520**	**100%**		**100%**	**0**	**100%**	**85,000,000**	**456%**	**0.30**	**Dinas Koperasi dan UKM**
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	**Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten**	**84**	**283,103,321**	**21**	**85,000,000**	**21**	**72,742,520**	**21**		**21**	**0**	**2100%**	**85,000,000**	**25%**	**0.30**	**Dinas Koperasi dan UKM**

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ... (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun (n-1) 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025.		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	80	138,000,000	20	75,000,000	20	38,000,000	20		20	0	**2000%**	75,000,000	**25%**	**0.54**	Dinas Koperasi dan UKM
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	4	145,103,321	1	10,000,000	1	34,742,520	1		1	0	**100%**	10,000,000	**25%**	**0.07**	Dinas Koperasi dan UKM
V	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN**	**persentase koperasi yang mengikuti pelatihan**	**39%**	**885,224,340**	**14%**	**195,151,050**	**14%**	**100,000,000**	**0**		**0**	**0**	**7%**	**195,151,050**	**18%**	**0.22**	**Dinas Koperasi dan UKM**
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah Kabupaten	**Cakupan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah Kabupaten**	**360**	**425,370,000**	**50**	**195,151,050**	**50**	**100,000,000**	**0**		**0**	**0**	**2500%**	**195,151,050**	**7%**	**0.46**	**Dinas Koperasi dan UKM**
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dalam Kopetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	360	425,370,000	50	195,151,050	50	100,000,000	0%		0%	0	**2500%**	195,151,050	**7%**	**0.46**	Dinas Koperasi dan UKM
	Pendidikan dan Latihan UKM dalam daerah Kabupaten	**Cakupan Pendidikan dan Latihan UKM dalam daerah Kabupaten**	320	**459,854,340**	0		0	-	0		0	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**-**	
	Peningkatan Peahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dalam Kopetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM	320	459,854,340	**0**	-	**0**	-	**0**		**0**	0	**0%**	**0**	**0%**	**-**	
VI	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**persentase koperasi yang dapat diberdayakan**	**21.85%**	**291,542,979**	**1**			**69,100,900**				**0**	**100%**	**0**	**458%**	**-**	**Dinas Koperasi dan UKM**
		persentase koperasi aktif	**82.74%**										**#DIV/0!**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanya Dalam Daerah Kabupaten	**Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanya Dalam Daerah Kabupaten**	**150**	**291,542,979**	**20**		**10**	**69,100,900**	**0**		**0**	**0**	**1000%**	**0**	**7%**	**-**	**Dinas Koperasi dan UKM**
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi La	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	120	142,542,979	10		10	34,100,900				0	**1000%**	0	**8%**	**-**	Dinas Koperasi dan UKM
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30	149,000,000	10			35,000,000					**1000%**	0	**33%**	**-**	
VII	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah**	**7%**	**11,897,213,482**	**100%**	**208,358,000**	**100%**	**700,000,000**			**100%**	**0**	**100%**	**208,358,000**	**1538%**	**0.02**	**Dinas Koperasi dan UKM**

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ... (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun (n-1) 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025.		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang di Lakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perzinan, Penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan Para pemangku Kepentingan	**Cakupan Pemberdayaan Usaha Mikro Yang di Lakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perzinan, Penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan Para pemangku Kepentingan**	**6400**	**11,897,213,482**	**4865**	**208,358,000**	**4805**	**700,000,000**	**0**		**8**	**0**	######	**208,358,000**	**38%**	**0.02**	**Dinas Koperasi dan UKM**
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	6000	620,000,000	4750	108,358,000	4750	100,000,000			100%	0	######	108,358,000	**40%**	**0.17**	Dinas Koperasi dan UKM
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	80	3,384,259,636	10	0	5	50,000,000				0	**1000%**	0	**13%**	-	Dinas Koperasi dan UKM
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	80	2,147,170,238	5		1	200,000,000					**500%**	0	**6%**	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	80	3,445,783,608	10	0	4	50,000,000			7	0	**850%**	0	**11%**	-	Dinas Koperasi dan UKM
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	80	1,600,000,000	15	0	10	100,000,000				0	**1500%**	0	**19%**	-	Dinas Koperasi dan UKM
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	80	700,000,000	75		35	200,000,000					**7500%**	0	**94%**	-	

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ... (akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun (n-1) 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025.		OPD Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VIII	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Jumlah Usaha Mikro dan Kecil**	**4%**	**332,936,340**	**100%**	**251,074,500**	**100%**	**200,000,000**			**100%**	**0**	**100%**	**251,074,500**	**2262%**	**0.75**	**Dinas Koperasi dan UKM**
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Cakupan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**40**	**332,936,340**	**10**	**251,074,500**	**10**	**200,000,000**	**0**		**10**	**0**	**1000%**	**251,074,500**	**25%**	**0.75**	**Dinas Koperasi dan UKM**
	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	40	332,936,340	10	**251,074,500**	10	200,000,000			10	0	**1000%**	251,074,500	**25%**	**0.75**	Dinas Koperasi dan UKM
			1623915%	71,541,112,383	1031714%	11,535,459,667	1014914%	9,976,007,574	9500%	676,391,242				12,094,897,009			

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun		Target Kinerja dan Anggaran SKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit Perangkat Daerah Penanggung
			4		5		6		7		8=7		9=5+8		10 = 9/4*100%		11
1	2	3	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K		
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80%**	**3,013,917,698**	**80%**	**1,933,087,931**	**80%**	**1,795,682,780**	**22%**	**388,335,973**	**64%**	**388,335,973**	**144%**	**2,321,423,904**	**180%**	**77%**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**27,500,000**	**100%**	**16,140,000**	**100%**	**15,677,100**	**-**	**-**	**18%**	**-**	**118%**	**16,140,000**	**118%**	**59%**	**Sekretariat**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7,500,000	2 Dokumen	1,670,000	2 Dokumen	1,482,100	-	-	-	-	2 Dokumen	**1,670,000**	150%	**22%**	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	1,670,000	1 Dokumen	1,470,000	-	-	-	-	1 Dokumen	**1,670,000**	100%	**67%**	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	1,670,000	2 Dokumen	1,470,000	-	-	-	-	1 Dokumen	**1,670,000**	100%	**67%**	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DokumenDPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	1,670,000	12 Dokumen	1,470,000	-	-	-	-	1 Dokumen	**1,670,000**	100%	**67%**	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	1,670,000	12 Dokumen	1,470,000	-	-	-	-	1 Dokumen	**1,670,000**	100%	**67%**	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,500,000	1 Laporan	1,670,000	2 Laporan	1,470,000	-	-	-	-	1 Laporan	**1,670,000**	100%	**67%**	Sekretariat
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	7,500,000	5 Laporan	6,120,000	4 Laporan	6,845,000	-	-	2 Laporan	-	7 Laporan	**6,120,000**	233%	**82%**	Sekretariat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**1,480,541,696**	**100%**	**1,621,250,291**	**100%**	**1,640,633,980**	**20%**	**332,782,973**	**63%**	**332,782,973**	**163%**	**1,954,033,264**	**163%**	**132%**	**Sekretariat**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ bulan	1,450,541,696	26 Orang/ bulan	1,526,924,495	26 Orang/ Bulan	1,558,231,116	3 Bulan	321,362,973	6 Bulan	321,362,973	26 Orang/ Bulan	**1,848,287,468**	100%	**127%**	Sekretariat
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	90,700,796	1 Dokumen	78,788,864	-	11,420,000	1 Dokumen	11,420,000	2 Dokumen	**102,120,796**	200%	**1021%**	Sekretariat
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	**-**	100%	**0%**	Sekretariat
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	**-**	100%	**0%**	Sekretariat
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,500,000	1 Laporan	1,955,000	1 Laporan	1,840,000	-	-	-	-	1 Laporan	**1,955,000**	100%	**78%**	Sekretariat
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	**-**	100%	**-**	Sekretariat

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	7,500,000	13 Laporan	1,670,000	4 Laporan	1,774,000	-	-	-	-	13 Laporan	**1,670,000**	100%	**22%**	Sekretariat
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	100%	-	Sekretariat
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**4,000,000**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**100%**	**-**	**100%**	**0%**	**Sekretariat**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	100%	**0%**	Sekretariat
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	100%	-	Sekretariat
	Koordinasi dan PenilaianBarang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	-	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	100%	-	Sekretariat
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	-	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	100%	-	Sekretariat
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2,000,000	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	-	100%	**0%**	Sekretariat
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	100%	**0%**	Sekretariat
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	100%	-	Sekretariat
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100%**	**2,400,000**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**100%**	**-**	**100%**	**0%**	**Sekretariat**
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	100%	-	Sekretariat
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	100%	-	Sekretariat
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	-	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	100%	-	Sekretariat
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	100%	-	Sekretariat
	Pengolahan Data Redistribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	-	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	100%	-	Sekretariat
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	100%	-	Sekretariat
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2,400,000	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	100%	**0%**	Sekretariat
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**85,000,000**	**100%**	**1,670,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**100%**	**1,670,000**	**100%**	**2%**	**Sekretariat**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0%**	Sekretariat
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	1,670,000	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	**1,670,000**	100%	**67%**	Sekretariat
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	Sekretariat
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0%**	Sekretariat
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	Sekretariat
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	Sekretariat
	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	1 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	Sekretariat
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0%**	Sekretariat
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	Sekretariat
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 Orang	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0%**	Sekretariat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**726,476,002**	**100%**	**136,873,640**	**100%**	**43,107,000**	**5%**	**1,995,000**	**58%**	**1,995,000**	**158%**	**138,868,640**	**158%**	**19%**	**Sekretariat**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000	1 Paket	310,000	1 Paket	-	-	-	-	-	1 Paket	**310,000**	100%	**31%**	Sekretariat
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75,000,000	1 Paket	1,490,840	-	-	-	-	-	-	1 Paket	**1,490,840**	100%	**2%**	Sekretariat
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2,500,000	1 Paket	-	1 Paket	300,000	-	-	-	-	2 Paket	**-**	200%	**0%**	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	**-**	100%	**-**	Sekretariat
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,147,800	1 Paket	1,995,000	1 Paket	1,995,000	1 Paket	1,995,000	2 Paket	**12,142,800**	200%	**121%**	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Paket	6,000,000	1 Dokumen	4,500,000	2 Dokumen	480,000	-	-	-	-	1 Dokumen	**4,500,000**	100%	**75%**	Sekretariat
	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	**-**	100%	**-**	Sekretariat
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	-	1 Laporan	-	-	-	-	-	1 Laporan	**-**	100%	**0%**	Sekretariat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	621,976,002	50 Laporan	120,425,000	50 Laporan	40,332,000	-	-	20 Laporan	22,710,000	70 Laporan	**143,135,000**	140%	**23%**	Sekretariat
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	**-**	100%	**-**	Sekretariat
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	**-**	100%	**-**	Sekretariat
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**525,000,000**	**100%**	**70,473,000**	**100%**	**8,280,000**	**100%**	**8,280,000**	**100%**	8,280,000	**200%**	**78,753,000**	**200%**	**15%**	**Sekretariat**

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	100%	-	Sekretariat
	pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan	3 Unit	100,000,000	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-	3 Unit	-	100%	**0%**	Sekretariat
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	100%	-	Sekretariat
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	100%	-	Sekretariat
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	75,000,000	15 Unit	48,375,000	-	-	-		-	-	1 Unit	**48,375,000**	20%	**65%**	Sekretariat
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	90,000,000	4 Unit	22,098,000	1 Unit	8,280,000	1 Unit	8,280,000	1 Unit	8,280,000	5 Unit	**30,378,000**	100%	**34%**	Sekretariat
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5,000,000	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	100%	**0%**	Sekretariat
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	200,000,000	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	100%	**0%**	Sekretariat
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	100%	-	Sekretariat
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50,000,000	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-	5 Unit	-	100%	**0%**	Sekretariat
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5,000,000	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	100%	**0%**	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**18,000,000**	**100%**	**24,931,000**	**100%**	**22,300,000**	**76%**	**17,000,000**	**89%**	**17,000,000**	**189%**	**41,931,000**	**189%**	**233%**	**Sekretariat**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	3 Laporan	19,131,000	1 Laporan	17,000,000	1 Laporan	17,000,000	1 Laporan	17,000,000	4 Laporan	**36,131,000**	400%	**723%**	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	-	-	1 Laporan	3,000,000	2 Laporan	**8,000,000**	200%	**160%**	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	100%	**0%**	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6,000,000	1 Laporan	800,000	1 Laporan	300,000	-	-	-	-	1 Laporan	**800,000**	100%	**13%**	Sekretariat
	Pemelihraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemelihraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**145,000,000**	**100%**	**61,750,000**	**100%**	**65,684,700**	**43%**	**28,278,000**	**85%**	**28,278,000**	**185%**	**90,028,000**	**185%**	**62%**	**Sekretariat**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	80,000,000	1 Unit	15,000,000	6 Unit	30,000,000	2 Unit	9,700,000	4 Unit	9,700,000	5 Unit	**24,700,000**	500%	**31%**	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	40,000,000	4 Unit	43,150,000	4 Unit	20,684,700	2 Unit	10,328,000	3 Unit	10,328,000	7 Unit	**53,478,000**	175%	**134%**	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	100%	-	Sekretariat

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	100%	-	Sekretariat
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	100%	-	Sekretariat
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Unit	5,000,000	10 Unit	3,600,000	20 Unit	15,000,000	8 Unit	8,250,000	18 Unit	8,250,000	28 Unit	**11,850,000**	280%	**237%**	Sekretariat
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	100%	-	Sekretariat
	Pemeliharaan aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	5,000,000	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	100%	**0%**	Sekretariat
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	100%	**0%**	Sekretariat
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	100%	**0%**	Sekretariat
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	100%	**0%**	Sekretariat
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan yang Pemeliharaan/ Rehabilitasi	1 Ha	-	1 Ha	-	-	-	-	-	-	-	1 Ha	-	100%	-	Sekretariat
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Jumlah Investor**	**100%**	**198,000,000**	**100%**	**73,500,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**73,500,000**	**100%**	**37%**	
	Penetapan Kebijakan Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	**Cakupan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota**	**100%**	**30,000,000**	**100%**	**54,575,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**54,575,000**	**100%**	**182%**	**Bidang Penanaman Modal, Promosi dan Pengembangan**
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	54,575,000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	**54,575,000**	100%	**546%**	Bidang Penanaman Modal, Promosi dan Pengembangan
	Evaluasi dan Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif atau Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di daerah	1 Kegiatan Usaha	20,000,000	1 Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	**0%**	Bidang Penanaman Modal, Promosi dan Pengembangan
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Cakupan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**100%**	**168,000,000**	**100%**	**18,925,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**18,925,000**	**100%**	**11%**	**Bidang Penanaman Modal, Promosi dan Pengembangan**
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	100%	**0%**	Bidang Penanaman Modal, Promosi dan Pengembangan
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	158,000,000	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	100%	**0%**	Bidang Penanaman Modal, Promosi dan Pengembangan
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	1 Dokumen	18,925,000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	**18,925,000**	0%	-	Bidang Penanaman Modal, Promosi dan Pengembangan

	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Persentase Potensi Investasi yang siap ditawarkan**	**100%**	**181,764,000**	**100%**	**-**	**100%**	**9,700,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**0%**	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**181,764,000**	**100%**	**-**	**100%**	**9,700,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**0%**	**Bidang Penanaman Modal, Promosi dan Pengembangan**
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	21,764,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	9,700,000	-	-	-	-	1 Dokumen	-	100%	**0%**	Bidang Penanaman Modal, Promosi dan Pengembangan
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	160,000,000	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	100%	**0%**	Bidang Penanaman Modal, Promosi dan Pengembangan
III	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelayanan Perizinan Melalui OSS**	**100%**	**240,025,500**	**100%**	**17,600,000**	**100%**	**12,100,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**17,600,000**	**100%**	**7%**	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**240,025,500**	**100%**	**17,600,000**	**100%**	**12,100,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**17,600,000**	**100%**	**7%**	**Bidang Perizinan dan Non Perizinan**
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	75,000,000	200 Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-	200 Pelaku Usaha	-	100%	**0%**	Bidang Perizinan dan Non Perizinan
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	120 Kegiatan Usaha	112,500,000	120 Kegiatan Usaha	7,300,000	-	-	-	-	-	-	120 Kegiatan Usaha	**7,300,000**	100%	**6%**	Bidang Perizinan dan Non Perizinan
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12 Kegiatan Usaha	27,820,500	2 Pelaku Usa	5,150,000	-	-	-	-	-	-	12 Orang	**5,150,000**	100%	**19%**	Bidang Perizinan dan Non Perizinan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1 Pelaku Usaha	24,705,000	1 Dokumen	5,150,000	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan Usaha	**5,150,000**	100%	**21%**	Bidang Perizinan dan Non Perizinan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkrinisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1 Dokumen	2,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Perizinan dan Non Perizinan
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	-	50 Pelaku Usaha	4,150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Perizinan dan Non Perizinan

	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	-	-	-	-	30 Kegiatan Usaha	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Perizinan dan Non Perizinan
IV	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Tindaklanjut Hasil Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**100%**	**541,270,450**	**100%**	**403,103,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**403,103,000**	**100%**	**74%**	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**541,270,450**	**100%**	**403,103,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**403,103,000**	**100%**	**74%**	**Bidang Pengendalian, Publikasi dan Pengaduan Masyarakat**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha	141,000,000	100 Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	100 Kegiatan Usaha	-	100%	**0%**	Bidang Pengendalian, Publikasi dan Pengaduan Masyarakat
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 Pelaku Usaha	151,064,045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 Pelaku Usaha	-	100%	**0%**	Bidang Pengendalian, Publikasi dan Pengaduan Masyarakat
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	120 Kegiatan	249,206,405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 Kegiatan	-	100%	**0%**	Bidang Pengendalian, Publikasi dan Pengaduan Masyarakat
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	-	60 Kegiatan Usaha	60,465,000	-	-	-	-	-	-	-	60 Kegiatan Usaha	**60,465,000**	-	**-**	Bidang Pengendalian, Publikasi dan Pengaduan Masyarakat
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	-	-	154 Pelaku Usaha	221,708,000	-	-	-	-	-	-	-	154 Pelaku Usaha	**221,708,000**	-	**-**	Bidang Pengendalian, Publikasi dan Pengaduan Masyarakat
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	-	100 Kegiatan Usaha	120,930,000	-	-	-	-	-	-	-	100 Kegiatan Usaha	**120,930,000**	-	**-**	Bidang Pengendalian, Publikasi dan Pengaduan Masyarakat
V	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan**	**100%**	**34,699,170**	**100%**	**5,150,000**	**100%**	**3,430,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**5,150,000**	**100%**	**15%**	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**34,699,170**	**100%**	**5,150,000**	**100%**	**3,430,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**5,150,000**	**100%**	**15%**	**Bidang Perizinan dan Non Perizinan**
	Prengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Teintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	34,699,170	1 Dokumen	5,150,000	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	**5,150,000**	100%	**15%**	Bidang Perizinan dan Non Perizinan

	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Teintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	-	-	-	-	1 Dokumen	3,430,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Perizinan dan Non Perizinan
	Total		**97%**	**4,209,676,818**	**97%**	**2,432,440,931**	**95%**	**1,820,912,780**	**21%**	**388,335,973**	**60%**	**388,335,973**	**157%**	**2,820,776,904**	**162%**	**67%**	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 S/D 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (total)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024(akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I								
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9=5+8		10 = 9/4*100%		11
			K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUTON**	**Persentase Jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah yang memenuhi standar penulisan, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi Baik, Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun, Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**100%**	**3,341,117,865**	**52%**	**1,720,762,024**	**49%**	**1,622,316,467**	**27%**	**438,013,922**	**27%**	**438,013,922**	**65%**	**2,158,775,946**	**65**	**64.61**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunya Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**31,400,000**	**25%**	**7,773,000**	**28%**	**8,813,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**25%**	**7,773,000**		**24.75**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	4,600,000	4	300,000	4	1,387,000			0	-	4	300,000		**6.52**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16	4,500,000	4	300,000	4	1,213,000			0	-	4	300,000		**6.67**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16	4,550,000	4	2,904,000	4	1,287,000			0	-	4	2,904,000		**63.82**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	60	4,550,000	15	1,050,000	15	1,213,000			0	-	15	1,050,000		**23.08**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	60	4,500,000	15	2,619,000	15	1,287,000			0	-	15	2,619,000		**58.20**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Penyelesaian ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	4,350,000	4	300,000	4	1,213,000			0	-	4	300,000		**6.90**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Evaluasi Kinrja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	4,350,000	4	300,000	4	1,213,000			0	-	4	300,000		**6.90**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Dokumen Administrasi Keuangan**	**100%**	**1,676,050,000**	**75%**	**1,263,333,259**	**75%**	**1,259,030,467**	**28%**	**354,200,805**	**28%**	**354,200,805**	**66%**	**1,617,534,064**	**66**	**96.51**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	1,550,000,000	22	1,213,593,259	22	1,218,343,467	22	352,250,805	22	352,250,805	0	**1,565,844,064**	-	**101.02**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	5,650,000							0	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	107,500,000	3	48,990,000	3	36,900,000	1	1,950,000	1	1,950,000	**4**	**50,940,000**	**33**	**47.39**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 S/D 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (total)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024(akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	4,350,000	1	375,000	1	2,574,000			0	-	**1**	**375,000**	**25**	**8.62**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	4,300,000	1	375,000	1	1,213,000			0	-	**1**	**375,000**	**33**	**8.72**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3	4,250,000							0	-	-	-	-	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi**	**100**	**115,595,000**	**0%**	**-**	**15%**	**17,000,000**	**-**	**-**	**0%**	**-**	-	-		-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	7,500,000							0	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12	63,275,000			3	17,000,000			0	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	4,120,000							0	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	18	4,200,000							0	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	12,500,000							0	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	24,000,000							0	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Umum**	**100**	**483,820,000**	**39%**	**188,275,250**	**6%**	**28,373,780**	**70%**	**19,899,450**	**70%**	**19,899,450**	**1**	**208,174,700**	**1**	**43.03**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	2,400,000							0	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	22,000,000	3	12,292,000	4	1,471,780	1	19,450	1	19,450	**4**	**12,311,450**	**33**	**55.96**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	5,320,000							0	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	10,400,000	1	8,304,850					0	-	**1**	**8,304,850**	**17**	**79.85**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	70,300,000	1	3,200,000	3	3,200,000			0	-	**1**	**3,200,000**	**33**	**4.55**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12,200,000	3	14,180,000	4	3,822,000			0	-	**3**	**14,180,000**	**25**	**116.23**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37	342,000,000	9	136,298,400	4	19,880,000	4	19,880,000	4	19,880,000	**13**	**156,178,400**	**35**	**45.67**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48	19,200,000	12	14,000,000					0	-	**12**	**14,000,000**	**25**	**72.92**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Bidang dalam OPD yang di layani administrasi perkantoranya**	**100**	**502,902,865**	**0%**	**-**	**2%**	**12,399,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-			0				0	-		-		**#VALUE!**	

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 S/D 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 I		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (total)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024(akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	386,677,865			0				0	-	-	-	#DIV/0!	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang di sediakan	2	16,000,000			1				0	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	100,225,000			1	12,399,000				-	-	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantoranya**	**100**	**212,050,000**	**47%**	**99,345,600**	**29%**	**62,520,220**	**31%**	**19,300,000**	**31%**	**19,300,000**	**1**	**118,645,600**	**1**	**55.95**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250	6,550,000	63	7,926,000	62	2,930,000			0	-	**63**	**7,926,000**	**25**	**121.01**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	17,300,000	3	6,547,600	3	11,012,000			**0**	-	**3**	**6,547,600**	**25**	**37.85**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan Jaasa dan perlatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	8,200,000								-	-	-	-	-	
	Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan jasa pelayanan umum kantor	26	180,000,000	7	84,872,000	6	48,578,220	2	19,300,000	**2**	**19,300,000**	**9**	**104,172,000**	**35**	**57.87**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Bidang dalam OPD Yang layak administrasi perkantoranya**	**100**	**319,300,000**	**51%**	**162,034,915**	**73%**	**234,180,000**	**19%**	**44,613,667**	**19%**	**44,613,667**	**1**	**206,648,582**	**1**	**64.72**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpelihara	40	267,000,000	10	158,034,915	10	181,780,000	3	44,613,667	3	44,613,667	**13**	**202,648,582**	**33**	**75.90**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	16	7,300,000	4	4,000,000	4	2,400,000			0	-	**4**	**4,000,000**	**25**	**54.79**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor yang terpelihara	5	45,000,000				50,000,000			0	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**100%**	**734,220,208**	**14%**	**105,830,000**	**25%**	**242,971,000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**105,830,000**	**14**	**14.41**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Pelopor**	**100%**	**557,000,000**	**19%**	**105,830,000**	**25%**	**242,971,000**	**0**	**-**	**0%**	**-**	**0**	**105,830,000**	**19**	**19.00**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	58	100,000,000							0	-	-	-	-	-	
	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	8	125,000,000							0	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	34	132,000,000	8	105,830,000	8	167,599,600			0	-	**8**	**105,830,000**	**24**	**80.17**	
	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	10	50,000,000							0	-	-	-	-	-	

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 S/D 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (total)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024(akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I								
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	37	100,000,000			10	75,371,400			0	-	-	-	-	-	
	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	30	50,000,000							0	-	-	-	-	-	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersenggaranya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan**	**100**	**177,220,208**	**0**	-		-	**0**	-	**0%**	-	-	-	-	-	
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	65	151,220,208							0	-	-	-	-	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	65	26,000,000							0	-	-	-	-	-	
III	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**CAKUPAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**100%**	**17,072,695,143**	**8%**	**1,339,602,240**	**21%**	**3,594,696,000**	**0%**	-	**0%**	-	**0**	**1,339,602,240**	**8**	**7.85**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Derah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan**	**100%**	**8,616,095,143**	**12%**	**1,067,077,240**	**29%**	**2,471,002,000**	**0**	-	**0%**	-	**0**	**1,067,077,240**	**12**	**12.38**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	1	125,000,000							0	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1	8,268,095,143	1	1,067,077,240	1	2,471,002,000			0	-	1	**1,067,077,240**	100	**12.91**	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1	223,000,000							0	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah**	**100%**	**1,119,000,000**	**100%**	**229,525,000**	**45%**	**497,995,000**	**0%**	-	**0%**	-	**1**	**229,525,000**	**100**	**20.51**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	512,000,000	1	229,525,000	1	497,995,000			0	-	1	**229,525,000**	100	**44.83**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kab Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	7	287,000,000							0	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 S/D 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (total)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024(akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I								
	Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	4	320,000,000							0	-	-	-	-	-	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Terlaksananya Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah**	**100**	**6,368,600,000**		**-**	**9%**	**568,499,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleks	50	37,600,000							0	-	-	-	-	-	
	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	30	250,000,000			8	32,000,000	30		30	-	**30**	**-**	**100**	**-**	
	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	56	5,156,000,000							0	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	42	675,000,000			10	78,094,000	42		42	-	**42**	**-**	**100**	**-**	
	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	12	250,000,000			3	458,405,000	12		12	-	**12**	**-**	**100**	**-**	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan pengembangan Olahraga**	**100%**	**969,000,000**	**100%**	**43,000,000**	**6%**	**57,200,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**1**	**43,000,000**	**100**	**4.44**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	45	87,000,000	12	43,000,000	11	57,200,000			0	-	**12**	**43,000,000**	**27**	**49.43**	
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	3	500,000,000							0	-	-	-	-	-	
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2	65,000,000							0	-	-	-	-	-	
	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	12	90,000,000							0	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2	227,000,000							0	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
IV	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Jumlah Organisasi pemuda**	**100%**	**219,537,450**	**100%**	**13,759,000**	**25%**	**120,830,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**1**	**13,759,000**	**100**	**6.27**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		**100%**	**219,537,450**	**100%**	**13,759,000**	**25%**	**120,830,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**		**13,759,000**		**6.27**	
	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	50	100,000,000							0	-	-	-		-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1	60,950,600	1	13,759,000					0	-	**1**	**13,759,000**	**100**	**22.57**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 S/D 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (total)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024(akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I								
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	50	17,586,850							0	-	-	-		-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	50	41,000,000			12	120,830,000			0	-	-	-		-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				21,367,570,666	**100%**	**3,179,953,264**	**25%**	**5,580,813,467**	**8%**	**438,013,922**		**438,013,922**	**1**	**3,617,967,186**		**16.93**	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9=5+8		10 = 9/4*100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**2,194,164,967**	**100%**	**1,457,117,861**	**100%**	**1,321,834,500**		**397,061,735**	**100%**	**397,061,735**		**1,854,179,596**		**84.51**	**Dinas Kebudayaan**
	Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah]**	**100%**	**65,000,000**	**100%**	**54,714,000**	**100%**	**35,388,802**		**-**	**100%**	**-**		**54,714,000**		**84.18**	**Dinas Kebudayaan**
	Penyusunan dok Perencanaan Perankat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	9,000,000	5 dok	8,955,000	5 dokumen	5,305,800		-	5 dok	-		**8,955,000**		99.50	Dinas Kebudayaan
	Koordinasi dan Penyusunan dok RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dok	8,000,000	8 dok	8,290,000	8 dokumen	4,837,800		-	8 dok	-		**8,290,000**		103.63	Dinas Kebudayaan
	Koordinasi dan Penyusunan dok perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dok	8,000,000	8 dok	7,890,000	8 dokumen	4,521,800		-	8 dok	-		**7,890,000**		98.63	Dinas Kebudayaan
	Koordinasi dan Penyusunan dok DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	18 Dok	8,000,000	8 dok	8,240,000	8 dokumen	4,567,800		-	8 dok	-		**8,240,000**		103.00	Dinas Kebudayaan
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	18 Dok	8,000,000	8 dok	8,859,000	8 dokumen	4,834,800		-	8 dok	-		**8,859,000**		110.74	Dinas Kebudayaan
	Koordinasi dan penyusunan lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaina Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 lap	8,000,000	8 lap	3,040,000	8 laporan	4,785,800		-	8 lap	-		**3,040,000**		38.00	Dinas Kebudayaan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerha	5 lap	16,000,000	5 lap	9,440,000	5 laporan	6,535,002		-	5 lap	-		**9,440,000**		59.00	Dinas Kebudayaan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**1,420,664,967**	**100%**	**1,048,870,817**	**100%**	**1,039,016,698**		**323,448,935**	**97%**	**323,448,935**		**1,372,319,752**		**96.60**	**Dinas Kebudayaan**
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang	1,354,664,967	14 Orang/ bulan	987,290,817	16 orang /bulan	992,319,898		323,448,935	14 Orang/bulan	323,448,935		**1,310,739,752**		96.76	Dinas Kebudayaan
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dok	40,000,000	7 dok	48,540,000	7 dokumen	33,640,000		-	7 dok	-		**48,540,000**		121.35	Dinas Kebudayaan
	Koordinasi dan Penyusunan lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	13,000,000		-		4,488,400		-	1 Lap	-		**-**		0.00	Dinas Kebudayaan
	Koordinasi dan Penyusunan pelap keuangan Bulanan Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SKPD	2 lap	13,000,000	3 lap	13,040,000	3 laporan	8,568,400		-	3 Lap	-		**13,040,000**		100.31	Dinas Kebudayaan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**132,000,000**	**100%**	**3,045,600**	**100%**	**11,650,000**		**9,925,000**	**67%**	**9,925,000**		**12,970,600**		**9.83**	**Dinas Kebudayaan**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	90,000,000	1 Paket	-					1 paket	-		-		0.00	Dinas Kebudayaan
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	12,000,000	1 dok	3,045,600	2 dokumen	11,650,000		9,925,000	1 dok	9,925,000		**12,970,600**		108.09	Dinas Kebudayaan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	30,000,000		**0**				-		**-**		**-**		0.00	Dinas Kebudayaan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**440,500,000**	**100%**	**258,746,444**	**100%**	**181,279,000**		**53,695,800**	**100%**	**53,695,800**		**312,442,244**		**70.93**	**Dinas Kebudayaan**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang di adakan	1 Paket	4,000,000	1 paket	2,557,000	1 paket	2,000,000		-	1 paket	-		**2,557,000**		63.93	Dinas Kebudayaan
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 paket	50,000,000		-		20,249,000		-	1 paket	-		**-**		0.00	Dinas Kebudayaan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	5,000,000	1 Paket	10,980,000	1 paket	2,000,000		2,000,000	1 Paket	2,000,000		**12,980,000**		259.60	Dinas Kebudayaan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 dok	1,500,000		-	5 dokumen	1,500,000		-	1 Paket	-		**-**		0.00	Dinas Kebudayaan
	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lap	380,000,000	2 lap	245,209,444	1 laporan	155,530,000		51,695,800	2 lap	51,695,800		**296,905,244**		78.13	Dinas Kebudayaan
	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Darah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**70,000,000**	**100%**	**-**		**-**		**-**	**100%**	**-**		**-**		**0.00**	**Dinas Kebudayaan**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	60,000,000		**-**				-		**-**		**-**		0.00	Dinas Kebudayaan
	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	4 Unit	10,000,000		0				-		**-**		**-**		0.00	Dinas Kebudayaan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		0					4 unit	-		**-**			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**15,000,000**	**100%**	**17,841,000**	**100%**	**3,500,000**		**1,992,000**	**100%**	**1,992,000**		**19,833,000**		**132.22**	**Dinas Kebudayaan**
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Cakupan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 lap	5,000,000	2 lap	9,000,000	3 laporan	2,500,000		1,992,000	2 lap	1,992,000		**10,992,000**		219.84	Dinas Kebudayaan
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 lap	10,000,000	1 Lap	8,841,000	12 laporan	1,000,000		-	1 Lap	-		**8,841,000**		88.41	Dinas Kebudayaan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**51,000,000**	**100%**	**73,900,000**	**100%**	**51,000,000**		**8,000,000**	**100%**	**8,000,000**		**81,900,000**		**160.59**	**Dinas Kebudayaan**
	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	6,000,000		-	11 unit	6,000,000		-	11 unit	-		**-**		0.00	Dinas Kebudayaan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	45,000,000	12 unit	73,900,000	12 unit	45,000,000		8,000,000	12 unit	8,000,000		**81,900,000**		182.00	Dinas Kebudayaan
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan**	**62.65**	**1,801,175,750**	**100%**	**2,292,146,000**		**1,385,000,000**		**-**	**18%**	**-**		**2,292,146,000**		**127.26**	**Dinas Kebudayaan**
		Persentase Sarana Adat (Baruga/Galampa) yang Telah Terbangun	**40**			**-**								**-**			
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**1,248,000,000**	**100%**	**2,292,146,000**	**100%**	**1,285,000,000**		**-**	**18%**	**-**		**2,292,146,000**		**183.67**	**Dinas Kebudayaan**
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan,	30 objek	1,200,000,000	5 Objek	2,292,146,000	1 objek	1,285,000,000		-	5 objek	-		**2,292,146,000**		191.01	Dinas Kebudayaan
	Pembinaan Sumberdaya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	15 Orang	48,000,000		0				-		-		-		0.00	Dinas Kebudayaan
	Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**216,925,750**	**100%**	**0**		**100,000,000**		**0**		**-**		**-**		**0.00**	**Dinas Kebudayaan**
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan tardisi budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	33 Objek	100,000,000	0	0		100,000,000		-		-		-		0.00	Dinas Kebudayaan
	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	5 lap	23,925,750		0				-		-		-		0.00	Dinas Kebudayaan
	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10 Lembaga	93,000,000		0				-		-		-		0.00	Dinas Kebudayaan
	Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	**Cakupan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**336,250,000**	**100%**	**0**	**100%**	**0**		**0**		**-**		**-**		**0.00**	**Dinas Kebudayaan**
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan lembaga adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	36 Objek	36,250,000		0	0 objek	-		-		-		-		0.00	Dinas Kebudayaan
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	15 Orang	40,000,000		0				-		-		-		0.00	Dinas Kebudayaan
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	5 Unit	260,000,000		0				-		-		-		0.00	Dinas Kebudayaan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
III	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Cakupan pelestarian kesenian tradisional**	**100%**	**252,416,497**	**100%**	**0**	**100%**	**0**		**0**		**-**		**-**		**0.00**	**Dinas Kebudayaan**
	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	**Cakupan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Kota**	**100%**	**252,416,497**	**100%**	**0**	**100%**	**0**		**0**		**-**		**-**		**0.00**	**Dinas Kebudayaan**
	Peningkatan pendidikan dan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	85 orang	80,000,000		-	0 orang	-		-		-		-		0.00	Dinas Kebudayaan
	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tardisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	150 sertifika	80,000,000	0	-				-		-		-			Dinas Kebudayaan
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 lembaga	92,416,497		-						-		-			Dinas Kebudayaan
IV	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal**	**100%**	**180,117,575**	**100%**	**0**				**0**		**-**		**-**		0.00	Dinas Kebudayaan
	Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	**Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**180,117,575**	**100%**	**0**				**-**		**-**		**-**		**0.00**	**Dinas Kebudayaan**
	Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	25 Orang	50,000,000		-				-		-		-		0.00	Dinas Kebudayaan
	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit	40,000,000	0	-				-		-		-		0.00	Dinas Kebudayaan
	Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	10 dok	90,117,575		-				-		-		-		0.00	Dinas Kebudayaan
V	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Cakupan Cagar Budaya yang dilestarikan dan yang dikelola**	**100%**	**365,341,762**	**100%**	**506,006,000**	**30%**	**81,945,600**		**16,400,000**	**4%**	**16,400,000**		**522,406,000**		**142.99**	**Dinas Kebudayaan**
	Penetapan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**100%**	**110,000,000**	**100%**	**7,500,000**	**100%**	**81,945,600**		**16,400,000**		**16,400,000**		**23,900,000**		**21.73**	**Dinas Kebudayaan**
	Pendaftaran obyek diduga cagar budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	107 Obyek	30,000,000		**7,500,000**	10 objek	81,945,600		16,400,000		**16,400,000**		**23,900,000**		79.67	Dinas Kebudayaan
	Penetapan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	37 Obyek	80,000,000		-				-		-		-		0.00	Dinas Kebudayaan
	Pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**100%**	**215,341,762**	**100%**	**498,506,000**	**100%**	**-**		**-**	**4%**	**-**		**498,506,000**		**231.50**	**Dinas Kebudayaan**
	Perlindungan Cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	33 Objek	78,000,000	1 objek	498,506,000	1 objek	-		-	1 objek	-		**498,506,000**		639.11	Dinas Kebudayaan
	Pengembagan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	33 Objek	78,000,000		-				-		-		-		0.00	Dinas Kebudayaan
	Pemanfaatan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	33 Objek	59,341,762		-				-		-		-		0.00	Dinas Kebudayaan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penertiban izin membawa cagar budaya keluar daerah Kab/Kota dalam satu daerah Kab/Kota	**Cakupan Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**40,000,000**	**100%**	-				-		-		-		**0.00**	**Dinas Kebudayaan**
	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	5 Objek	20,000,000		-				-		-		-			Dinas Kebudayaan
	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	5 lap	20,000,000		-				-		-		-		0.00	Dinas Kebudayaan
VI	**Program Pengelolaan Pemuseuman**	**Cakupan Pengelolaan Museum**	**100%**	**0**	**100%**	**0**				**0**		-		-		**#DIV/0!**	**Dinas Kebudayaan**
	Pengelolaan Museum Kab/Kota	**Cakupan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**100%**	**0**	**100%**	**0**				**0**		-		-		**#DIV/0!**	**Dinas Kebudayaan**
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu		Rp0		-				-		-		-		#DIV/0!	Dinas Kebudayaan
	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya		Rp0		-				-		-		-			Dinas Kebudayaan
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		Rp0		-				-		-		-			Dinas Kebudayaan
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara		Rp0		-				-		-		-			Dinas Kebudayaan
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi		Rp0		-				-		-		-			Dinas Kebudayaan
	Jumlah			**4,793,216,551**		**4,255,269,861**		**2,788,780,100**		**413,461,735**		**413,461,735**		**4,668,731,596**		97.40	Dinas Kebudayaan

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

NO	Nomenkulatur Urusan Kabupaten/Kota	Indikator	Target Renstra Perangkat Daearah pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9=5+8		10 = 9/4*100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**Program Penunjang Urusan**	**Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**2,043,942,603**	**100**	**1,486,742,587**	**100**	**1,373,618,775**	**19.17**	**263,294,845**	**19.17**	**263,294,845**	**119**	**1,750,037,432**	**119.2%**	**85.6%**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**36,300,000**	**100**	**21,401,600**	**100**	**33,543,500**	**28.6**	**9,578,000**	**28.6**	**9,578,000**	**129**	**30,979,600**	**128.6%**	**85%**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4,500,000	2	2,800,000	2	6,577,500	0	-	0	-	2	2,800,000	106.6%	62%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15	4,500,000	15	2,800,900	15	3,740,500	0	-	0	-	15	2,800,900	100.0%	62%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15	4,500,000	0	-	15	3,740,500	0	-	0	-	0	-	0.0%	0%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15	4,500,000	15	3,000,400	15	4,000,000	13	3,354,000	13	3,354,000	28	6,354,400	183.9%	141%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15	4,500,000	15	3,000,000	15	4,000,000	0	-	0	-	15	3,000,000	100.0%	67%	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	4,500,000	2	3,300,200	2	4,054,000	2	3,224,000	2	3,224,000	4	6,524,200	179.5%	145%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	9,300,000	1	6,500,100	2	7,431,000	1	3,000,000	1	3,000,000	2	9,500,100	86.5%	102%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**1,329,336,236**	**100**	**1,182,811,457**	**100**	**1,166,960,418**	**20.7**	**241,366,802**	**20.7**	**241,366,802**	**120.68**	**1,424,178,259**	**120.7%**	**107.1%**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 12 bulan	12	1,236,691,236	16	1,107,770,757	16	1,094,711,418	3	230,026,802	3	230,026,802	19	1,337,797,559	161.4%	108%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terbayarkan	8	33,600,000	8	33,600,000	8	30,800,000	1.5	5,600,000	1	5,600,000	9	39,200,000	118.2%	117%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD yang terbayarkan	7	50,045,000	10	34,440,000	10	34,440,000	1.7	5,740,000	2	5,740,000	12	40,180,000	166.7%	80%	

NO	Nomenkulatur Urusan Kabupaten/Kota	Indikator	Target Renstra Perangkat Daearah pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	4,500,000	2	3,500,350	2	3,504,500	0	-	0	-	2	3,500,350	100.0%	78%	
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	4,500,000	2	3,500,350	2	3,504,500	0	-	0	-	2	3,500,350	100.0%	77.8%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**33,000,000**	**100**	**3,500,350**	**100**	**3,413,500**	**0.0**	**-**	**0.0**	**-**	**100**	**3,500,350**	**100.0%**	**10.6%**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	4,500,000	2	3,500,350	2	3,413,500	0	-	0	-	2	3,500,350	100.0%	78%	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38	28,500,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**291,000,000**	**100**	**163,075,919**	**100**	**92,839,150**	**0.3**	**242,997**	**0.3**	**242,997**	**100.26**	**163,318,916**	**100.3%**	**56.1%**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan lampu yang diadakan	12	5,000,000	2	361,000	2	1,022,000	0	-	0	-	2	361,000	16.7%	7%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	12	80,000,000	12	13,427,000	12	29,305,000	0	217,000	0	217,000	12	13,644,000	100.7%	17%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	6,000,000	12	2,103,893	12	2,622,150	0	25,997	0	25,997	12	2,129,890	101.0%	35%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	12	200,000,000	2	147,184,026	2	59,890,000	0.0	-	0	-	2	147,184,026	16.7%	74%	

NO	Nomenkulatur Urusan Kabupaten/Kota	Indikator	Target Renstra Perangkat Daearah pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**175,839,367**	**0.0**	**-**	**0.0**	**-**	**0.0**	**-**	**0.0**	**-**	**0.0**	**-**	**0.0%**	**0%**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnyar yang diadakan	1	175,839,367	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**85,500,000**	**100**	**28,630,928**	**100**	**36,789,157**	**15.3**	**5,642,046**	**15.3**	**5,642,046**	**115.34**	**34,272,974**	**115%**	**40%**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim (Surat)	12	2,000,000	100	1,200,000	100	1,235,000	0	-	0	-	100	1,200,000	833%	60%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa wifi, tv kabel, air dan listrik	36	79,500,000	35	25,583,268	36	32,112,000	6	5,642,046	6	5,642,046	41	31,225,314	115%	39%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah barang peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	4	2,000,000	2	750,000	2	2,934,000	0	-	0	-	2	750,000	50%	38%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan bahan dan peralatan kebersihan	4	2,000,000	2	1,097,660	2	508,157	0.0	-	0	-	2	1,097,660	50%	55%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**92,967,000**	**100**	**87,322,333**	**100**	**40,073,050**	**16.1**	**6,465,000**	**16.1**	**6,465,000**	**116.13**	**93,787,333**	**116.1%**	**100.9%**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	33,957,000	1	36,885,000	1	40,073,050	0.16	6,465,000	0.16	6,465,000	1	43,350,000	116.1%	127.7%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5	59,010,000	5	50,437,333	0	-	0	-	0	-	5	50,437,333	100.0%	85.5%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin / Berkala	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	

NO	Nomenkulatur Urusan Kabupaten/Kota	Indikator	Target Renstra Perangkat Daearah pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin / Berkala	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin / Berkala	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	
	BIDANG KEARSIPAN																
II	**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip baku (%)**	**100**	**74,376,280**	**100**	**99,129,800**	**100**	**46,189,300**	**8.66**	**4,000,000**	**8.66**	**4,000,000**	**109**	**103,129,800**	**109%**	**139%**	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota**	**100**	**41,000,000**	**100**	**42,519,800**	**100**	**35,689,300**	11	**4,000,000**	**11**	**4,000,000**	**111**	**46,519,800**	**111%**	**113%**	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan Digunakan	300	35,000,000	150	23,836,800	250	23,036,800	43	4,000,000	43	4,000,000	193	27,836,800	64%	80%	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	200	6,000,000	100	18,683,000	150	12,652,500	0	-	0	-	100	18,683,000	50%	311%	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**15,000,000**	**100**	**56,610,000**	**0.08**	**10,500,000**	**0**	**-**	**0.0**	**-**	**100**	**56,610,000**	**57%**	**377%**	**Kabid Pengelolaan Arsip**
	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	150	10,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	Kabid Pengelolaan Arsip
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	175	5,000,000	100	56,610,000	100	10,500,000	0	-	0	-	100	56,610,000	57%	1132%	Kabid Pengelolaan Arsip
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**100**	**18,376,280**	**0.0**	**-**	**0.0**	**-**	**0.0**	**-**	**0.0**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab./Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab./Kota Melalui JIKN	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	
	Pemberdayaan kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab./Kota	Jumlah Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan yang diberdayakan kapasitasnya	1	18,376,280	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	
III	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Jumlah dokumen/arsip daerah yang lestari dan terselamatkan (dokumen)**	**100**	**14,641,000**	**0.00**	**-**	**100**	**3,036,000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0.0%**	**0%**	
	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kab./Kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	**Cakupan Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kab./Kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun**	**100**	**11,641,000**	**0.00**	**-**	**100**	**-**	**0**	**-**	**0.0**	**-**	**0**	**-**	**0.0%**	**0.00%**	

NO	Nomenkulatur Urusan Kabupaten/Kota	Indikator	Target Renstra Perangkat Daearah pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip Yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepeluh) tahun	100	3,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan	50	8,641,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	
	Perlindungan dan Penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kab./Kota	**Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kab./Kota**	**0.0**	**-**	**0.0**	**-**	**0.0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**0.00%**	
	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dievakuasi dan di identifikasi akibat bencana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	
	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dipulihkan dan disimpan akibat bencana	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kab./Kota Yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kec. Dan Desa/Kelurahan	**Cakupan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kab./Kota Yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kec. Dan Desa/Kelurahan**	**100**	**3,000,000**	**0.0**	**-**	**100**	**3,036,000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**0.00%**	
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kab./Kota	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah Kab./Kota	50	3,000,000	0	-	50	3,036,000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kab./Kota	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat daerah Kab./Kota	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	
	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah arsip yang mendapatkan pendampingan dan penyelamatan bagi pemekaran Daerah Kecamatan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	
	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah arsip yang mendapatkan pendampingan dan penyelamatan bagi pemekaran Desa/Kelurahan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	

NO	Nomenkulatur Urusan Kabupaten/Kota	Indikator	Target Renstra Perangkat Daearah pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pencarian Arsip Statis Kab./Kota Yang Dinyatakan Hilang	**Cakupan Pencarian Arsip Statis Kab./Kota Yang Dinyatakan Hilang**	**0.0**	**-**	**0.0**	**-**	**0.0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**0.00%**	**Kabid Pengelolaan Arsip, Kabid Pembinaan dan Pengawasan Arsip**
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Yang Dinyatakan Hilang	Jumlah arsip statis yang dinilai dan ditetapkan autentisitas yang dinyatakan hilang	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	
	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media Yang Dinyatakan Hilang	Jumlah arsip statis yang dievaluasi dan ditetapkan hasil alih media yang dinyatakan hilang	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	
	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah daftar pencarian arsip (DPA) yang dilakukan penetapan dan pengumuman	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0.0%	0.0%	
IV	**Program Perizinan Penggunaan Arsip**	**Persentase SKPD yang telah menerapkan arsip baku (%)**	**100**	**80,717,404**	**0.0**	**-**	**0.0**	**-**	**0**	**-**	**0.0**	**-**	**0**	**-**	**0%**	**0%**	
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	**Cakupan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**100**	**80,717,404**	**0.0**	**-**	**0.0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	
	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah arsip yang tersusun dan ditetapkan SOP yang bersifat tertutup	175	50,717,404	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah daftar arsip yang disediakan dan penetapan izin yang bersifat tertutup	200	30,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	
	BIDANG PERPUSTAKAAN																
V	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun**	**100**	**807,174,036**	**25%**	**113,301,550**	**25%**	**1,380,703,950**	**0.69%**	**38,208,208**	**0.69%**	**38,208,208**	**26%**	**151,509,758**	**0.0%**	**18.8%**	
	Pengelolan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	**Cakupan Pengelolan Perpustakaan Tingkat Daerah**	**100**	**393,674,036**	**10%**	**69,626,000**	**10%**	**740,194,000**	**0.19%**	**13,695,000**	**0.19%**	**13,695,000**	**10%**	**83,321,000**	**0.0%**	**21%**	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara	1	37,000,000	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.00%	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab./Kota	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab./Kota	2	35,000,000	0	-	2	364,594,000	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.00%	
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kab./Kota	Jumlah kekhasan koleksi Perpustakaan Umum Daerah yang Diadakan	1	36,674,036	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.00%	
	Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kab./Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kab./Kota yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan	4	50,000,000	2	28,426,000	2	116,000,000	0.1809483	10,495,000	0.2	10,495,000	2	38,921,000	53.1%	77.84%	

NO	Nomenkulatur Urusan Kabupaten/Kota	Indikator	Target Renstra Perangkat Daearah pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kab./Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus Tingkat Kab./Kota yang dibina	20	50,000,000	0	-	0	0	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.00%	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab./Kota	Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan (keg)	100	50,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.00%	
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0.00%	
	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah yang Diadakan	1	55,000,000	1	10,000,000	0	-	0	-	0	-	1	10,000,000	100%	18%	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang dikelola dan dikembangkan	20,000	70,000,000	15,000	31,200,000	15,000	259,600,000	185	3,200,000	185	3,200,000	15185	34,400,000	76%	49%	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab./Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	1	10,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah	**Cakupan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah**	**100%**	**413,500,000**	**15%**	**43,675,550**	**15%**	**640,509,950**	**0**	**24,513,208**	**0**	**24,513,208**	**0.15**	**68,188,758**	**0.0%**	**16%**	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	1	50,000,000	1	43,675,550	1	97,560,250	0	24,513,208	0	24,513,208	1	68,188,758	100%	136%	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab./Kota	Jumlah Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang menjadi kewenangan Daerah Kab./Kota yang dibangun dan mendapatkan pemeliharaan	1	210,000,000	0	-	2	500,000,000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terlaksananya Kegiatan Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	1	57,500,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	1	60,000,000	0	-	2	42,949,700	0	-	0	-	0	-	0%	0%	
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah duta baca tingkat daerah provinsi yang terpilih	2	36,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0%	0%	
Meningkatnya Kunjungan Perpustakaan	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun**	**100%**	**204,394,260**	**40%**	**-**	**40%**	**-**	**0%**	**-**	**0.0**	**-**	**0.40**	**-**	40%	0%	

NO	Nomenkulatur Urusan Kabupaten/Kota	Indikator	Target Renstra Perangkat Daearah pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Daerah	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**100,000,000**	**20%**	**-**	**20%**	**-**	**0%**	**-**	**0**	**-**	**0.20**	**-**	20%	0%	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	20	35,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalih mediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalih mediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	150	65,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**50%**	**104,394,260**	**0%**	**-**	**20%**	**-**	**0%**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	0%	0%	
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	150	44,394,260	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Kegiatan Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	150	60,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0%	
Rata-rata capaian Kinerja (%)			**106.89%**														
Predikat Kinerja																	
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program				**3,225,245,583**		**1,699,173,937**		**2,803,548,025**		**305,503,053**		**305,503,053**		**2,004,676,990**		**62.16%**	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No.	Jenis Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=9		9=5+8		10=9/4x100%		11
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100.00**	**4,291,829,098**	**100.00**	**2,954,403,389**	**100.00**	**3,901,662,817**	**25.00**	**968,184,343**	**25.00**	**968,184,343**	**62.50**	**3,922,587,732**	**62.50**	**91.40**	**Sekretariat Dinas Perikanan**
		Nilai LAKIP Perangkat Daerah	**78.57**		**77.02**		**77.79**		**77.10**		**77.10**	**-**	**77.06**	**-**	**98.08**	**-**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100.00**	**109,807,500**	**100.00**	**15,769,000**	**100.00**	**99,825,000**	**25.00**	**-**	**25.00**	**-**	**62.50**	**15,769,000**	**62.50**	**14.36**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	89,842,500	2	13,737,000	2	81,675,000	-	-	-	-	2	13,737,000	100.00	15.29	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	3,327,500	2	318,000	2	3,025,000	-	-	-	-	2	318,000	100.00	9.56	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	3,327,500	2	303,000	2	3,025,000	-	-	-	-	2	303,000	100.00	9.11	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	3,327,500	2	433,000	2	3,025,000	-	-	-	-	2	433,000	100.00	13.01	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	3,327,500	2	418,000	2	3,025,000	-	-	-	-	2	418,000	100.00	12.56	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	3,327,500	2	341,000	2	3,025,000	-	-	-	-	2	341,000	100.00	10.25	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	3,327,500	2	219,000	2	3,025,000	-	-	-	-	2	219,000	100.00	6.58	
	Administrasi Keuangan Daerah	**Cakupan administrasi keuangan daerah**	**100.00**	**3,215,283,023**	**100.00**	**2,549,018,239**	**100.00**	**2,922,984,567**	**25.00**	**944,098,180**	**25.00**	**944,098,180**	**62.50**	**3,493,116,419**	**62.50**	**108.64**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	3,097,462,903	33	2,470,801,239	35	2,815,875,367	35	933,818,180	35	933,818,180	34	3,404,619,419	97.14	109.92	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10	73,231,620	10	46,800,000	10	66,574,200	3	6,600,000	3	6,600,000	13	53,400,000	130.00	72.92	

No.	Jenis Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	11,979,000	12	9,000,000	12	10,890,000	3	1,300,000	3	1,300,000	15.00	10,300,000	125.00	85.98	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	2,662,000	-	-	-	2,420,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	6	3,327,500	-	-	-	3,025,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran (dokumen)	2	26,620,000	2	22,417,000	2	24,200,000	2	2,380,000	2	2,380,000	4	24,797,000	200.00	93.15	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100.00**	**26,620,000**	**100.00**	**623,000**	**100.00**	**24,200,000**	**25.00**	**-**	**25.00**	**-**	**62.50**	**623,000**	**62.50**	**2.34**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	3,327,500	2	312,000	2	3,025,000	-	-	-	-	2	312,000	100.00	9.38	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10	13,310,000	-	-	10	12,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	9,982,500	2	311,000	2	9,075,000	-	-	-	-	2	311,000	100.00	3.12	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100.00**	**111,804,000**	**100.00**	**337,000**	**100.00**	**101,640,000**	**25.00**	**-**	**25.00**	**-**	**62.50**	**337,000**	**62.50**	**0.30**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	70	53,240,000	-	-	35	48,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Jenis Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	140	3,327,500	33	337,000	35	3,025,000	-	-	-	-	33	337,000	23.57	10.13	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	55,236,500	-	-	4	50,215,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**100.00**	**332,750,000**	**100.00**	**207,440,050**	**100.00**	**302,500,000**	**25.00**	**375,000**	**25.00**	**375,000**	**62.50**	**207,815,050**	**62.50**	**62.45**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	1,996,500	-	-	5	1,815,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	8,651,500	5	2,830,000	5	7,865,000	-	-	-	-	5	2,830,000	100.00	32.71	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	6,655,000	-	-	5	6,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	7,986,000	-	-	-	7,260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	6,655,000	3	1,219,750	3	6,050,000	-	-	-	-	3	1,219,750	100.00	18.33	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	6,655,000	-	-	-	6,050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	7,986,000	6	2,388,000	6	7,260,000	-	-	-	-	6	2,388,000	100.00	29.90	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	246,235,000	20	201,002,300	20	223,850,000	1	375,000	1	375,000	21	201,377,300	26.25	81.78	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	39,930,000	-	-	1	36,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100.00**	**142,417,000**	**-**	**-**	**-**	**129,470,000**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

No.	Jenis Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	46,585,000	-	-	-	42,350,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	2	95,832,000	-	-	-	87,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100.00**	**161,051,000**	**100.00**	**113,476,100**	**100.00**	**146,410,000**	**25.00**	**19,487,163**	**25.00**	**19,487,163**	**62.50**	**132,963,263**	**62.50**	**82.56**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	7,986,000	12	2,016,000	12	7,260,000	-	-	-	-	12	2,016,000	100.00	25.24	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	33,275,000	12	76,612,100	12	30,250,000	3	19,487,163	3	19,487,163	15	96,099,263	125.00	288.80	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	16,637,500	12	4,000,000	12	15,125,000	-	-	-	-	12	4,000,000	100.00	24.04	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	103,152,500	12	30,848,000	12	93,775,000	-	-	-	-	12	30,848,000	100.00	29.91	

No.	Jenis Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100.00**	**192,096,575**	**100.00**	**67,740,000**	**100.00**	**174,633,250**	**25.00**	**4,224,000**	**25.00**	**4,224,000**	**62.50**	**71,964,000**	**62.50**	**37.46**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan memiliki ijin operasional per tahun (Unit/Thn)	1	84,857,905	1	52,990,000	1	77,143,550	1	4,224,000	1	4,224,000	2	57,214,000	200.00	67.42	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit/tahun)	10	53,998,670	10	14,750,000	10	49,089,700	-	-	-	-	10	14,750,000	100.00	27.32	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	53,240,000	-	-	1	48,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Produksi Perikanan Tangkap (Ton)**	**27,376**	**9,149,873,038**	**19,317**	**3,720,838,399**	**27,052**	**8,318,066,398**	**4,900**	**-**	**4,900**	**-**	**12,109**	**3,720,838,399**	**44.23**	**40.67**	**Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap**
		Pendapatan Nelayan (Juta Rupiah)	**3.20**		**3.07**		**3.15**		**3.10**		**3.10**	**-**	**3.09**	**-**	**96.41**	**-**	
		Persentase ketersediaan sarana perikanan tangkap	**69.48**		**81.46**		**66.63**		**-**		**-**	**-**	**40.73**	**-**	**58.62**	**-**	

No.	Jenis Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan	**Cakupan Pengelolaan Penangkapan Ikan**	**100.00**	**5,489,923,823**	**100.00**	**3,703,916,399**	**100.00**	**32,661,559**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.00**	**3,703,916,399**	**50.00**	**67.47**	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	35,927,715	2	1,500,000	2	32,661,559	-	-	-	-	2	1,500,000	100.00	4.18	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2	39,930,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	50	5,414,066,108	164	3,702,416,399	-	-	-	-	-	-	164	3,702,416,399	328.00	68.39	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil	**Cakupan Pemberdayaan Nelayan Kecil**	**100.00**	**1,083,280,829**	**100.00**	**3,000,000**	**100.00**	**5,942,979,033**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.00**	**3,000,000**	**50.00**	**0.28**	**Bidang Pengembangan Perikanan Tangkap**
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50	470,789,800	-	-	275	427,990,727	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	27	306,156,207	12	1,500,000	25	278,323,825	-	-	-	-	12	1,500,000	44.44	0.49	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	7	306,334,821	2	1,500,000	6	278,486,201	-	-	-	-	2	1,500,000	28.57	0.49	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	-	-	-	-	285	4,958,178,280	-								
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	**Cakupan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan**	**100.00**	**1,464,666,833**	**100.00**	**2,088,000**	**100.00**	**1,331,515,303**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.00**	**2,088,000**	**50.00**	**0.14**	**Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan TPI**
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.75	-	
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	9,700	1,464,666,833	2,000	2,088,000	2,600	1,331,515,303	-	-	-	-	1,000	2,088,000	10.31	0.14	

No.	Jenis Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100.00**	**493,482,625**	**100.00**	**11,834,000**	**100.00**	**448,620,568**	**25.00**	**-**	**25.00**	**-**	**63**	**11,834,000**	**62.50**	**2.40**	**Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan TPI**
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	2,600	493,482,625	323	11,834,000	700	448,620,568	120	-	120	-	443	11,834,000	17.04	2.40	
	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Cakupan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**100.00**	**124,770,104**	**-**	**-**	**100.00**	**113,427,367**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan TPI**
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	50	124,770,104	-	-	45	113,427,367	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Jenis Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100.00**	**493,748,825**	**100.00**	**-**	**100.00**	**448,862,568**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.00**	**-**	**50.00**	**-**	**Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan TPI**
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	50	493,748,825	-	-	45	448,862,568	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**	**4,183**	**1,662,058,179**	**1,909**	**2,093,737,700**	**4,158**	**1,510,961,983**	**480**	**-**	**480**	**-**	**1,195**	**2,093,737,700**	**28.56**	**125.97**	**Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya**
		Pendapatan pembudidaya ikan	**3.25**		**2.17**		**3.15**		**2.17**		**2.17**	**-**	**2.17**	**-**	**66.75**	**-**	
		Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	**100.00**		**40.87**		**100.00**		**-**		**-**	**-**	**20.44**	**-**	**20.44**	**-**	**Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan**
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	-	**-**		**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Jenis Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemberdayaaan Pembudidayaan Ikan Kecil	**Cakupan Pemberdayaaan Pembudidayaan Ikan Kecil**	**100**	**131,622,078**	**100**	**3,715,000**	**100**	**119,656,436**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.00**	**3,715,000**	**50.00**	**2.82**	
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10	71,489,987	-	-	8	64,990,897	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	12	15,488,348	2	2,215,000	12	14,080,317	-	-	-	-	2	2,215,000	16.67	14.30	
	Pelaksanaan Fasilitasi bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	13	23,812,994	-	-	12	21,648,177	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Diklat	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	13	20,830,749	13	1,500,000	12	18,937,045	-	-	-	-	13	1,500,000	100.00	7.20	
	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100.00**	**26,620,000**	**-**	**-**	**100.00**	**24,200,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2	3,674,226	-	-	2	3,340,205	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Jenis Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	40	22,945,775	-	-	30	20,859,795	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Cakupan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**100.00**	**1,503,816,102**	**100.00**	**2,090,022,700**	**100.00**	**1,367,105,546**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.00**	**2,090,022,700**	**50.00**	**138.98**	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	17,983,407	2	1,500,000	2	16,348,552	-	-	-	-	2	1,500,000	100.00	8.34	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33	1,067,694,659	20	1,951,734,200	28	970,631,508	-	-	-	-	20	1,951,734,200	60.61	182.80	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	140,265,159	9	53,685,500	4	127,513,781	-	-	-	-	9	53,685,500	180.00	38.27	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4	222,050,510	1	76,951,000	5	201,864,100	-	-	-	-	1	76,951,000	25.00	34.65	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	50	18,335,869	-	-	5	16,668,972	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidaya Ikan di darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	0.5	18,335,869	0.60	1,490,000	5	16,668,972	-	-	-	-	1	1,490,000	120.00	8.13	
	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan air untuk pembudidaya ikan di darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	50	19,150,628	64	4,662,000	4	17,409,662	-	-	-	-	64	4,662,000	128.00	24.34	
IV	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelaiutan dan Perikanan**	**Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan**	**87.50**	**134,529,867**	**-**	**-**	**75.00**	**122,299,879**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**100.00**	**134,529,867**	**-**	**-**	**100.00**	**122,299,879**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

No.	Jenis Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5	107,623,893	-	-	10	97,839,903	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	3	26,905,973	-	-	40	24,459,976	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Konsumsi ikan daerah (kg/kapita)**	**81.92**	**1,345,298,667**	**80.50**	**1,419,389,750**	**80.69**	**1,222,998,788**	**80.50**	**-**	**80.50**	**-**	**80.50**	**1,419,389,750**	**98.27**	**105.51**	**Bidang Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan TPI**
		Produksi Olahan Ikan (Ton)	**2,320**		**2,787**		**2,285**		**697**		**697**	**-**	**1,742**	**-**	**75.09**	**-**	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Cakupan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**100.00**	**34,210,853**	**100.00**	**1,500,000**	**100.00**	**31,100,775**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**1,500,000**	**100.00**	**4.38**	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	2	34,210,853	2	1,500,000	2	31,100,775	-	-	-	-	2	1,500,000	100.00	4.38	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Kecil	**Cakupan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Kecil**	**100.00**	**503,908,614**	**100.00**	**1,500,000**	**100.00**	**458,098,740**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.00**	**1,500,000**	**50.00**	**0.30**	
	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	50	503,908,614	40	1,500,000	40	458,098,740	-	-	-	-	40	1,500,000	80.00	0.30	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100.00**	**807,179,200**	**100.00**	**1,416,389,750**	**100.00**	**733,799,273**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.00**	**1,416,389,750**	**50.00**	**175.47**	

No.	Jenis Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi Ikan dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9,543	40,285,217	3,100	1,314,958,250	9,448	36,622,925	-	-	-	-	3,100	1,314,958,250	32.48	3,264.12	
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	30	766,893,983	18	101,431,500	30	697,176,348	-	-	-	-	18	101,431,500	60.00	13.23	
				16,583,588,849		**10,188,369,238**		**15,075,989,864**		**968,184,343**		**968,184,343**		**11,156,553,581**			
Rata-rata capaian kinerja (%)											**9.09**				**58.99**		
Predikat kinerja											**Sangat Rendah**				**Rendah**		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1.Dukungan SDM aparatur, pelaku usaha kelautan dan perikanan, sarana prasarana dan anggaran serta koordinasi yang baik dengan stakeholder; 2.Merupakan kegiatan prioritas sehingga harus sesuai target dan rencana aksi																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1.Hilangnya kewenangan pengelolaan ruang laut dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; 2.Kegiatan yang bersifat kontraktual dalam proses pengadaan; 3. Efisiensi anggaran																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1.Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal; 2.Percepatan penyerapan anggaran kegiatan sesuai jadwal.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : 1.Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah; 2.Meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan RKPD ataupun Renstra.																	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025) YANG DI		REALISASI KINERJA PADA I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN		UNIT KERJA SKPD
					K	Rp,			K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9=5+8		10 = 9/4*100%		11
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**12,656,984,269**	**102**	**5,271,548,467**	**100**	**#REF!**	**0.00**	**616,361,949**	**0.00**	**616,361,949**	**100**	**5,887,910,416**	**27.77**	**65.44**	**Dispar**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**99,561,000**	**100**	**91,127,800**	**100**	**#REF!**	**0.00**	**7,888,000**	**0**	**7,888,000**	**100**	**99,015,800**	**33.13**	**99.13**	**Dispar**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	12,671,400	4	41,352,900	3	#REF!		-	0	-	4	41,352,900	44.44	326.35	Dispar
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	12,671,400	1	4,096,800	1	3,650,000		-	0	-	1	4,096,800	25.00	32.33	Dispar
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	12,671,400	1	4,096,800	1	4,080,000		-	0	-	1	4,096,800	25.00	32.33	Dispar
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	12,671,400	1	4,096,800	1	3,650,000		-	0	-	1	4,096,800	25.00	32.33	Dispar
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	12,671,400	1	9,104,100	1	3,724,000		-	0	-	1	9,104,100	25.00	71.85	Dispar
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	12,671,400	1	7,404,800	1	4,848,000	1	4,848,000	1	4,848,000	2	12,252,800	50.00	96.70	Dispar
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	23,532,600	2	20,975,600	1	11,133,000	1	3,040,000	1	3,040,000	3	24,015,600	37.50	102.05	Dispar
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**9,356,301,320**	**97**	**4,034,310,665**	**100**	**1,939,562,510**	**0.00**	**558,246,299**	**0.00**	**558,246,299**	**100**	**4,592,556,964**	**38.12**	**63.74**	**Dispar**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1248	8,958,962,420	292	3,888,477,365	324	1,896,690,810	81	558,246,299	81	558,246,299	373	4,446,723,664	2.49	49.63	Dispar
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	371,996,100	1	124,040,000	1	22,300,000		-	0	-	1	124,040,000	25.00	33.34	Dispar
	Koordinasi dan Penyusunan Laporanoran Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	12,671,400	1	9,041,900	1	4,255,000		-	0	-	1	9,041,900	25.00	71.36	Dispar
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	12,671,400	3	12,751,400	3	16,316,700	1	-	1	-	4	12,751,400	100.00	100.63	Dispar

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025) YANG DI		REALISASI KINERJA PADA I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN		UNIT KERJA SKPD
					K	Rp,			K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,	K	Rp.	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100**	**13,361,000**	**150**	**8,575,800**	**100**	**3,720,000**	**0.00**	**-**	**0.00**	**-**		**8,575,800**	**50.00**	**66.32**	**Dispar**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	6,465,000	2	8,575,800	2	3,720,000		-	0	-	2	8,575,800	50.00	132.65	Dispar
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	6,896,000	0	-		-			0	-	0	-		0.00	Dispar
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**176,279,000**	**83**	**28,564,800**	**100**	**3,666,000**	**0.00**	**-**	**0.00**	**-**	**100**	**28,564,800**	**10.00**	**25.13**	**Dispar**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4	8,620,000	0	-		-			0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	139,644,000	1	18,900,000		-			0	-	1	18,900,000	25.00	13.53	Dispar
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	8,620,000	1	9,664,800	2	3,666,000			0	-	1	9,664,800	25.00	112.12	Dispar
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	8,620,000	0	-		-			0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	10,775,000	0	-		-			0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**553,507,440**	**96**	**444,943,684**	**100**	**53,795,000**	**0.00**	**13,906,500**	**0.00**	**13,906,500**	**100**	**458,850,184**	**25.00**	**77.60**	**Dispar**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	11,637,000	1	3,762,000		-			0	-	1	3,762,000	25.00	32.33	Dispar
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	45,384,300	1	110,055,900	4	-			0	-	1	110,055,900	25.00	242.50	Dispar
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	8,620,000	0	-		-			0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	23,705,000	1	19,940,000	2	500,000			0	-	1	19,940,000	25.00	84.12	Dispar
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	10,775,000	0	-		-			0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	17,472,740	1	19,550,000	4	935,000	1	415,000	1	415,000	2	19,965,000	50.00	114.26	Dispar
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	435,913,400	1	291,635,784	4	52,360,000	1	13,491,500	1	13,491,500	2	305,127,284	50.00	70.00	Dispar
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**925,194,872**		**-**	**100**	**-**	**0.00**	**-**	**0.00**	**-**	**0**	**-**	**0.00**	**0.00**	**Dispar**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	275,000,000	0	-					0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Laporanangan yang Disediakan	4	274,921,057	0	-					0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025) YANG DI		REALISASI KINERJA PADA I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN		UNIT KERJA SKPD
			K	Rp,	K	Rp,			K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,	K	Rp.	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	21,550,000	0	-					0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	12,671,400	0	-					0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	0	-					0	-	0	-			Dispar
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	250,000,000	0	-					0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	91,052,415	0	-					0	-	0	-		0.00	Dispar
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**1,252,848,440**	**91**	**544,741,850**	**100**	**167,680,920**	**0.00**	**29,669,150**	**0.00**	**29,669,150**	**100**	**574,411,000**	**43.75**	**72.97**	**Dispar**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	12,947,240	1	9,432,000	4	3,000,000	1	756,000	1	756,000	2	10,188,000	50.00	78.69	Dispar
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	85,820,227	1	45,744,750	4	24,139,000	1	4,213,150	1	4,213,150	2	49,957,900	50.00	58.21	Dispar
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4,697,900	0	3,200,000	2	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	5,200,000	25.00	110.69	Dispar
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	1,149,383,073	1	486,365,100	4	138,541,920	1	22,700,000	1	22,700,000	2	509,065,100	50.00	44.29	Dispar
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**279,931,197**	**100**	**119,283,868**	**100**	**28,370,000**	**0.00**	**6,652,000**	**0.00**	**6,652,000**	**100**	**125,935,868**	**22.12**	**53.21**	**Dispar**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporanangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporanangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	154,371,270	12	79,302,868	4	28,370,000	1	6,652,000	1	6,652,000	13	85,954,868	27.08	55.68	Dispar
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	12,930,000	5	10,000,000		-			0	-	5	10,000,000	25.00	77.34	Dispar
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	112,629,927	1	29,981,000		-			0	-	1	29,981,000	14.29	26.62	Dispar
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	-	0	-		-			0	-	0	-			Dispar
II	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Pengembangan Destiansi Wisata**	**70**	**3,545,031,028**	**48.4**	**570,219,900**	**60**	**150,596,194**	**60**	**-**	**48.39**	**-**	**48.39**	**570,219,900**	**69.13**	**16.09**	Dispar
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	**Cakupan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota**	**100**	**261,840,094**	**100**	**5,200,000**	**100**	**44,996,194**		**-**		**-**		**5,200,000**	**8.33**	**8.04**	**Dispar**
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	20	210,118,594		-	2	44,996,194			0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025) YANG DI		REALISASI KINERJA PADA I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN		UNIT KERJA SKPD
					K	Rp,			K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,	K	Rp.	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4	21,550,625	1	5,200,000	0	-			0	-	1	5,200,000	25.00	24.13	Dispar
	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	4	30,170,875		-	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	**Cakupan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**	**100**	**194,412,815**	**67**	**403,690,000**	**0**	**-**	**0.00**	**-**	**0.00**	**-**	**100**	**403,690,000**	**8.13**	**156.10**	**Dispar**
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4	21,550,625	1	-	0	-			0	-	1	-	25.00	0.00	Dispar
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	40	64,651,875	3	403,690,000	0	-			0	-	3	403,690,000	7.50	624.41	Dispar
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1	95,279,940		-	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4	12,930,375		-	0	-			0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	**Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota**	**100**	**2,985,335,119**	**275**	**161,329,900**	**100**	**103,000,000**	**0.00**	**-**	**0.00**	**-**	**100**	**161,329,900**	**70.83**	**60.31**	**Dispar**
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	21,550,625	1	59,440,500	1	100,000,000			0	-	1	59,440,500	25.00	275.82	Dispar
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	8	1,939,556,250		4,700,000					0	-	0	4,700,000	0.00	0.24	Dispar
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4	623,064,665	13	42,964,000					0	-	13	42,964,000	325.00	6.90	Dispar
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	80,000,000	2	44,225,400	1	3,000,000			0	-	2	44,225,400	50.00	55.28	Dispar
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3	278,838,152		-					0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025) YANG DI		REALISASI KINERJA PADA I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN		UNIT KERJA SKPD
					K	Rp,			K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,	K	Rp.	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4	42,325,428	1	10,000,000					0	-	1	10,000,000	25.00	23.63	Dispar
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	**Cakupan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota**	**100**	**103,443,000**	**0**	**-**	**0**	**2,600,000**	**0.00**	**-**	**0.00**	**-**	**0**	**-**	**0.00**	**0.00**	**Dispar**
	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	4	43,101,250		-	40 Usaha	2,600,000			0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	4	8,620,250		-		-			0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	4	8,620,250		-		-			0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	20	43,101,250		-		-			0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
III	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Kunjungan Wisata**	**85.00**	**1,510,180,540**	**85.00**	**713,602,400**	**85**	**56,000,000**	**85**	**-**	**85**	**-**	**85**	**713,602,400**	**100.00**	**47.25**	**Dispar**
		Persentase Pertumbuhan Wisatawan Jumlah Mancanegara	**51.17**		**451.00**		**40**		**40**		**40**		**451**		**881.38**		
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Nusantara/ Lokal	**42.70**		**21.00**		**40**		**40**		**40**		**21**		**49.18**		
		Persentase Tingkat Hunian Akomodasi	**10.05**		**4.22**		**10.05**		**10.05**		**7.53**		**4.22**		**41.99**		
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	**Cakupan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**	**100**	**1,510,180,540**	**121**	**713,602,400**	**100**	**56,000,000**	**0.00**	**-**	**0.00**	**-**	**100%**	**713,602,400**	**10.00**	**35.69**	**Dispar**
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	4	162,319,702		149,134,000	24	6,000,000			0	-	0	149,134,000	0.00	91.88	Dispar
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4	162,319,702		-					0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4	199,882,152	1	10,000,000					0	-	1	10,000,000	25.00	5.00	Dispar
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	8	679,534,702	2	554,468,400	1	50,000,000			0	-	2	554,468,400	25.00	81.60	Dispar

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025) YANG DI		REALISASI KINERJA PADA I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN		UNIT KERJA SKPD
					K	Rp,			K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,	K	Rp.	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4	306,124,281		-	0				0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
IV	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Pelaku Ekraf Yang di Fasilitasi/ Mendapatkan Perlindungan Hak Keakayaan Intelektual**	**2**	**378,103,370**		**-**	**0**	**-**		**-**		-		**-**		**0.00**	Dispar
	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota	**Cakupan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota**	**100**	**378,103,370**		**-**	**0**	**-**	**0.00**	**-**	**0.00**	**-**	**100%**	**-**		**0.00**	**Dispar**
	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	58	378,103,370		-		-			0	-		-		0.00	Dispar
V	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekraf Yang dibina**	**20**	**6,547,681,889**	**10**	**321,270,344**	**16**	**4,800,000**	**16**	**-**	**10%**	-	**10%**	**321,270,344**	**0.50**	**4.91**	Dispar
		Persentase SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisataan	**50**		**20**		**40**		**40**		**50%**	-	**50%**	**-**	**1.00**		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**100**	**5,559,741,274**	**46**	**321,270,344**	**100**	**4,800,000**	**0.00**	**-**	**0.00**	**-**	**100%**	**321,270,344**	**13.33**	**1.91**	**Dispar**
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi,Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4	710,666,302	1	21,311,000	-	-			0	-	1	21,311,000	25.00	3.00	Dispar
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	60	387,436,872	3	9,714,500	-	-			0	-	3	9,714,500	5.00	2.51	Dispar
	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	225	368,119,181		-	-	-			0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	800	3,115,886,872	200	80,000,000	200	2,100,000			0	-	200	80,000,000	25.00	2.57	Dispar
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	22	673,193,927		-		-			0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4	304,438,122	1	10,250,000	1	2,700,000			0	-	1	10,250,000	25.00	3.37	Dispar
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Cakupan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**100**	**987,940,615**	**0**	**-**	**100**	**-**		**-**		**-**	**100%**	**-**	**0.00**	**0.00**	**Dispar**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (2025) YANG DI		REALISASI KINERJA PADA I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN		UNIT KERJA SKPD
			K	Rp,	K	Rp,			K	Rp,	K	Rp,	K	Rp,	K	Rp.	
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	35	399,013,122		-					0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	4	294,463,747		-					0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	20	294,463,747		-					0	-	0	-	0.00	0.00	Dispar
				24,637,981,095		**6,876,641,111**		**#REF!**		**616,361,949**		**616,361,949**		**7,493,003,060**			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													**23.77**				
Predikat Kinerja																	

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya Inisiatif, Kreatifitas, dan Kerjasama Tim Dalam Penyelesaian Tugas dan Tanggung Jawab

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Lemahnya/Kurangnya Pemahaman Terhadap System Perencanaan Pembangunan, Kurangnnya Koordinasi antar instansi dan Lembaga Terkait, dan Rendahnya Kapasitas Fiskal APBD Kabupaten

Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Pengembangan Berkelanjutan terhadap DTW yang menjadi prioritas daerah, membentuk jaringan kerjasama melalui Pokdarwis, meningkatkan fasilitas pendukung promosi pariwisata serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk

Tindak Lanjut yang diperlukan dalan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berikutnya : diperlukan Anggaran dalam menunjang setiap kegiatan yang direncanakan untuk kepentingan daerah

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH) (2026)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU(N-2) (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9=5+8		10 = 9/4*100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Cakupan pelayanan penunjang usuran pemerintahan daerah**	**100%**	**5,687,434,261**	**100%**	**5,187,634,252**	**100%**	**6,327,520,572**	**100%**	**2,189,654,634**	**100%**	**2,189,654,634**	**200%**	**7,377,288,886**	**200**	**130**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	245,159,205	100%	36,802,800	100%	13,351,700	100%	0	**100%**	0	**200%**	**36,802,800**	**200**	**15**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	35,159,205	3	6,564,000	3	4,105,000	0	0	0	-	**3**	6,564,000	**100**	**18.67**	Sekreariat Dinas
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	35,000,000	1	8,640,000	1	4,105,000		0	**0**	-	**0**	8,640,000	**0**	**24.69**	Sekreariat Dinas
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	35,000,000	1	6,040,000	1	518,000		0	**0**	-	**0**	-	**0**	-	Sekreariat Dinas
	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	35,000,000	1	7,472,800	1	4,105,000		0	**0**	-	**0**	7,472,800	**0**	**21.35**	Sekreariat Dinas
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	35,000,000	1	750,000	1	518,000		0	**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	35,000,000	1	-	1	350		0	**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	35,000,000	4	7,336,000	4	350		0	**0**	-	**4**	7,336,000	**100**	**20.96**	Sekreariat Dinas
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan**	**100%**	**3,180,000,000**	**100%**	**4,708,122,603**	**100%**	**6,115,199,282**	**100**	**2,129,424,434**	**1**	**2,129,424,434**	**2**	**6,837,547,037**	**200**	**233**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	2,935,000,000	50 Orang	4,699,332,603	80 Orang	6,051,938,582	0	2,129,424,434	80	2,129,424,434	100	6,828,757,037	200	233	Sekreariat Dinas
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50	35,000,000	50	-	50	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Akuntasi SKPD	3	35,000,000	3	-	3	63,260,000		-	**2**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	35,000,000	1	-	1	-		-	**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT/	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH) (2026)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU(N-2) (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
									I								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	35,000,000	1	8,790,000	1	350		-	**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	35,000,000	1	-	1	-		-	**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12	35,000,000	12	-	12	350		-	**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	35,000,000	12	-	12	-			**0**	-	**12**	0	**100**	**0**	Sekreariat Dinas
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi Barang Milik Daerah**	**100**	**216,400,000**	**100%**	**4,500,000**	**100%**	**2,710,000**	**0**	**0**	**0**	-	**100%**	**4,500,000**	**1**	**2.079**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	35,000,000	1	4,500,000	1	2,710,000		0	**1**	-	**2**	4,500,000	**200**	**12.857**	Sekreariat Dinas
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	35,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	35,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	350,000,000	12	-	12	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	35,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	35,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	6,400,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian**	**100%**	**480,000,000**	**100%**	**5,000**	**100%**	**-**	**0**	**-**	**0**	-	**0%**	**-**	**100**	**0.000**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50	35,000,000	50	-	50	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapam	60	35,000,000	60	5,000		-		-	**0**	-	**0**	-	**0**	**0.000**	Sekreariat Dinas
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	35,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH) (2026)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU(N-2) (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	35,000,000	0	-	0	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	35,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	3	45,000,000	3	-	3	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam melaksanakan tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1	15,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	1	35,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	140,000,000	30	-	30	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30	35,000,000	30	-	30	-			**0**		**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	35,000,000	30	-	30	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi umum**	**100%**	**784,875,056**	**100%**	**271,028,849**	**100%**	**124,938,540**	**0**	**43,780,200**	**0**	**43,780,200**	**3**	**232,783,049**	**300**	**29.659**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	35,000,000	4 Paket	-	4 Paket	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	35,000,000	8	-	8	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	2	35,000,000	10	-	10	14,996,000			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2	35,000,000	2	36,392,849	2	3,104,501		-	**0**	-	**2**	36,392,849	**100**	**103.980**	Sekreariat Dinas
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2	5,000,000	2	-	2	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	35,000,000	2	-	2	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	14,875,056	1	2,846,000	1	4,800,000			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	550,000,000	1	152,610,000	1	102,038,039	1	43,780,200	**0**	**43,780,200**	**1**	**196,390,200**	**100**	**35.71**	Sekreariat Dinas
	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	5,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH) (2026)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU(N-2) (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	35,000,000	1	79,180,000	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran**	**100%**	548,000,000	**100%**	20,208,000	**100%**	700	0	-	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	1 Unit	0	1 Unit	0			**0**	-	**1**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5	0	5	-	5	350			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	48,000,000	3	-	3	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5	150,000,000	3	20,208,000	3	350			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1	150,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	150,000,000	8	-	8	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	8	50,000,000	8	-	8	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**110,000,000**	**100%**	**53,196,000**	**100%**	**21,460,350**		**1,700,000**	**0**	**1,700,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12	10,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000		-	**0**	-	**12**	6,000,000	**100**	**60**	Sekreariat Dinas
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	35,000,000	12	-	12	5,260,000			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	30,000,000	1	-	1	350			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	35,000,000	2	47,196,000	2	10,200,000	1	1,700,000	**0**	**1,700,000**	**2**	48,896,000	**100**	**139.70**	Sekreariat Dinas
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran**	**100%**	123,000,000	**100%**	93,771,000	**100%**	**49,860,000**	**0**	**14,750,000**	**1**	**14,750,000**	**2**	**108,521,000**	**200**	**2,213**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	3,000,000	1	56,770,000	1	31,800,000	1	9,615,000	**1**	**9,615,000**	**2**	**66,385,000**	**200**	**2,213**	Sekreariat Dinas

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT/	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH) (2026)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU(N-2) (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	15,000,000	30	36,300,000	50	18,060,000	15	5,135,000	**0**	**5,135,000**	**30**	41,435,000	**100**	**276.23**	Sekreariat Dinas
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan perizinannya	1	10,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1	10,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	20,000,000	3	-	3	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3	20,000,000	3	701,000	3	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	5,000,000	8	-	8	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	30,000,000	8	-	8	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	8	10,000,000	8	-	8	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Sekreariat Dinas
II	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktifitas padi**	**78.50%**	**2,444,221,780**	**51::00**	**812,320,000**	**51::00**	**115,000,000**		**8,721,000**	**0**	**8,721,000**	**0**	**770,841,000**	**0**	**140.15**	
		Produktifitas Hortikultura	**78.50%**		**51.00**		**51.00**				**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Populasi ternak	**1,060,576**		**5.827,.34**		**5.827,.34**				**0**		**0**		**0**	**0**	
		Persentase peningkatan Sarana Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, perkebunan dan populasi ternak	**90%**		**80%**		**80%**				**0**	-	**80%**	-	**88.89**	**0**	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Persentase penggunaan sarana pertanian**	**100%**	**550,000,000**	**100%**	**812,320,000**	**100%**	**115,000,000**		**8,721,000**	**100**	**8,721,000**	**100**	**770,841,000**	**100**	**140.15**	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	300,000,000	1	512,120,000	1	115,000,000	0	8,721,000	**0**	8,721,000	**1**	520,841,000	**100**	**173.61**	Bidang Tanaman Pangan
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2	250,000,000	2	300,200,000	2	-		-	**0**	-	**2**	250,000,000	**100**	**100.0**	Bidang Perkebunan
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	**Persentase capaian poplasi dan produksi peternakan**	**100%**	**250,000,000**	**100%**	-	**100%**	-	**0**	-	**0**	-	**0**		**0**	**0**	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanam an	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	500	50,000,000	500	-	500	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT/	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH) (2026)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU(N-2) (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
									I								
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanam an	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG hewan/tanaman	1	150,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	50,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase capaian produksi peternakan**	**85.50%**	**50,221,780**	**70.50%**	**-**	**70.50%**	**-**	**0**	**-**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan /Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1	50,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1	221,780	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	**Persentase pengawasan obat hewan di tingkat pengecer**	**100%**	**29,000,000**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**0**	**-**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan peredaran obat hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	12	14,000,000	12	-	12	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	1	15,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase bibit ternak dan HPT yang diawasi penyediaan dan peredarannya**	**95%**	**1,115,000,000**	**80%**	**-**	**80%**	**-**	**0**	**-**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Penjaminan Peredaran Benih /Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	2000	200,000,000	2000	-	2000	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	1	15,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan bersertifikat	2000	100,000,000	2000	-	2000	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	5	50,000,000	5	-	5	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	5	50,000,000	5	-	5	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1	150,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase capaian populasi ternak	90.80%	450,000,000	90.6%	-	90.6%	-		-	**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	
III	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN**	**Luas lahan Pertanian**	**15.25**	**14,794,490,388**	**15,25'**	**6,410,546,400**	**15,25'**	**493,150,250**	**15,25'**	**15,507,000**	**0**	**15,507,000**	**0**	**6,426,053,400**	**0**	**43.44**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH) (2026)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU(N-2) (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
	PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase Peningkatan Jumlah prasarana pertanian (JUT) yang telah terbangun**	**4.50%**		**3.24**		**3.24**	**-**			**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan	95%	5,500,000,000	85%	955,707,400	85%	330,629,200	85%	15,507,000	**0**	**15,507,000**	**85%**	971,214,400	**89.473684**	**17.66**	**0**
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1	1,000,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	PSP
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana pendukung pertanian lainnya	1	800,000,000	1	30,433,000	1	-	1	-	**0**	-	**1**	30,433,000	**100**	**3.80**	Sekreariat
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1	1,500,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0		**0**	Bidang Perkebunan
	Peningkatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil perkebunan	Jumlah Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	1	1,200,000,000	1	468,823,000	1	112,520,000	0	5,307,000	**0**	**5,307,000**	**1**	474,130,000	**100**	**39.510833**	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1	1,000,000,000	1	456,451,400	1	218,109,200	0	10,200,000	**0**	**10,200,000**	**1**	466,651,400	**100**	**46.67**	Bidang Tanaman Pangan
	Pembangunan Prasarana Pertanian	**Persentase prasarana pertanian yang dibangun**	**100%**	**9,854,490,388**	**100%**	**5,256,849,000**	**100%**	**1,050**	**0**	**-**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jaringan usaha tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	25	2,500,000,000	10	-	10	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	PSP
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan embung pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, direhabilitasi dan dipeliharan	15	1,500,000,000	3	-	3	-		-	**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	PSP
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan usaha tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan dipeliharan	35	3,500,000,000	25	5,116,000,000	25	350	0	-	**0**	-	**25**	**5,116,000,000**	**71.428571**	**146.17**	PSP
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan dipeliharan	15	1,500,000,000	3	-	3	-		-	**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	PSP
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah *Long Storage* yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	100,000,000	1	-	1	-		-	**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	PSP
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan pintu air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan dipelihara	1	100,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	PSP
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan rumah potong hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	104,490,388	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH) (2026)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU(N-2) (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	250,000,000	1	140,849,000	1	350		-	**0**	-	**1**	140,849,000	**100**	**56.3396**	Bidang Penyuluhan
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	300,000,000	2	-	2	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	PSP
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	300,000,000	2	-	2	350		-	**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	PSP
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase wilayah sumber bibit ternak yang dikelola**	**45%**	400,000,000	**25%**	-	**25%**	-	**0**	-	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan dimanfaatkan	5	250,000,000	5	-	5	-									Bidang Peternakan
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	5	150,000,000	5	-	5	-			**0**		**0**		**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	**Luasan lahan penggembalaan umum**	**5**	**340,000,000**	**5**	**197,990,000**	**5**	**162,520,000**	**0**	-	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	**5**	50,000,000	**5**	197,990,000	5	162,520,000		-	**0**	-	**5**	197,990,000	**100**	**395.98**	Bidang Peternakan
	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	**5**	210,000,000	**5**	-	**5**	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	1	80,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
IV	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan**	**10.00%**	**1,061,536,760**	**20**	-	**20**	-	**0**	-	**0**	-	**3**	**0**	**3**	**104**	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten /Kota	**Persentase capaian angka kesakitan ternak**	**2%**	**450,000,000**	**5%**	-	**5%**	-		-	**0**	-	**0**		**0**	**0**	**Bidang Peternakan**
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1	250,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**1**	740,960,000	**100**	**296**	Bidang Peternakan

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT/	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH) (2026)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU(N-2) (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	100,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah penyakit hewan menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang terkendali	1	100,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan**	**100%**	**262,000,000**	**100%**	**-**	**100%**	**-**		**-**	**0**	**-**	**1**		**100**	**0**	**Bidang Peternakan**
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan produk hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan keamanan produk hewan	1	100,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**1**	0	**100**	**79**	Bidang Peternakan
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1	100,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**100**	Bidang Peternakan
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	62,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelayanan kesehatan hewan**	**100%**	**120,000,000**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	2	70,000,000	2	-	2	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1	50,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kesehatan masyarakat veteriner yang memenuhi persyaratan teknis	**95%**	**170,000,000**	**80%**	**-**	**80%**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	0	**0**	**0**	
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan produk hewan	1	35,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan produk hewan	1	50,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	1	50,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan masyarakat veteriner	1	35,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis kesejahteraan hewan	**Persentase unit kesejahteraan hewan yang memenuhi persyaratan teknis**	**100%**	**59,536,760**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit kesejahteraan hewan	1	15,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH) (2026)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU(N-2) (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	1	44,536,760	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
V	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase lahan pertanian bebas bencana pertanaian**	**4%**	**680,981,601**	**4**	**26,200**	**4**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Persentase luas areal pengendalian OPT (Oragnisme penganggu tanaman)	**10%**		**25%**		**25%**				**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Persentase pengendalian dan penanggulanga n OPT**	**18.86%**	**680,981,601**	**20.89%**	**26,200**	**20.89%**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**1**	**0**	**530**	**72**	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	5	150,000,000	5	-	5	-			**0**	-	**1**	0	**20**	**343**	PSP
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang ditangani	5	150,000,000	5	-	5	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	PSP
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5	15,981,601	5	-	5	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	PSP
	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	1	15,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	PSP
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	350,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	
VI	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentaseperizinan usaha pertanian yang diterbitkan**	**4%**	**325,201,980**	**4%**	**-**	**4%**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase rekomendasi izin usaha pertanian yang terbit**	**10%**	**220,201,980**	**25%**	**-**	**25%**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik pemberian izin usaha pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha pertanian	1	20,201,980	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1	100,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT/	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH) (2026)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU(N-2) (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
									I								
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin usaha pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan diawasi	1	100,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan,Rumah Potong Hewan	**Persentase Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang terbit**	**100%**	**75,000,000**	**100%**	**-**	**100%**	**-**			**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	1	15,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi benih/bibit ternak dan pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan pakan yang diawasi	1	15,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas pemeliharaan hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang diawasi	1	15,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah sakit hewan/pasar hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar hewan yang diawasi	1	15,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah potong hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi	1	15,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail,Sub Distributor) Obat Hewan	**Persentase izin usaha pengecer obat hewan yang terbit**	**20%**	**30,000,000**	**20%**	**-**	**20%**	**-**	**0**	**-**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	1	15,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi	1	15,000,000	1	-	1	-			**0**	-	**0**	0	**0**	**0**	Bidang Peternakan
VII	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Pertumbuhan kelompok tani**	**55.20%**	**341,092,568**	**45.20%**	**362,748,000**	**50.20%**	**241,345,000**	**0**	**14,910,000**	**0**	**14,910,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Persentase Peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	**75.55%**		**65.55%**		**65.55%**				**0**	-	**0**		**0**	**0**	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Ratio ketersediaan penyuluh pertanian dengan pelaku utama**	**75.55%**	**341,092,568**	**65.55%**	**362,748,000**	**70.55%**	**241,345,000**		**14,910,000**	**0**	**14,910,000**	**65.55%**	**377,658,000**	**78.16**	**110.7**	

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH) (2026)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU(N-2) (2024)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENGANGGUNG JAWAB
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25	50,000,000	25	116,550,000	55 Unit	185,700,000	10	8,910,000	**10**	**8,910,000**	**35**	**125,460,000**	**140**	**250.92**	Bidang Penyuluhan
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50	50,000,000	50	160,480,000	25 Unit	50,000,000	5	6,000,000	**0**	**6,000,000**	**50**	166,480,000	100	**332.96**	Bidang Penyuluhan
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7	129,000,000	7	65,098,000	7 Unit	2,070,000		-	**0**	-	**7**	65,098,000	100	**50.5**	Bidang Penyuluhan
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	7	30,000,000	7	-	7 Unit	0									Bidang Penyuluhan
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	25	82,092,568	10 Unit	-	3 Unit	3,575,000			**0**	**-**	**0**	0	0	**0**	Bidang Penyuluhan
	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	7	-	7	20,620,000	7 Unit	0									Bidang Penyuluhan
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1	-	1	-	1 Dok	0									Bidang Penyuluhan
			5,449	25,334,959,338		12,773,248,652		7,177,015,822	0	2,228,792,634	91	2,228,792,634	164	15,002,041,286	3	59	
						Rata-rata capaian kinerja (%)										73	
						Predikat kinerja										R	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Koordinasi dan kerja sama antar Bidang Dinas Pertanian yang baik.												7					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : baru sebagaian dilaksanakan CPCL kegiatan.																	
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi dengan Bidang dan Instansi yang lain dalam hal CPCL dan koordinasi kegiatan.																	
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja OPD tahun berikutnya : Meningkatkan alokasi dana, fasilitas serta sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Pertanian																	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Triwulan 1		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9=8*		*10 = 9/4*100%*		*11*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persen**	**100%**	**1,908,110,775**	**98%**	**1,170,837,408**	**100%**	**2,246,125,874**	**10%**	**228,455,204**	**10%**	**228,455,204**	**0.10**	**0.12**	**Dinas Perdagangan**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***presentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	**Persen**	**100%**	**28,400,000**	**100%**	**8,034,000**	**100%**	**8,800,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0.00**	**0.00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5,200,000	1	2,939,000	1	5,200,000	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,600,000	0	-	0	-	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,600,000	0	-	0	-	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,600,000	1	5,095,000	1	3,600,000	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,600,000	0	-	0	-	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3,600,000	0	-	0	-	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	5,200,000	0	-	0	-	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**presentasi ketepatan waktu menyelesaikan laporan keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100%**	**1,202,373,925**	**98,62%**	**886,884,144**	**100%**	**1,932,665,814**	**11%**	**218,455,204**	**11%**	**218,455,204**	**0.11**	**0.18**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	15	1,153,298,725	14	853,544,880	12	1,908,367,216	11	217,255,204	11	217,255,204	**0.73**	**0.19**	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	38,775,200	12	33,339,264	12	24,298,598	1	1,200,000	1	1,200,000	**0.08**	**0.03**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	4,800,000	0	-	0	-	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen	4	5,500,000	0	-	0	-	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	

No	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
										Triwulan 1						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**presentasi penyusunan dokumen administrasi barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**100%**	**4,153,200**	**0%**	**-**	**100%**	**5,468,860**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0.00**	**0.00**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1	4,153,200	0	-	1	5,468,860	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**20,400,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0.00**	**0.00**	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	**2**	3,600,000	0	-	0	-	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	dokumen	2	5,200,000	0	-	0	-	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	2	6,400,000	0	-	0	-	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	2	5,200,000	0	-	0	-	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**54,750,000**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0.00**	**0.00**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Mesin/Kartu Absensi			-	0	-		-	0	-	0	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya Anjab SKPD (Dokumen)			-	0	-		-	0	-	0	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	43	9,750,000	0	-	0	-	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	45,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Sumberdaya Aparatur (orang)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis (orang)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**483,963,650**	**99,66%**	**143,877,564**	**100%**	**202,577,200**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0.00**	**0.00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1,500,000	0	-	5	1,500,000	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	3,707,650	5	31,612,000	5	42,180,200	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	5,000,000	4	2,340,224	4	5,000,000	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	

No	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
										Triwulan 1						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1,440,000	0	-	0	-	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	467,516,000	15	108,442,440	15	153,897,000	37	-	37	-	**2.47**	**0.00**	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	4,800,000	1	1,482,900	0	-	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**100%**	**52,550,000**	**95,14%**	**23,500,000**	**100%**	**400,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0.00**	**0.00**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dians atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	0	-	0	-	0	-		-	0%	-	**#DIV/0!**	**#VALUE!**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	Unit	2	26,550,000	1	23,500,000	0	-	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (Unit)	Unit	7	26,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			0	-	7	400,000	0	-	0	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung yang diadakan (Unit)				0	-	0	-	0	-	0	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**persentasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100%**	**15,400,000**	**99,21%**	**36,905,700**	**100%**	**44,094,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0.00**	**0.00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	25	1,000,000	25	1,200,000	25	2,094,000	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6,000,000	12	5,705,700	12	6,000,000	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan memiliki ijin operasional per tahun (Unit/Thn)	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	8,400,000	2	30,000,000	2	36,000,000	2	-	2	-	**1.00**	**0.00**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**persentase dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100%**	**46,120,000**	**99,75%**	**71,636,000**	**100%**	**52,120,000**	**19%**	**10,000,000**	**19%**	**10,000,000**	**0.19**	**0.22**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	40,120,000	5	71,636,000	5	40,120,000	2	10,000,000	2	10,000,000	**0.40**	**0.25**	

No	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
										Triwulan 1						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	6,000,000	0	-	5	2,000,000	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	0	-	1	10,000,000	0	-	0	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
	Penataan Organisasi	**Cakupan Penataan Organisasi**					-					0%	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Janatan	Tersusunnya Anjab SKPD					-					0	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
II	***PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN***	**Persentase rekomendasi dan perizinan yang diterbitkan**	**Persen**	**100%**	**190,811,078**	**99,10%**	**10,950,000**	**100%**	**18,730,078**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0.00**	**0.00**	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	**Persentase penyusunan dokumen Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Persen**	**100%**	**135,811,078**	**99,58%**	**5,909,000**	**100%**	**13,228,078**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0.00**	**0.00**	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	135,811,078	1	5,909,000	1	13,228,078	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	**Persentase Dokumen Tanda Daftar Gudang**	**Persen**	**100%**	**55,000,000**	**98,53%**	**5,041,000**	**100%**	**5,502,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0.00**	**0.00**	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Presentase Penyusunan Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	1	55,000,000	1	5,041,000	1	5,502,000	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
III	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar**	**Persen**	**100%**	**4,904,658,925**	**98,14%**	**663,752,400**	**100%**	**60,711,773**	**12%**	**7,200,000**	**12%**	**7,200,000**	**0.12**	**0.00**	
		Persentase PKL yang tertata										0%	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Persentase pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar**	**Persen**	**100%**	**4,449,658,925**	**0%**	**-**	**100%**	**10,638,925**	**0%**	**-**	0%	-	**0.00**	**0.00**	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	4,304,658,925	0	-	1	7,341,925	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	145,000,000	0	-	1	3,297,000	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	**Persentase PKL yang tertata**	**Persen**	**100%**	**455,000,000**	**98,14%**	**663,752,400**	**100%**	**50,072,848**	**14%**	**7,200,000**	**14%**	**7,200,000**	**0.14**	**0.02**	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1	356,000,000	1	663,752,400	1	43,169,848	0	7,200,000	0	7,200,000	**0.00**	**0.02**	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1	99,000,000	0	-	1	6,903,000	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	

No	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
										Triwulan 1						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
IV	**Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase pemantauan kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan barang pokok penting**	**Persen**	**100%**	**129,882,441**	**98,72%**	**153,938,400**	**100%**	**170,585,480**	**6%**	**10,000,000**	**6%**	**10,000,000**	**0.06**	**0.08**	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	**Persentasi Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**Persen**	**100%**	**119,082,441**	**98,58%**	**81,989,400**	**100%**	**50,723,881**	**20%**	**10,000,000**	**20%**	**10,000,000**	**0.20**	**0.08**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	7	108,982,441	7	60,633,000	7	36,194,881	2	10,000,000	2	10,000,000	**0.29**	**0.09**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	7	10,100,000	7	21,356,400	7	14,529,000	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	**Persentase penyusunan dokumen Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota**	**Persen**	**100%**	**10,800,000**	**98,87%**	**71,949,000**	**100%**	**119,861,599**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0.00**	**0.00**	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usha Distribusi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	7	3,600,000	7	51,750,000	7	10,395,000	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	7	3,600,000	7	16,171,000	7	9,357,700	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam satu Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	7	3,600,000	7	4,028,000	7	100,108,899	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
V	**Program Pengembangan Ekspor**	**Nilai ekspor**	**Persen**	**100%**	**30,250,000**	**0**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0.00**	**0.00**	
	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah	**Persentase penyusunan dokumen Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100%**	**30,250,000**	**0**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0.00**	**0.00**	

No	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Triwulan 1		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	Pelaku Usaha	50	12,750,000	0	-	0	-	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yan dibina	Pelaku Usaha	50	17,500,000			0	-		-	0	-	**0.00**	**0.00**	
														#DIV/0!	**#DIV/0!**	
VI	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**Persen**	**100%**	**107,642,232**	**78,50%**	**38,513,480**	**100%**	**9,244,232**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0.00**	**0.00**	
		Persentase pengujian dan sertifikasi mutu komoditi								**0%**	**-**	**0%**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
		Persentase pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen								**0%**	**-**	**0%**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	**Cakupan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**	**Persen**	**100%**	**107,642,232**	**78,50%**	**38,513,480**	**100%**	**9,244,232**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0.00**	**0.00**	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Data UTTP Kemetrologian Daerah	Unit	11	67,642,232	39	38,513,480	7	4,888,232	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku usaha Kemetrologian Daerah	Orang	20	30,000,000	0	-	7	1,206,000	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	11	10,000,000	0	0	7	3,150,000	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
VII	***PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI***	**Presentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk**	**Persen**	**100%**	**121,022,819**	**95,24%**	**1,500,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0.00**	**0.00**	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Terlaksananya Pelaksanaan Promosi, Pemaaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri**	**Persen**	**100%**	**121,022,819**	**95,24%**	**1,500,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0.00**	**0.00**	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri ditingkat Kabupaten/Kota	UMKM	30	71,022,819	30	1,500,000	0	-	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	Orang	25	50,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL				**7,392,378,270**	**98,01%**	**2,039,491,688**		**2,505,397,437**	**10%**	**245,655,204**	**23.74**	**245,655,204**	**#DIV/0!**	**0.03**	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024).		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9=5+8		10 = 9/4*100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1,482,901,093	30%	2,069,396,446	100%	2,008,989,804	2940%	590,742,192	29.4%	590,742,192	29%	70,826,700	29%	5%	Disperin
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	46,000,000	23%	28,923,350	100%	29,610,000	22%	6,490,000	22%	6,490,000	45%	35,413,350	45%	77%	Disperin
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	10,000,000	10	3,892,500	10	8,025,000		-	0%	-	0	3,892,500	0%	39%	Disperin
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	6,000,000	20	4,270,000	10	4,068,000		-	0%	-	0	4,270,000	0%	71%	Disperin
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10	6,000,000	20	4,270,000	10	2,928,000		-	0%	-	0	4,270,000	0%	71%	Disperin
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	6,000,000	20	4,640,000	10	4,093,000		-	0%	-	0	4,640,000	0%	77%	Disperin
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10	6,000,000	20	4,305,850	10	2,978,000		-	0%	-	0	4,305,850	0%	72%	Disperin
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersedia (Dokumen)	10	6,000,000	10	3,702,500	10	3,759,000	86%	3,245,000	86%	3,245,000	1	6,947,500	9%	116%	Disperin
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	10	6,000,000	10	3,842,500	10	3,759,000	86%	3,245,000	86%	3,245,000	1	7,087,500	9%	118%	Disperin
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	1,028,401,093	33%	1,851,412,336	100%	1,883,230,204	30%	558,470,992	0%	558,470,992	33%	2,409,883,328	33%	234.33%	Disperin
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjagan ASN	14	970,401,093	14	1,810,932,136	14	1,849,045,104	30%	558,470,992	30%	558,470,992	14	2,369,403,128	102%	244%	Disperin
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	8	42,000,000	7	32,683,200	8	27,840,000		-	0%	-	7	32,683,200	88%	78%	Disperin
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersedia (Laporan)	10	8,000,000	10	3,954,500	10	2,586,100		-	0%	-	10	3,954,500	100%	49%	Disperin
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	8,000,000	10	3,842,500	10	3,759,000		-	0%	-	10	3,842,500	100%	48%	Disperin
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	43,000,000	28%	-	0%	-		-	0%	-	28%	-	28%	0.00%	Disperin
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	8,000,000	0.25%	-	0	-		-	0%		0	-	0%	0.00%	Disperin

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024).		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53	37,000,000	25	-	0	-		-	0%	-	25	-	47%	0.00%	Disperin
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	144,000,000	13%	129,489,060	100%	46,706,100	23%	10,801,200	0%	10,801,200	13%	140,290,260	13%	97.42%	Disperin
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4%	10,000,000		-	0	-		-	0%						Disperin
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	8,000,000	12	-	0	-			0%	-	12	-	600%	0%	Disperin
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan					0				0%						Disperin
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	25,000,000	0	16,620,000	2	10,989,000	31%	3,357,000	31%	3,357,000	0	19,977,000	15%	80%	Disperin
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang disediakan	1	6,000,000	1	3,415,350	1	2,252,100		-	0%	-	1	3,415,350	100%	57%	Disperin
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22	93,000,000	12	109,453,710	15	33,465,000	22%	7,444,200	22%	7,444,200	12	116,897,910	56%	126%	Disperin
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	65,000,000	100%	-	0%	-		-	0%	-	100%	-	100%	0%	Disperin
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2	65,000,000	0	-	0	-		-	0%	-	0		0%	0%	Disperin
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	12,000,000		-	0	-		-	0%	-					Disperin
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	20,000,000	13	-	0	-		-	0%	-	13	-	433%	0%	Disperin
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	54,000,000	100%	11,155,700	100%	14,616,000	14%	1,980,000	14%	1,980,000	114%	13,135,700	114%	24%	Disperin
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim (Surat)	300	4,000,000	250	5,323,200	200	1,816,000	41%	750,000	0%	750,000	250	6,073,200	83%	152%	Disperin
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, air dan listrik yang terbayarkan (Bulan)	4	40,000,000	6	5,832,500	4	12,800,000	10%	1,230,000	0%	1,230,000	6	7,062,500	150%	18%	Disperin
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Unit)	1	10,000,000		-	0	-		-	0%	-	0	-	0%	0%	Disperin
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	102,500,000	19%	48,416,000	100%	34,827,500	37%	13,000,000	0%	13,000,000	19%	61,416,000	19%	60%	Disperin
	#REF!	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	45,000,000	3	46,486,000	3	34,827,500	37%	13,000,000	37%	13,000,000	3	59,486,000	112%	132.19%	Disperin
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	2,000,000		-	0	-		-	0%	-	0	-	0%	0.00%	Disperin
	#REF!	Jumlah Mebel yang Dipelihara	53	17,500,000		-	0	-		-	0%	-	0	-	0%	0.00%	Disperin
	#REF!	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	8,000,000	3	1,000,000	3	-		-	0%	-	3	1,000,000	19%	12.50%	Disperin

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024).		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22	30,000,000	1	930,000	1	-		-	0%	-	1	930,000	5%	3.10%	Disperin
II	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase jumlah pertumbujan industri yang mengolah sumber daya daerah	100%	196,419,860	58%	139,892,600	3%	243,469,688		10,800,000	8%	10,800,000	#REF!	129,501,600	#REF!	66%	Disperin
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100%		58%		75%						66%		66%		
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pertumbujan industri yang mengolah sumber daya daerah		196,419,860		139,892,600		243,469,688	4%	10,800,000	4%	10,800,000					Disperin
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	6%	71,419,860	4	21,191,000	3	31,330,000	0%	-	0%	-	400%	21,191,000	6667%	29.67%	Disperin
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	25,000,000	1	37,706,400	4	109,180,000	0%	-	0%	-	1	37,706,400	100%	150.83%	Disperin
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	75,000,000	1	80,995,200	2	102,959,688	10%	10,800,000	10%	10,800,000	1	91,795,200	110%	122.39%	Disperin
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	25,000,000	0	-	0	-	-	-	0%	-	0	-	0%	0.00%	Disperin
III	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluaran oleh instansi terkait	100%	11,839,965	0.23%	22,282,500	100%	4,800,000	0	-	0%	-	0%	22,282,500	0%	188.20%	Disperin
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluaran oleh instansi terkait	100%	11,839,965	0.23%	22,282,500	100%	4,800,000		-	0%	-	0%	22,282,500	0%	188.20%	Disperin
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Perindustrian dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Indusri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1%	7,200,000	1	13,897,500	1	1,200,000		-	0%	-	100%	13,897,500	10000%	193.02%	Disperin

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024).		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Fasilitasi, Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Bwerbasis Resiko melalui Sistim Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Submssion Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sector perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sector perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistim OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha industry kecil dan menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat	1	4,639,965	1	8,385,000	1	3,600,000		-	0%	-	1	8,385,000	100%	181%	Disperin
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM masuk dalam SIINas	1%	#REF!	0.32%	46,662,500	1%	24,356,500	31%	7,500,000	0%	7,500,000	100%	34,302,500		1000%	Disperin
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IKM masuk dalam SIINas	1%	32,476,389	0.32%	46,662,500	1%	24,356,500	31%	7,500,000	31%	7,500,000		34,302,500			Disperin
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	12,576,389	1	27,360,000	1	9,600,000		-	0%	-					Disperin
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1	7,200,000	1	5,525,000	1	4,225,000		-	0%	7,500,000	100%	13,025,000	100%	181%	Disperin
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	12,700,000	1	13,777,500	1	10,531,500	71%	7,500,000	71%	7,500,000	2	21,277,500		168%	Disperin
	Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program		**100%**	**3,728,030,916**	**89%**	**2,278,234,046**	**1**	**2,281,615,992**	**27%**	**609,042,192**	**27%**	**609,042,192**	**1**	**256,913,300**	**115%**	**6.89%**	**Disperin**

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2023 S/D 2026		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025(akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		Unit perangkat daerah penanggungjawab
									Triwulan I								
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9=5+8		10 = 9/4*100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Kab/Kota**	100	**6,586,151,797**		**1,546,374,220**	100	**1,277,642,243**		**320,597,350**	-	**320,597,350**		**1,866,971,570**		**28**	Dinas Transmigrasi
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100	**95,000,000**		**30,874,200**	100	**17,082,000**		**6,022,000**	-			**30,874,200**		32	Dinas Transmigrasi
	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	15,000,000		5,858,900	5	3,620,000		1,685,000	-	1,685,000		**7,543,900**		50	Dinas Transmigrasi
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	18,000,000		5,197,900	5	3,860,000						**5,197,900**		29	Dinas Transmigrasi
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20	18,000,000		4,768,000	5	3,835,000						**4,768,000**		26	Dinas Transmigrasi
	koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20	13,500,000		4,026,100	15	1,580,000		1,580,000		1,580,000		**5,606,100**	-	42	Dinas Transmigrasi
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan	20	13,500,000		4,517,000	15	1,430,000						**4,517,000**		33	Dinas Transmigrasi
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	5,000,000		1,238,200	1	1,500,000		1,500,000		1,500,000		**2,738,200**		55	Dinas Transmigrasi
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	12,000,000		5,268,100	3	1,257,000		1,257,000		1,257,000		**6,525,100**	-	54	Dinas Transmigrasi

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2023 S/D 2026		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025(akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		Unit perangkat daerah penanggungjawab
									Triwulan I								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	**100**	**4,211,087,294**		**978,763,766**	100	**1,050,731,743**		**298,831,870**		**298,831,870**		**1,277,595,636**	-	30	Dinas Transmigrasi
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	4,057,512,408		943,503,966	13	1,039,798,743		298,831,870		298,831,870		**1,242,335,836**	-	31	Dinas Transmigrasi
	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	89,080,000		19,440,000	5	-						**19,440,000**	-	22	Dinas Transmigrasi
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	6,494,886		1,090,700	1	2,000,000						**1,090,700**	-	17	Dinas Transmigrasi
	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	30,000,000		7,781,500	5	6,680,000						**7,781,500**		26	Dinas Transmigrasi
	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	28,000,000		6,947,600	3	2,253,000						**6,947,600**		25	Dinas Transmigrasi
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100**	**12,906,185**		**663,500**	100	**879,000**						**663,500**		5	Dinas Transmigrasi
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	3,000,000		-	-	-						**-**		-	Dinas Transmigrasi
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekon dan Tersusunnya laporan barang semester dan akhir tahun SKPD	2	4,906,185		663,500	2	879,000						**663,500**		14	Dinas Transmigrasi
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	5,000,000			-							**-**		-	Dinas Transmigrasi
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**175,000,000**		70,000,000	100	**4,273,500**		-				**70,000,000**		40	Dinas Transmigrasi

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2023 S/D 2026		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025(akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		Unit perangkat daerah penanggungjawab
									Triwulan I								
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4%	5,000,000		-				-				-		-	Dinas Transmigrasi
	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20	85,000,000			2	4,273,500						-		-	Dinas Transmigrasi
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	30,000,000			0							-		-	Dinas Transmigrasi
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8	25,000,000		30,000,000	0							**30,000,000**		120	Dinas Transmigrasi
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	30,000,000		40,000,000	0							**40,000,000**		133	Dinas Transmigrasi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**689,500,000**		**162,477,123**	100	**144,120,000**		**14,387,480**		**14,387,480**		**176,864,603**	-	26	Dinas Transmigrasi
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	6,000,000			-	-						-		-	Dinas Transmigrasi
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	32,000,000			-							-		-	Dinas Transmigrasi
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1			-	-							-			Dinas Transmigrasi
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	12,000,000		1,987,800	5	1,050,000						**1,987,800**		17	Dinas Transmigrasi
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	9,500,000		2,400,000	-	-						**2,400,000**		25	Dinas Transmigrasi
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400	630,000,000		158,089,323	50	143,070,000		14,387,480		14,387,480		**172,476,803**		27	Dinas Transmigrasi
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**810,000,000**		**8,750,000**	100	**-**						**8,750,000**		1	Dinas Transmigrasi

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2023 S/D 2026		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Triwulan I		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025(akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		Unit perangkat daerah penanggungjawab
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8	700,000,000									-		-		Dinas Transmigrasi
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	65,000,000		8,750,000	0	-					**8,750,000**		13		Dinas Transmigrasi
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	35,000,000		-	0	-		-			-		-		Dinas Transmigrasi
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	10,000,000									-		-		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**137,364,613**		**44,589,377**	100	**22,656,000**		**1,356,000**		**1,356,000**	**45,945,377**		33		Dinas Transmigrasi
	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	259	10,000,000		2,220,000	1	900,000		450,000		450,000	**2,670,000**	-	27		Dinas Transmigrasi
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	15,000,000			3	5,232,000		906,000		906,000	**906,000**	-	6		Dinas Transmigrasi
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	2,364,613				-					-		-		Dinas Transmigrasi
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	110,000,000		42,369,377	1	16,524,000					**42,369,377**	-	39		Dinas Transmigrasi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**455,293,705**		**44,779,850**	100	**37,900,000**					**44,779,850**	-	10		Dinas Transmigrasi
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	284,293,705		44,279,850	4	37,900,000					**44,279,850**	-	16		Dinas Transmigrasi
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	10,000,000									-		-		Dinas Transmigrasi
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	21,000,000		500,000							**500,000**		2		Dinas Transmigrasi

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2023 S/D 2026		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025(akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		Unit perangkat daerah penanggungjawab
									Triwulan I								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	50,000,000		-								-		-	Dinas Transmigrasi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	90,000,000		-								-		-	Dinas Transmigrasi
II	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN**	**Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi penetapannya dan pengurusan legal aspek pertanahannya.**	**100**	**229,729,500**		**49,999,450**	1	**39,440,000**		**1,575,000**		**1,575,000**		**51,574,450**	-	22	Kawasan Lasalimu
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	**Cakupan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**100**	229,729,500			100	39,440,000		1,575,000		1,575,000		**1,575,000**	-	1	Kawasan Lasalimu
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	4%	20,884,500		-	1	39,440,000		1,575,000		1,575,000		**1,575,000**	-	8	Kawasan Lasalimu
	Advokasi dan musyawarah penetapan kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	4%	20,500,000			0	-						-		-	
	Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	500	74,895,000			-	-						-	-	-	Kawasan Lasalimu
	Penatausahaan pencadangan Tanah untuk kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	8	113,450,000		49,999,450		-		-		-		**49,999,450**		44	Kawasan Lasalimu
III	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah KK Transmigrasi. Jumlah Kawasan Transmigrasi**	**100**	**127,627,500**		**35,000,000**	-	**26,060,000**						**35,000,000**	-	27	Kawasan Lasalimu
	Penataan Persebaran penduduk yang Berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penataan Persebaran penduduk yang Berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**127,627,500**			-	**26,060,000**						-	-	-	Kawasan Lasalimu
	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (sau) daerah kabupaten/kota.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	12,000,000			-	26,060,000						-	-	-	Kawasan Lasalimu

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2023 S/D 2026		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025(akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		Unit perangkat daerah penanggungjawab
									Triwulan I								
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran.	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1	6,000,000		-		-						-		-	Kawasan Lasalimu
	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	20	14,500,000		35,000,000		-						**35,000,000**		241	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	50	11,500,000		-								-		-	
	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	50	6,000,000		-								-		-	
	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	100	6,000,000		-								-		-	
	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	100	9,000,000		-								-		-	
	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	50	6,000,000		-								-		-	
	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	2	11,000,000										-		-	
	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	50	13,000,000		-								-		-	
	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	50	3,000,000		-								-		-	

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2023 S/D 2026		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025(akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		Unit perangkat daerah penanggungjawab
									Triwulan I								
	Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	100	3,000,000		-								-		-	
	Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik)	100	3,000,000		-								-		-	
	Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	100	4,525,000		-								-		-	
	Penampungan Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal	50	3,000,000		-								-		-	
	Cek Kesehatan Calon Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	100	3,500,000		-								-		-	
	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa)	100	2,500,000		-								-		-	
	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	100	3,102,500		-								-		-	
	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran	100	4,000,000		-								-		-	
	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	100	3,000,000		-	**100**	-			-	-		-		-	
IV	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah KK Transmigrasi. Jumlah Kawasan Transmigrasi**	**100**	**26,597,571**		**10,000,000**	**100**	**-**						**10,000,000**		38	Kawasan Lasalimu
	Pengembangan satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.	**Cakupan Pengembangan satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.**	**100**	**26,597,571**		10,000,000	**100**	-						**10,000,000**		38	Kawasan Lasalimu
	penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	**100**	11,000,000		10,000,000	**10**	-						**10,000,000**		91	Kawasan Lasalimu

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA PD Tahun 2023 S/D 2026		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025(akhir tahun pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2025		Unit perangkat daerah penanggungjawab
									Triwulan I								
	Penguatan Insfrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1	15,597,571		-	**1**	-						-		-	Kawasan Lasalimu

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja Pada I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat
			4		5		6		7		8=7		9=5+8		10 = 9/4*100%		
1	*2*	*3*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	11
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Persentase Pelayanan dan Laporan Administrasi Keuangan, Persentase Laporan Barang Milik Daerah, Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur, Persentase Pelayanan Administrasi Umum, Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah, Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan, Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**22,580,046,627**	**1**	**26,720,785,888**	**1**	**22,296,847,980**	**1**	**6,899,316,838**	**1**	**6,899,316,838**	**1**	**33,620,102,726**	**1**	**1**	**Setda**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Persentase Pelayanan dan Laporan Administrasi Keuangan, Persentase Laporan Barang Milik Daerah, Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur, Persentase Pelayanan Administrasi Umum, Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah, Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan, Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**477,809,777**	**100%**	**307,111,600**	**100%**	**310,039,500**	**100%**	**27,554,000.00**	**100%**	**27,554,000**	**100%**	**334,665,600**	**100%**	**1**	**Setda**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Setda	3 Dok	63,160,219	3 Dok	57,316,000	1 Dok	36,466,000	1	4,800,000	1	4,800,000	1	62,116,000	1	1	Bagian Umum
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA Setda	1 Dok	52,761,967	1 Dok	20,501,250	10 Dok	49,691,250	0	-	1	0	1	20,501,250	1	0	Bagian Umum
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan Setda	1 Dok	45,504,608	1 Dok	19,907,350	10 Dok	48,067,350	0	-	1	0	1	19,907,350	1	0	Bagian Umum
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA Setda	1 Dok	52,905,081	1 Dok	19,665,000	10 Dok	46,419,900	0	-	1	0	1	19,665,000	1	0	Bagian Umum
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan Setda	1 Dok	54,022,081	1 Dok	20,784,000	10 Dok	42,299,000	0	-	1	0	1	20,784,000	1	0	Bagian Umum
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja realisasi SKPD	1 Dok	49,945,151	1 Dok	38,278,000	1 Lap	22,780,000	1	22,754,000	1	22,754,000	1	61,032,000	1	1	Bagian Umum
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD)	1 Dok	159,510,670	1 Dok	130,660,000	1 Lap	64,316,000	0	-	1	0	1	130,660,000	1	1	Bagian Umum
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam "BAIK", Persentase kehadiran pegawai dalam1 Tahun, Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, Persentase jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat Daerah yang memenuhi standar penulisan**	**100%**	**8,808,620,428**	**100%**	**8,680,933,420**	**100%**	**8,588,300,560**	**100%**	**2,538,839,643**	**100%**	**2,538,839,643**	**100%**	**11,219,773,063**	**100%**	**1**	**Setda**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang di Bayarkan	12 Bulan	7,693,208,900	12 Bulan	7,603,144,120	12 Bulan	7,939,715,260	3	2,407,490,343	0	2,407,490,343	0	10,010,634,463	-	-	Setda
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Pengelolah Keuangan yang dibayarkan	12 Bulan	245,800,000	12 Bulan	410,560,000	0	-	0	-	0	0	0	410,560,000	-	2	Bagian Umum
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Triwulan SPJ, LP2P, Rekon, Penatausahaan Setda	13 Dok	731,930,824	13 Dok	543,475,000	12 Bulan	560,111,000	3	131,349,300	0	131,349,300	0	674,824,300	-	1	Bagian Umum
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 Lap	97,371,427	2 Lap	107,054,250	3 Lap	32,774,250	**0**	-	0	0	0	107,054,250	-	1	Bagian Umum
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	2 Lap	40,309,277	2 Lap	16,700,050	3 Lap	55,700,050	0	-	0	0	0	16,700,050	-	0	Bagian Umum

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja Pada I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat
			4		5		6		7		8=7		9=5+8		10 = 9/4*100%		
1	*2*	*3*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	11
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam "BAIK", Persentase kehadiran pegawai dalam1 Tahun, Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, Persentase jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat Daerah yang memenuhi standar penulisan**	**100%**	**149,171,332**	**100%**	**178,759,000**	**100%**	**112,493,300**	**100%**	**54,325,700**	**100%**	**54,325,700**	**100%**	**233,084,700**	**100%**	**2**	**Setda**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	149,171,332	4 Lap	178,759,000	4 Lap	112,493,300	0	54,325,700	0	54,325,700	0	233,084,700	-	-	Bagian Umum
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam "BAIK", Persentase kehadiran pegawai dalam1 Tahun, Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, Persentase jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat Daerah yang memenuhi standar penulisan**	**100%**	**363,065,901**	**100%**	**553,589,250**	**100%**	**377,324,300**	**100%**	**3,936,400**	**100%**	**3,936,400.00**	**100%**	**557,525,650**	**100%**	**2**	**Setda**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Tahun	37,893,507	1 Tahun	40,395,500	1 Unit	22,255,200	0	3,936,400	0	3,936,400	0	44,331,900.00	-	-	Bagian Umum
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Tahun	128,550,000	1 Tahun	224,850,000	1 Paket	93,750,000	1	-	0	0	0	224,850,000	-	2	Bagian Umum
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	125,515,671	1 Dok	168,160,750	2 Dok	95,030,900	1	-	0	0	0	168,160,750.00	-	-	Bagian Umum
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Org	70,650,000	7 Org	13,000	20 Org	85,620,000	-	-	-	0	-	13,000.00	-	-	Setda
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Org	208,372	200 Org	120,015,000	2 Keg/ Org	80,668,200	0	-	0	0	0	120,015,000	-	576	Setda
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Org	248,351	200 Org	155,000	1 Keg/ Org	-	0	-	0	0	0	155,000	-	1	Setda
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam "BAIK", Persentase kehadiran pegawai dalam1 Tahun, Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, Persentase jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat Daerah yang memenuhi standar penulisan**	**100%**	**4,049,669,079**	**100%**	**6,729,383,900**	**100%**	**2,953,933,000**	**0**	**898,820,752**		**898,820,752**	**14**	**7,628,204,652**	**1**	**2**	**Setda**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	29,284,000	1 Tahun	44,987,000	1 Paket	14,948,000	0	14,880,000	0	14,880,000	4	59,867,000	2	2	Bagian Umum
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	131,063,720	1 Tahun	178,240,300	1 Paket	358,848,000	**1**	24,000,000	1	24,000,000	15	202,240,300	15	2	Bagian Umum
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun	166,659,289	1 Tahun	195,394,000	1 Paket	57,932,000	**1**	16,982,000	1	16,982,000	8	212,376,000	8	1	Bagian Umum
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun	535,620	1 Tahun	268,937,600	1 Paket	270,924,000	**1**	171,676,000	1	171,676,000	18	440,613,600	2	823	Bagian Umum
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	191,298,450	1 Tahun	391,040,000	1 Paket	149,510,000	**1**	24,000,000	1	24,000,000	18	415,040,000	18	2	Bagian Umum
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Tahun	95,040,000	1 Tahun	141,000,000	12 Bulan Dok	103,680,000	**1**	29,280,000	1	29,280,000	16	170,280,000	16	2	Bagian Umum
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Tahun	175,000,000	1 Tahun	125,700,000	1 Paket	40,800,000	**1**	39,401,000	1	39,401,000	2	165,101,000	2	1	Bagian Umum
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun	1,250,735,000	1 Tahun	2,295,263,000	1 Lap	825,658,000	**1**	223,648,000	1	223,648,000	10	2,518,911,000	10	2	Bagian Umum

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja Pada I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat
			4		5		6		7		8=7		9=5+8		10 = 9/4*100%		
1	*2*	*3*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	11
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	2,010,053,000	1 Tahun	3,088,822,000	1 Lap	1,131,633,000	**1**	354,953,752	1	354,953,752	21	3,443,775,752	21	2	Bagian Umum
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam "BAIK", Persentase kehadiran pegawai dalam1 Tahun, Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, Persentase jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat Daerah yang memenuhi standar penulisan**	**100%**	**593,120,000**	**100%**	**1,371,640,430**	**100%**	**2,474,598,000**	**18**	**2,209,609,000**		**2,209,609,000**	**15**	**3,581,249,430**	**15**	**6**	**Setda**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Tahun	226,000,000	1 Tahun	13,000	10 Unit	2,222,970,000	5	2,186,609,000	5	2,186,609,000	6	2,186,622,000	0	10	Bagian Umum
	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Tahun	8,500,000	1 Tahun	901,614,430.00	1 Paket Unit	68,000,000	1	23,000,000	1	23,000,000	-	924,614,430	-	109	Bagian Umum
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	120,000,000	1 Paket Unit	31,000	0	-	0	0	-	120,000,000	-	1	Bagian Umum
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	208,620,000	1 Tahun	13,000	0 Unit	5,000	0	-	0	0	3	13,000	33	0	Bagian Umum
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	-	1 Tahun	350,000,000	1 Paket Unit	-	0	-	0	0	14	350,000,000	1	-	Bagian Umum
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	-	1 Tahun	-	0 Unit	183,592,000	0	-	0	0	14	0	1	-	Bagian Umum
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam "BAIK", Persentase kehadiran pegawai dalam1 Tahun, Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, Persentase jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat Daerah yang memenuhi standar penulisan**	**100%**	**3,581,204,726**	**100%**	**4,290,604,288**	**100%**	**3,299,625,578**	**25**	**383,228,127**		**383,228,127**	**64**	**4,673,832,415**	**45**	**1**	**Setda**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Dok	182,995,731	1 Dok	168,455,600	1 Lap	95,441,600	1	18,162,400	1	18,162,400	326	186,618,000	-	1	Bagian Umum
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	1,147,154,247	12 Bulan	1,346,692,996	12 Bulan Lap	1,322,357,996	3	215,447,883	3	215,447,883	18	1,562,140,879	18	1	Bagian Umum
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	333,240,000	1 Tahun	761,400,692	6 Keg Lap	307,900,982	1	58,717,844	1	58,717,844	3	820,118,536	3	2	Bagian Umum
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	1,917,814,748	12 Bulan	2,014,055,000	12 Bulan Lap	1,573,925,000	3	90,900,000	3	90,900,000	66	2,104,955,000	0	1	Bagian Umum
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam "BAIK", Persentase kehadiran pegawai dalam1 Tahun, Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, Persentase jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat Daerah yang memenuhi standar penulisan**	**100%**	**1,646,425,000**	**100%**	**2,229,158,000**	**100%**	**1,724,056,985**	**25**	**456,479,216**		**456,479,216**	**64**	**2,685,637,216**	**45**	**2**	Bagian Umum
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Tahun	184,060,000	1 tahun	141,575,000	12 Bulan Unit	146,757,000	1	7,101,250	1	7,101,250	1	148,676,250	1	1	Bagian Umum

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja Pada I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat
			4		5		6		7		8=7		9=5+8		10 = 9/4*100%		
1	*2*	*3*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	11
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun	1,265,965,000	1 tahun	1,838,022,000	12 Bulan Unit	1,070,499,985	1	398,822,966	1	398,822,966	1	2,236,844,966	1	2	Bagian Umum
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Tahun	20,000,000	1 tahun	30,135,000	1 Paket Unit	30,000,000	0	27,300,000	0	27,300,000	0	57,435,000	-	3	Bagian Umum
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	61,400,000	1 tahun	79,000,000	0 Unit	23,500,000	0	23,255,000	0	23,255,000	0	102,255,000	-	2	Bagian Umum
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	55,000,000	1 tahun	40,900,000	1 Paket Unit	3,000,000	0	-	0	0	0	40,900,000	-	1	Bagian Umum
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	60,000,000	1 tahun	13,000	1 Paket Unit	100,000	0	-	0	0	0	13,000	-	0	Bagian Umum
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	-	1 tahun		1 Paket Unit	250,100,000	0	-	0	0	0	0	-	#DIV/0!	Bagian Umum
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 tahun	99,513,000	1 Paket Unit	200,100,000	0	-	0	0	0	99,513,000	-	#DIV/0!	Bagian Umum
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Terfasiliitasinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**525,334,665**	**1 Tahun**	**379,000,000**	**1 Keg Paket**	**630,367,057**		**50,000,000**	**0**	**50,000,000**		**429,000,000**		**-**	**Bagian Umum**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	200,314,665	12 Bulan	-	12 Bulan	213,367,057	-	-	-	0	-	-	-	-	Bagian Umum
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Tahun	108,500,000	1 Tahun	94,000,000	1 Keg Paket	117,000,000	-	-	-	0	-	94,000,000.00	-	-	Bagian Umum
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Tahun	-	1 Tahun	60,000,000	2 Orang	-	-	-	-	0	-	60,000,000.00	-	-	Bagian Umum
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	216,520,000	12 Bulan	225,000,000	2 Orang 12 Bulan	300,000,000	3	50,000,000	3.00	50,000,000	3.00	275,000,000.00	3	-	Bagian Umum
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam "BAIK", Persentase kehadiran pegawai dalam1 Tahun, Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, Persentase jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat Daerah yang memenuhi standar penulisan**	**100%**	**695,685,000**	**1 Dok**	**553,398,000**	**1 Dok**	**883,460,000**		**195,596,000**	**0**	**195,596,000**		**748,994,000**		**-**	**Bagian Umum**
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Bulan	459,200,000	12 Bulan	462,000,000	12 Bulan Paket	400,000,000	3	124,000,000	12	124,000,000		586,000,000.00	-	-	Bagian Umum
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Bulan	485,000	12 Bulan	-	12 Bulan Paket	382,000,000	3	63,000,000	-	63,000,000	3.00	63,000,000.00	3	-	Bagian Umum
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Bulan	236,000,000	12 Bulan	91,398,000	12 Bulan Paket	101,460,000	3	8,596,000	12	8,596,000	3.00	99,994,000.00	3	-	Bagian Umum
	Penataan Organisasi	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam "BAIK", Persentase kehadiran pegawai dalam1 Tahun, Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, Persentase jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat Daerah yang memenuhi standar penulisan**	**100%**	**729,523,519**	**-**	**599,697,000**	**-**	**343,157,700**		**51,128,000**	**0**	**51,128,000**		**650,825,000**		**-**	**Bagian Ortala**
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dok	219,259,352	1 Dok	175,493,000	1 Dok	115,891,000	1	9,938,600	1.00	9,938,600	1.00	185,431,600	1		Bagian Ortala
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Lap	243,403,889	1 Lap	201,024,000	1 Lap	102,401,700	1	34,233,000	1	34,233,000	1	235,257,000	1	1	Bagian Ortala

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja Pada I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat
			4		5		6		7		8=7		9=5+8		10 = 9/4*100%		11
1	*2*	*3*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dok	266,860,278	1 Dok	223,180,000	1 Dok	124,865,000	1	6,956,400	1	6,956,400	1	230,136,400	1	1	Bagian Ortala
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam "BAIK", Persentase kehadiran pegawai dalam1 Tahun, Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, Persentase jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat Daerah yang memenuhi standar penulisan**	**100%**	**960,417,200**	**-**	**847,511,000**	**-**	**599,492,000**		**29,800,000**	**0**	**29,800,000**		**877,311,000**		**-**	**Bagian Humas**
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Lap	459,518,000	1 Lap	396,720,000	1 Lap	224,526,000	**0**	10,200,000	0	10,200,000	0	406,920,000	-	1	Bagian Humas
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Lap	250,900,000	1 Lap	203,542,000	1 Lap	158,453,000	**0**	6,800,000	0	6,800,000	0	210,342,000	-	1	Bagian Humas
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Lap	249,999,200	1 Lap	247,249,000	1 Lap	216,513,000	**0**	12,800,000	0	12,800,000	0	260,049,000	-	1	Bagian Humas
II	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**terlaksannya pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	**100%**	**5,226,604,292**	**-**	**3,219,842,250**	**-**	**4,811,219,300**		**138,976,080**	**0**	**138,976,080**		**3,358,818,330**		**-**	**Setda**
	Administrasi Tata Pemerintahan	**terlaksannya pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	**100%**	**657,833,087.00**	**-**	**696,499,250.00**	**-**	**518,585,600.00**		**51,252,000**	**0**	**51,252,000**		**747,751,250**		**-**	**Bagian Tapem**
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dok	187,979,465	1 Dok	248,464,000	1 Dok	140,505,200	-	41,177,000	-	41,177,000	-	289,641,000	-	2	Bagian Tapem
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dok	379,938,513	1 Dok	383,528,000	1 Dok	255,124,900	**-**	10,075,000	-	10,075,000	-	393,603,000	-		Bagian Tapem
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dok	89,915,109	1 Dok	64,507,250	1 Dok	122,955,500	**-**	-	-	0	-	64,507,250.00	-	**1**	Bagian Tapem
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**terlaksannya pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	**100%**	**3,469,341,862**	**-**	**1,649,743,000**	**-**	**3,705,070,000**		**7,400,000**	**-**	**7,400,000**	**-**	**1,657,143,000**	**-**	**-**	**Bag. Kesra**
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Tahun	1,270,562,540	1 Tahun	943,068,000	1 Dok	2,024,300,000	1	2,200,000	1	2,200,000	1	945,268,000	1	1	Bag. Kesra
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dok	1,099,740,670	1 Dok	108,675,000	1 Dok	1,213,069,000	1	2,200,000	1	2,200,000	1	110,875,000	1	0	Bag. Kesra
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dok	1,099,038,652	1 Dok	598,000,000	1 Dok	467,701,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	601,000,000	1	1	Bag. Kesra
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**terlaksannya pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	**100%**	**1,050,030,220**	**-**	**800,222,000**	**-**	**524,958,700**		**80,324,080**	**0**	**80,324,080**		**880,546,080**		**-**	**Bag. Hukum**
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	26 Dok	324,565,529	3 Dok	297,707,000	26 Dok	171,105,400		39,709,500	0	39,709,500	0	337,416,500	-	1	Bag. Hukum
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	501,887,913	3 Kasus	310,717,000	3 Kasus	253,715,300	1	8,866,100	1	8,866,100	1	319,583,100	1	1	Bag. Hukum
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dok	223,576,778	2 Dok	191,798,000	2 Dok	100,138,000	1	31,748,480	1	31,748,480	1	223,546,480	1	1	Bag. Hukum
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	**terlaksannya pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	**100%**	**49,399,123**	**1 Dok**	**73,378,000**	**1 Lap**	**62,605,000**	**1**	**-**	**1**	**0**		**73,378,000**	**1**	**-**	**Setda**
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Dok	49,399,123	1 Dok	73,378,000	1 Lap	62,605,000	**1**	-	1	0	1	73,378,000	1	-	Bagian Tapem
III	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**terlaksannya pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	**100%**	**1,830,836,516**	**-**	**2,187,793,100**	**-**	**1,033,291,200**	**5**	**234,500,090**	**5**	**234,500,090**		**2,422,293,190**	**5**	**-**	**Setda**
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**terlaksannya pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	**100%**	**487,408,432**	**-**	**1,082,892,100**	**-**	**394,049,800**	**3**	**37,414,300**	**3**	**37,414,300**		**1,120,306,400**	**3**	**-**	**Bag. Perkonomian & SDA**
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Penyiapan bahan kajian untuk perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pembangunan.	1 Dok	137,311,178		-		-	0	-	0	0	0	0	-	-	Bag. Perkonomian & SDA

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja Pada I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat
			4		5		6		7		8=7		9=5+8		10 = 9/4*100%		
1	*2*	*3*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	11
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Dok	137,311,178	1 Dok	180,293,100	1 Lap	86,855,000	1	25,289,600	1	25,289,600	1	205,582,700	1	1	Bag. Perkonomian & SDA
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Lap	212,786,076	1 Lap	703,198,000	3 Dok	259,224,800	1	3,200,000	1	3,200,000	1	706,398,000	1	3	Bag. Perkonomian & SDA
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD		-	3 Dok	199,401,000	1 Dok	47,970,000	**1**	8,924,700	1	8,924,700	1	208,325,700	1	#DIV/0!	Bag. Adm Perekonomian & SDA
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Terlaksananya Perekonomian dan Pembangunan**	**100%**	**613,552,009**	**1 Lap**	**544,258,000**	**1 Lap**	**279,928,650**	**1**	**95,525,580**	**1**	**95,525,580**		**639,783,580**	**1**	**-**	**Bag. Pmbangunan**
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dok	157,831,371	1 Dok	164,588,000	1 Dok	77,653,700	1	32,521,280	1	32,521,280	1	197,109,280	1	1	Bag. Pmbangunan
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Lap	287,221,167	1 Lap	218,867,000	1 Lap	121,804,950	1	42,160,800	1	42,160,800	1	261,027,800	1	1	Bag. Pmbangunan

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja Pada I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit Perangkat
			4		5		6		7		8=7		9=5+8		10 = 9/4*100%		
1	*2*	*3*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	11
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Lap	168,499,471	1 Lap	160,803,000	1 Lap	80,470,000	1	20,843,500	1	20,843,500	1	181,646,500	1	1	Bag. Pmbangunan
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Terlaksananya Perekonomian dan Pembangunan**	**100%**	**619,225,792**	**10 Orang**	**462,195,000**	**10 Orang**	**312,667,800**	**3**	**85,452,710**	**3**	**85,452,710**		**547,647,710**	**3**	**-**	**Bag. PBJ**
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dok	256,550,772	1 Dok	210,296,000	1 Dok	131,873,000	1	47,342,510	1	47,342,510	1	257,638,510	1	1	Bag. PBJ
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dok	183,435,195	1 Dok	131,674,600	1 Dok	99,330,000	1	24,873,850	1	24,873,850	1	156,548,450	1	1	Bag. PBJ
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	179,239,825	10 Orang	120,224,400	10 Orang	81,464,800	3	13,236,350	3	13,236,350	3	133,460,750	3	1	Bag. PBJ
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Terlaksananya Perekonomian dan Pembangunan**	**100%**	**110,650,283**	**1 Dok**	**98,448,000**	**7 Dok**	**46,644,950**	**0**	**16,107,500**	**0**	**16,107,500**		**114,555,500**	**-**	**-**	**Bag. Perkonomian & SDA**
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dok	110,650,283	1 Dok	98,448,000	7 Dok	46,644,950	0	16,107,500	0	16,107,500	0	114,555,500	-	1	Bag. Perkonomian & SDA
				#REF!	**-**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	**-**	**#REF!**	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* / Kegiatan *(output)*	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggun
			4		*5*		*6*		*7*		*8 = 7*		*9 = 5 + 8*		*10 = 9 /4 x 100%*		
1	*2*	*3*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	*11*
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
	SEKRETARIAT DPRD		**100%**	**115,949,923,131**	**41%**	**47,410,502,669**	**100%**	**22,740,212,041**	**29%**	**6,506,254,903**	**0%**	**10,708,066,945**	**100%**	**58,118,569,614**	**100%**	**50%**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN**	**Cakupan Pelayanan Administrasi UmumSekretariat DPRD**	**100%**	**68,461,767,745**	**40%**	**27,490,313,113**	**100%**	**15,814,282,241**	**19%**	**2,952,737,653**	**0%**	**6,189,537,945**	**100%**	**33,679,851,058**	**100%**	**49%**	**Setwan**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**201,831,736**	**53%**	**106,992,130**	**100%**	**53,179,000**	**25%**	**13,270,000**	**0%**	**26,273,000**	**100%**	**133,265,130**	**100%**	**66%**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dkm	27,603,275	20 Dkm	16,193,700	10 Dkm	10,040,000	Dkm	-	9 Dkm	9,283,000	10 Dkm	25,476,700	10 Dkm	92%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	32 Dkm	24,341,117	16 Dkm	14,389,500	8 Dkm	5,312,000	Dkm	-	Dkm	-	8 Dkm	14,389,500	8 Dkm	59%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	32 Dkm	25,785,396	16 Dkm	14,892,180	8 Dkm	5,318,000	Dkm	-	Dkm	-	8 Dkm	14,892,180	8 Dkm	58%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	28 Dkm	28,482,374	14 Dkm	15,592,750	7 Dkm	7,425,000	Dkm	-	Dkm	-	7 Dkm	15,592,750	7 Dkm	55%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	28 Dkm	24,749,525	14 Dkm	13,253,000	7 Dkm	6,452,000	Dkm	-	Dkm	-	7 Dkm	13,253,000	7 Dkm	54%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Dkm	19,746,527	10 Dkm	11,625,000	5 Dkm	5,148,000	Dkm	840,000	4 Dkm	7,055,000	5 Dkm	18,680,000	5 Dkm	95%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 Dkm	51,173,522	20 Dkm	21,046,000	10 Dkm	13,484,000	Dkm	12,430,000	8 Dkm	9,935,000	10 Dkm	30,981,000	10 Dkm	61%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan**	**100%**	**9,202,787,188**	**40%**	**3,677,495,862**	**100%**	**1,806,128,311**	**25%**	**454,301,301**	**0%**	**893,654,155**	**100%**	**4,571,150,017**	**100%**	**50%**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Org	8,824,350,766	50 Orang	3,527,312,362	25 Org	1,726,488,311	25 Org	453,197,301	25 Org	893,654,155	25 Org	4,420,966,517	25 Org	50%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Doikumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dkm	323,960,364	24 Dkm	99,560,000	12 Dkm	51,480,000	Dkm	-	Dkm	-	12 Dkm	99,560,000	12 Dkm	31%	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Dkm	23,177,154	10 Dkm	21,957,000	5 Dkm	14,036,000	Dkm	-	Dkm	-	5 Dkm	21,957,000	5 Dkm	95%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	20 Dkm	31,298,904	10 Dkm	28,666,500	5 Dkm	14,124,000	Dkm	1,104,000	Dkm	-	5 Dkm	28,666,500	5 Dkm	92%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**2,255,204,847**	**13%**	**294,691,600**	**100%**	**165,100,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**294,691,600**	**100%**	**13%**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	170 org	222,768,000	100 org	94,524,700	60 org	25,000,000	Org	-	Org	-	60 org	94,524,700	60 org	42%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Org	118,024,347	Org	9,700,000	35 Org	-	Org	-	Org	-	35 Org	9,700,000	35 Org	8%	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Org	1,392,300,000	5 Org	4,183,000	27 Org	18,000,000	Org	-	Org	-	27 Org	2,083,000	27 Org	0%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	144 org	522,112,500	15 Org	186,283,900	144 org	122,100,000	Org	-	Org	-	144 org	186,283,900	144 org	36%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**2,650,845,203**	**56%**	**1,483,931,600**	**100%**	**640,639,570**	**35%**	**222,101,200**	**0%**	**480,953,100**	**100%**	**1,964,884,700**	**100%**	**74%**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	102,334,050	2 Paket	31,073,350	1 Paket	30,560,500	Paket	-	Paket	6,220,000	1 Paket	37,293,350	1 Paket	36%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	120 Paket	185,640,000	60 Paket	33,513,800	30 Paket	60,599,070	2 Paket	-	Paket	1,200,000	30 Paket	34,713,800	30 Paket	19%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	92,820,000	Paket	-	Paket	74,200,000	Paket		Paket	-	1 Paket		1 Paket	0%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	48 Paket	140,390,250	24 Paket	153,097,450	12 Paket	64,050,000	Paket	579,000	Paket	21,350,000	12 Paket	174,447,450	12 Paket	124%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	40 Dkm	187,459,272	20 Dkm	281,819,800	10 Dkm	16,880,000	2 Dkm	10,000,000	2 Dkm	214,219,800	10 Dkm	496,039,600	10 Dkm	265%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	92,820,000	24 Laporan	18,304,500	144 Laporan	89,200,000	Laporan	27,905,000	Laporan	3,346,000	144 Laporan	11,416,500	144 Laporan	12%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48 Laporan	1,756,561,631	24 Laporan	762,322,700	144 Laporan	302,150,000	Laporan	183,617,200	Laporan	234,617,300	144 Laporan	996,940,000	144 Laporan	57%	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20 Dkm	92,820,000	10 Dkm	203,800,000	5 Dkm	3,000,000	Dkm	-	Dkm	-	5 Dkm	200,000,000	5 Dkm	215%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barnag Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**673,643,471**	**182%**	**1,227,275,300**	**100%**	**619,515,000**	**0%**	**-**	**0%**	**2,590,000**	**100%**	**1,229,865,300**	**100%**	**183%**	

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas /operasional yang disediakan	Unit	-	-	0	-	-	-		-	-	Unit		Unit		
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebeleur yang disediakan	40 Unit	255,255,000	-	568,991,600	-	300,000,000	Unit		Unit	-	10 Unit	568,991,600	10 Unit	223%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	40 Unit	418,388,471	20 Unit	658,283,700	10 Unit	319,515,000	Unit	-	Unit	2,590,000	10 Unit	660,873,700	10 Unit	158%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**4,573,009,350**	**35%**	**1,612,420,204**	**100%**	**1,051,692,000**	**12%**	**124,333,600**	**0%**	**293,717,500**	**100%**	**1,906,137,704**	**100%**	**42%**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan	2,297,295,000	60 Laporan	859,994,200	30 Laporan	396,000,000	Laporan	64,000,000	12 Laporan	172,500,000	30 Laporan	1,032,494,200	30 Laporan	45%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	20 Laporan	1,206,660,000	10 Laporan	339,944,004	5 Laporan	314,600,000	Laporan	32,733,600	2 Laporan	51,917,500	5 Laporan	391,861,504	5 Laporan	32%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	94,444,350	6 Laporan	36,850,000	3 Laporan	25,660,000	Laporan	-	Laporan	0	3 Laporan	36,850,000	3 Laporan	39%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 Laporan	974,610,000	24 Laporan	375,632,000	12 Laporan	315,432,000	Laporan	27,600,000	5 Laporan	69,300,000	12 Laporan	444,932,000	12 Laporan	46%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**2,680,035,950**	**47%**	**1,272,707,550**	**100%**	**1,151,195,080**	**6%**	**63,460,000**	**0%**	**206,778,000**	**100%**	**1,479,485,550**	**100%**	**55%**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	92 Unit	1,914,270,950	45 Unit	1,087,088,450	17 Unit	418,974,660	Unit	63,460,000	Unit	189,119,000	17 Unit	1,276,207,450	17 Unit	67%	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	40 Unit	92,820,000		-		-	-		-	-	10 Unit	-	10 Unit	0%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	148 Unit	116,025,000	67 Unit	123,432,800	37 Unit	31,520,000	Unit	-	Unit	-	37 Unit	123,432,800	37 Unit	106%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	16 Unit	464,100,000	8 Unit	62,186,300	4 Unit	700,700,420	Unit	-	Unit	17,659,000	4 Unit	79,845,300	4 Unit	17%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	92,820,000	-	0	-	-	-		-	-	1 Unit	-	1 Unit	0%	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejateraan DPRD**	**100%**	**46,224,360,000**	**39%**	**17,814,798,867**	**100%**	**10,326,833,280**	**20%**	**2,075,271,552**	**0%**	**#REF!**	**100%**	**#REF!**	**100%**	**#REF!**	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	100 Orang	44,553,600,000	50 Orang	17,245,750,867	25 Org	10,019,833,280	25 Org	2,075,271,552	25 Org	#REF!	25 Org	#REF!	25 Org	#REF!	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	500 Orang	1,438,710,000	250 Paket	567,998,000	164 org	307,000,000	164 org	-	164 org	-	164 org	567,998,000	164 org	39%	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	232,050,000	-	1,050,000	-	-	-	-	-	-	164 org	1,050,000	164 org	0%	
II	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD**	**100%**	**47,488,155,386**	**42%**	**19,920,189,556**	**100%**	**6,925,929,800**	**51%**	**3,553,517,250**	**0%**	**4,518,529,000**	**100%**	**24,438,718,556**	**100%**	**51%**	**Setwan**

	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Cakupan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**100%**	**2,810,227,751**	**51%**	**1,424,173,800**	**100%**	**376,992,000**	**30%**	**114,200,000**	**0%**	**187,734,000**	**100%**	**1,611,907,800**	**100%**	**57%**	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	40 Dkm	2,099,839,001	20 Dkm	1,209,259,400		219,442,000	Dkm	97,500,000	Dkm	167,552,000		1,376,811,400		66%	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	40 Dkm	302,888,750	20 Dkm	93,184,600	10 Dkm	58,790,000	Dkm	16,700,000	4 Dkm	19,512,000	10 Dkm	57,848,600	10 Dkm	19%	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	40 Dkm	203,750,000	20 Dkm	47,785,200	10 Dkm	49,380,000	Dkm	-	1 Dkm	670,000	10 Dkm	24,635,200	10 Dkm	12%	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun	40 Dkm	203,750,000	20 Dkm	73,944,600	10 Dkm	49,380,000	Dkm	-	Dkm	-	10 Dkm	24,944,600	10 Dkm	12%	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Cakupan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**100%**	**1,158,698,768**	**43%**	**492,689,750**	**100%**	**182,125,000**	**0%**	**-**	**0%**	**6,582,000**	**100%**	**499,271,750**	**100%**	**43%**	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	120 Dkm	319,266,352	60 Dkm	79,254,400	30 Dkm	35,380,000	Dkm	-	6 Dkm	4,965,000	30 Dkm	84,219,400	30 Dkm	26%	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan PPAS	120 Dkm	184,919,625	60 Dkm	109,115,500	30 Dkm	30,500,000	Dkm	-	Dkm	-	30 Dkm	109,115,500	30 Dkm	59%	
	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	120 Dkm	176,547,150	60 Dkm	116,083,000	30 Dkm	39,460,000	Dkm	-	6 Dkm	969,000	30 Dkm	117,052,000	30 Dkm	66%	
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD perubahan	120 Dkm	84,589,100	60 Dkm	55,173,600	30 Dkm	19,330,000	Dkm	-	Dkm	-	30 Dkm	55,173,600	30 Dkm	65%	
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah dokumen hasil pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD per semester	120 Dkm	75,015,807	60 Dkm	12,531,250	30 Dkm	24,320,000	Dkm	-	Dkm	-	30 Dkm	12,531,250	30 Dkm	17%	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pertanggungjawaban APBD	120 Dkm	318,360,735	60 Dkm	120,532,000	30 Dkm	33,135,000	Dkm		6 Dkm	648,000	30 Dkm	121,180,000	30 Dkm	38%	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	**Cakupan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100%**	**3,886,719,506**	**30%**	**1,151,509,000**	**100%**	**473,660,000**	**14%**	**64,000,000**	**0%**	**102,000,000**	**100%**	**1,253,509,000**	**100%**	**32%**	
	Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	2 Dkm	235,438,875	2 Dkm	405,904,000	2 Dkm	2,268,000	Dkm	-	Dkm	0	2 Dkm		2 Dkm	0%	
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	12 Dkm	2,211,280,631	Dkm	1,605,000	3 Dkm	39,392,000	Dkm	-	Dkm	0	3 Dkm	1,605,000	3 Dkm	0%	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	40 Org	960,000,000	20 Org	444,000,000	10 Org	264,000,000	10 Org	40,000,000	10 Org	66,000,000	10 Org	510,000,000	10 Org	53%	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	20 Org	480,000,000	10 Org	300,000,000	5 Org	168,000,000	5 Org	24,000,000	5 Org	36,000,000	5 Org	336,000,000	5 Org	70%	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Cakupan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**100%**	**9,731,351,068**	**18%**	**1,740,593,950**	**100%**	**1,060,932,000**	**0%**	**-**	**0%**	**288,317,500**	**100%**	**2,028,911,450**	**100%**	**21%**	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	160 Laporan	3,126,634,450	80 Laporan	348,410,500	40 Laporan	114,087,000	Laporan	-	1 Laporan	1,718,000	40 Laporan	350,128,500	40 Laporan	11%	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD	88 Dkm	39,657,900	2 Dkm	8,919,450	22 Dkm	2,220,000	Dkm	-	Dkm	0	22 Dkm	8,919,450	22 Dkm	22%	
	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	16 Dkm	6,565,058,720	6 Dkm	1,383,264,000	3 Dkm	944,625,000	2 Dkm	-	2 Dkm	286,599,500	3 Dkm	1,669,863,500	3 Dkm	25%	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Cakupan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**100%**	**260,000,000**	**3%**	**8,400,000**	**100%**	**38,100,000**	**0%**	**-**	**0%**	**2,690,000**	**100%**	**3,020,000**	**100%**	**1%**	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD	10 Dkm	130,000,000	5 Dkm	4,200,000	5 Dkm	19,050,000	Dkm	-	5 Dkm	2,690,000	5 Dkm	1,510,000	5 Dkm	1%	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	10 Dkm	130,000,000	5 Dkm	4,200,000	5 Dkm	19,050,000	Dkm	-	Dkm	-	5 Dkm	1,510,000	5 Dkm	1%	

	Pembahasan Kerja Sama Daerah	**Cakupan Pembahasan Kerjasama Daerah**	**100%**	**65,000,000**	**8%**	**5,135,000**	**100%**	**200,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**0**	**100%**	**1,435,000**	**100%**	**2%**	
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah dokumen bahan rekomendasi dan publikasi yang disusun	10 Dkm	65,000,000	5 Dkm	5,135,000	5 Dkm	200,000,000	Dkm	-	Dkm	-	5 Dkm	1,435,000	5 Dkm	2%	
	Fasilitasi Tugas DPRD	**Cakupan Fasilitasi Tugas DPRD**	**100%**	**29,576,158,296**	**51%**	**15,097,688,056**	**100%**	**4,594,120,800**	**73%**	**3,375,317,250**	**0%**	**3,931,205,500**	**100%**	**19,028,893,556**	**100%**	**64%**	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	144 Dkm	29,576,158,296	50 Dkm	15,097,688,056	21 Dkm	4,594,120,800	21 Dkm	3,375,317,250	Dkm	3,931,205,500	144 Dkm	19,028,893,556	144 Dkm	64%	
			Total		**98%**	**47,410,502,669**	**100%**	**22,740,212,041**	**29%**	**6,506,254,903**	**0%**	**10,708,066,945**	**100%**	**58,118,569,614**	**100%**	**127%**	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daearah pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7		9= 5+7		10 = 9/4 x 100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang																**Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Buton**
	Keuangan			**701,570,931,926**		**122,479,811,707**		**124,855,564,566**		**4,754,849,074.00**		**4,754,849,074**		**127,234,660,781**		**18%**	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**400%**	**28,445,262,957**	**100%**	**4,582,928,492**	**100%**	**8,770,934,691**	**0%**	**3,886,846,111.00**	**0%**	**3,886,846,111**	**100%**	**8,469,774,603**	**25%**	**30%**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**400%**	**616,800,000**	**100%**	**94,292,250**	**100%**	**77,839,000**	**0%**	**14,601,000.00**	**0%**	**14,601,000**	**100%**	**108,893,250**	**25%**	**18%**	
	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	38	77,000,000	2	16,788,500	12	14,890,000	12	14,601,000	12	14,601,000	14	31,389,500	-	41%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	38	77,000,000	2	22,451,500	12	76,000		-	-	-	2	22,451,500	-	29%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	38	77,000,000	2	13,438,500	12	14,731,000		-	-	-	2	13,438,500	-	17%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7	75,000,000	1	15,211,750	2	112,000		-	-	-	1	15,211,750	-	20%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7	62,000,000	1	13,313,750	2	17,000,000		-	-	-	1	13,313,750	-	21%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	145	85,400,000	1	13,088,250	48	14,790,000		-	-	-	1	13,088,250	-	15%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)	147	163,400,000		-	48	16,240,000		-	-	-	-	-	-	0%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**400%**	**12,639,756,309**	**100%**	**2,586,177,071**	**100%**	**6,896,366,306**	**0%**	**3,415,323,156.00**	**0%**	**3,415,323,156**	**100%**	**6,001,500,227**	**25%**	**47%**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang)	185	10,383,412,000	41	2,340,846,261	48	6,673,765,806.00	0	3,326,411,156	-	3,326,411,156	41	5,667,257,417	-	55%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28	189,000,000	10	84,476,000	6	89,462,000	0	27,060,000	-	27,060,000	10	111,536,000	-	59%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	23	213,100,000	5	26,819,700	6	28,964,000		-	-	-	5	26,819,700	-	13%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	25	95,944,309	4	27,265,250	7	27,500		-	-	-	4	27,265,250	-	28%	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	31	1,376,800,000	1	16,014,250	10	67,598,000	0	25,600,000	-	25,600,000	1	41,614,250	-	3%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daearah pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan lapoan keuangan akhir tahun SKPD	8	231,000,000	5	90,755,610	1	36,549,000	1	36,252,000	1	36,252,000	6	127,007,610	-	55%	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15	150,500,000		-	5	-			-	-		-	-	0%	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**400%**	**3,370,282,684**	**100%**	**20,396,850**	**100%**	**14,876,000**		-	**0%**	**-**	**100%**	**20,396,850**	**25%**	**1%**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9	229,000,000	3	12,490,750	2	16,000			-	-	3	**12,490,750**	-	5%	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	521,282,684		-					-	-		-	-	0%	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6	440,000,000	1	371,600					-	-	1	**371,600**	-	0%	
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10	670,000,000		-					-	-		-	-	0%	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13	570,000,000	1	7,159,750	4	14,860,000			-	-	1	**7,159,750**	-	1%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	43	570,000,000	1	374,750					-	-	1	**374,750**	-	0%	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	481	370,000,000		-					-	-		-	-	0%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**400%**	**1,904,423,964**	**100%**	**50,152,000**	**100%**	**58,478,000**	**0%**	**42,638,000.00**	**0%**	**42,638,000**	**100%**	**92,790,000**	**25%**	**5%**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	37	218,700,000	1	148,000	12	14,916,000		-	-	-	1	148,000	-	0%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Orang)	98	362,500,000	0	-				-	-	-	-	-	-	0%	
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11	136,800,000	2	27,427,000	3	14,792,000	3	14,589,000	3	14,589,000	5	42,016,000	-	31%	
	Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	7	128,423,964	1	222,000	2	13,670,000	2	13,483,000	2	13,483,000	3	13,705,000	-	11%	
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	89	260,000,000	83	296,000	2	14,826,000	2	14,566,000	2	14,566,000	85	14,862,000	-	6%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	29	301,000,000	7	148,000	1	74,000		-	-	-	7	148,000	-	0%	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	105	262,000,000	83	11,376,200	1	200,000		-	-	-	83	**11,376,200**	-	4%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	160	235,000,000	40	10,534,800		-			-	-	40	**10,534,800**	-	4%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**400%**	**5,190,500,000**	**100%**	**398,790,023**	**100%**	**209,365,000**	**0%**	**122,723,148.00**	**0%**	**122,723,148**	**100%**	**521,513,171**	**25%**	**10%**	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daearah pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	214,000,000	2	4,619,000	1	6,612,000		-	-	-	2	4,619,000	-	2%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	437	587,000,000	5	53,793,000	144	10,000,000		-	-	-	5	53,793,000	-	9%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	100,500,000		-					-	-		-	-	0%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	424,000,000	1	53,714,200	1	63,248,000	1	63,248,000	1	63,248,000	2	116,962,200	-	28%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	510,000,000	2	18,502,500	2	5,445,000			-	-	2	18,502,500	-	4%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50	195,000,000	20	14,980,000	1	30,280,000	0	2,000,000	-	2,000,000	20	16,980,000	-	9%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103	2,760,000,000	97	253,181,323	2	93,780,000	0	57,475,148	-	57,475,148	97	310,656,471	-	11%	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48	400,000,000		-					-	-		-	-	0%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**400%**	**2,425,000,000**	**100%**	**-**	**100%**	**113,424,000**	**0%**	-	**0%**	-	**100%**	**-**	**25%**	**0%**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	855,000,000		-		-			-	-		-	-	0%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	400,000,000		-					-	-		-	-	0%	
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21	200,000,000		-					-	-		-	-	0%	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34	255,000,000		-	3	113,424,000			-	-		-	-	0%	
	Pengadaan Aset tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	289	355,000,000		-					-	-		-	-	0%	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-		-		-			-	-	-	-	-	0%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	180,000,000		-					-	-		-	-	0%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	151	180,000,000		-					-	-		-	-	0%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**400%**	**1,158,500,000**	**100%**	**1,125,659,848**	**100%**	**1,261,488,200**	**0%**	**242,570,807.00**	**0%**	242,570,807	**100%**	**1,368,230,655**	**25%**	**118%**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	260	13,500,000	125	7,800,000	45	1,476,000	0	1,000,000.00	-	1,000,000	125	8,800,000	-	65%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	242	340,000,000	2	881,597,248	80	1,136,830,000	0	206,470,807	-	206,470,807	2	1,088,068,055	-	320%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	305,000,000		-	5	4,000,000			-	-		-	-	0%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daearah pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	500,000,000	1	236,262,600	2	119,182,200	0	35,100,000	-	35,100,000	1	271,362,600	-	54%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**400%**	**1,140,000,000**	**100%**	**307,460,450**	**100%**	**139,098,185**	**0%**	**48,990,000.00**	**0%**	48,990,000	**100%**	**356,450,450**	**25%**	**31%**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	195,000,000		-					-	-		-	-	0%	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	305,000,000	1	297,460,450	2	136,098,185	0	48,990,000	-	48,990,000	1	346,450,450	-	114%	
	Pemeliharaan Meubeuler	Jumlah Mebel yang Dipelihara	42	320,000,000		-		-			-	-		-	-	0%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	320,000,000	12	10,000,000	2	3,000,000			-	-	12	10,000,000	-	3%	
II	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase perangkat daerah yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAP**	**400%**	**669,897,355,666**	**100%**	**116,932,488,388**	**100%**	**115,254,906,325**	**0%**	**669,719,556.00**	**0%**	669,719,556	**100%**	**117,602,207,944**	**25%**	**18%**	**Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Buton**
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**400%**	**5,841,166,879**	**100%**	**784,176,498**	**100%**	**598,619,750**	**0%**	**187,189,780.00**	**0%**	187,189,780	**100%**	**971,366,278**	**25%**	**17%**	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	182	420,000,000	2	48,019,000	60	27,172,150	0	20,545,000	-	20,545,000	2	68,564,000	-	16%	
	koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	182	420,000,000	2	48,211,000	60	29,086,250			-	-	2	48,211,000	-	11%	
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Buku)	213	289,680,328	48	5,075,000	55	3,395,000			-	-	48	5,075,000	-	2%	
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Buku)	213	289,603,200	48	32,154,000	55	30,649,000			-	-	48	32,154,000	-	11%	
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Buku)	213	288,276,000	48	21,300,000	55	26,738,000	55	26,516,000	55	26,516,000	103	47,816,000	-	17%	
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Buku)	213	289,200,000	48	4,671,000	55	26,764,000			-	-	48	4,671,000	-	2%	
	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	171	1,136,000,000	6	142,724,800	55	70,516,000	0	30,260,000	-	30,260,000	6	172,984,800	-	15%	
	koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	171	660,000,000	6	133,656,880	55	109,899,000			-	-	6	133,656,880	-	20%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daearah pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	28	500,891,351	7	347,991,818	7	274,178,350	0	109,868,780	-	109,868,780	7	457,860,598	-	91%	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	70	800,000,000	10	222,000	20	74,000			-	-	10	222,000	-	0%	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	61	440,000,000	1	151,000	20	74,000			-	-	1	151,000	-	0%	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	50	307,516,000		-	15	74,000			-	-		-	-	0%	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**400%**	**3,311,200,000**	**100%**	**356,653,051**	**100%**	**171,920,000**	**0%**	**55,897,920.00**	**0%**	55,897,920	**100%**	**412,550,971**	**25%**	**12%**	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	77	600,000,000	2	71,218,500	25	68,632,000	0	33,587,920	-	33,587,920	2	104,806,420	-	17%	
	Pengelolaan sisa lebih prerhitunganAnggaran tahun sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (laporan)	73	500,000,000	1	18,968,000	24	13,688,000	24	13,505,000	24	13,505,000	25	32,473,000	-	6%	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	47	400,000,000	2	55,320,000	15	15,840,000	0	8,805,000	-	8,805,000	2	64,125,000	-	16%	
	Penata Usahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	78	300,000,000	3	17,343,000	25	130,000			-	-	3	17,343,000	-	6%	
	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	544	340,000,000	4	106,277,400	180	31,040,000			-	-	4	106,277,400	-	31%	
	Penyusunan petunjuk teknis admistrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jawaban sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Buku)	35	540,000,000	14	24,026,000	7	27,180,000			-	-	14	24,026,000	-	4%	
	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten / kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	520	631,200,000	120	63,500,151	120	15,410,000			-	-	120	63,500,151	-	10%	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**400%**	**7,182,403,200**	**100%**	**415,620,295**	**100%**	**191,122,900**	**0%**	**80,207,600.00**	**0%**	80,207,600	**100%**	**495,827,895**	**25%**	**7%**	
	koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	48	600,000,000	12	1,538,000	12	388,000			-	-	12	1,538,000	-	0%	
	rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	80	400,000,000	5	12,165,000	25	200,000			-	-	5	12,165,000	-	3%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daearah pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	96	1,080,000,000	3	186,065,120	31	76,411,400	0	33,410,000	-	33,410,000	3	219,475,120	-	20%	
	konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	62	302,403,200	2	7,385,000	20	148,000			-	-	2	7,385,000	-	2%	
	koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daera tentang penjabaran pelaksanaan apbd kab./kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	227	1,400,000,000	2	204,245,675	75	112,443,000	0	46,797,600	-	46,797,600	2	251,043,275	-	18%	
	penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	37	700,000,000	1	1,459,500	12	834,500			-	-	1	1,459,500	-	0%	
	koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendahaaran dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	46	400,000,000		-	15	148,000			-	-		-	-	0%	
	penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	271	300,000,000	1	820,000	90	74,000			-	-	1	820,000	-	0%	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Buku)	25	300,000,000		-	7	74,000			-	-		-	-	0%	
	penyusunan sisten dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	22	1,000,000,000	1	672,000	7	74,000			-	-	1	672,000	-	0%	
	pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	444	400,000,000	144	1,270,000	100	298,000			-	-	144	1,270,000	-	0%	
	Koordinasi dan penyusunan statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	121	300,000,000		-	40	30,000			-	-		-	-	0%	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**400%**	**652,362,585,587**	**100%**	**115,307,369,144**	**100%**	**114,293,243,675**	**0%**	**346,424,256.00**	**0%**	346,424,256	**100%**	**115,653,793,400**	**25%**	**18%**	
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	10	2,480,000,000		-					-	-		-	-	0%	
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	80	2,000,000,000		-					-	-		0	-	0%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daearah pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Analisis Perencanan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	47	49,600,000,000	2	3,310,833,712					-	-	2	3,310,833,712	-	7%	
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	3	4,000,000,000	0	-					-	-	-	-	-	0%	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	4	562,282,585,587	1	111,996,535,432	1	111,916,138,300	0	346,424,256	-	346,424,256	1	112,342,959,688	-	20%	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	8	28,000,000,000		-	2	2,377,105,375			-	-	-	-	-	0%	
	Pengelolaan Dana bagi hasil Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4	4,000,000,000		-					-	-		-	-	0%	
	Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	**Cakupan Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah**	**400%**	**1,200,000,000**	**100%**	**68,669,400**		**-**		-	**0%**	-	**100%**	**68,669,400**	**25%**	**6%**	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	78	600,000,000		-					-	-		-	-	0%	
	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah Bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota(orang)	396	600,000,000	96	68,669,400					-	-	96	68,669,400	-	11%	
III	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase aset yang teregistrasi**	**300%**	**3,228,313,303**	**100%**	**964,394,827**	**100%**	**829,723,550**	**0%**	**198,283,407.00**	**0%**	198,283,407	**100%**	**1,162,678,234**	**33%**	**36%**	**Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Buton**
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**400%**	**3,228,313,303**	**100%**	**964,394,827**	**100%**	**829,723,550**	**0%**	**198,283,407.00**	**0%**	198,283,407	**100%**	**1,162,678,234**	**25%**	**36%**	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	152	600,000,000	2	55,044,000	50	38,328,500		-	-	-	2	55,044,000	-	9%	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	136	222,700,000		-	45	370,000		-	-	-		-	-	0%	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	136	218,000,000	1	35,435,000	45	34,408,000		-	-	-	1	35,435,000	-	16%	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	241	200,439,200		-	80	400,000		-	-	-		-	-	0%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	16	221,206,406	1	35,736,568	5	28,795,000	0	26,190,000	-	26,190,000	1	61,926,568	-	28%	
	inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	7	249,600,000	1	10,390,000	2	370,000		-	-	-	1	10,390,000	-	4%	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	7	225,743,675	1	585,519,599	2	602,541,750	0	100,987,007	-	100,987,007	1	686,506,606	-	304%	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daearah pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	7	227,040,000	1	59,579,700	2	370,000		-	-	-	1	59,579,700	-	26%	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	7	214,600,000	1	20,490,000	2	250,000		-	-	-	1	20,490,000	-	10%	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	38	240,840,022	8	28,879,260	10	42,940,000	0	16,556,400	-	16,556,400	8	45,435,660	-	19%	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	8	204,200,000	2	65,985,000	2	30,675,000	0	28,355,000	-	28,355,000	2	94,340,000	-	46%	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	8	194,600,000	2	67,335,700	2	49,905,300	0	26,195,000	-	26,195,000	2	93,530,700	-	48%	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	261	209,344,000		-	55	370,000			-	-		-	-	0%	
				701,570,931,926		**122,479,811,707**		**124,855,564,566**		**4,754,849,074**	-	**4,754,849,074**		**127,234,660,781**		**18%**	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9=8		10 = 9/4 X 100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(K)	(Rp)	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)**	**100**	**15,811,127,249**	**100**	**5,651,803,632**	**100**	**2,206,527,053**	**29.31**	**646,827,182**	**29.31**	**646,827,182**	**129.31**	**646,827,182**	**129.31**	**4.09**	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**100**	**193,993,800**	**100**	**63,255,200**	**100**	**26,596,000**	**20.68**	**5,500,000**	**20.68**	**5,500,000**	**120.68**	**5,500,000**	**120.68**	**2.84**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20	35,735,700	10	15,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA	20	25,525,500	5	4,990,350	5	3,700,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA	20	25,525,500	10	10,990,350	5	5,310,000			-	-	-	-	-	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA	20	25,525,500	5	4,990,350	5	6,300,000			-	-	-	-	-	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA	20	25,525,500	10	10,493,800	5	4,900,000			-	-	-	-	-	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan LAKIP	20	30,630,600	10	11,600,000	5	6,386,000	4	5,500,000	4	5,500,000	4	5,500,000	20.00	17.96	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	20	25,525,500	5	4,990,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
													0.57	**785,714.29**	**2.86**	**2.57**	
															Rendah		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)**	**100**	**11,916,277,000**	**100**	**4,428,489,182**	**100**	**1,984,772,553**	**29.01**	**575,739,097**	**29.01**	**575,739,097**	**129.01**	**5,004,228,279**	**129.01**	**41.99**	
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	132	11,304,454,506	64	4,140,560,419	34	1,914,777,153	8	559,739,097	8	559,739,097	8	559,739,097	6.06	4.95	
	Penyediaan administrasi jasa pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	550,561,294	10	268,431,252	5	64,895,400	2	16,000,000	2	16,000,000	2	16,000,000	10.00	2.91	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	20	35,735,700	5	5,349,000	-	-			-	-	-	-	-	0.00	
	Penyusunan pelaporan keuangan Bulanan Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	20	25,525,500	5	14,148,511	5	5,100,000			-	-	-	-	-	0.00	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													2.50	**143,934,774.25**	**4.02**	**1.96**	
													Sangat Baik				
	Administrasi barang milik daerah pada perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi barang milik daerah pada perangkat Daerah (%)**	**100**	**70,000,000**	**100**	**16,000,000**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**100**	**16,000,000**	**100.00**	**22.86**	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20	70,000,000	5	16,000,000	-	-			-	-		-	-	0.00	
													-	-	-	-	
													Sangat Rendah				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)**	**100%**	**236,839,293**	**100**	**4,976,000**		**-**		**-**	**-**	**-**	**100**	**4,976,000**	**10,000.00**	**2.10**	
	Peningkatan sarana dan Prasarana disiplin Pegawai	Jumlah Mesin absensi dan aplikasi kepegawaian (unit)	4	20,000,000	-	-		-			-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya (set)	160	100,000,000	-	-		-			-	-	-	-	-	-	
	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	20	25,525,500	5	4,976,000					-	-	-	-	-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	11	21,313,793	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	20	70,000,000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	0.00	
													-	-	-	-	
													Sangat Rendah				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**100**	**2,091,870,636**	**100**	**811,214,750**	**100**	**121,418,000**	**42.86**	**52,043,094**	**42.86**	**52,043,094**	**143**	**863,257,844**	**142.86**	**41.27**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	80	26,546,520	40	10,500,000	20	866,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantoer	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40	265,921,916	20	194,250,750	10	16,300,000			-	-	-	-	-	0.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	40	360,567,200	20	63,940,000	10	52,500,000	6	32,620,000	6	32,620,000	6	32,620,000	15.00	9.05	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen ahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	20	30,630,600	-	-	5	684,000			-	-	-	-	-	0.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	240	1,408,204,400	120	542,524,000	60	51,068,000	15	19,423,094	15	19,423,094	15	19,423,094	6.25	1.38	
													4.20	**10,408,619**	**4.25**	**2.09**	
													Rendah				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)**	**100**	**240,000,000**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional/lapangan yang disediakan	4	160,000,000	-	-					-	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4	80,000,000	-	-					-	-		-	-	-	
													-	-	-	-	
														Sangat Rendah			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**401,861,480**	**100**	**125,836,000**	**100**	**50,056,000**	**17.20**	**8,608,991**	**17.20**	**8,608,991**	**117**	**134,444,991**	**117.20**	**33.46**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1400	10,210,200	700	5,836,000	350	1,056,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	320,600,280	24	105,000,000	12	44,000,000	2	8,608,991	2	8,608,991	2	8,608,991	4.17	2.69	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	51,051,000	5	15,000,000	5	5,000,000			-	-	-	-	-	0.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	20	20,000,000		-	-	-			-	-	-	-	-	0.00	
													0.50	**2,152,247.75**	**1.04**	**0.67**	
														Sangat Baik			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)**	**100%**	**660,285,040**	**100**	**202,032,500**	**100**	**23,684,500**	**20.84**	**4,936,000**	**20.84**	**4,936,000**	**121**	**206,968,500**	**12,084.06**	**31.35**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	160	572,285,040	80	202,032,500	40	23,684,500	10	4,936,000	10	4,936,000	10	4,936,000	6.25	0.86	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	53,000,000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20	35,000,000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
													3.33	**1,645,333.33**	**2.08**	**0.29**	
														Rendah			
													1.39	**19,865,836.05**	**1.78**	**0.95**	
														Baik			
II	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase kenaikan PAD**	**19.00**	**4,122,368,250**	**17.50**	**1,125,612,078**	**18.00**	**206,522,000**	**0.63**	**25,875,000**	**12.53**	**25,875,000**	**13**	**1,151,487,078**	**65.94**	**27.93**	
		Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya	**100**		**100**		**100**		**12.53**		**12.53**	-	**12.53**	**-**	**12.53**	**-**	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Jumlah PAD Yang Dihasilkan (M Rp)**	**186**	**4,122,368,250**	**87**	**1,125,612,078**	**45**	**206,522,000**	**0.63**	**25,875,000**	**12.53**	**25,875,000**	**100**	**1,151,487,078**	**53.51**	**27.93**	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	8	63,813,750	4	213,551,328	-	-			-	-	-	-	-	-	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8	265,000,000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	20	335,831,500	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10	200,000,000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	0.00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	20	428,100,000	10	143,400,000	5	27,478,000	3	17,425,000	3	17,425,000	3	17,425,000	15.00	4.07	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	20	102,102,000	10	102,743,000	-	-			-	-	-	-	-	0.00	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10,000	130,000,000	3,000	36,533,500	3,000	6,480,000			-	-	-	-	-	0.00	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	20	102,102,000	10	41,899,000	5	12,525,000			3	6,890,000	3	6,890,000	15.00	6.75	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	48	65,000,000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	0.00	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	20	51,051,000	5	11,000,000	-	-			-	-	-	-	-	-	
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	20	630,600,000	10	287,599,000	5	137,314,000	-	-	1	7,028,000	1	7,028,000	5.00	1.11	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20	255,255,000	5	28,000,000	-	-			-	-	-	-	-	-	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	20	375,777,400	10	97,198,000	5	17,325,000	1	8,450,000	1	8,450,000	1	8,450,000	5.00	2.25	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16	237,994,600	8	82,148,000	4	5,400,000			-	-	-	-	-	0.00	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	8	879,741,000	4	81,540,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
													0.57	**2,842,357.14**	**2.86**	**1.01**	
														Rendah			
	Jumlah	**-**	**-**	**19,933,495,499**	**-**	**6,777,415,710**	**-**	**2,413,049,053**	**-**	**672,702,182**		**672,702,182**		**7,450,117,892**		**37.37**	
													0.98	**11,354,096.60**	**2.32**	**0.98**	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
									I								
1	*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8 = 7*		*9 = 8 + 5*		*10 9/4 x 100%*		*11*
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																
	BIDANG KEPEGAWAIAN			**42,669,258,215**		**20,097,128,122**		**48,474,745,099**		**540,027,234**		**540,027,234**					
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**400**	**38,241,648,155**	**68**	**18,624,660,043**	**100**	**46,825,784,499**	**5**	**498,813,234**	**5**	**498,813,234**	**73**	**19,123,473,277**	**18.31**	**50.01**	
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**400**	**53,754,405**	**100**	**52,751,500**	**100**	**41,902,250**	**22**	**14,620,850**	**22**	**14,620,850**	**122**	**67,372,350**	**30.56**	**125.33**	**BKPSDM**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	13,754,405	2	16,826,000	2	8,281,900	-	-	-	-	2	16,826,000	22.22	122.33	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	5,000,000	1	5,455,500	1	3,642,000	-	-	-	-	1	5,455,500	25.00	109.11	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	5,000,000	1	5,438,000	1	4,129,750	-	-	-	-	1	5,438,000	25.00	108.76	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	7,000,000	1	5,822,000	1	6,699,850	-	1,259,850	-	1,259,850	1	7,081,850	25.00	101.17	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	7,000,000	1	5,947,500	1	5,787,750	-	-	-	-	1	5,947,500	25.00	84.96	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	5,000,000	1	5,347,500	1	4,998,500	1	4,998,500	1	4,998,500	2	10,346,000	50.00	206.92	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	11,000,000	2	7,915,000	2	8,362,500	1	8,362,500	1	8,362,500	3	16,277,500	37.50	147.98	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**400**	**30,048,493,750**	**95**	**18,251,180,203**	**100**	**46,578,539,029**	**15**	**436,314,954**	**15**	**436,314,954**	**110**	**18,687,495,157**	**27.50**	**62.19**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	29,979,493,750	14	18,168,059,703	14	46,541,620,029	3	436,314,954	3	436,314,954	17	18,604,374,657	30.36	62.06	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	26,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25	10,000,000	1	50,040,000	1	25,020,000	-	-	-	-	1	50,040,000	4.00	500.40	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	7,000,000	1	11,432,500	1	5,440,000	-	-	-	-	1	11,432,500	25.00	163.32	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	26,000,000	3	21,648,000	3	6,459,000	-	-	-	-	3	21,648,000	25.00	83.26	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
									I								
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**400**	**40,000,000**	**-**	-	**100**	**8,400,000**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.00**	**0.00**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	5,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	15,000,000	-	-	2	8,400,000	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	20,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**400**	**1,005,000,000**	**-**	6,660,000	**100**	**350,000**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**6,660,000**	**0.00**	**0.66**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4	25,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200	60,000,000	-	6,660,000	1	350,000	-	-	-	-	-	6,660,000	0.00	11.10	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11	15,000,000	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	60,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	25,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	4	250,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14	150,000,000	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	170,000,000	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200	250,000,000	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**400**	**753,000,000**	**73**	**172,097,460**	**100**	**112,015,000**	**-**	**24,677,200**	**-**	**24,677,200**	**73**	**196,774,660**	**18.18**	**26.13**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	3,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	30,000,000	2	35,153,000	3	45,415,000	-	10,585,000	-	10,585,000	2	45,738,000	14.29	152.46	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	-	-	11,032,000	1	-	-	-	-	-	-	11,032,000	0.00	0.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	25,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	25,000,000	-	-	1	950,000	-	695,000	-	695,000	-	695,000	0.00	2.78	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	30,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
									I								
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	35,000,000	12	-	12	-	-	-	-	-	12	-	25.00	0.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65	450,000,000	1	83,312,460	1	45,250,000	-	13,397,200	-	13,397,200	1	96,709,660	1.54	21.49	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	100,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18	55,000,000	1	42,600,000	1	20,400,000	-	-	-	-	1	42,600,000	5.56	77.45	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**400**	**5,770,000,000**	**94**	-	**100**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**94**	**-**	**23.53**	**0.00**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	150,000,000	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	54	80,000,000	14	-	17	-	-	-	-	-	14	-	25.93	0.00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	5,540,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8		2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	25.00	0.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**400**	**161,400,000**	**50**	**75,325,380**	**100**	**43,478,220**	**-**	**13,000,230**	**-**	**13,000,230**	**50**	**88,325,610**	**12.50**	**54.72**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	3,000,000	-	5,000,000	1	3,000,000	-	804,000	-	804,000	-	5,804,000	0.00	193.47	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	15,000,000	1	5,977,380	1	6,000,000	-	996,230	-	996,230	1	6,973,610	2.08	46.49	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	15,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	56	128,400,000	1	64,348,000	1	34,478,220	-	11,200,000	-	11,200,000	1	75,548,000	1.79	58.84	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**400**	**410,000,000**	**81**	**66,645,500**	**100**	**41,100,000**	**1**	**10,200,000**	**1**	**10,200,000**	**82**	**76,845,500**	**20.55**	**18.74**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47	200,000,000	11	66,645,500	12	41,100,000	1	10,200,000	1	10,200,000	12	76,845,500	25.53	38.42	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	10,000,000	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	25.00	0.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	100,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	100,000,000	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
									I								
II	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pemetaan Jabatan Pelaksana sesuai dengan Kebutuhan**	**400**	**4,427,610,060**	**40**	1,472,468,079	**100**	1,648,960,600	**-**	**41,214,000**	**-**	**41,214,000**	**40**	**1,513,682,079**	**9.89**	**34.19**	**BKPSDM**
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Cakupan Pengadaan ,Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**400**	**1,296,109,286**	**45**	495,976,044	**100**	**93,045,600**	**-**	**23,859,000**	**-**	**23,859,000**	**45**	**519,835,044**	**11.36**	**40.11**	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	4		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	8	1,100,000,000	2	454,221,044	2	69,202,000	-	23,267,000	-	23,267,000	2	477,488,044	25.00	43.41	
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	4		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4	66,109,286	1	14,492,000	1	8,249,700	-	222,000	-	222,000	1	14,714,000	25.00	22.26	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	12		-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	70,000,000	1	13,924,100	1	6,888,000	-	-	-	-	1	13,924,100	25.00	19.89	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4	60,000,000	1	13,338,900	1	8,705,900	-	370,000	-	370,000	1	13,708,900	25.00	22.85	
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Mutasi dan Promosi ASN	**Persentase Mutasi dan Promosi ASN**	**400**	**215,000,000**	**33**	**29,151,500**	**100**	**20,865,000**	**-**	**1,269,000**	**-**	**1,269,000**	**33**	**30,420,500**	**8.33**	**14.15**	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	15,000,000	-	3,152,000	1	5,888,000	-	-	-	-	-	3,152,000	0.00	21.01	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4	200,000,000	1	25,999,500	1	14,977,000	-	1,269,000	-	1,269,000	1	27,268,500	25.00	13.63	
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase Pengembangan Kompetensi ASN**	**400**	**2,751,500,774**	**14**	**905,538,135**	**100**	**1,528,374,000**	**-**	**10,006,000**	**-**	**10,006,000**	**14**	**915,544,135**	**3.39**	**33.27**	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	80	40,000,000	10	120,000,000	20	-	-	-	-	-	10	120,000,000	12.50	300.00	
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4	1,000,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	12	1,000,000,000	3	9,000,000	3	1,236,170,000	-	-	-	-	3	9,000,000	25.00	0.90	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	80	50,000,000	1	150,148,000	20	70,000,000	-	-	-	-	1	150,148,000	1.25	300.30	
	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	4	186,500,774	2	19,470,000	1	21,858,000	-	670,000	-	670,000	2	20,140,000	50.00	10.80	
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	200	20,000,000	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	1000	150,000,000	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
									I								
	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	80	30,000,000	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	2000	150,000,000	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional / Struktural	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	400	125,000,000	115	606,920,135	100	200,346,000	-	9,336,000	-	9,336,000	115	616,256,135	28.75	493.00	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**400**	**165,000,000**	**30.72**	**41,802,400**	**100**	6,676,000	**-**	**6,080,000**	**-**	**6,080,000**	**31**	**47,882,400**	**7.68**	**29.02**	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8		-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	400	100,000,000	-	11,469,000	100	6,676,000	-	6,080,000	-	6,080,000	-	17,549,000	0.00	17.55	
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3000	60,000,000	263	30,185,400	750	-	-	-	-	-	263	30,185,400	8.77	50.31	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8		-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	4	5,000,000	-	148,000	1	-	-	-	-	-	-	148,000	0.00	2.96	
Jumlah			**800**	**42,669,258,215**	**108**	**20,097,128,122**	**200**	**48,474,745,099**	**54**	**540,027,234**			**113**	**20,637,155,356**	**28**	**84**	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Tahun 2025 Pada Triwulan ke- Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	5		6		7		8=7		9 = 5+ 7		15 = 9/6 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**%**	**100**	**2,326,014,550**	**100**	**3,231,015,077**	**19%**	**615,520,440**		**615,520,440**	**100**	**2,941,534,990**		91%	BAPPEDA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**%**	**100**	**36,977,650**	**100**	**47,244,148**		**-**		**-**	**100**	**36,977,650**		78%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	4,965,300	5	6,655,000		-		**-**	5	4,965,300	100%	75%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	8		8	5,324,000		-		**-**	8	-	100%	0%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	8	10,178,850	8	5,324,000		-		**-**	8	10,178,850	100%	191%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	8	5,098,450	8	5,324,000		-		**-**	8	5,098,450	100%	96%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	8	5,186,050	8	5,324,000		-		**-**	8	5,186,050	100%	97%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	4,000,000	5	5,324,000		-		**-**	5	4,000,000	100%	75%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	7,549,000	5	13,969,148		-		**-**	5	7,549,000	100%	54%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100%**	**1,580,780,599**	**100%**	**2,125,953,537**		**558,300,789**		**558,300,789**	1	**2,139,081,388**		**101%**	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Tahun 2025 Pada Triwulan ke- Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	19	1,497,615,299	19	2,079,787,076	19	558,300,789	19	558,300,789	19	2,055,916,088	0%	99%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	61,440,000	5	18,150,000				-	5	61,440,000	100%	339%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	-	5	11,136,840		-		-	0	-	0%	0%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	16,470,300	10	12,100,000		-		-	6	16,470,300	100%	136%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10	5,255,000	10	4,779,621		-		-	10	5,255,000	100%	110%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	%	**-**	**4,993,993**	**100%**	**25,047,000**		**-**		**-**	**-**	**4,993,993**	**0%**	**20%**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	2,185,000	1	2,420,000				-	0	2,185,000	0%	90%	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	1	3,630,000				-	0	-	0%	0%	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	1	3,630,000				-	0	-	0%	0%	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	2,808,993	1	10,527,000				-	0	2,808,993	0%	27%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Tahun 2025 Pada Triwulan ke-		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Triwulan I								
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	1	2,420,000				-	0	-	0%	0%	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	1	2,420,000				-	0	-	0%	0%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**6,146,750**	**100%**	**91,665,970**		**-**		**-**		**6,146,750**		**7%**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana pegawai	unit	-	-	3	3,025,000		-		-	-	-	0%	0%	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	40	-	40	30,250,000		-		-	40	-	100%	0%	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	6,146,750	5	6,761,480	5		5	-	10	6,146,750	200%	91%	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	2	3,630,000		-		-	0	-	0%	0%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Org	-	-	2	11,699,490		-		-	0	-	0%	0%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Org	50	-	50	36,300,000		-		-	50	-	100%	0%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**440,485,182**	**100**	**521,908,090**		**27,499,651**		**27,499,651**	100	**467,984,833**		**90%**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	5	798,600		-		-	0	-	0%	0%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	-	-	3	2,420,000		-		-	0	-	0%	0%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	3	3,630,000		-		-	0	-	0%	0%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	4,487,350	12	5,324,000	1	707,350	1	707,350	12	5,194,700	109%	98%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	10,595,000	4	13,296,690		2,750,000	0	2,750,000	4	13,345,000	100%	100%	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	1	6,050,000				-	0	-	0%	0%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Tahun 2025 Pada Triwulan ke-		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Triwulan I								
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	419,768,832	1	484,000,000		24,042,301		24,042,301	1	443,811,133	100%	92%	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	5,634,000	1	6,388,800		-		-	1	5,634,000	100%	88%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peemrintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	%	**100**	**31,647,000**	**100**	**121,000,000**				-		**31,647,000**		26%	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	1	23,800,000				-	0	-	0%	0%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	-	-	1	48,400,000				-	0	-	0%	0%	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-	-	1	6,050,000				-	0	-	0%	0%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	31,647,000	1	18,150,000				-	1	31,647,000	100%	174%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	1	12,500,000				-	0	-	0%	0%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	1	12,100,000				-	0	-	0%	0%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**35,520,376**	**100%**	**51,642,800**		**5,115,000**		**5,115,000**	100	**40,635,376**		79%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	75	704,000	75	798,600					75	704,000	100%	88%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	18,302,126	12	23,958,000	2	4,409,000	2	4,409,000	14	22,711,126	117%	95%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	1,120,000	3	9,317,000			0	-	0	1,120,000	0%	12%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	15,394,250	1	17,569,200		706,000		706,000	1	16,100,250	100%	92%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**189,463,000**	100%	**246,553,532**		**24,605,000**		**24,605,000**	100	**214,068,000**		87%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Tahun 2025 Pada Triwulan ke- Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	-	-	17	199,077,833		24,605,000		**24,605,000**	0	24,605,000	0%	12%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Opearsional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	5	189,463,000	2	18,435,699	-		0	-	5	189,463,000	100%	1028%	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	1	2,420,000				-	0	-	0%	0%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	-	-	1	6,050,000				-	0	-	0%	0%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	1	8,470,000				-	0	-	0%	0%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	1	6,050,000				-	0	-	0%	0%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	1	6,050,000				-	0	-	0%	0%	
II	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai perundang-undangan yang berlaku**	**%**	**100**	**1,124,215,378**	**100**	**1,588,293,414**		**47,054,900**		**47,054,900**	100	**1,171,270,278**	100%	74%	BAPPEDA
		Persentase keselarasan program pembangunan daerah dengan program nasional	**%**													
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Cakupan penyusunan perencanaan dan pendanaan**	**%**	**100**	**707,100,389**	**100**	**543,895,049**		**47,054,900**		**47,054,900**	100	**754,155,289**	100%	139%	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	-	-	1	64,152,881		-		-	0	-	0%	0%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Tahun 2025 Pada Triwulan ke- Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	30	65,461,664	30	121,000,000		-	0	-	30	65,461,664	100%	54%	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	8,516,000	1	26,619,335		20,886,600		20,886,600	1	29,402,600	100%	110%	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	30,874,000	1	49,372,114		-	0	-	1	30,874,000	100%	63%	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	122,929,360	1	98,146,609		16,100,000	0	16,100,000	1	139,029,360	100%	142%	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	-	-	20	9,154,110			-	-	0	-	0%	0%	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	23	479,319,365	26	175,450,000	1	10,068,300	1	10,068,300	24	489,387,665	104%	279%	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Cakupan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**%**	**100**	**120,571,444**	**100%**	**393,248,669**		**-**	-	**-**	100	**120,571,444**	100%	31%	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	-	-	5	66,548,669			-	-	0	-	0%	0%	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Org	1	102,603,244	1	121,000,000		-		-	1	102,603,244	100%	85%	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	5	17,968,200	5	205,700,000		-	-	-	5	17,968,200	100%	9%	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Cakupan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**%**	**100**	**296,543,545**	**100%**	**528,976,335**		**-**	-	**-**	100	**296,543,545**	100%	56%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Tahun 2025 Pada Triwulan ke- Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	67,130,040	1	217,346,843		-	0	-	1	67,130,040	100%	31%	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerjasama	-	-	3	69,629,492		-	-	-	0	-	0%	0%	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	1	229,413,505	1	242,000,000		-	0	-	1	229,413,505	100%	95%	
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	**Cakupan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**%**	-	-	**100%**	**122,173,361**		-	-	-	0	-	0%	0%	
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	-	-	1	32,000,000		-	-	-	0	-	0%	0%	
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	-	-	1	40,173,361			-	-	0	-	0%	0%	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	1	50,000,000			-	-	0	-	0%	0%	
III	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase capaian kinerja RPD bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**%**	**100**	**515,915,180**	**100%**	**534,775,170**		**-**		**-**	100	**515,915,180**	100%	96%	BAPPEDA
		Persentase capaian kinerja RPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	**%**			100%			-	-	-	0	-	0%	-	
		Persentase capaian kinerja RPD bidang perekonomian dan sda	**%**			100%			-	-	-	0	-	0%	-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Tahun 2025 Pada Triwulan ke- Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Persentase sinkronisasi perencanaan program prioritas pusat dan daerah	**%**			100%			-	-	-	0	-	0%	-	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Cakupan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	%	**100**	**345,685,680**	**100%**	**244,582,087**		**-**		**-**	100	**345,685,680**	100%	**-**	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	-	5,809,800	1	10,068,908			0	-	0	5,809,800	0%	58%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	1	6,588,000	1	5,141,895		-	-	-	1	6,588,000	100%	128%	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	7	8,508,450	7	11,698,946		-	-	-	7	8,508,450	100%	73%	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	5,831,200	1	13,041,138		-	-	-	1	5,831,200	100%	45%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	-	13,494,700	1	10,000,000			-	-	0	13,494,700	0%	135%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Tahun 2025 Pada Triwulan ke-		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Triwulan I								
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	7	4,797,000	7	7,000,000		-	-	-	7	4,797,000	100%	69%	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	7	6,513,750	7	8,131,200		-	-	-	7	6,513,750	100%	80%	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	294,142,780	1	179,500,000		-	-	-	1	294,142,780	100%	164%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	**Cakupan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	**%**	**100**	**65,126,800**	**100%**	**90,466,248**		**-**		**-**	100	**65,126,800**	100%	72%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	7,143,200	1	9,221,900		-	-	-	1	7,143,200	100%	77%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	1	2,523,500	1	3,472,700			-	-	1	2,523,500	100%	73%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Tahun 2025 Pada Triwulan ke-		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Triwulan I								
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	7	4,936,000	7	6,788,100		-	0	-	7	4,936,000	100%	73%	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	37,857,100	1	52,184,638		-	0	-	1	37,857,100	100%	73%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	-	2,972,500	1	5,040,000		-	-	-	0	2,972,500	0%	59%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	1	3,072,000	1	4,549,600			-	-	1	3,072,000	100%	68%	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	-	3,981,500	7	5,578,100			-	-	0	3,981,500	0%	71%	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	-	2,641,000	6	3,631,210			-	-	0	2,641,000	0%	73%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Cakupan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**%**	**100**	**105,102,700**	**100%**	**199,726,835**		**-**		**-**	100	**105,102,700**			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Tahun 2025 Pada Triwulan ke-		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Triwulan I								
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	-	4,925,000	1	12,100,000		-	-	-	-	4,925,000	0%	41%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Dokumen	1	4,331,000	1	11,495,000		-	-	-	1	4,331,000	100%	38%	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	7	9,328,500	7	12,354,100		-	-	-	7	9,328,500	100%	76%	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Dokumen	1	65,114,500	1	83,930,440		-	0	-	1	65,114,500	100%	78%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	-	-	1	8,857,805		-	-	-	0	-	0%	0%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	1		1	4,439,490			-	-	1	-	100%	0%	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	1		1	18,150,000			-	-	1	-	100%	0%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Tahun 2025 Pada Triwulan ke- Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	2	21,403,700	2	48,400,000		-	-	-	2	21,403,700	100%	44%	
					3,966,145,108		**5,354,083,661**		**662,575,340**		**662,575,340**		**4,628,720,448**			

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA Pada Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (DPA Awal 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Triwulan 1		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
			4		5		6		7		8=7		9=8/4*100%		
1	*2*	*3*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	*10*
I	**PRGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**2,205,059,698**	**100%**	**4,106,405,532**	**100%**	**1,720,528,137**	**22%**	**512,352,324**	**21.91%**	**512,352,324**	**21.91%**	**23.24%**	**BRIDA**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**30,450,000**	**100%**	**37,762,532**	**100%**	**22,297,000**	**25.00%**	**9,869,000**	**25.00%**	**9,869,000**	**25.00%**	**32.41%**	**BRIDA**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dok.)	*1*	4,000,000	2	6,403,219	1	3,400,000	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*1*	4,000,000	2	3,439,800	1	1,174,000	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*1*	4,000,000	2	3,439,800	1	1,774,000	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	*1*	4,250,000	2	3,974,497	1	1,350,000	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	*1*	4,250,000	2	3,984,294	1	1,650,000	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*1*	4,700,000	2	8,295,894	1	4,400,000	*1*	*4,400,000*	1	4,400,000	*100%*	*94%*	BRIDA
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*1*	5,250,000	2	8,225,028	2	8,549,000	*1*	*5,469,000*	1	5,469,000	*100%*	*104%*	BRIDA
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**1,474,299,698**	**100%**	**2,811,254,671**	**100%**	**1,372,162,387**	**60.00%**	**451,187,470**	**60.00%**	**451,187,470**	**60.00%**	**30.60%**	**BRIDA**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*21*	1,377,299,698	36	2,712,595,090	*17*	1,344,706,137	*17*	*444,447,470*	17	444,447,470	*81%*	*32%*	BRIDA
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*1*	30,000,000	2	80,880,000	*1*	20,220,000	*1*	*6,740,000*	1	6,740,000	*100%*	*22%*	BRIDA

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA Pada Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (DPA Awal 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Triwulan 1		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
			4		5		6		7		8=7		9=8/4*100%		
1	*2*	*3*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	*10*
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*1*	7,000,000	10	5,879,581	5	3,046,250	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*12*	60,000,000	24	11,900,000	12	4,190,000	*3*	-	3	0	*25%*	*0%*	BRIDA
	Administrasi Barang Milik Daerah	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah (%)**	**100%**	**4,500,000**	**100%**	**15,933,676**	**100%**	**4,321,000**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	**BRIDA**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*1*	1,000,000	2	475,700	1	425,000	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*1*	3,500,000	3	15,457,976	1	3,896,000	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)**	**100%**	**96,500,000**	**100%**	**43,879,820**	**100%**	**22,590,750**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	**BRIDA**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	*2*	30,000,000	3	35,535,300	2	19,550,000	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*1*	3,500,000	2	8,344,520	1	3,040,750	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*50*	63,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**100%**	**211,110,000**	**100%**	**585,416,563**	**100%**	**116,005,000**	**18.37%**	**36,103,854**	**18.37%**	**36,103,854**	**18.37%**	**17.10%**	**BRIDA**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*1*	850,000	2	1,203,000	1	645,000	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA Pada Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (DPA Awal 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Triwulan 1		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
			4		5		6		7		8=7		9=8/4*100%		
1	*2*	*3*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	*10*
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*12*	6,700,000	24	15,302,413	12	5,800,000	*3*	*1,035,000*	3	1,035,000	*25%*	*15%*	BRIDA
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*12*	2,000,000	24	2,400,000	12	1,440,000	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	*1*	1,560,000	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*24*	200,000,000	48	566,511,150	24	108,120,000	*6*	*35,068,854*	6	35,068,854	*25%*	*18%*	BRIDA
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100%**	**195,000,000**	**100%**	**103,089,975**	**0%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	**BRIDA**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit)	*2*	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	*5*	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan (Unit)	*5*	75,000,000	17	103,089,975	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100%**	**75,200,000**	**100%**	**398,319,545**	**100%**	**129,603,000**	**0.00%**	**520,000**	**0.00%**	**520,000**	**0.00%**	**0.69%**	**BRIDA**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*12*	1,200,000	24	3,000,000	*12*	1,200,000	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA Pada Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (DPA Awal 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Triwulan 1		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
			4		5		6		7		8=7		9=8/4*100%		
1	*2*	*3*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	*10*
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air & Listrik	Jumah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	*12*	8,000,000	24	44,016,345	*12*	19,484,200	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*1*	66,000,000	2	351,303,200	1	108,918,800	-	*520,000*	-	520,000	*0%*	*1%*	BRIDA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)**	**100%**	**118,000,000**	**100%**	**110,748,750**	**100%**	**53,549,000**	**50.00%**	**14,672,000**	**50.00%**	**14,672,000**	**50.00%**	**12.43%**	**BRIDA**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*3*	60,000,000	6	100,748,750	*2*	46,549,000	*1*	*8,172,000*	1	8,172,000	*33%*	*14%*	BRIDA
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	*5*	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*5*	3,000,000	4	3,000,000	*2*	7,000,000	*1*	*6,500,000*	1	6,500,000	*20%*	*217%*	BRIDA
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	*1*	50,000,000	1	7,000,000	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
II	**PROGRAM PENELITAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Penelitian Hasil Kelitbangan**	**100%**	**936,000,000**	**100%**	**2,470,816,476**	**100%**	**368,450,000**	**13%**	**10,000,000**	**12.50%**	**10,000,000**	**12.50%**	**1.07%**	**BRIDA**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Cakupan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**100%**	**136,000,000**	**100%**	**442,743,977**	**100%**	**180,694,000**	**50.00%**	**10,000,000**	**50.00%**	**10,000,000**	**50.00%**	**7.35%**	**BRIDA**
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	100,000,000	4	427,448,600	*2*	180,694,000	*1*	*10,000,000*	1	10,000,000	*100%*	*10%*	BRIDA

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA Pada Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (DPA Awal 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Triwulan 1		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
			4		5		6		7		8=7		9=8/4*100%		
1	*2*	*3*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	*10*
	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1	18,000,000	2	15,295,377	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Cakupan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**100%**	**350,000,000**	**100%**	**525,000,466**	**100%**	**150,000,000**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	**BRIDA**
	Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	0	0	2	400,000,466	1	150,000,000			-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	175,000,000	1	125,000,000	-	-			-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	175,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Cakupan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**100%**	**200,000,000**	**100%**	**775,000,000**	**100%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	**BRIDA**
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usahaa Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	1	125,000,000	-	-			-	0	*0%*	*0%*	BRIDA

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA Pada Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (DPA Awal 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Triwulan 1		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
			4		5		6		7		8=7		9=8/4*100%		
1	*2*	*3*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	*10*
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian , Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	200,000,000	4	650,000,000	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
III	**PROGRAM PENELITAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Penelitian Hasil Kelitbangan**	**100%**	**250,000,000**	**100%**	**728,072,033**	**100%**	**37,756,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	**BRIDA**
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Cakupan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**100%**	**250,000,000**	**100%**	**728,072,033**	**100%**	**37,756,000**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**0.00%**	**BRIDA**
	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA

NO	Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub	Target Kinerja dan Anggaran RPD dan RENSTRA Pada Tahun		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (DPA Awal 2025)		Capaian Kinerja dan Realisasi Triwulan 1		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Total)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		OPD Penanggung Jawab
			4		5		6		7		8=7		9=8/4*100%		
1	*2*	*3*	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	*10*
	Diseminasi jenis. Prosedur dan metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	125,000,000	2	165,393,933	1	37,756,000	-		-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	125,000,000	3	562,678,100	-	-	-	-	-	0	*0%*	*0%*	BRIDA
			100%	**3,141,059,698**	**100%**	**6,577,222,008**	**100%**	**2,088,978,137**	**26.92%**	**522,352,324**	**26.92%**	**522,352,324**	**26.92%**	**16.63%**	**-**
									26.92%	**25.01%**	**26.92%**	**25.01%**			

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerh Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun..... (%)		unit
									I								
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9 = 8+5		10 = 9/4 x 100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**		**100%**	**2,790,112,159**	**100%**	**2,951,312,064**	-	**498,598,708**	-	**498,598,708**	**100%**	3,288,710,867	**100%**	65.55	Inspektorat
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**152**	**50,174,287**	**50**	**33,345,000**	**50**	**31,100,000**	-	**-**	-	-	**50**	33,345,000	**100**	2.40	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	13,884,912	12	9,004,000	12	4,600,000	-	-	-	-	12	9,004,000	12	0.65	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA (Renja) SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21	6,263,125	6	4,000,000	6	4,600,000	-	-	-	-	6	4,000,000	6	0.64	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA (Renja)SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	21	6,263,125	6	4,000,000	6	4,300,000	-	-	-	-	6	4,000,000	6	0.67	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	21	6,000,000	6	4,000,000	6	4,300,000	-	-	-	-	6	4,000,000	6	0.76	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	21	5,263,125	6	4,000,000	6	4,800,000	-	-	-	-	6	4,000,000	6	0.53	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22	7,500,000	7	4,341,000	7	4,500,000	-	-	-	-	7	4,341,000	7	0.87	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22	5,000,000	7	4,000,000	7	4,000,000	-	-	-	-	7	4,000,000	7	0.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**158**	**1,099,200,000**	**#REF!**	**1,556,629,159**	**40**	**1,651,084,286**	-	**439,493,708**	-	**439,493,708**	**40**	1,996,122,867	**40**	1.88	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	1,060,200,000	17	1,439,642,672	17	1,533,658,338	-	424,493,708	-	424,493,708	17	1,864,136,380	17	79.32	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24	23,500,000	6	108,986,487	6	109,425,948	-	15,000,000	-	15,000,000	6	123,986,487	6	22.54	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20	5,500,000	5	4,000,000	5	4,000,000	-	-	-	-	5	4,000,000	5	0.89	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerh Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun..... (%)		unit
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9 = 8+5		10 = 9/4 x 100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20	4,500,000	5	-	5	-	-	-	-	-	5	-	5	0.0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	24	5,500,000	7	4,000,000	7	4,000,000	-	-	-	-	7	4,000,000	7	0.14	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**88**	**29,000,000**	**#REF!**	**-**	**22**	**-**	-	-	-	-	**22**	-	**22**	0.0	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20	6,000,000	5	-	5	-	-	-	-	-	5	-	5	0.0	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	28	5,000,000	7	-	7	-	-	-	-	-	7	-	7	0.0	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	20	5,000,000	5	-	5	-	-	-	-	-	5	-	5	0.0	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20	13,000,000	5	-	5	-	-	-	-	-	5	-	5	0.0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**131**	**1,238,700,000**	**#REF!**	**400,541,000**	**186**	**305,559,000**	-	**-**	-	-	**186**	400,541,000	**186**	5.7	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	33	70,000,000	32	21,000,000	32	41,400,000	-	-	-	-	32	21,000,000	32	3.5	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20	6,000,000	5	-	5	-	-	-	-	-	5	-	5	0.0	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	24	20,000,000	6	-	6	-	-	-	-	-	6	-	6	0.0	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24	44,800,000	6	-	6	-	-	-	-	-	6	-	6	0.0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26	350,000,000	5	-	5	-	-	-	-	-	5	-	5	0.0	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	270	300,000,000	66	-	66	30,000,000	-	-	-	-	66	-	66	0.0	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerh Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun..... (%)		unit
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9 = 8+5		10 = 9/4 x 100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	264	447,900,000	66	379,541,000	66	234,159,000	-	-	-	-	66	379,541,000	66	0.7	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**692**	**566,971,513**	**173**	**472,845,400**	**173**	**324,832,795**	-	**36,105,000.00**	-	**36,105,000**	**173**	508,950,400	**173**	92.5	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	5,500,000	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	0.0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	5,263,125	10	-	10	-	-	-	-	-	10	-	10	0.0	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	5,263,125	5	-	5	-	-	-	-	-	5	-	5	0.0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	15,000,000	25	46,776,700	25	45,256,445	-	11,645,000	-	11,645,000	25	58,421,700	25	9.0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	6,500,000	10	13,568,700	10	3,500,350	-	2,500,000	-	2,500,000	10	16,068,700	10	3.1	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	5,263,125	15	7,200,000	15	4,320,000	-	960,000	-	960,000	15	8,160,000	15	1.1	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20	7,500,000	5	-	5	-	-	-	-	-	5	-	5	0.0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40	4,500,000	10	-	10	4,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	10	1,000,000	10	0.0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264	431,682,138	66	394,500,000	66	254,856,000	-	20,000,000	-	20,000,000	66	414,500,000	66	75.4	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	5,500,000	15	-	15	-	-	-	-	-	15	-	15	0.0	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	44	75,000,000	11	10,800,000	11	12,900,000	-	-	-	-	11	10,800,000	11	0.0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**108**	**665,578,750**	**27**	**171,670,000**	**27**	**492,026,590**	-	**-**	-	-	**27**	171,670,000	**27**	3.4	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8	50,000,000	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	0.0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8	250,000,000	2	-	2	290,100,000	-	-	-	-	2	-	2	0.0	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24	251,000,000	6	-	6	86,500,000	-	-	-	-	6	-	6	0.0	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerh Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun..... (%)		unit
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9 = 8+5		10 = 9/4 x 100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24	23,000,000	6	79,170,000	6	115,426,590	-	-	-	-	6	79,170,000	6	4.0	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4	20,000,000	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	0.0	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	8	23,000,000	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	0.0	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	15,789,375	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	0.0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	15,789,375	2	92,500,000	2		-	-	-	-	2	92,500,000	2	5.4	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	17,000,000	5	-	5	-	-	-	-	-	5	-	5	0.0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**81**	**26,300,000**	**81**	**68,559,600**	**81**	**23,944,593**	-	**2,000,000.00**	-	**2,000,000.00**	**81**	70,559,600	**81**	13.3	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240	5,300,000	60	1,000,000	60	1,000,093	-	-	-	-	60	1,000,000	60	0.1	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16	7,000,000	4	42,000,000	4	14,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	4	44,000,000	4	6.3	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	7,000,000	7	17,500,000	7	3,750,000	-	-	-	-	7	17,500,000	7	2.5	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40	7,000,000	10	8,059,600	10	5,194,500	-	-	-	-	10	8,059,600	10	0.1	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**290**	**100,000,000**	**72**	**86,522,000**	**72**	**122,764,800**	-	**21,000,000.00**	-	**21,000,000**	**72**	107,522,000	**72**	15.4	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	7,000,000	1	86,522,000	1	117,764,800	-	20,000,000	-	20,000,000	1	106,522,000	1	3.8	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72	28,000,000	18	-	18	-	-	-	-	-	18	-	18	0.0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	72	5,000,000	18	-	18	-	-	-	-	-	18	-	18	0.0	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	72	40,000,000	18	-	18	-	-	-	-	-	18	-	18	0.0	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerh Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun..... (%)		unit
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9 = 8+5		10 = 9/4 x 100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68	20,000,000	17	-	17	5,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	17	1,000,000	17	#DIV/0!	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								-	-	-	-	372				
	INSPEKTORAT DAERAH	**Kpabilitas APIP**	**IV**		**I**		**II**		-	-	-	-	**II**		**II**		
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**MeningkatnyaTindak Lanjut Temuan BPK RI**	**100%**	**2,910,935,322**	**100%**	**1,414,260,000**	**87%**	**1,072,133,000**	-	**114,000,000**	-	**114,000,000**	**87%**	1,528,260,000	**87%**		Inspektorat
		Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	**4.3**		**3.1**		**3.1**		-	-	-	-	**3.1**		**3.1**		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		**528**	**2,110,935,322**		**1,187,460,000**	**205**	**844,693,000**	-	**104,000,000**	-	**104,000,000**	**205**	1,291,460,000	**205**	4.30	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10	300,000,000	40	-	40	-	-	-	-	-	40	-	40	0.00	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	188	450,000,000	40	503,300,000	47	355,130,000	-	100,000,000	-	100,000,000	47	603,300,000	47	2.01	
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	46	300,000,000	40	245,720,000	47	109,800,000	-	4,000,000	-	4,000,000	47	249,720,000	47	0.71	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	160	350,000,000	40	141,300,000	40	167,400,000	-	-	-	-	40	141,300,000	40	0.40	
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	84	350,000,000	21	253,650,000	21	173,875,000	-	-	-	-	21	253,650,000	21	1.20	
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12	210,935,322	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3	0.00	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	28	150,000,000	7	43,490,000	7	38,488,000	-	-	-	-	7	43,490,000	7	0.05	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		**25**	**800,000,000**	**25**	**226,800,000**	**25**	**227,440,000**	-	**10,000,000**	-	**10,000,000**	**25**	236,800,000	**25**	0.59	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	40	400,000,000	10	126,000,000	10	54,640,000	-	-	-	-	10	126,000,000	10	0.32	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	60	400,000,000	15	100,800,000	15	172,800,000	-	10,000,000	-	10,000,000	15	110,800,000	15	2.77	
III	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Nilai MCP korsubgah KPK**	**55%**	**40,000,000**	**40%**	**53,250,000**	**40%**	**199,299,200**	-	**44,850,000**	-	44,850,000	**40%**	98,100,000	**40%**	3.82	Inspektorat
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		**40**	**25,689,275**	**10**	**-**	**10**	**36,399,200**	-	-	-	-	**10**	-	**10**	0.00	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	20	13,000,000	5	-	5	32,400,000	-	-	-	-	5	-	5	0.00	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerh Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun..... (%)		unit
1	2	3	4		5		6		7		8=7		9 = 8+5		10 = 9/4 x 100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	20	12,689,275	5	-	5	3,999,200	-	-	-	-	5	-	5	0.00	
	Pendampingan dan Asistensi		**528**	**103,000,000**	**132**	**53,250,000**	**132**	**162,900,000**	-	**44,850,000**	-	-	**132**	53,250,000	**132**	1.97	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	172	27,000,000	43	-	43	96,300,000	-	44,850,000	-	44,850,000	43	44,850,000	43	1.66	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	172	27,000,000	43	-	43	32,400,000	-	-	-	-	43	-	43	0.00	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12	33,000,000	3	50,000,000	3	17,100,000	-	-	-	-	3	50,000,000	3	3.13	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.	172	16,000,000	43	3,250,000	43	17,100,000	-	-	-	-	43	3,250,000	43	0.00	
				2,950,935,322		4,257,622,159		4,222,744,264		657,448,708		657,448,708		4,915,070,867		1.666	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Semester I Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggu
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8		10 = 6 + 9		11 = 10/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**Meningkat nya Pelayanan Administrasi Umum Pemerintah Kecamatan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya.** **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"** **Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun** **Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan** **Persentase Jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah yang memnuhi standar penulisan**	**100%**	**5,326,405,259**	**93.85%**	**4,090,362,036**	**100%**	**1,042,399,376**	**4.40**	**245,630,388**	**4**	**245,630,388**	**5**	**4,335,992,424**	**5.34**	**0.81**	**Kec. Lasalimu Selatan**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**32,487,000**	**100.0%**	**16,351,079**	**100%**	**8,470,000**	**57%**	**4,840,000**	**57%**	**4,840,000**	**100%**	**21,191,079**	**100%**	**0.65**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Resntra dan Renja SKPD	100%	4,641,000	Dok	749,000	6 Dok	1,210,000	6 Dok	1,210,000	6 Dok	1,210,000	6 Dok	1,959,000	6 Dok	0.42	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunya RKA-SKPD	100%	4,641,000	12 Dok	3,597,500	6 Dok	1,210,000	6 Dok	1,210,000	6 Dok	1,210,000	18 Dok	4,807,500	18 Dok	1.04	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunya Perubahan RKA-SKPD	100%	4,641,000	12 Dok	3,969,122	6 Dok	1,210,000				-	12 Dok	3,969,122	12 Dok	0.86	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunya DPA-SKPD	100%	4,641,000	19 Dok	4,105,000	9 Dok	1,210,000	9 Dok	1,210,000	9 Dok	1,210,000	28 Dok	5,315,000	28 Dok	1.15	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunya Perubahan DPA-SKPD	100%	4,641,000	16 Dok	1,895,207	9 Dok	1,210,000	-	-	-	-	16 Dok	1,895,207	16 Dok	0.41	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	100%	4,641,000	1 Lap	538,000	4 Lap	1,210,000	4 Lap	1,210,000	4 Lap	1,210,000	5 Lap	1,748,000	5 Lap	0.38	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen SOP SKPD Tersedianya Data Analisis labatan SKPD	100%	4,641,000	2 Dok	1,497,250	1 Dok	1,210,000		-		-	2 Dok	1,497,250	2 Dok	0.32	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah yang memenuhi standar penulisan**	**100%**	**4,270,427,247**	**90.83%**	**2,741,428,803**	**100%**	**833,460,036**	**25%**	**211,833,788**	**25%**	**211,833,788**	**116.25%**	**2,953,262,591**	**116.25%**	**0.69**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun	100%	4,217,530,929	106 Org/Bln	2,627,828,803	12 Org/Bln	819,668,926	12 Org/Bln	211,833,788	12 Org/Bln	211,833,788	118 Org/Bln	2,839,662,591	118 Org/Bln	0.67	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Dokumen Administrasi Pelaksanaan TugasASN	100%	18,749,640	3 Dok	26,150,000	1 Dok	4,888,400		-		-	3 Dok	26,150,000	3 Dok	1.39	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	24,133,200	4 Dok	48,000,000	1 Dok	6,292,000		-		-	4 Dok	48,000,000	4 Dok	1.99	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	5,328,796	16 Lap	4,352,000	4 Lap	1,389,322		-		-	16 Lap	4,352,000	16 Lap	0.82	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/ Semesteran SKPD	100%	4,684,681	46 Lap	35,098,000	12 Lap	1,221,388		-		-	46 Lap	35,098,000	46 Lap	7.49	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah**	**100%**	**16,707,600**	**100%**	**4,200,000**	**100%**	**4,356,000**		**1,246,000**	**0%**	**1,246,000**	**100%**	**5,446,000**	**100%**	**0.33**	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	1 Lap	16,707,600	1 Lap	4,200,000	1 Lap	4,356,000	1 Lap	1,246,000	1 Lap	1,246,000	2 Lap	5,446,000	2 Lap	0.33	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**4,791,512**	**0.00%**	**1,130,000**	**100%**	**1,249,242**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**1,130,000**	**0%**	**0.24**	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya Dokumen LPPD	100%	4,791,512	1 Dok	1,130,000	1 Dok	1,249,242				-	1 Dok	1,130,000	1	0.24	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**100%**	**540,212,400**	**100%**	**551,402,698**	**100%**	**119,054,000**	**16%**	**18,593,100**	**16%**	**18,593,100**	**116%**	**569,995,798**	**116%**	**1.06**	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Semester I Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggu
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8		10 = 6 + 9		11 = 10/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen instalasi/ penerang bangunan kantor terpasang	100%	7,425,600	1 Paket	1,516,000	1 Paket	1,936,000	1 Paket	1,936,000	1 Paket	1,936,000	2 Paket	3,452,000	2 Paket	0.46	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK, dll)	100%	37,128,000	43 Paket	61,951,988	1 Paket	9,680,000	1 Paket	4,089,100	1 Paket	4,089,100	44 Paket	66,041,088	44 Paket	1.78	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor (Makan, Minum)	100%	37,128,000	53 Paket	240,273,000	1 Paket	9,170,000	1 Paket	4,618,000	1 Paket	4,618,000	54 Paket	244,891,000	54 Paket	6.60	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya blanko, format dan bahan cetak lainnya	100%	8,353,800	11 Paket	25,312,350	1 Paket	2,178,000				-	11 Paket	25,312,350	11 Paket	3.03	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	450,177,000	120 Lap	222,349,360	11 Lap	96,090,000	116 Lap	7,950,000	116 Paket	7,950,000	236 Lap	230,299,360	236 Lap	0.51	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya** **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"**	**100%**	**171,717,000**	**100%**	**240,219,508**	**100%**	**185,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**240,219,508**	**100%**	**1.40**	
		Pengadaan Belanja modal peralatandan mesin	tersedianya peralatan dan mesin			1 Unit	15,120,000							100%	15,120,000			
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	100%	51,721,500	4 Unit	53,590,409				-	-	-	4 Unit	53,590,409	4 Unit	1	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	116,025,000	5 Unit	171,509,099	12 unit	185,000			-	-	5 Unit	171,509,099	5 Unit	1.48	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya** **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"**	**100%**	**229,729,500**	**98.33%**	**170,600,948**	**100%**	**59,895,098**	**8%**	**4,917,500**	**8%**	**4,917,500**	**106.54%**	**175,518,448**	**106.54%**	**0.76**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan Jasa surat menyurat	100%	11,602,500	32 Lap	620,000	12 Lap	3,025,000				-	32 Lap	620,000	32	0.05	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	9,282,000	27 Lap	29,197,748	1 Lap	2,420,000	1 Lap	517,500	1 Lap	517,500	28 Lap	29,715,248	28 Lap	3.20	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	100%	208,845,000	79 Lap	140,783,200	1 Lap	54,450,098	4 Lap	4,400,000	4 Lap	4,400,000	83 Lap	145,183,200	83 Lap	0.70	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya** **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"**	**100%**	**60,333,000**	**98.32%**	**365,029,000**	**100%**	**15,730,000**	**27%**	**4,200,000**	**27%**	**4,200,000**	**125.02%**	**369,229,000**	**125.02%**	**6.12**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	46,410,000	7 Unit	102,451,000	1 Unit	12,100,000	1 Unit	4,200,000	1 Unit	4,200,000	8 Unit	106,651,000	8 Unit	2.30	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	9,282,000	3 Unit	262,578,000	1 Unit	2,420,000		-		-	3 Unit	262,578,000	3 Unit	28.29	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	4,641,000			1 Unit	1,210,000				-	0	-	0	-	
II	**Meningkat nya Pelayanan Administrasi Umum Pemerintah Kecamatan**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**100%**	**92,820,000**		**7,385,900**	**100%**	**3,572,000**	**100%**	**3,572,000**	**100%**	**3,572,000**	**100%**	**10,957,900**	**1**	**0.12**	Kec. Lasalimu Selatan
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**100%**	**46,410,000**		**4,227,900**	**100%**	**1,786,000**	**100%**	**1,786,000**	**100%**	**1,786,000**	**100%**	**6,013,900**	**100%**	**0.13**	
		Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Terlaksananya Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	46,410,000	3 Lap	4,227,900	3 Lap	1,786,000	3 Lap	1,786,000	3 Lap	1,786,000	6 Lap	6,013,900	6	0	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**100%**	**46,410,000**		**3,158,000**	**100%**	**1,786,000**	**100%**	**1,786,000**	**100%**	**1,786,000**	**100%**	**4,944,000**	**100%**	**0.11**	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Semester I Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Unit Perangkat Daerah Penanggu
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8		10 = 6 + 9		11 = 10/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	46,410,000	1 Lap	3,158,000.00	1 Lap	1,786,000	1 Lap	1,786,000	1 Lap	1,786,000	2 Lap	4,944,000	2	0	
III	**Meningkat nya Pelayanan Administrasi Umum Pemerintah Kecamatan**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat/Pokmas yang terlibat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa**	**100%**	**92,820,000**		**3,946,000**	**100%**	**1,936,000**	**100%**	**1,936,000**	**100%**	**1,936,000**	**100%**	**5,882,000**	**100%**	**0.06**	**Kec. Lasalimu Selatan**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**92,820,000**		**3,946,000**	**100%**	**1,936,000**	**100%**	**1,936,000**	**100%**	**1,936,000**	**100%**	**5,882,000**	**100%**	**0.06**	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawara perencanaan pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat/Pokmas yang terlibat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	92,820,000	6 Lembaga	3,946,000	3 Lembaga	1,936,000	3 Lembaga	1,936,000	3 Lembaga	1,936,000	9	5,882,000	9	0.06	
IV	**Meningkat nya Pelayanan Administrasi Umum Pemerintah Kecamatan**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**100%**	**92,820,000**		**19,527,000**	**100%**	**3,572,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**19,527,000**	**0%**	**0.21**	**Kec. Lasalimu Selatan**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**92,820,000**		**19,527,000**	**100%**	**3,572,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**19,527,000**	**#DIV/0!**	**0.21**	
		Sinergisitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Trantibum)	100%	46,410,000	14 Lap	9,140,000	2 Lap	1,786,000	0	-		-	14 Lap	9,140,000	14 Lap	0.20	
		Harmonisasi Huabungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	46,410,000	33 Lap	10,387,000	1 Lap	1,786,000	0	-			33 Lap	10,387,000	33 Lap	0.22	
V	**Meningkat nya Pelayanan Administrasi Umum Pemerintah Kecamatan**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemrintahan Umum di Kecamatan**	**100%**	**92,820,000**		**9,043,000**	**100%**	**2,476,750**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**9,043,000**	**0%**	**0.10**	**Kec. Lasalimu Selatan**
		Penyelenggaraan Urusan Pemrintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**92,820,000**		**9,043,000**	**100%**	**2,476,750**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**9,043,000**	**0%**	**0.10**	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan keutuhan NKRI	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Hari Jadi, Karnaval dan Resepsi HUT RI)	100%	92,820,000	110 Orang	9,043,000	60 Orang	2,476,750		-		-	110 Orang	9,043,000	110 Orang	0.10	
VI	**Meningkat nya Pelayanan Administrasi Umum Pemerintah Kecamatan**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Telah Menerapkan Tata Kelola Desa yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**	**100%**	**92,820,000**		**15,229,460**	**100%**	**3,572,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**15,229,460**	**0%**	**0.16**	**Kec. Lasalimu Selatan**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**100%**	**92,820,000**		**15,229,460**		**3,572,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**15,229,460**	**0%**	**0.16**	
		Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	46,410,000	32 Dok	7,860,460	2 Dok	1,786,000		-		-	32 Dok	7,860,460	32 Dok	0.17	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	46,410,000	32 Dok	7,369,000	1 Dok	1,786,000		-		-	32 Dok	7,369,000	32 Dok	0.16	
																Rata-rata capaian Kinerja (%)	**0.04**	
																Predikat Kinerja	Rendah	
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program		**5,790,505,259**		**4,145,493,396**		**1,057,528,126**		**251,138,388**		**251,138,388**		**4,396,631,784**		**0.04**	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023) (Tahun n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7		9 = 5 + 8		10=9/4 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**UNSUR KEWILAYAHAN/ KECAMATAN**	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya,**															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"**															
		Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	**100%**	**7,938,570,795**	**89%**	**1,897,830,970**	**100%**	**1,422,486,650**	**3.36**	**549,521,460**	**3.36**	**549,521,460**	**426%**	**2,447,352,430**	**425.7**	**30.83**	**Kec. Lasalimu**
		Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan															
		Persentase Jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah yang memnuhi standar penulisan															
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**56,713,020**	**85.36%**	**-**	**100%**	**3,490,000**	**0%**	**-**	**0.0%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Resntra dan Renja SKPD	6 Dok	3,805,620	4 Dok	-	6 dok	70,000	**6 Dok**	-	0 dok	-	6 dok	-	6 Dok	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunya RKA-SKPD	6 Dok	8,817,900	5 Dok	-	6 Dok	570,000	6 Dok	-	0 dok	-	6 dok	-	6 Dok	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunya Perubahan RKA-SKPD	6 Dok	8,817,900	5 Dok	-	6 dok	570,000	0 Dok	-	0 dok	-	6 dok	-	6 Dok	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunya DPA-SKPD	9 Dok	8,817,900	6 dok	-	9 Dok	570,000	0 Dok	-	0 dok	-	6 dok	-	9 Dok	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunya Perubahan DPA-SKPD	9 Dok	8,817,900	6 dok	-	9 Dok	570,000	0 Dok	-	0 dok	-	6 dok	-	9 Dok	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Lap	8,817,900	4 Lap	-	4 Lap	570,000	0 Lap	-	0 dok	-	10 dok	-	4 Lap	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen SOP SKPD	1 Dok	8,817,900	1 Dok	-	1 Dok	570,000	0 Dok	-	0 dok	-	6 dok	-	1 Dok	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah yang memenuhi standar penulisan**	**100%**	**5,846,192,023**	**100%**	**1,287,026,229**	**100%**	**1,109,204,406**	**42.24%**	**468,583,385**	**42.24%**	**468,583,385**	**100%**	**1,755,609,614**	**100%**	**30.03**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun	10 Org/Bln	5,646,318,392	11 Org/Bln	1,243,959,297	10 Org/Bln	1,073,097,474	11 Org/Bln	468,583,385	6 bulan	468,583,385	12 bulan	1,712,542,682	11 Org/Bln	30.33	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Dokumen Administrasi Pelaksanaan TugasASN	1 Dok	173,419,931	1 Dok	37,366,932	1 Dok	8,566,932	0 Dok	-	0 bulan	-	12 bulan	37,366,932	1 Dok	21.55	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	8,817,900	1 Dok	1,900,000	1 Dok	26,400,000	0 Dok	-	0 bulan	-	0 bulan	1,900,000	1 Dok	21.55	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap	8,817,900	2 Lap	1,900,000	2 Lap	570,000	0 Lap	-	0 bulan	-	7 dok	1,900,000	2 Lap	21.55	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/ Semesteran SKPD	12 Lap	8,817,900	5 dok	1,900,000	5 dok	570,000	0 bulan	-	0 bulan	-	5 dok	1,900,000	12 Lap	21.55	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah**	**100%**	**19,492,200**	**0%**	**-**	**100%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**-**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	1 Lap	19,492,200	1 Lap	-	1 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**235,126,983**	**67.76%**	**22,400,000**	**100%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**22,400,000**	**100%**	**9.53**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	1 Peket	45,723,132	1 Peket	22,400,000	1 Peket	-	0 Peket	-	0 psg	-	20 psg	22,400,000	1 Peket	48.99	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya Dokumen LPPD	1 Dok	3,763,851	1 Dok	-	1 Dok	-	0 Dok	-	5 dok	-	5 dok	-	1 Peket	-	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 Dok	185,640,000	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 orang	-	0 orang	-	0 Dok	-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023) (Tahun n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7		9 = 5 + 8		10=9/4 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**100%**	**1,036,353,663**	**86.33%**	**259,735,541**	**100%**	**105,670,244**	**45.21%**	**47,777,150**	**45.21%**	**47,777,150**	**100%**	**307,512,691**	**100%**	**29.67**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen instalasi/ penerang bangunan kantor terpasang	1 Peket	32,487,000	2 Peket	6,982,000	1 Peket	1,150,000	0 Peket	1,150,000	0 Peket	1,150,000	1 Peket	8,132,000	1 Peket	25.03	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK, dll)	1 Peket	154,277,699	1 Peket	15,000,000	1 Peket	11,621,000	1 Peket	11,621,000	1 Peket	11,621,000	1 Peket	26,621,000	1 Peket	17.26	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor (Makan, Minum)	1 Peket	77,055,066	1 Peket	19,333,290	1 Peket	9,783,000	1 Peket	9,783,000	1 Peket	9,783,000	1 Peket	29,116,290	1 Peket	37.79	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya blanko, format dan bahan cetak lainnya	1 Peket	25,240,078	1 Peket	8,689,251	1 Peket	2,986,400	1 Peket	2,983,250	1 Peket	2,983,250	1 Peket	11,672,501	1 Peket	46.25	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Kunjungan Tamu	20 Lap	341,856,060		102,150,000		31,980,000		4,480,000		4,480,000		106,630,000		31.19	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	373,878,960	15 Lap	107,581,000	12 Lap	37,949,844	3 Lap	17,759,900	1 tahun	17,759,900	1 tahun	125,340,900	1 tahun	33.52	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	31,558,800	1 Dok	-	1 Dok	10,200,000	0 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya** **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"**	**100%**	**331,265,298**	**0%**	**225,000,000**	**100%**	**10,395,000**	**100.00%**	**10,395,000**	**0%**	**10,395,000**	**0%**	**235,395,000**	**100%**	**71**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas Perorangan atau Kenderaan Dinas Jabatan	1 unit	232,050,000	0 unit	25,000,000	1 unit	-	0 Unit	-	0 unit	-	0 unit	25,000,000	2 unit	11	
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	1 unit	12,196,548	0 unit	-	1 unit	10,395,000	0 Unit	10,395,000	0 unit	10,395,000	0 unit	10,395,000	1 unit	85	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	17,403,750	1 Unit	-	2 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	69,615,000		200,000,000		-		-		-		-		-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya** **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"**	**100%**	**84,549,738**	**100%**	**12,330,000**	**100%**	**21,830,000**	**28%**	**6,135,000**	**28.10%**	**6,135,000**	**100%**	**18,465,000**	**100%**	**21.84**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan Jasa surat menyurat	2 Lap	5,931,198	4 Lap	-	2 Lap	-	0 Lap	-	0 bulan	-	12 bulan	-	2 Lap	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Lap	37,128,000	2 Lap	12,330,000	2 Lap	3,830,000	0 Lap	1,635,000	6 bulan	1,635,000	12 bulan	13,965,000	2 Lap	37.61	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	4 Lap	41,490,540	3 Lap	-	4 Lap	18,000,000	0 Lap	4,500,000	0 Laporan	4,500,000	0 Laporan	4,500,000	4 Lap	10.85	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya** **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"**	**100%**	**328,877,870**	**100%**	**91,339,200**	**100%**	**171,897,000**	**9.67%**	**16,630,925**	**9.67%**	**16,630,925**	**100%**	**107,970,125**	**100%**	**32.83**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	189,647,870	1 Unit	43,039,200	1 Unit	40,797,000	1 Unit	16,630,925	1 Unit	16,630,925	1 Unit	59,670,125	1 Unit	31.46	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	69,615,000	1 Unit	33,300,000	1 Unit	38,000,000	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	33,300,000	1 Unit	47.83	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	69,615,000	1 Unit	15,000,000	2 Unit	93,100,000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	15,000,000	0 Unit	21.55	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**0.004%**	**71,267,195**	**11 Desa**	**-**	**11 Desa**	**9,920,000**	**0 Desa**	**9,920,000**	**11 Desa**	**9,920,000**	**11 Desa**	**9,920,000**	**11 Desa**	**13.92**	**Kec. Lasalimu**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023) (Tahun n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7		9 = 5 + 8		10=9/4 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**0.004%**	**67,320,025**	**100%**	**-**	**100%**	**9,920,000**	**100%**	**9,920,000**	**100.00%**	**9,920,000**	**100%**	**9,920,000**	**100%**	**14.74**	
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Terlaksananya Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1 Lap	67,320,025	1 Lap	-	1 Lap	9,920,000	0 Lap	9,920,000	0 Lap	9,920,000	1 Lap	9,920,000	1 Lap	15	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**100%**	**3,947,170**	**7.29%**	**-**	**100%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	CakupanFasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Lap	3,947,170	1 Lap	-	1 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat/Pokmas yang terlibat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa**	**4.45%**	**776,589,599**	**3.61%**	**158,522,175**	**50%**	**325,400,000**	**0%**	**32,798,000**	**0%**	**32,798,000**	**50%**	**191,320,175**	**50%**	**24.64**	**Kec. Lasalimu**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**4.45%**	**539,898,599**	**11 Desa**	**9,000,000**	**11 Desa**	**-**	**0 Desa**	**-**	**11 Desa**	**-**	**11 Desa**	**9,000,000**	**11 Desa**	**1.67**	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawara perencanaan pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat/Pokmas yang terlibat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa	21 Lembaga	539,898,599	21 Lembaga	9,000,000	21 Lembaga	-	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	21 Lembaga	9,000,000	21 Lembaga	1.67	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatann**		**236,691,000**		**149,522,175**		**325,400,000**		**32,798,000**		**32,798,000**		**182,320,175**		**77.03**	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawara perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawara perencanaan pembangunan di Kelurahan	21 Lembaga	51,051,000	21 Lembaga	-	21 Lembaga	-	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	21 Lembaga	-	21 Lembaga	-	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		185,640,000		149,522,175		325,400,000		32,798,000		32,798,000		182,320,175		98.21	
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**100%**	**26,761,955**	**12.48%**	**-**	**100%**	**10,185,000**	**0%**	**9,610,000**	**0%**	**9,610,000**	**100%**	**9,610,000**	**100%**	**35.91**	**Kec. Lasalimu**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**26,761,955**		**-**		**10,185,000**		**9,610,000**	**0%**	**9,610,000**	**100%**	**9,610,000**	**100%**	**35.91**	
	Sinergisitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Trantibum)	1 Lap	9,282,000	1 Lap	-	1 Lap	5,120,000	0 Lap	4,920,000	0 Lap	4,920,000	1 Lap	4,920,000	1 Lap	53.01	
	Harmonisasi Huabungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap	17,479,955	1 Lap	-	1 Lap	5,065,000	0 Lap	4,690,000	1 Lap	4,690,000	1 Lap	4,690,000	1 Lap	26.83	
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemrintahan Umum di Kecamatan**	**100%**	**39,493,583**	**100%**	**21,350,000**	**100%**	**1,634,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**21,350,000**	**100%**	**54.06**	**Kec. Lasalimu**
	Penyelenggaraan Urusan Pemrintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**39,493,583**	**0%**	**21,350,000**	**0%**	**1,634,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**21,350,000**	**100%**	**54.06**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan keutuhan NKRI	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Hari Jadi, Karnaval dan Resepsi HUT RI)	50 Orang	39,493,583	0 org	21,350,000	0 org	1,634,000	0 org	-	0 org	-	0 org	21,350,000	0 org	54.06	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023) (Tahun n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7		9 = 5 + 8		10=9/4 x100%		16
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Telah Menerapkan Tata Kelola Desa yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**	**100%**	**28,328,710**	**100%**	**-**	**100%**	**5,068,000**	**0%**	**4,920,000**	**0%**	**4,920,000**	**100%**	**4,920,000**	**100%**	**17.37**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**100%**	**28,328,710**		**-**		**5,068,000**		**4,920,000**	**0%**	**4,920,000**	**100%**	**4,920,000**	**100%**	**17.37**	
	Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dok	9,282,000	1 Dok	-	1 Dok	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 Dok	-	1 Dok	-	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dok	9,764,710	1 Dok	-	1 Dok	-	0 Tahun	-	0 Tahun	-	1 Dok	-	1 Dok	-	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dok	9,282,000	0 Dok	-	1 Dok	5,068,000	0 Dok	4,920,000	0 Dok	4,920,000	0 Dok	4,920,000	1 Dok	53.01	
														Rata-rata capaian Kinerja (%)		**6.83**	
														Predikat Kinerja		Rendah	
	Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program			**8,881,011,837**		**2,077,703,145**		**1,774,693,650**		**606,769,460**		**606,769,460**		**2,684,472,605**		**6.83**	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017-2021) (Tahun n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (Tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester II Pelaksanaan Renja		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7		9 = 5 + 8		10 = 9/4 x 100%		11
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kecamatan																
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**307**	**22,889,928,337**	**75**	**5,188,896,075**		**4,011,285,391**	**282**	**1,021,049,627**	**25%**	**1,021,049,627**		**6,209,945,702**		**27**	**KEC. PASARWAJO**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**7**	**30,683,349**	**7**	**23,381,300**		**17,414,000**	**7**	**-**	**0%**	**-**		**23,381,300**		**76**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Resntra dan Renja SKPD	1	4,452,359	1	3,012,000	1	4,048,000	1	-	**0%**	-		3,012,000		68	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	1	4,568,733	1	3,534,000	1	2,683,000	1	-	**0%**	-		3,534,000		77	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	3,180,872	1	3,502,000	1	2,683,000	1	-	**0%**	-		3,502,000		110	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	1	3,198,113	1	3,496,300	1	2,518,000	1	-	**0%**	-		3,496,300		109	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	3,232,163	1	3,506,000	1	2,518,000	1	-	**0%**	-		3,506,000		108	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1	7,744,433	1	3,485,000	1	2,964,000	1	-	**0%**	-		3,485,000		45	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	4,306,677	1	2,846,000	1	-	1	-	**#DIV/0!**	-		2,846,000		66	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah yang memenuhi standar penulisan**	**56**	**18,369,791,985**	**56**	**4,003,007,643**		**3,736,577,241**	**62**	**982,472,019**	**26%**	**982,472,019**		**4,985,479,662**		**27**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	50	18,306,650,162	50	3,957,087,843	50	3,690,441,241	53	982,472,019	**27%**	**982,472,019**		4,939,559,862		27	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		1	-	1	-	1	-	**#DIV/0!**	-		-		#DIV/0!	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	52,797,738	1	40,920,000	1	40,920,000	4	-	**0%**	-		40,920,000		78	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	5,172,150	2	-	2	2,668,000	2	-	**0%**	-		-		-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran/ triwulanan/ semesteran SKPD	2	5,171,934	2	4,999,800	2	2,548,000	2	-	**0%**	-		4,999,800		97	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah**	**12**	**12,930,375**	**12**	**-**		**-**	**12**	**-**	**#DIV/0!**	**-**		**-**		**-**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	12	12,930,375	12	-	12	-	12		#DIV/0!	-		-		-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah**	**54**	**94,410,100**		**10,500,000**		**-**	**24**	**-**	**#DIV/0!**	**-**		**10,500,000**		**11**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya sarana dan prasarana disiplin pegawai	3	-	3	-	3	-	3	-	**#DIV/0!**			-		#DIV/0!	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	50	72,410,100	20	10,500,000	20	-	20		**#DIV/0!**	-		10,500,000		15	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya pendataan melalui sistem informasi kepegawaian (disiplin Pegawai)		-		-		-		-	**#DIV/0!**	**-**		-		#DIV/0!	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017-2021) (Tahun n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (Tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester II Pelaksanaan Renja		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7		9 = 5 + 8		10 = 9/4 x 100%		11
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1	22,000,000	1	-	1	-	1	-	#DIV/0!	-		-		-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah (Perda, Perbup dll)		-													
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**104**	**2,603,750,953**		**170,931,000**		**93,463,950**	**104**	**9,640,000**	**0%**	**9,640,000**		**180,571,000**		**7**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi Listrik/ penerang bangunan kantor	10	40,385,871	10	11,170,000	10		10		**0%**	-		11,170,000		28	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	340,068,863	5	5,836,000	5		5		**0%**			5,836,000		2	
	Penyediaan perlatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2	66,000,000	2	-	2	-	2		#DIV/0!			-		-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	42	729,719,076	42	71,125,000	42	29,333,950	42	6,730,000	**0%**	6,730,000		77,855,000		11	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetakan Dan Penggandaan	15	55,066,157	15	17,000,000	15	5,750,000	15	-	**0%**			17,000,000		31	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		9,240,000		-		-		-	**0%**			-		-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	1,363,270,987	30	65,800,000	30	58,380,000	30	2,910,000	**0%**	2,910,000		68,710,000		5	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		-		-		-		-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**7**	**978,398,375**		**190,000,000**		**-**	**6**	**-**	**0%**	**-**		**190,000,000**		**19**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	189,645,500	1	25,000,000	1		1		**0%**	**-**		25,000,000		**13**	
	Pengadaan mebel	Tersedianya Mebel	2	86,202,500	2	15,000,000	2		2		**0%**	-		15,000,000		**17**	
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin	2	56,031,625	2		2		2							**-**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	646,518,750	1	150,000,000	1		1		**0%**	-		150,000,000		**23**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**47**	**735,307,325**		**179,325,800**		**106,555,200**	**47**	**28,937,608**	**0%**	**28,937,608**		**208,263,408**		**28**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan Jasa surat menyurat	5	0	5	-	5	-	5	-	#DIV/0!	-		-		#DIV/0!	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	86,202,500	12	36,600,000	12	36,600,000	12	6,137,608	**17%**	6,137,608		42,737,608		**50**	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8	64,651,875	8	-	8	-	8		#DIV/0!			-		**-**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	22	584,452,950	22	142,725,800	22	69,955,200	22	22,800,000	**33%**	22,800,000		165,525,800		**28**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**20**	**64,651,875**		**611,750,332**		**57,275,000**	**20**	**-**	**0%**	**-**		**611,750,332**		**946**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	64,651,875	10	49,475,000	10	39,275,000	10	-	**0%**	-		49,475,000		**77**	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017-2021) (Tahun n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (Tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester II Pelaksanaan Renja		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7		9 = 5 + 8		10 = 9/4 x 100%		11
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8	-	8	23,275,332	8		8	-	#DIV/0!	-		23,275,332		#DIV/0!	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	-	1	539,000,000	1		1	-	#DIV/0!	-		539,000,000		#DIV/0!	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1	-	1	-	1	18,000,000	1	-	0%	-		-		#DIV/0!	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**4**	**193,955,625**	**4**	**46,999,000**		**-**	**3**	**-**	**0%**	**-**		**46,999,000**		**24**	**KEC. PASARWAJO**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**2**	**-**	**2**	**30,520,000**		**-**	**1**	**-**	**0%**	**-**		**30,520,000**		**#DIV/0!**	
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daeran dan instansi vertikal terkait	Jumlah Desa Yang Mendapat Fasilitasi Kemiskinan	1	86,202,500	1		1		1								
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	1	-	1	30,520,000	1	-	1		#DIV/0!	-		30,520,000		#DIV/0!	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**2**	**193,955,625**	**2**	**16,479,000**		**-**	**2**	**-**	**#DIV/0!**	**-**		**16,479,000**		**8**	
	Perencanaa kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan		-		16,479,000		-			#DIV/0!	-		**16,479,000**		#DIV/0!	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	129,303,750	1	-	1	-	1		#DIV/0!	-		-		-	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	64,651,875	1	-	1	-	1		#DIV/0!	-		-		-	
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat/Pokmas yang terlibat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa**	**202**	**8,555,598,125**		**1,002,922,000**		**3,002,684,178**	**94**	**162,000,000**	**5%**	**162,000,000**		**1,164,922,000**		**14**	**KEC. PASARWAJO**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**3**	**43,101,250**		**9,900,000**		**6,775,000**	**1**	**-**	**0%**	**-**		**9,900,000**		**23**	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawara perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	43,101,250	1	9,900,000	1	6,775,000	1		**0%**	**-**		9,900,000		**23**	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	64,651,875	1		1		1		**#DIV/0!**			-		**-**	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017-2021) (Tahun n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (Tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester II Pelaksanaan Renja		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7		9 = 5 + 8		10 = 9/4 x 100%		11
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	215,506,250	1		1		1		#DIV/0!			-		-	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatann**	**36**	**7,111,706,250**		**21,022,000**		**2,023,909,178**	**18**	**-**	**0%**	**-**		**21,022,000**		**0**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Musrenbang (LPM,PKK,KT dll)	9	6,465,187,500	9	21,022,000	9	-	9	-	#DIV/0!	-		21,022,000		**0**	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	646,518,750	9	2,012,117,590	9	2,023,909,178	9	-	**0%**	-		2,012,117,590		**311**	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya (LPM,PKK,KT dll)	9	775,822,500	9		9		9		#DIV/0!					-	
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	9	387,911,250	9		9		9		#DIV/0!					-	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatann**	**9**	215,506,250		**972,000,000**		**972,000,000**	**9**	**162,000,000**		**162,000,000**		**1,134,000,000**		**526**	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya (LPM, RW)	9	215,506,250	9	972,000,000	9	972,000,000	9	162,000,000	**17%**	162,000,000		1,134,000,000		**526**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	**Cakupan Desa/Kelurahan yang memberlakukan PPKM**	**44**	969,778,125		**-**		**-**	**44**	**-**		**-**		**-**		**-**	
	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Cakupan Desa/Kelurahanyang memberlakukan penagnanan Covid-19	22	431,012,500	22	-	22	-	22	-				-		-	
	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Cakupan pengadaan peralatan pendukung pelaksanaan penangnan Covid-19	22	538,765,625	22	-	22	-	22					-		-	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Cakupan Desa/Kelurahan yang melaksanakan keg. PKK**	**110**	215,506,250		**-**		**-**	**22**	**-**		**-**		**-**		**-**	
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	22	215,506,250	22	-	22	-	22					-		-	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	22	215,506,250	22		22		22					-		-	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	22	215,506,250	22		22		22					-		-	

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017-2021) (Tahun n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (Tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester II Pelaksanaan Renja		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7		9 = 5 + 8		10 = 9/4 x 100%		11
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Cakupan Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing	22	-	22		22		22					-		#DIV/0!	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga	22	-	22		22		22					-		#DIV/0!	
IV	**PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**66**	**431,012,500**		**38,194,000**		**14,897,000**	**22**	**-**	**0%**	**-**		**38,194,000**		**9**	**KEC. PASARWAJO**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**44**	**431,012,500**		**38,194,000**		**14,897,000**	**-**	**-**	**0%**	**-**		**38,194,000**		**9**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Hari Jadi, Karnaval dan Resepsi HUT RI)	22	215,506,250	22	19,600,000		14,897,000			**0%**			19,600,000		**9**	
	Harmonisasi Huabungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksanya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22	215,506,250	22	18,594,000		-			**0%**			18,594,000		**9**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**22**	**-**	**22**	**-**		**-**	**22**	**-**	**0%**	**-**		**-**		**#DIV/0!**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan keutuhan NKRI	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Hari Jadi, Karnaval dan Resepsi HUT RI)	22	-	22	-	22	-	22		**0%**	-		-		**#DIV/0!**	
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaran urusan Pemerintahan Umum**	**48**	**431,012,500**	**-**	**30,000,000**		**30,000,000**	**4**	**-**	**0%**	**-**		**30,000,000**		**7**	**KEC. PASARWAJO**
	Penyelenggaraan Urusan Pemrintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Cakupan Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala daerah**	**48**	**431,012,500**	**66**	**30,000,000**		**30,000,000**	**4**	**-**	**0%**	**-**		**30,000,000**		**7**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	22	215,506,250	22		22		22								

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017-2021) (Tahun n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (Tahun n-1)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester II Pelaksanaan Renja		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7		9 = 5 + 8		10 = 9/4 x 100%		11
			K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	22	215,506,250	22	-	22		22								
	Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan kecamatan	4	-	22	30,000,000	4	30,000,000	4		**0%**	-		**30,000,000**		**#DIV/0!**	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Telah Menerapkan Tata Kelola Desa yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**	**143**	**646,518,750**		**-**		**-**	**143**	**-**	**#DIV/0!**	-		**-**		**0**	**KEC. PASARWAJO**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**143**	**646,518,750**	**143**	**-**	**143**	**-**	**143**	**-**	**#DIV/0!**	-		**-**		**-**	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13	215,506,250	13	-	13	-	13	-	**#DIV/0!**	-		-		-	
	Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13	215,506,250	13	-	13	-	13	-	**#DIV/0!**	-		-		-	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	215,506,250	13	-	13	-	13	-	**#DIV/0!**	-		-		-	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlasananya Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas kepala Desa dan Perangkat Desa	13	215,506,250	13	-	13	-	13	-	**#DIV/0!**	-		-		-	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa	13	215,506,250	13	-	13	-	13	-	**#DIV/0!**	-		-		-	
	Fasilitasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	13	215,506,250	13	-	13	-	13	-	**#DIV/0!**	-		-		-	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	13	215,506,250	13	-	13	-	13	-	**#DIV/0!**	-		-		-	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13	215,506,250	13	-	13	-	13	-	**#DIV/0!**	-		-		-	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13	215,506,250	13	-	13	-	13	-	**#DIV/0!**	-		-		-	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	13	107,753,125	13	-	13	-	13	-	**#DIV/0!**	-		-		-	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	13	107,753,125	13	-	13	-	13	-	**#DIV/0!**	-		-		-	
				32,717,013,337		**6,307,011,075**		**7,058,866,569**	**548**	**1,183,049,627**	**16.76%**	**1,183,049,627**	**-**	**7,460,060,702**		**23**	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester I-II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7		9 = 5 + 8		10 = 9/4 x 100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**100%**	**2,535,418,549**	**85%**	**1,126,078,334**	**100%**	**1,399,623,717**	**3.8512039**	**197,679,711**	**3.85**	**197,679,711**	**470.1%**	**1,323,758,045**	**470.1**	**52.21**	**Kec. Kapontori**
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	**100%**														
		Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	**100%**														
		Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	**100%**														
		Persentase Jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah yang memnuhi standar penulisan	**100%**														
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**36,518,549**	**100%**	**21,609,700**	**100%**	**36,518,549**	**0%**	**-**	**0.00%**	**-**	**100%**	**21,609,700**	**100%**	**59.17**	**Kec. Kapontori**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Resntra dan Renja SKPD	6 dok	**4,500,000**	6 dok	487,200.00	10 dok	**4,500,000**	6 dok	-	0 dok	-	0 dok	487,200	6 dok	10.83	Kec. Kapontori
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunya RKA-SKPD	6 dok	4,620,199	6 dok	3,912,000.00	5 dok	4,620,199	6 dok	-	0 dok	-	0 dok	3,912,000	6 dok	84.67	Kec. Kapontori
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunya Perubahan RKA-SKPD	6 dok	4,500,000	6 dok	3,565,000.00	5 dok	4,500,000	6 dok	-	0 dok	-	0 dok	3,565,000	6 dok	79.22	Kec. Kapontori
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunya DPA-SKPD	9 dok	8,100,000	6 dok	3,995,500.00	5 dok	8,100,000	6 dok	-	0 dok	-	0 dok	3,995,500	9 dok	49.33	Kec. Kapontori
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunya Perubahan DPA-SKPD	9 dok	5,700,000	6 dok	5,521,000.00	5 dok	5,700,000	6 dok	-	0 dok	-	0 dok	5,521,000	9 dok	96.86	Kec. Kapontori
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Lap	4,015,850	4 Lap	3,277,000.00	4 Lap	4,015,850	4 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	3,277,000	4 dok	81.60	Kec. Kapontori
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen SOP SKPD Jumlah Data Analisis Jabatan SKPD	1 Laporan	5,082,500	1 dok	852,000	1 Lap	5,082,500	1 dok	-	0 Lap	-	0 Lap	852,000	1 Lap	16.76	Kec. Kapontori
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah yang memenuhi standar penulisan**	**100%**	**1,910,400,000**	**100%**	**925,401,090**	**100%**	**848,883,168**	**21.49%**	**182,384,511**	**21.49%**	**182,384,511**	**100%**	**1,107,785,601**	**100%**	**57.99**	Kec. Kapontori
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan	12 Orang/Bulan	1,800,000,000	12 bulan	903,214,840	14 bulan	830,232,968	3 bulan	182,384,511	6 bulan	182,384,511	12 bulan	1,085,599,351	12 bulan	60.31	Kec. Kapontori
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa honorarium penatausahaan keuangan dan barang jasa	1 dok	29,000,000	12 Lap	13,440,000	12 bulan	6,000,000	0 bulan		0 bulan	-	12 bulan	13,440,000	12 bulan	46.34	Kec. Kapontori
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	65,000,000	12 bulan	5,400,000	12 bulan	10,800,000	0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	5,400,000	0 bulan	8.31	Kec. Kapontori
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	9,200,000	7 dok	1,669,250	7 dok	904,500	0 bulan	-	0 bulan	-	7 dok	1,669,250	7 dok	18.14	Kec. Kapontori
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	1 dok	7,200,000	5 dok	1,677,000	5 dok	945,700	0 bulan		0 bulan	-	5 dok	1,677,000	5 dok	23.29	Kec. Kapontori

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester I-II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7		9 = 5 + 8		10 = 9/4 x 100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah**	**100%**	**6,000,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	Kec. Kapontori
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya jasa honorarium penatausahaan keuangan dan barang jasa	1 Lap	6,000,000	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	Kec. Kapontori
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**51,000,000**	**67.76%**	**657,050**	**100%**	**51,000,000**	**0%**	**883,200**	**0%**	**883,200**	**100%**	**1,540,250**	**100%**	**3.02**	Kec. Kapontori
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	1 Peket	23,000,000	20 Psang	-	1 psg	23,000,000	0 psg	-	0 psg	-	20 psg	-	20 psg	-	Kec. Kapontori
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya Dokumen LPPD	1 dok	13,000,000	5 dok	657,050	5 dok	13,000,000	3 dok	883,200	5 dok	883,200	5 dok	1,540,250	5 dok	11.85	Kec. Kapontori
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Sumber daya Aparatur yg mengikuti Bimtek	6 orang	15,000,000	0 orang	-	0 orang	15,000,000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	Kec. Kapontori
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya** **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"**	**100%**	**202,700,000**	**86.33%**	**97,497,280**	**100%**	**202,700,000**	**2.60%**	**5,262,000**	**2.60%**	**5,262,000**	**100%**	**102,759,280**	**100%**	**50.70**	Kec. Kapontori
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen instalasi/ penerang bangunan kantor terpasang	1 Peket	3,000,000	12 bulan	1,541,000	12 bulan	3,000,000	0 bulan		0 bulan	-	12 bulan	1,541,000	12 bulan	51.37	Kec. Kapontori
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan ATK dan Kebutuhan lain	1 Peket	7,500,000	12 bulan	8,854,180	27 unit	7,500,000	10 unit	2,372,000	20 unit	2,372,000	20 unit	11,226,180	20 unit	149.68	Kec. Kapontori
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Kebutuhan Makan Minum Tamu	1 Peket	55,000,000	12 bulan	35,325,000	12 bulan	55,000,000	3 bulan	2,740,000	6 bulan	2,740,000	12 bulan	38,065,000	12 bulan	69.21	Kec. Kapontori
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya blanko, format dan bahan cetak lainnya	1 Peket	5,500,000	12 bulan	2,717,100	12 bulan	5,500,000	3 bulan	150,000	6 bulan	150,000	12 bulan	2,867,100	12 bulan	52.13	Kec. Kapontori
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Lap	14,000,000	1 tahun	-	0 tahun	14,000,000	0 tahun		0 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	Kec. Kapontori
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan dana untuk koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	1 Lap	105,700,000	1 tahun	49,060,000	1 tahun	105,700,000	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	49,060,000	1 tahun	46.41	Kec. Kapontori
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terbayarnya Honor tenaga pengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (TIK)	1 dok	12,000,000	0 orang operator komputer	-	2 orang operator komputer	12,000,000	0 orang operator komputer		0 orang operator komputer	-	0 orang operator komputer	-	0 orang operator komputer	-	Kec. Kapontori
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya** **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"**	**100%**	**170,000,000**	**0%**	**11,746,000**	**100%**	**170,000,000**	**0%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0%**	**11,746,000**	**100%**	**7**	**Kec. Kapontori**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	1 unit	50,000,000	0 unit	-	2 unit	50,000,000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	2 unit	-	Kec. Kapontori
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	1 unit	10,000,000	0 unit	6,428,000	1 unit	10,000,000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	6,428,000	1 unit	64.28	Kec. Kapontori
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 unit	110,000,000	0 unit	5,318,000	1 unit	110,000,000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	5,318,000	1 unit	4.83	Kec. Kapontori
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya** **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"**	**100%**	**70,000,000**	**100%**	**34,897,814**	**100%**	**70,000,000**	**5%**	**3,300,000**	**4.71%**	**3,300,000**	**100%**	**38,197,814**	**100%**	**54.57**	**Kec. Kapontori**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester I-II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7		9 = 5 + 8		10 = 9/4 x 100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Perangko,Materai dan bahan penunjang pelaksanaan administrasi SKPD	1 Laporan	3,000,000	12 bulan	1,825,950	12 bulan	3,000,000	0 bulan	-	0 bulan	-	12 bulan	1,825,950	12 bulan	60.87	Kec. Kapontori
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	17,500,000	12 bulan	2,018,000	12 bulan	17,500,000	2 bulan	300,000	6 bulan	300,000	12 bulan	2,318,000	12 bulan	13.25	Kec. Kapontori
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	49,500,000	1 Laporan	31,053,864	1 Laporan	49,500,000	1 Laporan	3,000,000	0 Laporan	3,000,000	0 Laporan	34,053,864	0 Laporan	68.80	Kec. Kapontori
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**100%**	**88,800,000**	**100%**	**34,269,400**	**100%**	**20,522,000**	**28.51%**	**5,850,000**	**28.51%**	**5,850,000**	**100%**	**40,119,400**	**100%**	**45.18**	**Kec. Siotapina**
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"															
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terbayarnya Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara dan memenuhi Perijinan kendaraan	1 unit	5,000,000	12 bulan	27,912,400	12 bulan	18,000,000	0 bulan	5,850,000	4 bulan	5,850,000	12 bulan	33,762,400	12 bulan	675.25	Kec. Kapontori
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terpeliharanya Bangunan kantor atau gedung lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	43,800,000	12 bulan	4,857,000	12 bulan	2,022,000	0 bulan	-	4 bulan	-	12 bulan	4,857,000	12 bulan	11.09	Kec. Kapontori
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terpeliharanya Bangunan kantor atau gedung lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	40,000,000	2 Unit	1,500,000	2 Unit	500,000	2 Unit		2 Unit	-	2 Unit	1,500,000	2 Unit	3.75	Kec. Siotapina
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**0.004%**	**20,000,000**	**11 Desa**	**6,645,000**	**11 Desa**	**-**	**0 Desa**	**-**	**11 Desa**	**-**	**11 Desa**	**6,645,000**	**11 Desa**	**33.23**	**Kec. Kapontori**
		Persentase peningkatan pembinaan dan layanan kantor kecamatan															
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**0.004%**	**11,000,000**	**100%**	**6,645,000**	**100%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**6,645,000**	**100%**	**60.41**	Kec. Kapontori
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan	1 Lap	11,000,000	0 tahun	6,645,000	1 tahun	-	0 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	6,645,000	1 tahun	60	Kec. Kapontori
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**100%**	**9,000,000**	**7.29%**	**-**	**100%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	Kec. Kapontori
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik	1 Lap	9,000,000	1 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	Kec. Kapontori
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat/Pokmas yang terlibat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa**	**4.45%**	**934,348,282**	**3.61%**	**3,759,000**	**50%**	**3,704,800**	**0%**	**3,704,800**	**0%**	**3,704,800**	**50%**	**7,463,800**	**50%**	**0.80**	Kec. Kapontori
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Masyarakat/Pokmas yang terlibat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa**	**4.45%**	**418,415,800**	**11 Desa**	**3,759,000**	**11 Desa**	**3,704,800**	**0 Desa**	**3,704,800**	**11 Desa**	**3,704,800**	**11 Desa**	**7,463,800**	**11 Desa**	**1.78**	Kec. Kapontori

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester I-II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7		9 = 5 + 8		10 = 9/4 x 100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawara perencanaan pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat/Pokmas yang terlibat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lap	45,715,800	1 Lap	3,759,000	1 Lap	3,704,800	0 Lap	3,704,800	1 Lap	3,704,800	1 Lap	7,463,800	1 Lap	16.33	Kec. Kapontori
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	***Persentase masyarakat/pokmas yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan di desa/kel***	**17**	**372,700,000**	**17**	**270,476,500**	**17**	**418,415,800**	**-**	**-**	**17**	**296,062,855**	**34**	**566,539,355**	**7**	152.01	Kec. Kapontori
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawara perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah desa yang melakukan proses perencanaan di Kelurahan	*2*	372,700,000	*2*	-	**2**	-			**2**	278,812,855	**4**	**450,672,355**	**1**	120.92	Kec. Kapontori
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**100%**	**65,715,800**	**12.48%**	**7,952,000**	**100%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**7,952,000**	**100%**	**12.10**	Kec. Kapontori
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**		**65,715,800**		**7,952,000**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**100%**	**7,952,000**	**100%**	**12.10**	Kec. Kapontori
	Sinergisitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penanganan trantibum tk. Kecamatan	1 Lap	20,000,000	1 Lap	3,579,000	1 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	1 Lap	3,579,000	20 orang	17.90	Kec. Kapontori
	Harmonisasi Huabungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan penanganan trantibum tk. Kecamatan	1 Lap	45,715,800	1 Lap	4,373,000	1 Lap	-	0 Lap		1 Lap	-	1 Lap	4,373,000	1 Lap	9.57	Kec. Kapontori
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemrintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemrintahan Umum di Kecamatan**	**100%**	**39,994,198**	**100%**	**5,962,000**	**100%**	**2,314,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**5,962,000**	**100%**	**14.91**	Kec. Kapontori
	Penyelenggaraan Urusan Pemrintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemrintahan Umum di Kecamatan**	**100%**	**39,994,198**	**0%**	**5,962,000**	**0%**	**2,314,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**5,962,000**	**100%**	**14.91**	Kec. Kapontori
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan keutuhan NKRI	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Hari Jadi, Karnaval dan Resepsi HUT RI)	60 Org	39,994,198	0 org	5,962,000	0 org	2,314,000	0 org	-	0 org	-	0 org	5,962,000	150 org	14.91	Kec. Siotapina
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Telah Menerapkan Tata Kelola Desa yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**	**100%**	**37,522,484**	**100%**	**10,283,000**	**100%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**10,283,000**	**100%**	**27.40**	Kec. Kapontori
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**37,522,484**		**10,283,000**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**100%**	**10,283,000**	**100%**	**27.40**	Kec. Kapontori
	Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa/keluraha	1 Tahun	18,461,898	1 tahun	3,609,000	1 tahun	-	1 tahun		1 tahun	-	1 tahun	3,609,000	1 tahun	19.55	Kec. Kapontori
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Monev APBDes dan Pengelolaan Keuangan Desa	1 Tahun	9,778,586	1 Tahun	3,287,000	1 Tahun	-	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0 Tahun	3,287,000	0 Tahun	33.61	Kec. Kapontori
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen kegiatan pembinaan PKK	1 Tahun	9,282,000	0 Tahun	3,387,000	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0 Tahun	3,387,000	0 Tahun	36.49	Kec. Kapontori

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester I-II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7		9 = 5 + 8		10 = 9/4 x 100%		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																5.54	
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program				3,632,999,313		1,160,679,334		1,405,642,517		201,384,511		201,384,511		1,362,063,845		5.54	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit OPD Penanggung Jawab
									I		II								
1	2	3	4		5		6		7		8		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat**	**100%**	**5,588,455,035**	**89%**	**965,776,073**	**100%**	**852,788,171**	**21.58**	**208,389,892**			**21.58**	**208,389,892**	**2247%**	**1,174,165,965**	**2,246.9**	**21.01**	**Kec. Wabula**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**20,884,500**	**85.36%**	**4,950,000**	**100%**	**5,030,000**	**0%**	**-**			**0.0%**	**-**	**100%**	**4,950,000**	**100%**	**23.70**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dok	3,480,750	1 lap	825,000	2 dok	740,000	-				0 dok	-	2 dok	825,000	2 dok	23.70	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA	1 dok	3,480,750	1 lap	825,000	1 dok	1,155,000	0				0 dok	-	1 dok	825,000	1 dok	23.70	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA	1 dok	3,480,750	1 dok	825,000	1 dok	860,000	0 Dok	-			0 dok	-	1 dok	825,000	dok	23.70	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA	1 dok	3,480,750	1 dok	825,000	1 dok	650,000	0 Dok	-			0 dok	-	1 dok	825,000	1 dok	23.70	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA	1 dok	3,480,750	1 dok	825,000	1 dok	975,000	0 Dok	-			0 dok	-	1 dok	825,000	1 dok	23.70	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP dan laporan hasil koordinasi penyusunan LAKIP	1 lap	3,480,750	1 lap	825,000	1 lap	650,000	0 Lap				0 dok	-	1 dok	825,000	1 dok	23.70	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen SOP SKPD Tersedianya Data Analisis Jabatan SKPD								-			0 dok	-	0	-	0	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**4,658,357,340**	**100%**	**767,037,403**	**100%**	**754,692,293**	**27.61%**	**208,389,892**			**27.61%**	**208,389,892**	**100%**	**975,427,295**	**100%**	**20.94**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang /ASN yang menerima gaji dan tunjangan	11 Org/Bln	4,524,975,000	14 bln	724,948,103	11 Org/Bln	719,402,293	3 Bln	**208,389,892**			6 bulan	**208,389,892**	12 bulan	933,337,995	11 Org/Bln	20.63	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3 dok	126,420,840	1 lap	40,440,000	4 dok	32,640,000	0 Dok	-			6 bln	-	12 bulan	40,440,000	1 Dok	31.99	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								-			0 bulan	-	0 bulan	-	1 Dok	#DIV/0!	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 lap	3,480,750	1 lap	824,300	1 lap	1,350,000	0 Lap	-			0 bulan	-	1 lap	824,300	1 lap	23.68	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	12 Lap	3,480,750	20 lap	825,000	12 Lap	1,300,000	0 bulan	-			0 bulan	-	5 dok	825,000	12 Lap	23.70	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah**	**100%**	**16,707,600**	**0%**	**-**		**4,200,000**	**0.00%**	**-**			**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**-**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	16,707,600	1 Lap			4,200,000	0 Lap	-			0 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit OPD Penanggung Jawab
									I		II								
1	2	3	4		5		6		7		8		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**46,410,000**	**67.76%**	**-**	**100%**	**6,552,000**	**0%**	**-**			**0%**	-	**100%**	**-**	**100%**	**-**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	**46,410,000**	1 set	-	1 paket	6,552,000		-			0 psg	-	1 set	-	1 Peket	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya Dokumen LPPD								-			0	-	0	-	0	-	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-			0 orang	-	0 orang	-	0 Dok	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**100%**	**178,911,840**	**86.33%**	**19,130,268**	**100%**	**23,443,678**	**0.00%**	**-**			**0.00%**	-	**100%**	**19,130,268**	**100%**	**10.69**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	2,320,500	12 bln	550,000	6 paket	605,000	0 Peket				0 Peket	-	1 Peket	6,031,368	1 Peket	259.92	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	2,320,500	12 bln	6,031,368		1,070,000						-	1 Peket	#REF!	1 Peket	#REF!	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	2,320,500		730,000		360,000						-	1 Peket	730,000	1 Peket	31.46	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	2,320,500	12 bln	2,802,400	3 paket	851,678					1 paket	-	1 Peket	2,802,400	1 Peket	120.77	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 paket	6,683,040				-					0 Lap	-	0 Lap	-	1 Lap	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 lap	140,670,000	12 bln	9,016,500	12 bln	18,957,000		-			6 bln	-	1 tahun	9,016,500	1 tahun	6.41	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	**22,276,800**				1,600,000					0 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**46,410,000**	**0%**	**67,046,000**	**100%**	**8,499,000**	**0.00%**	**-**			**0%**	-	**0%**	**67,046,000**	**100%**	**144**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas Perorangan atau Kenderaan Dinas Jabatan								-			0 unit	-	0 unit	-	0	-	
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	23,205,000	0 unit	28,877,000		-	0 Unit	-			0 unit	-	0 unit	28,877,000	1 unit	124	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 unit	23,205,000	1 Unit	38,169,000		8,499,000					1 unit	-	1 unit	38,169,000	1 unit	164	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**100%**	**298,880,400**	**100%**	**74,162,402**	**100%**	**40,121,200**	**0%**	**-**			**0.00%**	-	**100%**	**74,162,402**	**100%**	**24.81**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	5,569,200	12 bln	3,672,000	12 Lap	1,296,000	0 Lap				6 bln	-	12 bulan	3,672,000	12 Lap	65.93	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap	9,282,000	12 bln	4,207,202	12 bln	4,766,000	0 Lap				6 bulan	-	12 bulan	4,207,202	12 bln	45.33	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lap	284,029,200	12 bln	66,283,200	12 Lap	34,059,200	0 Lap				0 Laporan	-	0 Laporan	66,283,200	12 Lap	23.34	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**321,893,355**	**100%**	**33,450,000**	**100%**	**10,250,000**	**0.00%**	**-**			**#REF!**	-	**100%**	**33,450,000**	**100%**	**10.39**	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit OPD Penanggung Jawab
									I		II								
1	2	3	4		5		6		7		8		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	146,191,500	12 bln	33,450,000	1 Unit	10,250,000					1 Unit	-	1 Unit	33,450,000	1 Unit	22.88	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	175,701,855		-	1 Unit	-	0 Unit	-			0 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor dan Bangunan lainnya					-			0 Unit				0	-	0	-	0 Unit	-	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**0.004%**	**232,050,000**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0 Desa**	**-**			**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**Kec. Wabula**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**	**0.004%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**			**0.00%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	Kec. Wabula
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Terlaksananya Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait							0 Lap	-			0 Lap	-	0	-	0	-	Kec. Wabula
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	**100%**	**232,050,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**			**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**-**	Kec. Wabula
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik	7 lap	**232,050,000**	0				0 Lap	-			0 Lap	-	0	-	1 Lap	-	Kec. Wabula
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat/Pokmas yang terlibat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa**	**4.45%**	**17,867,850**	**3.61%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**			**0%**	**-**	**50%**	**-**	**50%**	**-**	Kec. Wabula
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**4.45%**	**17,867,850**	**7 desa**	**-**	**0**	**-**	**0 Desa**	**-**			**0**	**-**	**7 desa**	**-**	**11 Desa**	**-**	Kec. Wabula
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawara perencanaan pembangunan di Desa	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	7 Lembaga	17,867,850	7 desa	-			0 Lembaga	-			0 Lembaga	-	7 desa	-	21 Lembaga	-	Kec. Wabula
	Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatann**		-						-				-		-		**#DIV/0!**	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya (LPM,PKK,KT dll)							0 Lembaga	-			0 Lembaga	-	0	-	21 Lembaga	#DIV/0!	Kec. Wabula
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**100%**	**35,735,700**	**12.48%**	**-**	**100%**	**4,000,000**	**0%**	**-**			**0%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	Kec. Wabula
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**35,735,700**		**-**		**4,000,000**		**-**			**0%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	Kec. Wabula
	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Trantibum)	12 Lap	17,867,850	7 desa	-	7 lap	2,600,000	0 Lap	-			0 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	Kec. Wabula

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra		Unit OPD Penanggung Jawab
									I		II								
1	2	3	4		5		6		7		8		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 lap	17,867,850	12 bln	-	7 lap	1,400,000	0 Lap	-			7 lap	-	7 lap	-	1 Lap	-	Kec. Wabula
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemrintahan Umum di Kecamatan**	**100%**	**46,410,000**	**100%**	-	**100%**	**1,400,000**	**0%**	-			**0%**	-	**100%**	-	**100%**	-	Kec. Wabula
	Penyelenggaraan Urusan Pemrintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**46,410,000**	**100%**	-	**0%**	**1,400,000**	**0%**	-			**0%**	-	**100%**	-	**100%**	-	Kec. Wabula
	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi,konsultasi) wawasan kebangsaan dan	**jumlah orang yang mengikuti pembinaan**	**7 org**	**92,820,000**											0 org	-	0 org	-	Kec. Wabula
	penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	**jumlah laporan konflik yang ditangani**	**7 lap**	**92,820,000**											**100%**	-	**100%**	-	Kec. Wabula
	pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpian kecamatan	jumlah dokumen tugas forum komunikasi pimpinan kecamatan	12 dok	**46,410,000**		-	7 dok	**1,400,000**	0 org	-			0 org	-	**100%**	-	**100%**	-	Kec. Wabula
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Telah Menerapkan Tata Kelola Desa yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**	**100%**	**71,471,400**	**100%**	-	**100%**	-	**0%**	-				-	0	-		-	Kec. Wabula
1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	**100%**	**71,471,400**	**100%**	-		-		-				-	0	-	0	-	Kec. Wabula
1.2	Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	7 dok	35,735,700	7 desa	-				-				-	0 Dok	-	0	-	Kec. Wabula
1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	7 dok	35,735,700	7 desa	-				-				-				-	
1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-				-				-				Rendah	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																**1,174,165,965**		**3.48**	
Predikat Kinerja																			
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program				**5,991,989,985**		**965,776,073**		**858,188,171**		**208,389,892**				**208,389,892**					

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (Tahun n)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Yang Terpenuhi Sesuai Standar**	**100%**	**8,418,678,011**	**89%**	**4,877,790,346**	**100%**	**1,430,098,414**	**2.19**	**226,797,443**	**2.19**	**226,797,443**	**308%**	**5,104,587,789**	**308.3**	**60.63**	**Kec. Wolowa**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	160 Dokumen	**49,087,000**	140 Dokumen	**24,127,040**	**100%**	**8,467,900**	**7.94%**	**1,914,700**	**7.94%**	**1,914,700**	**100%**	**26,041,740**	140 Dokumen	**53.05**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	6,941,000	20 Dokumen	**2,990,850**	6 dok	1,209,700	**6 Dok**	1,914,700	0 dok	**1,914,700**	6 dok	4,905,550	20 Dokumen	70.67	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	24 Dokumen	6,941,000	20 Dokumen	3,285,450	6 Dok	1,209,700	6 Dok	-	0 dok	-	6 dok	3,285,450	20 Dokumen	47.33	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24 Dokumen	7,041,000	20 Dokumen	3,238,100	6 dok	1,209,700	0 Dok	-	0 dok	-	6 dok	3,238,100	20 Dokumen	45.99	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	36 Dokumen	7,041,000	30 Dokumen	3,829,600	9 Dok	1,209,700	0 Dok	-	0 dok	-	6 dok	3,829,600	30 Dokumen	54.39	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	36 Dokumen	6,941,000	30 Dokumen	3,631,400	9 Dok	1,209,700	0 Dok	-	0 dok	-	6 dok	3,631,400	30 Dokumen	52.32	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	7,041,000	16 Laporan	3,449,320	4 Lap	1,209,700	0 Lap		0 dok	-	10 dok	3,449,320	16 Laporan	48.99	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7,141,000	4 Dokumen	3,702,320	1 Dok	1,209,700	0 Dok	-	0 dok	-	6 dok	3,702,320	4 Dokumen	51.85	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**6,476,173,999**	119 Laporan	**3,519,112,982**	**100%**	**1,118,654,864**	**18.81%**	**210,436,443**	**18.81%**	**210,436,443**	**100%**	**3,729,549,425**	119 Laporan	**57.59**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Org/Bln	6,397,349,356	40 Org/ Bulan	**3,431,651,852**	10 Org/Bln	1,103,022,914	11 Org/Bln	210,436,443	6 bulan	210,436,443	12 bulan	3,642,088,295	40 Org/ Bulan	56.93	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dok	37,390,640	4 Dokumen	34,920,000	1 Dok	6,030,000	0 Dok	-	0 bulan	-	12 bulan	34,920,000	4 Dokumen	93.39	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dok	26,261,400	3 Dokumen	45,600,000	1 Dok	6,500,000	0 Dok	-	0 bulan	-	0 bulan	45,600,000	3 Dokumen	173.64	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koor	12 Lap	8,028,796	8 Laporan	3,624,860	2 Lap	1,839,150	0 Lap	-	0 bulan	-	7 dok	3,624,860	8 Laporan	45.15	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	72 Lap	7,143,807	48 Laporan	3,316,270	5 Lap	1,262,800	0 Lap	-	0 Lap	-	5 Lap	3,316,270	48 Laporan	46.42	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	9 Dokumen	**111,201,512**	9 Dokumen	**81,971,530**	**100%**	**13,292,550**	**0%**	-	**0%**	-	**100%**	**81,971,530**	9 Dokumen	**73.71**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	64,410,000	4 Paket	48,305,500	1 Peket	12,043,500	0 Peket		0 psg	-	20 psg	48,305,500	4 Paket	75.00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	6,791,512	4 Dokumen	3,666,030	1 Dok	1,249,050	0 Dok	-	5 dok	-	5 dok	3,666,030	4 Dokumen	53.98	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	40,000,000	1 Orang	30,000,000	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 orang	30,000,000	1 Orang	75.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	66 Dokumen	**934,166,000**	65 Dokumen	**440,386,139**	**100%**	**152,228,700**	**5.61%**	**8,539,000**	**5.61%**	**8,539,000**	**100%**	**448,925,139**	65 Dokumen	**48.06**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14,425,600	3 Paket	8,033,950	1 Peket	1,934,000	0 Peket		0 Peket	-	1 Peket	8,033,950	4 Paket	55.69	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	57,128,000	4 Paket	38,506,244	1 Peket	9,679,000	1 Peket	-	1 Peket	-	1 Peket	38,506,244	4 Paket	67.40	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan LogistiK Kantor yang Disediakan	4 Paket	73,128,000	4 Paket	39,277,500	1 Peket	9,678,000	1 Peket	4,539,000	1 Peket	4,539,000	1 Peket	43,816,500	4 Paket	59.92	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (Tahun n)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	16,353,800	4 Paket	8,593,745	1 Peket	2,177,700	1 Peket	-	1 Peket	-	1 Peket	8,593,745	4 Paket	52.55	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,600,000	2 Dokumen	599,700	0 Lap	-	0 Lap		0 Lap	-	0 Lap	599,700	2 Dokumen	266.80	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	710,177,000	48 Laporan	323,775,000	12 Lap	117,160,000	3 Lap	4,000,000	1 tahun	4,000,000	1 tahun	327,775,000	48 Laporan	46.15	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	61,353,600	4 Dokumen	21,600,000	1 Dok	11,600,000	0 Dok		0 Dok	-	1 Dok	21,600,000	4 Dokumen	35.21	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**14 Unit**	**300,358,000**	**17 Unit**	**135,853,580**	**100%**	**43,949,700**	**0.00%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**135,853,580**	17 Unit	**45**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	92,820,000	0 Unit	-	1 unit	22,750,000	0 Unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 Unit	-	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	79,692,000	6 Unit	45,585,800	1 unit	14,219,700	0 Unit		0 unit	-	0 unit	45,585,800	6 Unit	57	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	127,846,000	11 Unit	90,267,780	2 Unit	6,980,000	5 Unit		5 Unit	-	5 Unit	90,267,780	11 Unit	71	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**44 Laporan**	**342,743,500**	**44 Laporan**	**170,804,325**	**100%**	**59,768,500**	**2%**	**907,300**	**1.52%**	**907,300**	**100%**	**171,711,625**	**44 Laporan**	**50.10**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	19,616,500	8 Laporan	9,354,600	2 Lap	3,024,700	0 Lap		0 bulan	-	12 bulan	9,354,600	8 Laporan	47.69	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan	14,282,000	8 Laporan	9,315,458	2 Lap	2,319,000	0 Lap	907,300	6 bulan	907,300	12 bulan	10,222,758	8 Laporan	71.58	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	28 Laporan	308,845,000	28 Laporan	152,134,267	4 Lap	54,424,800	0 Lap	-	0 Laporan	-	0 Laporan	152,134,267	28 Laporan	49.26	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11 Unit**	**204,948,000**	**7 Unit**	**505,534,750**	**100%**	**33,736,200**	**14.82%**	**5,000,000**	**14.82%**	**5,000,000**	**100%**	**510,534,750**	**7 Unit**	**249.10**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	175,025,000	3 Unit	96,424,700	1 Unit	30,244,800	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	101,424,700	3 Unit	57.95	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	23,282,000	3 Unit	408,684,550	1 Unit	2,381,400	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	408,684,550	3 Unit	1,755.37	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	6,641,000	1 Unit	425,500	2 Unit	1,110,000	0 Unit		2 Unit	-	2 Unit	425,500	1 Unit	6.41	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pablikt di Wilayah Kecamatan**	**100%**	**79,536,888**	**11 Desa**	**29,896,570**	**11 Desa**	**12,717,000**	**0 Desa**	**-**	**11 Desa**	**-**	**11 Desa**	**29,896,570**	**11 Desa**	**37.59**	**Kec. Wolowa**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**3 Laporan**	**27,955,000**	3 Laporan	**5,976,550**	**100%**	**6,048,000**	**0%**	**-**	**0.00%**	**-**	**100%**	**5,976,550**	**3 Laporan**	**21.38**	**Kec. Wolowa**
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	27,955,000	3 Laporan	5,976,550	1 Lap	6,048,000	0 Lap	-	0 Lap	-	1 Lap	5,976,550	3 Laporan	21.38	Kec. Wolowa

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (Tahun n)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**4 Laporan**	**51,581,888**	4 Laporan	**23,920,020**	**100%**	**6,669,000**	**0%**	-	**0%**	-	**100%**	**23,920,020**	**4 Laporan**	**46.37**	**Kec. Wolowa**
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	51,581,888	4 Laporan	23,920,020	1 Lap	6,669,000	0 Lap	-	0 Lap	-	1 Lap	23,920,020	4 Laporan	46.37	Kec. Wolowa
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Ditindak Lanjuti**	**100%**	**65,112,671**	**3.61%**	**38,304,303**	**50%**	**12,277,000**	**0%**	-	**0%**	-	**50%**	**38,304,303**	**50%**	**58.83**	**Kec. Wolowa**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**4 Laporan**	**33,907,671**	**4 Laporan**	**11,896,100**	**11 Desa**	**6,228,000**	**0 Desa**	-	**11 Desa**	-	**11 Desa**	**11,896,100**	**4 Laporan**	**35.08**	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawara perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	112 Lembaga	33,907,671	112 Lembaga	11,896,100	28 Lembaga	6,228,000	28 Lembaga	-	0 Lembaga	-	21 Lembaga	11,896,100	112 Lembaga	35.08	
	Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanTingkat Kecamatan	**Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatann**	**4 Laporan**	**31,205,000**	**4 Laporan**	**26,408,203**		**6,049,000**		-		-		**26,408,203**	**4 Laporan**	**84.63**	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	112 Lembaga	31,205,000	112 Lembaga	26,408,203	28 Lembaga	6,049,000	28 Lembaga	-	0 Lembaga	-	21 Lembaga	26,408,203	112 Lembaga	84.63	
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Ditindak Lanjuti**	**100%**	**39,761,955**	**12.48%**	**22,762,363**	**100%**	**6,968,000**	**0%**	-	**0%**	-	**100%**	**22,762,363**	**100%**	**57.25**	**Kec. Wolowa**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**8 Laporan**	**39,761,955**	**8 Laporan**	**22,762,363**		**6,968,000**		-	**0%**	-	**100%**	**22,762,363**	**8 Laporan**	**57.25**	**Kec. Wolowa**
	Sinergisitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	13,282,000	4 Laporan	8,570,400	1 Lap	2,416,000	0 Lap	-	0 Lap	-	1 Lap	8,570,400	4 Laporan	64.53	Kec. Wolowa
	Harmonisasi Huabungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	26,479,955	4 Laporan	14,191,963	1 Lap	4,552,000	0 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	14,191,963	4 Laporan	53.60	Kec. Wolowa
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemrintahan Umum Yang Ditindak Lanjuti**	**100%**	**39,493,583**	**100%**	**11,289,325**	**100%**	**14,202,000**	**0%**	-	**0%**	-	**100%**	**11,289,325**	**100%**	**28.59**	**Kec. Wolowa**
	Penyelenggaraan Urusan Pemrintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**2 Laporan**	**39,493,583**	**2 Laporan**	**11,289,325**	**0%**	**14,202,000**	**0%**	-	**0%**	-	**100%**	**11,289,325**	**2 Laporan**	**28.59**	**Kec. Wolowa**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	39,493,583	100 Orang	11,289,325	0 org	14,202,000	0 org	-	0 org	-	0 org	11,289,325	100 Orang	28.59	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (Tahun n)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Ditindak Lanjuti**	**100%**	**45,328,710**	**100%**	**20,920,670**	**100%**	**7,368,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**20,920,670**	**100%**	**46.15**	**Kec. Wolowa**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**10 Dokumen**	**45,328,710**	**8 Dokumen**	**20,920,670**		**7,368,000**		**-**	**0%**	**-**	**100%**	**20,920,670**	**8 Dokumen**	**46.15**	
	Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	18,282,000	4 Dokumen	10,503,530	1 Dok	2,416,000	1 tahun	-	1 tahun	-	1 Dok	10,503,530	4 Dokumen	57.45	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	17,764,710	4 Dokumen	10,417,140	1 Dok	2,536,000	0 Tahun	-	0 Tahun	-	1 Dok	10,417,140	4 Dokumen	58.64	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	9,282,000	0 Dokumen	-	1 Dok	2,416,000	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dok	-	0 Dokumen	-	
														Rata-rata capaian Kinerja (%)		**2.61**	
														Predikat Kinerja		Rendah	
	Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program			**8,687,911,818**		**5,000,963,577**		**1,483,630,414**		**226,797,443**		**226,797,443**		**5,227,761,020**		**2.61**	

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester I-II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II								
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7 + 8		10 = 5 + 9		11=10/4 x100%		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**100%**	**6,015,551,961**	**85%**	**1,112,926,634**	**100%**	**951,958,418**	**4.014878**	**197,679,711**	**6.11**	**272,680,918**	**10.13**	**470,360,629**	**1097.7%**	**1,583,287,263**	**1,097.7**	**26.32**	**Kec. Siotapina**
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"	**100%**																
		Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun	**100%**																
		Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	**100%**																
		Persentase Jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah yang memnuhi	**100%**																
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**31,065,926**	**100%**	**8,458,000**	**100%**	**2,953,100**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0.00%**	**-**	**100%**	**8,458,000**	**100%**	**27.23**	**Kec. Siotapina**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Resntra dan Renja SKPD	6 dok	5,708,430	6 dok	1,614,000	10 dok	703,000	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	1,614,000	6 dok	28.27	Kec. Siotapina
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunya RKA-SKPD	6 dok	3,370,758	6 dok	1,229,000	5 dok	506,550	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	1,229,000	6 dok	36.46	Kec. Siotapina
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunya Perubahan RKA-SKPD	6 dok	3,370,758	6 dok	1,229,000	5 dok	506,550	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	1,229,000	6 dok	36.46	Kec. Siotapina
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Tersusunya DPA-SKPD	9 dok	4,746,351	6 dok	1,352,000	5 dok	618,500	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	1,352,000	9 dok	28.49	Kec. Siotapina
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunya Perubahan DPA-SKPD	9 dok	4,746,351	6 dok	1,352,000	5 dok	618,500	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	-	0 dok	1,352,000	9 dok	28.49	Kec. Siotapina
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Lap	4,482,278	4 Lap	1,310,000	4 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	1,310,000	4 dok	29.23	Kec. Siotapina
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen SOP SKPD Jumlah Data Analisis Jabatan SKPD	1 Laporan	4,641,000	1 dok	372,000	1 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	372,000	1 Lap	8.02	Kec. Siotapina
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah yang memenuhi standar penulisan**	**100%**	**4,624,066,224**	**100%**	**925,401,090**	**100%**	**848,883,168**	**21.49%**	**182,384,511**	**0.288**	**244,429,618**	**50.28%**	**426,814,129**	**100%**	**1,352,215,219**	**100%**	**29.24**	**Kec. Siotapina**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan	12 Orang/Bulan	4,540,388,994	12 bulan	903,214,840	14 bulan	830,232,968	3 bulan	182,384,511	3 bulan	243,525,118	6 bulan	425,909,629	12 bulan	1,329,124,469	12 bulan	29.27	Kec. Siotapina

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester I-II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II								
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7 + 8		10 = 5 + 9		11=10/4 x100%		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa honorarium penatausahaan keuangan dan barang jasa	1 dok	23,390,640	12 Lap	13,440,000	12 bulan	6,000,000	0 bulan		0 bulan	-	0 bulan	-	12 bulan	13,440,000	12 bulan	57.46	Kec. Siotapina
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	46,781,280	12 bulan	5,400,000	12 bulan	10,800,000	0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	-	0 bulan	5,400,000	0 bulan	11.54	Kec. Siotapina
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	6,295,052	7 dok	1,669,250	7 dok	904,500	0 bulan	-	0 bulan	904,500	0 bulan	904,500	7 dok	2,573,750	7 dok	40.89	Kec. Siotapina
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	1 dok	7,210,258	5 dok	1,677,000	5 dok	945,700	0 bulan		6 bulan	-	0 bulan	-	5 dok	1,677,000	5 dok	23.26	Kec. Siotapina
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah**	**100%**	**19,492,200**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**Kec. Siotapina**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya jasa honorarium penatausahaan keuangan dan barang jasa	1 Lap	19,492,200	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	Kec. Siotapina
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**402,202,983**	**67.76%**	**657,050**	**100%**	**981,050**	**0%**	**883,200**	**0.00%**	**-**	**0%**	**883,200**	**100%**	**1,540,250**	**100%**	**0.38**	**Kec. Siotapina**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	1 Peket	27,159,132	20 Psang	-	1 psg	-	0 psg	-	0 psg	-	0 psg	-	20 psg	-	20 psg	-	Kec. Siotapina
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya Dokumen LPPD	1 dok	3,763,851	5 dok	657,050	5 dok	981,050	3 dok	883,200	2 dok	-	5 dok	883,200	5 dok	1,540,250	5 dok	40.92	Kec. Siotapina
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Sumber daya Aparatur yg mengikuti Bimtek	6 orang	371,280,000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	Kec. Siotapina
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya** **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"**	**100%**	**441,665,406**	**86.33%**	**97,497,280**	**100%**	**48,035,200**	**10.95%**	**5,262,000**	**29.5%**	**14,152,000**	**40.42%**	**19,414,000**	**100%**	**116,911,280**	**100%**	**26.47**	**Kec. Siotapina**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen instalasi/ penerang bangunan kantor terpasang	1 Peket	16,591,574	12 bulan	1,541,000	12 bulan	538,000	0 bulan		6 bulan	538,000	0 bulan	538,000	12 bulan	2,079,000	12 bulan	12.53	Kec. Siotapina

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester I-II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II								
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7 + 8		10 = 5 + 9		11=10/4 x100%		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan ATK dan Kebutuhan lain	1 Peket	25,722,743	12 bulan	8,854,180	27 unit	6,704,200	10 unit	2,372,000	10 unit	2,217,000	20 unit	4,589,000	20 unit	13,443,180	20 unit	52.26	Kec. Siotapina
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan																	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Kebutuhan Makan Minum Tamu	1 Peket	38,288,250	12 bulan	35,325,000	12 bulan	8,160,000	3 bulan	2,740,000	3 bulan	3,000,000	6 bulan	5,740,000	12 bulan	41,065,000	12 bulan	107.25	Kec. Siotapina
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya blanko, format dan bahan cetak lainnya	1 Peket	11,317,079	12 bulan	2,717,100	12 bulan	900,000	3 bulan	150,000	3 bulan	-	6 bulan	150,000	12 bulan	2,867,100	12 bulan	25.33	Kec. Siotapina
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Lap	-	1 tahun	-	0 tahun	-	0 tahun		0 tahun		0 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	Kec. Siotapina
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan dana untuk koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	1 Lap	327,468,960	1 tahun	49,060,000	1 tahun	31,733,000	1 tahun	-	1 tahun	8,397,000	1 tahun	8,397,000	1 tahun	57,457,000	1 tahun	17.55	Kec. Siotapina
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terbayarnya Honor tenaga pengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (TIK)	1 dok	22,276,800	0 orang operator komputer	-	2 orang operator komputer	-	0 orang operator komputer		0 orang operator komputer		0 orang operator komputer	-	0 orang operator komputer	-	0 orang operator komputer	-	Kec. Siotapina
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya** **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"**	**100%**	**201,317,298**	**0%**	**11,746,000**	**100%**	**4,647,000**	**0%**	**-**	**100%**	**4,647,000**	**100.00%**	**4,647,000**	**0%**	**16,393,000**	**100%**	**8**	**Kec. Siotapina**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	1 unit	92,820,000	0 unit	-	2 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	2 unit	-	Kec. Siotapina
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	1 unit	44,683,548	0 unit	6,428,000	1 unit	4,647,000	0 unit	-	0 unit	4,647,000	0 unit	4,647,000	0 unit	11,075,000	1 unit	24.79	Kec. Siotapina
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 unit	63,813,750	0 unit	5,318,000	1 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	5,318,000	1 unit	8.33	Kec. Siotapina
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya** **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"**	**100%**	**105,954,030**	**100%**	**34,897,814**	**100%**	**25,936,900**	**13%**	**3,300,000**	**8.30%**	**2,152,300**	**21.02%**	**5,452,300**	**100%**	**40,350,114**	**100%**	**38.08**	**Kec. Siotapina**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Perangko,Materai dan bahan penunjang pelaksanaan administrasi SKPD	1 Laporan	5,931,198	12 bulan	1,825,950	12 bulan	1,546,300	0 bulan	-	6 bulan	1,546,300	0 bulan	1,546,300	12 bulan	3,372,250	12 bulan	56.86	Kec. Siotapina
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	12,122,292	12 bulan	2,018,000	12 bulan	2,937,000	2 bulan	300,000	4 bulan	606,000	6 bulan	906,000	12 bulan	2,924,000	12 bulan	24.12	Kec. Siotapina
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	87,900,540	1 Laporan	31,053,864	1 Laporan	21,453,600	1 Laporan	3,000,000	1 Laporan	-	0 Laporan	3,000,000	0 Laporan	34,053,864	0 Laporan	38.74	Kec. Siotapina

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester I-II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II								
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7 + 8		10 = 5 + 9		11=10/4 x100%		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**100%**	**189,787,894**	**100%**	**34,269,400**	**100%**	**20,522,000**	**28.51%**	**5,850,000**	**35.6%**	**7,300,000**	**64.08%**	**13,150,000**	**100%**	**47,419,400**	**100%**	**24.99**	**Kec. Siotapina**
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"																	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terbayarnya Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara dan memenuhi Perijinan kendaraan	1 unit	143,377,894	12 bulan	27,912,400	12 bulan	18,000,000	0 bulan	5,850,000	4 bulan	4,800,000	4 bulan	10,650,000	12 bulan	38,562,400	12 bulan	26.90	Kec. Siotapina
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terpeliharanya Bangunan kantor atau gedung lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	32,487,000	12 bulan	4,857,000	12 bulan	2,022,000	0 bulan	-	4 bulan	2,000,000	4 bulan	2,000,000	12 bulan	6,857,000	12 bulan	21.11	Kec. Siotapina
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor dan Bangunan lainnya	Terpeliharanya Bangunan kantor atau gedung lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	13,923,000	2 Unit	1,500,000	2 Unit	500,000	2 Unit		2 Unit	500,000	2 Unit	500,000	2 Unit	2,000,000	2 Unit	14.36	Kec. Siotapina
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**0.004%**	**43,418,876**	**11 Desa**	**6,645,000**	**11 Desa**	**-**	**0 Desa**	**-**	**11 Desa**	**-**	**11 Desa**	**-**	**11 Desa**	**6,645,000**	**11 Desa**	**15.30**	**Kec. Siotapina**
		Persentase peningkatan pembinaan dan layanan kantor kecamatan																	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**0.004%**	**39,471,705**	**100%**	**6,645,000**	**100%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**6,645,000**	**100%**	**16.83**	**Kec. Siotapina**
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan	1 Lap	39,471,705	0 tahun	6,645,000	1 tahun	-	0 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	6,645,000	1 tahun	17	Kec. Siotapina
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya**	**100%**	**3,947,171**	**7.29%**	**-**	**100%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**Kec. Siotapina**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester I-II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II								
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7 + 8		10 = 5 + 9		11=10/4 x100%		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik	1 Lap	3,947,171	1 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	Kec. Siotapina
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat/Pokmas yang terlibat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa**	**4.45%**	**14,210,046**	**3.61%**	**3,759,000**	**50%**	**3,704,800**	**0%**	**3,704,800**	**0%**	**-**	**0%**	**3,704,800**	**50%**	**7,463,800**	**50%**	**52.52**	**Kec. Siotapina**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Masyarakat/Pokmas yang terlibat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa**	**4.45%**	**14,210,046**	**11 Desa**	**3,759,000**	**11 Desa**	**3,704,800**	**0 Desa**	**3,704,800**	**11 Desa**	**-**	**11 Desa**	**3,704,800**	**11 Desa**	**7,463,800**	**11 Desa**	**52.52**	**Kec. Siotapina**
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawara perencanaan pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat/Pokmas yang terlibat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lap	14,210,046	1 Lap	3,759,000	1 Lap	3,704,800	0 Lap	3,704,800	1 Lap	-	1 Lap	3,704,800	1 Lap	7,463,800	1 Lap	52.52	Kec. Siotapina
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**100%**	**20,992,171**	**12.48%**	**7,952,000**	**100%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**7,952,000**	**100%**	**37.88**	**Kec. Siotapina**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**		**20,992,171**		**7,952,000**		**-**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**100%**	**7,952,000**	**100%**	**37.88**	**Kec. Siotapina**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester I-II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II								
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7 + 8		10 = 5 + 9		11=10/4 x100%		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sinergisitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan penanganan trantibum tk. Kecamatan	1 Lap	9,869,087	1 Lap	3,579,000	1 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	0 Lap	-	1 Lap	3,579,000	20 orang	36.26	Kec. Siotapina
	Harmonisasi Huabungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan penanganan trantibum tk. Kecamatan	1 Lap	11,123,084	1 Lap	4,373,000	1 Lap	-	0 Lap		1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	4,373,000	1 Lap	39.31	Kec. Siotapina
V	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemrintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemrintahan Umum di Kecamatan**	**100%**	**39,994,198**	**100%**	**5,962,000**	**100%**	**2,314,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**5,962,000**	**100%**	**14.91**	**Kec. Siotapina**
	Penyelenggaraan Urusan Pemrintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemrintahan Umum di Kecamatan**	**100%**	**39,994,198**	**0%**	**5,962,000**	**0%**	**2,314,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**5,962,000**	**100%**	**14.91**	**Kec. Siotapina**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan keutuhan NKRI	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Hari Jadi, Karnaval dan Resepsi HUT RI)	60 Org	39,994,198	0 org	5,962,000	0 org	2,314,000	0 org	-	0 org	-	0 org	-	0 org	5,962,000	150 org	14.91	Kec. Siotapina
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Telah Menerapkan Tata Kelola Desa yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**	**100%**	**37,522,484**	**100%**	**10,283,000**	**100%**	**-**	**0%**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**10,283,000**	**100%**	**27.40**	**Kec. Siotapina**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**37,522,484**		**10,283,000**		**-**		**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**10,283,000**	**100%**	**27.40**	**Kec. Siotapina**
	Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa/keluraha	1 Tahun	18,461,898	1 tahun	3,609,000	1 tahun	-	1 tahun		1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	3,609,000	1 tahun	19.55	Kec. Siotapina
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Monev APBDes dan Pengelolaan Keuangan Desa	1 Tahun	9,778,586	1 Tahun	3,287,000	1 Tahun	-	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0 Tahun	3,287,000	0 Tahun	33.61	Kec. Siotapina

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Semester I-II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II								
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7 + 8		10 = 5 + 9		11=10/4 x100%		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen kegiatan pembinaan PKK	1 Tahun	9,282,000	0 Tahun	3,387,000	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0 Tahun	-	0 Tahun	3,387,000	0 Tahun	36.49	Kec. Siotapina
																Rata-rata capaian Kinerja (%)		**7.68**	
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah	
	Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program			**6,171,689,736**		**1,147,527,634**		**957,977,218**		**201,384,511**		**272,680,918**		**474,065,429**		**1,621,593,063**		**7.68**	

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh Program (Program 1 s.d. Program 6)			
Predikat Kinerja dari seluruh Program (Program 1 s.d. Program 6)			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya kemauan yang kuat bagi para pegawai Kantor Kecamatan Siotapina dalam menjalankan tugas yang diemban dan saling membantu dalam proses pencapaian kinerja SKPD

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : kurangnya anggaran terutama dibidang yang berkaitan dengan kelembagan masyarakat

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan berikutnya : anggaran bisa di realisasikan sesuai RAB

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya : kerjasama antar perencana Dinas dan Bappeda

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN I (JANUARI S.D MARET 2025) KABUPATEN BUTON

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1)Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**10,518,568,363**	**100 %**	**2,364,416,422**	**100 %**	**1,806,573,849**	**100 %**	**491,052,113**	**100 %**	**491,052,113**	**100 %**	**2,855,468,535**	**100 %**		**Badan Kesbangpol**
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**84,000,000**	**100%**	**44,425,450**	**100%**	**28,589,000**	**100%**	**461,000**	**100%**	**461,000**	**100%**	**44,886,450**	**100%**	**-**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	16,500,000	4	5,964,000	4	6,550,000	2		2	-		5,964,000		-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	10,000,000	3	6,661,000	3	3,350,000	2		2	-		6,661,000		-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12	10,000,000	3	6,184,000	3	3,350,000			2	-		6,184,000		-	
	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12	13,000,000	3	6,880,000	3	4,150,000	2		2	-		6,880,000		-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12	14,000,000	3	7,246,000	2	4,150,000			1	-		7,246,000		-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	9,500,000	2	5,772,000	2	989,000	1		5	-		5,772,000		-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Da	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	11,000,000	3	5,718,450	3	6,050,000	1	461,000	4	461,000		6,179,450		-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD**	**100%**	**40,000,000**	**100%**	**-**	**100%**	**6,305,000**	**100%**	**91,420**	**100%**	**91,420**	**100%**		**100%**		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporamn Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40	20,000,000	10		10	6,305,000		91,420		91,420					
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40	20,000,000	10		10										
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**7,558,708,298**	**100%**	**1,534,970,073**	**100%**	**1,486,109,849**	**100%**	**436,551,613**	**100%**	**436,551,613**	**100%**	**1,971,521,686**	**100%**	**-**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	100	7,379,708,298	25	1,450,683,073	20	1,451,426,849	6	436,551,613	6	436,551,613		1,887,234,686		-	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	120,000,000	5	68,829,000	5	27,883,000				-		68,829,000		-	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8	40,000,000			2										
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20	9,500,000	5	6,465,000	5	3,650,000				-		6,465,000		-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1)Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	20	9,500,000	5	8,993,000	5	3,150,000				-		8,993,000		-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian pada SKPD**	**100%**	**78,500,000**	**100%**	**41,790,500**	**100%**	**3,000,000**	**100%**		**100%**	**-**	**100%**	**7,103,000**	**100%**	**100%**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8	5,500,000			2	-									
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30	40,000,000	30	34,687,500	30									-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	3,000,000	3	7,103,000	3	3,000,000	2		2	-		7,103,000		-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	30,000,000			30										
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**683,000,000**	**100%**	**386,793,049**	**100%**	**150,135,000**	**100%**	**45,026,080**	**100%**	**45,026,080**	**100%**	431,819,129	**100%**	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20	105,000,000	5	20,082,890	5	6,050,000			5	-		20,082,890		-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	20	8,000,000	5	475,000	5	200,000	200000		200000	-		475,000		-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	400	4,000,000			100										
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20	6,000,000	5		5							-			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	540,000,000	30	366,235,159	30	143,885,000		45,026,080	10	45,026,080		411,261,239		-	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasisi elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8	20,000,000			2										
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**1,710,000,000**	**100%**	**132,371,450**	**100%**	**-**	**100%**		**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang disediakan	8	1,390,000,000			2					-					
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	20	200,000,000	5	55,700,000	5										
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	20	40,000,000		76,671,450	5										
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20	50,000,000			5									-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20	30,000,000	5		5							-		-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**203,360,065**	**100%**	**78,667,400**	**100%**	**30,340,000**	**100%**	**522,000**	**100%**	**522,000**	**100%**	**79,189,400**	**100%**	-	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200	11,360,065	300	4,692,000	300	2,340,000	200	300,000	200	300,000		4,992,000		-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	8	24,000,000	2	10,200,000	2	6,000,000	1		1	-		10,200,000		-	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8	8,000,000	2	10,000,000	2	6,000,000						10,000,000		-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1)Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	40	160,000,000	10	53,775,400	10	16,000,000	6	222,000	6	222,000		53,997,400		-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**161,000,000**	**100%**	**145,398,500**	**100%**	**102,095,000**	**100%**	**8,400,000**	**100%**	**8,400,000**	**100%**	**134,100,000**	**100%**	**-**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	110,000,000	2	125,700,000	2	102,095,000	3	8,400,000	3	8,400,000		134,100,000		-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	8,000,000			5										
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	20	8,000,000			5										
	Pemeliharaan Peralatan dan M	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20	7,000,000			5	-									
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	20,000,000		19,698,500	1										
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20	8,000,000			5										
II	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan**	**25**	**464,100,000**	**25**	**762,814,916**	**25**	**679,520,000**		**-**		**-**		**28,098,500**		**-**	**Badan Kesbangpol**
	Prumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Cakupan Prumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**25**	**464,100,000**	**25**	**762,814,916**	**25**	**679,520,000**		**-**		**-**		**28,098,500**		-	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4	4,100,000	**1**	1,444,950	1										
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8	90,000,000	2		2										
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200	66,000,000	50		50										
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20	89,000,000	50	28,098,500	50							28,098,500		-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1)Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	160	139,000,000	40	42,343,846	40										
	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	120	76,000,000	30		30										
	Pembentukan paskibraka	Jumlah Peserta Paskibraka			75	690,927,620	75	679,520,000				-					
III	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik**	**20**	**2,382,745,437**	**20**	**31,347,553,861**	**20**	**421,930,000**		-		-		**31,346,608,861**		-	**Badan Kesbangpol**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	**Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.**	**20**	**2,382,745,437**	**20**	**31,347,553,861**	**20**	**421,930,000**		-		-		**31,346,608,861**		-	Badan Kesbangpol
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	120	177,745,437	30	945,000	30										Badan Kesbangpol
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Tersusunnya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.															Badan Kesbangpol

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1)Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	400	589,000,000	100	66,372,400	100					-		66,372,400		-	Badan Kesbangpol
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	400	576,000,000	100	30,868,742,309	100	10,330,000				-		30,868,742,309		-	Badan Kesbangpol
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	60	1,040,000,000	15	411,494,152	15	411,600,000				-		411,494,152		-	Badan Kesbangpol
IV	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina dan mendapatkan pengawasan**	**35**	**315,145,950**	**35**	**37,006,800**	**35**	**-**		**-**		**-**		**26,517,800**		**-**	**Badan Kesbangpol**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**35**	**315,145,950**	**35**	**37,006,800**	**35**	**-**		**-**		**-**		**26,517,800**		**-**	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4	4,706,450	1	1,255,000	1										
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4	89,439,500	1		1										
	Pelaksaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	360	72,000,000	90	9,234,000	90										

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1)Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah															
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400	149,000,000	100	26,517,800	100				10	-		26,517,800		-	Badan Kesbangpol
V	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Cakupan Penyuluhan P4GN pada Generasi Muda (pelajar)**	**25**	**230,168,196**	**25**	**81,893,860**	**25**	**10,330,000**		**-**		**-**		**992,000**		**-**	**Badan Kesbangpol**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**25**	**230,168,196**	**25**	**81,893,860**	**25**	**10,330,000**		**-**		**-**		**992,000**		**-**	
	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4	5,168,196	1	992,000	1					-		992,000		-	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4	46,000,000	1		1										
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	480	71,000,000	120	27,566,000	120	10,330,000				-					
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	240	58,000,000	60	53,335,860	60										

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1)Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	480	50,000,000	120		120										
VI	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Potensi Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi yang ditangani**	**25**	**2,377,936,047**	**25**	**198,776,633**	**25**	**271,544,773**		**-**		**-**		**196,257,133**		**-**	**Badan Kesbangpol**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**25**	**2,377,936,047**	**25**	**198,776,633**	**25**	**271,544,773**		**-**		**-**		**196,257,133**		**-**	**Badan Kesbangpol**
	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasann Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasann Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	4	2,899,797	1	2,519,500	1										
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasann Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasann Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	16	1,390,000,000	4		4							-		-	
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasann Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasann Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	240	43,561,250	60		60					-		-		-	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1)Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4		5		6		7		8 = 6+7		9 = 5 + 8		10=9/4 x 100 %		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasann Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasann Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	400	154,475,000	100	28,103,000	100	20,730,000				-		28,103,000		-	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasann Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasann Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	192	689,000,000	48	80,545,883	48	10,330,000			2	-		80,545,883		-	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	24	98,000,000	6	87,608,250	6	240,484,773	2		12	-		87,608,250		-	
	Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh Program			**16,288,663,993**		**34,792,462,492**		**3,189,898,622**		**491,052,113**		**491,052,113**		**35,283,514,605**		**0.00**	

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara substansial, diantaranya memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang menggambarkan kondisi ekonomi makro daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah serta arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan.

3.1. Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kondisi perekonomian daerah pada tahun 2024 dan yang terjadi pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II digambarkan melalui beberapa indikator makro diantaranya : PDRB, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, gini rasio, inflasi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia ketenagakerjaan, dan.

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Setiap kebijakan pembangunan akan selalu menimbulkan *multiplier effect* yang sangat luas dan menyangkut kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan memiliki produktivitas yang tinggi, sehingga secara akumulatif akan mempengaruhi kondisi perekonomian wilayah. Kondisi tersebut secara makro tercermin dari tinggi rendahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indicator utama perkembangan ekonomi suatu daerah yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.

PDRB Kabupaten Buton berdasarkan harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 5.297,27 miliar rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 234,61 miliar rupiah atau 0,95 persen dibandingkan dengan tahun 2023 mencapai 5.062,66 miliar rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010 angka PDRB harga konstan 2010 juga mengalami peningkatan, pada tahun 2023 sebesar 3.101,74 miliar rupiah dan pada tahun 2024 menjadi 3.200,92 miliar rupiah.

Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Buton mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0,96 persen. Kenaikan ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	2021	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	805,72	958,38	1.048,70	1.147,35
Pertambangan & Penggalian	1.563,69	1.779,05	1.992,17	1.830,42
Industri Pengolahan	101,86	115,24	107,78	132,41
Pengadaan Listrik & Gas	1,72	1,91	2,11	2,35
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	16,44	17,20	19,12	19,46
Konstruksi	263,80	269,88	268,41	325,26
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	532,03	646,94	746,31	819,85
Transportasi & Pergudangan	31,98	37,74	41,82	47,17
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,11	5,86	6,03	6,51
Informasi & Komunikasi	11,31	12,86	13,08	14,98
Jasa Keuangan & Asuransi	28,98	33,21	36,74	35,76
Real Estate	19,27	19,51	20,95	22,10
Jasa Perusahaan	0,70	0,80	0,91	0,98
Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	376,63	380,86	417,31	530,96
Jasa Pendidikan	217,76	246,53	269,56	287,70
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	36,42	38,66	39,89	42,14
Jasa Lainnya	22,63	25,88	30,62	31,08
PDRB	4.036,29	4.591,95	5.062,66	5.297,27

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024
*Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara*

Tabel 3.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2020 s/d Tahun 2024 Kabupaten Buton (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	2021	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	546,57	607,14	629,01	646,78
Pertambangan & Penggalian	1.111,53	1.156,64	1.181,05	1.113,32
Industri Pengolahan	69,71	74,38	65,44	76,49
Pengadaan Listrik & Gas	1,61	1,71	1,80	1,95
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	12,91	13,04	14,21	14,21
Konstruksi	177,11	166,63	156,41	184,46
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	378,74	427,14	463,21	495,01
Transportasi & Pergudangan	27,31	29,12	28,92	31,73
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,77	4,22	4,25	4,47
Informasi & Komunikasi	11,48	12,56	13,06	14,46
Jasa Keuangan & Asuransi	18,14	18,66	19,95	18,87
Real Estate	15,39	15,81	16,30	16,71
Jasa Perusahaan	0,51	0,55	0,59	0,63
Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	262,43	261,03	277,69	342,70
Jasa Pendidikan	164,23	174,22	180,24	187,69
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	27,46	28,32	28,38	29,99
Jasa Lainnya	18,22	19,43	21,21	21,46
PDRB	2.847,09	3.010,49	3.101,74	3.200,92

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024;
*Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara*

Pada sisi lain, besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur ekonomi Buton didominasi 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, dan konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Buton.

Peranan terbesar pembentukan PDRB Kabupaten Buton pada tahun 2024, kelima lapangan usaha tersebut memberi kontribusi yang cukup besar bagi PDRB Buton, dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 34,55 persen (angka ini menurun dari angka 39,35 persen di tahun 2023) dikarenakan menurunnya aktivitas pertambangan oleh perusahaan baru yang beroperasi di wilayah Buton. Selanjutnya lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 21,66 persen (turun dari 20,71 persen di tahun 2023), penurunan negatif ini dikarenakan turunnya produksi subkategori perikanan yang signifikan pada tahun 2024. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,48 persen (naik dari 14,74 persen di tahun 2023). Berikutnya lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 10,02 persen (naik dari 8,24 persen di tahun 2023), dan lapangan usaha konstruksi sebesar 6,14 persen (naik dari 5,30 persen di tahun 2023).

Tabel 3.3
Peranan PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 s/d Tahun 2024

Lapangan Usaha	2021	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan,	19,96	20,87	20,71	21,66
Pertambangan & Penggalian	38,74	38,74	39,35	34,55
Industri Pengolahan	2,52	2,51	2,13	2,50
Pengadaan Listrik & Gas	0,04	0,04	0,04	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,41	0,37	0,38	0,37
Konstruksi	6,54	5,88	5,30	6,1
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil &	13,18	14,09	14,74	15,48
Transportasi & Pergudangan	0,79	0,82	0,83	0,89
Penyediaan Akomodasi & Makan	0,13	0,13	0,12	0,12
Informasi & Komunikasi	0,28	0,28	0,26	0,28
Jasa Keuangan & Asuransi	0,72	0,72	0,72	0,73
Real Estate	0,48	0,46	0,44	0,43
Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02
Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	9,33	8,29	8,24	10, 02
Jasa Pendidikan	5,40	5,37	5,32	5,4
Jasa Kesehatan & Kegiatan	0,90	0,84	0,79	0,80
Jasa Lainnya	0,56	0,56	0,60	0,59
PDRB	10	10	10	10

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024
*Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara*

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Buton pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2023 nilai tambah bruto sudah mulai menunjukkan tren yang positif karena menjelang tahun politik dan pemilihan umum serentak. Pada tahun 2024 kondisi ekonomi masih terus berlangsung naik karena sudah masuk dalam tahun penyelenggaraan pemilihan umum serentak sehingga kegiatan perekonomian lebih lancar dibandingkan tahun 2023. Nilai PDRB Buton pada tahun 2024 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 3.200,92 miliar rupiah. Angka tersebut naik dari

3.101,74 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,20 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi ekonomi tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan hanya sebesar 3,03 persen.

Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 5,16 persen. Pertumbuhan dalam kategori akomodasi dan penyediaan makan minum salah satunya disebabkan oleh peningkatan aktivitas kegiatan penyelenggara pemilu dan partai politik di beberapa wilayah Kabupaten Buton.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi berikutnya dicapai oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, yaitu sebesar 2,83 persen. Hal ini salah satunya didukung oleh kenaikan jumlah produksi perikanan tangkap yang sangat signifikan pada tahun 2024 dibanding tahun 2023. Peningkatan produksi ini tidak terlepas dari intervensi program pemerintah daerah di sektor perikanan, diantaranya pemberian bantuan sarana prasarana produksi perikanan.

Selanjutnya lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 10,73 persen serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,86 persen. Hal ini secara umum dipengaruhi oleh pemberlakuan kebijakan (pajak penjualan atas barang mewah) PPnBM nol persen dan pengajuan kredit KUR yang memberikan kemudahan pada proses peminjaman kredit di masyarakat, hal ini yang menyebabkan meningkatnya sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Secara khusus event Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara juga berperan meningkatkan aktivitas perdagangan di Kabupaten Buton.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan ekonomi positif walaupun beberapa lapangan usaha masih relatif kecil pertumbuhannya dibawah 1 persen seperti lapangan usaha pertambangan dan penggalian, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan jasa keuangan dan asuransi

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (Persen)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,79	3,34	11,08	3,60	2,83
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,24	0,01	4,05	2,12	-5,73
3	Industri Pengolahan	-2,53	3,43	6,69	-12,01	16,88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,21	1,21	7,93	6,44	5,23
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	5,72	1,88	1,05	8,99	-0,01
6	Konstruksi	-2,97	6,71	-5,91	-6,13	17,93
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,73	7,98	12,78	8,45	6,86
8	Transportasi dan Pergudangan	-2,54	2,76	6,65	-0,69	9,71
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,13	1,71	11,88	0,68	5,16
10	Informasi dan Komunikasi	9,38	2,97	9,40	3,99	10,73
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,92	8,22	2,85	6,95	-5,43
12	Real Estate	0,98	0,99	2,76	3,09	2,50
13	Jasa Perusahaan	-2,34	0,42	8,53	7,90	5,46
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,52	0,79	-0,53	6,38	23,41
15	Jasa Pendidikan	4,25	3,93	6,08	3,46	4,13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,67	7,02	3,13	0,21	5,65
17	Jasa Lainnya	-0,66	2,41	6,68	9,14	1,20
18	Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestik Bruto	-0,49	2,62	5,74	3,03	3,20

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024
*Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara*

3.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor- faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita Kabupaten Buton dalam kurun waktu 2020 hingga tahun 2024 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2020-2021 mengalami pertumbuhan positif, tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp. 33,26 juta rupiah, mengalami kenaikan hingga tahun 2021 sebesar Rp. 34,62 juta rupiah. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 38,78 juta rupiah kemudian mengalami kenaikan

secara signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 43,41 juta rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

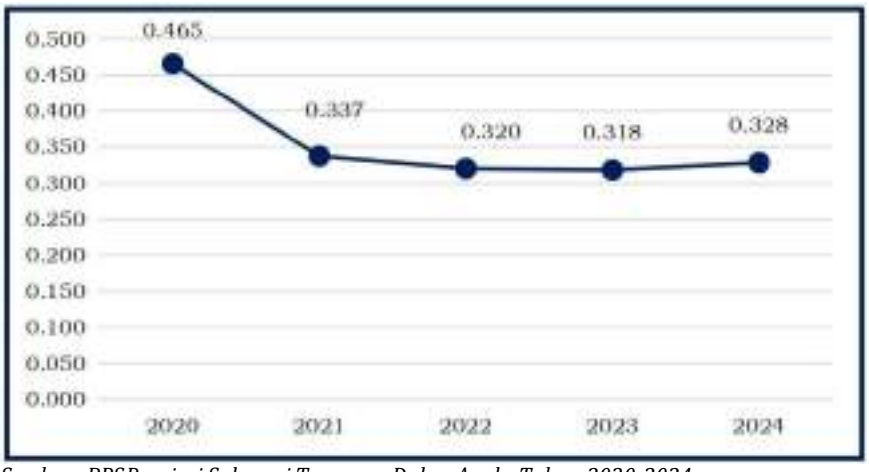
Uraian		Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
1	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					
	- ADHB	3.816,73	4.036,	4.591,9	5.062,	5.297,2
	- ADHK	2.774,41	2.847.	3.010.4	3.101.	3.200.9
2	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
	- ADHB	33,26	34,6	38,7	42,	43,4
	- ADHK	24,18	24,4	25,4	25,	26,2
3	Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK	-11,69	0,99	4,10	1,49	1,66
4	Jumlah Penduduk (orang)	115,207	117.0	119.3	120.8	122.02
5	Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)	-0,49	2,62	5,74	3,03	3,20

Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024
*Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara*

3.1.4. Indeks Ketimpangan (Gini Ratio)

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kabupaten Buton pada tahun 2020 tertinggi tercatat sebesar 0,465 dan terus menurun hingga menjadi 0,318 pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan kembali menjadi 0,328. Capaian ini menjadikan Kabupaten Buton tetap berada dalam kategori ketimpangan sedang, yang menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dari para pemangku kepentingan untuk memastikan pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan di masyarakat

Gambar 3.1
Perkembangan Indeks Ketimpangan (Gini Ratio) Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2020-2024

3.1.5. Laju Inflasi

Inflasi yang tinggi merupakan salah satu fenomena dalam perekonomian yang dapat menekan daya beli masyarakat dan menurunkan pendapatan rill masyarakat. Inflasi dapat di lihat dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Dalam beberapa tahun terakhir inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara cenderung berada diatas rata-rata inflasi Sulawesi Tenggara dan nasional. Hal ini tentu saja berdampak negatif pada jalannya roda perekonomian. Laju inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung mengalami ketidakstabilan yang ditunjukkan dengan fluktuasi laju inflasi pada tingkat Nasional.

Sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton, pendataan terhadap inflasi di Kabupaten Buton didasarkan pada pengukuran indeks perubahan harga pasar (IPH). Dimana pada tahun 2024, indeks perubahan harga (IPH) cukup fluktuatif dari bulan ke bulan, namun pada bulan desember minggu keempat IPH Kabupaten Buton sebesar 0,07 point menunjukkan inflasi daerah terkendali. Apabila dilihat dari ukuran inflasi Kabupaten Buton berdasarkan inflasi Kota Baubau, menunjukkan kecenderungan peningkatan selama tiga tahun terakhir. Dimana pada tahun 2023, inflasi Kota Baubau mencapai nilai tertinggi sebesar 1.73 persen. Angka inflasi tersebut bahkan lebih tinggi dari inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara (0.45 persen). Namun pada tahun 2023, nilai inflasi mengalami penurunan menjadi sebesar 0,08 persen, lebih rendah dari inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,28 persen, dan pada tahun 2024 inflasi kota Baubau kembali meningkat menjadi 8,35 persen dan lebih tinggi 0,96 poin dari inflasi provinsi sebesar 7,39 persen.

Gambar 3.2
Pergerakkan Inflasi Tahunan Kota Baubau dan Propinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2020 s/d Tahun 2024



Sumber : BPS Kab Buton Dalam Angka Tahun 2024

3.1.6. Kemiskinan

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buton cenderung mengalami fluktuasi selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024). Pada tahun 2020 tercatat sebesar 13,21 persen menurun 0,44 point dari tahun 2019 sebesar 13,65 persen. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin meningkat kembali menjadi 14,25 ribu jiwa atau meningkat sebesar 13,92 persen. Kemudian untuk tahun 2022 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan walaupun tidak signifikan menjadi 13,61 ribu jiwa atau 13,27 persen, dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 14,15 ribu jiwa atau bertambah menjadi 13,77 persen. Pada tahun 2024 penduduk miskin meningkat menjadi 14,41 ribu jiwa atau 13,99 persen naik 0,58 point dari tahun 2023. Peningkatan ini tidak terlepas dari tidak adanya intervensi kebijakan program-program strategis pada sektor-sektor pemicu kemiskinan yang telah dilakukan selama tahun 2024 baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, pemberian bantuan sarana prasarana produksi perikanan, pertanian, kelompok usaha kecil menengah dan industri kecil menengah, dan hal ini tentu harus terus dilakukan agar dapat menahan laju peningkatan angka kemiskinan. Gambaran perkembangan indikator kemiskinan di Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

Uraian		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Garis Kemiskinan	262.54	270.21	279.62	302.18	313.83
2	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu	13,68	14,25	13,61	14,15	14,
3	Persentase Penduduk Miskin	13,21	13,92	13,	13,77	13,99

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2025

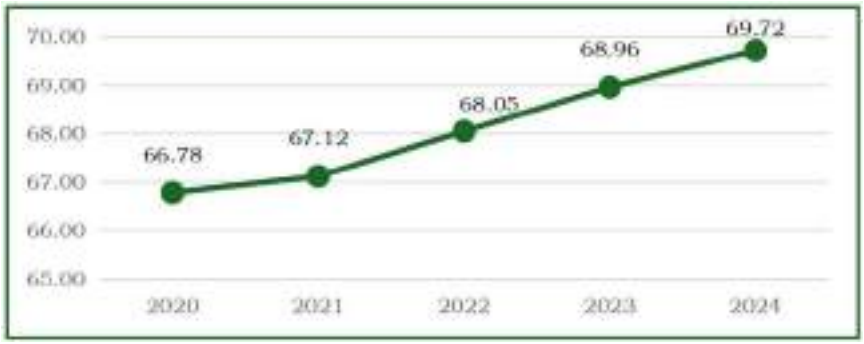
3.1.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak.

Secara umum nilai IPM Kabupaten Buton selama lima tahun terakhir belum menunjukkan peningkatan yang begitu signifikan. Angka IPM pada tahun 2020 mencapai 66,78, tahun 2021 mencapai 67,12, tahun 2022 mencapai 68,05, hingga tahun 2023 IPM Kabupaten Buton mencapai 68,96 dan tahun 2024 mencapai 69,72. Apabila dibandingkan empat daerah sekitar, Buton berada pada peringkat ketiga setelah Kota Baubau dan Kabupaten Buton Utara.

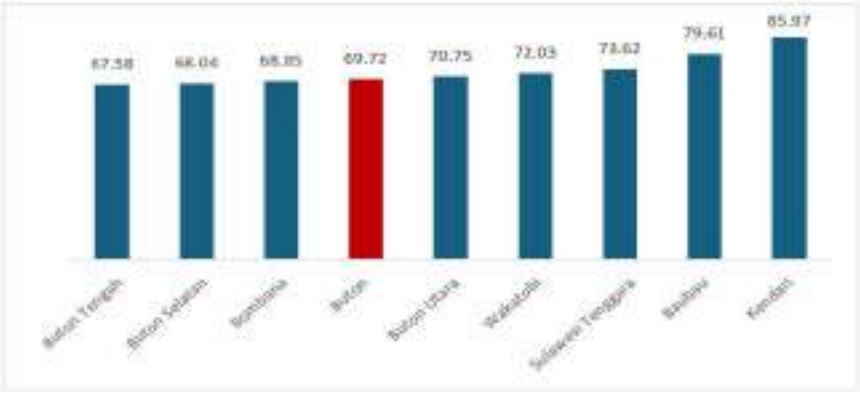
Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Berikut perkembangan IPM Kabupaten Buton tahun 2020-2024 :

Gambar 3.3
Perkembangan IPM Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024



Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2025

Gambar 3.4
Perbandingan IPM Kabupaten Buton dengan Kabupaten/Kota Sekitar
Tahun 2024



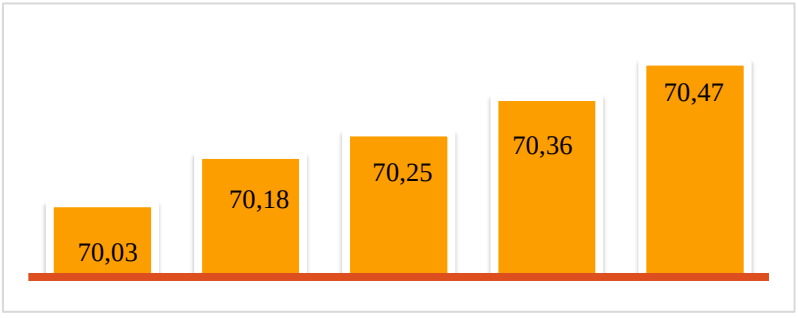
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025

Gambaran indikator pembentuk IPM Kabupaten Buton secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini :

1. Angka Harapan Hidup

Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan angka harapan hidup. Angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Perkembangan angka harapan hidup Kabupaten Buton selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 3.5
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025

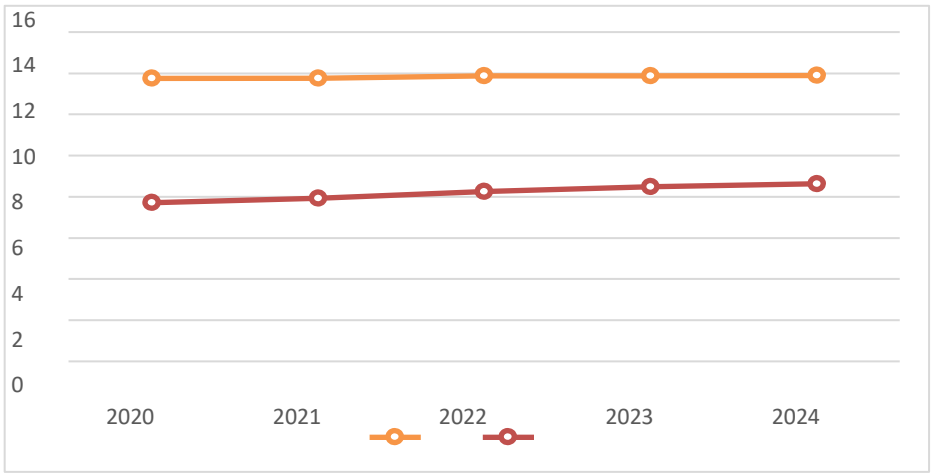
Grafik pada Gambar 3.8 diatas menunjukkan usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Buton cenderung mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun

2020, usia harapan hidup Kabupaten Buton berada pada 70,03 tahun meningkat menjadi 70,18 tahun pada tahun 2021. Pada tahun 2022 usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Buton kembali meningkat menjadi 70,25 tahun hingga 70,36 tahun pada tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 70,47 tahun pada tahun 2024. Meningkatnya angka harapan hidup tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya cakupan layanan kesehatan masyarakat yang semakin membaik, ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai, petugas kesehatan yang kompeten dan kesadaran masyarakat akan kesehatan yang terus meningkat, dan hal ini pula mengindikasikan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Namunpun demikian pelayanan kesehatan masih harus terus ditingkatkan, mengingat AHH Kabupaten Buton masih berada dibawah capaian propinsi dan capaian nasional selama lima tahun terakhir.

2. Angka Harapan Lama Sekolah

Sesuai dengan publikasi terbaru BPS Kabupaten Buton, angka melek huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung Koefisien Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sudah tidak relevan. Sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah satunya menggunakan angka harapan lama sekolah (HLS). HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka HLS Kabupaten Buton selama periode 2020-2024 menunjukkan peningkatan meskipun tidak terlalu besar. Pada 2020 angka HLS Kabupaten Buton hanya sebesar 13,75 dan terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 13,89.

Gambar 3.6
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

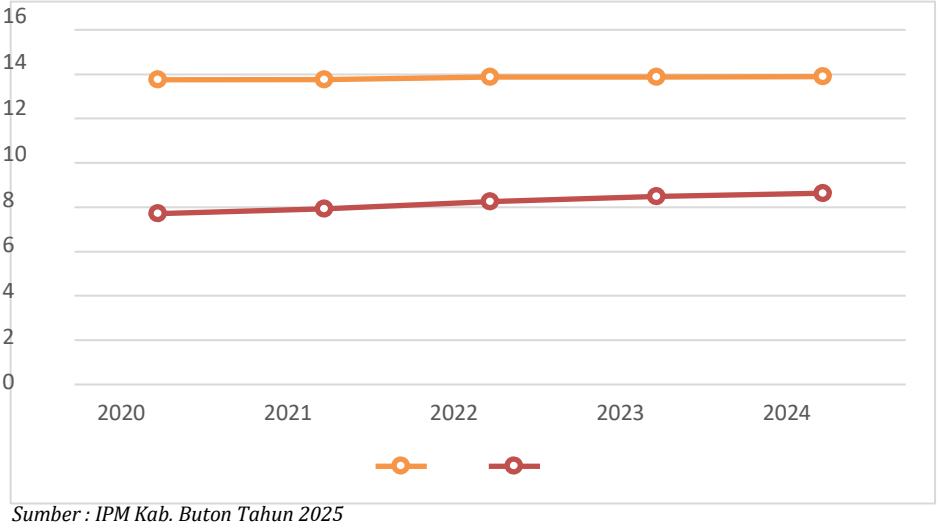


Sumber : IPM Kab. Buton Tahun 2025

3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun dan level nasional mencanangkan Program Wajib Belajar 12 tahun. Pada grafik di bawah ini digambarkan rata-rata lama sekolah Kabupaten Buton dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

Gambar 3.7
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024



Sumber : IPM Kab. Buton Tahun 2025

Berdasarkan gambar 3.7 di atas terlihat bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Buton mengalami kenaikan setiap tahunnya. Diawali pada tahun 2020 berada di angka 7,71 terus meningkat di tahun 2021 menjadi 7,92 dan pada tahun 2024 sesuai dengan data terbaru melonjak hingga angka 8,63. Hal ini mengindikasikan bahwa minat dan tingkat kemauan untuk bersekolah cukup tinggi. Diharapkan dengan terus naiknya angka rata-rata lama sekolah ini, mampu mencetak SDM yang unggul dan berkualitas.

4. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan salah satu pembentuk dalam pencapaian IPM dari sisi standar hidup yang layak. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Tabel 3.7 menunjukkan pengeluaran per kapita Kabupaten Buton dari Tahun 2020 hingga 2024. Pengeluaran per kapita Kabupaten Buton selama lima tahun cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2020, pengeluaran per kapita Kabupaten Buton berada pada nilai Rp. 7.307.000 per jiwa selama setahun dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 8.401.000 per jiwa selama setahun.

Tabel 3.7
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (dalam 000 Rp)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Buton	7307	7324	7594	7995	8.401
Muna	8203	8218	8328	8703	9.107
Konawe	10126	10151	10552	10963	11.415
Kolaka	12515	12525	12639	13055	13.534
Konawe Selatan	9037	9059	9347	9753	10.250
Bombana	8234	8310	8680	9042	9.692
Wakatobi	9204	9280	9758	10240	10.739
Kolaka Utara	10218	10244	10721	11020	11.650
Buton Utara	7470	7496	7935	8289	8.746
Konawe Utara	9165	9181	9666	10113	10.658
Kolaka Timur	7727	7753	8155	8520	9.012
Konawe Kepulauan	6700	6738	7192	7564	7.996
Muna Barat	7485	7502	7668	8076	8.458
Buton Tengah	7221	7244	7670	8003	8.434
Buton Selatan	7263	7279	7476	7936	8.386

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Kendari	14335	14356	14765	15116	15.651
Kota Baubau	10483	10503	10835	11207	11.755
Sulawesi Tenggara	**9331**	**9381**	**9708**	**10117**	**10.606**

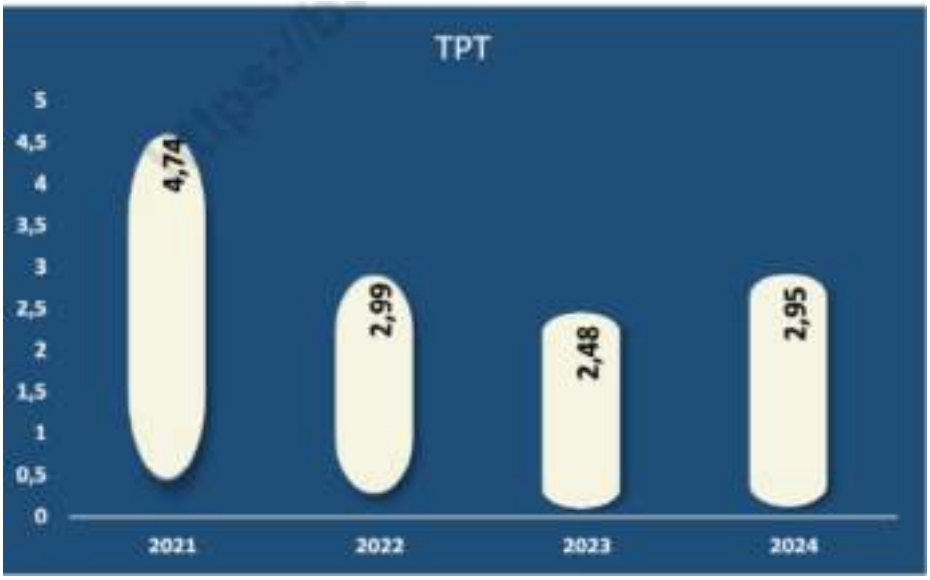
Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2025

3.1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran didefinisikan sebagai persentase penduduk angkatan kerja yang belum bekerja terhadap angkatan kerja itu sendiri. Angkatan kerja mencakup penduduk yang belum mendapat pekerjaan tetapi siap untuk bekerja (menganggur) dan penduduk yang sudah mendapat pekerjaan (bekerja). TPT menunjukkan banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Semakin tinggi TPT berarti semakin banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Berdasarkan data BPS menunjukkan TPT Kabupaten Buton dari tahun 2020 sampai 2024 cenderung fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2024, TPT Kabupaten Buton sebesar 2,95 persen, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang/jasa sebanyak 2 sampai 3 diantaranya merupakan pengangguran. Meskipun angka TPT Kabupaten Buton cenderung moderat, tetapi kondisi tersebut tetap diperlukan perhatian dalam menyikapi kondisi pengangguran tersebut. Khususnya mulai tahun 2023, semenjak adanya pandemi Covid-19 menyebabkan angka pengangguran di Kabupaten Buton meningkat dengan sebab terhentinya berbagai aktivitas ekonomi, namun secara perlahan kondisi ini cukup membaik pada tahun 2024.

Gambar 3.8
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024



Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2025

3.1.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja di suatu daerah. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. TPAK merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Semakin tinggi nilai TPAK nya semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja didalam pasar kerja.

Tabel 3.8
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2024

Kegiatan Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Kerja	69.965	70.577	70.672	84.570	70.672
Angkatan Kerja	45.712	45.467	54.660	57.920	54.660
- *Bekerja*	45.328	43.313	53.023	56.483	53.023
- *Pengangguran*	184	154	637	437	1.637
Bukan Angkatan Kerja	24.253	25.110	16.012	26.650	16.012
- *Sekolah*	5.820	4.760	3.824	7.366	3.824
- *Mengurus Rumah Tangga*	14.463	17.000	10.165	15.661	10.165
- *Lainnya*	3.970	3.350	2.023	3.623	2.023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,34	64,42	77,34	68,49	69,26
Tingkat Pengangguran (%)	4,78	4,74	2,99	2,48	2,95

Sumber : Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2025

TPAK Kabupaten Buton cenderung berfluktuasi dari tahun 2020. Tahun 2020 TPAK Buton mengalami peningkatan menjadi 65,34 persen. Artinya, terdapat 65,34 persen penduduk usia kerja yang bekerja secara aktif. Peningkatan TPAK ini merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi. Namun pada tahun 2021 menurun menjadi 64,42 persen, dan kembali meningkat menjadi 77,34 persen pada 2022. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 68,49 persen dan pada tahun 2024 kembali meningkat 69,26 persen. TPAK yang fluktuatif memberikan indikasi adanya potensi ekonomi yang masih belum stabil dalam hal pasokan (*supply*) tenaga kerja.

3.2. Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kabupaten Buton, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek perekonomian pada tataran global, nasional, maupun lingkungan regional Sulawesi Tenggara. Seiring terjadinya perubahan iklim dan ketidakpastian tensi geopolitik global yang telah memberikan tekanan terhadap perekonomian secara global di tahun 2023, mendorong berbagai negara di dunia termasuk Indonesia terus berupaya untuk membangun *herd* immunity dan mendorong mobilitas serta aktivitas perekonomian serta berlanjutnya stimulus kebijakan fiscal dan moneter, yang telah memberikan dampak positif bagi perekonomian global di tahun 2023 hingga tahun 2024. Pemulihan ekonomi global diperkirakan berlanjut pada tahun 2025, meskipun pemulihan perekonomian global masih dibayangi oleh beberapa kondisi diantaranya ketidakpastian tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti, meningkatnya inflasi karena gangguan rantai pasokan, keterbatasan energy, adanya himbauan dari WHO untuk mewaspadai ancaman virus dengan tingkat penyebaran yang lebih tinggi dari virus covid-19, dan adanya ancaman perubahan iklim (el nino). Keberhasilan Indonesia melepaskan diri dari tekanan geopolitik global dan dampak perlambatan pertumbuhan global turut dipengaruhi oleh implementasi rangkaian kebijakan tahunan pemerintah yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah (RKP). Dimana pada tahun 2025, kebijakan ekonomi pembangunan nasional akan memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri dan mendorong pembangunan ekonomi hijau.

Sejalan dengan perbaikan perekonomian global di tahun 2024, perekonomian Indonesia juga sudah memasuki trend pemulihan, dan tahun 2024

merupakan tahun bangkitnya perekonomian Indonesia yang ditandai dengan perekonomian yang tumbuh positif pada tahun 2024 sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen (yoy). Perkembangan tersebut terutama ditopang oleh kinerja ekspor sejalan dengan tetap kuatnya permintaan mitra dagang utama. Selain itu, permintaan domestik juga tumbuh didorong oleh penanganan pandemik serta vaksinasi yang semakin baik. Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja LU utama tetap dalam tren pertumbuhan positif. Dimana pada sisi produksi LU terkait mobilitas masyarakat seperti transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,99 persen, sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,93 persen. Secara spasial, kinerja pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh hampir seluruh wilayah, dimana selama tahun 2024 kelompok provinsi di pulau Jawa mewarnai struktur dan kinerja ekonomi Indonesia dengan kontribusi sebesar 56,4 persen. Kedepan, pemulihan ekonomi domestik diprakirakan terus berlangsung secara bertahap.

Sejalan dengan hal tersebut Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui koordinasi kebijakan moneter–fiskal, mempertahankan suku bunga di level 3,8 persen di tengah tekanan eksternal yang meningkat, elektronifikasi sistem pembayaran dan penerapan BI-Fast, kebijakan pembukaan sektor-sektor prioritas, peningkatan ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2025 diprakirakan tetap kuat pada kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3 persen didukung konsumsi swasta, investasi dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

Berdasarkan beberapa indikator pendukung, ekonomi Kabupaten Buton pada tahun 2025 juga diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 pada kisaran sebesar 5,80-5,92 persen. Faktor yang berperan penting pada akselerasi pertumbuhan tersebut adalah perbaikan kondisi dan berlanjutnya pembangunan fisik proyek pada sektor-sektor strategis/sektor unggulan, peningkatan produksi aspal seiring meningkatnya permintaan kebutuhan aspal Buton sebagai dampak dari dukungan kebijakan pemerintah terkait penggunan aspal Buton pada jalan-jalan nasional, yang akan berdampak pula pada pergerakan sektor-sektor pembentuk PDRB lainnya, serta peningkatan investasi

pelaku usaha eksisting dan baru. Perbaikan kondisi pasca pandemi covid-19 yang disertai peningkatan mobilitas masyarakat dan perbaikan kondisi dunia usaha diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton yang lebih baik pada tahun 2025. Sehubungan hal tersebut dan dalam mengoptimalkan momen pemulihan ekonomi Kabupaten Buton, terdapat upaya yang bisa dilakukan dan disinergikan bersama multi-stakeholder diantaranya: (a) Mendorong produksi dan produktivitas komoditas unggulan khususnya sektor pertanian dan perikanan, melalui intervensi program dan kegiatan strategis; (b) Mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil masyarakat melalui pendampingan dan pemberian sarana prasarana pendukung kegiatan kelompok UMKM dan IKM; (c) Mengoptimalkan dan mengakselerasi penyerapan APBD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendukung pembangunan di Kabupaten Buton; (d) Mendorong investasi dan kerja sama dengan swasta dalam pemanfaatan aset, maupun dalam pengelolaan produk unggulan daerah seperti aspal Buton.

Perbaikan ekonomi dari sisi permintaan pada tahun 2025 diprakirakan terjadi pada sisi belanja pemerintah, konsumsi, investasi dan kinerja ekspor khususnya sektor pertambangan dan penggalian. Perbaikan terjadi karena normalisasi aktivitas dunia usaha dan masyarakat. Konsumsi rumah tangga diprakirakan membaik sejalan dengan peningkatan aktivitas masyarakat. Disamping itu, terus berjalannya perbaikan daya beli yang didukung oleh program-program stimulus pemerintah diprakirakan akan terus mendorong peningkatan kinerja konsumsi.

Konsumsi pemerintah pada tahun 2025 juga diprakirakan akan mengalami peningkatan seiring terjadi peningkatan pagu belanja. Pada trilwulan III tahun 2025, Pemerintah Daerah diprakirakan akan mempercepat pembangunan fisik dan pencairan anggaran pembangunan. Disisi lain, perbaikan pemahaman terkait sistem SIPD dan juga backup menggunakan sistem diperkirakan akan mempercepat konsumsi pemerintah pada triwulan III tahun 2025. Lebih lanjut, peningkatan koordinasi antara BPKAD dengan Perangkat Daerah untuk mempercepat realisasi sesuai dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya diprediksi menjadi faktor yang menopang terjaganya capaian realisasi belanja yang tinggi pada tahun 2025.

Aktivitas investasi dan penanaman modal diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan kemudahan perizinan melalui aplikasi OSS. Kinerja

ekspor juga diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, khususnya pada komoditas aspal seiring dengan peningkatan kebutuhan aspal Buton. Dari sisi penawaran, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton diperkirakan akan terjadi akselerasi pertumbuhan beberapa lapangan usaha strategis seperti pertambangan dan lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha pertanian, konstruksi dan perdagangan.

Oleh karena itu, pelaksanaan upaya pemulihan ekonomi di Kabupaten Buton terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton melalui beragam program pemulihan ekonomi yang memperhitungkan potensi yang dimiliki, diantaranya : a) Intervensi program-program strategis dalam upaya membangun optimisme pemulihan ekonomi, b) akselerasi APBD untuk mendorong pemulihan ekonomi, dukungan dan pengembangan UMKM, serta c) Digitalisasi ekonomi dan keuangan serta meningkatkan sumber pendapatan di daerah antara lain melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Adapun beberapa indikator makro ekonomi daerah pada tahun 2025 diharapkan akan tetap membaik, diantaranya :

- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton diprakirakan kisaran 5,80-5,92 persen.
- PDRB harga berlaku diprakirakan sebesar Rp. 5.248.657,98, dan PDRB harga konstan (2010) diprakirakan sebesar Rp. 3.189.280,18.
- PDRB per kapita atas dasar harga berlaku diproyeksikan sebesar 43,48 juta rupiah, dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan diproyeksikan sebesar 26,42 juta rupiah.
- Persentase penduduk miskin diharapkan dapat ditekan pada kisaran 13,20-12,83 persen dengan jumlah penduduk miskin menurun menjadi 13,51-12,83 ribu jiwa dan tingkat kemiskinan ekstrem diprakirakan sebesar 0,57-0,37 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 0,558 ribu jiwa.
- Indeks tingkat ketimpangan (gini rasio) diproyeksikan berada pada kisaran 0,30 melalui intervensi berbagai program pembangunan dan penyediaan infrastruktur diberbagai wilayah Kabupaten Buton.
- Laju inflasi diproyeksikan pada kisaran 0,23-0,17 persen.
- Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 sebesar 1,88 persen.
- Indeks pembangunan manusia tahun 2025 diprakirakan akan berada pada 67,33, dengan capaian angka usia harapan hidup sebesar 69,24 tahun, angka

rata-rata lama sekolah sebesar 8,33 tahun, angka harapan lama sekolah sebesar 13,97 tahun, dan pengeluaran per kapita adhb sebesar 7,694 ribu rupiah.

- Tingkat pengangguran terbuka diprakirakan akan menurun pada 2,98-2,97 persen, dengan jumlah penganggur berada pada kisaran sebesar 1.637-1.636 jiwa.

Berdasarkan kondisi tersebut proyeksi target indikator makro dapat dicapai dengan beberapa pertimbangan dan asumsi, yaitu sebagai berikut :

a. Kegiatan ekonomi yang terus berjalan akan menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton pada triwulan III.
b. Adanya kebijakan pemerintah berupa pemberian bantuan stimulus fiskal seperti peningkatan bantuan sosial non tunai dan intervensi kebijakan pemerintah daerah melalui program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
c. Proyek pemerintah daerah yang diperkirakan akan kembali berlanjut pada triwulan III 2025, yang akan berdampak pada peningkatan kinerja lapangan usaha konstruksi.

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pandemi covid-19 yang melanda hampir seluruh negara didunia sejak tahun 2023 yang dampaknya masih cukup berpengaruh pada beberapa sektor ekonomi telah mendorong pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2025. Dimana pada tahun 2025, kebijakan ekonomi pembangunan nasional akan memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri dan mendorong pembangunan ekonomi hijau.

Disamping itu pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi, juga direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan nasional, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana dan melaksanakan *major project* dengan daya ungkit tinggi, dengan tetap melaksanakan kebijakan pembangunan nasional yang menerapkan penganggaran yang efektif dan tetap melanjutkan implementasi m*oney follow program* atau anggaran mengikuti program prioritas, yang mana kaidah

tersebut harus dilakukan dengan indikator capaian yang jelas dan dapat diukur, sehingga belanja negara bukan hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk melakukan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, serta peningkatan daya beli masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut kebijakan ekonomi pembangunan Kabupaten Buton tahun 2025 juga diarahkan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian daerah yang sebelumnya mengalami kontraksi negatif akibat pandemi covid 19, melalui penguatan sektor-sektor strategis dengan daya ungkit tinggi, penguatan sistem kesehatan, penguatan sistem perlindungan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat kecil menengah.

Selain itu tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buton tahun 2025-2029, maka kebijakan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Buton tahun 2025 juga diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan pencapaian visi daerah yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Bisnis dan Berbudaya di Kabupaten Buton Tahun 2045".

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka pengelolaan ekonomi daerah diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi (pro-growth) yang berkualitas dengan didukung stabilitas ekonomi yang tetap terjaga; mengurangi pengangguran (pro-job); mengurangi kemiskinan (pro-poor), dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan (pro-environment), dan tetap melaksanakan kaidah money follow program agar sasaran pembangunan dalam RPJMD dapat tercapai. Pengelolaan ekonomi yang pro growth dimaksudkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan disertai pemerataan distribusi pendapatan (growth with equity). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran pokok yang menjadi indikator perbaikan kondisi perekonomian. Namun sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi belumlah menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan sebagai dua sasaran yang sama pentingnya yang harus dicapai agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut
dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak berhenti sampai dengan laju pertumbuhan yang tinggi, melainkan

pertumbuhan yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

Pengelolaan ekonomi yang pro job lebih menekankan pada percepatan perluasan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan adanya peningkatan aktivitas dunia usaha dan ekonomi yang pada gilirannya akan memberikan peluang yang lebih besar kepada angkatan kerja di pasar. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat tercapai bila disertai dengan peningkatan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran di masyarakat. Peningkatan jumlah partisipasi angkatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran merupakan gambaran kemampuan masyarakat untuk mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menikmati bagian dari peningkatan pendapatan. Kebijakan yang mampu menopang pengembangan sektor riil, khususnya di sektor industri kecil dan pertanian, akan menjadi kebijakan-kebijakan yang mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah daerah.

Sementara itu pengelolaan ekonomi yang pro poor diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan. Menurunnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi satu indikator yang secara langsung menunjukkan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penetapan penanggulangan sasaran kemiskinan dan masalah-masalah didalamnya dimaksudkan agar kebijakan-kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat secara langsung menyentuh masyarakat yang berada di lapisan bawah. Sasaran tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, melainkan juga untuk memberikan akses yang lebih luas ke berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan lain sebagainya. Upaya tersebut dilaksanakan sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjalankan program sustainable development goals (SDGs) dan konvergensi penanganan stunting.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian target pembangunan ekonomi tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Buton telah menetapkan berbagai dukungan kebijakan, antara lain percepatan pembangunaninfrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan konektivitas antar dan intra wilayah, peningkatan peran per sektor ekonomi khususnya sektor pertambangan, sektor perikanan, sektor pertanian, sektor pariwisata dan sektor perdagangan, peningkatan daya saing dan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi pengelolaan potensi sumber daya alam yang

berkelanjutan, penguatan dan peningkatan peran usaha mikro kecil menengah dan industri kecil menengah, pengembangan ekonomi kreatif serta optimalisasi kerjasama dengan KADIN Buton. Melalui langkah-langkah kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Kebijakan tersebut akan terwujud manakala didukung oleh institusi pemerintah yang handal dan kredibel, dan dalam rangka mewujudkan institusi pemerintah yang baik menuju terciptanya good and clean governance, Pemerintah Kabupaten Buton telah melakukan perbaikan/peningkatan kinerja pelayanan antara lain melalui pelayanan pemerintahan yang terpusat di TAKAWA, optimalisasi mall pelayanan public, dan optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektornik (SPBE). Selain didukung oleh institusi pemerintah yang baik, perwujudan ekonomi yang pro growth, pro job, pro poor tidak terlepas dari stabilitas daerah yang terus kondusif dan tetap terjaga khususnya dalam tahapan pesta demokrasi tahun 2024 yang telah dilaksanakan. Dalam upaya mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif, pemerintah daerah Kabupaten Buton senantiasa melakukan koordinasi dengan aparat keamanan melalui forum komunikasi pemimpin daerah (KOMINDA), dan terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Buton.

3.4. Arah Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dokumen RKPD dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan APBD Kabupaten Buton Tahun 2026 disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi yang tertuang dalm RPJMD Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, karena APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengeluaran daerah, maka belanja daerah harus disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan kata lain pengalokasian anggaran belanja tidak lagi berdasarkan anggaran mengikuti fungsi (*money follow function),* yang tidak fokus dan tanpa indikator dan formula yang tepat, tetapi pengalokasian anggaran mengikuti kaidah anggaran mengikuti program prioritas *(money follow prioritized pograms)* sehingga anggaran yang dialokasikan betul-betul bermanfaat untuk rakyat dan berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut maka pemerintah daerah juga perlu melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah dan karena itu pengelolaan APBD harus melalui 4 (empat) tahapan penting, yaitu : perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah akan memuat realisasi dan proyeksi/target serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.4.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan

kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dari sisi pendapatan daerah, perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum Pendapatan Tahun Anggaran 2025 antara lain diprioritaskan untuk menampung dan memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian atas pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada komponen lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyesuaian atas pendapatan transfer pemerintah pusat.

Proyeksi pendapatan daerah dalam perubahan RKPD Kabupaten Buton tahun 2025 dipengaruhi pula oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam mendukung isu-isu strategis nasioanl dan daerah diantaranya penanganan dampak c*ovid-19.* Selain itu pula kebijakan perubahan pendapatan yang berpengaruh terhadap proyeksi Pendapatan Daerah yaitu adanya penyesuaian PMK Nomor 215/PMK/07/2024 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Periode Ketiga Pada Tahun 2024, PMK Nomor 218/PMK.07/2024 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 703 Tahun 2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2024 serta penyesuaian target- target pendapatan daerah sesuai sumber pendapatan dan hasil evaluasi capaian sampai triwulan II tahun 2025, yang mana sumber dana pembangunan APBD Kabupaten Buton secara umum masih didominasi oleh sumber pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, sementara kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan perkembangan kondisi realisasi pendapatan tahun 2024, pendapatan pada perubahan tahun anggaran 2025 sebelum perubahan dan target

pendapatan daerah pada kurun waktu tahun 2025 serta asumsi pendapatan tahun 2025, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025
(dalam juta rupiah)

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2024	APBD Tahun 2025	Realisasi APBD Tahun 2025 s/d	Perubahan RKPD Tahun 2025 *
4	Pendapatan	**858.188,17**	**791.408,00**	-	**779.764,00**
4.1	Pendapatan Asli Daerah	**37.340,16**	**34.000,00**	-	**63.454,00**
4.1.01	Pajak daerah	4.584,65	4.970,00	-	10.620,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.121,72	2.525,00	-	5.319,00
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.024,73	11.959,00	-	12.824,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	16.609,05	14.545.00	-	34.690,00
4.2	Pendapatan Transfer	**790.786,70**	**749.408,00**	-	**708.309,00**
4.2.01	Pendapatan transfer Pemerintah Pusat	768.996,07	724.468,00	-	683.368,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.790,63	24.940,00	-	24.940,00
4.3	Lain-lain Pendapatan yang sah	**30.061,31**	**8.000,00**	-	**8.000,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	21.117,64	0	-	0
4.3.02	Dana Darurat	0	0	-	0
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Dana Bos)	8.943,68	8.000,00	-	8.000,00

Sumber : BKAD Kab. Buton, Tahun 2024-2025
* data belum tersedia

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada semester pertama (bulan Juni 2025), target pada APBD tahun berjalan, serta pertimbangan kemungkinan pencapaian target PAD, maka dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Buton Tahun 2025 meliputi :

1. Menyesuaikan rencana penerimaan dari pendapatan transfer pusat, dan penyesuaian pendapatan transfer antar daerah;
2. Peningkatan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pendapatan daerah;

3. Akselerasi penyusunan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Penyediaan sistem pajak daerah yang berbasis android dan dapat diakses oleh masyarakat (desa/kelurahan) dengan sistem pembayaran online serta terintegrasi langsung dengan KPK, BPK, Kemendagri, Dirjen Pajak dan Bapenda Provinsi serta percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD);
5. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah;
7. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
8. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
9. Validasi data pajak daerah;
10. Melaksanakan program *host to host* (H2H) dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB-P2 dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
11. Akselerasi pelayanan publik di mall pelayanan public.

3.4.2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan

permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar meliputi : (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olah raga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, (r) kearsipan.

Untuk urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (*core competence*), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan pilihan meliputi : (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) perdagangan, (e) perindustrian, dan (f) transmigrasi. Selain itupula terdapat beberapa unsur yaitu unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan perencanaan dan keuangan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik).

Adapun penggunaan belanja daerah dalam APBD ditujukan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dan prioritas pembangunan provinsi tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Oleh sebab itu kebijakan belanja daerah tahun 2025 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan tetap melaksanakan kaidah ***money follow program,*** dan secara umum perubahan asumsi kebijakan belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 diarahkan untuk kegiatan-kegiatan :

a. Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan yang bermutu melalui sekolah terstandar dan terjangkau; peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan

akses dan kualitas pelayanan kesehatan, optimalisasi jaminan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan kesehatan RSUD, memperkuat upaya promotif dan preventif Germas; penguatan pelaksanaan sistem jaminan sosial melalui pengelolaan data penduduk miskin, pemberdayaan sosial, penurunan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui optimalisasi program penanggulangan kemiskinan lintas sektor; penurunan tingkat pengangguran melalui revitalisasi balai latihan kerja (BLK) daerah; peningkatan pembinaan kepemudaan, dan prestasi olahraga; dan peningkatan kualitas anak, perempuan dan kesetaraan gender.

b. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pada kawasan-kawasan strategis khususnya kawasan pengembangan pertambangan, pariwisata, perikanan, pertanian; percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan sarana pendidikan pada daerah-daerah yang belum tersentuh sarana pendidikan yang memadai; penyediaan infrastruktur kesehatan, sarana prasarana air bersih dan sanitasi, perbaikan pemukiman dan kawasan kumuh, serta ketersediaan listrik bagi masyarakat miskin khususnya pada lokus *stunting;* pemeliharaan infrastruktur perkotaan seperti infrastruktur jalan, penerangan jalan, dan taman kota; percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau akses internet; percepatan pembangunan infrastruktur antar wilayah untuk membuka aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah; dan peningkatan pelayanan pengendalian bencana.
c. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan promosi dan pemanfaatan Aspal Buton; pengembangan dan pemanfaatan sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata secara lestari dan berkelanjutan; peningkatan ketahanan pangan masyarakat (*food estate*) melalui penyiapan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, cadangan pangan, swasembada pangan; penyediaan sarana dan prasaran pariwisata sebagai penyangga utama pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional Wakatobi; revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya; dan peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam rangka penurunan emisi karbon dan emisi gas rumah kaca.
d. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah produksi UMKM dan IKM dengan fasilitasi dan pemberian bantuan diantaranya bantuan sarana dan

prasarana, pembinaan/pendampingan/pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku usaha industri kecil menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah dan pelaku kerja informal dalam upaya meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat.

e. Memenuhi pelaksanaan penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berbasis elektronik atau SPBE, penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), penguatan data dan informasi pembangunan, peningkatan pelayanan pemerintah melalui program smart city, peningkatan pelayanan terpadu, peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana dan prasarana aparatur/publik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyediaan anggaran kegiatan tahapan pelaksanaan pemilihan umum (PEMILU) Kabupaten Buton.
f. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat dalam menjawab isu-isu nasional antara lain dukungan pencapaian target SPM, penanggulangan dan percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak dan S*tunting*, pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan (*TPG-SDGs*), pendampingan program pangan tunai dan pendampingan program keluarga harapan.
g. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
h. Menyesuaikan gaji pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Sebagai gambaran kebutuhan dana untuk memenuhi pengeluaran daerah Kabupaten Buton, tabel 3.9 di bawah ini menampilkan proyeksi belanja pada perubahan tahun anggaran 2025 :

Tabel 3.10
Realisasi dan Target Belanja Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025
(dalam juta rupiah)

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2024	APBD Tahun 2025	Realisasi APBD Tahun 2025 s/d Bulan Juni *	Perubahan RKPD Tahun 2025
5	Belanja	**807.229,05**	**862.349,00**	-	**808.430,00**
5.1	Belanja Operasi	**555.838,06**	**602.069,00**	-	**572.237,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	338.539,37	426.060,00	-	420.680,00
5.1.02	Belanja Barang dan	181.971,79	171.538,00	-	149.663,00
5.1.03	Belanja Bunga	3.310,83	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	32.001,49	4.346,00	-	1.192,00
5.1.06	Belanja Bantuan	14,58	52,00	-	30,00
5.1.07	Belanja Subsidi	-	72,00		672,00
5.2	Belanja Modal	**139.464,45**	**145.987,00**	-	**125.976,00**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0	0	-	0
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan	21.095.01	30.338,00	-	28.892,00
5.2.3	Belanja Modal Bangunan dan	79.622.84	55.845,00	-	68.699,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	38.013.25	58.239,00	-	26.622,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	733,35	63,00	-	263,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.005,16	1.500,00	-	1.500,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	**0**	**2.377,00**	-	**500,00**
5.4	Belanja Transfer	**111,996.54**	**111.916,00**	-	**109.717,00**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0	0	-	0
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	111,996.54	111.916,00	-	109.717,00
	Surplus/(Defisit)	**49.883,96**	**-70.940,00**	-	**-28.670,00**

Sumber : BKAD Kab. Buton, Tahun 2024-2025
* data belum tersedia

3.4.3. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang akan terjadi maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) atau pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah atau pembayaran pokok utang.

Kebijakan pembiayaan daerah pada perubahan tahun anggaran 2025, diarahkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pembiayaan Penerimaan

   Merencanakan perubahan penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran 2024 sebagai salah satu sumber pendanaan pada perubahan APBD tahun anggaran 2025.

2. Kebijakan Pembiayaan Pengeluaran

   Pembiayaan pengeluaran pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 adalah perubahan penganggaran pembayaran pokok utang pada Bank Sultra.

Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pada tahun 2025 dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tersebar di seluruh perangkat daerah. Sebagai gambaran pembiayaan daerah, tabel 3.10 di bawah ini menampilkan proyeksi pembiayaan daerah pada perubahan tahun anggaran 2025 :

Tabel 3.11
Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Pada Perubahan RKPD
Tahun 2025
(dalam juta rupiah)

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2024	APBD Tahun 2025	Realisasi APBD Tahun 2025 s/d Bulan Juni *	Perubahan RKPD Tahun 2025
6.1	Penerimaan Pembiayaan	**33.268,81**	**70.940,00**	-	**28.670,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	33.268.81	70.940,00	-	28.670,00
6.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	**54.406,03**	0	-	**0**
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0	0		
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	54.406,03	0	-	0
	Jumlah Pembiayaan Neto	**(21.137,22)**	**70.940,00**	-	**28.670,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	**66.537,12**	**0,00**	-	**0,00**

Sumber : BKAD Kab. Buton, Tahun 2024-2025

* data belum tersedia

Secara lengkap proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Buton sebelum dan setelah perubahan kebijakan umum perubahan tahun anggaran 2025 terlihat pada tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.12
Realisasi dan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Buton
Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2024	APBD Tahun 2025	Realisasi APBD Tahun 2025 sampai Bulan Juni *	Perubahan RKPD Tahun 2025
4	Pendapatan	**858.188,17**	**791.408,00**	-	**779.764,00**
4.1	Pendapatan Asli Daerah	**37.340,16**	**34.000,00**	-	**63.454,00**
4.1.01	Pajak daerah	4.584,65	4.970,00	-	10.620,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.121,72	2.525,00	-	5.319,00
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.024,73	11.959,00	-	12.824,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	16.609,05	14.545.00	-	34.690,00
4.2	Pendapatan Transfer	**790.786,70**	**749.408,00**	-	**708.309,00**
4.2.01	Pendapatan transfer Pemerintah Pusat	768.996,07	724.468,00	-	683.368,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.790,63	24.940,00	-	24.940,00
4.3	Lain-lain Pendapatan yang sah	**30.061,31**	**8.000,00**	-	**8.000,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	21.117,64	0	-	0
4.3.02	Dana Darurat	0	0	-	0
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Hibah Dana Bos)	8.943,68	8.000,00	-	8.000,00
5	Belanja	**807.229,05**	**862.349,00**	-	**808.430,00**
5.1	Belanja Operasi	**555.838,06**	**602.069,00**	-	**572.237,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	338.539,37	426.060,00	-	420.680,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.971,79	171.538,00	-	149.663,00
5.1.03	Belanja Bunga	3.310,83	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	32.001,49	4.346,00	-	1.192,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14,58	52,00	-	30,00
5.1.07	Belanja Subsidi	-	72,00	-	672,00
5.2	Belanja Modal	**139.464,45**	**145.987,00**	-	**125.976,00**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0	0	-	0
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.095.01	30.338,00	-	28.892,00
5.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	79.622.84	55.845,00	-	68.699,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	38.013.25	58.239,00	-	26.622,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	733,35	63,00	-	263,00

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2024	APBD Tahun 2025	Realisasi APBD Tahun 2025 sampai Bulan Juni *	Perubahan RKPD Tahun 2025
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.005,16	1.500,00	-	1.500,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	**0**	**2.377,00**	-	**500,00**
5.4	Belanja Transfer	**111,996.54**	**111.916,00**	-	**109.717,00**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	111,996.54	111.916,00	-	109.717,00
	Surplus/(Defisit)	**49.883,96**	**-70.940,00**	-	**-28.670,00**
6.1	Penerimaan pembiayaan	**33.268,81**	**70.940,00**	-	**28.670,00**
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)				
6.1.02	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0
6.2	Pengeluaran pembiayaan	**54.406,03**	0	-	**0**
6.2.02	Penyertaan modal (Investasi) daerah	0	0	0	0
6.2.03	Pembayaran pokok	54.406,03	0	-	0
	Jumlah Pembiayaan Neto	**(21.137,22)**	**70.940,00**	-	**28.670,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	**66.537,12**	**0,00**	-	**0,00**

Sumber : BKAD Kab. Buton, Tahun 2024-2025

* data belum tersedia

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dirumuskan untuk mencapai target kinerja Pemerintah Kabupaten Buton yang dijabarkan kedalam RKPD Kabupaten Buton tahun 2025. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tersebut berpedoman pada arah kebijakan pemerintah dalam RKP tahun 2025, prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 sebagai bentuk keselarasan perencanaan pembangunan, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai triwulan kedua, proyeksi kerangka ekonomi makro, permasalahan dan isu strategis yang menjadi perhatian, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal. Selain itu, berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 menyebutkan bahwa dalam perumusan perubahan RKPD tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya keselarasan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Buton memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai bentuk penyelarasan pembangunan.

Berdasarkan tema dari RKP 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".** Dari tema tersebut, terdapat delapan arahan presiden terkait Prioritas Nasional dalam RKP 2025 yaitu: 1) memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); 2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru; 3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; 4) memperkuat pembangunan

Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; 5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; 7) memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi dan penyelundupan; 8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai yang adil dan makmur. Kedelapan prioritas nasional ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sehingga menciptakan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan tema RKP Tahun 2025.

Tema tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional pada akhir tahun 2025 melalui kerangka ekonomi makro untuk mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi (5,3-5,6 persen), penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (4,5-5,0 persen), Rasio Gini (0,379-0,382 persen), peningkatan Indeks Modal Manusia (0,56 persen), penurunan Tingkat Kemiskinan (7,8-8,0 persen), penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar (38,6 persen), peningkatan Nilai Tukar Petani (113-115) serta Nilai Tukar Nelayan (104-105).

Sebagai bentuk sinkronisasi dengan RKP tahun 2025 maka tema RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 adalah **"Mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Sulawesi Tenggara" (Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan, Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah bagi Masyarakat Sulawesi Tenggara).** Sejalan dengan sasaran dan target nasional maka sasaran dan target pembangunan Sulawesi Tenggara tahun 2025 adalah (i) Laju Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen, (ii) PDRB per Kapita sebesar 73,1 juta rupiah, (iii) Kontribusi PDRB Provinsi sebesar 0,9 persen, (iv) Tingkat Kemiskinan sebesar 10,04-10,54 persen, (v) Rasio Gini sebesar 0,365-0,371, (vi) Indeks Modal Manusia sebesar 0,53, (vii) Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 28,93 persen, (viii) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah sebesar 82,39, dan (ix) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,54-3,04 persen.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan propinsi Sulawesi Tenggara pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar seluruh lapisan masyarakat dengan sasaran:

- Meningkatnya kualitas layanan pendidikan;
- Meningkatnya kualitas layanan kesehatan; dan
- Meningkatnya kesetaraan gender, ketahanan keluarga.

Tujuan 2: Mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan perlindungan sosial dan memantapkan ketahanan sosial budaya bagi seluruh lapisan masyarakat dengan sasaran:

- Meningkatnya akses dan kualitas perlindungan sosial dan jaminan sosial;
- Meningkatnya taraf hidup masyarakat; dan
- Meningkatnya ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana.

Tujuan 3: Mewujudkan ruang ekspresi dan interaksi sebagai pondasi transformasi sosial dengan sasaran:

- Terwujudnya pembangunan karakter masyarakat;
- Terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan kerukunan umat beragama; dan
- Terwujudnya aktivitas budaya yang maju.

Tujuan 4: Mewujudkan transformasi ekonomi melalui pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, penciptaan lapangan kewirausahaan serta pengembangan konektivitas antar wilayah dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran:

- Meningkatnya kontribusi sektor unggulan daerah;
- Terjaganya stabilitas ekonomi;
- Meningkatnya daya saing investasi;
- Meningkatnya kapasitas fiskal daerah;
- Meningkatnya kualitas hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- Meningkatnya konektivitas antarwilayah; dan
- Meningkatnya inovasi IPTEK dan produktivitas ekonomi.

Tujuan 5: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas dengan sasaran:

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur; dan
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan RKP tahun 2025 dan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 maka Tema RKPD Kabupaten Buton pada tahun 2025 adalah **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah".** Target indikator makro untuk Perubahan RKPD Tahun 2025 masih berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten Tahun 2025 dengan memperhatikan capaian kinerja pada tahun 2024 dan target RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2029 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Buton
Tahun 2025

No	Indikator	Capaian Tahun 2024*	Target Tahun	
			RKPD Perubahan 2025	KEM-PPKF 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,20	3,50	3,50 - 4,03
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,95	2,38-2,83	2,38-2,83
3	Tingkat Kemiskinan (%)	13,99	13,04-13,98	13,04-13,98
4	Rasio Gini (Poin)	0,328	0,312-0,327	0,312-0,327
5	Indeks Modal Manusia (Indeks)	-	0,53	0,53
6	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	31,46	35,00	35,00
7	PDRB perkapita (Juta Rp)	43,41	44,38	44,38

Keterangan :) Sumber Data BPS Buton, 2024*

Adapun keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Buton yang termuat dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Buton tahun 2025-2029 dengan dokumen RPD 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Penyelarasan Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran Pembangunan Kabupaten Buton

RANCANGAN AWAL RPJMD 2025-2029		RPD 2023-2026	
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**
Tujuan 1. Meningkatkan Buton religius yang berpedoman pada nilai dan kebudayaan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat	**Indeks Kesalehan Sosial***	**Tujuan 4. Mewujudkan masyarakat Buton yang aman dan menghargai nilai-nilai budaya serta bersatu dalam pembangunan melalui pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman norma, tata nilai budaya Buton**	**Angka kriminalitas yang tertangani**
Sasaran 1.1 Meningkatkan kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**	Sasaran 4.2 Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat	Persentase penyelesaian tindak kejahatan
Sasaran 1.3 Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	*Crime Rate**		Persentase ormas aktif
Sasaran 1.2 Menguatnya nilai-nilai norma dan budaya kearifan lokal dalam kehidupan	Indeks Pembangunan Kebudayaan**	Sasaran 4.1 Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan
Tujuan 2. Mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berkualitas dengan berpedoman pada nilai religius	**Indeks Reformasi Birokrasi****	**Tujuan 3. Mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean governance*), baik (*good governance*), berkualitas dan bertanggung jawab.**	**Indeks Reformasi Birokrasi**
Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi**	Sasaran 3.1 Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP kabupaten

RANCANGAN AWAL RPJMD 2025-2029		RPD 2023-2026		
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**	**TUJUAN/SASARAN**		**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**
			Indeks kepuasan masyarakat	
			Opini BPK	
		Sasaran 3.2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa		Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang)
Tujuan 3. Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia	**Indeks Pembangunan Manusia***	**Tujuan 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**		**Indeks Pembangunan Manusia**
Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	Indeks Pendidikan**	Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan		Angka harapan lama sekolah
				Rata-rata Lama sekolah
		Sasaran 2.3 Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan
				Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional
Sasaran 3.2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	Indeks Kesehatan**	Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan		Angka harapan hidup
Sasaran 3.4 Meningkatnya kualitas keluarga yang sesuai norma keidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**	Sasaran 2.3 Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga		Kategori kabupaten layak anak

RANCANGAN AWAL RPJMD 2025-2029		RPD 2023-2026	
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**
Sasaran 3.5 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender**		Indeks pembangunan gender
Tujuan 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	**PRDB per Kapita****	**Tujuan 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**
Sasaran 4.1 Penurunan Penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan	Tingkat Kemiskinan*	Sasaran 2.2 Menurunnya angka kemiskinan daerah	Angka kemiskinan
	Rasio Gini*		Gini ratio
			Pendapatan perkapita
			Pengeluan perkapita
Tujuan 5. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman berbasis lingkungan yang asri dan ketahanan bencana	**Penurunan Intensitas Emisi GRK***	**Tujuan 1. Mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan**	**Indeks kualitas lingkungan hidup**
	Indeks Resiko bencana**		
Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	Sasaran 1.2 Terpeliharanya kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	Indeks kualitas air
			Indeks kualitas udara
			Indeks tutupan lahan
Sasaran 5.2 Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Ketahanan Daerah		
Tujuan 6. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkeadilan	**Indeks Infrastruktur**	**Tujuan 5. Mewujudkan konektivitas antar wilayah**	**Indeks konektivitas**

RANCANGAN AWAL RPJMD 2025-2029		RPD 2023-2026	
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**
Sasaran 6.1 Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas dasar (infrastruktur dasar) berkualitas	Indeks Infrastruktur Kawasan Permukiman	Sasaran 5.1 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata	Indeks Infrastruktur wilayah
Sasaran 6.2 Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	Indeks Kesenjangan Infrastruktur Perkotaan dan Pedesaan	Sasaran 5.2 Meningkatnya ketersediaan energi listrik	Rasio elektrifikasi
Tujuan 7. Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif guna meningkatkan pendapatan masyarakat	**Pertumbuhan Ekonomi***	**Tujuan 1. Mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan**	**Laju pertumbuhan ekonomi**
	Indeks Daya Saing Daerah**	**Tujuan 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**
Sasaran 7.1 Meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB selain Pertambangan dan Penggalian**	Sasaran 1.1 Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
	Indeks Ekonomi Hijau**		Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penganggalian
	Indeks Ekonomi Biru**		Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor
Sasaran 7.2 Meningkatnya hilirisasi produk unggulan berbasis potensi SDA	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan*		

RANCANGAN AWAL RPJMD 2025-2029		RPD 2023-2026	
TUJUAN/SASARAN	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**
Sasaran 7.3 Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Buton Terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara**		
Sasaran 7.4 Terjaganya daya beli ekonomi masyarakat	Tingkat Inflasi**		
Sasaran 7.5 Meningkatkan produktivitas tenaga kerja berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka**	Sasaran 2.2 Menurunnya angka kemiskinan daerah	Tingkat pengangguran terbuka

Adapun target tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Buton tahun 2025 yang termuat dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Buton tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Buton
pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025

VISI : **TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN**				
MISI	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**SATUAN**	**TARGET**
MISI 1: Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good dovernance*), serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang religius, kondusif dan berbudaya	Tujuan 1. Meningkatkan Buton religius yang berpedoman pada nilai dan kebudayaan dalam perilaku kehidupan bermasyarakat	Indeks Kesalehan Sosial*	Poin	70
	Sasaran 1.1 Meningkatkan kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**	Poin	88,13
	Sasaran 1.2 Menguatnya nilai-nilai norma dan budaya kearifan lokal dalam kehidupan	*Indeks Pembangunan Kebudayaan**	Poin	53,40
	Sasaran 1.2 Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	*Crime Rate**	Per 100.000 Penduduk	80,00
	Tujuan 2. Mengimplementasikan reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi**	Poin	55,81
	Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi**	Poin	55,81
MISI 2: Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat	Tujuan 3. Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,01
	Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	Indeks Pendidikan**	Poin	67,80
	Sasaran 3.2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan kesehatan	Indeks Kesehatan**	Poin	77,81

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN				
MISI	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**SATUAN**	**TARGET**
	Sasaran 3.3 Meningkatnya kualitas keluarga sesuai yang sejahtera dan sesuai norma kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Keluarga**	Poin	70,19
	Sasaran 3.4 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender**	Poin	0,459
	Tujuan 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	PDRB per Kapita**	Juta Rupiah/ Kapita	42,88
	Sasaran 4.1 Penurunan penduduk miskin dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan*	%	13,00
		Rasio Gini*	Poin	0,312
MISI 3: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	Tujuan 5. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman berbasis lingkungan yang asri dan ketahanan bencana	Penurunan Intensitas Emisi GRK*	%	35,00
		Indeks Risiko Bencana**	Poin	132,14
	Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	Poin	83,79
	Sasaran 5.2 Meningkatnya ketangguhan dan tanggap bencana wilayah	Indeks Ketahanan Bencana**	Poin	0,30
	Tujuan 6. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pembangunan yang handal dan berkeadilan	Indeks Infrastruktur	%	55,64
	Sasaran 6.1 Meningkatnya ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas dasar (infrastruktur dasar) berkualitas	Indeks Infrastruktur Kawasan Permukiman	%	55,51
	Sasaran 6.2 Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana	Indeks Kesenjangan Infrastruktur Perkotaan dan Pedesaan	%	0,266

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT BUTON YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN				
MISI	**TUJUAN / SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**SATUAN**	**TARGET**
	pembangunan di seluruh wilayah			
MISI 4: Meningkatkan ekonomi mandiri dan peluang kerja berbasis potensi lokal	Tujuan 7. Meningkatkan perekonomian daerah yang tumbuh dan inklusif guna meningkatkan pendapatan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi*	%	4,03
		Indeks Daya Saing Daerah **	Poin	3,46
	Sasaran 7.1 Meningkatnya pengembangan ekonomi unggulan daerah berasis pemanfaatan SDA	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB selain pertambangan dan penggalian**	%	3.637.685
		Indeks Ekonomi Hijau**	Poin	80,8
		Indeks Ekonomi Biru**	Poin	49,72
	Sasaran 7.2 Meningkatnya hilirisasi produk unggulan berbasis SDA	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan*	%	2,89
	Sasaran 7.3 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Buton Terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara	%	3,02
	Sasaran 7.4 Terjaganya daya beli ekonomi masyarakat	Tingkat Inflasi**	%	2±1
	Sasaran 7.5 Meningkatnya produktivitas tenaga kerja berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka**	%	2,83

Sumber : Rancangan RPJMD Kab. Buton Tahun 2025-2029

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari

pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

RKP tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan nasional yang disusun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan merupakan penerjemahan dari visi misi dan janji Presiden-Wakil Presiden terpilih tahun 2025-2029, dengan visi "***Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045***", yang akan diwujudkan melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita, meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan

perubahan. Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan kedalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, telah ditetapkan prioritas nasional, sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut:

PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial.

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, telah dirumuskan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Dan untuk mendukung tercapainya sasaran ini, dilaksanakan serangkaian arah kebijakan, yaitu (1) memperkokoh ideologi Pancasila; (2) penguatan demokrasi; (3) pemantapan komunikasi pembangunan dan informasi publik; (4) kepemimpinan nasional yang berasaskan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia; serta (5) transformasi akses terhadap keadilan dan pengarusutamaan hak asasi manusia.

PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.

Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan sasaran pembangunan yaitu:

(1) Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan tersebut dilaksanakan arah kebijakan melalui (a) penguatan pertahanan negara; (b) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; (c)

penguatan sistem keamanan negara; (d) profesionalisme pelayanan kepolisian; (e) penguatan keamaan laut dan hidro-oceanografi; (f) keamanan siber, sandi, dan sinyal; (g) penguatan infrastruktur dan jejaring *smart diplomacy*; (h) diplomasi ekonomi; dan (i) hubungan internasional yang kondusif.

(2) Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi dan air secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan tersebut, dilaksanakan arah kebijakan melalui (a) swasembada pangan; (b) swasembada energi; (c) swasembada air; (d) pemenuhan akses air minum aman; serta (e) percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk masyarakat.

(3) Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan sasaran pembangunan dimaksud, dilaksanakan arah kebijakan melalui (a) penguatan ekonomi syariah; (b) penguatan ekonomi digital; (c) penerapan ekonomi sirkular industri; (d) pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (e) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (f) penerapan ekonomi sirkular dari sumber sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara partisipatif (hulu); (g) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (hilir); (h) pembangunan rendah karbon; (i) pengembangan ekosistem tenaga kerja hijau; (j) pengelolaan hutan lestari; serta (k) pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru.

PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

Untuk mengawal keberhasilan proses pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di f36sentra produksi melalui peran aktif koperasi telah dirumuskan beberapa sasaran pembangunan dan arah kebijakan sebagai berikut:

(1) Sasaran melanjutkan pengembangan infrastruktur, dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) penguatan konektivitas dan layanan transportasi; (b) penguatan konektivitas dan transisi energi listrik; (c) penguatan konektivitas dan ekosistem digital; serta (d) pengembangan pengairan dan irigasi.

(2) Sasaran meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap produk domestik bruto dilaksanakan melalui arah kebijakan pendalaman sektor keuangan.

(3) Sasaran meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas dilaksanakan melalui arah kebijakan peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Peningkatan prioritas produktivitas utamanya difokuskan pada penciptaan ekosistem usaha yang dapat mendorong usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk tumbuh dan berkembang.

(4) Sasaran meningkatnya nilai tambah pariwisata dilaksanakan arah kebijakan pembangunan berkualitas dan berkelanjutan.

(5) Sasaran meningkatnya proporsi produk domestik bruto ekonomi kreatif dilaksanakan arah kebijakan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.

Pembangunan dan pembentukan modal manusia diarahkan untuk menjamin setiap anak sejak dalam kandungan, termasuk anak dalam kondisi khusus dapat tumbuh, berkembang dan terlindungi dari kekerasan serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik dan terlindungi. Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas, telah dirumuskan beberapa sasaran pembangunan dan arah kebijakan sebagai berikut:

(1) Sasaran pendidikan berkualitas yang merata akan diwujudkan dengan melaksanakan arah kebijakan (a) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (c) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (d) penguatan sistem tata kelola pendidikan; (e) penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang *science, technology, engineering, art and mathematic*; serta (f) penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi.

(2) Sasaran kesehatan untuk semua akan diwujudkan melalui arah kebijakan (a) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat; (b) pengendalian penyakit dan

pembudayaan hidup sehat; (c) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan; serta (d) penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola yang komprehensif.

(3) Sasaran keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif akan dicapai dengan arah kebijakan melalui (a) peningkatan ketangguhan keluarga; (b) peningkatan kualitas perlindungan anak; (c) peningkatan kualitas pemuda; (d) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan; serta (e) peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia.

(4) Sasaran iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi akan dicapai dengan arah kebijakan melalui (a) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja; (b) peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional; (c) pengembangan manajemen talenta nasional; serta (d) peningkatan prestasi olahraga.

PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam dalam meningkatkan nilai tambah dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut:

(1) Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan. Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan tersebut, dilaksanakan arah kebijakan melalui (a) pengembangan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor sebagai industri strategis nasional termasuk di dalamnya penguatan industri dasar; serta (b) pengembangan aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru.

(2) Sasaran integrasi ekonomi domestik dan global dilaksanakan serangkaian arah kebijakan pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global melalui (a) optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan penguatan sistem logistik nasional; (b) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; serta (c) peningkatan perdagangan domestik, antar wilayah dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global.

PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberatasan Kemiskinan

Untuk mengawal keberhasilan proses membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, telah dirumuskan beberapa sasaran pembangunan sebagai berikut:

(1) Sasaran perlindungan sosial yang adaptif. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, dilaksanakan arah kebijakan melalui (a) satu sistem registrasi sosial ekonomi; (b) reformasi sistem jaminan sosial; (c) integrasi bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif; (d) pengembangan ekonomi perawatan (*care economy*) untuk perluasan perlindungan sosial dan kesejahteraan; serta (e) inklusi sosial untuk kesejahteraan kelompok rentan.

(2) Sasaran meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, akan dilaksanakan arah kebijakan melalui penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.

(3) Sasaran mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan dilaksanakan melalui peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan.

(4) Sasaran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui pembangunan wilayah metropolitan dan pembangunan ibu kota Nusantara.

PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan, telah dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut:

(1) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) reformasi politik; (b) reformasi hukum; (c) pencegahan dan pemberantasan korupsi; (d) penguatan kelembagaan hukum, serta (e) transformasi sistem penuntutan dan *advocaat general*.

(2) Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) reformasi tata kelola pemerintahan; (b) inklusivitas dan transformasi digital layanan publik; dan (c) perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, tenaga kerja Indonesia dan keamanan insani.

(3) Terwujudnya Masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba.

(4) Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan dilaksanakan melalui arah kebijakan penanggulangan judi dan penyelundupan.

(5) Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan dilaksanakan melalui arah kebijakan peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara.

(6) Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi diwujudkan dengan serangkaian arah kebijakan optimalisasi pendapatan negara yang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif, melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan.

(7) Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diwujudkan dengan pengendalian inflasi yang dilaksanakan utamanya melalui pengendalian komponen inflasi harga bergejolak.

PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut:

(1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat, dan (b) pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa.

(2) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dilaksanakan melalui arah kebijakan (a) pembangunan berketahanan iklim dan (b) pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025

Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 masih merujuk pada prioritas pembangunan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026. Dengan memperhatikan isu/permasalahan yang dihadapi baik secara nasional maupun lingkup kewilayahan dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, maka ditetapkan prioritas dan fokus pembangunan Sulawesi Tenggara dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 sebagai berikut:

1. **Prioritas Pembangunan Provinsi 1:** Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif

   Rumusan fokus pembangunan pada prioritas ini adalah:

   a. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan menengah;
   b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional dan tetap fokus pada permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas daerah antara lain : Penanganan *Stunting.*
2. **Prioritas Pembangunan Provinsi 2:** Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik;

   Adapun fokus pembangunan pada prioritas ini adalah:

   a. Mengurangi beban pengeluaran dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan;
   b. Meningkatkan kapasitas sektor riil dan menciptakan iklim usaha kondusif;
   c. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat.
3. **Prioritas Pembangunan Provinsi 3:** Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan;

   Adapun rumusan fokus pembangunan pada prioritas ini adalah:

   a. Mendorong transformasi ekonomi pada Sektor Pariwisata, Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian dan hilirisasi pertambangan serta program padat karya untuk menyerap tenaga kerja;
   b. Peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah.
4. **Prioritas Pembangunan Provinsi 4:** Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

   Adapun fokus pembangunan pada prioritas ini adalah:

a. Optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penerapan SPBE (SIPD, SDI, dll);
b. Optimalisasi inovasi daerah.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2025

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan nasional dalam RKP tahun 2025, isu strategis pembangunan provinsi dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025, serta visi misi bupati dan wakil bupati terpilih, maka telah dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Buton yang termuat dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Buton tahun 2025-2029 yang merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap sebagai berikut: (i) Hilirisasi pengelolaan komoditas sektor unggulan Buton (pertambangan/Asbuton, pertanian, perikanan); (ii) Transformasi ekonomi berkelanjutan; (iii) Pemerintahan yang profesional dan akuntabel; (iv) Mewujudkan SDM yang cerdas, sehat dan unggul; (v) Peningkatan pelestarian dan pengembangan budaya Buton; (vi) Percepatan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat; (vii) Meningkatnya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup; (viii) Percepatan pemerataan pembangunan dan penataan wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Berdasarkan 8 (delapan) isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Buton tahun 2025 yang telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Secara umum arah kebijakan pembangunan ini disusun berdasarkan misi dan mempertimbangkan potensi, tantangan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Buton. Fokus utama arah kebijakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buton tahun 2025 mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Buton tahun 2025-2029 untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2025.

Tabel 4.4
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Buton

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1: Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang religius, kondusif dan berbudaya	Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan, serta penguatan kondusivitas keamanan dan ketertiban wilayah	Optimalisasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah
		Peningkatan penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal, serta penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan di Kabupaten Buton
		Akselerasi pembangunan pusat pemerintahan dan perwujudan pelayanan publik yang terintegrasi berbasis digital
		Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN dan pengelolaan aset daerah
		Transparansi proses perencanaan, penganggaran dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
		Penguatan integritas partai politik
MISI 2: Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan menuju masyarakat berkehidupan layak	Wajid PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya
		Mendorong partisipasi pendidikan tinggi sesuai dengan potensi unggulan wilayah seperti pertanian, pertambangan, perikanan dan pariwisata
		Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan *Internet Of Things* (IoT)
		Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Percepatan penanganan stunting serta percepatan eliminasi penyakit menular di daerah endemis, melalui pendekatan multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor
		Penyediaan pelayanan rujukan serta pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*), khususnya untuk daerah kepulauan dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
		Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal dan pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial seperti perkawinan anak
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
	Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif integratif	Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu
MISI 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Optimalisasi pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup	Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dalam mendukung pelestarian lingkungan
		Penguatan antisipasi dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap lingkungan dan ketahanan bencana
	Peningkatan aksesibilitas pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan publik	Peningkatan konektivitas, jaringan logistik dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan
		Pemanfaatan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global
		Pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (meningkatkan konektivitas antar wilayah dan menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan)
		Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk penanganan *backlog*
		Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
MISI 4: Meningkatkan ekonomi mandiri dan peluang kerja berbasis potensi lokal	Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan	Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	kondisi sosial budaya masyarakat	Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya
		Peningkatan peran PMA/PMDN terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi baru
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi
		Pembangunan ekosistem riset dan inovasi berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja
	Peningkatan kualitas pendampingan kewirausahaan daerah berbasis sektor UMKM baik pemberdayaan, permodalan, pengembangan produk hingga pemasaran	Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran) penerapan teknologi dan kemitraan usaha
	Peningkatan tenaga kerja yang produktif dan sesuai kondisi pasar kerja	Peningkatan kualitas serta kuantitas Sumber Daya Manusia lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lapangan usaha

Sumber : Rancangan RPJMD Kab. Buton tahun 2025-2029

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan, maka perumusan tema pembangunan dilakukan untuk menjawab isu strategis pembangunan tahun 2025, maka Pemerintah Kabupaten Buton telah merumuskan tema pembangunan tahun 2025, yaitu ***"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah",*** dengan fokus pembangunan peningkatan kualitas SDM melalui pendekatan formal dan informal; penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, peningkatan kualitas perumahan masyarakat miskin, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perluasan akses kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya pendidik, pemerataan sarana

dan prasarana serta ketersediaan perbekalan kesehatan, peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dan perdesaan.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam lima Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2025, yaitu:

PPD 1: Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar.

PPD 2: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas.

PPD 3: Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan

PPD 4: Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya.

PPD 5: Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan keselarasan kebijakan pembangunan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, maka rumusan prioritas pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan sinergitas dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025, dan prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025. Keterkaitan penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2025, dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dan prioritas pembangunan provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Prioritas Nasional RKP 2025		**Prioritas Pembangunan RKPD Sulawesi Tenggara 2025**		**Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Buton 2025**		**Prioritas Nasional dan Propinsi yang Terkait**
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan	PPP 1	Pembangunan manusia yang unggul dan kompetitif	PPD 1	Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	**Prioritas Nasional**: PN 1, PN 3 **Prioritas Provinsi**: PPP 1, PPP 2

Prioritas Nasional RKP 2025		Prioritas Pembangunan RKPD Sulawesi Tenggara 2025		Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Buton 2025		Prioritas Nasional dan Propinsi yang Terkait
	Perlindungan Sosial					
PN 2	Memantapkan Sistem pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.	PPP 2	Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik	PPD 2	Pengurangan kesenjangan antar antar wilayah melalui penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka konektivitas	**Prioritas Nasional**: PN 3 **Prioritas Provinsi**: PPP 3
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	PPP 3	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pemerataan pembangunan	PPD 3	Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	**Prioritas Nasional**: PN 2, PN 5, PN 6 **Prioritas Provinsi**: PPP 3
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi,	PPP 4	Tata kelola pemerintahan yang baik	PPD 4	Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan	**Prioritas Nasional**: PN 4, PN 8 **Prioritas Provinsi**:

Prioritas Nasional RKP 2025		Prioritas Pembangunan RKPD Sulawesi Tenggara 2025		Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Buton 2025		Prioritas Nasional dan Propinsi yang Terkait
	Pendidikan Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas				pelestarian cagar budaya	PPP 3
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri			PPD 5	Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	**Prioritas Nasional**: PN 7, PN 8 **Prioritas Provinsi**: PPP 4
PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberatasan Kemiskinan					
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan					
PN 8	Memperkuat Penyelarasan					

Prioritas Nasional RKP 2025		Prioritas Pembangunan RKPD Sulawesi Tenggara 2025		Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Buton 2025		Prioritas Nasional dan Propinsi yang Terkait
	Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur					

Sumber : Hasil Pengolahan

Program unggulan Kepala Daerah Kabupaten Buton dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan. Penjabaran program unggulan kepala daerah Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Buton

PROGRAM UNGGULAN	PROYEK STRATEGIS	URAIAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Digitalisasi desa	Mempercepat layanan warga desa dengan menghadirkan command center dan sistem pelayanan berbasis digital.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	Integrated single database	Integrated Single Database akan menghubungkan data seluruh OPD dalam satu sistem yang terpadu, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	Mall pelayanan publik (MPP)	Menghadirkan layanan terpadu berbasis digital dan fasilitas memadai untuk mempermudah akses masyarakat. Peningkatan pelayanan juga dilakukan dengan pengelolaan manajemen asset secara	Program Pelayanan Penanaman Modal Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

PROGRAM UNGGULAN	PROYEK STRATEGIS	URAIAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
		terpusat serta peningkatan kesejahteraan ASN	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Penyelengaraan Pengawasan
HARMONISASI KEHIDUPAN BERAGAMA	Bantuan tempat ibadah / lembaga keagamaan.	Mendorong pembangunan fasilitas keagamaan di seluruh wilayah termasuk kompleks perkantoran sebagai upaya memperkuat peran tempat ibadah dan lembaga keagamaan dalam membentuk masyarakat Buton yang religius.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Bantuan kesejahteraan guru honorer, guru madrasah diniyah (MADIN)/taman pendidikan Qur'an (TPQ)/pondok ppesantren	Pemberian bantuan kesejahteraan diberikan kepada Guru Honorer, Guru Madrasah Diniyah (MADIN), TPQ, Pondok Pesantren, serta tokoh agama sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam membangun karakter dan spiritual masyarakat menuju Buton yang religius	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Beasiswa penghapal /hafiz Al – Qur'an.	Pemberian beasiswa kepada para penghafal atau hafiz Al-Qur'an sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan keagamaan dan upaya mencetak generasi Qur'ani yang berakhlak mulia di Kabupaten Buton.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Penguatan dan fasilitasi forum kerukunan umat beragama (FKUB)	Penguatan dan fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dilakukan untuk mendorong dialog antarumat beragama serta meningkatkan toleransi dan keharmonisan kehidupan masyarakat di Kabupaten Buton.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
PROGRAM RELIGIUS	Program literasi Al-Qur'an	Dilakukan peningkatan kegiatan kerohanian rutin dilakukan di sekolah, kantor, dan lingkungan masyarakat.	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemerintahan dan

PROGRAM UNGGULAN	PROYEK STRATEGIS	URAIAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
			Kesejahteraan Rakyat
	Pembiasan perilaku religi (P3R) di sekolah dilakukan secara rutin dan terjadwal dengan baik	Program Pembiasaan Perilaku Religi (P3R) di sekolah dilakukan secara rutin dan terjadwal untuk semua agama. Tujuannya agar siswa terbiasa menjalankan ajaran agamanya masing-masing, membentuk sikap yang baik, serta menumbuhkan rasa toleransi dan hidup rukun di sekolah.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Program Pengelolaan Pendidikan
	Program santunan duka pemerintah kabupaten (Pemkab) Buton	Pemberian bantuan/santunan duka bagi masyarakat/keluarga yang mengalami dukacita sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
PENINGKATAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN WILAYAH	Penataan taman/taman terbuka hijau (RTH) dan lokasi pedagang kaki lima (PKL)	Penataan taman dan ruang terbuka hijau (RTH) dilakukan agar menjadi ruang publik yang asri, nyaman, dan fungsional. Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) juga ditata secara bersih dan tertata rapi sebagai pusat ekonomi rakyat yang berkelanjutan tanpa mengganggu keindahan lingkungan.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Pengelolaan sampah terpadu	Pengelolaan Sampah Terpadu dilakukan dengan penjadwalan pengambilan sampah secara rutin dan teratur agar prosesnya lebih efektif dan menyeluruh yang diatur melalui regulasi daerah	Program Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Tempat pembuangan akhir (TPA)/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)/tempat pengolahan	Dilakukan secara terintegrasi untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang efisien dan ramah lingkungan. Fasilitas ini berperan penting dalam meminimalkan volume	Program Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau

PROGRAM UNGGULAN	PROYEK STRATEGIS	URAIAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
	sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R)/tempat penampungan sementara (TPS)	sampah, memaksimalkan daur ulang, serta menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan secara berkelanjutan.	Kerusakan Lingkungan Hidup
	Bank sampah	Dimanfaatkan menjadi barang bernilai seperti bahan bakar batu bara dan minyak melalui pemanfaatan teknologi modern (mesin pengolah sampah) sehingga mendukung lingkungan bersih sekaligus mendorong ekonomi sirkular yang berkelanjutan.	Program Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Gerakan lingkungan bersih	Gerakan Lingkungan Bersih dilakukan secara gotong royong melibatkan sekolah, desa, dan perkantoran sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan
PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	Program beasiswa pendidikan Dokter per kecamatan	Program Beasiswa Pendidikan Dokter Per Kecamatan disiapkan untuk mendukung putra-putri daerah menempuh pendidikan kedokteran, guna mencetak tenaga medis yang siap kembali mengabdi di wilayah asalnya	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Ajang/lomba kreatifitas guru dan siswa berprestasi	Ajang atau lomba kreativitas dibidang pendidikan, kebudayaan, dan kepemudaan diselenggarakan sebagai ruang ekspresi dan pengembangan potensi bagi guru, siswa, dan pemuda berprestasi.	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan

PROGRAM UNGGULAN	PROYEK STRATEGIS	URAIAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
			Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	Beasiswa bagi masyarakat/siswa miskin	Pemberian beasiswa bagi masyarakat/siswa berprestasi atau siswa miskin untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan dan mendorong pemerataan akses belajar	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Literasi berbasis inklusi sosial	Mendorong perpustakaan dan pusat belajar menjadi ruang terbuka yang ramah bagi semua kalangan, termasuk kelompok rentan dan marginal.	Program Pembinaan Perpustakaan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	Taman baca integratif	Taman Baca Integratif dikembangkan sebagai ruang belajar yang menyenangkan dan terbuka untuk semua usia mendukung pembelajaran sepanjang hayat di tengah masyarakat.	Program Pembinaan Perpustakaan Program Pengelolaan Pendidikan
	Percepatan penanganan stunting	Percepatan penanganan stunting dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif, edukasi kesehatan, serta peningkatan akses layanan dasar bagi ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pemberdayaan Masyrakat Bidang Kesehatan

PROGRAM UNGGULAN	PROYEK STRATEGIS	URAIAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Pembinaan Keluarga Berencana Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengembangan Permukiman Program Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Program Pencatatan Sipil Program Rehabilitasi Sosial Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan

PROGRAM UNGGULAN	PROYEK STRATEGIS	URAIAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
			Pengembangan Prasarana Pertanian
	Revitalisasi posyandu	Peningkatan kapasitas kader, penyediaan sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi layanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*)	Pelayanan Kesehatan untuk Semua (Health for All) merupakan upaya memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpencil, mendapatkan akses layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
PENGEMBANGAN DAN INOVASI	Fasilitasi dewan riset daerah	Memperkuat lembaga riset di daerah melalui rekomendasi kebijakan berbasis penelitian. Program ini juga mendorong kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri untuk pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan.	Program Riset dan Inovasi Daerah
	Penelitian untuk hilirisasi komoditas	Program penelitian hilirisasi komoditas perikanan, pertanian, dan sektor unggulan lainnya. Bertujuan mengembangkan teknologi agar produk lokal punya nilai tambah.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Riset dan Inovasi Daerah
	Penerapan teknologi tepat guna	Program teknologi tepat guna mendorong inovasi daerah lewat solusi praktis sesuai kebutuhan lokal. Tujuannya untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program
	Ajang kreasi dan inovasi daerah	Program ajang kreasi dan inovasi daerah di Kabupaten Buton bertujuan menggali potensi lokal dan mendorong masyarakat berinovasi. Kegiatan ini menjadi wadah	Program Riset dan Inovasi

PROGRAM UNGGULAN	PROYEK STRATEGIS	URAIAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
		bagi generasi muda dan pelaku usaha untuk menampilkan ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi pembangunan.	
	Expo produk unggulan daerah	Program Expo Produk Unggulan Daerah bertujuan mempromosikan komoditas unggulan seperti perikanan dan pertanian kepada publik dan mitra usaha. Kegiatan ini membantu memperluas pasar dan meningkatkan nilai ekonomi produk lokal.	Program Promosi Penanaman Modal Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Pengembangan UMK
PENATAAN WILAYAH	Penyusunan masterplan penataan/perluasan kawasan	Program Penyusunan Masterplan Penataan/Perluasan Kawasan bertujuan merancang pengembangan wilayah secara terarah dan berkelanjutan. Masterplan ini membantu mengatur tata ruang untuk mendukung ekonomi, layanan publik, dan lingkungan yang lebih baik. Dilakukan dengan percepatan penyelesaian RTRW dan RDTR.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Lomba/sayembara desain penataan/perluasan kawasan	Program lomba desain penataan kawasan di Kabupaten Buton bertujuan menjaring ide-ide kreatif untuk tata ruang yang fungsional dan menarik. Kegiatan ini juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, ahli, dan masyarakat dalam pembangunan kawasan yang terencana.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Pembangunan penataan/perluasan kawasan perkotaan	Program penataan dan perluasan kawasan perkotaan di Kabupaten Buton fokus pada pengembangan Buton Bersinar dan wajah ibu kota. Tujuannya untuk membangun pusat kota yang tertata, modern, meningkatkan ekonomi, dan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan

PROGRAM UNGGULAN	PROYEK STRATEGIS	URAIAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
		mendukung layanan pemerintahan	
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	Jalan dan jembatan	Meningkatkan konektivitas antarwilayah baik jalan darat maupun laut lewat pembangunan infrastruktur. Program ini juga mencakup penerangan jalan untuk mendukung keselamatan dan aktivitas ekonomi warga di malam hari.	Program Penyelenggaraan Jalan
	Jaringan irigasi terpadu usaha tani (JITUT)	Program Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kabupaten Buton bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi air irigasi hingga ke petak-petak tersier lahan pertanian. Hal ini dapat mendukung perluasan sawah (cetak sawah) untuk produktivitas pertanian.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Jalan usaha tani (JUT)	Program Jalan Usaha Tani (JUT) di Kabupaten Buton bertujuan mempermudah petani mengangkut alat dan hasil pertanian. Dengan membangun dan memperbaiki jalan tani, program ini diharapkan meningkatkan efisiensi kerja dan kesejahteraan petani.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Embung pertanian	Program embung pertanian di Kabupaten Buton bertujuan menyediakan cadangan air untuk lahan pertanian, terutama saat kemarau. Embung juga berfungsi menampung air hujan agar bisa dimanfaatkan petani secara optimal.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Rehabilitasi tanggul sungai	Program Rehabilitasi Tanggul Sungai di Kabupaten Buton bertujuan memperbaiki tanggul rusak agar bisa mencegah banjir dan melindungi pemukiman serta lahan pertanian. Perbaikan dilakukan secara berkelanjutan agar tanggul	Program Pengelolaan Sumber Daya Air

PROGRAM UNGGULAN	PROYEK STRATEGIS	URAIAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
		berfungsi optimal dan aman bagi masyarakat.	
	Penataan trotoar dan drainase kota	Program Penataan Trotoar dan Drainase Kota di Buton bertujuan memperbaiki fasilitas pejalan kaki dan saluran air agar lebih rapi dan aman. Penataan ini juga mendukung kenyamanan, kelancaran aktivitas kota, dan mencegah genangan saat hujan.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase
	Sistem penyediaan air minum (SPAM)	Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Buton bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih yang layak dan berkelanjutan. Program ini mencakup pembangunan dan pengembangan jaringan distribusi air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan layanan publik.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minun
	Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)/sanitasi	Program Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) di Buton bertujuan meningkatkan sanitasi lingkungan melalui pengolahan limbah yang baik. Program ini mendukung kesehatan masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Sarana dan prasarana/utilitas obyek wisata	Program sarana dan prasarana objek wisata di Buton bertujuan mendukung kenyamanan pengunjung melalui peningkatan akses, fasilitas, dan utilitas dasar. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata daerah.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT	Kemudahan investasi	Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan dan dukungan infrastruktur. Langkah ini diharapkan menarik lebih banyak investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal

PROGRAM UNGGULAN	PROYEK STRATEGIS	URAIAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
	Pembentukan klaster usaha menengah kecil mikro (UMKM)	Mendorong kolaborasi antar pelaku usaha sejenis agar lebih produktif dan kompetitif. Klaster ini juga membantu memperluas pasar dan memperkuat rantai pasok lokal. Hal ini dilakukan dengan memperkuat kelembagaan UMKM dan IKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Gerakan "*one village one product*"	Mendorong setiap desa mengembangkan produk unggulan khas daerahnya. Program ini mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dan memperkuat identitas produk desa agar lebih dikenal luas.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Penyelenggaran Jalan
	Pengembangan ekonomi kreatif	Mendorong potensi seni, budaya, dan inovasi lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Melalui pelatihan, promosi, dan dukungan usaha, program ini memperkuat peran pelaku ekonomi kreatif di daerah.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Proses Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Pelatihan start-up wirausaha Muda	Membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan berbisnis. Program ini mendorong lahirnya wirausaha baru yang inovatif dan mandiri di daerah.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan	Peningkatan keterampilan SDM, khususnya kaum muda dan perempuan, melalui pelatihan, bantuan stimulan,	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan

PROGRAM UNGGULAN	PROYEK STRATEGIS	URAIAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
	jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok kaum muda dan perempuan.	dan pendampingan pemasaran bagi pelaku UMKM. Dengan program ini, pelaku usaha diharapkan lebih mandiri, produktif, dan mampu bersaing di pasar.	Usaha Mikro (UMKM)
	Kemudahan perijinan untuk berusaha.	Mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan bagi pelaku usaha. Hal ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang ramah, mendorong pertumbuhan usaha, dan membuka lapangan kerja.	Program Pelayanan Penanaman Modal Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Hilirisasi produk unggulan	Meningkatkan potensi dan pengelolaan produk unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, dan industri pengolahan. Melalui pemenuhan sarana prasarana ekonomi sampai industri pengolahan dan perbaikan regulasi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Pelatihan ketrampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja	Pelatihan keterampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja asli Buton diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal. Program ini bertujuan membuka peluang kerja yang lebih luas (multisektor) serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat daerah.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Magang dan penyaluran tenaga kerja baru	Membekali generasi muda dengan pengalaman kerja nyata serta menghubungkan mereka dengan dunia industri.	Program Penempatan Tenaga Kerja

PROGRAM UNGGULAN	PROYEK STRATEGIS	URAIAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
	Bursa Lowongan Kerja (Job Fair) dan informasi pasar tenaga kerja on- line.	Bursa Lowongan Kerja (Job Fair) dan layanan informasi pasar tenaga kerja secara online diselenggarakan untuk mempertemukan pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja secara lebih mudah dan cepat.	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Pembinaan kelompok petani/nelayan	Pembinaan kelompok petani dan nelayan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi, akses pasar, dan keberlanjutan usaha mereka. Program ini juga menyasar wirausaha muda dan petani milenial agar terlibat aktif dalam sektor pertanian dan perikanan modern, mendorong regenerasi petani, serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Program Penyuluhan Pertanian Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Bantuan sosial untuk rumah tangga miskin (RTM)/ kaum difabel/kelompok Lansia	Bantuan sosial diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), kaum difabel, dan kelompok lansia sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan sosial dari pemerintah. Program ini bertujuan untuk meringankan beban hidup, meningkatkan kesejahteraan, dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari layanan dasar.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Proyek padat karya	Proyek Padat Karya dilaksanakan untuk menciptakan lapangan kerja sementara bagi masyarakat, terutama yang terdampak ekonomi. Program ini memanfaatkan tenaga kerja lokal dalam pembangunan infrastruktur dasar, sehingga sekaligus meningkatkan pendapatan dan memperkuat ekonomi masyarakat secara langsung.	Program Penempatan Kerja

PROGRAM UNGGULAN	PROYEK STRATEGIS	URAIAN	PROGRAM PRIORITAS (NOMENKLATUR)
	Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH)/ rumah korban bencana.	Bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan rumah korban bencana diberikan untuk memastikan masyarakat tinggal di hunian yang aman, sehat, dan layak.	Program Kawasan Permukiman
	Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) – online.	Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) – Online merupakan inisiatif untuk memudahkan masyarakat miskin dan rentan dalam mengakses berbagai layanan perlindungan dan rehabilitasi sosial.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sumber Data: Rancangan RPJMD Kab. Buton Tahun 2025-2029

4.2.4. Kebijakan Pembangunan Daerah Dengan Pendekatan Substansi Secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial

Penyusunan perencanaan daerah juga memperhatikan konsep pendekatan substansi secara holistik, tematik, integratif dan spasial. Dimana pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keruangan dalam perencanaan.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buton tahun 2025, dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat memiliki nilai manfaat dan dampak terhadap penyelesaian berbagai isu strategis dan atau permasalahan pembangunan daerah.

4.2.5. Kebijakan Penanganan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menegaskan bahwa dalam rangka penghapusan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 diperlukan suatu keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama antara kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, juga kekuatan di luar pemerintah seperti organisasi filantropi bidang sosial kemasyarakatan dalam membuat daya ungkit yang besar untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

Tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Buton masih kategori cukup tinggi. Dimana pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin sebesar 14,15 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 13,77 persen dan meningkat menjadi 14,41 ribu jiwa atau 13,99 persen di tahun 2024. Demikian pula jumlah penduduk miskin ekstrem pada tahun 2022 sebesar 894 ribu jiwa atau 0,83 persen dan menurun menjadi 384 ribu jiwa atau 0,37 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin diproyeksi turun menjadi 13,40 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 13,04 persen.

Proyeksi penurunan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem pada tahun 2025 dilakukan dengan intervensi sektor-sektor pemicu kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui optimalisasi program-program penanggulangan kemiskinan lintas sektor program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah Kabupaten Buton dalam penanggulangan kemiskinan melalui strategi mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan jumlah kantong kemiskinan. Adapun program penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Program Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025

Perangkat Daerah	Program	Strategis	KET
Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran	L
	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatkan Pendapatan	L

Perangkat Daerah	Program	Strategis	KET
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran	L
	Program Penanganan Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran	L
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	TL
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	P
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	P
	Program Pencatatan Sipil	Mengurangi Beban Pengeluaran	TL
Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	TL
		Mengurangi Beban Pengeluaran	L
Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	L
Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	TL
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	P
	Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	TL

Perangkat Daerah	Program	Strategis	KET
Dinas Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatkan Pendapatan	TL
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatkan Pendapatan	L
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
Dinas Koperasi dan UKM	Program Pemberdayaan UMKM	Meningkatkan Pendapatan	TL
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatkan Pendapatan	L
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatkan Pendapatan	TL
Dinas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Pendapatan	L
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatkan Pendapatan	L
	Program Hubungan Industrial	Mengurangi Beban Pengeluaran	TL
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	TL
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	TL
	Program Pengembangan Perumahan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	L
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	TL
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	TL
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	TL

Perangkat Daerah	Program	Strategis	KET
	Program Penyelenggaraan Jalan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	TL
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatkan Pendapatan	P
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Mengurangi Beban Pengeluaran	TL
	Program Perlindungan Perempuan	Mengurangi Beban Pengeluaran	P
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Meningkatkan Pendapatan	L
Dinas Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatkan Pendapatan	TL
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	TL
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatkan Pendapatan	P
	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatkan Pendapatan	TL
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	P
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	P
Dinas Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	TL

Perangkat Daerah	Program	Strategis	KET
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	P

Sumber Data: Rancangan RPJMD Kab. Buton 2025-2029

Selanjutnya dalam upaya peningkatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal (SPM) akan diintervensi melalui kebijakan beberapa program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagaimana pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Program Urusan Perangkat Daerah Berdasarkan Mandat
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025

No	Urusan	Kriteria SPM	Integrasi Program Nomenklatur
	Urusan Pendidikan		
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Program Pengelolaan Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Program Pengelolaan Pendidikan
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Program Pengelolaan Pendidikan
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan
	Urusan Kesehatan		
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Urusan	Kriteria SPM	Integrasi Program Nomenklatur
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7.	Pelayanan kesehatan pada lanjut usia	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ)	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	Jumlah warga negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Urusan	Kriteria SPM	Integrasi Program Nomenklatur
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus)*	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus)* yang mendapatkan peayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Program Pengembangan Perumahan
	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari oenegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana

No	Urusan	Kriteria SPM	Integrasi Program Nomenklatur
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Urusan Sosial		
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial
4.	Rehabilitasi sosial dasar tunas sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Penanganan Bencana

4.2.6. Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting*

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* mengatur tentang strategi dan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan *stunting* menjadi 14% pada tahun 2024. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang menghasilkan angka prevalensi *stunting* tahun 2023 sebesar 21,5% (dari 21,6% di tahun 2022), maka pemerintah telah melakukan pemutakhiran terhadap target penurunan prevalensi *stunting*, dan pada tahun 2025 diproyeksi mengalami penurunan menjadi 20,78 persen.

Untuk mencapai target prevalensi *stunting* tahun 2025, perlu sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Perencanaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan kegiatan lintas sektoral menjadi salah satu wujud keterlibatan pemerintah Kabupaten Buton dalam penanganan *stunting* guna mendukung

percepatan penurunan *stunting* secara nasional. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Buton tahun 2025 dalam upaya percepatan penurunan *stunting* diantaranya dengan peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita, peningkatan sarana prasarana posyandu, akses air bersih dan sanitasi layak. Adapun program-program pendukung pencapaian target tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Program Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting*
Tahun 2025

OPD	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Layanan
PROGRAM INTERVENSI KONVERGENSI DAERAH			
Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Remaja Putri	Konsumsi tablet tambah darah (TTD) remaja putri
			Skrining anemia terhadap remaja putri
Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Ibu Nifas	Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK)
			Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil
			Pelayanan keluarga berencana (KB) pascapersalinan
			Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan
			Pemeriksaan kehamilan 6 kali selama masa kehamilan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Sasaran Bayi Usia 0 - 23 Bulan	Anak usia 0-23 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar

OPD	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Layanan
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tatalaksana gizi buruk
			Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi
			Anak usia 0-23 bulan mendapatkan imunisasi rutin lengkap
			Anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan
			Anak usia 0-5 bulan mendapatkan air susu ibu (ASI) ekslusif
			Anak usia 6-23 bulan mendapatkan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) beragam
			Anak usia 6-23 bulan mendapatkan obat cacing/Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan
			Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat air susu ibu (ASI)
			Praktik Inisiasi Menyusui Dini
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Sasaran Bayi Usia 24 - 59 Bulan	Anak usia 24-59 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Anak usia 24-59 bulan dipantau pertumbuhan dan perkembangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Anak usia 24-59 bulan gizi buruk mendapatkan tatalaksana gizi buruk
			Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi

OPD	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Layanan
			Anak usia 24-59 bulan mendapatkan obat-obat cacing/Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan
			Jumlah temuan kasus pneumonia pada anak usia 24-59 bulan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Remaja Putri	Konsumsi tablet tambah darah (TTD) remaja putri
			Skrining anemia terhadap remaja putri
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rumah Tangga dan Masyarakat	Akses terhadap air minum aman
			Akses terhadap sanitasi aman
			Anak usia 0-59 bulan mendapatkan akta kelahiran dan Katu Identitas Anak (KIA)
			Kelompok sasaran mendapatkan pendampingan
			Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
			Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi di desa dan kelurahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rumah Tangga dan Masyarakat	Akses terhadap air minum aman
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Akses terhadap sanitasi aman
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Tangga dan Masyarakat	Akses terhadap sanitasi aman
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		

OPD	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Layanan
Dinas Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Ibu Nifas	Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK)
		Sasaran Bayi Usia 0 - 23 Bulan	Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi
			Anak usia 6-23 bulan mendapatkan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) beragam
		Sasaran Bayi Usia 24 - 59 Bulan	Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi
		Rumah Tangga dan Masyarakat	Anak usia 0-59 bulan mendapatkan akta kelahiran dan Katu Identitas Anak (KIA)
Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Ibu Nifas	Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Sasaran Bayi Usia 0 - 23 Bulan	Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi
			Anak usia 6-23 bulan mendapatkan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) beragam
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Sasaran Bayi Usia 24 - 59 Bulan	Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rumah Tangga dan Masyarakat	Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi di desa dan kelurahan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi di desa dan kelurahan
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rumah Tangga dan Masyarakat	Anak usia 0-59 bulan mendapatkan akta kelahiran dan Katu Identitas Anak (KIA)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Rumah Tangga dan Masyarakat	Kelompok sasaran mendapatkan pendampingan

OPD	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Layanan
	MASYARAKAT HUKUM ADAT		
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Ibu Nifas	Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil
			Pelayanan keluarga berencana (KB) pascapersalinan
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rumah Tangga dan Masyarakat	Kelompok sasaran mendapatkan pendampingan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
Dinas Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rumah Tangga dan Masyarakat	Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi di desa dan kelurahan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		

KEGIATAN PENDUKUNG

OPD	Program	Kegiatan
Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
BAPPEDA	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
BKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

OPD	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Layanan
BALITBANG	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2025 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan turut mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat. Penyusunan rencana program dan kegiatan dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, atas bawah *(top down)* dan bawah atas *(bottom up),* serta pendekatan substansi secara holistik-tematik, integratif, dan spasial dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD tahun 2025-2029 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2025.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas, dilaksanakan dengan kolaborasi potensi sumber pendanaan dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber pendanaan lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Program pembangunan daerah tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten, terdiri atas Urusan Wajib sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Urusan Pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025, prioritas program pembangunan daerah dan indikator kinerja yang ingin dicapai tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							**244.242.227.434,00**	**251.961.499.492,00**	**264.300.491.636,00**	**20.058.264.202,00**							**369.032.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**244.242.227.434,00**	**251.961.499.492,00**	**264.300.491.636,00**	**20.058.264.202,00**							**369.032.500.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**244.242.227.434,00**	**251.961.499.492,00**	**264.300.491.636,00**	**20.058.264.202,00**							**369.032.500.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**152.750.566.978,00**	**197.069.750.492,00**	**202.691.088.286,00**	**25.246.933.022,00**							**177.997.500.000,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	57.000.000,00	60.590.800,00	60.590.800,00	3.590.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pendidikan Kabupaten Buton		65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	15.748.000,00	15.748.000,00	8.748.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	6.721.000,00	6.721.000,00	-279.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	6.721.000,00	6.721.000,00	-279.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.206.800,00	7.206.800,00	206.800,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.011.000,00	7.011.000,00	11.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	7.000.000,00	10.977.000,00	10.977.000,00	3.977.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	6.206.000,00	6.206.000,00	-8.794.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			16.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	150.286.566.978,00	196.614.193.907,00	202.439.527.086,00	52.152.960.108,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pendidikan Kabupaten Buton		175.104.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1371/14 Orang/bulan	1371/14 Orang/bulan	150.214.566.978,00	196.553.507.907,00	202.421.387.086,00	52.206.820.108,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			175.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	48.160.000,00	12.000.000,00	-38.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	0 Laporan	7.000.000,00	6.386.000,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	-8.860.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			16.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	145.000.000,00	0,00	0,00	-145.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pendidikan Kabupaten Buton		175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	687.000.000,00	166.064.000,00	46.856.000,00	-640.144.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pendidikan Kabupaten Buton		740.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	10.000.000,00	3.776.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	15.218.000,00	2.723.000,00	-47.277.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	4.489.000,00	1.785.000,00	-28.215.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	5.721.000,00	2.558.000,00	-12.442.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	500.000.000,00	130.860.000,00	39.790.000,00	-460.210.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah*				100 %	100 %	1.200.000.000,00	27.110.000,00	12.200.000,00	-1.187.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pendidikan Kabupaten Buton		1.445.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	0 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	2 Unit	150.000.000,00	27.110.000,00	12.200.000,00	-137.800.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	420.000.000,00	0,00	0,00	-420.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah*				100 %	100 %	185.000.000,00	122.642.600,00	97.154.400,00	-87.845.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pendidikan Kabupaten Buton		213.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	500 Laporan	15.000.000,00	6.000.000,00	2.400.000,00	-12.600.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	108.642.600,00	86.754.400,00	-63.245.600,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah*				100 %	100 %	190.000.000,00	79.149.185,00	34.760.000,00	-155.240.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pendidikan Kabupaten Buton		255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	79.149.185,00	34.760.000,00	-115.240.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka partisipasi kasar (APK) SD/ MI/ Paket A,angka partisipasi murni (APM) SD/ MI/ Paket A,angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/ Paket B,angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B,Proporsi Anak yang terlayani PAUD,Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan**				**100 %**	**100 %**	**89.586.660.456,00**	**54.833.669.000,00**	**61.580.483.350,00**	**97.498.339.544,00**							**187.085.000.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/Paket A*				115.99 %	115.99 %	33.975.000.000,00	33.266.110.000,00	37.918.547.000,00	3.943.547.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Buton		71.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				5 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	0 Ruang	1.000.000.000,00	68.250.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	0 Ruang	1.000.000.000,00	42.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	0 Ruang	1.000.000.000,00	68.250.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	5 Unit	1.000.000.000,00	1.312.500.000,00	1.420.006.500,00	420.006.500,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	0 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	1 Ruang	1.000.000.000,00	178.500.000,00	178.500.000,00	-821.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Ruang	0 Ruang	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				50 Paket	1 Paket	1.000.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00	-490.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																		
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				20 Paket	0 Paket	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				25 Paket	0 Paket	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	0 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	200.000.000,00	144.770.000,00	106.080.000,00	-93.920.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				500 Orang	0 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				500 Orang	85 Orang	500.000.000,00	0,00	68.000.000,00	-432.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				121 Satuan Pendidikan	121 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	1.129.190.000,00	1.392.720.000,00	1.142.720.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				122 Satuan Pendidikan	122 Satuan Pendidikan	12.000.000.000,00	14.776.980.000,00	14.776.980.000,00	2.776.980.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			15.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				244 Orang	244 Orang	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				15 Ruang	0 Ruang	1.125.000.000,00	0,00	0,00	-1.125.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Ruang	0 Ruang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				15 Unit	0 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				250 Orang	250 Orang	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	5 Konten Digital	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				121 Dokumen	121 Dokumen	150.000.000,00	9.900.000,00	4.800.000,00	-145.200.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				7 Komunitas	7 Komunitas	75.000.000,00	690.000.000,00	663.000.000,00	588.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7 Kegiatan	7 Kegiatan	50.000.000,00	46.000.000,00	43.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				500 Buku	0 Buku	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	5 Ruang	1.000.000.000,00	1.848.000.000,00	2.554.027.300,00	1.554.027.300,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	10 Unit	1.000.000.000,00	249.375.000,00	249.375.000,00	-750.625.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				250 Orang	250 Orang	150.000.000,00	1.100.000.000,00	1.250.000.000,00	1.100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				121 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Ruang	15 Ruang	1.600.000.000,00	4.606.875.000,00	8.216.538.200,00	6.616.538.200,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1000 Peserta Didik	5 Peserta Didik	500.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				25 Paket	25 Paket	800.000.000,00	5.785.520.000,00	5.785.520.000,00	4.985.520.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/Paket B*				97.45 %	97.45 %	38.100.000.000,00	16.192.500.000,00	18.291.079.350,00	-19.808.920.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Buton		81.675.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				5 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	500.000.000,00	299.250.000,00	437.088.050,00	-62.911.950,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				15 Ruang	0 Ruang	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	0 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				5 Ruang	0 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				5 Ruang	0 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				50 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	10 Unit	1.000.000.000,00	210.000.000,00	685.512.500,00	-314.487.500,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	1.500.000.000,00	756.000.000,00	1.942.559.150,00	442.559.150,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	0 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			4.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Ruang	0 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	0 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				10 Ruang	10 Ruang	1.000.000.000,00	378.000.000,00	378.000.000,00	-622.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Unit	25 Unit	1.000.000.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	-947.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				25 Unit	25 Unit	1.000.000.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	-947.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	10 Unit	500.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	-185.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				50 Paket	50 Paket	1.000.000.000,00	840.000.000,00	840.000.000,00	-160.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																		
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				50 Paket	0 Paket	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				50 Paket	0 Paket	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	0 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				900 Peserta Didik	900 Peserta Didik	900.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-650.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	100.000.000,00	62.400.000,00	31.420.000,00	-68.580.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1000 Orang	0 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	500.000.000,00	0,00	40.000.000,00	-460.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	303.910.000,00	142.310.000,00	-157.690.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	10.000.000.000,00	7.261.330.000,00	7.261.330.000,00	-2.738.670.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			12.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				50 Unit	0 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				250 Orang	250 Orang	150.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-75.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				50 Dokumen	50 Dokumen	200.000.000,00	9.900.000,00	4.800.000,00	-195.200.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				15 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-17.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				7 Komunitas	7 Komunitas	150.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				7 Kegiatan	7 Kegiatan	50.000.000,00	21.000.000,00	18.000.000,00	-32.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				50 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	5 Ruang	1.000.000.000,00	567.000.000,00	1.026.349.650,00	26.349.650,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				250 Orang	250 Orang	150.000.000,00	725.000.000,00	725.000.000,00	575.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				1500 Buku	0 Buku	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				50 Paket	0 Paket	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	0 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				100 Paket	100 Paket	500.000.000,00	3.580.710.000,00	3.580.710.000,00	3.080.710.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentase Anak yang terlayani PAUD* *Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini*				59,52 % 59.52 %	59,52 % 59.52 %	9.411.660.456,00	3.879.644.000,00	3.883.842.000,00	-5.527.818.456,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Buton		19.950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				10 Unit	10 Unit	500.000.000,00	420.000.000,00	457.198.000,00	-42.802.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				100 Paket	0 Paket	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				100 Paket	0 Paket	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				500 Peserta Didik	0 Peserta Didik	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				100 Orang	0 Orang	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				135 Satuan Pendidikan	135 Satuan Pendidikan	91.660.456,00	68.145.000,00	46.545.000,00	-45.115.456,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				135 Satuan Pendidikan	135 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	2.549.205.000,00	2.549.205.000,00	2.249.205.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				270 Orang	270 Orang	400.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-350.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara				50 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				250 Orang	0 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				15 Dokumen	15 Dokumen	50.000.000,00	22.500.000,00	11.100.000,00	-38.900.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	0 Ruang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	0 Ruang	1.500.000.000,00	312.054.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				10 Unit	0 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				100 Paket	0 Paket	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	0 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				100 Paket	100 Paket	1.000.000.000,00	357.740.000,00	669.794.000,00	-330.206.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				135 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				100 Ruang	0 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 Tingkat Partisipasi warga Negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan*				0,32 % 92.18 %	0,32 % 92.18 %	8.100.000.000,00	1.495.415.000,00	1.487.015.000,00	-6.612.985.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Kabupaten Buton		13.860.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1500 Peserta Didik	0 Peserta Didik	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				100 Orang	0 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	0 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	350.000.000,00	1.428.840.000,00	1.428.840.000,00	1.078.840.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				25 Orang	0 Orang	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				15 Dokumen	15 Dokumen	50.000.000,00	16.575.000,00	8.175.000,00	-41.825.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				15 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				35 Paket	0 Paket	520.000.000,00	0,00	0,00	-520.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				1000 Buku	0 Buku	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	0 Ruang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				7 Ruang	0 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				35 Unit	0 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				3 Unit	0 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				200 Peserta Didik	0 Peserta Didik	325.000.000,00	0,00	0,00	-325.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				9 Ruang	0 Ruang	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				50 Paket	0 Paket	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				15 unit	0 unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				25 Paket	0 Paket	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	0 Ruang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan kurikulum muatan lokal**				**75 %**	**75 %**	**700.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000.000,00**							**1.750.000.000,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar*				100 %	100 %	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Buton		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				100 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				100 Buku	0 Buku	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				100 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				50 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal*				100 %	100 %	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Kabupaten Buton		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				100 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				100 Buku	0 Buku	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				100 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar Persentase guru PAUD, TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik**				**10,49 48,08 Rasio %**	**10,49 48,08 Rasio %**	**600.000.000,00**	**58.080.000,00**	**28.920.000,00**	**250.000.000,00**							**850.000.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan*				100 %	100 %	600.000.000,00	58.080.000,00	28.920.000,00	-571.080.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Satuan Pendidikan Kabupaten Buton		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				100 Dokumen	100 Dokumen	300.000.000,00	58.080.000,00	28.920.000,00	-271.080.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				100 Laporan	0 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional**				**100 %**	**100 %**	**605.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**745.000.000,00**							**1.350.000.000,00**	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*				100 %	100 %	305.000.000,00	0,00	0,00	-305.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Kabupaten Buton		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				100 Dokumen	0 Dokumen	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				100 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*				100 %	100 %	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal Kabupaten Buton		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				200 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				100 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				100 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	J U M L A H								**244.242.227.434,00**	**251.961.499.492,00**	**264.300.491.636,00**	**20.058.264.202,00**							**369.032.500.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN							**98.327.497.244,00**	**150.215.296.458,00**	**157.610.908.400,00**	**59.283.411.156,00**							**102.601.006.473,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**98.327.497.244,00**	**150.215.296.458,00**	**157.610.908.400,00**	**59.283.411.156,00**							**102.601.006.473,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**98.327.497.244,00**	**150.215.296.458,00**	**157.610.908.400,00**	**59.283.411.156,00**							**102.601.006.473,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**45.586.625.000,00**	**66.369.227.458,00**	**67.290.647.521,00**	**-2.227.880.146,00**							**43.358.744.854,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK" persentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan persentase jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah yang memenuhi standar penulisan*				100 %	100 %	239.862.500,00	102.383.000,00	78.608.000,00	-161.254.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Kesehatan		181.116.085,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	33.075.000,00	47.185.000,00	29.455.000,00	-3.620.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik				28.940.625,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.562.500,00	7.582.000,00	7.517.000,00	-20.045.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik				23.152.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	7.120.000,00	6.520.000,00	-23.480.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik				23.152.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	33.075.000,00	9.395.000,00	6.855.000,00	-26.220.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar				28.940.625,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	33.075.000,00	9.383.000,00	6.913.000,00	-26.162.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar				28.940.625,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	33.075.000,00	7.820.000,00	7.450.000,00	-25.625.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar				28.940.625,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	13.898.000,00	13.898.000,00	-36.102.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik				19.048.585,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK" persentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan persentase jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah yang memenuhi standar penulisan*				100 %	100 %	40.250.000.000,00	63.326.266.562,00	64.716.791.625,00	24.466.791.625,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Dinas Kesehatan		39.219.028.241,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				625 Orang/ bulan	625 Orang/ bulan	40.000.000.000,00	63.198.586.562,00	64.590.651.625,00	24.590.651.625,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			39.053.530.773,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	104.400.000,00	104.400.000,00	-15.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			95.220.968,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			19.018.125,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	15.740.000,00	15.170.000,00	-29.830.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			31.696.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	7.540.000,00	6.570.000,00	-13.430.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			19.561.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK" persentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan persentase jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah yang memenuhi standar penulisan*				100 %	100 %	420.250.000,00	17.460.000,00	4.350.000,00	-415.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Dinas Kesehatan		204.418.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000,00	4.500.000,00	2.100.000,00	-42.900.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	4.500.000,00	2.100.000,00	-22.900.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	0 Orang	200.000.000,00	4.500.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	0 Orang	55.125.000,00	0,00	0,00	-55.125.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	55.125.000,00	3.960.000,00	150.000,00	-54.975.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			74.418.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK" persentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan persentase jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah yang memenuhi standar penulisan*				100 %	100 %	660.000.000,00	234.370.000,00	199.998.000,00	-460.002.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Kesehatan		521.363.028,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	7.870.000,00	7.870.000,00	-12.130.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.268.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	9.700.000,00	3.482.000,00	-36.518.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			46.944.278,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	1.800.000,00	-3.200.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.268.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	9.600.000,00	1.200.000,00	-48.800.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			57.881.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	202.200.000,00	185.646.000,00	-214.354.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK" persentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan persentase jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah yang memenuhi standar penulisan*				100 %	100 %	971.000.000,00	0,00	0,00	-971.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Dinas Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				58 Unit	0 Unit	941.000.000,00	0,00	0,00	-941.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	0 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK" persentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan persentase jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah yang memenuhi standar penulisan*				100 %	100 %	2.770.512.500,00	2.644.944.696,00	2.263.608.696,00	-506.903.804,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Kesehatan		2.901.568.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.512.500,00	5.505.000,00	2.169.000,00	-3.343.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.268.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	248.460.000,00	248.460.000,00	-1.540.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			370.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			22.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000.000,00	2.390.979.696,00	2.012.979.696,00	-487.020.304,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK" persentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan persentase jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah yang memenuhi standar penulisan*				100 %	100 %	275.000.000,00	43.803.200,00	27.291.200,00	-247.708.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	DInas Kesehatan		331.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	38.803.200,00	22.291.200,00	-27.708.800,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi kejadian luar biasa (KLB) Insidensi tuberculosis (TB) Persentase tercapainya indikator standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)**				**100 57,3 83,94 84,40 % Per 100.000 pddk % Per 100.000 ribu pddk**	**100 57,3 83,94 84,40 % Per 100.000 pddk % Per 100.000 ribu pddk**	**50.832.122.244,00**	**82.747.021.000,00**	**89.153.084.879,00**	**4.184.389.375,00**							**55.016.511.619,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Puskesmas Terakrediatasi*				100 % 1001 % 67 %	100 % 1001 % 67 %	24.319.597.244,00	47.334.000.000,00	50.486.529.309,00	26.166.932.065,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Masyarakat		23.586.056.421,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	6.844.597.244,00	25.393.272.000,00	25.393.272.000,00	18.548.674.756,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			4.709.000.687,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.250.000.000,00	2.404.000.000,00	5.613.343.309,00	4.363.343.309,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	850.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Waoleona Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	19.062.000,00	4.648.000,00	-95.352.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				6 Unit	6 Unit	6.500.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	1.500.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Takimpo Kab. Buton, Pasarwajo, Banabungi Kab. Buton, Pasarwajo, Kaongkeongkea Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Tuangila Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Wajah Jaya Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			8.424.093.973,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				2 Unit	0 Unit	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	2.100.000.000,00	4.599.742.000,00	4.599.742.000,00	2.499.742.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				1 Unit	1 Unit	600.000.000,00	148.146.000,00	148.146.000,00	-451.854.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	4.725.000.000,00	6.075.278.000,00	6.125.278.000,00	1.400.278.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			6.242.961.761,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				5592 Keluarga	5592 Keluarga	100.000.000,00	4.500.000,00	2.100.000,00	-97.900.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	0 Paket	350.000.000,00	90.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Cakupan Kunjungan Rawat inap*				100 %	100 %	25.112.525.000,00	34.312.517.000,00	37.878.691.870,00	12.766.166.870,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Masyarakat		30.130.455.198,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1793 Orang	1793 Orang	73.500.000,00	4.114.488.000,00	605.737.000,00	532.237.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			248.325.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2354 Orang	2354 Orang	73.500.000,00	610.416.000,00	605.916.000,00	532.416.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			660.975.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2492 Orang	2492 Orang	60.375.000,00	32.240.000,00	18.740.000,00	-41.635.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			216.693.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12046 Orang	12046 Orang	86.250.000,00	34.360.000,00	22.050.000,00	-64.200.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			164.193.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2222 Orang	2222 Orang	90.000.000,00	29.860.000,00	955.650.000,00	865.650.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			221.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17338 Orang	17338 Orang	86.250.000,00	22.820.000,00	12.100.000,00	-74.150.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			216.693.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1902 Orang	1902 Orang	93.750.000,00	29.860.000,00	18.740.000,00	-75.010.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			226.406.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2428 Orang	2428 Orang	93.750.000,00	19.340.000,00	5.840.000,00	-87.910.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			121.406.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				733 Orang	733 Orang	82.500.000,00	20.960.000,00	13.350.000,00	-69.150.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			106.837.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				112 Orang	112 Orang	86.250.000,00	42.710.000,00	97.410.000,00	11.160.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			111.693.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				347 Orang	347 Orang	101.250.000,00	31.500.000,00	174.400.000,00	73.150.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			131.118.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	86.250.000,00	23.650.000,00	19.150.000,00	-67.100.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			216.693.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	86.250.000,00	5.248.000,00	448.000,00	-85.802.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			90.562.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	112.500.000,00	2.206.161.000,00	3.675.152.000,00	3.562.652.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			118.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	51.750.000,00	4.870.000,00	189.520.000,00	137.770.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			54.337.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	67.500.000,00	5.240.000,00	275.270.000,00	207.770.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			70.875.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	67.500.000,00	197.080.000,00	192.210.000,00	124.710.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			70.875.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	23.570.000,00	4.870.000,00	-31.130.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			37.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	4.500.000,00	266.772.500,00	66.772.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			230.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang	12 Orang	69.000.000,00	9.620.000,00	94.800.000,00	25.800.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			72.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				2 Orang	2 Orang	48.300.000,00	4.500.000,00	3.900.000,00	-44.400.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			65.205.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	63.000.000,00	3.043.058.000,00	2.037.375.500,00	1.974.375.500,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	6.600.000.000,00	17.805.896.000,00	21.630.998.870,00	15.030.998.870,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			9.315.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				1721 Orang	0 Orang	45.000.000,00	4.500.000,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	51.750.000,00	6.750.000,00	3.260.000,00	-48.490.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	15.435.000.000,00	5.852.023.000,00	5.776.845.000,00	-9.658.155.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			17.153.887.698,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	171.600.000,00	104.797.000,00	174.427.000,00	2.827.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			78.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				15 Unit	0 Unit	948.750.000,00	18.000.000,00	0,00	-948.750.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	0 Dokumen	45.000.000,00	4.500.000,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Ambuau Indah Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	441.494.000,00	441.494.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	0,00	16.866.000,00	16.866.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	233.000.000,00	233.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	308.450.000,00	308.450.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Tersusunnya Profil Kesehatan*				100 %	100 %	1.400.000.000,00	1.100.504.000,00	787.863.700,00	-612.136.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Masyarakat		1.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000.000,00	1.100.504.000,00	787.863.700,00	-612.136.300,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase rumah sakit dan puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar**				**90,57 %**	**90,57 %**	**240.000.000,00**	**677.311.000,00**	**670.111.000,00**	**758.250.000,00**							**998.250.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-						160.000.000,00	9.000.000,00	4.200.000,00	-155.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Praktik Tenaga Kesehatan		606.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	4.500.000,00	2.100.000,00	-77.900.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			298.493.025,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	4.500.000,00	2.100.000,00	-77.900.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			307.716.975,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-						80.000.000,00	668.311.000,00	665.911.000,00	585.911.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	SDM Kesehatan		392.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	668.311.000,00	665.911.000,00	585.911.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			392.040.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Cakupan kefarmasian memenuhi standar**				**100 %**	**100 %**	**225.000.000,00**	**385.417.000,00**	**378.517.000,00**	**1.006.000.000,00**							**1.231.000.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah temuan kasus obat dan makanan yang diselesaikan*				100 %	100 %	75.000.000,00	376.417.000,00	376.417.000,00	301.417.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Apotek, Toko Obat		730.012.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	376.417.000,00	376.417.000,00	301.417.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			730.012.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-				-	-	50.000.000,00	4.500.000,00	2.100.000,00	-47.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Industri Rumah Tangga		500.987.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	4.500.000,00	2.100.000,00	-47.900.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			500.987.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-						100.000.000,00	4.500.000,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Usaha Rumah Makan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	4.500.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total brbasis masyarakat (STBM) Keluarga yang stop BABS**				**63,2 75 % %**	**63,2 75 % %**	**1.443.750.000,00**	**36.320.000,00**	**118.548.000,00**	**552.750.000,00**							**1.996.500.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-						262.500.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00	-241.650.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Masyarakat		483.937.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	262.500.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00	-241.650.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			483.937.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-						787.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-777.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Masyarakat		1.091.631.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	393.750.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-388.250.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			635.256.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				6165 Keluarga	6165 Keluarga	393.750.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-389.250.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			456.375.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-						393.750.000,00	5.470.000,00	87.698.000,00	-306.052.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Masyarakat		420.931.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	393.750.000,00	5.470.000,00	87.698.000,00	-306.052.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			420.931.250,00	DINAS KESEHATAN
	J U M L A H								**98.327.497.244,00**	**150.215.296.458,00**	**157.610.908.400,00**	**59.283.411.156,00**							**102.601.006.473,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							**32.959.324.653,00**	**34.275.944.931,00**	**33.717.385.331,00**	**758.060.678,00**							**18.965.302.099,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**32.959.324.653,00**	**34.275.944.931,00**	**33.717.385.331,00**	**758.060.678,00**							**18.965.302.099,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**32.959.324.653,00**	**34.275.944.931,00**	**33.717.385.331,00**	**758.060.678,00**							**18.965.302.099,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**25.577.177.774,00**	**31.995.944.931,00**	**29.637.385.331,00**	**-8.391.875.675,00**							**17.185.302.099,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	28.250.000,00	0,00	0,00	-28.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	BLUD RSUD		32.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Laburunci	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Laburunci	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Laburunci	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Laburunci	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Laburunci	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Laburunci	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	4.750.000,00	0,00	0,00	-4.750.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Laburunci	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	21.591.529.660,00	24.618.196.131,00	22.287.241.331,00	695.711.671,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		14.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				227 Orang/ bulan	227 Orang/ bulan	21.591.529.660,00	24.618.196.131,00	22.287.241.331,00	695.711.671,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Laburunci	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			14.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	-		75.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			75.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	190.302.099,00	0,00	0,00	-190.302.099,00			-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	-		190.302.099,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	190.302.099,00	0,00	0,00	-190.302.099,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			190.302.099,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*CAKUPAN PENUNJANG BARANG MILIK DAERAH*				100 %	100 %	1.020.000.000,00	0,00	0,00	-1.020.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	BLUD RSUD		392.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	630.000.000,00	0,00	0,00	-630.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Laburunci	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				02 0	02 0	390.000.000,00	0,00	0,00	-390.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Laburunci	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			192.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG*				100 %	100 %	1.016.896.015,00	372.748.800,00	345.144.000,00	-671.752.015,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	BLUD RSUD		840.300.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.016.896.015,00	372.748.800,00	345.144.000,00	-671.752.015,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Laburunci	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			840.300.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*CAKUPAN PELAYANAN BLUD*				100 %	100 %	1.655.200.000,00	7.005.000.000,00	7.005.000.000,00	5.349.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	BLUD RSUD		1.655.200.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	7.005.000.000,00	7.005.000.000,00	7.005.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Laburunci	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.655.200.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**32.959.324.653,00**	**34.275.944.931,00**	**33.717.385.331,00**	**758.060.678,00**							**18.965.302.099,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**32.959.324.653,00**	**34.275.944.931,00**	**33.717.385.331,00**	**758.060.678,00**							**18.965.302.099,00**	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**32.959.324.653,00**	**34.275.944.931,00**	**33.717.385.331,00**	**758.060.678,00**							**18.965.302.099,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**32.959.324.653,00**	**34.275.944.931,00**	**33.717.385.331,00**	**758.060.678,00**							**18.965.302.099,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase capaian pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**7.382.146.879,00**	**2.280.000.000,00**	**4.080.000.000,00**	**-5.602.146.879,00**							**1.780.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*"Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP "*				100 %	100 %	7.134.607.797,00	2.280.000.000,00	4.080.000.000,00	-3.054.607.797,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat		1.730.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	2.038.756.920,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-538.756.920,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Laburunci	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				4 Unit	4 Unit	1.250.000.000,00	780.000.000,00	1.080.000.000,00	-170.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Laburunci	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			400.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Laburunci	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			400.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	730.850.877,00	0,00	0,00	-730.850.877,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Laburunci	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				13 Unit	13 Unit	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Laburunci	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			130.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	2.265.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	-765.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Laburunci	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya pelayanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan*				100 %	100 %	247.539.082,00	0,00	0,00	-247.539.082,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Masyarakat		50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	247.539.082,00	0,00	0,00	-247.539.082,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Laburunci	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	J U M L A H								**32.959.324.653,00**	**34.275.944.931,00**	**33.717.385.331,00**	**758.060.678,00**							**18.965.302.099,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**58.667.597.519,00**	**74.740.692.451,00**	**34.976.871.891,00**	**-23.690.725.628,00**							**53.319.890.868,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**58.667.597.519,00**	**74.740.692.451,00**	**34.976.871.891,00**	**-23.690.725.628,00**							**53.319.890.868,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**58.667.597.519,00**	**74.740.692.451,00**	**34.976.871.891,00**	**-23.690.725.628,00**							**53.319.890.868,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.960.597.519,00**	**4.356.343.632,00**	**3.866.279.503,00**	**-2.543.718.892,00**							**4.416.878.627,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	130.035.908,00	72.934.108,00	55.767.200,00	-74.268.708,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON		37.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	7.339.434,00	20.959.434,00	14.653.000,00	7.313.566,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	8.647.524,00	9.997.524,00	9.997.200,00	1.349.676,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	18.357.150,00	13.657.150,00	10.712.000,00	-7.645.150,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	32.814.000,00	3.026.000,00	2.779.000,00	-30.035.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	34.609.850,00	13.323.000,00	7.683.000,00	-26.926.850,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	28.267.950,00	11.971.000,00	9.943.000,00	-18.324.950,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.970.183.024,00	3.268.036.529,00	3.362.051.146,00	-608.131.878,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON		3.745.078.627,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	3.352.777.904,00	3.022.465.329,00	3.140.879.946,00	-211.897.958,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.542.227.427,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	611.405.120,00	239.571.200,00	221.171.200,00	-390.233.920,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			202.851.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	0 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	207.799.623,00	75.651.750,00	516.600,00	-207.283.023,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON		300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	0 Unit	29.000.000,00	0,00	0,00	-29.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	0 Paket	62.800.000,00	0,00	0,00	-62.800.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	11.000.000,00	847.000,00	516.600,00	-10.483.400,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	0 Orang	4.999.623,00	74.804.750,00	0,00	-4.999.623,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	900.393.425,00	496.093.000,00	210.645.491,00	-689.747.934,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON		129.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.000.000,00	3.033.000,00	3.033.000,00	-20.967.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	325.000.000,00	74.670.000,00	16.300.000,00	-308.700.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			16.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	0 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	50.445.000,00	29.400.000,00	9.028.000,00	-41.417.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	25.508.425,00	20.060.000,00	7.193.639,00	-18.314.786,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	23.440.000,00	23.440.000,00	10.000.000,00	-13.440.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket	0 Paket	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	400.000.000,00	345.490.000,00	165.090.852,00	-234.909.148,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	555.000.000,00	0,00	0,00	-555.000.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	62.309.289,00	36.837.295,00	25.993.866,00	-36.315.423,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON		35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	150 Laporan	8.237.289,00	17.643.295,00	6.799.866,00	-1.437.423,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	21.072.000,00	19.194.000,00	19.194.000,00	-1.878.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			19.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.134.876.250,00	406.790.950,00	211.305.200,00	-923.571.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	174.876.250,00	203.790.950,00	43.305.200,00	-131.571.050,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				4 Unit	1 Unit	100.000.000,00	153.000.000,00	118.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota**				**%**	**0 %**	**5.756.000.000,00**	**24.766.074.000,00**	**21.782.637.000,00**	**11.451.456.492,00**							**17.207.456.492,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-						3.526.000.000,00	21.817.637.000,00	21.767.637.000,00	18.241.637.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	MASYARAKAT		13.972.456.492,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				10 Lembaga	0 Lembaga	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				5 Lembaga	0 Lembaga	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0087	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan				0 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	0 KM	1.066.000.000,00	0,00	0,00	-1.066.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0.5 KM	0.5 KM	2.400.000.000,00	21.817.637.000,00	21.767.637.000,00	19.367.637.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			13.972.456.492,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				5 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*						2.230.000.000,00	2.948.437.000,00	15.000.000,00	-2.215.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	MASYARAKAT		3.235.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0,5 KM	0 KM	200.000.000,00	500.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				1 Bendung	0 Bendung	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1 KM	1 KM	600.000.000,00	380.800.000,00	15.000.000,00	-585.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			1.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0009	Peningkatan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan				1 Bendung	0 Bendung	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0.5 KM	0 KM	200.000.000,00	817.637.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			1.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				1 Bendung	0 Bendung	400.000.000,00	750.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.5 KM	0 KM	200.000.000,00	500.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Bendung	0 Bendung	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**				**-**	**-**	**8.725.000.000,00**	**1.545.943.500,00**	**200.000.000,00**	**-7.650.879.188,00**							**1.074.120.812,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	8.725.000.000,00	1.545.943.500,00	200.000.000,00	-8.525.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	MASYARAKAT		1.074.120.812,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				200 Unit	0 Unit	2.100.000.000,00	0,00	0,00	-2.100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				2,5 Liter/Detik	0 Liter/Detik	2.000.000.000,00	945.943.500,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				1,5 Liter/Detik	0 Liter/Detik	1.800.000.000,00	0,00	0,00	-1.800.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			74.120.812,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				10 Unit	0 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				500 SR	0 SR	2.000.000.000,00	400.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				20 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	MASYARAKAT		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah**				**100 %**	**100 %**	**7.360.000.000,00**	**3.984.880.000,00**	**3.708.880.000,00**	**-4.591.307.262,00**							**2.768.692.738,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	7.360.000.000,00	3.984.880.000,00	3.708.880.000,00	-3.651.120.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	MASYARAKAT		2.768.692.738,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				500 Unit	0 Unit	6.000.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-SANITASI MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS SDM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				200 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	1.300.000.000,00	3.984.880.000,00	3.708.880.000,00	2.408.880.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-SANITASI MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS SDM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			168.692.738,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase panjang drainase kondisi baik**				**45 %**	**45 %**	**2.600.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**-2.461.040.095,00**							**138.959.905,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*						2.600.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-2.600.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	MASYARAKAT		138.959.905,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				200 M	0 M	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				1 Sistem Drainase Lingkungan	0 Sistem Drainase Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	2.000.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			8.959.905,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase luas permukiman yang tertata**				**45 %**	**45 %**	**520.000.000,00**	**1.400.000.000,00**	**1.400.000.000,00**	**-97.280.663,00**							**422.719.337,00**	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*						520.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	880.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	MASYARAKAT		422.719.337,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0026	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				1 M³/Hari	0 M³/Hari	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar				200 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG SANITASI-SANITASI MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS SDM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			422.719.337,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0034	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				0 M³/Hari	0 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Kepatuhan IMB**				**6 %**	**6 %**	**350.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**							**550.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*cakupan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*				10 Dokumen	10 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	MASYARAKAT		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 Bangunan Gedung	0 Bangunan Gedung	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				25 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**				**-**	**-**	**1.000.000.000,00**	**4.111.270.000,00**	**0,00**	**1.856.508.450,00**							**2.856.508.450,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.000.000.000,00	4.111.270.000,00	0,00	-1.000.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	MASYARAKAT		2.856.508.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				7 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				1 Kawasan	0 Kawasan	1.000.000.000,00	4.111.270.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			2.856.508.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik** **Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap**				**56,96 %**	**0** **86.01 %**	**24.600.000.000,00**	**33.825.181.319,00**	**3.589.075.388,00**	**-1.098.280.032,00**							**23.501.719.968,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				undefined undefined		24.600.000.000,00	33.825.181.319,00	3.589.075.388,00	-21.010.924.612,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	MASYARAKAT		23.501.719.968,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				5 KM	5 KM	13.000.000.000,00	10.751.610.319,00	2.889.075.388,00	-10.110.924.612,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			3.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				5 KM	5 KM	5.000.000.000,00	22.073.571.000,00	400.000.000,00	-4.600.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			16.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1,5 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				0 Jembatan	0 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			3.301.719.968,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	0 Jembatan	4.000.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				1 Jembatan	0 Jembatan	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				1 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				4 KM	4 KM	2.200.000.000,00	1.000.000.000,00	300.000.000,00	-1.900.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio tenaga operator/teknisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi**				**30 Orang**	**30 Orang**	**220.000.000,00**	**180.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-94.936.085,00**							**125.063.915,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*cakupan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*				undefined undefined	undefined undefined	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	MASYARAKAT		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				30 Orang	0 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	80.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-80.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	MASYARAKAT		10.063.915,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI																		
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Orang	0 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			10.063.915,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				2 Layanan Informasi	0 Layanan Informasi	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-				-	-	40.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-25.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	MASYARAKAT		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	40.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang**				**0,05 %**	**0,05 %**	**576.000.000,00**	**371.000.000,00**	**415.000.000,00**	**-318.229.376,00**							**257.770.624,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*cakupan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*				undefined undefined	undefined undefined	371.000.000,00	341.000.000,00	400.000.000,00	29.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	MASYARAKAT		140.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	341.000.000,00	400.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00			-	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	MASYARAKAT		102.770.624,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			102.770.624,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	80.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-65.000.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	J U M L A H								**58.667.597.519,00**	**74.740.692.451,00**	**34.976.871.891,00**	**-23.690.725.628,00**							**53.319.890.868,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**21.030.450.618,00**	**4.284.080.194,00**	**2.925.938.271,00**	**-18.104.512.347,00**							**23.939.131.895,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.030.450.618,00**	**4.284.080.194,00**	**2.925.938.271,00**	**-18.104.512.347,00**							**23.939.131.895,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**21.030.450.618,00**	**4.284.080.194,00**	**2.925.938.271,00**	**-18.104.512.347,00**							**23.939.131.895,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.995.881.212,00**	**2.127.690.194,00**	**2.124.582.571,00**	**0,00**							**2.995.881.212,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	38.409.000,00	38.951.600,00	37.959.000,00	-450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Sekretariat Dinas Perumahan Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman		38.409.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	6.409.000,00	6.409.000,00	6.160.000,00	-249.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.409.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000,00	5.544.000,00	5.544.000,00	544.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000,00	4.999.900,00	4.557.000,00	-443.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000,00	4.999.000,00	4.999.000,00	-1.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000,00	4.999.700,00	4.699.000,00	-301.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.836.736.152,00	1.654.781.894,00	1.620.631.021,00	-216.105.131,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Sekretariat Dinas Perumahan Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman		1.836.736.152,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25/12 Orang/bulan	25/12 Orang/bulan	1.736.616.152,00	1.578.461.894,00	1.540.696.021,00	-195.920.131,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.736.616.152,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	85.120.000,00	61.320.000,00	65.040.000,00	-20.080.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			85.120.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	4.895.000,00	-105.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	90.000.000,00	5.000.000,00	4.520.000,00	-85.480.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Sekretariat Dinas Perumahan Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman		90.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	4.520.000,00	-480.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	0 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	280.536.060,00	120.081.000,00	81.234.850,00	-199.301.210,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Sekretariat Dinas Perumahan Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman		280.536.060,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	9.084.000,00	7.504.000,00	-7.496.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	6.680.000,00	8.683.850,00	-1.316.150,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	200.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	202.536.060,00	96.280.000,00	57.210.000,00	-145.326.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			202.536.060,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	4.837.000,00	4.837.000,00	-163.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	295.000.000,00	72.178.000,00	45.078.000,00	-249.922.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Sekretariat Dinas Perumahan Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman		295.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	54.200.000,00	27.100.000,00	-172.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	35.000.000,00	17.978.000,00	17.978.000,00	-17.022.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	338.700.000,00	180.174.900,00	250.034.900,00	-88.665.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Sekretariat Dinas Perumahan Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman		338.700.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.700.000,00	1.692.000,00	2.376.000,00	676.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.700.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	21.912.000,00	21.912.000,00	-8.088.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	156.570.900,00	225.746.900,00	-74.253.100,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	116.500.000,00	56.522.800,00	85.124.800,00	-31.375.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Sekretariat Dinas Perumahan Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman		116.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	98.000.000,00	52.862.000,00	81.464.000,00	-16.536.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			98.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	3.500.000,00	3.660.800,00	3.660.800,00	160.800,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**-**	**-**	**430.000.000,00**	**315.607.000,00**	**115.129.000,00**	**1.225.000.000,00**							**1.655.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	350.000.000,00	300.450.000,00	100.000.000,00	-250.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.575.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				10 Unit Rumah	5 Unit Rumah	200.000.000,00	150.450.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			575.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				3 Unit Rumah	7 Unit Rumah	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-				-	-	50.000.000,00	15.157.000,00	15.129.000,00	-34.871.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Pengelola Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	15.157.000,00	15.129.000,00	-34.871.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**864.747.876,00**	**370.500.000,00**	**43.750.000,00**	**116.199.124,00**							**980.947.000,00**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	864.747.876,00	370.500.000,00	43.750.000,00	-820.997.876,00			-	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		980.947.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				10 Unit Rumah	5 Unit Rumah	864.747.876,00	370.500.000,00	43.750.000,00	-820.997.876,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Barangka Kab. Buton, Lasalimu, Talaga Baru Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Balimu Kab. Buton, Siotapina, Kumbewaha Kab. Buton, Wabula, Bajo Bahari	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			980.947.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**-**				**-**	**-**	**3.874.600.290,00**	**224.500.000,00**	**51.500.000,00**	**387.460.029,00**							**4.262.060.319,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.874.600.290,00	224.500.000,00	51.500.000,00	-3.823.100.290,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		4.262.060.319,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				10 Unit Rumah	5 Unit Rumah	3.874.600.290,00	224.500.000,00	51.500.000,00	-3.823.100.290,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			4.262.060.319,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**				**-**	**-**	**12.865.221.240,00**	**1.245.783.000,00**	**590.976.700,00**	**1.180.022.124,00**							**14.045.243.364,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-	-	12.865.221.240,00	1.245.783.000,00	590.976.700,00	-12.274.244.540,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Masyarakat Kabupaten Buton		14.045.243.364,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				10 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				28 Lokasi	20 Lokasi	12.565.221.240,00	945.783.000,00	290.976.700,00	-12.274.244.540,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			13.745.243.364,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	J U M L A H								**21.030.450.618,00**	**4.284.080.194,00**	**2.925.938.271,00**	**-18.104.512.347,00**							**23.939.131.895,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**9.233.953.876,00**	**4.835.933.583,00**	**4.824.195.871,00**	**-4.409.758.005,00**							**10.157.349.264,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.233.953.876,00**	**4.835.933.583,00**	**4.824.195.871,00**	**-4.409.758.005,00**							**10.157.349.264,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**9.233.953.876,00**	**4.835.933.583,00**	**4.824.195.871,00**	**-4.409.758.005,00**							**10.157.349.264,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**4.729.411.312,00**	**2.781.457.687,00**	**2.900.342.378,00**	**472.941.131,00**							**5.202.352.443,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	44.500.000,00	25.370.000,00	20.942.427,00	-23.557.573,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja		64.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	7.000.000,00	3.942.000,00	3.904.427,00	-3.095.573,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	6.000.000,00	3.318.000,00	2.625.000,00	-3.375.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	6.000.000,00	3.318.000,00	2.625.000,00	-3.375.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	3.363.000,00	2.225.000,00	-3.775.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.500.000,00	3.763.000,00	2.625.000,00	-2.875.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	6.000.000,00	4.513.000,00	4.513.000,00	-1.487.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	8.000.000,00	3.153.000,00	2.425.000,00	-5.575.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.318.368.050,00	2.478.726.783,00	2.719.357.197,00	-599.010.853,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja		3.426.309.181,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.272.868.050,00	2.456.740.783,00	2.698.497.197,00	-574.370.853,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.347.309.181,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	26.500.000,00	15.810.000,00	15.810.000,00	-10.690.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	3.088.000,00	2.525.000,00	-2.475.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	3.088.000,00	2.525.000,00	-2.475.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah*				100 %	100 %	18.200.000,00	10.680.000,00	10.040.000,00	-8.160.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja		28.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0 Laporan	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	11.600.000,00	10.680.000,00	10.040.000,00	-1.560.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			18.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	301.668.170,00	24.488.000,00	3.025.000,00	-298.643.170,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja		376.668.170,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	150.668.170,00	20.900.000,00	0,00	-150.668.170,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			173.668.170,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	3.588.000,00	3.025.000,00	-2.975.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0 Orang	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	401.560.439,00	152.037.904,00	76.822.754,00	-324.737.685,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja		476.560.439,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	2.037.754,00	2.037.754,00	-9.962.246,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	288.560.439,00	150.000.150,00	74.785.000,00	-213.775.439,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			301.560.439,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	316.614.653,00	0,00	0,00	-316.614.653,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja		391.614.653,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			181.614.653,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	66.614.653,00	0,00	0,00	-66.614.653,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah*				100 %	100 %	28.500.000,00	4.861.000,00	4.861.000,00	-23.639.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja		38.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	0 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	4.861.000,00	4.861.000,00	-3.139.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	300.000.000,00	85.294.000,00	65.294.000,00	-234.706.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja		400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	85.294.000,00	65.294.000,00	-134.706.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah petugas Linmas per 10000 penduduk Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3) Persentase penyelesaian pelanggaran perda/perkada**				**55.2 64.00 66.66 % % %**	**55.2 64.00 66.66 % % %**	**4.504.542.564,00**	**2.054.475.896,00**	**1.923.853.493,00**	**450.454.257,00**							**4.954.996.821,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota*				100 %	100 %	4.097.399.999,00	2.027.528.596,00	1.913.803.493,00	-2.183.596.506,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja, Masyarakat, ASN Kab. Buton		4.497.854.256,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	74.999.999,00	0,00	0,00	-74.999.999,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.200.000,00	928.909.400,00	918.014.400,00	-282.185.600,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.300.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Orang	0 Orang	1.270.000.000,00	0,00	0,00	-1.270.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.360.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	15.000.300,00	4.050.000,00	-95.950.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	6.882.000,00	5.787.197,00	-1.212.803,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.454.256,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				10 laporan	10 laporan	1.300.200.000,00	1.076.736.896,00	985.951.896,00	-314.248.104,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.400.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				10 Laporan	0 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				1 Unit	0 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Cakupan Penegakkan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota*				100 %	100 %	307.142.565,00	26.947.300,00	10.050.000,00	-297.092.565,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja, Masyarakat, ASN Kab. Buton		347.142.565,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 Laporan	0 Laporan	97.503.870,00	0,00	0,00	-97.503.870,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			107.503.870,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				2 Laporan	2 Laporan	109.638.695,00	11.642.300,00	3.000.000,00	-106.638.695,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			119.638.695,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	15.305.000,00	7.050.000,00	-92.950.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Cakupan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kab/Kota*				100 %	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Satuan Polisi Pamong Praja		110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H								**9.233.953.876,00**	**4.835.933.583,00**	**4.824.195.871,00**	**-4.409.758.005,00**							**10.157.349.264,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							**5.135.556.521,00**	**3.186.978.523,00**	**3.011.966.374,00**	**-2.123.590.147,00**							**4.057.584.582,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.135.556.521,00**	**3.186.978.523,00**	**3.011.966.374,00**	**-2.123.590.147,00**							**4.057.584.582,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.135.556.521,00**	**3.186.978.523,00**	**3.011.966.374,00**	**-2.123.590.147,00**							**4.057.584.582,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**				**100 %**	**100 %**	**4.547.862.425,00**	**2.800.213.523,00**	**2.620.322.374,00**	**-1.195.510.758,00**							**3.352.351.667,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	32.542.400,00	37.689.000,00	38.837.131,00	6.294.731,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dokumen perencanaan		35.796.640,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2.970.000,00	7.325.000,00	7.325.000,00	4.355.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.267.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	2.970.000,00	3.296.000,00	3.296.000,00	326.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.267.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	2.970.000,00	3.222.000,00	3.222.000,00	252.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.267.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	3.456.200,00	3.055.500,00	4.580.631,00	1.124.431,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.801.820,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	3.456.200,00	4.029.500,00	3.825.500,00	369.300,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.801.820,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2.970.000,00	2.691.000,00	2.691.000,00	-279.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.267.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	13.750.000,00	14.070.000,00	13.897.000,00	147.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.125.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.875.200.525,00	2.285.555.323,00	2.308.713.143,00	433.512.618,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dokumen keuangan		2.057.647.527,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.824.347.525,00	2.242.679.323,00	2.265.092.143,00	440.744.618,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.006.794.527,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	30.855.000,00	36.240.000,00	36.240.000,00	5.385.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.855.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				48 Dokumen	0 Dokumen	5.808.000,00	0,00	0,00	-5.808.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.808.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	0 Dokumen	5.280.000,00	0,00	0,00	-5.280.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.280.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2.970.000,00	3.230.000,00	3.975.000,00	1.005.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.970.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				24 Laporan	24 Laporan	2.970.000,00	3.406.000,00	3.406.000,00	436.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.970.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3 Dokumen	0 Dokumen	2.970.000,00	0,00	0,00	-2.970.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.970.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	14.850.000,00	0,00	0,00	-14.850.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Barang Milik Daerah		16.038.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	2.970.000,00	0,00	0,00	-2.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.267.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	0 Dokumen	2.970.000,00	0,00	0,00	-2.970.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.970.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	0 Laporan	2.970.000,00	0,00	0,00	-2.970.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.267.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0 Laporan	2.970.000,00	0,00	0,00	-2.970.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.267.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0 Laporan	2.970.000,00	0,00	0,00	-2.970.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.267.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	54.247.500,00	4.419.600,00	2.154.000,00	-52.093.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN Damkar		104.247.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	6 Dokumen	3.307.500,00	4.419.600,00	2.154.000,00	-1.153.500,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.307.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	0 Dokumen	2.970.000,00	0,00	0,00	-2.970.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.970.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	0 Dokumen	2.970.000,00	0,00	0,00	-2.970.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.970.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	229.392.000,00	162.042.500,00	91.400.000,00	-137.992.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		229.392.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0 Paket	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0 Paket	5.500.000,00	8.280.000,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	0 Paket	5.500.000,00	3.490.000,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.600.000,00	6.650.000,00	7.390.000,00	790.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.036.000,00	3.032.500,00	3.500.000,00	464.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.036.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	0 Dokumen	3.036.000,00	0,00	0,00	-3.036.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.036.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	0 Paket	2.750.000,00	0,00	0,00	-2.750.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.750.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	3.300.000,00	5.800.000,00	0,00	-3.300.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.300.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	187.000.000,00	134.790.000,00	80.510.000,00	-106.490.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			187.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	0 Dokumen	2.970.000,00	0,00	0,00	-2.970.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.970.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	0 Dokumen	8.600.000,00	0,00	0,00	-8.600.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.821.000.000,00	67.372.000,00	30.200.000,00	-1.790.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Barang Milik Daerah		70.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	0,00	57.300.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			45.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	1.776.000.000,00	0,00	0,00	-1.776.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	15.000.000,00	4.236.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	15.000.000,00	5.836.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	440.500.000,00	116.349.200,00	97.021.600,00	-343.478.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		440.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	9.000.000,00	15.150.000,00	19.565.000,00	10.565.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	425.000.000,00	97.699.200,00	73.656.600,00	-351.343.400,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			425.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	80.130.000,00	126.785.900,00	51.996.500,00	-28.133.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Barang Milik Daerah		398.730.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	55.000.000,00	125.690.000,00	49.008.000,00	-5.992.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				7 Unit	0 Unit	2.750.000,00	0,00	0,00	-2.750.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.750.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	0 Unit	2.750.000,00	0,00	0,00	-2.750.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.750.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	0 Unit	2.750.000,00	0,00	0,00	-2.750.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.750.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	16.880.000,00	1.095.900,00	2.988.500,00	-13.891.500,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			16.880.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			159.300.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			159.300.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota**				**43,03 %**	**43,03 %**	**587.694.096,00**	**386.765.000,00**	**391.644.000,00**	**117.538.819,00**							**705.232.915,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	290.094.096,00	275.890.000,00	289.469.000,00	-625.096,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran		348.112.915,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				2 Dokumen	1 Dokumen	8.760.000,00	261.600.000,00	226.600.000,00	217.840.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			10.512.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	0 Laporan	14.400.000,00	6.320.000,00	0,00	-14.400.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			17.280.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				3 Dokumen	3 Dokumen	8.400.000,00	7.970.000,00	12.865.000,00	4.465.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			10.080.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			8.640.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				3 Dokumen	0 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			8.640.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				3 Orang	0 Orang	78.000.000,00	0,00	0,00	-78.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			93.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				1 Desa/Kelurahan	0 Desa/Kelurahan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			72.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				3 Unit	3 Unit	42.000.000,00	0,00	50.004.000,00	8.004.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			50.400.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				3 Dokumen	0 Dokumen	56.334.096,00	0,00	0,00	-56.334.096,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			67.600.915,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				25 Keluarga	0 Keluarga	7.800.000,00	0,00	0,00	-7.800.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			9.360.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-				-	-	15.600.000,00	6.000.000,00	0,00	-15.600.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Peralatan Proteksi Kebakaran		18.720.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				7 Dokumen	0 Dokumen	7.800.000,00	6.000.000,00	0,00	-7.800.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			9.360.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				7 Dokumen	0 Dokumen	7.800.000,00	0,00	0,00	-7.800.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			9.360.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-				-	-	18.000.000,00	4.875.000,00	2.175.000,00	-15.825.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Kejadian Kebakaran		21.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	4.875.000,00	2.175.000,00	-15.825.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			21.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	108.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-8.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Masyarakat Kab. Buton		129.600.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				25 Orang	50 Orang	36.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	64.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			43.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				2 Desa/Kelurahan	0 Desa/Kelurahan	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			43.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	0 Dokumen	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			43.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-				-	-	156.000.000,00	0,00	0,00	-156.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Korban kejadian		187.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				3 Laporan	0 Laporan	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			43.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar				1 Dokumen	0 Dokumen	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			28.800.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				2 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			36.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				2 Unit	0 Unit	66.000.000,00	0,00	0,00	-66.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			79.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	J U M L A H								**5.135.556.521,00**	**3.186.978.523,00**	**3.011.966.374,00**	**-2.123.590.147,00**							**4.057.584.582,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.423.432.381,00**	**2.157.252.444,00**	**2.128.599.607,00**	**183.243.364,00**							**2.606.675.745,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	25.620.000,00	37.444.950,00	24.073.000,00	-1.547.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dokumen		26.901.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	6.246.000,00	6.246.000,00	6.246.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.472.875,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	0 Dokumen	0,00	3.091.950,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.472.875,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	0 Dokumen	0,00	3.189.500,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.472.875,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	4.027.000,00	4.027.000,00	4.027.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.583.125,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	4.077.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.583.125,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	0 Laporan	0,00	3.064.500,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.472.875,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	0,00	13.749.000,00	11.565.000,00	11.565.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.843.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	1.665.366.132,00	1.761.406.424,00	1.922.906.471,00	257.540.339,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	PNS BPBD		1.720.452.682,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25/12 Orang/bulan	25/12 Orang/bulan	0,00	1.716.115.924,00	1.880.416.471,00	1.880.416.471,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.654.178.651,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	35.040.000,00	35.040.000,00	35.040.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			59.328.281,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	5.191.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.472.875,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	5.059.500,00	4.830.000,00	4.830.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.472.875,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	28.307.500,00	2.730.000,00	2.730.000,00	-25.577.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dokumen		29.472.875,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.472.875,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	410.681.250,00	199.031.270,00	75.964.336,00	-334.716.914,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dokumen		441.215.313,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.157.625,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	0,00	10.000.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			11.576.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	0,00	2.100.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.788.125,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	4.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.736.438,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	48 Laporan	0,00	178.779.000,00	72.397.336,00	72.397.336,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			405.168.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	0 Dokumen	0,00	2.435.270,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.788.125,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	70.000.000,00	21.493.000,00	0,00	-70.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		138.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	0 Unit	0,00	9.534.000,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			28.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	0 Unit	0,00	11.959.000,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	121.275.000,00	45.636.800,00	46.536.800,00	-74.738.200,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dokumen		134.871.375,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.375.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.157.625,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	45.636.800,00	46.536.800,00	46.536.800,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			127.338.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	102.182.499,00	89.510.000,00	56.389.000,00	-45.793.499,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dokumen		115.762.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			23.152.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	0,00	86.510.000,00	56.389.000,00	56.389.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			57.881.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			28.940.625,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	0 Unit	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.788.125,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	
1.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase penanganan tanggap darurat bencana**				**100 %**	**100 %**	**1.088.749.391,00**	**110.200.280,00**	**97.000.280,00**	**105.167.189,00**							**1.193.916.580,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	313.587.500,00	0,00	0,00	-313.587.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Masyarakat Kabupaten Buton		332.855.845,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				300 Orang	0 Orang	90.200.000,00	0,00	0,00	-90.200.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			93.831.220,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	0 Dokumen	223.387.500,00	0,00	0,00	-223.387.500,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			239.024.625,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*				100 %	100 %	483.936.891,00	91.000.280,00	95.500.280,00	-388.436.611,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Masyarakat Kabupaten Buton		535.593.735,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				12 Kegiatan	0 Kegiatan	91.866.891,00	0,00	0,00	-91.866.891,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			96.460.235,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				40 Orang	0 Orang	27.562.500,00	8.114.000,00	0,00	-27.562.500,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			30.318.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				7 Kawasan	0 Kawasan	3.307.500,00	0,00	0,00	-3.307.500,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				90 Orang	0 Orang	30.250.000,00	0,00	0,00	-30.250.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			31.762.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	0 Dokumen	28.450.000,00	0,00	0,00	-28.450.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			31.295.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	0 Dokumen	211.750.000,00	0,00	0,00	-211.750.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			241.395.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				7 Kawasan	7 Kawasan	90.750.000,00	82.886.280,00	95.500.280,00	4.750.280,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			104.362.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				100 %	100 %	95.150.000,00	5.100.000,00	1.500.000,00	-93.650.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Masyarakat Kabupaten Buton		119.588.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				12 Laporan	0 Laporan	30.250.000,00	0,00	0,00	-30.250.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			31.762.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				12 Dokumen	0 Dokumen	30.250.000,00	0,00	0,00	-30.250.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			31.762.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				90 Orang	90 Orang	5.775.000,00	5.100.000,00	1.500.000,00	-4.275.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			6.063.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1200 Orang	0 Orang	28.875.000,00	0,00	0,00	-28.875.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*				100 %	100 %	196.075.000,00	14.100.000,00	0,00	-196.075.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Masyarakat Kabupaten Buton		205.878.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	17.325.000,00	0,00	0,00	-17.325.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			18.191.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				12 Dokumen	0 Dokumen	57.750.000,00	9.000.000,00	0,00	-57.750.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			60.637.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				2 Kegiatan	0 Kegiatan	121.000.000,00	5.100.000,00	0,00	-121.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			127.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H								**3.512.181.772,00**	**2.267.452.724,00**	**2.225.599.887,00**	**-1.286.581.885,00**							**3.800.592.325,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS SOSIAL							**4.988.735.188,00**	**2.868.071.816,00**	**2.401.192.543,00**	**-2.587.542.645,00**							**5.558.323.877,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.988.735.188,00**	**2.868.071.816,00**	**2.401.192.543,00**	**-2.587.542.645,00**							**5.558.323.877,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**4.988.735.188,00**	**2.868.071.816,00**	**2.401.192.543,00**	**-2.587.542.645,00**							**5.558.323.877,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.297.846.323,00**	**1.700.762.816,00**	**1.627.885.543,00**	**229.784.632,00**							**2.527.630.955,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	28.000.000,00	31.150.000,00	29.250.000,00	1.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Dinas Sosial		32.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	950.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			8.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	7.460.000,00	6.960.000,00	2.960.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	3.605.000,00	3.205.000,00	-795.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	3.690.000,00	3.190.000,00	-810.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.245.000,00	3.745.000,00	-255.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-400.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-400.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah yang memenuhi standar penulisan*				100 Persen	100 Persen	1.858.021.920,00	1.399.409.175,00	1.391.379.300,00	-466.642.620,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Dinas Sosial		2.038.959.012,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.809.370.920,00	1.348.409.175,00	1.342.629.300,00	-466.741.620,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.990.308.012,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	40.651.000,00	47.640.000,00	45.390.000,00	4.739.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			40.651.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	-640.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	4.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	200.000,00			-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Dinas Sosial		4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	200.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	43.000.000,00	24.339.450,00	7.089.450,00	-35.910.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Dinas Sosial		64.961.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	35.000.000,00	15.750.000,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.490.450,00	3.990.450,00	-9.550,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.099.000,00	3.099.000,00	-901.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			21.961.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya*				100 Persen	100 Persen	195.274.403,00	119.165.006,00	78.837.608,00	-116.436.795,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Dinas Sosial		217.160.443,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0 Paket	28.000.000,00	12.400.000,00	0,00	-28.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			28.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	8.760.000,00	8.760.000,00	-3.240.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.075.000,00	5.347.850,00	5.340.500,00	-3.734.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			9.982.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.520.000,00	7.440.000,00	6.140.000,00	-8.380.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			14.520.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0 Laporan	9.859.535,00	0,00	0,00	-9.859.535,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			9.859.535,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	115.619.868,00	76.848.000,00	51.908.000,00	-63.711.868,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			135.098.408,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.200.000,00	8.369.156,00	6.689.108,00	489.108,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			6.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"*				0 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Dinas Sosial		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase bidang dalam OPD yang dilayani administrasi perkantorannya*				100 Persen	100 Persen	36.100.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	-14.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Dinas Sosial		36.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			18.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			14.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"*				100 Persen	100 Persen	133.450.000,00	101.299.185,00	95.929.185,00	-37.520.815,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Dinas Sosial		134.450.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	0 Unit	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			7.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	17 Unit	120.950.000,00	101.299.185,00	95.929.185,00	-25.020.815,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			121.950.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase peningkatan kapasitas PSKS lembaga dan non lembaga**				**100 %**	**100 %**	**414.000.000,00**	**74.680.000,00**	**41.580.000,00**	**41.400.000,00**							**455.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	*Persentase Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitasnya*				0.006 Persen	0.006 Persen	256.500.000,00	74.680.000,00	7.680.000,00	-248.820.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		262.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				284 Keluarga	284 Keluarga	256.500.000,00	74.680.000,00	7.680.000,00	-248.820.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Wasuamba Kab. Buton, Lasalimu, Benteng Kab. Buton, Lasalimu, Talaga Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			262.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Lasalimu, Wasuamba Kab. Buton, Lasalimu, Benteng Kab. Buton, Lasalimu, Talaga Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota*				0 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	157.500.000,00	0,00	33.900.000,00	-123.600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		192.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	0 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Orang	7 Orang	37.500.000,00	0,00	0,00	-37.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			42.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Keluarga	15 Keluarga	0,00	0,00	33.900.000,00	33.900.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Lembaga	0 Lembaga	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			95.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Sertifikat	0 Sertifikat	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	*Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Akibat Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal*				0 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Tenaga Kerja Migran akibat korban tindak kekerasan yang terpenuhi fasilitasnya		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PPKS diluar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial**				**4.96 %**	**4.96 %**	**432.069.757,00**	**206.820.000,00**	**111.428.000,00**	**216.034.879,00**							**648.104.636,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi kebutuhan dasarnya*				4.96 Persen	4.96 Persen	432.069.757,00	206.820.000,00	111.428.000,00	-320.641.757,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis		648.104.636,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	167.069.757,00	71.000.000,00	40.600.000,00	-126.469.757,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			210.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	150 Orang	85.000.000,00	108.932.000,00	65.660.000,00	-19.340.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	0 Orang	145.000.000,00	0,00	0,00	-145.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			175.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			63.104.636,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				390 Orang	1 Orang	35.000.000,00	26.888.000,00	5.168.000,00	-29.832.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*				0 Persen	0 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																		
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial**				**100 %**	**100 %**	**473.339.514,00**	**185.809.000,00**	**120.960.000,00**	**71.000.928,00**							**544.340.442,00**	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	*Persentase Anak-Anak Terlantar yang terjangkau, yang mendapat rujukan, terpantau dan terpelihara*				100 Persen	100 Persen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	0 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	0 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	0 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			30.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	438.339.514,00	185.809.000,00	120.960.000,00	-317.379.514,00			-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		504.340.442,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				47330 Orang	47330 Orang	153.339.514,00	132.600.000,00	94.200.000,00	-59.139.514,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			179.340.442,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				47330 Keluarga	0 Keluarga	55.000.000,00	3.200.000,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6800 Keluarga	6800 Keluarga	170.000.000,00	50.009.000,00	26.760.000,00	-143.240.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			190.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				47330 Orang	0 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			70.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**				**100 %**	**100 %**	**1.371.479.594,00**	**700.000.000,00**	**499.339.000,00**	**11.368.250,00**							**1.382.847.844,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*				100 Persen	100 Persen	1.322.479.594,00	700.000.000,00	499.339.000,00	-823.140.594,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		1.327.847.844,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				47330 Orang	47330 Orang	452.479.594,00	400.000.000,00	279.064.000,00	-173.415.594,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			457.847.844,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	350.000.000,00	300.000.000,00	220.275.000,00	-129.725.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	0 Orang	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang diselenggarakan*				100 Persen	100 Persen	49.000.000,00	0,00	0,00	-49.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Taruna Siaga Bencana/Pelopor Pelopor Perdamaian		55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	0 Kampung	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				55 Orang	0 Orang	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H								**4.988.735.188,00**	**2.868.071.816,00**	**2.401.192.543,00**	**-2.587.542.645,00**							**5.558.323.877,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TENAGA KERJA							**2.845.644.054,00**	**2.059.100.767,00**	**1.869.553.709,00**	**-976.090.345,00**							**3.161.994.209,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.845.644.054,00**	**2.059.100.767,00**	**1.869.553.709,00**	**-976.090.345,00**							**3.161.994.209,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**2.845.644.054,00**	**2.059.100.767,00**	**1.869.553.709,00**	**-976.090.345,00**							**3.161.994.209,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.699.617.312,00**	**1.699.100.767,00**	**1.443.913.709,00**	**198.461.731,00**							**1.898.079.043,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 PERSEN	100 PERSEN	35.000.000,00	24.507.000,00	22.718.600,00	-12.281.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Tenaga Kerja		41.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	5.000.000,00	7.067.000,00	5.415.000,00	415.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	4.360.000,00	4.360.000,00	-640.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				20 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	5.000.000,00	4.360.000,00	4.360.000,00	-640.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	9 Laporan	5.000.000,00	4.360.000,00	4.360.000,00	-640.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	5.000.000,00	4.360.000,00	4.223.600,00	-776.400,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan waktu menyelesaika laporan Keuangan Perangkat Daerah*				25 PERSEN	25 PERSEN	1.132.000.000,00	1.390.399.167,00	1.267.026.636,00	135.026.636,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Tenaga Kerja		1.138.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.102.000.000,00	1.348.099.167,00	1.227.996.636,00	125.996.636,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.102.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	34.440.000,00	34.440.000,00	29.440.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50 Dokumen	50 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				26 Laporan	26 Laporan	5.000.000,00	4.360.000,00	4.590.000,00	-410.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	3.500.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 PERSEN	100 PERSEN	30.000.000,00	4.200.000,00	2.000.000,00	-28.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Tenaga Kerja		36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	4.200.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 PERSEN	100 PERSEN	99.500.000,00	0,00	0,00	-99.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Tenaga Kerja		141.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				30 Unit	30 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	35 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 PERSEN	100 PERSEN	208.617.312,00	155.487.500,00	63.645.423,00	-144.971.889,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Tenaga Kerja		247.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	10.000.000,00	4.600.000,00	2.706.123,00	-7.293.877,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	2.672.500,00	744.300,00	-9.255.700,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	9.617.312,00	0,00	0,00	-9.617.312,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	0 Laporan	8.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	17 Laporan	125.000.000,00	142.215.000,00	60.195.000,00	-64.805.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			145.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 PERSEN	100 PERSEN	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Tenaga Kerja		116.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 PERSEN	100 PERSEN	51.500.000,00	73.421.600,00	62.183.600,00	10.683.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Tenaga Kerja		70.579.043,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	20 Laporan	4.000.000,00	3.000.000,00	732.000,00	-3.268.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	33.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	-28.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	12.000.000,00	8.520.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	2.500.000,00	55.901.600,00	56.451.600,00	53.951.600,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.579.043,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 PERSEN	100 PERSEN	53.000.000,00	51.085.500,00	26.339.450,00	-26.660.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Tenaga Kerja		108.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	51.085.500,00	26.339.450,00	21.339.450,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu kerencana tenaga kerja**				**18,09 %**	**18,09 %**	**68.278.942,00**	**0,00**	**0,00**	**16.827.894,00**							**85.106.836,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro*				22 DOKUMEN	22 DOKUMEN	68.278.942,00	0,00	0,00	-68.278.942,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Perusahaan		85.106.836,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				3 Dokumen	3 Dokumen	34.139.471,00	0,00	0,00	-34.139.471,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			42.553.418,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				3 Orang	3 Orang	34.139.471,00	0,00	0,00	-34.139.471,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			42.553.418,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase lulusan bersertifikat pelatihan**				**100 %**	**100 %**	**815.500.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**66.550.000,00**							**882.050.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*				192 ORANG	192 ORANG	692.500.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-392.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Masyarakat/Pencaker		749.050.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				155 Orang	155 Orang	414.000.000,00	245.000.000,00	300.000.000,00	-114.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala Kab. Buton, Lasalimu, Wagari Kab. Buton, Lasalimu, Talaga Baru	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			466.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				2 Lembaga	0 Lembaga	64.500.000,00	55.000.000,00	0,00	-64.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			67.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				6 Unit	6 Unit	214.000.000,00	0,00	0,00	-214.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			216.050.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang diBina*				5 LEMBAGA	5 LEMBAGA	34.500.000,00	0,00	0,00	-34.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Masyarakat / Pencaker		37.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				5 Lembaga	5 Lembaga	34.500.000,00	0,00	0,00	-34.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			37.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	*Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi*				1 PERIZINAN	1 PERIZINAN	29.500.000,00	0,00	0,00	-29.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Masyarakat/Pencaker		32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi																		
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				3 Perizinan	3 Perizinan	29.500.000,00	0,00	0,00	-29.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas*				21 PERUSAHAAN	21 PERUSAHAAN	29.500.000,00	0,00	0,00	-29.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Perusahaan Kecil		32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				15 Perusahaan	15 Perusahaan	29.500.000,00	0,00	0,00	-29.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah*				1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	29.500.000,00	0,00	0,00	-29.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Dinas Tenaga Kerja		32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	29.500.000,00	0,00	0,00	-29.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja/pencari kerja yang dtempatkan difasilitasi akses kesempatan kerja dan usaha mandiri**				**50 %**	**50 %**	**165.715.000,00**	**30.000.000,00**	**12.820.000,00**	**24.857.250,00**							**190.572.250,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Kerja*				10 ORANG	10 ORANG	75.100.000,00	12.660.000,00	900.000,00	-74.200.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Masyarakat / Pencari Kerja		81.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				8 Orang	8 Orang	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			24.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				8 Orang	8 Orang	22.000.000,00	12.660.000,00	900.000,00	-21.100.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			24.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				20 Orang	20 Orang	29.100.000,00	0,00	0,00	-29.100.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				2 Orang	2 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				2 Orang	2 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi*				1 LEMBAGA	1 LEMBAGA	8.100.000,00	0,00	0,00	-8.100.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Masyarakat / Pencari Kerja		11.572.250,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi																		
			Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi				2 Lembaga	2 Lembaga	3.400.000,00	0,00	0,00	-3.400.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS																		
			Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku				2 Lembaga	2 Lembaga	4.700.000,00	0,00	0,00	-4.700.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			7.572.250,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online*				8 DOKUMEN	8 DOKUMEN	19.515.000,00	17.340.000,00	11.920.000,00	-7.595.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Masyarakat / Pencari Kerja		27.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				3 Dokumen	3 Dokumen	5.200.000,00	0,00	0,00	-5.200.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			8.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				3 Orang	3 Orang	8.115.000,00	17.340.000,00	11.920.000,00	3.805.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				140 Orang	0 Orang	6.200.000,00	0,00	0,00	-6.200.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			8.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya*				21 ORANG	21 ORANG	63.000.000,00	0,00	0,00	-63.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Masyarakat / Pencari Kerja		71.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				48 Orang	48 Orang	39.000.000,00	0,00	0,00	-39.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			43.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																		
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				24 Orang	24 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			14.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				25 Orang	25 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			14.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**				**59,09 %**	**59,09 %**	**96.532.800,00**	**30.000.000,00**	**112.820.000,00**	**9.653.280,00**							**106.186.080,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online*				22 PERUSAHAAN	22 PERUSAHAAN	34.532.800,00	15.000.000,00	12.020.000,00	-22.512.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Perusahaan		38.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				30 Perusahaan	30 Perusahaan	10.532.800,00	15.000.000,00	12.020.000,00	1.487.200,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			11.700.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				30 Perusahaan	30 Perusahaan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			13.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			13.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah*				0 PERKARA	0 PERKARA	62.000.000,00	15.000.000,00	100.800.000,00	38.800.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Perusahaan		68.086.080,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				0 Perkara	0 Perkara	12.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			13.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				0 Perkara	0 Perkara	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			14.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			13.286.080,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				4 Lembaga	4 Lembaga	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			13.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				100 Orang	100 Orang	13.000.000,00	0,00	100.800.000,00	87.800.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			14.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	J U M L A H								**2.845.644.054,00**	**2.059.100.767,00**	**1.869.553.709,00**	**-976.090.345,00**							**3.161.994.209,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**5.684.893.148,00**	**5.414.709.632,00**	**4.749.981.395,00**	**-934.911.753,00**							**6.249.628.303,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.684.893.148,00**	**5.414.709.632,00**	**4.749.981.395,00**	**-934.911.753,00**							**6.249.628.303,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**5.684.893.148,00**	**5.414.709.632,00**	**4.749.981.395,00**	**-934.911.753,00**							**6.249.628.303,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**34,30 %**	**34,30 %**	**3.186.193.745,00**	**1.936.993.832,00**	**2.088.093.195,00**	**308.619.374,00**							**3.494.813.119,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	64.000.000,00	48.019.000,00	48.019.000,00	-15.981.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	8.000.000,00	9.458.000,00	9.458.000,00	1.458.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	8.000.000,00	4.804.000,00	4.804.000,00	-3.196.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	8.000.000,00	5.038.000,00	5.038.000,00	-2.962.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	8.000.000,00	5.303.000,00	5.303.000,00	-2.697.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	8.000.000,00	5.554.000,00	5.554.000,00	-2.446.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	0,00	5.420.000,00	5.420.000,00	5.420.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**NON URUSAN**							**5.684.893.148,00**	**5.414.709.632,00**	**4.749.981.395,00**	**-934.911.753,00**							**6.249.628.303,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.684.893.148,00**	**5.414.709.632,00**	**4.749.981.395,00**	**-934.911.753,00**							**6.249.628.303,00**	
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.684.893.148,00**	**5.414.709.632,00**	**4.749.981.395,00**	**-934.911.753,00**							**6.249.628.303,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**5.684.893.148,00**	**5.414.709.632,00**	**4.749.981.395,00**	**-934.911.753,00**							**6.249.628.303,00**	
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	16.000.000,00	12.442.000,00	12.442.000,00	-3.558.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah*				20 Dokumen	20 Dokumen	2.146.816.756,00	1.575.689.832,00	1.740.911.595,00	-405.905.161,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2.262.157.594,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.084.816.756,00	1.565.190.832,00	1.730.412.595,00	-354.404.161,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.189.057.594,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			11.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			11.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	0,00	5.078.000,00	5.078.000,00	5.078.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**NON URUSAN**							**5.684.893.148,00**	**5.414.709.632,00**	**4.749.981.395,00**	**-934.911.753,00**							**6.249.628.303,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.684.893.148,00**	**5.414.709.632,00**	**4.749.981.395,00**	**-934.911.753,00**							**6.249.628.303,00**	
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.684.893.148,00**	**5.414.709.632,00**	**4.749.981.395,00**	**-934.911.753,00**							**6.249.628.303,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**5.684.893.148,00**	**5.414.709.632,00**	**4.749.981.395,00**	**-934.911.753,00**							**6.249.628.303,00**	
	2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				10 Dokumen	10 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	8.000.000,00	5.421.000,00	5.421.000,00	-2.579.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				10 Dokumen	10 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				2 Dokumnen	2 Dokumnen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				5 Laporan	5 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				20 Laporan	20 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				30 Laporan	30 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	123.000.000,00	5.996.000,00	5.996.000,00	-117.004.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		156.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10 Dokumen	10 Dokumen	8.000.000,00	5.996.000,00	5.996.000,00	-2.004.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	362.000.000,00	89.281.000,00	76.289.650,00	-285.710.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		450.800.525,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	4.544.500,00	4.544.500,00	-40.455.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			47.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.050.525,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**NON URUSAN**							**5.684.893.148,00**	**5.414.709.632,00**	**4.749.981.395,00**	**-934.911.753,00**							**6.249.628.303,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.684.893.148,00**	**5.414.709.632,00**	**4.749.981.395,00**	**-934.911.753,00**							**6.249.628.303,00**	
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.684.893.148,00**	**5.414.709.632,00**	**4.749.981.395,00**	**-934.911.753,00**							**6.249.628.303,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**5.684.893.148,00**	**5.414.709.632,00**	**4.749.981.395,00**	**-934.911.753,00**							**6.249.628.303,00**	
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	40.000.000,00	9.006.150,00	8.835.150,00	-31.164.850,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			52.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	0 Paket	25.000.000,00	350,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	5.060.000,00	110.000,00	-29.890.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			52.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	0,00	70.670.000,00	62.800.000,00	62.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			249.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**NON URUSAN**							**5.684.893.148,00**	**5.414.709.632,00**	**4.749.981.395,00**	**-934.911.753,00**							**6.249.628.303,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.684.893.148,00**	**5.414.709.632,00**	**4.749.981.395,00**	**-934.911.753,00**							**6.249.628.303,00**	
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.684.893.148,00**	**5.414.709.632,00**	**4.749.981.395,00**	**-934.911.753,00**							**6.249.628.303,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**5.684.893.148,00**	**5.414.709.632,00**	**4.749.981.395,00**	**-934.911.753,00**							**6.249.628.303,00**	
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				3 Unit	3 Unit	223.650.000,00	49.223.050,00	50.139.350,00	-173.510.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		236.525.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	63.000.000,00	0,00	0,00	-63.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			66.150.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			110.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	3.150.000,00	350,00	0,00	-3.150.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	31.500.000,00	43.372.000,00	44.289.000,00	12.789.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			33.075.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	10.500.000,00	350,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			11.025.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.500.000,00	5.850.350,00	5.850.350,00	-4.649.650,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			11.025.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	61.950.000,00	28.570.350,00	28.570.000,00	-33.380.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		69.330.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.615.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.200.000,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	3.150.000,00	350,00	0,00	-3.150.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	48.300.000,00	28.570.000,00	28.570.000,00	-19.730.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			50.715.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan pemerintah*				12 Unit	12 Unit	164.776.989,00	140.214.600,00	138.167.600,00	-26.609.389,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	110.250.000,00	118.046.400,00	118.046.400,00	7.796.400,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	12.526.989,00	22.168.200,00	20.121.200,00	7.594.211,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase perangkat daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)**				**83,33 %**	**83,33 %**	**258.419.640,00**	**52.319.200,00**	**41.674.200,00**	**25.841.963,00**							**284.261.603,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah Yang Melaksanankan PUG*				36 PD	36 PD	105.519.640,00	52.170.200,00	41.674.200,00	-63.845.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Organisasi Perangkat daerah		124.261.603,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	16.530.000,00	14.630.000,00	-7.870.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	23.019.640,00	24.528.200,00	15.932.200,00	-7.087.440,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				36 Orang	36 Orang	30.000.000,00	6.312.000,00	6.312.000,00	-23.688.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				36 Orang	36 Orang	30.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-25.200.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			34.261.603,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi Kemasyarakatan*				36 Organisasi	36 Organisasi	46.900.000,00	84.000,00	0,00	-46.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Perempuan, Organisasi Kemasyarakatan		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	22.000.000,00	60.000,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				36 Organisasi	0 Organisasi	24.900.000,00	24.000,00	0,00	-24.900.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan*				1 lembaga	1 lembaga	106.000.000,00	65.000,00	0,00	-106.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Lembaga Pemberdayaan perempuan		95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	0 Lembaga	37.000.000,00	28.000,00	0,00	-37.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				20 Orang	0 Orang	37.000.000,00	6.000,00	0,00	-37.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	0 Dokumen	32.000.000,00	31.000,00	0,00	-32.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**728.178.000,00**	**261.940.000,00**	**261.915.000,00**	**72.777.800,00**							**800.955.800,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban kekerasan Terhadap Perempuan*				15 Orang	15 Orang	224.000.000,00	0,00	0,00	-224.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Korban Kekerasan Terhadap perempuan		292.955.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	81.000.000,00	0,00	0,00	-81.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			89.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	143.000.000,00	0,00	0,00	-143.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			203.955.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapat layanan Komprehensif*				15 Orang	15 Orang	185.000.000,00	261.940.000,00	261.915.000,00	76.915.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Korban Kekerasan Terhadap perempuan		186.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				30 Orang	30 Orang	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			96.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Layanan	30 Layanan	90.000.000,00	261.940.000,00	261.915.000,00	171.915.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Layanan perlindungan perempuan*				1 lembaga	1 lembaga	319.178.000,00	0,00	0,00	-319.178.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan		322.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Dokumen	30 Dokumen	77.599.000,00	0,00	0,00	-77.599.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			78.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				30 Orang	30 Orang	65.500.000,00	0,00	0,00	-65.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			66.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				20 Orang	20 Orang	86.079.000,00	0,00	0,00	-86.079.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			87.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			91.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Kebijakan Kualitas Keluarga yang Ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**547.801.267,00**	**493.231.050,00**	**257.071.000,00**	**54.780.127,00**							**602.581.394,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan peningkatan Kualitas Keluarga*				1 Laporan	1 Laporan	208.650.057,00	197.451.350,00	95.377.000,00	-113.273.057,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Masyarakat, Keluarga, Perangkat Daerah		240.156.394,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				36 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	70.000.000,00	350,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			85.156.394,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	106.952.000,00	95.377.000,00	20.377.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	63.650.057,00	90.499.000,00	0,00	-63.650.057,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Kualitas keluarga*				1 lembaga	1 lembaga	249.901.210,00	295.779.350,00	161.694.000,00	-88.207.210,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Lembaga Penyedia layanan peningkatan Kualitas Keluarga		267.425.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	71.401.210,00	350,00	28.856.000,00	-42.545.210,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	89.250.000,00	186.202.000,00	132.402.000,00	43.152.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			93.712.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	89.250.000,00	109.577.000,00	436.000,00	-88.814.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			93.712.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Kualitas Keluarga*				1 Layanan	1 Layanan	89.250.000,00	350,00	0,00	-89.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Masyarakat, Keluarga, Perangkat Daerah		95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Layanan	0 Layanan	89.250.000,00	350,00	0,00	-89.250.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase perangkat daerah yang mengembangkan Sistem Informasi gender dan Anak (SIGA)**				**100 %**	**100 %**	**477.968.997,00**	**179.942.000,00**	**18.242.000,00**	**47.796.900,00**							**525.765.897,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Data Gender dan Anak*				36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	477.968.997,00	179.942.000,00	18.242.000,00	-459.726.997,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan, Desa dan Kelurahan		525.765.897,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				50 Dokumen	50 Dokumen	402.429.809,00	164.940.000,00	3.240.000,00	-399.189.809,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			446.449.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	75.539.188,00	15.002.000,00	15.002.000,00	-60.537.188,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			79.316.147,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak (Forum anak Kab/Kota, Forum anak Kecamatan, Forum anak Kelurahan) yang terbentuk**				**100 %**	**100 %**	**365.716.800,00**	**753.035.550,00**	**412.963.000,00**	**54.857.520,00**							**420.574.320,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Pelayanan Pemenuhan Hak Anak*				1 Lembaga	1 Lembaga	115.000.000,00	321.985.000,00	347.510.000,00	232.510.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		135.574.320,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				10 Organisasi	10 Organisasi	60.000.000,00	153.630.000,00	182.465.000,00	122.465.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	168.355.000,00	165.045.000,00	110.045.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			65.574.320,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak*				1 Lembaga	1 Lembaga	250.716.800,00	431.050.550,00	65.453.000,00	-185.263.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		285.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	65.000.000,00	173.385.000,00	1.274.000,00	-63.726.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	350,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	85.447.000,00	57.300.000,00	-2.700.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	65.716.800,00	172.218.200,00	6.879.000,00	-58.837.800,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase kekerasan Terhadap Anak**				**0,002 12 614.700 %**	**0,002 12 614.700 %**	**120.614.699,00**	**1.737.248.000,00**	**1.670.023.000,00**	**61.471,00**							**120.676.170,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak*				10 Orang	10 Orang	17.000.000,00	168.750.000,00	101.525.000,00	84.525.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Korban Kekerasan Terhadap Anak		17.850.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				36 Orang	36 Orang	8.500.000,00	168.750.000,00	101.500.000,00	93.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			8.925.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota																		
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00	0,00	25.000,00	-8.475.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			8.925.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Kekerasan Terhadap Anak*				10 Orang	10 Orang	33.739.700,00	1.499.478.000,00	1.499.478.000,00	1.465.738.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Korban Kekerasan Terhadap Anak		41.457.420,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				10 Orang	10 Orang	11.025.000,00	0,00	0,00	-11.025.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			11.576.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				10 Layanan	10 Layanan	22.714.700,00	1.499.478.000,00	1.499.478.000,00	1.476.763.300,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			29.881.170,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Terhadap Anak*				1 Lembaga	1 Lembaga	69.874.999,00	69.020.000,00	69.020.000,00	-854.999,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Korban Kekerasan Terhadap Anak		61.368.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				10 Kegiatan	10 Kegiatan	15.750.000,00	0,00	0,00	-15.750.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			16.537.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				1 Orang	1 Orang	20.000.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	49.020.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			21.127.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				10 Dokumen	10 Dokumen	11.550.000,00	0,00	0,00	-11.550.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			12.127.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus				10 Orang	10 Orang	11.549.999,00	0,00	0,00	-11.549.999,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota																		
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	11.025.000,00	0,00	0,00	-11.025.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			11.576.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	J U M L A H								**5.684.893.148,00**	**5.414.709.632,00**	**4.749.981.395,00**	**-934.911.753,00**							**6.249.628.303,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**3.603.509.592,00**	**2.076.328.245,00**	**1.524.090.997,00**	**-2.079.418.595,00**							**3.324.337.333,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.603.509.592,00**	**2.076.328.245,00**	**1.524.090.997,00**	**-2.079.418.595,00**							**3.324.337.333,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**3.603.509.592,00**	**2.076.328.245,00**	**1.524.090.997,00**	**-2.079.418.595,00**							**3.324.337.333,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.870.538.108,00**	**1.491.926.460,00**	**1.445.983.222,00**	**167.053.811,00**							**2.037.591.919,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	49.000.000,00	16.611.550,00	17.220.700,00	-31.779.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton		56.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	7.000.000,00	7.099.900,00	7.099.900,00	99.900,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	7.000.000,00	150.000,00	270.000,00	-6.730.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	7.000.000,00	358.000,00	217.500,00	-6.782.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	7.000.000,00	2.976.900,00	2.976.900,00	-4.023.100,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	7.000.000,00	95.350,00	725.000,00	-6.275.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	7.000.000,00	2.971.900,00	2.971.900,00	-4.028.100,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	7.000.000,00	2.959.500,00	2.959.500,00	-4.040.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.313.000.000,00	1.216.947.285,00	1.240.917.447,00	-72.082.553,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton		1.342.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.218.000.000,00	1.170.162.385,00	1.203.736.547,00	-14.263.453,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.242.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00	40.624.000,00	31.020.000,00	-18.980.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	30.000.000,00	3.649.200,00	3.649.200,00	-26.350.800,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	7.000.000,00	2.511.700,00	2.511.700,00	-4.488.300,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton		16.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	0 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	0 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	80.000.000,00	2.394.700,00	0,00	-80.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton		84.591.919,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0 Unit	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	0 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	2.394.700,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			24.591.919,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	213.000.000,00	176.494.000,00	97.810.150,00	-115.189.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton		289.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	12.509.000,00	12.509.000,00	-12.491.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	3.490.000,00	4.011.150,00	-2.988.850,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			12.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-1.400.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	150.000.000,00	153.895.000,00	74.690.000,00	-75.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo Kab. Buton, Kapontori, Watumotobe Kab. Buton, Lasalimu, Kamaru Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Ambuau Indah Kab. Buton, Siotapina, Kumbewaha Kab. Buton, Wolowa, Wolowa Kab. Buton, Wabula, Wabula	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			209.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	43.000.000,00	29.965.925,00	32.665.925,00	-10.334.075,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	13.000.000,00	1.800.000,00	900.000,00	-12.100.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	9.500.000,00	11.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	18.665.925,00	20.265.925,00	5.265.925,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	86.538.108,00	49.513.000,00	57.369.000,00	-29.169.108,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton		125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	85.000.000,00	49.513.000,00	57.369.000,00	-27.631.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			105.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	**NON URUSAN**							**3.603.509.592,00**	**2.076.328.245,00**	**1.524.090.997,00**	**-2.079.418.595,00**							**3.324.337.333,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.603.509.592,00**	**2.076.328.245,00**	**1.524.090.997,00**	**-2.079.418.595,00**							**3.324.337.333,00**	
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.603.509.592,00**	**2.076.328.245,00**	**1.524.090.997,00**	**-2.079.418.595,00**							**3.324.337.333,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**3.603.509.592,00**	**2.076.328.245,00**	**1.524.090.997,00**	**-2.079.418.595,00**							**3.324.337.333,00**	
1.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Angka ketersediaan energi Angka ketersediaan protein**				**2.560 39,38 Kilo Kalori/Kapita/Hari Gram/Kapita/hari**	**2.560 39,38 Kilo Kalori/Kapita/Hari Gram/Kapita/hari**	**491.263.873,00**	**0,00**	**0,00**	**-454.680.793,00**							**36.583.080,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	491.263.873,00	0,00	0,00	-491.263.873,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Desa sentra pertanian		36.583.080,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	0 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Wakangka	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	0 Laporan	10.263.873,00	0,00	0,00	-10.263.873,00	Kab. Buton, Kapontori, Wakangka Kab. Buton, Lasalimu, Lawele Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Ambuau Indah Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Wajah Jaya Kab. Buton, Siotapina, Sumber Sari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				1 unit	0 unit	446.000.000,00	0,00	0,00	-446.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kabawakole	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			36.583.080,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi Konsumsi Energi per kapita Konsumsi Protein per kapita**				**1,23 1.936 55,30 % KKal/Kapita/hari Gram/Kapita/Hari**	**1,23 1.936 55,30 % KKal/Kapita/hari Gram/Kapita/Hari**	**922.736.126,00**	**537.805.585,00**	**76.668.775,00**	**8.454.723,00**							**931.190.849,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan*				100 %	100 %	165.736.126,00	96.051.350,00	7.305.850,00	-158.430.276,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Keluarga dengan stunting dan atau berisiko stunting; Keluarga yang terdampak Inflasi		195.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Siotapina, Manuru Kab. Buton, Wolowa, Galanti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	4.537.000,00	2.437.000,00	-12.563.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				4 Keluarga	0 Keluarga	90.000.000,00	54.350.000,00	1.500.000,00	-88.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Ambuau Togo Kab. Buton, Siotapina, Labuandiri Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																		
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				1 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Watumotobe Kab. Buton, Lasalimu, Kamaru Kab. Buton, Lasalimu, Lawele Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Ambuau Indah Kab. Buton, Siotapina, Kuraa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	8.378.850,00	3.368.850,00	-11.631.150,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Wakoko Kab. Buton, Pasarwajo, Takimpo Kab. Buton, Kapontori, Watumotobe Kab. Buton, Lasalimu, Kamaru Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Ambuau Indah Kab. Buton, Siotapina, Kuraa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	0 Dokumen	10.736.126,00	28.785.500,00	0,00	-10.736.126,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	565.000.000,00	429.999.935,00	65.238.625,00	-499.761.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Masyarakat atau kelompok masyarakat yang terdampak inflasi atau rawan pangan terutama bahan pangan pokok		491.190.849,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																		
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Ton	5 Ton	400.000.000,00	429.999.935,00	65.238.625,00	-334.761.375,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			475.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				50 Ton	0 Ton	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			16.190.849,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	*Cakupan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi*				100 %	100 %	15.000.000,00	6.649.000,00	2.029.000,00	-12.971.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Kelompok Usaha Tani, Gapoktan dan Pelaku Usaha Pangan		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	6.649.000,00	2.029.000,00	-12.971.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Cakupan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*				100 %	100 %	177.000.000,00	5.105.300,00	2.095.300,00	-174.904.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Keluarga Kurang Energi Kronis /Kurang Energi Protein atau berisiko Kurang Energi Kronis/Kurang Energi Protein		225.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				3 Laporan	0 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Barangka Kab. Buton, Lasalimu, Lawele Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Umalaoge Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Megabahari Kab. Buton, Siotapina, Sampuabalo Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			185.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	5.105.300,00	2.095.300,00	-9.904.700,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala Kab. Buton, Kapontori, Watumotobe Kab. Buton, Lasalimu, Kakenauwe Kab. Buton, Siotapina, Kumbewaha Kab. Buton, Wolowa, Wolowa Kab. Buton, Wabula, Wabula	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase daerah rawan pangan** **Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan**				**13,68** **18,75 %**	**13,68** **18,75 %**	**258.835.825,00**	**24.622.200,00**	**1.439.000,00**	**0,00**							**258.835.825,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Cakupan Penanganan Daerah Rawan Pangan* *Cakupan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan*				100 %	100 %	130.000.000,00	21.449.000,00	1.439.000,00	-128.561.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Seluruh Desa dan kelurahan, termasuk yang mengalami rawan pangan di wilayah Pemerintah Kabupaten Buton		130.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	0 Dokumen	130.000.000,00	21.449.000,00	1.439.000,00	-128.561.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo Kab. Buton, Kapontori, Watumotobe Kab. Buton, Lasalimu, Kamaru Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Ambuau Indah Kab. Buton, Wolowa, Wolowa Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			130.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	128.835.825,00	3.173.200,00	0,00	-128.835.825,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Desa dan kelurahan yang mengalami rawan pangan di wilayah Pemerintah Kabupaten Buton		128.835.825,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	70.000.000,00	3.173.200,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo Kab. Buton, Kapontori, Watumotobe Kab. Buton, Lasalimu, Kamaru Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Ambuau Indah Kab. Buton, Siotapina, Kumbewaha Kab. Buton, Wolowa, Wolowa Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	0 Laporan	58.835.825,00	0,00	0,00	-58.835.825,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala Kab. Buton, Kapontori, Watumotobe Kab. Buton, Lasalimu, Kamaru Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Ambuau Indah Kab. Buton, Siotapina, Kumbewaha Kab. Buton, Wolowa, Wolowa Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			58.835.825,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Tingkat keamanan pangan**				**93,33 %**	**93,33 %**	**60.135.660,00**	**21.974.000,00**	**0,00**	**0,00**							**60.135.660,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	60.135.660,00	21.974.000,00	0,00	-60.135.660,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Pelaku Usaha Pangan segar dan pangan kemasan yang beredar di Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Buton		60.135.660,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	0 Dokumen	8.135.660,00	0,00	0,00	-8.135.660,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			8.135.660,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	21.974.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Laporan	0 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			9.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	J U M L A H								**3.603.509.592,00**	**2.076.328.245,00**	**1.524.090.997,00**	**-2.079.418.595,00**							**3.324.337.333,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**5.933.018.663,00**	**4.106.988.451,00**	**4.075.300.983,00**	**-1.857.717.680,00**							**6.558.420.877,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.933.018.663,00**	**4.106.988.451,00**	**4.075.300.983,00**	**-1.857.717.680,00**							**6.558.420.877,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**5.933.018.663,00**	**4.106.988.451,00**	**4.075.300.983,00**	**-1.857.717.680,00**							**6.558.420.877,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.504.090.563,00**	**1.901.421.451,00**	**1.904.324.283,00**	**-38.440.941,00**							**2.465.649.622,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	42.193.685,00	30.606.850,00	80.606.850,00	38.413.165,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Dinas Lingkungan Hidup		46.863.054,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.618.440,00	2.618.250,00	2.618.250,00	-190,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			2.880.284,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.098.875,00	2.626.650,00	2.626.650,00	-1.472.225,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			4.508.763,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.976.060,00	2.891.000,00	2.891.000,00	-1.085.060,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			4.373.666,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.628.250,00	2.617.950,00	2.617.950,00	-2.010.300,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			5.091.075,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.166.873,00	2.351.000,00	2.351.000,00	-815.873,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			3.483.560,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.347.586,00	5.565.000,00	5.565.000,00	2.217.414,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			3.682.345,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	3.857.601,00	11.937.000,00	11.937.000,00	8.079.399,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			4.243.361,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			6.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				25 Data	0 Data	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			6.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	0,00	50.000.000,00	44.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			6.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.869.376.338,00	1.618.099.801,00	1.574.995.633,00	-294.380.705,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Dinas Lingkungan Hidup		1.909.394.938,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	1.836.487.933,00	1.568.714.151,00	1.525.609.983,00	-310.877.950,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			1.873.217.692,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	12.222.000,00	2.467.000,00	2.467.000,00	-9.755.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			13.569.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.777.600,00	25.920.000,00	25.920.000,00	13.142.400,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			14.055.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.138.805,00	4.138.650,00	4.138.650,00	-155,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			4.552.686,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.750.000,00	16.860.000,00	16.860.000,00	13.110.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.719.000,00	4.263.000,00	4.263.000,00	-456.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Dinas Lingkungan Hidup		5.190.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.719.000,00	4.263.000,00	4.263.000,00	-456.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			5.190.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	162.231.649,00	4.435.000,00	4.435.000,00	-157.796.649,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Dinas Lingkungan Hidup		131.692.475,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	4.105.046,00	4.435.000,00	4.435.000,00	329.954,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			4.515.551,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0 Dokumen	83.876.603,00	0,00	0,00	-83.876.603,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			80.651.924,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	0 Orang	74.250.000,00	0,00	0,00	-74.250.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			46.525.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	151.961.964,00	96.927.000,00	47.572.000,00	-104.389.964,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Dinas Lingkungan Hidup		111.079.694,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	59.290,00	0,00	0,00	-59.290,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			65.219,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.082.130,00	5.002.000,00	5.002.000,00	-2.080.130,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			7.790.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	727.694,00	0,00	0,00	-727.694,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			800.463,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	1.742.400,00	0,00	0,00	-1.742.400,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			1.916.640,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	142.350.450,00	91.925.000,00	42.570.000,00	-99.780.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			100.507.029,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	86.969.387,00	34.329.000,00	79.691.000,00	-7.278.387,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Dinas Lingkungan Hidup		87.144.897,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	43.000.000,00	0,00	0,00	-43.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	14 Unit	30.000.000,00	34.329.000,00	59.691.000,00	29.691.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	13.969.387,00	0,00	20.000.000,00	6.030.613,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			7.144.897,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	85.132.190,00	66.400.800,00	66.400.800,00	-18.731.390,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Dinas Lingkungan Hidup		93.645.409,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.584.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-384.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			1.742.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20.993.830,00	16.476.000,00	16.476.000,00	-4.517.830,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			23.093.213,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			7.260.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	55.954.360,00	48.724.800,00	48.724.800,00	-7.229.560,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			61.549.796,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	101.506.350,00	46.360.000,00	46.360.000,00	-55.146.350,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Dinas Lingkungan Hidup		80.638.255,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	94.906.350,00	46.360.000,00	46.360.000,00	-48.546.350,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			73.378.255,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			7.260.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase ketersediaan dokumen instrumen perencanaan lingkungan Persentase ketersediaan dokumen instrumen perencanaan lingkungan**				**100 75 % %**	**100 75 % %**	**246.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**162.904.962,00**							**408.904.962,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Cakupan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	146.000.000,00	0,00	0,00	-146.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Dinas Lingkungan Hidup		268.904.962,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				1 Dokumen	0 Dokumen	146.000.000,00	0,00	0,00	-146.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			268.904.962,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Dinas Lingkungan Hidup		140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS																		
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Presentase kelompok kampung iklim yang terbentuk Cakupan Pemantauan Kualitas Air Indeks Kualitas Air (IKA) Persentase luas tutupan bangunan tertangani sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Udara (IKU) Cakupan pemantauan kualitas udara**				**3.16 36.94 53.55 81.92 83.26 92.22 92.89 % % Poin % Poin Poin %**	**3.16 36.94 53.55 81.92 83.26 92.22 92.89 % % Poin % Poin Poin %**	**288.358.590,00**	**48.488.000,00**	**38.304.000,00**	**28.835.859,00**							**317.194.449,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Cakupan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	156.513.106,00	28.412.000,00	24.512.000,00	-132.001.106,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pihak Terkait		172.164.417,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	13.834.355,00	4.012.000,00	2.212.000,00	-11.622.355,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			15.217.791,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	112.533.053,00	9.400.000,00	7.900.000,00	-104.633.053,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			123.786.358,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan																		
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				1 Paket	1 Paket	30.145.698,00	15.000.000,00	14.400.000,00	-15.745.698,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			33.160.268,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	25.127.731,00	6.023.000,00	4.823.000,00	-20.304.731,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Dinas Lingkungan Hidup		27.640.504,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	25.127.731,00	6.023.000,00	4.823.000,00	-20.304.731,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			27.640.504,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*				75 %	75 %	106.717.753,00	14.053.000,00	8.969.000,00	-97.748.753,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pihak Terkait		117.389.528,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0010	Pelaksanaan Restorasi																		
			luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				2 Ha	2 Ha	106.717.753,00	14.053.000,00	8.969.000,00	-97.748.753,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			117.389.528,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Presentase RTH dalam kondisi baik**				**83 %**	**83 %**	**128.680.284,00**	**15.814.000,00**	**15.814.000,00**	**9.168.029,00**							**137.848.313,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	128.680.284,00	15.814.000,00	15.814.000,00	-112.866.284,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Dinas Lingkungan Hidup		137.848.313,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	16.349.388,00	0,00	0,00	-16.349.388,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			18.777.563,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Ha	5 Ha	112.330.896,00	15.814.000,00	15.814.000,00	-96.516.896,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			119.070.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan**				**35 %**	**35 %**	**50.819.340,00**	**3.987.000,00**	**1.887.000,00**	**50.819.340,00**							**101.638.680,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Cakupan Penyimpanan sementara Limbah B3*				100 %	100 %	9.316.879,00	3.987.000,00	1.887.000,00	-7.429.879,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Pekaku Usaha/kegiatan		18.633.758,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	1 Laporan	9.316.879,00	3.987.000,00	1.887.000,00	-7.429.879,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			18.633.758,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	41.502.461,00	0,00	0,00	-41.502.461,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Pelaku Usaha/Kegiatan		83.004.922,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	0 Dokumen	41.502.461,00	0,00	0,00	-41.502.461,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			83.004.922,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup**				**80 %**	**80 %**	**98.271.180,00**	**19.200.000,00**	**13.200.000,00**	**9.827.118,00**							**108.098.298,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	98.271.180,00	19.200.000,00	13.200.000,00	-85.071.180,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Pelaku Usaha/Kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan		108.098.298,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	1 Dokumen	28.875.924,00	3.512.000,00	2.012.000,00	-26.863.924,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			31.763.516,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Orang	0 Orang	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			12.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				164 Badan Usaha	164 Badan Usaha	58.395.256,00	15.688.000,00	11.188.000,00	-47.207.256,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			64.234.782,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase lembaga Masyarakat Hukum Adat yang mendapatkan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)**				**100 %**	**100 %**	**33.000.000,00**	**3.362.000,00**	**1.862.000,00**	**13.200.000,00**							**46.200.000,00**	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Cakupan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH*				100 %	100 %	16.500.000,00	3.362.000,00	1.862.000,00	-14.638.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Lembaga Masyarakat Hukum Adat		23.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	3.362.000,00	1.862.000,00	-14.638.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			23.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Cakupan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH*				100 %	100 %	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Lembaga Masyarakat Hukum Adat		23.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	0 Dokumen	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			23.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH**				**50 %**	**50 %**	**350.000.000,00**	**10.306.000,00**	**9.106.000,00**	**305.963.856,00**							**655.963.856,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	350.000.000,00	10.306.000,00	9.106.000,00	-340.894.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Masyarakat dan lembaga terkait		655.963.856,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				5 Lembaga	5 Lembaga	350.000.000,00	10.306.000,00	9.106.000,00	-340.894.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			655.963.856,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentse Sekolah Adiwiyata Persentse lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten**				**10 60 % %**	**10 60 % %**	**47.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.256.000,00**							**61.776.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	47.520.000,00	0,00	0,00	-47.520.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Masyarakat dan Lembaga terkait		61.776.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				1 Entitas	0 Entitas	47.520.000,00	0,00	0,00	-47.520.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			61.776.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 %**	**134.400.000,00**	**2.034.000,00**	**1.134.000,00**	**13.440.000,00**							**147.840.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	134.400.000,00	2.034.000,00	1.134.000,00	-133.266.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Masyarakat dan Pihak Terkait		147.840.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				5 Pengaduan	5 Pengaduan	57.576.000,00	2.034.000,00	1.134.000,00	-56.442.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			63.333.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				5 Perkara	0 Perkara	76.824.000,00	0,00	0,00	-76.824.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			84.506.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase cakupan area pelayanan kebersihan Persentase sampah tertangani**				**21 43.60 % %**	**21 43.60 % %**	**2.051.878.706,00**	**2.102.376.000,00**	**2.089.669.700,00**	**55.427.991,00**							**2.107.306.697,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Cakupan Pengelolaan Sampah*				100 %	100 %	2.051.878.706,00	2.102.376.000,00	2.089.669.700,00	37.790.994,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Masyarakat dan Pihak Terkait		2.107.306.697,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				5 Kelompok	5 Kelompok	4.168.329,00	3.476.000,00	1.676.500,00	-2.491.829,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			4.585.162,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	0 Dokumen	16.940.000,00	0,00	0,00	-16.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			18.634.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				13 Unit	0 Unit	569.497.377,00	275.000.000,00	0,00	-569.497.377,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			622.814.535,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				5976 Ton	5976 Ton	710.700.000,00	704.100.000,00	702.600.000,00	-8.100.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			710.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah																		
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				0 0	14 0	274.290.000,00	500.000.000,00	571.638.000,00	297.348.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			274.290.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																		
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				-	30 Persentase	380.000.000,00	570.000.000,00	570.000.000,00	190.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			380.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				0 0	0 0	96.283.000,00	49.800.000,00	243.755.200,00	147.472.200,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			96.283.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	J U M L A H								**5.933.018.663,00**	**4.106.988.451,00**	**4.075.300.983,00**	**-1.857.717.680,00**							**6.558.420.877,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**2.914.968.561,00**	**1.958.472.806,00**	**1.695.373.520,00**	**-1.219.595.041,00**							**2.010.899.588,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.914.968.561,00**	**1.958.472.806,00**	**1.695.373.520,00**	**-1.219.595.041,00**							**2.010.899.588,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**2.914.968.561,00**	**1.958.472.806,00**	**1.695.373.520,00**	**-1.219.595.041,00**							**2.010.899.588,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.240.232.278,00**	**1.695.315.840,00**	**1.560.498.992,50**	**-1.204.524.350,00**							**1.035.707.928,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*"Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"*				100 %	100 %	27.935.000,00	15.740.000,00	19.095.000,00	-8.840.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	desa Dongkala kec Pasarwajo kab.buton		25.012.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	3.807.000,00	3.807.000,00	-193.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.509.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	4.000.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	-1.890.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.500.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	2.397.000,00	5.327.000,00	1.327.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.500.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	-2.330.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.500.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	1.447.000,00	1.872.000,00	-2.128.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.500.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	2.129.000,00	2.129.000,00	-1.871.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.500.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	3.935.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	-1.755.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.403.345.478,00	1.306.565.640,00	1.381.011.942,50	-22.333.535,50			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat kabupaten buton		207.602.378,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.348.059.678,00	1.262.022.640,00	1.336.473.942,50	-11.585.735,50	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			150.500.678,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	20.670.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	-270.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.850.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	26.446.800,00	17.040.000,00	17.040.000,00	-9.406.800,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			27.500.950,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.171.000,00	3.105.000,00	3.100.000,00	-1.071.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.550.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.998.000,00	3.998.000,00	3.998.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.200.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*"Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah"*				100 %	100 %	7.864.800,00	6.356.800,00	6.356.800,00	-1.508.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat kabupaten buton		8.200.450,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7.864.800,00	6.356.800,00	6.356.800,00	-1.508.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.200.450,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	29.256.000,00	0,00	0,00	-29.256.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat kabupaten buton		30.750.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	21.756.000,00	0,00	0,00	-21.756.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			22.500.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	0 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	305.716.000,00	281.033.400,00	106.363.250,00	-199.352.750,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		321.517.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	1.869.000,00	0,00	0,00	-1.869.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.050.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.000.000,00	122.199.000,00	9.946.000,00	-27.054.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			38.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	16.884.400,00	14.347.250,00	11.347.250,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	0 Dokumen	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.450.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	258.247.000,00	141.950.000,00	82.070.000,00	-176.177.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			271.267.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*"Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"*				100 %	100 %	383.925.000,00	0,00	0,00	-383.925.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat kabupaten buton		336.925.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	126.000.000,00	0,00	0,00	-126.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			115.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	114.925.000,00	0,00	0,00	-114.925.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			124.925.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	28.000.000,00	0,00	0,00	-28.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			42.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 unit Unit	0 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	40.900.000,00	7.770.000,00	6.372.000,00	-34.528.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat kabupaten buton		53.380.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.050.000,00	1.020.000,00	372.000,00	-678.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.850.000,00	6.750.000,00	6.000.000,00	-850.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.830.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			42.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	41.290.000,00	77.850.000,00	41.300.000,00	10.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		52.320.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	10.070.000,00	41.850.000,00	22.450.000,00	12.380.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.070.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	36.000.000,00	18.850.000,00	6.850.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	0 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	16.720.000,00	0,00	0,00	-16.720.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			16.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan pelayanan dokumen kependudukan**				**85 %**	**85 %**	**601.961.245,00**	**187.236.966,00**	**83.585.663,50**	**44.946.135,00**							**646.907.380,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*				100 %	100 %	230.832.381,00	52.116.000,00	30.052.000,00	-200.780.381,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	kab buton, semua kecamatam, semua kelurahan		243.032.381,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				2 Dokumen	0 Dokumen	4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				2 Dokumen	0 Dokumen	3.700.000,00	0,00	0,00	-3.700.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				12 Orang	0 Orang	3.900.000,00	0,00	0,00	-3.900.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	2 Laporan	202.932.381,00	52.116.000,00	30.052.000,00	-172.880.381,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			223.932.381,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				2 Dokumen	0 Dokumen	3.750.000,00	0,00	0,00	-3.750.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				2 Laporan	0 Laporan	3.800.000,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				2 Laporan	0 Laporan	4.550.000,00	0,00	0,00	-4.550.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk				2 Dokumen	0 Dokumen	3.900.000,00	0,00	0,00	-3.900.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Cakupan Penataan Pendaftaran Penduduk*				100 %	100 %	243.745.000,00	121.800.966,00	39.862.375,50	-203.882.624,50			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	kab buton, semua kecamatam, semua kelurahan		264.241.135,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	3.745.000,00	0,00	0,00	-3.745.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.858.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				2 Dokumen	0 Dokumen	240.000.000,00	121.800.966,00	39.862.375,50	-200.137.624,50	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			260.383.135,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*				100 %	100 %	90.250.000,00	13.320.000,00	13.671.288,00	-76.578.712,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	kab buton, semua kecamatam, semua kelurahan		101.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	0 Laporan	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				2 Dokumen	0 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				2 Laporan	0 Laporan	5.800.000,00	0,00	0,00	-5.800.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan				2 Dokumen	0 Dokumen	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	0 Laporan	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			33.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk				2 Dokumen	0 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk				12 Orang	0 Orang	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia				2 Dokumen	0 Dokumen	38.200.000,00	13.320.000,00	13.671.288,00	-24.528.712,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			38.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*"Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk" undefined*				100 % undefined undefined	100 % undefined undefined	37.133.864,00	0,00	0,00	-37.133.864,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	kab buton, semua kecamatam, semua kelurahan		38.133.864,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	0 Dokumen	5.800.000,00	0,00	0,00	-5.800.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk				1 Laporan	0 Laporan	4.833.864,00	0,00	0,00	-4.833.864,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.833.864,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				4 Laporan	0 Laporan	26.500.000,00	0,00	0,00	-26.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur**				**97.84 %**	**97.84 %**	**65.662.265,00**	**54.989.000,00**	**29.830.932,00**	**189.290.675,00**							**254.952.940,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil*				100 %	100 %	35.512.265,00	36.989.000,00	11.304.000,00	-24.208.265,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	kab buton, semua kecamatam, semua kelurahan		169.780.714,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				2 Dokumen	0 Dokumen	2.455.695,00	0,00	0,00	-2.455.695,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.455.695,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				3 Layanan	3 Layanan	25.000.000,00	36.989.000,00	11.304.000,00	-13.696.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			155.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil				2 Dokumen	0 Dokumen	2.056.570,00	0,00	0,00	-2.056.570,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.056.570,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				2 Paket	0 Paket	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.268.449,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*				100 %	100 %	28.850.000,00	18.000.000,00	18.526.932,00	-10.323.068,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	kab buton, semua kecamatam, semua kelurahan		76.912.226,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				1 Laporan	0 Laporan	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				1 Laporan	0 Laporan	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0005	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil				3 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	0 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0007	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil				3 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	0 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			12.062.226,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil				3 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil				5 Orang	0 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	18.000.000,00	18.526.932,00	17.526.932,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			32.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*"Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil"*				100 %	100 %	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	kab buton, semua kecamatam, semua kelurahan		8.260.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil				3 Dokumen	0 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan				1 Laporan	0 Laporan	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.260.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.03.2.03.0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan				1 Laporan	0 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data**				**100 %**	**100 %**	**6.200.000,00**	**18.000.000,00**	**18.526.932,00**	**57.453.196,00**							**63.653.196,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*"Cakupan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan"*				100 %	100 %	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	kab buton, semua kecamatam, semua kelurahan		8.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	0 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	0 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				1 Laporan	0 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*"Cakupan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan"*				100 %	100 %	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	kab buton, semua kecamatam, semua kelurahan		3.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*"Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan"*				100 %	100 %	3.200.000,00	18.000.000,00	18.526.932,00	15.326.932,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	kab buton, semua kecamatam, semua kelurahan		46.353.196,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.653.196,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0002	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri																		
			Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Laporan	0 Laporan	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.850.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	18.000.000,00	18.526.932,00	18.426.932,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			21.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*"Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan"*				100 %	100 %	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	kab buton, semua kecamatam, semua kelurahan		5.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.450.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				4 Laporan	0 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.850.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase tersedianya profile kependudukan sesuai peraturan**				**100 %**	**100 %**	**912.773,00**	**2.931.000,00**	**2.931.000,00**	**8.765.371,00**							**9.678.144,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Cakupan Penyusunan Profil Kependudukan*				100 %	100 %	912.773,00	2.931.000,00	2.931.000,00	2.018.227,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	kab buton, semua kecamatam, semua kelurahan		9.678.144,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.757.504,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	712.773,00	2.931.000,00	2.931.000,00	2.218.227,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.920.640,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H								**2.914.968.561,00**	**1.958.472.806,00**	**1.695.373.520,00**	**-1.219.595.041,00**							**2.010.899.588,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**80 %**	**80 %**	**2.467.918.615,00**	**1.771.907.025,00**	**1.768.043.190,00**	**198.835.735,00**							**2.666.754.350,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	33.713.035,00	25.618.000,00	25.035.450,00	-8.677.585,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan MAsyarakat dan Desa		37.084.340,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	2.981.000,00	2.981.000,00	2.981.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.558.377,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	3.062.000,00	3.001.500,00	3.001.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.357.920,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	3.558.000,00	3.558.000,00	3.558.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.710.886,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.402.000,00	4.180.650,00	4.180.650,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.884.432,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.468.000,00	4.167.300,00	4.167.300,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.023.092,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.438.000,00	2.438.000,00	2.438.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.861.645,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.709.000,00	4.709.000,00	4.709.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.687.988,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan*				100 persen	100 persen	1.646.515.102,00	1.487.007.025,00	1.543.200.740,00	-103.314.362,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan MAsyarakat dan Desa		1.811.802.349,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	0,00	1.430.921.025,00	1.487.114.740,00	1.487.114.740,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.757.041.215,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	0,00	50.040.000,00	50.040.000,00	50.040.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			45.101.249,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	3.212.000,00	3.212.000,00	3.212.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.750.572,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.834.000,00	2.834.000,00	2.834.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.909.313,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	7.204.326,00	4.190.000,00	4.190.000,00	-3.014.326,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah		7.708.629,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	0,00	4.190.000,00	4.190.000,00	4.190.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.708.629,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	87.849.651,00	704.000,00	704.000,00	-87.145.651,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan MAsyarakat dan Desa		96.634.616,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			39.270.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				19 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			16.830.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	704.000,00	704.000,00	704.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.098.766,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.666.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			19.493.650,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.666.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.610.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	201.355.658,00	142.591.000,00	107.358.000,00	-93.997.658,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan MAsyarakat dan Desa		173.905.866,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			14.781.185,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.721.650,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	4.003.000,00	4.003.000,00	4.003.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.529.204,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.664.314,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	127.490.000,00	94.767.000,00	94.767.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			118.577.717,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.763.000,00	1.753.000,00	1.753.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.288.660,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			16.643.136,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 persen	100 persen	331.564.479,00	24.800.000,00	0,00	-331.564.479,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan MAsyarakat dan Desa		364.720.927,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			357.020.927,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	24.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	96.664.873,00	62.997.000,00	62.355.000,00	-34.309.873,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan MAsyarakat dan Desa		106.331.361,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.301.000,00	1.659.000,00	1.659.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.773.856,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.934.640,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.778.867,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				23 Laporan	23 Laporan	0,00	60.696.000,00	60.696.000,00	60.696.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			90.843.998,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	63.051.491,00	24.000.000,00	25.200.000,00	-37.851.491,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pemberdayaan MAsyarakat dan Desa		68.566.262,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	0,00	24.000.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			43.810.914,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	O Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.055.348,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	
1.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase desa yang terfasilitasi penataan desanya**				**80 %**	**80 %**	**14.979.168,00**	**2.342.000,00**	**2.342.000,00**	**11.983.334,00**							**26.962.502,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa*				100 %	100 %	14.979.168,00	2.342.000,00	2.342.000,00	-12.637.168,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Desa		26.962.502,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				83 Desa	83 Desa	9.690.500,00	1.079.000,00	1.079.000,00	-8.611.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.659.550,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				83 Desa	83 Desa	1.270.500,00	1.263.000,00	1.263.000,00	-7.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.882.967,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				83 Unit	0 Unit	4.018.168,00	0,00	0,00	-4.018.168,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.419.985,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase desa yang mengadakan kerja sama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga dalam kabupaten**				**80 %**	**80 %**	**11.296.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**4.518.400,00**							**15.814.400,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Cakupan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa*				100 %	100 %	11.296.000,00	850.000,00	850.000,00	-10.446.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Desa		15.814.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				83 Dokumen	0 Dokumen	5.524.000,00	0,00	0,00	-5.524.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			7.576.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				83 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				83 Dokumen	83 Dokumen	3.772.000,00	850.000,00	850.000,00	-2.922.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			5.238.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa sesuai UU Desa No.6 tahun 2014**				**80 %**	**80 %**	**1.614.570.881,00**	**1.403.123.000,00**	**1.114.986.000,00**	**120.818.359,00**							**1.735.389.240,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa*				100 %	100 %	1.614.570.881,00	1.403.123.000,00	1.114.986.000,00	-499.584.881,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Desa		1.735.389.240,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				83 Dokumen	83 Dokumen	8.432.301,00	65.913.000,00	69.577.000,00	61.144.699,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.022.562,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				83 Dokumen	83 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				83 Dokumen	0 Dokumen	4.203.233,00	0,00	0,00	-4.203.233,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.497.459,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				83 Dokumen	83 Dokumen	1.286.857.129,00	1.010.581.000,00	1.010.581.000,00	-276.276.129,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.376.937.128,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				83 Orang	0 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				83 Laporan	0 Laporan	5.150.000,00	0,00	0,00	-5.150.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.510.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				83 Dokumen	0 Dokumen	8.127.555,00	0,00	0,00	-8.127.555,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.859.035,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				83 Dokumen	0 Dokumen	9.641.459,00	0,00	0,00	-9.641.459,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.509.191,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				55 Laporan	O Laporan	210.171.879,00	250.000.000,00	0,00	-210.171.879,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			231.189.067,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Laporan	0 Laporan	5.575.061,00	0,00	0,00	-5.575.061,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.965.316,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				83 Dokumen	0 Dokumen	10.300.000,00	6.629.000,00	329.000,00	-9.971.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			11.330.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	0 Dokumen	2.274.492,00	0,00	0,00	-2.274.492,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.433.707,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				83 Orang	0 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				83 Laporan	0 Laporan	19.073.540,00	0,00	0,00	-19.073.540,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.790.159,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa																		
			Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.764.232,00	70.000.000,00	34.499.000,00	17.734.768,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			18.235.116,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**				**-**	**-**	**3.428.000.583,00**	**765.100.000,00**	**314.516.600,00**	**-521.980.260,00**							**2.906.020.323,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 % 100 persen	100 % 100 persen	3.428.000.583,00	765.100.000,00	314.516.600,00	-3.113.483.983,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	LKA,LKD, dan PKK		2.906.020.323,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				83 Dokumen	0 Dokumen	43.400.000,00	0,00	0,00	-43.400.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				83 Dokumen	0 Dokumen	21.700.000,00	0,00	0,00	-21.700.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				83 Lembaga	83 Lembaga	65.100.000,00	65.100.000,00	65.100.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Unit	0 Unit	108.500.000,00	0,00	0,00	-108.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	0 Dokumen	54.250.000,00	0,00	0,00	-54.250.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	0 Laporan	325.500.000,00	0,00	0,00	-325.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	0 Laporan	23.870.000,00	0,00	0,00	-23.870.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	2.720.580.583,00	700.000.000,00	249.416.600,00	-2.471.163.983,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			2.396.020.323,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				83 Keluarga	0 Keluarga	65.100.000,00	0,00	0,00	-65.100.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	J U M L A H								**7.536.765.247,00**	**3.943.322.025,00**	**3.200.737.790,00**	**-4.336.027.457,00**							**7.350.940.815,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**7.782.116.816,00**	**5.543.503.538,00**	**5.058.448.735,00**	**-2.723.668.081,00**							**10.751.585.537,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.782.116.816,00**	**5.543.503.538,00**	**5.058.448.735,00**	**-2.723.668.081,00**							**10.751.585.537,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**7.782.116.816,00**	**5.543.503.538,00**	**5.058.448.735,00**	**-2.723.668.081,00**							**10.751.585.537,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.611.519.975,00**	**1.858.970.298,00**	**1.592.487.835,00**	**252.496.558,00**							**2.864.016.533,00**	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	42.350.000,00	42.350.000,00	6.820.000,00	-35.530.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		46.585.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.050.000,00	6.050.000,00	1.050.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.050.000,00	6.050.000,00	2.885.000,00	-3.165.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6.050.000,00	6.050.000,00	2.885.000,00	-3.165.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	2.258.765.576,00	1.542.897.078,00	1.512.785.385,00	-745.980.191,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2.490.142.133,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.202.055.576,00	1.452.747.078,00	1.485.645.385,00	-716.410.191,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.422.261.133,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	36.300.000,00	64.740.000,00	24.720.000,00	-11.580.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			39.930.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.050.000,00	6.050.000,00	0,00	-5.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.630.000,00	3.630.000,00	0,00	-1.630.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.050.000,00	6.050.000,00	0,00	-2.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	-9.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10.648.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	-2.420.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	-2.420.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	-2.420.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	-2.420.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	14.500.000,00	14.500.000,00	5.120.000,00	-9.380.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		15.972.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	2.420.000,00	2.420.000,00	150.000,00	-2.270.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	130.000,00	-2.270.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	-2.420.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	-2.420.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	183.940.399,00	186.330.000,00	26.600.000,00	-157.340.399,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		169.699.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.630.000,00	3.630.000,00	1.420.000,00	-2.210.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	148.850.399,00	151.240.000,00	25.180.000,00	-123.670.399,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			131.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	-2.420.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 persen	100 persen	32.830.000,00	0,00	0,00	-32.830.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		54.571.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.310.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	4.370.000,00	0,00	0,00	-4.370.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	3.050.000,00	0,00	0,00	-3.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				94 Unit	0 Unit	12.100.000,00	0,00	0,00	-12.100.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.310.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	0 Unit	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	27.104.000,00	27.500.220,00	8.384.000,00	-18.720.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		29.814.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	200 Laporan	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.100.000,00	12.972.000,00	5.964.000,00	-6.136.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.310.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	-2.420.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.164.000,00	9.688.220,00	0,00	-10.164.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			11.180.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	42.350.000,00	35.713.000,00	32.778.450,00	-9.571.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		46.585.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	4.840.000,00	16.880.500,00	16.879.300,00	12.039.300,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.324.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	12.100.000,00	17.300.500,00	15.899.150,00	3.799.150,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.310.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	6.050.000,00	1.532.000,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	12.100.000,00	0,00	0,00	-12.100.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.310.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Rata - rata jumlah anak perkeluarga**				**3,67 persen**	**3,67 persen**	**137.573.890,00**	**229.408.890,00**	**141.000.000,00**	**13.757.389,00**							**151.331.279,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Cakupan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*				100 persen	100 persen	78.283.890,00	8.708.890,00	0,00	-78.283.890,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanad		86.112.279,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	8.708.890,00	8.708.890,00	0,00	-8.708.890,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.579.779,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan																		
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				1 Dokumen	0 Dokumen	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	4.235.000,00	0,00	0,00	-4.235.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			4.658.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				3 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				38 Organisasi	0 Organisasi	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				38 Organisasi	38 Organisasi	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan																		
			Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				1 Kegiatan	0 Kegiatan	4.235.000,00	0,00	0,00	-4.235.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			4.658.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Kegiatan	0 Kegiatan	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				1 Kegiatan	0 Kegiatan	4.235.000,00	0,00	0,00	-4.235.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			4.658.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				1 Kegiatan	0 Kegiatan	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Dokumen	0 Dokumen	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																		
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				1 Kegiatan	0 Kegiatan	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0022	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)																		
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan				1 Dokumen	0 Dokumen	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	0 Kegiatan	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota*				100 persen	100 persen	59.290.000,00	220.700.000,00	141.000.000,00	81.710.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		65.219.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	0 Dokumen	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan																		
			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	0 Dokumen	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02.0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	0 Dokumen	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	0 Laporan	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				1 Dokumen	0 Dokumen	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	0 Dokumen	4.840.000,00	0,00	0,00	-4.840.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			5.324.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	4.840.000,00	73.780.000,00	57.000.000,00	52.160.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			5.324.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	3.630.000,00	146.920.000,00	84.000.000,00	80.370.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				22 Unit	0 Unit	4.840.000,00	0,00	0,00	-4.840.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			5.324.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk				1 Laporan	0 Laporan	4.840.000,00	0,00	0,00	-4.840.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			5.324.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB																		
			Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan				1 Dokumen	0 Dokumen	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				1 Laporan	0 Laporan	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Dokumen	0 Dokumen	4.840.000,00	0,00	0,00	-4.840.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			5.324.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	0 Dokumen	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.993.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI/CPR BAGI PEREMPUAN USIA 15-49 TAHUN PERSENTASE PESERTA KB AKTIF (PA) METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)**				**50.79 8.53 persen persen**	**50.79 8.53 persen persen**	**3.223.603.870,00**	**2.571.524.350,00**	**2.518.560.900,00**	**2.779.610.827,00**							**6.003.214.697,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal*				100 persen	100 persen	1.225.090.720,00	691.682.750,00	773.501.000,00	-451.589.720,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3.714.850.232,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	302.500.000,00	115.999.800,00	46.621.000,00	-255.879.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			332.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				25 Unit	0 Unit	12.100.000,00	0,00	0,00	-12.100.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			13.310.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	1 Laporan	354.840.970,00	342.650.950,00	343.000.000,00	-11.840.970,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.090.325.067,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	132.132.000,00	101.432.000,00	0,00	-132.132.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			145.345.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	115.724.000,00	100.000.000,00	134.880.000,00	19.156.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			127.296.840,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	302.500.000,00	31.600.000,00	0,00	-302.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				38 Organisasi	38 Organisasi	5.293.750,00	0,00	249.000.000,00	243.706.250,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			5.823.125,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Cakupan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*				100 persen	100 persen	896.530.213,00	592.846.000,00	1.091.413.900,00	194.883.687,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		986.183.234,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																		
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				35 Unit	0 Unit	14.520.000,00	0,00	0,00	-14.520.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			15.972.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				394 Orang	394 Orang	384.216.213,00	567.148.000,00	1.091.413.900,00	707.197.687,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			422.637.834,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				35 Organisasi	35 Organisasi	72.600.000,00	25.698.000,00	0,00	-72.600.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			79.860.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	0 Laporan	425.194.000,00	0,00	0,00	-425.194.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			467.713.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*				100 persen	100 persen	181.414.937,00	272.163.600,00	286.405.000,00	104.990.063,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		289.556.431,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	14.157.000,00	30.240.000,00	45.900.000,00	31.743.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			15.572.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				684 Orang	684 Orang	14.604.337,00	77.250.000,00	215.382.000,00	200.777.663,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			16.064.771,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP																		
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				1 Laporan	1 Laporan	10.962.600,00	104.462.600,00	0,00	-10.962.600,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			12.058.860,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Dokumen	0 Dokumen	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				24 Unit	24 Unit	30.250.000,00	34.371.000,00	25.123.000,00	-5.127.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-KELUARGA BERENCANA DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			33.275.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				2154 Orang	2154 Orang	18.150.000,00	11.530.000,00	0,00	-18.150.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			19.965.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	12.584.000,00	10.100.000,00	0,00	-12.584.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			13.842.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				24 Orang	0 Orang	17.545.000,00	0,00	0,00	-17.545.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			19.299.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	0 Laporan	12.100.000,00	0,00	0,00	-12.100.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			13.310.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				3 Orang	0 Orang	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				38 Kab/Kota	0 Kab/Kota	12.342.000,00	0,00	0,00	-12.342.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			103.576.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				3 Orang	0 Orang	14.520.000,00	0,00	0,00	-14.520.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			15.972.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				703 Orang	703 Orang	12.100.000,00	4.210.000,00	0,00	-12.100.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			13.310.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*				100 persen	100 persen	920.568.000,00	1.014.832.000,00	367.241.000,00	-553.327.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		1.012.624.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				14 Organisasi	14 Organisasi	60.500.000,00	54.241.000,00	54.241.000,00	-6.259.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			66.550.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	181.500.000,00	3.750.000,00	0,00	-181.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			199.650.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				1 Laporan	1 Laporan	332.750.000,00	100.823.000,00	0,00	-332.750.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			366.025.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				95 Unit	95 Unit	42.350.000,00	325.768.000,00	313.000.000,00	270.650.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			46.585.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				57 Kampung	57 Kampung	303.468.000,00	530.250.000,00	0,00	-303.468.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			333.814.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**RATA - RATA USIA KAWIN PERTAMA**				**31,12 persen**	**31,12 persen**	**1.809.419.081,00**	**883.600.000,00**	**806.400.000,00**	**-76.396.053,00**							**1.733.023.028,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*				100 persen	100 persen	1.257.659.081,00	197.200.000,00	120.000.000,00	-1.137.659.081,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		1.239.676.989,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	0 Laporan	273.638.681,00	0,00	0,00	-273.638.681,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			301.002.549,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				106858 Keluarga	0 Keluarga	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL																		
			Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia				1 Kegiatan	0 Kegiatan	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	127.050.000,00	67.200.000,00	0,00	-127.050.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			139.755.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	0 Laporan	60.500.000,00	0,00	0,00	-60.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			66.550.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				25 Unit	25 Unit	60.500.000,00	130.000.000,00	120.000.000,00	59.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			66.550.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				150 Orang	0 Orang	133.100.000,00	0,00	0,00	-133.100.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			146.410.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				120 Orang	0 Orang	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	1 Laporan	145.200.000,00	0,00	0,00	-145.200.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			15.972.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				100 Orang	0 Orang	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Dokumen	0 Dokumen	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				120 Orang	0 Orang	261.650.400,00	0,00	0,00	-261.650.400,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			287.815.440,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Laporan	0 Laporan	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				95 Kelompok	0 Kelompok	114.950.000,00	0,00	0,00	-114.950.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			126.445.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Dokumen	0 Dokumen	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			6.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																		
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				95 Kelompok	0 Kelompok	38.720.000,00	0,00	0,00	-38.720.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			42.592.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Cakupan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*				100 persen	100 persen	551.760.000,00	686.400.000,00	686.400.000,00	134.640.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		493.346.039,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				38 Organisasi	0 Organisasi	128.260.000,00	0,00	0,00	-128.260.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			14.108.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	0 Laporan	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			133.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				38 Organisasi	0 Organisasi	60.500.000,00	0,00	0,00	-60.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			66.550.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	0 Laporan	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			133.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1 laporan	1 laporan	54.450.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00	257.550.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			59.895.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				1 laporan	1 laporan	66.550.000,00	374.400.000,00	374.400.000,00	307.850.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			86.592.439,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H								**7.782.116.816,00**	**5.543.503.538,00**	**5.058.448.735,00**	**-2.723.668.081,00**							**10.751.585.537,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**13.311.280.950,00**	**4.522.520.899,00**	**6.134.987.043,00**	**-7.176.293.907,00**							**31.333.732.548,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.311.280.950,00**	**4.522.520.899,00**	**6.134.987.043,00**	**-7.176.293.907,00**							**31.333.732.548,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**13.311.280.950,00**	**4.522.520.899,00**	**6.134.987.043,00**	**-7.176.293.907,00**							**31.333.732.548,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.935.062.107,00**	**2.926.609.686,00**	**3.076.424.720,00**	**986.670.441,00**							**4.921.732.548,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	42.000.000,00	35.805.000,00	18.280.000,00	-23.720.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN Dinas Perhubungan Kab.Buton		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	6.000.000,00	4.145.000,00	4.145.000,00	-1.855.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	-1.470.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	3.160.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	-1.840.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	3.230.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	6.000.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00	-2.190.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	14.770.000,00	3.635.000,00	-6.365.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.219.732.548,00	2.609.202.035,00	2.965.709.920,00	-254.022.628,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN Dinas Perhubungan Kab.Buton		4.284.732.548,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	3.134.732.548,00	2.538.092.035,00	2.901.869.920,00	-232.862.628,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.134.732.548,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	63.840.000,00	63.840.000,00	-11.160.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	3.635.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	3.635.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	105.000.000,00	3.496.400,00	3.496.400,00	-101.503.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN Dinas Perhubungan Kab.Buton		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	350,00	350,00	-4.999.650,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				42 Paket	1 Paket	50.000.000,00	350,00	350,00	-49.999.650,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000,00	3.495.000,00	3.495.000,00	-1.505.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	1 Orang	30.000.000,00	350,00	350,00	-29.999.650,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	1 Orang	15.000.000,00	350,00	350,00	-14.999.650,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	167.329.559,00	171.296.701,00	52.312.650,00	-115.016.909,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN Dinas Perhubungan Kab.Buton		292.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	10.000,00	10.000,00	-990.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	9.005.000,00	-995.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	3.400.300,00	2.900.300,00	-2.099.700,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	136.329.559,00	147.886.401,00	40.397.350,00	-95.932.209,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			260.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	280.000.000,00	45.501.050,00	700,00	-279.999.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN Dinas Perhubungan Kab.Buton		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	200.000.000,00	45.500.350,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	10.000.000,00	350,00	350,00	-9.999.650,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	70.000.000,00	350,00	350,00	-69.999.650,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	21.000.000,00	8.924.000,00	8.924.000,00	-12.076.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN Dinas Perhubungan Kab.Buton		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	924.000,00	924.000,00	-1.076.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	100.000.000,00	52.384.500,00	27.701.050,00	-72.298.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN Dinas Perhubungan Kab.Buton		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	52.384.500,00	27.701.050,00	-72.298.950,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase perlengkapan jalan kabupaten yang terpasang**				**-**	**0 %**	**9.311.620.459,00**	**1.595.909.463,00**	**3.058.560.573,00**	**7.010.379.541,00**							**16.322.000.000,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Ideal*				-	100 Persen	785.000.000,00	172.571.000,00	172.571.000,00	-612.429.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Masyarakat Kabupaten Buton		1.160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350,00	350,00	-349.999.650,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	350,00	350,00	-19.999.650,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	350,00	350,00	-9.999.650,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	350,00	350,00	-9.999.650,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	395.000.000,00	172.569.600,00	172.569.600,00	-222.430.400,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	4.375.420.459,00	1.413.709.613,00	2.885.985.723,00	-1.489.434.736,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Masyarakat Kabupaten Buton		8.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				120 Unit	25 Unit	2.500.000.000,00	1.194.359.263,00	534.359.263,00	-1.965.640.737,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Laburunci Kab. Buton, Pasarwajo, Banabungi Kab. Buton, Kapontori, Watumotobe Kab. Buton, Kapontori, Wakuli Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Walompo Kab. Buton, Siotapina, Matanauwe Kab. Buton, Siotapina, Sampuabalo Kab. Buton, Siotapina, Kuraa Kab. Buton, Siotapina, Kumbewaha Kab. Buton, Siotapina, Karya Jaya Kab. Buton, Siotapina, Manuru Kab. Buton, Siotapina, Gunungjaya Kab. Buton, Wolowa, Kaumbu Kab. Buton, Wolowa, Suka Maju Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Wabula Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				300 Unit	300 Unit	1.125.420.459,00	350,00	2.246.310.350,00	1.120.889.891,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Saragi Kab. Buton, Pasarwajo, Lapodi Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				100 Unit	100 Unit	500.000.000,00	160.000.000,00	105.316.110,00	-394.683.890,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Lapodi Kab. Buton, Pasarwajo, Winning Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa Kab. Buton, Pasarwajo, Kaongkeongkea Kab. Buton, Kapontori, Watumotobe Kab. Buton, Kapontori, Barangka Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Ambuau Indah Kab. Buton, Siotapina, Matanauwe Kab. Buton, Siotapina, Sampuabalo Kab. Buton, Wolowa, Kaumbu Kab. Buton, Wolowa, Bungi Kab. Buton, Wabula, Wasampela Kab. Buton, Wabula, Wabula Satu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				100 Unit	0 Unit	250.000.000,00	59.350.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-				-	-	4.000.000.000,00	700,00	700,00	-3.999.999.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Masyarakat Kabupaten Buton		7.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang																		
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1 Unit	1 Unit	4.000.000.000,00	700,00	700,00	-3.999.999.300,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Takimpo Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Ambuau Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			7.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-				-	-	55.000.000,00	9.626.050,00	1.050,00	-54.998.950,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Masyarakat Kabupaten Buton		90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	350,00	350,00	-29.999.650,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				2 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	9.625.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	350,00	350,00	-14.999.650,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	350,00	350,00	-4.999.650,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0010	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)																		
			Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi				7 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)																		
			Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				7 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	350,00	350,00	350,00			-	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	0 Laporan	0,00	350,00	350,00	350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	66.200.000,00	1.050,00	1.050,00	-66.198.950,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Masyarakat Kabupaten Buton		72.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	350,00	350,00	-29.999.650,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	350,00	350,00	-29.999.650,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	6.200.000,00	350,00	350,00	-6.199.650,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	350,00	350,00	350,00			-	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	0 0	0,00	350,00	350,00	350,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	350,00	350,00	-29.999.650,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat Kabupaten Buton		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	350,00	350,00	-29.999.650,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**-**				**-**	**-**	**64.598.384,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**10.025.401.616,00**							**10.090.000.000,00**	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-				-	-	64.598.384,00	1.400,00	1.400,00	-64.596.984,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Masyarakat Kabupaten Buton		3.060.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				2 Unit	1 Unit	40.000.000,00	350,00	350,00	-39.999.650,00	Kab. Buton, Lasalimu, Nambo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Unit	1 Unit	9.598.384,00	350,00	350,00	-9.598.034,00	Kab. Buton, Lasalimu, Nambo Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Lasalimu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				12 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	350,00	350,00	-14.999.650,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia				1 Unit	0 Unit	0,00	350,00	350,00	350,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Lasalimu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-				-	-	0,00	350,00	350,00	350,00			-	- -	Masyarakat Kabupaten Buton		7.030.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				-	0 0	0,00	350,00	350,00	350,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			7.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau																		
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan				7 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau																		
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.03.2.15	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Masyarakat Kabupaten Buton		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.15.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal				12 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.16	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Jumlah Pelabuhan yang beroperasi 24 jam*				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Masyarakat Kabupaten Buton		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.16.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan				-	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								**13.311.280.950,00**	**4.522.520.899,00**	**6.134.987.043,00**	**-7.176.293.907,00**							**31.333.732.548,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN							**5.934.697.912,00**	**3.478.877.698,00**	**4.745.932.927,00**	**-1.188.764.985,00**							**7.842.219.832,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.934.697.912,00**	**3.478.877.698,00**	**4.745.932.927,00**	**-1.188.764.985,00**							**7.842.219.832,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**5.566.890.466,00**	**3.399.498.368,00**	**4.582.151.623,00**	**-984.738.843,00**							**7.438.677.950,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.558.200.000,00**	**2.097.991.368,00**	**2.119.691.622,00**	**224.500.000,00**							**2.782.700.000,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	35.000.000,00	20.926.000,00	20.364.000,00	-14.636.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Kominfo dan Persandian		35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	2.988.000,00	2.988.000,00	-2.012.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	2.988.000,00	2.850.000,00	-2.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	2.988.000,00	2.850.000,00	-2.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	5.000.000,00	2.998.000,00	2.850.000,00	-2.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	5.000.000,00	2.988.000,00	2.850.000,00	-2.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	2.988.000,00	2.988.000,00	-2.012.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	2.988.000,00	2.988.000,00	-2.012.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.343.000.000,00	1.798.558.497,00	1.894.601.409,00	551.601.409,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Kominfo dan Persandian		1.446.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.300.000.000,00	1.771.192.497,00	1.863.512.409,00	563.512.409,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	34.000.000,00	21.380.000,00	25.389.000,00	-8.611.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			37.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	4.500.000,00	2.988.000,00	2.850.000,00	-1.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	4.500.000,00	2.998.000,00	2.850.000,00	-1.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	71.000.000,00	64.000,00	0,00	-71.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Kominfo dan Persandian		71.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	0 Unit	12.000.000,00	5.000,00	0,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	0 Paket	35.000.000,00	5.000,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	0 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	0 Orang	12.000.000,00	54.000,00	0,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	440.200.000,00	232.385.000,00	154.294.000,00	-285.906.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Kominfo dan Persandian		492.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.800.000,00	2.138.000,00	2.138.000,00	-1.662.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	26.300.000,00	44.199.000,00	-5.801.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.300.000,00	3.577.000,00	3.577.000,00	277.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	13.700.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	-11.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47 Laporan	47 Laporan	350.000.000,00	192.245.000,00	96.255.000,00	-253.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			380.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	364.000.000,00	135.000,00	0,00	-364.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Kominfo dan Persandian		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	150.000.000,00	135.000,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	29.000.000,00	0,00	0,00	-29.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			32.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			38.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	80.000.000,00	15.798.871,00	24.308.213,00	-55.691.787,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Kominfo dan Persandian		87.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				75 Laporan	75 Laporan	2.000.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	39.000.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	-37.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			43.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	0 Laporan	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			19.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	21.000.000,00	12.008.871,00	20.518.213,00	-481.787,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			23.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	225.000.000,00	30.124.000,00	26.124.000,00	-198.876.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Kominfo dan Persandian		251.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	30.124.000,00	26.124.000,00	-33.876.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			66.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrsi Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah**				**60 71,43 84.09 % % %**	**60 71,43 84.09 % % %**	**2.444.515.966,00**	**1.160.097.000,00**	**1.181.000.000,00**	**1.593.484.034,00**							**4.038.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	2.444.515.966,00	1.160.097.000,00	1.181.000.000,00	-1.263.515.966,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Media dan Masyarakat		4.038.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				30 Laporan	30 Laporan	1.200.000.000,00	700.000.000,00	813.000.000,00	-387.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			2.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				15 Komunitas	15 Komunitas	50.000.000,00	10.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			108.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik																		
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				5 Laporan	0 Laporan	35.000.000,00	10.000,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				8 Permohonan	8 Permohonan	315.000.000,00	200.000.000,00	75.000.000,00	-240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																		
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				100 Persentase	0 Persentase	28.000.000,00	40.000,00	0,00	-28.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				30 Rekomendasi	0 Rekomendasi	35.515.966,00	3.000,00	0,00	-35.515.966,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				100 Persentase	0 Persentase	50.000.000,00	19.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				3 Media	3 Media	320.000.000,00	50.000.000,00	33.000.000,00	-287.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				3 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	10.000,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				15 Konten	15 Konten	175.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				100 Orang	0 Orang	206.000.000,00	5.000,00	0,00	-206.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase OPD yang memiliki aplikasi informatika terintegrasi**				**55.56 %**	**55.56 %**	**564.174.500,00**	**141.410.000,00**	**1.281.460.001,00**	**53.803.450,00**							**617.977.950,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	51.384.500,00	5.000,00	0,00	-51.384.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Pemerintah Kabupaten Buton		56.522.950,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	0 Dokumen	51.384.500,00	5.000,00	0,00	-51.384.500,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			56.522.950,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	512.790.000,00	141.405.000,00	1.281.460.001,00	768.670.001,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Pemerintah Daerah Kabupaten		561.455.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional																		
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				2 Aplikasi	0 Aplikasi	25.000.000,00	5.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			27.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo				1 Dokumen	0 Dokumen	24.200.000,00	38.000,00	0,00	-24.200.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			25.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				2 Laporan	2 Laporan	30.250.000,00	14.000,00	6.120.000,00	-24.130.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			33.275.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	30.250.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	-17.750.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			33.275.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																		
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				5 Dokumen	0 Dokumen	24.200.000,00	5.000,00	0,00	-24.200.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			25.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				1 Dokumen	0 Dokumen	18.150.000,00	5.000,00	0,00	-18.150.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			19.965.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	0 Dokumen	38.150.000,00	5.000,00	0,00	-38.150.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			39.965.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				43 Aplikasi	0 Aplikasi	20.570.000,00	5.000,00	0,00	-20.570.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			25.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				43 Aplikasi	0 Aplikasi	24.200.000,00	5.000,00	0,00	-24.200.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			25.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah				15 Dokumen	0 Dokumen	24.200.000,00	5.000,00	0,00	-24.200.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			25.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				2 unit	0 unit	18.150.000,00	5.000,00	0,00	-18.150.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			19.965.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				25 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	24.200.000,00	129.000.000,00	1.242.500.001,00	1.218.300.001,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			25.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi																		
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				17 Layanan	17 Layanan	20.570.000,00	5.000,00	0,00	-20.570.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			25.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				5 Dokumen	0 Dokumen	18.150.000,00	3.000,00	0,00	-18.150.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			19.965.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas				7 Program	0 Program	30.200.000,00	5.000,00	0,00	-30.200.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			32.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	24.200.000,00	5.000,00	20.060.000,00	-4.140.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			25.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																		
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan				5 Aplikasi	0 Aplikasi	18.150.000,00	15.000,00	0,00	-18.150.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			19.965.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	100.000.000,00	280.000,00	280.000,00	-99.720.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**234.807.446,00**	**54.337.330,00**	**149.479.304,00**	**-85.328.142,00**							**257.541.882,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**				**62.22 %**	**62.22 %**	**234.807.446,00**	**54.337.330,00**	**149.479.304,00**	**22.734.436,00**							**257.541.882,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi*				100 %	100 %	234.807.446,00	54.337.330,00	149.479.304,00	-85.328.142,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Buton		257.541.882,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				4 Orang	4 Orang	75.807.446,00	49.317.330,00	48.410.304,00	-27.397.142,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			82.641.882,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 Persentase	0 Persentase	35.000.000,00	5.000,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			38.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	100 Persentase	25.000.000,00	5.000.000,00	101.069.000,00	76.069.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			27.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				5 Dokumen	0 Dokumen	49.000.000,00	5.000,00	0,00	-49.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			53.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				5 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	10.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**133.000.000,00**	**25.042.000,00**	**14.302.000,00**	**-118.698.000,00**							**146.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah**				**66.67 %**	**66.67 %**	**133.000.000,00**	**25.042.000,00**	**14.302.000,00**	**13.000.000,00**							**146.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	96.700.000,00	22.942.000,00	13.252.000,00	-83.448.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Buton		106.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				5 Dokumen	5 Dokumen	21.700.000,00	12.220.000,00	6.820.000,00	-14.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			23.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10 Laporan	10 Laporan	26.600.000,00	2.409.000,00	2.409.000,00	-24.191.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			29.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				6 Laporan	6 Laporan	24.200.000,00	3.515.000,00	975.000,00	-23.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				9 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	24.200.000,00	4.798.000,00	3.048.000,00	-21.152.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	36.300.000,00	2.100.000,00	1.050.000,00	-35.250.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Perangkat Daerah		39.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	36.300.000,00	2.100.000,00	1.050.000,00	-35.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			39.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	J U M L A H								**5.934.697.912,00**	**3.478.877.698,00**	**4.745.932.927,00**	**-1.188.764.985,00**							**7.842.219.832,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH							**7.048.590.778,00**	**2.137.648.832,00**	**1.953.322.237,00**	**-5.095.268.541,00**							**7.296.179.696,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.048.590.778,00**	**2.137.648.832,00**	**1.953.322.237,00**	**-5.095.268.541,00**							**7.296.179.696,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**7.048.590.778,00**	**2.137.648.832,00**	**1.953.322.237,00**	**-5.095.268.541,00**							**7.296.179.696,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.334.000.917,00**	**1.765.718.832,00**	**1.644.073.237,00**	**0,00**							**2.334.000.917,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakuapan perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	35.000.000,00	20.000.000,00	19.940.000,00	-15.060.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Koperasi dan UKM		35.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	-2.510.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	-2.510.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	-2.510.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	-2.510.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	-2.510.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	-2.510.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	1.789.000.917,00	1.433.144.832,00	1.406.092.237,00	-382.908.680,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		1.789.000.917,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17/14 Orang/bulan	17/14 Orang/bulan	1.736.500.917,00	1.388.204.832,00	1.361.152.237,00	-375.348.680,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.736.500.917,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	34.440.000,00	34.440.000,00	4.440.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*				100 %	100 %	15.000.000,00	6.850.000,00	1.480.000,00	-13.520.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		15.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	1.150.000,00	1.480.000,00	-1.020.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	2.500.000,00	2.700.000,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	25.000.000,00	7.000.000,00	2.100.000,00	-22.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		25.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				21 Paket	21 Paket	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			16.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00	-400.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0 Orang	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0 Orang	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0 Orang	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	350.000.000,00	154.850.000,00	79.317.000,00	-270.683.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		350.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	2.000.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	-994.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	0 Paket	35.000.000,00	28.070.000,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			35.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	7.000.000,00	10.074.000,00	8.227.000,00	1.227.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	300.000.000,00	107.500.000,00	62.284.000,00	-237.716.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	8.200.000,00	7.800.000,00	5.800.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		90.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			70.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	15.000.000,00	100.954.000,00	99.944.000,00	84.944.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		15.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0 Laporan	2.500.000,00	1.010.000,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	91.944.000,00	91.944.000,00	90.444.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	15.000.000,00	42.920.000,00	35.200.000,00	20.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		15.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	7.000.000,00	42.920.000,00	35.200.000,00	28.200.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase koperasi/USP yang difasilitasi penerbitan izin**				**12,19 %**	**12,19 %**	**233.400.092,00**	**6.300.000,00**	**0,00**	**-113.400.092,00**							**120.000.000,00**	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota*				100 %	100 %	120.000.000,00	6.300.000,00	0,00	-120.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	anggota Masyarakat yang mendirikan koperasi		120.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit Usaha	0 Unit Usaha	120.000.000,00	6.300.000,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			120.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	113.400.092,00	0,00	0,00	-113.400.092,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Koperasi		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit Usaha	0 Unit Usaha	113.400.092,00	0,00	0,00	-113.400.092,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan**				**17,88 %**	**17,88 %**	**160.733.136,00**	**40.140.000,00**	**6.010.000,00**	**0,00**							**160.733.136,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah/Kabupaten /Kota*				100 %	100 %	160.733.136,00	40.140.000,00	6.010.000,00	-154.723.136,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Koperasi wilayah Kabupaten Buton		160.733.136,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				90 Unit Usaha	0 Unit Usaha	80.000.000,00	27.420.000,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			80.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	80.733.136,00	12.720.000,00	6.010.000,00	-74.723.136,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			80.733.136,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Cakupan penilaian kesehatan KSP/USP**				**17,88 %**	**17,88 %**	**160.810.605,00**	**43.340.000,00**	**0,00**	**0,00**							**160.810.605,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten*				100 %	100 %	160.810.605,00	43.340.000,00	0,00	-160.810.605,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Koperasi KSP / USP wilayah Kabupaten Buton		160.810.605,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				36 Unit Usaha	0 Unit Usaha	80.000.000,00	21.770.000,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			80.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				10 Unit Usaha	0 Unit Usaha	80.810.605,00	21.570.000,00	0,00	-80.810.605,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			80.810.605,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
5.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan**				**58,53 %**	**58,53 %**	**150.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**150.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah Kabupaten*				100 %	100 %	150.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-150.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Koperasi di wilayah Kabupaten Buton		150.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				90 Orang	0 Orang	150.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
6.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang dapat diberdayakan**				**17,88 %**	**17,88 %**	**131.010.990,00**	**32.314.000,00**	**285.205.000,00**	**360.989.010,00**							**492.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	131.010.990,00	32.314.000,00	285.205.000,00	154.194.010,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Masyarakat / Koperasi		492.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				30 Keluarga	400 Keluarga	89.010.990,00	22.094.000,00	285.205.000,00	196.194.010,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			450.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				40 Unit Usaha	0 Unit Usaha	42.000.000,00	10.220.000,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			42.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
7.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase pemberdaaan UMKM**				**5,17 %**	**5,17 %**	**3.117.170.238,00**	**160.836.000,00**	**18.034.000,00**	**0,00**							**3.117.170.238,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Cakupan pemberdayaan usaha mikro yang di lakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan*				100 %	100 %	3.117.170.238,00	160.836.000,00	18.034.000,00	-3.099.136.238,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Masyarakat Wilayah Kabupaten Buton		3.117.170.238,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				20 Unit Usaha	0 Unit Usaha	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			900.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				40 Unit Usaha	0 Unit Usaha	347.170.238,00	0,00	0,00	-347.170.238,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			347.170.238,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				20 Unit Usaha	0 Unit Usaha	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			900.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				20 Orang	20 Orang	600.000.000,00	45.588.000,00	3.034.000,00	-596.966.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			600.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				3574 Unit Usaha	3574 Unit Usaha	170.000.000,00	26.342.000,00	15.000.000,00	-155.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			170.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				20 Orang	0 Orang	200.000.000,00	88.906.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
8.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil/menengah**				**4,14 %**	**4,14 %**	**761.464.800,00**	**39.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**761.464.800,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Cakupan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil*				100 %	100 %	761.464.800,00	39.000.000,00	0,00	-761.464.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Masyarakat Wilayah Kabupaten Buton		761.464.800,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				10 Unit Usaha	0 Unit Usaha	302.669.400,00	39.000.000,00	0,00	-302.669.400,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			302.669.400,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	458.795.400,00	0,00	0,00	-458.795.400,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			458.795.400,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	J U M L A H								**7.048.590.778,00**	**2.137.648.832,00**	**1.953.322.237,00**	**-5.095.268.541,00**							**7.296.179.696,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**3.781.524.379,00**	**1.956.970.580,00**	**1.919.588.524,00**	**-1.861.935.855,00**							**18.599.994.701,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.781.524.379,00**	**1.956.970.580,00**	**1.919.588.524,00**	**-1.861.935.855,00**							**18.599.994.701,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**3.781.524.379,00**	**1.956.970.580,00**	**1.919.588.524,00**	**-1.861.935.855,00**							**18.599.994.701,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.029.324.379,00**	**1.912.570.580,00**	**1.894.358.524,00**	**15.335.670.322,00**							**18.364.994.701,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	38.388.000,00	15.677.100,00	15.677.100,00	-22.710.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kantor DPMPTSP		41.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.740.000,00	1.482.100,00	1.482.100,00	-2.257.900,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.740.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	-2.270.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.740.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	-2.270.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.714.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	-3.244.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.714.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	-3.244.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.740.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	-2.270.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	14.000.000,00	6.845.000,00	6.845.000,00	-7.155.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.896.911.429,00	1.640.623.980,00	1.739.309.724,00	-157.601.705,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kantor DPMPTSP		17.663.994.701,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26/12 Orang/bulan	26/12 Orang/bulan	1.750.499.701,00	1.558.221.116,00	1.656.906.860,00	-93.592.841,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			17.504.994.701,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	129.957.728,00	78.788.864,00	78.788.864,00	-51.168.864,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.740.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	-1.900.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.714.000,00	1.774.000,00	1.774.000,00	-2.940.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	47.800.000,00	0,00	0,00	-47.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kantor DPMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	7.800.000,00	0,00	0,00	-7.800.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	376.904.700,00	109.388.000,00	43.107.000,00	-333.797.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kantor DPMPTSP		380.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	5.000.000,00	312.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.470.000,00	0,00	0,00	-13.470.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-9.700.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.034.700,00	17.986.000,00	1.995.000,00	-23.039.700,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	1.440.000,00	480.000,00	-9.520.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0 Laporan	13.400.000,00	1.200.000,00	0,00	-13.400.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	300.000.000,00	88.150.000,00	40.332.000,00	-259.668.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	534.896.250,00	8.280.000,00	8.280.000,00	-526.616.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kantor DPMPTSP		130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	86.580.000,00	0,00	0,00	-86.580.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	128.316.250,00	8.280.000,00	8.280.000,00	-120.036.250,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	37.400.000,00	29.600.000,00	22.300.000,00	-15.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kantor DPMPTSP		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	24.000.000,00	17.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**NON URUSAN**							**3.781.524.379,00**	**1.956.970.580,00**	**1.919.588.524,00**	**-1.861.935.855,00**							**18.599.994.701,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.781.524.379,00**	**1.956.970.580,00**	**1.919.588.524,00**	**-1.861.935.855,00**							**18.599.994.701,00**	
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.400.000,00	0,00	0,00	-8.400.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.781.524.379,00**	**1.956.970.580,00**	**1.919.588.524,00**	**-1.861.935.855,00**							**18.599.994.701,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**3.781.524.379,00**	**1.956.970.580,00**	**1.919.588.524,00**	**-1.861.935.855,00**							**18.599.994.701,00**	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	600.000,00	300.000,00	-3.700.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	97.024.000,00	109.001.500,00	65.684.700,00	-31.339.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kantor DPMPTSP		115.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	4 Unit	50.024.000,00	61.501.500,00	20.684.700,00	-29.339.300,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	12.000.000,00	17.500.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan jumlah investor**				**3,16 %**	**3,16 %**	**102.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-102.000.000,00**							**0,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	67.100.000,00	0,00	0,00	-67.100.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Masyarakat/Pelaku Usaha		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	49.100.000,00	0,00	0,00	-49.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Cakupan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	34.900.000,00	0,00	0,00	-34.900.000,00			-	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Masyarakat/Pelaku Usaha/Investor		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	34.900.000,00	0,00	0,00	-34.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**140.000.000,00**	**19.000.000,00**	**9.700.000,00**	**-20.000.000,00**							**120.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	140.000.000,00	19.000.000,00	9.700.000,00	-130.300.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Masyarakat/Pelaku Usaha/Investor		120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**91.000.000,00**	**21.400.000,00**	**12.100.000,00**	**4.000.000,00**							**95.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Cakupan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota*				100 %	100 %	91.000.000,00	21.400.000,00	12.100.000,00	-78.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat/Pelaku Usaha		95.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	5.900.000,00	2.950.000,00	-22.050.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	21.000.000,00	5.700.000,00	4.150.000,00	-16.850.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				50 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	25.000.000,00	9.800.000,00	5.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**404.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-404.200.000,00**							**0,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	404.200.000,00	0,00	0,00	-404.200.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Masyarakat/Pelaku Usaha/Investor		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				100 Kegiatan Usaha.	100 Kegiatan Usaha.	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan , serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	154.200.000,00	0,00	0,00	-154.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**15.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.430.000,00**	**5.000.000,00**							**20.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	15.000.000,00	4.000.000,00	3.430.000,00	-11.570.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat/Pelaku Usaha/Investor		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	4.000.000,00	3.430.000,00	-11.570.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H								**3.781.524.379,00**	**1.956.970.580,00**	**1.919.588.524,00**	**-1.861.935.855,00**							**18.599.994.701,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							**21.353.170.666,00**	**5.662.316.467,00**	**5.570.160.568,00**	**-15.783.010.098,00**							**21.967.529.504,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.353.170.666,00**	**5.662.316.467,00**	**5.570.160.568,00**	**-15.783.010.098,00**							**21.967.529.504,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**21.353.170.666,00**	**5.662.316.467,00**	**5.570.160.568,00**	**-15.783.010.098,00**							**21.967.529.504,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.326.717.865,00**	**1.622.316.867,00**	**1.530.237.208,00**	**224.076.786,00**							**3.550.794.651,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	31.400.000,00	8.813.000,00	0,00	-31.400.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		23.700.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	0 Dokumen	4.600.000,00	1.387.000,00	0,00	-4.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	0 Dokumen	4.500.000,00	1.213.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	0 Dokumen	4.550.000,00	1.287.000,00	0,00	-4.550.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			300.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				14 Dokumen	0 Dokumen	4.550.000,00	1.213.000,00	0,00	-4.550.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.700.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				14 Dokumen	0 Dokumen	4.500.000,00	1.287.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.300.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	0 Laporan	4.250.000,00	1.213.000,00	0,00	-4.250.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			300.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	0 Laporan	4.450.000,00	1.213.000,00	0,00	-4.450.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.676.050.000,00	1.259.030.867,00	1.347.169.491,00	-328.880.509,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		1.677.300.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.550.000.000,00	1.218.343.867,00	1.318.769.491,00	-231.230.509,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.550.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	0 Dokumen	5.650.000,00	0,00	0,00	-5.650.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.050.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	107.500.000,00	36.900.000,00	28.400.000,00	-79.100.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			108.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	0 Laporan	4.350.000,00	2.574.000,00	0,00	-4.350.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.400.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	0 Laporan	4.300.000,00	1.213.000,00	0,00	-4.300.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.350.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3 Dokumen	0 Dokumen	4.250.000,00	0,00	0,00	-4.250.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.300.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	115.595.000,00	17.000.000,00	15.300.000,00	-100.295.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		99.400.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				12 Unit	0 Unit	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				41 Paket	0 Paket	63.275.000,00	17.000.000,00	15.300.000,00	-47.975.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			70.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	0 Dokumen	4.120.000,00	0,00	0,00	-4.120.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				6 Dokumen	0 Dokumen	4.200.000,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	0 Orang	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	0 Orang	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	469.420.000,00	28.373.780,00	21.629.497,00	-447.790.503,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		505.700.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	0 Paket	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.000.000,00	1.471.780,00	29.497,00	-21.970.503,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			23.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	0 Paket	5.320.000,00	0,00	0,00	-5.320.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	0 Paket	10.400.000,00	0,00	0,00	-10.400.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	70.300.000,00	3.200.000,00	1.720.000,00	-68.580.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			70.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	12.200.000,00	3.822.000,00	0,00	-12.200.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			21.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37 Kali Laporan	37 Kali Laporan	342.000.000,00	19.880.000,00	19.880.000,00	-322.120.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			367.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	0 Dokumen	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	502.902.865,00	12.399.000,00	0,00	-502.902.865,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		627.544.651,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	386.677.865,00	0,00	0,00	-386.677.865,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			54.544.651,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	100.225.000,00	12.399.000,00	0,00	-100.225.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			73.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	212.050.000,00	62.520.220,00	36.366.220,00	-175.683.780,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		233.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	250 Laporan	6.550.000,00	2.930.000,00	288.000,00	-6.262.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	17.300.000,00	11.012.000,00	4.612.000,00	-12.688.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			17.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	0 Laporan	8.200.000,00	0,00	0,00	-8.200.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				26 Laporan	26 Laporan	180.000.000,00	48.578.220,00	31.466.220,00	-148.533.780,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	319.300.000,00	234.180.000,00	109.772.000,00	-209.528.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		383.350.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	267.000.000,00	181.780.000,00	107.372.000,00	-159.628.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			270.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	7.300.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-4.900.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.350.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	45.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			106.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**				**-**	**-**	**734.220.208,00**	**242.970.600,00**	**216.556.360,00**	**12.522.027,00**							**746.742.235,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-				-	-	557.000.000,00	242.970.600,00	216.556.360,00	-340.443.640,00			-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	-		537.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				58 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			70.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				8 Orang	0 Orang	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			125.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				34 Kegiatan	34 Kegiatan	132.000.000,00	167.599.600,00	174.511.600,00	42.511.600,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			135.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				10 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			55.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				37 Orang	37 Orang	100.000.000,00	75.371.000,00	42.044.760,00	-57.955.240,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				30 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			52.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	177.220.208,00	0,00	0,00	-177.220.208,00			-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	-		209.742.235,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				65 Organisasi	0 Organisasi	151.220.208,00	0,00	0,00	-151.220.208,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			182.242.235,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				65 Orang	0 Orang	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			27.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**				**-**	**-**	**17.072.695.143,00**	**3.676.199.000,00**	**3.778.661.000,00**	**351.551.940,00**							**17.424.247.083,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.616.095.143,00	2.552.505.000,00	2.679.485.000,00	-5.936.610.143,00			-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	-		8.055.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota				1 Unit	1 Unit	125.000.000,00	81.503.000,00	85.817.000,00	-39.183.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			127.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	1 Unit	8.268.095.143,00	2.471.002.000,00	2.593.668.000,00	-5.674.427.143,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			7.700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	1 Dokumen	223.000.000,00	0,00	0,00	-223.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			228.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.119.000.000,00	497.995.000,00	591.395.000,00	-527.605.000,00			-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	-		1.195.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	512.000.000,00	497.995.000,00	591.395.000,00	79.395.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			514.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota																		
			Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota				7 Kegiatan	0 Kegiatan	287.000.000,00	0,00	0,00	-287.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			301.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				4 Orang	10 Orang	320.000.000,00	0,00	0,00	-320.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			380.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	6.368.600.000,00	568.499.000,00	429.581.000,00	-5.939.019.000,00			-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	-		7.066.247.083,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				50 Orang	0 Orang	37.600.000,00	0,00	0,00	-37.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			37.247.083,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				30 Orang	0 Orang	250.000.000,00	32.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				56 Pelatda	0 Pelatda	5.156.000.000,00	0,00	0,00	-5.156.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			5.760.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				42 Orang	42 Orang	675.000.000,00	78.094.000,00	78.094.000,00	-596.906.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			715.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	458.405.000,00	351.487.000,00	101.487.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			254.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	969.000.000,00	57.200.000,00	78.200.000,00	-890.800.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		1.108.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				45 Laporan	0 Laporan	87.000.000,00	57.200.000,00	78.200.000,00	-8.800.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			93.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																		
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				3 Laporan	0 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			545.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				2 Dokumen	0 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			99.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				12 Unit	0 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			132.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				2 Lembaga	0 Lembaga	227.000.000,00	0,00	0,00	-227.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			239.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**-**				**-**	**-**	**219.537.450,00**	**120.830.000,00**	**44.706.000,00**	**26.208.085,00**							**245.745.535,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	219.537.450,00	120.830.000,00	44.706.000,00	-174.831.450,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		245.745.535,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			110.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	60.950.600,00	0,00	0,00	-60.950.600,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			70.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				7 Unit	0 Unit	17.586.850,00	0,00	0,00	-17.586.850,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			16.745.535,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																		
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				52 Organisasi	52 Organisasi	41.000.000,00	120.830.000,00	44.706.000,00	3.706.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			49.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	J U M L A H								**21.353.170.666,00**	**5.662.316.467,00**	**5.570.160.568,00**	**-15.783.010.098,00**							**21.967.529.504,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEBUDAYAAN							**4.357.469.592,00**	**2.788.780.100,00**	**2.752.072.724,00**	**-1.605.396.868,00**							**4.793.216.551,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.357.469.592,00**	**2.788.780.100,00**	**2.752.072.724,00**	**-1.605.396.868,00**							**4.793.216.551,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**4.357.469.592,00**	**2.788.780.100,00**	**2.752.072.724,00**	**-1.605.396.868,00**							**4.793.216.551,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.994.695.424,00**	**1.321.834.500,00**	**1.419.824.724,00**	**199.469.543,00**							**2.194.164.967,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	62.007.600,00	35.388.802,00	20.693.000,00	-41.314.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Kebudayaan		65.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	8.137.800,00	5.305.800,00	4.330.800,00	-3.807.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	7.762.800,00	4.837.800,00	3.159.500,00	-4.603.300,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	7.046.800,00	4.521.800,00	2.811.000,00	-4.235.800,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				18 Dokumen	18 Dokumen	7.942.800,00	4.567.800,00	2.195.100,00	-5.747.700,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				18 Dokumen	18 Dokumen	7.759.800,00	4.834.800,00	2.187.800,00	-5.572.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	7.710.800,00	4.785.800,00	2.948.800,00	-4.762.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	15.646.800,00	6.535.002,00	3.060.000,00	-12.586.800,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			16.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.306.205.862,00	1.039.016.698,00	1.237.231.676,00	-68.974.186,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Kebudayaan		1.420.664.967,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.247.363.562,00	992.319.898,00	1.181.062.045,00	-66.301.517,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.354.664.967,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	33.865.500,00	33.640.000,00	44.140.000,00	10.274.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			40.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.488.400,00	4.488.400,00	4.488.000,00	-8.000.400,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	12.488.400,00	8.568.400,00	7.541.631,00	-4.946.769,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	121.650.000,00	11.650.000,00	14.635.448,00	-107.014.552,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Kebudayaan		132.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	0 Paket	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			90.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	11.650.000,00	11.650.000,00	14.635.448,00	2.985.448,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			12.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	376.500.000,00	181.279.000,00	112.407.000,00	-264.093.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Kebudayaan		440.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	3.573.000,00	1.573.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	20.249.000,00	18.514.000,00	-31.486.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	320.000.000,00	155.530.000,00	88.320.000,00	-231.680.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			380.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah CakupanPenyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Darah*				100 %	100 %	65.831.962,00	0,00	0,00	-65.831.962,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Kebudayaan		70.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			60.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	5.831.962,00	0,00	0,00	-5.831.962,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	11.500.000,00	3.500.000,00	2.496.000,00	-9.004.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Kebudayaan		15.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.496.000,00	-4.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	9.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	51.000.000,00	51.000.000,00	32.361.600,00	-18.638.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Kebudayaan		51.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	0 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	32.361.600,00	-12.638.400,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			45.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase sarana adat (baruga/galampa) yang telah terbangun Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan**				**42,11 65,06 % %**	**42,11 65,06 % %**	**1.562.432.500,00**	**1.385.000.000,00**	**1.278.248.000,00**	**163.743.250,00**							**1.726.175.750,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	1.069.000.000,00	1.285.000.000,00	1.178.248.000,00	109.248.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	Masyarakat		1.173.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				29 Objek	29 Objek	1.025.000.000,00	1.285.000.000,00	1.178.248.000,00	153.248.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Wasaga Kab. Buton, Pasarwajo, Kambulabulana Kab. Buton, Kapontori, Todanga Kab. Buton, Kapontori, Tumada Kab. Buton, Lasalimu, Waoleona Kab. Buton, Lasalimu, Lawele Kab. Buton, Wabula, Wasampela	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			1.125.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				15 Orang	0 Orang	44.000.000,00	0,00	0,00	-44.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			48.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	190.182.500,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-90.182.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	Masyarakat		216.925.750,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				30 Objek	30 Objek	85.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Awainulu Kab. Buton, Pasarwajo, Saragi Kab. Buton, Pasarwajo, Kaongkeongkea Kab. Buton, Kapontori, Watumotobe Kab. Buton, Lasalimu, Talaga Baru Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Wajah Jaya Kab. Buton, Wolowa, Galanti Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				5 Laporan	0 Laporan	20.182.500,00	0,00	0,00	-20.182.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			23.925.750,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				10 Sertifikat	0 Sertifikat	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			93.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	303.250.000,00	0,00	0,00	-303.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	Lembaga Adat		336.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				33 Objek	0 Objek	30.250.000,00	0,00	0,00	-30.250.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			36.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				15 Orang	0 Orang	38.000.000,00	0,00	0,00	-38.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			40.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				5 Unit	0 Unit	235.000.000,00	0,00	0,00	-235.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			260.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
3.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Cakupan pelestarian kesenian tradisional**				**100 %**	**100 %**	**229.469.542,00**	**0,00**	**0,00**	**22.946.955,00**							**252.416.497,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Kota*				100 %	100 %	229.469.542,00	0,00	0,00	-229.469.542,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	Sanggar Seni		252.416.497,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				72 Orang	0 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				150 Sertifikat	0 Sertifikat	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga	0 Lembaga	79.469.542,00	0,00	0,00	-79.469.542,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			92.416.497,00	DINAS KEBUDAYAAN
4.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Cakupan pelestarian sejarah lokal**				**100 %**	**100 %**	**163.743.250,00**	**0,00**	**0,00**	**16.374.325,00**							**180.117.575,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	163.743.250,00	0,00	0,00	-163.743.250,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	Masyarakat		180.117.575,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				25 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1 Unit	0 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			40.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				10 Dokumen	0 Dokumen	73.743.250,00	0,00	0,00	-73.743.250,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			90.117.575,00	DINAS KEBUDAYAAN
5.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Cakupan cagar budaya yang dilestarikan dan yang dikelola**				**33 %**	**33 %**	**332.128.876,00**	**81.945.600,00**	**54.000.000,00**	**33.212.886,00**							**365.341.762,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Cakupan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	95.000.000,00	81.945.600,00	54.000.000,00	-41.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				105 Objek	50 Objek	25.000.000,00	81.945.600,00	54.000.000,00	29.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			30.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				29 Objek	0 Objek	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	201.128.876,00	0,00	0,00	-201.128.876,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	Masyarakat		215.341.762,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				30 Objek	0 Objek	72.500.000,00	0,00	0,00	-72.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			78.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				30 Objek	0 Objek	72.500.000,00	0,00	0,00	-72.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			78.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				30 Objek	0 Objek	56.128.876,00	0,00	0,00	-56.128.876,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			59.341.762,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	Masyarakat		40.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.03.0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				5 Objek	0 Objek	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi				5 Laporan	0 Laporan	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
6.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Cakupan Pengelolaan Museum**				**100 %**	**100 %**	**75.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**75.000.000,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				25 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				3 Orang	0 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			15.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				3 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			15.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				3 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				3 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	J U M L A H								**4.357.469.592,00**	**2.788.780.100,00**	**2.752.072.724,00**	**-1.605.396.868,00**							**4.793.216.551,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH							**3.149.476.873,00**	**2.803.548.025,00**	**2.515.442.549,00**	**-634.034.324,00**							**2.900.842.059,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.149.476.873,00**	**2.803.548.025,00**	**2.515.442.549,00**	**-634.034.324,00**							**2.900.842.059,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**2.976.445.873,00**	**2.754.322.725,00**	**2.468.207.249,00**	**-508.238.624,00**							**2.733.342.059,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase sekolah yang memiliki perpustakaan sesuai standar perpustakaan Cakupan pembinaan perpustakaan**				**4,39 75 % %**	**4,39 75 % %**	**783.933.814,00**	**1.380.703.950,00**	**1.359.193.950,00**	**-108.933.814,00**							**675.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolan Perpustakaan Tingkat Daerah*				40 %	40 %	286.507.814,00	740.194.000,00	718.394.000,00	431.886.186,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum		295.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	20.430.000,00	116.000.000,00	110.600.000,00	90.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	30.000.000,00	364.594.000,00	364.594.000,00	334.594.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50 Orang	0 Orang	52.627.814,00	0,00	0,00	-52.627.814,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				2 Dokumen	0 Dokumen	24.250.000,00	0,00	0,00	-24.250.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				15000 Eksemplar	15000 Eksemplar	61.000.000,00	259.600.000,00	243.200.000,00	182.200.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				100 Eksemplar	0 Eksemplar	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				2 Perpustakaan	0 Perpustakaan	48.200.000,00	0,00	0,00	-48.200.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah*				35 %	35 %	497.426.000,00	640.509.950,00	640.799.950,00	143.373.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum		380.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				50 Orang	0 Orang	52.720.000,00	0,00	0,00	-52.720.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	65.250.000,00	42.949.700,00	43.929.700,00	-21.320.300,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	300.000.000,00	500.000.000,00	533.000.000,00	233.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			200.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				50 Orang	0 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				1 Lokus	1 Lokus	54.456.000,00	97.560.250,00	63.870.250,00	9.414.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**"Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno"**				**80 %**	**80 %**	**159.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.170.000,00**							**145.000.000,00**	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	73.250.000,00	0,00	0,00	-73.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	OPD Kab. Buton, Kecamatan, Desa/Kelurahan		65.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				50 Orang	0 Orang	28.250.000,00	0,00	0,00	-28.250.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				1000 Eksemplar	0 Eksemplar	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	85.920.000,00	0,00	0,00	-85.920.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	OPD Kab. Buton, Kecamatan, Desa/Kelurahan		80.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				1000 Eksemplar	0 Eksemplar	35.920.000,00	0,00	0,00	-35.920.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				100 Eksemplar	0 Eksemplar	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
3.	**2.24.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.033.342.059,00**	**1.373.618.775,00**	**1.109.013.299,00**	**-120.000.000,00**							**1.913.342.059,00**	
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	38.600.000,00	33.543.500,00	27.578.000,00	-11.022.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	OPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab. Buton		38.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.500.000,00	6.577.500,00	6.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			4.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	5.000.000,00	3.740.500,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	5.000.000,00	3.740.500,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	5.000.000,00	4.000.000,00	3.354.000,00	-1.646.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	5.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.500.000,00	4.054.000,00	3.224.000,00	-1.276.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			4.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	9.600.000,00	7.431.000,00	6.000.000,00	-3.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			9.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.429.616.059,00	1.166.960.418,00	976.773.023,00	-452.843.036,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	OPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab. Buton		1.429.616.059,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.341.776.059,00	1.094.711.418,00	905.533.023,00	-436.243.036,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.341.776.059,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	39.600.000,00	30.800.000,00	28.100.000,00	-11.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			39.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	39.240.000,00	34.440.000,00	37.140.000,00	-2.100.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			39.240.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.500.000,00	3.504.500,00	3.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			4.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.500.000,00	3.504.500,00	3.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			4.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	54.500.000,00	3.413.500,00	3.000.000,00	-51.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	OPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab. Buton		54.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	4.500.000,00	3.413.500,00	3.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			4.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	331.572.000,00	92.839.150,00	37.496.900,00	-294.075.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	OPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab. Buton		231.572.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.022.000,00	1.022.000,00	365.000,00	-657.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.022.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24.900.000,00	29.305.000,00	10.613.500,00	-14.286.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			24.900.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.650.000,00	2.622.150,00	198.400,00	-5.451.600,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			5.650.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	59.890.000,00	26.320.000,00	-273.680.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			200.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	52.003.000,00	36.789.157,00	23.144.000,00	-28.859.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	OPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab. Buton		52.003.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	2.500.000,00	1.235.000,00	432.000,00	-2.068.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	44.472.000,00	32.112.000,00	22.112.000,00	-22.360.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			44.472.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2.934.000,00	2.934.000,00	450.000,00	-2.484.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.934.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2.097.000,00	508.157,00	150.000,00	-1.947.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			2.097.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	127.051.000,00	40.073.050,00	41.021.376,00	-86.029.624,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	OPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab. Buton		107.051.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	46.365.000,00	40.073.050,00	41.021.376,00	-5.343.624,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			46.365.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	0 Unit	80.686.000,00	0,00	0,00	-80.686.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			60.686.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**173.031.000,00**	**49.225.300,00**	**47.235.300,00**	**-125.795.700,00**							**167.500.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku**				**75 %**	**75 %**	**82.931.000,00**	**46.189.300,00**	**44.199.300,00**	**-431.000,00**							**82.500.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota*				25 %	25 %	62.931.000,00	35.689.300,00	37.299.300,00	-25.631.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	OPD Kab. Buton, Kecamatan, Desa/Kelurahan		62.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				250 Berkas	250 Berkas	37.200.000,00	23.036.800,00	25.036.800,00	-12.163.200,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			37.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				150 Berkas	150 Berkas	25.731.000,00	12.652.500,00	12.262.500,00	-13.468.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	10.500.000,00	6.900.000,00	-13.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	OPD Kab. Buton, Kecamatan, Desa/Kelurahan		20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				100 Arsip	100 Arsip	20.000.000,00	10.500.000,00	6.900.000,00	-13.100.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**38.100.000,00**	**3.036.000,00**	**3.036.000,00**	**-3.100.000,00**							**35.000.000,00**	
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-				-	-	38.100.000,00	3.036.000,00	3.036.000,00	-35.064.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	OPD Kab. Buton, Kecamatan, Desa/Kelurahan		35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				50 Daftar	50 Daftar	15.750.000,00	3.036.000,00	3.036.000,00	-12.714.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				50 Arsip	0 Arsip	22.350.000,00	0,00	0,00	-22.350.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
3.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Persentase peningkatan pengguna atau pengunjung arsip**				**6 %**	**6 %**	**52.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-				-	-	52.000.000,00	0,00	0,00	-52.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	OPD Kab. Buton, Kecamatan, Desa/Kelurahan		50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				100 Arsip	0 Arsip	52.000.000,00	0,00	0,00	-52.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	J U M L A H								**3.149.476.873,00**	**2.803.548.025,00**	**2.515.442.549,00**	**-634.034.324,00**							**2.900.842.059,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERIKANAN							**15.075.989.862,00**	**3.529.191.583,00**	**3.259.213.207,00**	**-11.816.776.655,00**							**16.583.588.846,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**15.075.989.862,00**	**3.529.191.583,00**	**3.259.213.207,00**	**-11.816.776.655,00**							**16.583.588.846,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**15.075.989.862,00**	**3.529.191.583,00**	**3.259.213.207,00**	**-11.816.776.655,00**							**16.583.588.846,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Nilai LAKIP perangkat daerah**				**100 77,79 % %**	**100 77,79 % %**	**3.901.662.817,00**	**2.961.803.583,00**	**3.107.510.007,00**	**390.166.282,00**							**4.291.829.099,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	99.825.000,00	9.380.000,00	9.367.545,00	-90.457.455,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Perikanan		109.807.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	81.675.000,00	7.528.000,00	7.528.000,00	-74.147.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			89.842.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.025.000,00	288.000,00	275.545,00	-2.749.455,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.327.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.025.000,00	273.000,00	273.000,00	-2.752.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.327.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.025.000,00	433.000,00	433.000,00	-2.592.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.327.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.025.000,00	298.000,00	298.000,00	-2.727.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.327.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.025.000,00	341.000,00	341.000,00	-2.684.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.327.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	3.025.000,00	219.000,00	219.000,00	-2.806.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.327.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.922.984.567,00	2.532.263.583,00	2.707.677.462,00	-215.307.105,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Perikanan		3.215.283.024,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	2.815.875.367,00	2.459.743.583,00	2.635.157.462,00	-180.717.905,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.097.462.904,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	66.574.200,00	46.800.000,00	46.800.000,00	-19.774.200,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			73.231.620,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.890.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-3.090.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			11.979.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.420.000,00	0,00	0,00	-2.420.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.025.000,00	0,00	0,00	-3.025.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Holimombo	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.327.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	24.200.000,00	17.920.000,00	17.920.000,00	-6.280.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.620.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	24.200.000,00	4.673.000,00	4.673.000,00	-19.527.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Perikanan		26.620.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.025.000,00	312.000,00	312.000,00	-2.713.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.327.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	12.100.000,00	0,00	0,00	-12.100.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.310.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9.075.000,00	4.361.000,00	4.361.000,00	-4.714.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.982.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	101.640.000,00	337.000,00	337.000,00	-101.303.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Perikanan		111.804.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				35 Unit	0 Unit	48.400.000,00	0,00	0,00	-48.400.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			53.240.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				35 Dokumen	35 Dokumen	3.025.000,00	337.000,00	337.000,00	-2.688.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.327.500,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	50.215.000,00	0,00	0,00	-50.215.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			55.236.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	302.500.000,00	152.250.000,00	90.055.000,00	-212.445.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Perikanan		332.750.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.815.000,00	0,00	0,00	-1.815.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.996.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.865.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	14.135.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.651.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	7.260.000,00	0,00	0,00	-7.260.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.986.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	7.260.000,00	0,00	0,00	-7.260.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.986.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	223.850.000,00	130.250.000,00	68.055.000,00	-155.795.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			246.235.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	36.300.000,00	0,00	0,00	-36.300.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			39.930.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	129.470.000,00	0,00	0,00	-129.470.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Perikanan		142.417.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	42.350.000,00	0,00	0,00	-42.350.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			46.585.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	87.120.000,00	0,00	0,00	-87.120.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			95.832.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	146.410.000,00	126.320.000,00	218.820.000,00	72.410.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Perikanan		161.051.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0 Laporan	7.260.000,00	0,00	0,00	-7.260.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.986.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.250.000,00	81.672.000,00	174.172.000,00	143.922.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			33.275.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.125.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.125.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			16.637.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	93.775.000,00	39.648.000,00	39.648.000,00	-54.127.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			103.152.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	174.633.250,00	136.580.000,00	76.580.000,00	-98.053.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Perikanan		192.096.575,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	77.143.550,00	65.580.000,00	65.580.000,00	-11.563.550,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			84.857.905,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	49.089.700,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-38.089.700,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			53.998.670,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	48.400.000,00	60.000.000,00	0,00	-48.400.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			53.240.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi Perikanan Tangkap Pendapatan Nelayan Persentase Ketersediaan Sarana Perikanan Tangkap**				**27.052 3,15 66,63 Ton Juta Rupiah %**	**27.052 3,15 66,63 Ton Juta Rupiah %**	**8.318.066.397,00**	**253.707.500,00**	**86.961.500,00**	**831.806.642,00**							**9.149.873.039,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Cakupan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota*				100 %	100 %	32.661.559,00	900.000,00	0,00	-32.661.559,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Rumah Tangga Perikanan		35.927.715,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	0 Dokumen	32.661.559,00	900.000,00	0,00	-32.661.559,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			35.927.715,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	5.942.979.032,00	236.253.100,00	78.133.100,00	-5.864.845.932,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Nelayan Kecil		6.537.276.937,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				275 Orang	0 Orang	427.990.727,00	900.000,00	900.000,00	-427.090.727,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			470.789.800,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				25 Kelompok	0 Kelompok	278.323.825,00	900.000,00	0,00	-278.323.825,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			306.156.208,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				6 Unit Usaha	0 Unit Usaha	278.486.200,00	900.000,00	0,00	-278.486.200,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			306.334.821,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				285 Unit	2 Unit	4.958.178.280,00	233.553.100,00	77.233.100,00	-4.880.945.180,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			5.453.996.108,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Cakupan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*				100 %	100 %	1.331.515.303,00	2.399.400,00	1.499.400,00	-1.330.015.903,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Dinas Perikanan, Stakeholder/Pelaku Usaha Perikanan		1.464.666.833,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				2600 Layanan	2000 Layanan	1.331.515.303,00	2.399.400,00	1.499.400,00	-1.330.015.903,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Holimombo Kab. Buton, Lasalimu, Kamaru Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Lasalimu Kab. Buton, Siotapina, Kumbewaha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			1.464.666.833,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	448.620.568,00	14.155.000,00	7.329.000,00	-441.291.568,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Rumah Tangga Perikanan		493.482.625,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				700 Rekomendasi	100 Rekomendasi	448.620.568,00	14.155.000,00	7.329.000,00	-441.291.568,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			493.482.625,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Cakupan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota*				100 %	100 %	113.427.367,00	0,00	0,00	-113.427.367,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Rumah Tangga Perikanan		124.770.104,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.05.0003	Penerbitan rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)																		
			Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan				45 Rekomendasi	0 Rekomendasi	113.427.367,00	0,00	0,00	-113.427.367,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			124.770.104,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	448.862.568,00	0,00	0,00	-448.862.568,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Rumah Tangga Perikanan		493.748.825,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.06.0003	Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)																		
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				45 Rekomendasi	0 Rekomendasi	448.862.568,00	0,00	0,00	-448.862.568,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			493.748.825,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Pendapatan Pembudidaya Ikan Produksi Perikanan Budidaya**				**3,15 4.158 Juta Rupiah Ton**	**3,15 4.158 Juta Rupiah Ton**	**1.510.961.981,00**	**213.654.500,00**	**60.114.500,00**	**151.096.192,00**							**1.662.058.173,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Cakupan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil*				100 %	100 %	119.656.434,00	2.515.000,00	1.615.000,00	-118.041.434,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Pembudidaya Ikan		131.622.078,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				8 Kelompok	0 Kelompok	64.990.897,00	0,00	0,00	-64.990.897,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			71.489.987,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				12 Kelompok	2 Kelompok	14.080.316,00	1.615.000,00	1.615.000,00	-12.465.316,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			15.488.348,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				12 Kelompok	0 Kelompok	21.648.177,00	0,00	0,00	-21.648.177,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			23.812.994,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				12 Kelompok	0 Kelompok	18.937.044,00	900.000,00	0,00	-18.937.044,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			20.830.749,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	24.200.000,00	0,00	0,00	-24.200.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Rumah Tangga Perikanan		26.619.996,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				2 Rekomendasi	0 Rekomendasi	3.340.205,00	0,00	0,00	-3.340.205,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			3.674.226,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Rekomendasi	0 Rekomendasi	20.859.795,00	0,00	0,00	-20.859.795,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			22.945.770,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Cakupan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan*				100 %	100 %	1.367.105.547,00	211.139.500,00	58.499.500,00	-1.308.606.047,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Pembudidaya Ikan		1.503.816.099,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	16.348.552,00	1.200.000,00	0,00	-16.348.552,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			17.983.407,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				28 Unit	2 Unit	970.631.508,00	163.165.500,00	50.745.500,00	-919.886.008,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			1.067.694.657,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				4 Dokumen	2 Dokumen	201.864.100,00	2.631.000,00	1.431.000,00	-200.433.100,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			222.050.510,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	0 Unit	127.513.781,00	36.323.000,00	6.323.000,00	-121.190.781,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			140.265.159,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				5 Unit	0 Unit	16.668.972,00	0,00	0,00	-16.668.972,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			18.335.869,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				5 Unit	0 Unit	16.668.972,00	600.000,00	0,00	-16.668.972,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			18.335.869,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				4 Dokumen	0 Dokumen	17.409.662,00	7.220.000,00	0,00	-17.409.662,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			19.150.628,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan**				**75,00 %**	**75,00 %**	**122.299.879,00**	**0,00**	**0,00**	**12.229.988,00**							**134.529.867,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	122.299.879,00	0,00	0,00	-122.299.879,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Pokmaswas		134.529.867,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				10 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	24.459.976,00	0,00	0,00	-24.459.976,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			26.905.974,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				40 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	97.839.903,00	0,00	0,00	-97.839.903,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			107.623.893,00	DINAS PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase layanan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri terhadap seluruh keluarga berisiko stunting Produksi Olahan Hasil Perikanan Konsumsi Ikan Daerah**				**100 2.285 80,69 % Ton Kg/Kapita**	**100 2.285 80,69 % Ton Kg/Kapita**	**1.222.998.788,00**	**100.026.000,00**	**4.627.200,00**	**122.299.880,00**							**1.345.298.668,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Cakupan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil*				100 %	100 %	31.100.775,00	600.000,00	0,00	-31.100.775,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan		34.210.853,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				2 Dokumen	0 Dokumen	31.100.775,00	600.000,00	0,00	-31.100.775,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			34.210.853,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Cakupan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*				100 %	100 %	458.098.740,00	75.300.000,00	0,00	-458.098.740,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan		503.908.614,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				40 Unit Usaha	0 Unit Usaha	458.098.740,00	75.300.000,00	0,00	-458.098.740,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			503.908.614,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota*				100 %	100 %	733.799.273,00	24.126.000,00	4.627.200,00	-729.172.073,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan		807.179.201,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				9448 Ton	3000 Ton	36.622.925,00	1.285.000,00	1.285.000,00	-35.337.925,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			40.285.218,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				30 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	697.176.348,00	22.841.000,00	3.342.200,00	-693.834.148,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PENUGASAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			766.893.983,00	DINAS PERIKANAN
	J U M L A H								**15.075.989.862,00**	**3.529.191.583,00**	**3.259.213.207,00**	**-11.816.776.655,00**							**16.583.588.846,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PARIWISATA							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**3.299.924.793,00**	**2.343.361.730,00**	**2.373.074.169,00**	**863.463.506,61**							**4.163.388.299,61**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	38.163.000,00	41.859.000,00	39.035.000,00	872.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pariwisata Kab. Buton		27.350.400,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	6 Dokumen	0,00	8.305.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.557.400,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.788.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.557.400,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.218.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.557.400,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.793.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.557.400,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.793.000,00	3.724.000,00	3.724.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.557.400,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.848.000,00	4.848.000,00	4.848.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.557.400,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2 Laporan	0,00	13.114.000,00	11.133.000,00	11.133.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.006.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.216.655.101,00	1.942.689.810,00	2.085.587.899,00	-131.067.202,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Dinas Pariwisata Kab. Buton		2.626.711.043,33	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	27 Orang/bulan	0,00	1.896.690.810,00	2.032.936.199,00	2.032.936.199,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.515.161.143,33	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	22.300.000,00	32.080.000,00	32.080.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			104.435.100,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.403.000,00	4.255.000,00	4.255.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.557.400,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	19.296.000,00	16.316.700,00	16.316.700,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.557.400,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.548.000,00	3.868.000,00	3.720.000,00	-828.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pariwisata Kab. Buton		3.751.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	3.868.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.815.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.936.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	32.004.000,00	3.888.000,00	3.666.000,00	-28.338.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pariwisata Kab. Buton		49.489.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.420.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			39.204.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	3.888.000,00	3.666.000,00	3.666.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.420.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.420.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.025.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	548.024.000,00	150.376.000,00	67.744.350,00	-480.279.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pariwisata Kab. Buton		152.368.040,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.267.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	0 Paket	0,00	5.836.000,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			12.741.300,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.420.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	5.750.000,00	2.229.350,00	2.229.350,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	0,00	2.500.000,00	935.000,00	935.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.905.340,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	136.290.000,00	64.580.000,00	64.580.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			122.379.400,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	107.700.000,00	0,00	0,00	-107.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pariwisata Kab. Buton		869.398.148,61	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			275.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			537.096.626,61	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.050.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.557.400,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			47.694.122,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	305.755.692,00	167.680.920,00	145.330.920,00	-160.424.772,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pariwisata Kab. Buton		354.038.740,67	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.634.840,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	24.139.000,00	24.139.000,00	24.139.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			28.715.357,67	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.318.900,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	138.541.920,00	116.191.920,00	116.191.920,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			320.369.643,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	47.075.000,00	33.000.000,00	27.990.000,00	-19.085.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pariwisata Kab. Buton		80.281.927,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	5 Unit	0,00	33.000.000,00	27.990.000,00	27.990.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			43.338.570,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.630.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			33.313.357,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase pengembangan destinasi wisata**				**60 %**	**60 %**	**1.527.778.866,00**	**26.000.000,00**	**133.300.000,00**	**-492.504.318,12**							**1.035.274.547,88**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	434.241.366,00	10.000.000,00	27.700.000,00	-406.541.366,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	DTW Kab. Buton (Atraksi Wisata, Aksesbilitas, Fasilitas dan Jasa Pendukung Pariwisata)		70.325.718,75	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				5 Lokasi	2 Lokasi	155.705.732,00	10.000.000,00	27.700.000,00	-128.005.732,00	Kab. Buton, Kapontori, Boneatiro Barat Kab. Buton, Wabula, Wabula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			56.434.218,75	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	5.512.500,00	0,00	0,00	-5.512.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Winning Kab. Buton, Pasarwajo, Banabungi Kab. Buton, Pasarwajo, Kaongkeongkea Kab. Buton, Kapontori, Boneatiro Kab. Buton, Kapontori, Tuangila Kab. Buton, Kapontori, Lambusango Timur Kab. Buton, Kapontori, Mabulugo Kab. Buton, Kapontori, Boneatiro Barat Kab. Buton, Wabula, Wasuemba Kab. Buton, Wabula, Wabula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			5.788.125,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0 Dokumen	273.023.134,00	0,00	0,00	-273.023.134,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Winning Kab. Buton, Wabula, Wabula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			8.103.375,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	186.537.500,00	0,00	0,00	-186.537.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Destinasi Wisata (Atraksi Wisata, Aksesbilitas, Fasilitas dan Jasa Pendukung Pariwisata), Masyarakat di Sekitar Destinasi Wisata, Pelaku Industri Pariwisata, dan SDM Pariwisata		26.625.375,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			5.788.125,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				10 Unit	0 Unit	16.537.500,00	0,00	0,00	-16.537.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Wasuemba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			17.364.375,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				40 Orang	0 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			3.472.875,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	845.000.000,00	11.400.000,00	103.000.000,00	-742.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Destinasi Wisata (Atraksi Wisata, Aksesbilitas, Fasilitas dan Jasa Pendukung Pariwisata), Desa Wisata, Masyarakat di Sekitar Destinasi Wisata, Pelaku Industri Pariwisata, dan SDM Pariwisata		910.540.454,13	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Winning Kab. Buton, Pasarwajo, Banabungi Kab. Buton, Wabula, Wabula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			5.788.125,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				35 Lokasi	0 Lokasi	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			520.931.250,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				25 Unit	0 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kancinaa Kab. Buton, Pasarwajo, Banabungi Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Wasuemba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			274.937.242,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	11.400.000,00	3.000.000,00	-57.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				-	0 0	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Wabula, Wasuemba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			97.515.959,63	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			11.367.877,50	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penetapan Tanda Dafatar Usaha Pariwisata*				100 %	100 %	62.000.000,00	4.600.000,00	2.600.000,00	-59.400.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Usaha-Usaha Sektor Pariwisata		27.783.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota																		
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				40 Usaha	40 Usaha	40.000.000,00	4.600.000,00	2.600.000,00	-37.400.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			11.576.250,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota																		
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota				10 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			2.315.250,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)																		
			Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi				12 Usaha	0 Usaha	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			2.315.250,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0013	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)																		
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)				12 Unit Usaha	0 Unit Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			11.576.250,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Nusantara Persentase Tingkat Hunian Akomodasi Persentase Kunjungan Wisata**				**40 45 7.53 85 % % % %**	**40 45 7.53 85 % % % %**	**705.000.000,00**	**62.000.000,00**	**54.700.000,00**	**-255.322.860,50**							**449.677.139,50**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	705.000.000,00	62.000.000,00	54.700.000,00	-650.300.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Desa Wisata, Destinasi Wisata, ODTW, Industri Pariwisata, Mitra Pariwisata, Event, dan Beberapa Kegiatan Promosi dan Pemasaran Lainnya		449.677.139,50	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				24 Dokumen	24 Dokumen	100.000.000,00	10.000.000,00	4.700.000,00	-95.300.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			49.526.557,25	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			49.526.557,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			66.541.407,25	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				7 Kegiatan	1 Kegiatan	500.000.000,00	52.000.000,00	50.000.000,00	-450.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Banabungi Kab. Buton, Kapontori, Boneatiro Kab. Buton, Kapontori, Mabulugo Kab. Buton, Kapontori, Boneatiro Barat Kab. Buton, Wabula, Wasuemba Kab. Buton, Wabula, Wabula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			188.441.557,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				6 Promosi	0 Promosi	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			95.641.061,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase pelaku Ekraf yang difasiltasi/mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual**				**2 %**	**2 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.154.743,33**							**112.154.743,33**	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Kota Kreatif Kab. Buton, industri Pariwisata		112.154.743,33	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			112.154.743,33	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase tenaga kerja pariwisata dan Ekraf yang dibina** **Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan**				**16** **40 %** **%**	**16** **40 %** **%**	**1.456.101.086,00**	**10.000.000,00**	**4.550.000,00**	**1.344.015.708,68**							**2.800.116.794,68**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar*				100 %	100 %	1.050.000.000,00	10.000.000,00	4.550.000,00	-1.045.450.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif		2.356.586.234,68	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	0 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			393.141.160,08	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				100 Orang	0 Orang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			172.833.520,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				40 Orang	0 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			166.077.690,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				200 Orang	0 Orang	250.000.000,00	5.400.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			1.112.283.520,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				20 Orang	0 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			371.940.574,60	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	4.600.000,00	4.550.000,00	-35.450.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			140.309.770,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Cakupan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif*				100 %	100 %	406.101.086,00	0,00	0,00	-406.101.086,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Pelaku Ekonomi Kreatif		443.530.560,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				40 Orang	0 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			173.384.770,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha																		
			Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha				1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			135.072.895,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				20 Orang	0 Orang	156.101.086,00	0,00	0,00	-156.101.086,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			135.072.895,00	DINAS PARIWISATA
	J U M L A H								**6.988.804.745,00**	**2.441.361.730,00**	**2.565.624.169,00**	**-4.423.180.576,00**							**8.560.611.525,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERTANIAN							**23.003.578.688,00**	**7.277.667.783,00**	**6.873.999.389,00**	**-16.129.579.299,00**							**25.515.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**23.003.578.688,00**	**7.277.667.783,00**	**6.873.999.389,00**	**-16.129.579.299,00**							**25.515.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**23.003.578.688,00**	**7.277.667.783,00**	**6.873.999.389,00**	**-16.129.579.299,00**							**25.515.000.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**5.253.578.688,00**	**6.364.652.533,00**	**6.281.534.139,00**	**2.151.421.312,00**							**7.405.000.000,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	250.000.000,00	13.351.700,00	17.581.700,00	-232.418.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN lingkup Dinas Pertanian		280.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	4.105.000,00	4.105.000,00	-95.895.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	4.105.000,00	4.105.000,00	-20.895.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	518.000,00	2.708.000,00	-22.292.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	4.105.000,00	4.105.000,00	-20.895.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	518.000,00	2.558.000,00	2.558.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**23.003.578.688,00**	**7.277.667.783,00**	**6.873.999.389,00**	**-16.129.579.299,00**							**25.515.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**23.003.578.688,00**	**7.277.667.783,00**	**6.873.999.389,00**	**-16.129.579.299,00**							**25.515.000.000,00**	
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**23.003.578.688,00**	**7.277.667.783,00**	**6.873.999.389,00**	**-16.129.579.299,00**							**25.515.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**23.003.578.688,00**	**7.277.667.783,00**	**6.873.999.389,00**	**-16.129.579.299,00**							**25.515.000.000,00**	
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	350,00	350,00	-24.999.650,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	350,00	350,00	-24.999.650,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan*				100 %	100 %	3.600.000.000,00	6.115.199.282,00	6.060.276.059,00	2.460.276.059,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN lingkup Dinas Pertanian		5.615.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	3.500.000.000,00	6.051.938.582,00	5.982.976.059,00	2.482.976.059,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	63.260.000,00	68.520.000,00	18.520.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	350,00	3.880.000,00	-21.120.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	350,00	4.900.000,00	-20.100.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	50.000.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	-47.290.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN lingkup Dinas Pertanian		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	-22.290.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian*				100 %	100 %	163.578.688,00	0,00	0,00	-163.578.688,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN lingkup Dinas Pertanian		145.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				3 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**23.003.578.688,00**	**7.277.667.783,00**	**6.873.999.389,00**	**-16.129.579.299,00**							**25.515.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**23.003.578.688,00**	**7.277.667.783,00**	**6.873.999.389,00**	**-16.129.579.299,00**							**25.515.000.000,00**	
	3.27.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**23.003.578.688,00**	**7.277.667.783,00**	**6.873.999.389,00**	**-16.129.579.299,00**							**25.515.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**23.003.578.688,00**	**7.277.667.783,00**	**6.873.999.389,00**	**-16.129.579.299,00**							**25.515.000.000,00**	
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	0 Orang	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum*				100 %	100 %	390.000.000,00	147.310.501,00	112.165.330,00	-277.834.670,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN lingkup Dinas Pertanian		465.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	14.996.000,00	19.645.829,00	-30.354.171,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	3.104.501,00	3.104.501,00	-21.895.499,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.800.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**23.003.578.688,00**	**7.277.667.783,00**	**6.873.999.389,00**	**-16.129.579.299,00**							**25.515.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**23.003.578.688,00**	**7.277.667.783,00**	**6.873.999.389,00**	**-16.129.579.299,00**							**25.515.000.000,00**	
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**23.003.578.688,00**	**7.277.667.783,00**	**6.873.999.389,00**	**-16.129.579.299,00**							**25.515.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**23.003.578.688,00**	**7.277.667.783,00**	**6.873.999.389,00**	**-16.129.579.299,00**							**25.515.000.000,00**	
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	124.410.000,00	79.815.000,00	-170.185.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran*				100 %	100 %	475.000.000,00	700,00	700,00	-474.999.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN lingkup Dinas Pertanian		485.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	350,00	350,00	-399.999.650,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			400.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	25.000.000,00	350,00	350,00	-24.999.650,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi perkantoran*				100 %	100 %	150.000.000,00	21.460.350,00	36.696.350,00	-113.303.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN lingkup Dinas Pertanian		170.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-19.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				14 Laporan	14 Laporan	50.000.000,00	5.260.000,00	20.496.000,00	-29.504.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	350,00	350,00	-24.999.650,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	-39.800.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran*				100 %	100 %	175.000.000,00	64.620.000,00	52.104.000,00	-122.896.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN lingkup Dinas Pertanian		185.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	25.000.000,00	42.600.000,00	34.044.000,00	9.044.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	50 Unit	100.000.000,00	22.020.000,00	18.060.000,00	-81.940.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**23.003.578.688,00**	**7.277.667.783,00**	**6.873.999.389,00**	**-16.129.579.299,00**							**25.515.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**23.003.578.688,00**	**7.277.667.783,00**	**6.873.999.389,00**	**-16.129.579.299,00**							**25.515.000.000,00**	
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**23.003.578.688,00**	**7.277.667.783,00**	**6.873.999.389,00**	**-16.129.579.299,00**							**25.515.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**23.003.578.688,00**	**7.277.667.783,00**	**6.873.999.389,00**	**-16.129.579.299,00**							**25.515.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas padi**				**76,50 kwintal/hektar**	**76,50 kwintal/hektar**	**4.150.000.000,00**	**130.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-50.000.000,00**							**4.100.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase penggunaan sarana pertanian*				100 %	100 %	3.100.000.000,00	130.000.000,00	15.000.000,00	-3.085.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Gapoktan, Poktan, /petani		3.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	130.000.000,00	15.000.000,00	-985.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	0 Laporan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			1.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan																		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan				1 Laporan	0 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan																		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan				1 Laporan	0 Laporan	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Sribatara	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura																		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura				1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase capaian produksi pertanian/ perkebunan*				100 %	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Gapoktan, Poktan, petani dan petani ternak		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Bukit Asri Kab. Buton, Lasalimu, Wasambaa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Wajah Jaya Kab. Buton, Siotapina, Sumber Sari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penggunaan sarana pertanian*				100 %	100 %	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Petani peternak/toko tani/ternak.		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																		
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				1 Laporan	0 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Persentase Capaian Populasi Ternak*				90,90 %	90,90 %	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	masyarakat tani/peternak, gapoktan/poktan		800.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				200 Ekor	0 Ekor	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			800.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Luasan lahan pertanian**				**15,25 Ha**	**15,25 Ha**	**11.900.000.000,00**	**530.230.250,00**	**336.120.250,00**	**200.000.000,00**							**12.100.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Persentase prasarana pertanian yang dibangun*				90 %	90 %	2.950.000.000,00	355.189.200,00	173.599.200,00	-2.776.400.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Gapoktan, Poktan, /petani		3.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	0 Laporan	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan																		
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				7 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan				3 Unit	3 Unit	400.000.000,00	125.040.000,00	112.520.000,00	-287.480.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan																		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				7 Unit	0 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	230.149.200,00	61.079.200,00	-1.438.920.800,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase prasarana pertanian yang dibangun*				100 %	100 %	8.800.000.000,00	1.050,00	1.050,00	-8.799.998.950,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Gapoktan, Poktan, /petani		8.700.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				6 Unit	0 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Wakangka Kab. Buton, Kapontori, Wakuli Kab. Buton, Lasalimu, Lawele Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Ambuau Indah Kab. Buton, Siotapina, Sumber Sari	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENGUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				50 Unit	0 Unit	6.000.000.000,00	350,00	350,00	-5.999.999.650,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENGUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			7.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				7 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	350,00	350,00	-999.999.650,00	Kab. Buton, Kapontori, Wakangka Kab. Buton, Lasalimu, Sribatara Kab. Buton, Siotapina, Walompo Kab. Buton, Wolowa, Wolowa Kab. Buton, Wabula, Holimombo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENGUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				8 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	350,00	350,00	-999.999.650,00	Kab. Buton, Kapontori, Watumotobe Kab. Buton, Kapontori, Wakangka Kab. Buton, Kapontori, Wakalambe Kab. Buton, Kapontori, Wakuli Kab. Buton, Lasalimu, Lasembangi Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Ambuau Indah	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENGUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			600.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan																		
			Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				3 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Wakangka Kab. Buton, Lasalimu, Sribatara Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Ambuau Indah	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENGUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase wilayah sumber bibit ternak yang dikelola.*				40 %	40 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	masyarakat tani/peternak, gapoktan/poktan		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak																		
			Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	*Luasan lahan penggembalaan umum*				5 Ha	5 Ha	50.000.000,00	175.040.000,00	162.520.000,00	112.520.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Petani peternak.		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.04.0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum																		
			Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan				5 Ha	5 Ha	50.000.000,00	175.040.000,00	162.520.000,00	112.520.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan**				**10 %**	**10 %**	**400.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**							**600.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Persentase capaian angka kesakitan ternak*				1 %	1 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Masyarakat tani/peternak.		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelayanan kesehatan hewan*				100 %	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	masyarakat tani/peternak, gapoktan/poktan		300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	0 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase capaian angka kesakitan ternak* *Persentase kesehatan masyarakat veteriner memenuhi persyaratan teknis*				3 %	3 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	masyarakat tani/peternak, gapoktan/poktan		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase luas areal pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman)** **Persentase lahan pertanian bebas bencana pertanian**				**15** **4 %** **%**	**15** **4 %** **%**	**500.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**500.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Persentase pengendalian dan penanggulanga n OPT*				19,85 %	19,85 %	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Gapoktan, Poktan, petani dan Penyuluh swadaya masyarakat.		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				5 Ha	0 Ha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				10 Ha	0 Ha	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase pertumbuhan kelompok tani**				**50,20 %**	**50,20 %**	**800.000.000,00**	**252.785.000,00**	**241.345.000,00**	**10.000.000,00**							**810.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Ratio ketersediaan penyuluh pertanian dengan pelaku utama*				70,55 %	70,55 %	800.000.000,00	252.785.000,00	241.345.000,00	-558.655.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Gapoktan, Poktan, /petani/PPL Swdaya/PPL		810.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				55 Unit	55 Unit	200.000.000,00	192.040.000,00	185.700.000,00	-14.300.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				25 Unit	25 Unit	150.000.000,00	52.100.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				7 Unit	7 Unit	150.000.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	-147.930.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				3 Unit	3 Unit	150.000.000,00	4.475.000,00	3.575.000,00	-146.425.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Wakalambe Kab. Buton, Lasalimu, Lawele Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Ambuau Indah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani																		
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk				7 Unit	0 Unit	100.000.000,00	2.100.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENGUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	J U M L A H								**23.003.578.688,00**	**7.277.667.783,00**	**6.873.999.389,00**	**-16.129.579.299,00**							**25.515.000.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERDAGANGAN KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERDAGANGAN							**7.392.378.269,00**	**2.505.397.437,00**	**2.033.599.977,00**	**-5.358.778.292,00**							**10.348.306.856,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**7.392.378.269,00**	**2.505.397.437,00**	**2.033.599.977,00**	**-5.358.778.292,00**							**10.348.306.856,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**7.392.378.269,00**	**2.505.397.437,00**	**2.033.599.977,00**	**-5.358.778.292,00**							**10.348.306.856,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.928.110.775,00**	**2.246.125.874,00**	**1.079.031.383,00**	**278.661.078,00**							**2.206.771.853,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	28.400.000,00	8.800.000,00	7.991.000,00	-20.409.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pedagangan		28.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**7.392.378.269,00**	**2.505.397.437,00**	**2.033.599.977,00**	**-5.358.778.292,00**							**10.348.306.856,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.392.378.269,00**	**2.505.397.437,00**	**2.033.599.977,00**	**-5.358.778.292,00**							**10.348.306.856,00**	
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**7.392.378.269,00**	**2.505.397.437,00**	**2.033.599.977,00**	**-5.358.778.292,00**							**10.348.306.856,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**7.392.378.269,00**	**2.505.397.437,00**	**2.033.599.977,00**	**-5.358.778.292,00**							**10.348.306.856,00**	
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	2.791.000,00	-809.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0 Laporan	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	5.200.000,00	0,00	0,00	-5.200.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*presentase ketepatan waktu menyelesaikan laporan keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	1.202.373.925,00	1.932.665.814,00	946.220.383,00	-256.153.542,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Perdagangan		1.205.885.003,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.153.298.725,00	1.908.367.216,00	921.915.583,00	-231.383.142,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.154.109.803,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	38.775.200,00	24.298.598,00	24.304.800,00	-14.470.400,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			38.775.200,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0 Laporan	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	0 Laporan	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*presentase penyusunan dokumen administrasi barang milik perangkat daerah*				100 %	100 %	4.153.200,00	5.468.860,00	1.216.000,00	-2.937.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pedagangan		6.153.200,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.153.200,00	5.468.860,00	1.216.000,00	-2.937.200,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.153.200,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	20.400.000,00	0,00	0,00	-20.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pedagangan		20.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	5.200.000,00	0,00	0,00	-5.200.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				2 Laporan	0 Laporan	6.400.000,00	0,00	0,00	-6.400.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**7.392.378.269,00**	**2.505.397.437,00**	**2.033.599.977,00**	**-5.358.778.292,00**							**10.348.306.856,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.392.378.269,00**	**2.505.397.437,00**	**2.033.599.977,00**	**-5.358.778.292,00**							**10.348.306.856,00**	
	3.30.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**7.392.378.269,00**	**2.505.397.437,00**	**2.033.599.977,00**	**-5.358.778.292,00**							**10.348.306.856,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**7.392.378.269,00**	**2.505.397.437,00**	**2.033.599.977,00**	**-5.358.778.292,00**							**10.348.306.856,00**	
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	54.750.000,00	0,00	0,00	-54.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Pedagangan		9.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				44 Paket	0 Paket	9.750.000,00	0,00	0,00	-9.750.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	0 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	483.963.650,00	202.577.200,00	75.443.750,00	-408.519.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Perdagangan		483.963.650,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.800,00	-200,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.707.650,00	42.180.200,00	30.353.950,00	26.646.300,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.707.650,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	1.440.000,00	0,00	0,00	-1.440.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.440.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	0,00	153.897.000,00	43.590.000,00	43.590.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			467.516.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**7.392.378.269,00**	**2.505.397.437,00**	**2.033.599.977,00**	**-5.358.778.292,00**							**10.348.306.856,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.392.378.269,00**	**2.505.397.437,00**	**2.033.599.977,00**	**-5.358.778.292,00**							**10.348.306.856,00**	
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**7.392.378.269,00**	**2.505.397.437,00**	**2.033.599.977,00**	**-5.358.778.292,00**							**10.348.306.856,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**7.392.378.269,00**	**2.505.397.437,00**	**2.033.599.977,00**	**-5.358.778.292,00**							**10.348.306.856,00**	
	3.30.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase penusunan dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	52.550.000,00	400.000,00	0,00	-52.550.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Perdagangan		376.700.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			350.150.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	26.550.000,00	0,00	0,00	-26.550.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.550.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	26.000.000,00	400.000,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	15.400.000,00	44.094.000,00	16.050.000,00	650.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Perdagangan		15.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25 Laporan	25 Laporan	1.000.000,00	2.094.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	8.400.000,00	36.000.000,00	10.050.000,00	1.650.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	66.120.000,00	52.120.000,00	32.110.250,00	-34.009.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Perdagangan		60.120.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	40.120.000,00	40.120.000,00	30.110.250,00	-10.009.750,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			40.120.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase rekomendasi dan perizinan yang diterbitkan**				**11,53 %**	**11,53 %**	**190.811.078,00**	**18.730.078,00**	**6.025.850,00**	**19.081.107,00**							**209.892.185,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Persentase penyusunan dokumen Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan*				100 %	100 %	135.811.078,00	13.228.078,00	5.055.850,00	-130.755.228,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Pelaku Usaha		144.892.185,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	135.811.078,00	13.228.078,00	5.055.850,00	-130.755.228,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			144.892.185,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Presentase Penyusunan Dokumen Tanda Daftar Gudang*				100 %	100 %	55.000.000,00	5.502.000,00	970.000,00	-54.030.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Pelaku Usaha		65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	5.502.000,00	970.000,00	-54.030.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar**				**100 %**	**100 %**	**4.904.658.925,00**	**60.711.773,00**	**825.493.343,00**	**2.632.781.652,00**							**7.537.440.577,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar*				100 %	100 %	4.449.658.925,00	10.638.925,00	788.169.743,00	-3.661.489.182,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Pelaku Usaha dan Masyarakat		6.582.440.577,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	4.304.658.925,00	7.341.925,00	788.169.743,00	-3.516.489.182,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.337.440.577,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	145.000.000,00	3.297.000,00	0,00	-145.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			245.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Persentase PKL yang tertata*				100 %	100 %	455.000.000,00	50.072.848,00	37.323.600,00	-417.676.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Pelaku Usaha dan Masyarakat		955.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	356.000.000,00	43.169.848,00	37.323.600,00	-318.676.400,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			656.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	99.000.000,00	6.903.000,00	0,00	-99.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			299.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase pemantauan kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan barang pokok penting**				**100 %**	**100 %**	**140.127.440,00**	**170.585.480,00**	**123.049.401,00**	**2.543.245,00**							**142.670.685,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentasi Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota*				100 %	100 %	119.082.441,00	50.723.881,00	37.347.401,00	-81.735.040,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Pelaku Usaha dan Masyarakat		131.470.685,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				7 Laporan	7 Laporan	108.982.441,00	36.194.881,00	32.100.401,00	-76.882.040,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			118.870.685,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				7 Laporan	7 Laporan	10.100.000,00	14.529.000,00	5.247.000,00	-4.853.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			12.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*persentase penyusunan dokumen Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota*				100 %	100 %	21.044.999,00	119.861.599,00	85.702.000,00	64.657.001,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat dan Pelaku Usaha		11.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				7 Laporan	7 Laporan	3.600.000,00	10.395.000,00	4.395.000,00	795.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				7 Laporan	7 Laporan	3.600.000,00	9.357.700,00	4.182.000,00	582.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				7 Laporan	7 Laporan	13.844.999,00	100.108.899,00	77.125.000,00	63.280.001,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**				**0 12,11 % %**	**0 12,11 % %**	**107.647.232,00**	**9.244.232,00**	**0,00**	**10.759.223,00**							**118.406.455,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*cakupan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan*				100 %	100 %	107.647.232,00	9.244.232,00	0,00	-107.647.232,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Pelaku Usaha dan Perusahaan		118.406.455,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				7 Unit	7 Unit	67.647.232,00	4.888.232,00	0,00	-67.647.232,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			76.406.455,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				7 Orang	7 Orang	30.000.000,00	1.206.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal																		
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				7 Unit	7 Unit	10.000.000,00	3.150.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			12.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk**				**0 %**	**0 %**	**121.022.819,00**	**0,00**	**0,00**	**12.102.282,00**							**133.125.101,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Persentase Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*				100 %	100 %	121.022.819,00	0,00	0,00	-121.022.819,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	UMKM		133.125.101,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				25 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			55.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				30 UMKM	0 UMKM	71.022.819,00	0,00	0,00	-71.022.819,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			78.125.101,00	DINAS PERDAGANGAN
	J U M L A H								**7.392.378.269,00**	**2.505.397.437,00**	**2.033.599.977,00**	**-5.358.778.292,00**							**10.348.306.856,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERINDUSTRIAN							**2.498.585.502,00**	**2.445.708.892,00**	**2.310.282.909,00**	**-188.302.593,00**							**2.722.444.051,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**2.498.585.502,00**	**2.445.708.892,00**	**2.310.282.909,00**	**-188.302.593,00**							**2.722.444.051,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**2.498.585.502,00**	**2.445.708.892,00**	**2.310.282.909,00**	**-188.302.593,00**							**2.722.444.051,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.149.915.639,00**	**2.104.122.704,00**	**2.198.836.721,00**	**188.991.564,00**							**2.338.907.203,00**	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	42.500.000,00	32.020.000,00	13.058.650,00	-29.441.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Perindustrian		49.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	5.500.000,00	8.130.000,00	853.950,00	-4.646.050,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				20 Dokumen	10 Dokumen	6.500.000,00	4.093.000,00	425.000,00	-6.075.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			6.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				20 Dokumen	6 Dokumen	6.500.000,00	4.093.000,00	168.700,00	-6.331.300,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	6.500.000,00	4.093.000,00	4.093.000,00	-2.407.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				20 Dokumen	0 Dokumen	6.500.000,00	4.093.000,00	0,00	-6.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	5.500.000,00	3.759.000,00	3.759.000,00	-1.741.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	5.500.000,00	3.759.000,00	3.759.000,00	-1.741.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.504.915.639,00	1.884.395.104,00	2.092.234.671,00	587.319.032,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Perindustrian		1.704.407.203,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.447.915.639,00	1.849.037.104,00	2.064.394.671,00	616.479.032,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.647.407.203,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	46.000.000,00	27.840.000,00	27.840.000,00	-18.160.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			46.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	3.759.000,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	0 Laporan	5.500.000,00	3.759.000,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	44.000.000,00	0,00	0,00	-44.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Perindustrian		48.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				44 Paket	0 Paket	44.000.000,00	0,00	0,00	-44.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			48.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	251.000.000,00	125.100.100,00	48.031.900,00	-202.968.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Perindustrian		264.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	0 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala Kab. Buton, Kapontori, Tumada Kab. Buton, Wabula, Wabula Kab. Buton, Wabula, Koholimembona	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3	**NON URUSAN**							**2.498.585.502,00**	**2.445.708.892,00**	**2.310.282.909,00**	**-188.302.593,00**							**2.722.444.051,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.498.585.502,00**	**2.445.708.892,00**	**2.310.282.909,00**	**-188.302.593,00**							**2.722.444.051,00**	
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**2.498.585.502,00**	**2.445.708.892,00**	**2.310.282.909,00**	**-188.302.593,00**							**2.722.444.051,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**2.498.585.502,00**	**2.445.708.892,00**	**2.310.282.909,00**	**-188.302.593,00**							**2.722.444.051,00**	
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	13.533.000,00	10.152.000,00	-14.848.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			27.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	2.252.100,00	1.104.900,00	-4.895.100,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	190.000.000,00	109.315.000,00	36.775.000,00	-153.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Perindustrian		92.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	53.500.000,00	15.900.000,00	8.039.000,00	-45.461.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Perindustrian		54.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	250 Laporan	3.500.000,00	3.100.000,00	2.379.000,00	-1.121.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	12.800.000,00	5.660.000,00	-34.340.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala Kab. Buton, Wabula, Wabula Kab. Buton, Wabula, Koholimembona	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	114.000.000,00	46.707.500,00	37.472.500,00	-76.527.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Perindustrian		127.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	46.707.500,00	37.472.500,00	-22.527.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	0 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Wabula, Koholimembona	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				33 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			17.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	0 Unit	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				22 Unit	0 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Wabula, Koholimembona	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK Persentase jumlah industri yang mengolah sumber daya daerah**				**-**	**0 75 % %**	**235.187.784,00**	**278.704.688,00**	**85.314.688,00**	**23.518.778,00**							**258.706.562,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah Pertumbuahan industri yang mengolah sumber daya daerah*				-	75 %	235.187.784,00	278.704.688,00	85.314.688,00	-149.873.096,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Pelaku Industri Kecil Menengah		258.706.562,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				6 Dokumen	6 Dokumen	95.187.784,00	52.370.000,00	31.330.000,00	-63.857.784,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			103.706.562,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	120.000.000,00	5.400.000,00	-29.600.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	106.334.688,00	48.584.688,00	-36.415.312,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Prosentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait**				**100 %**	**100 %**	**44.851.517,00**	**16.800.000,00**	**4.800.000,00**	**4.485.151,00**							**49.336.668,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluaran oleh instansi terkait*				100 %	100 %	44.851.517,00	16.800.000,00	4.800.000,00	-40.051.517,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Pelaku Industri Kecil Menengah		49.336.668,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	8.400.000,00	1.200.000,00	-13.800.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			19.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	29.851.517,00	8.400.000,00	3.600.000,00	-26.251.517,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			30.336.668,00	DINAS PERINDUSTRIAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Prosentase Industri Kecil Menengah yang masuk dalam SIINas**				**1 %**	**1 %**	**68.630.562,00**	**46.081.500,00**	**21.331.500,00**	**6.863.056,00**							**75.493.618,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase IKM masuk dalam SIINas* *Prosentase Industri Kecil Menengah yang masuk dalam SIINas*				1 %	1 %	68.630.562,00	46.081.500,00	21.331.500,00	-47.299.062,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Pelaku Industri Kecil Menengah		75.493.618,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	26.400.000,00	9.600.000,00	-15.400.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			27.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	18.630.562,00	9.150.000,00	1.200.000,00	-17.430.562,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			20.493.618,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	10.531.500,00	10.531.500,00	-14.468.500,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			28.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	J U M L A H								**2.498.585.502,00**	**2.445.708.892,00**	**2.310.282.909,00**	**-188.302.593,00**							**2.722.444.051,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS TRANSMIGRASI KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TRANSMIGRASI							**1.814.688.797,00**	**1.343.142.243,00**	**1.105.236.579,00**	**-709.452.218,00**							**1.996.157.676,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.814.688.797,00**	**1.343.142.243,00**	**1.105.236.579,00**	**-709.452.218,00**							**1.996.157.676,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**1.814.688.797,00**	**1.343.142.243,00**	**1.105.236.579,00**	**-709.452.218,00**							**1.996.157.676,00**	
1.	**3.32.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**1.530.126.596,00**	**1.277.642.243,00**	**1.070.466.579,00**	**95.000.000,00**							**1.625.126.596,00**	
	3.32.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	26.500.000,00	17.082.000,00	7.782.000,00	-18.718.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Transmigrasi Kab. Buton		26.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	4.000.000,00	3.620.000,00	1.685.000,00	-2.315.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	3.860.000,00	390.000,00	-4.610.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			5.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	3.835.000,00	615.000,00	-4.385.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			5.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	4.000.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	-2.420.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			4.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	4.000.000,00	1.430.000,00	755.000,00	-3.245.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00	-1.743.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.*				100 %	100 %	1.132.826.596,00	1.050.731.743,00	968.305.579,00	-164.521.017,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Transmigrasi Kab. Buton		1.132.826.596,00	DINAS TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.32.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.114.826.596,00	1.039.798.743,00	966.470.579,00	-148.356.017,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.114.826.596,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	8.000.000,00	6.680.000,00	865.000,00	-7.135.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	8.000.000,00	2.253.000,00	970.000,00	-7.030.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi barang Milik Daerah pada perangkat daerah* *Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 % 100 persen	100 % 100 persen	1.500.000,00	879.000,00	0,00	-1.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Transmigrasi Kab. Buton		1.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0 Laporan	1.500.000,00	879.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	35.000.000,00	4.273.500,00	0,00	-35.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Dinas Transmigrasi Kab. Buton		60.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	0 Paket	10.000.000,00	4.273.500,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			10.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	0 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum perangkat daerah*				100 %	100 %	183.000.000,00	144.120.000,00	46.270.000,00	-136.730.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Transmigrasi Kab. Buton		203.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	0 Paket	1.500.000,00	1.050.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	9 Laporan	180.000.000,00	143.070.000,00	46.270.000,00	-133.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Transmigrasi Kab. Buton		50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	36.300.000,00	22.656.000,00	21.459.000,00	-14.841.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Transmigrasi Kab. Buton		36.300.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			900.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	5.232.000,00	4.035.000,00	1.035.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	32.400.000,00	16.524.000,00	16.524.000,00	-15.876.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			32.400.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	75.000.000,00	37.900.000,00	26.650.000,00	-48.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dinas Transmigrasi Kab. Buton		115.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	45.000.000,00	37.900.000,00	26.650.000,00	-18.350.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			85.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			25.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
2.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya dan pengurusan legal aspek pertanahannya**				**1 Kawasan**	**1 Kawasan**	**115.000.000,00**	**39.440.000,00**	**19.440.000,00**	**30.000.000,00**							**145.000.000,00**	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*cakupan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi Cakupan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi*				100 % 100 persen	100 % 100 persen	115.000.000,00	39.440.000,00	19.440.000,00	-95.560.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Kawasan Transmigrasi Lasalimu		145.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	39.440.000,00	19.440.000,00	4.440.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			15.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.02.2.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi																		
			Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi				500 Hektar	0 Hektar	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi																		
			Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			80.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
3.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah Satuan pemukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya**				**1 SP**	**1 SP**	**120.000.000,00**	**26.060.000,00**	**12.930.000,00**	**0,00**							**120.000.000,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota*				100 %	100 %	120.000.000,00	26.060.000,00	12.930.000,00	-107.070.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Kawasan Transmigrasi Lasalimu		120.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	26.060.000,00	12.930.000,00	-17.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Rejo Sari Kab. Buton, Wolowa, Bungi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			30.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				2 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Bungi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			40.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				25 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Rejo Sari Kab. Buton, Wolowa, Bungi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			25.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				20 Orang	0 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			25.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
4.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase pembinaan yang dilaksanakan pada satuan pemukiman transmigrasi**				**100 %**	**100 %**	**49.562.201,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**56.468.879,00**							**106.031.080,00**	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*Cakupan pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian*				100 %	100 %	49.562.201,00	0,00	2.400.000,00	-47.162.201,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas	Kawasan Transmigrasi Lasalimu		106.031.080,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				20 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	19.562.201,00	0,00	0,00	-19.562.201,00	Kab. Buton, Lasalimu, Wasambaa Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Rejo Sari Kab. Buton, Wolowa, Suka Maju	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			50.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	30.000.000,00	0,00	2.400.000,00	-27.600.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah dalam rangka konektivitas			56.031.080,00	DINAS TRANSMIGRASI
	J U M L A H								**1.814.688.797,00**	**1.343.142.243,00**	**1.105.236.579,00**	**-709.452.218,00**							**1.996.157.676,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DAERAH							**71.549.792.788,00**	**31.814.403.030,00**	**25.523.846.213,00**	**-46.025.946.575,00**							**70.998.792.788,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**71.549.792.788,00**	**31.814.403.030,00**	**25.523.846.213,00**	**-46.025.946.575,00**							**70.998.792.788,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**71.549.792.788,00**	**31.814.403.030,00**	**25.523.846.213,00**	**-46.025.946.575,00**							**70.998.792.788,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan penataan organsisasi yang tepat fungsi dan ukuran sesuai peraturan yang berlaku**				**100 90 % %**	**100 90 % %**	**64.849.792.788,00**	**25.143.965.780,00**	**20.435.217.013,00**	**-551.000.000,00**							**64.298.792.788,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Presentase Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA Presentase Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Presentase Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA Presentase Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Presentase Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	474.500.000,00	399.398.500,00	147.398.900,00	-327.101.100,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kecamatan, Keluarahan dan Desa		473.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	1 Dokumen	0,00	57.316.000,00	28.829.300,00	28.829.300,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			64.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	54.000.000,00	49.691.250,00	9.615.350,00	-44.384.650,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			54.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	46.000.000,00	48.067.350,00	9.608.600,00	-36.391.400,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			46.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen	0 Dokumen	53.500.000,00	46.419.900,00	9.356.700,00	-44.143.300,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			53.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Dokumen	0 Dokumen	55.000.000,00	42.299.000,00	9.084.700,00	-45.915.300,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	51.000.000,00	39.640.000,00	22.780.000,00	-28.220.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			51.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	115.965.000,00	58.124.250,00	-91.875.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* *Persentase Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan* *Persentase Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir* *Persentase Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran* *Presentase Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	12.746.340.281,00	8.732.810.560,00	8.869.879.943,00	-3.876.460.338,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kecamatan, Keluarahan dan Desa		12.196.340.281,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	11.200.340.281,00	7.939.335.260,00	8.238.358.843,00	-2.961.981.438,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			11.200.340.281,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	850.000.000,00	629.521.000,00	560.111.000,00	-289.889.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	108.254.250,00	26.749.250,00	-73.250.750,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	46.000.000,00	55.700.050,00	44.660.850,00	-1.339.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			46.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada*				100 Persen	100 Persen	640.000.000,00	141.073.300,00	84.920.150,00	-555.079.850,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kecamatan, Keluarahan dan Desa		640.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 laporan Laporan	4 laporan Laporan	640.000.000,00	141.073.300,00	84.920.150,00	-555.079.850,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			640.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* *Persentase Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* *Persentase Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* *Persentase Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* *Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* *Persentase Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*				100 Persen	100 Persen	1.371.000.000,00	432.190.100,00	251.442.500,00	-1.119.557.500,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kecamatan, Keluarahan dan Desa		1.371.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Dokumen Unit	1 Dokumen Unit	50.000.000,00	40.395.200,00	17.909.500,00	-32.090.500,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	457.000.000,00	143.250.000,00	8.550.000,00	-448.450.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			457.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	145.270.900,00	74.599.000,00	-175.401.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	205.000.000,00	534.000,00	85.620.000,00	-119.380.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2 kegiatan Orang	2 kegiatan Orang	255.000.000,00	102.140.000,00	64.764.000,00	-190.236.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			255.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Kegiatan Orang	0 Orang	154.000.000,00	600.000,00	0,00	-154.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			154.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* *Persentase Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Persentase Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Persentase Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Persentase Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* *Persentase Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Persentase Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Persentase Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Persentase Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				100 Persen	100 Persen	21.207.000.000,00	4.144.484.000,00	2.550.603.000,00	-18.656.397.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kecamatan, Keluarahan dan Desa		21.207.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	93.000.000,00	14.948.000,00	14.948.000,00	-78.052.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			93.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.370.000.000,00	520.774.000,00	73.400.000,00	-2.296.600.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.370.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.844.000.000,00	57.932.000,00	37.432.000,00	-7.806.568.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.844.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	270.924.000,00	270.924.000,00	170.924.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	600.000.000,00	149.510.000,00	52.128.000,00	-547.872.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen	200.000.000,00	120.000.000,00	103.680.000,00	-96.320.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	-159.200.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000.000,00	916.442.000,00	825.658.000,00	-3.674.342.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.300.000.000,00	2.053.154.000,00	1.131.633.000,00	-4.168.367.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* *Persentase Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* *Persentase Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* *Persentase Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				100 Persen	100 Persen	12.034.620.000,00	2.919.820.400,00	2.291.006.000,00	-9.743.614.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kecamatan, Keluarahan dan Desa		12.034.620.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	7.726.000.000,00	2.222.970.000,00	2.222.970.000,00	-5.503.030.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.726.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket Unit	1 Paket Unit	2.400.000.000,00	90.048.000,00	68.000.000,00	-2.332.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Paket Unit	1 Paket Unit	1.500.000.000,00	31.000,00	31.000,00	-1.499.969.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	4.620.000,00	5.000,00	5.000,00	-4.615.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.620.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 paket Unit	0 Unit	400.000.000,00	423.174.400,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	4.000.000,00	183.592.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Persentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* *Persentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Persentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				100 Persen	100 Persen	6.973.000.000,00	3.887.839.578,00	2.484.833.778,00	-4.488.166.222,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kecamatan, Keluarahan dan Desa		6.973.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	145.655.600,00	93.897.600,00	-106.102.400,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	2.350.000.000,00	1.322.357.996,00	949.817.996,00	-1.400.182.004,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Kegiatan Laporan	6 Kegiatan Laporan	1.000.000.000,00	297.900.982,00	307.900.982,00	-692.099.018,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	3.423.000.000,00	2.121.925.000,00	1.133.217.200,00	-2.289.782.800,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.423.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* *Persentase Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Presentase Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* *Presentase Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* *Presentase Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Presentase Jumlah Mebel yang Dipelihara* *Presentase Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* *Presentase Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	4.918.072.507,00	1.556.966.485,00	1.474.056.985,00	-3.444.015.522,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kecamatan, Keluarahan dan Desa		4.918.072.507,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	287.000.000,00	166.575.000,00	146.757.000,00	-140.243.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			287.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	3.450.000.000,00	1.333.591.485,00	1.070.499.985,00	-2.379.500.015,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Paket Unit	1 Paket Unit	100.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	131.072.507,00	23.500.000,00	23.500.000,00	-107.572.507,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			131.072.507,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Paket Unit	1 Paket Unit	450.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-447.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket Unit	1 Paket Unit	200.000.000,00	100.000,00	100.000,00	-199.900.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket Unit	1 Paket Unit	200.000.000,00	100.000,00	200.100.000,00	100.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket Unit	1 Paket Unit	100.000.000,00	100.000,00	100.000,00	-99.900.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Jumlah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.502.260.000,00	645.367.057,00	630.367.057,00	-871.892.943,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kecamatan, Keluarahan dan Desa		1.502.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Bulan Orang/Bulan	12 Bulan Orang/Bulan	602.260.000,00	213.367.057,00	213.367.057,00	-388.892.943,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			602.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Kegiatan Paket	1 Kegiatan Paket	200.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00	-83.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	0 Orang	300.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang 12 Bulan Orang/Bulan	2 Orang 12 Bulan Orang/Bulan	400.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase Jumlah Makanan dan minuman yang disediakan kepada KDH Persentase Jumlah Makanan dan minuman yang disediakan kepada Sekretariat Daerah Persentase Jumlah Makanan dan minuman yang disediakan kepada WKDH*				100 Persen	100 Persen	1.383.000.000,00	883.460.000,00	883.460.000,00	-499.540.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kecamatan, Keluarahan dan Desa		1.383.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	552.800.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-152.800.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			552.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	405.200.000,00	382.000.000,00	382.000.000,00	-23.200.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			405.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	425.000.000,00	101.460.000,00	101.460.000,00	-323.540.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			425.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase Jumlah Dokumen Anjab* *Persentase Jumlah Laporan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik* *Persentase Laporan Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik*				100 Persen	100 Persen	750.000.000,00	520.885.800,00	279.353.700,00	-470.646.300,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kecamatan, Keluarahan dan Desa		750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	250.000.000,00	170.121.000,00	89.965.000,00	-160.035.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	250.000.000,00	165.549.800,00	96.503.850,00	-153.496.150,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	250.000.000,00	185.215.000,00	92.884.850,00	-157.115.150,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan* *Persentase Jumlah Pelaksanaan rapat koordinasi unsur Muspida lingkup Kab. Buton* *Persentase Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan*				100 Persen	100 Persen	850.000.000,00	879.670.000,00	487.895.000,00	-362.105.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kecamatan, Keluarahan dan Desa		850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	350.000.000,00	343.289.000,00	182.469.000,00	-167.531.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	250.000.000,00	257.493.000,00	152.233.000,00	-97.767.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	250.000.000,00	278.888.000,00	153.193.000,00	-96.807.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**4.350.000.000,00**	**5.087.826.300,00**	**4.205.443.600,00**	**0,00**							**4.350.000.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase Jumlah Laporan SPM* *Persentase Jumlah Pengelolaan Administrasi Kewilayahan* *Persentase Terlakasaannya Penataan Administrasi Pemerintahan*				100 %	100 %	700.000.000,00	705.275.000,00	476.671.600,00	-223.328.400,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kecamatan, Keluarahan dan Desa		700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	200.000.000,00	222.333.300,00	117.937.600,00	-82.062.400,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	300.000.000,00	297.746.900,00	243.348.500,00	-56.651.500,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	200.000.000,00	185.194.800,00	115.385.500,00	-84.614.500,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase Jumlah Bantuan Beasiswa (Siswa Berpretasi) Jumlah Kecamatan yang dimonitorin dan diEvaluasi Persentase Jumlah Fasilisitasi Keagaamaan Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Jemaah Haji Jumlah Fasilitas Peribadatan Persentase Jumlak kecamatan yang dimonitoring dan evaluasi Untuk Pelaksanaan Raskin*				100 Persen	100 Persen	2.800.000.000,00	3.600.980.000,00	3.190.403.000,00	390.403.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kecamatan, Keluarahan dan Desa		2.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	800.000.000,00	2.024.300.000,00	1.559.986.000,00	759.986.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1.000.000.000,00	1.009.119.000,00	1.213.069.000,00	213.069.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1.000.000.000,00	567.561.000,00	417.348.000,00	-582.652.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase Jumlah Dokumen Prolegda Jumlah Penyusunan Ranperda dan Ranperbub Jumlah Produk Hukum Daerah yang di evaluasi Persentase Jumlah Jumlah Dokumen Peraturan perundang-undangan yang di publikasiK &e Jumlah Kegiatan Persentase Jumlah Pelayanan Hukum dan Penegakkan Aturan Hukum Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah Jumlah Penyusunan Rencana Aksi Nasional HAM*				100 Persen	100 Persen	750.000.000,00	672.626.300,00	485.272.600,00	-264.727.400,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kecamatan, Keluarahan dan Desa		750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				26 Dokumen Dokumen	26 Dokumen Dokumen	250.000.000,00	195.906.000,00	139.807.250,00	-110.192.750,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus Kasus	3 Kasus Kasus	250.000.000,00	341.749.300,00	247.923.150,00	-2.076.850,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen	250.000.000,00	134.971.000,00	97.542.200,00	-152.457.800,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase Terlaksananya Kerja Sama Daerah*				100 %	100 %	100.000.000,00	108.945.000,00	53.096.400,00	-46.903.600,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kecamatan, Keluarahan dan Desa		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	100.000.000,00	108.945.000,00	53.096.400,00	-46.903.600,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Cakupan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan administrasi pembangunan daerah Cakupan pengelolaan kebijakan administrasi perekonomian**				**85 88 % %**	**85 88 % %**	**2.350.000.000,00**	**1.582.610.950,00**	**883.185.600,00**	**0,00**							**2.350.000.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*persentase jumlah Fasilisitasi Kegiatan TIPD Jumlah Wilayah Pemantauan Harga BBM, AMPS / Agen Persentase terlaksananya penyebaran informasi komoditas unggulan melalui pameran komoditas Persentase Terlaksannya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*				100 %	100 %	750.000.000,00	634.304.550,00	362.806.350,00	-387.193.650,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kecamatan, Keluarahan dan Desa		750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	200.000.000,00	125.775.000,00	83.401.250,00	-116.598.750,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				3 Dokumen Dokumen	3 Dokumen Dokumen	350.000.000,00	438.039.800,00	233.851.000,00	-116.149.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	200.000.000,00	70.489.750,00	45.554.100,00	-154.445.900,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase Jumlah Dokumen Laporan Semesteran Pengadaan Barang dan Jasa Setda Persentase Jumlah fasilisitasi Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah (TP,DAK, DID) Persentase Jumlah kecamatan yang dimonitoring kegiatan pembangunan*				100 %	100 %	750.000.000,00	406.643.650,00	195.848.000,00	-554.152.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kecamatan, Keluarahan dan Desa		750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	250.000.000,00	123.873.700,00	57.177.000,00	-192.823.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	250.000.000,00	153.259.950,00	87.350.000,00	-162.650.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	250.000.000,00	129.510.000,00	51.321.000,00	-198.679.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentae Jumlah Laporan Pembinaan dan Advokasi PBJ Persentase Jumlah Pengelolaan Layananan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Persentase Jumlah Proses Lelang/Tender PBJ Kab.Buton*				100 %	100 %	750.000.000,00	476.762.800,00	277.886.300,00	-472.113.700,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kecamatan, Keluarahan dan Desa		750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	250.000.000,00	188.613.000,00	115.609.000,00	-134.391.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	250.000.000,00	144.950.000,00	88.715.200,00	-161.284.800,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				10 Orang	10 Orang	250.000.000,00	143.199.800,00	73.562.100,00	-176.437.900,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Persentase Jumlah sumber daya alam yang dikembangkan*				100 %	100 %	100.000.000,00	64.899.950,00	46.644.950,00	-53.355.050,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kecamatan, Keluarahan dan Desa		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				7 Dokumen Dokumen	7 Dokumen Dokumen	100.000.000,00	64.899.950,00	46.644.950,00	-53.355.050,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H								**71.549.792.788,00**	**31.814.403.030,00**	**25.523.846.213,00**	**-46.025.946.575,00**							**70.998.792.788,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DPRD							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**17.535.150.500,00**	**16.777.862.951,00**	**15.940.868.577,00**	**1.809.710.000,00**							**19.344.860.500,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	52.631.000,00	53.179.000,00	53.179.000,00	548.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Sekretariat DPRD		57.895.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	10.040.000,00	10.040.000,00	10.040.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.916.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	5.312.000,00	5.312.000,00	5.312.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.980.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	5.318.000,00	5.318.000,00	5.318.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.395.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	7.425.000,00	7.425.000,00	7.425.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.168.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	6.452.000,00	6.452.000,00	6.452.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.097.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	5.148.000,00	5.148.000,00	5.148.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.663.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	0,00	13.484.000,00	13.484.000,00	13.484.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			14.676.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	2.423.592.000,00	1.806.128.311,00	1.745.669.847,00	-677.922.153,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Sekretariat DPRD		2.572.955.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	0,00	1.726.488.311,00	1.666.029.847,00	1.666.029.847,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.464.423.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	51.480.000,00	51.480.000,00	51.480.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			92.909.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	14.036.000,00	14.036.000,00	14.036.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.647.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	14.124.000,00	14.124.000,00	14.124.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.976.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	337.126.000,00	233.250.000,00	165.100.000,00	-172.026.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Sekretariat DPRD		444.223.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			63.888.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	0 Orang	0,00	12.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			82.335.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			78.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	0,00	178.000.000,00	122.100.000,00	122.100.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	664.608.000,00	938.979.570,00	640.639.570,00	-23.968.430,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Sekretariat DPRD		778.076.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	30.560.500,00	30.560.500,00	30.560.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			29.348.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	0,00	60.599.070,00	60.599.070,00	60.599.070,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			53.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	74.200.000,00	74.200.000,00	74.200.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.620.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	64.050.000,00	64.050.000,00	64.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			40.262.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	16.880.000,00	16.880.000,00	16.880.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			53.761.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	89.200.000,00	89.200.000,00	89.200.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.620.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				144 Laporan	144 Laporan	0,00	600.490.000,00	302.150.000,00	302.150.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			521.605.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.620.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	175.632.000,00	838.973.000,00	619.515.000,00	443.883.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Sekretariat DPRD		193.195.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			73.205.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	0,00	538.973.000,00	319.515.000,00	319.515.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			119.990.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.131.223.500,00	1.051.692.000,00	1.051.692.000,00	-79.531.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Sekretariat DPRD		1.273.145.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	396.000.000,00	396.000.000,00	396.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			648.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	314.600.000,00	314.600.000,00	314.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			346.060.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	0,00	25.660.000,00	25.660.000,00	25.660.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			27.085.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	315.432.000,00	315.432.000,00	315.432.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			252.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	698.738.000,00	1.153.827.790,00	1.151.195.080,00	452.457.080,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Sekretariat DPRD		768.611.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	23 Unit	0,00	418.974.660,00	418.974.660,00	418.974.660,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			548.996.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	0 Unit	0,00	12.165.000,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.620.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	37 Unit	0,00	19.700.000,00	31.520.000,00	31.520.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			33.275.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	702.988.130,00	700.700.420,00	700.700.420,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			133.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.620.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				100 %	100 %	12.051.600.000,00	10.701.833.280,00	10.513.878.080,00	-1.537.721.920,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	DPRD		13.256.760.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				27 Orang/Bulan	27 Orang/Bulan	0,00	10.019.833.280,00	10.206.878.080,00	10.206.878.080,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			12.777.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				125 Paket	125 Paket	0,00	682.000.000,00	307.000.000,00	307.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			412.610.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				27 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			66.550.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	
1.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Presentase layanan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD**				**100 %**	**100 %**	**13.482.006.891,00**	**11.805.253.200,00**	**8.988.885.000,00**	**2.936.056.109,00**							**16.418.063.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Cakupan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*				100 %	100 %	720.054.500,00	376.992.000,00	376.992.000,00	-343.062.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	OPD Kabupaten Buton		1.080.080.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	517.460.000,00	219.442.000,00	219.442.000,00	-298.018.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			776.190.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	85.594.500,00	58.790.000,00	58.790.000,00	-26.804.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			128.390.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				10 Dokumen	10 Dokumen	58.500.000,00	49.380.000,00	49.380.000,00	-9.120.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			87.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				10 Dokumen	10 Dokumen	58.500.000,00	49.380.000,00	49.380.000,00	-9.120.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			87.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Cakupan Pembahasan Kebijakan Anggaran*				100 %	100 %	375.246.000,00	182.125.000,00	182.125.000,00	-193.121.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	OPD Kabupaten Buton		541.509.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				30 Dokumen	30 Dokumen	90.222.000,00	35.380.000,00	35.380.000,00	-54.842.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			135.334.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				30 Dokumen	30 Dokumen	52.257.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	-21.757.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			78.385.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				30 Dokumen	30 Dokumen	49.892.000,00	39.460.000,00	39.460.000,00	-10.432.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			74.836.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				30 Dokumen	30 Dokumen	68.905.000,00	19.330.000,00	19.330.000,00	-49.575.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			82.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				30 Dokumen	30 Dokumen	23.010.000,00	24.320.000,00	24.320.000,00	1.310.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			34.514.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				30 Dokumen	30 Dokumen	90.960.000,00	33.135.000,00	33.135.000,00	-57.825.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			136.440.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Cakupan Peningkatan Kapasitas DPRD*				100 %	100 %	1.068.268.000,00	522.444.000,00	473.660.000,00	-594.608.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Anggota DPRD dan Staf DPRD		1.422.402.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	67.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	-65.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			100.902.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	641.000.000,00	88.176.000,00	39.392.000,00	-601.608.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			961.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				10 Orang	10 Orang	240.000.000,00	264.000.000,00	264.000.000,00	24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			240.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	5 Orang	120.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Cakupan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyaraka*				100 %	100 %	2.707.026.000,00	1.284.087.000,00	1.060.932.000,00	-1.646.094.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat		4.017.657.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				40 Laporan	40 Laporan	840.395.000,00	223.987.000,00	114.087.000,00	-726.308.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.217.710.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				25 Dokumen	25 Dokumen	11.386.000,00	7.400.000,00	2.220.000,00	-9.166.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			17.080.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	1.855.245.000,00	1.052.700.000,00	944.625.000,00	-910.620.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.782.867.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Cakupan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD*				100 %	100 %	70.400.000,00	38.100.000,00	38.100.000,00	-32.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Anggota DPRD		105.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				5 Dokumen	5 Dokumen	35.200.000,00	19.050.000,00	19.050.000,00	-16.150.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			52.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				5 Laporan	5 Laporan	35.200.000,00	19.050.000,00	19.050.000,00	-16.150.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			52.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Cakupan Pembahasan Kerja Sama Daerah*				100 %	100 %	17.600.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	182.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kabupaten Buton		26.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																		
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	17.600.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	182.400.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Cakupan Fasilitasi Tugas DPRD*				100 %	100 %	8.523.412.391,00	9.201.505.200,00	6.657.076.000,00	-1.866.336.391,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Anggota DPRD		9.224.415.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				144 Dokumen	144 Dokumen	8.523.412.391,00	9.201.505.200,00	6.657.076.000,00	-1.866.336.391,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.224.415.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H								**31.017.157.391,00**	**28.583.116.151,00**	**24.929.753.577,00**	**-6.087.403.814,00**							**35.762.923.500,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**5.336.505.827,00**	**3.762.341.491,00**	**3.116.526.518,00**	**-2.219.979.309,00**							**5.850.003.313,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.336.505.827,00**	**3.762.341.491,00**	**3.116.526.518,00**	**-2.219.979.309,00**							**5.850.003.313,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**5.336.505.827,00**	**3.762.341.491,00**	**3.116.526.518,00**	**-2.219.979.309,00**							**5.850.003.313,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan pelayanan penunjangurusan pemerintahan daerah**				**100 100 % %**	**100 100 % %**	**3.213.437.243,00**	**2.402.059.709,00**	**2.251.368.432,00**	**301.190.627,00**							**3.514.627.870,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah*				100 %	100 %	47.244.148,00	39.117.900,00	34.077.676,00	-13.166.472,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Bappeda Kabupaten Buton		47.139.148,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	6.655.000,00	5.000.300,00	5.010.300,00	-1.644.700,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	5.324.000,00	4.840.000,00	4.420.000,00	-904.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.324.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	5.324.000,00	4.840.050,00	4.404.050,00	-919.950,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.324.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	5.324.000,00	5.098.450,00	4.593.000,00	-731.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.324.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	5.324.000,00	5.186.050,00	4.864.050,00	-459.950,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.324.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	5.324.000,00	4.000.000,00	3.567.776,00	-1.756.224,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.324.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	13.969.148,00	10.153.050,00	7.218.500,00	-6.750.648,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.969.148,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.108.375.703,00	1.920.835.143,00	1.929.014.634,00	-179.361.069,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Bappeda Kabupaten Buton		2.316.889.590,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.062.209.242,00	1.865.750.643,00	1.875.988.234,00	-186.221.008,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.268.430.167,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	18.150.000,00	44.400.000,00	42.640.000,00	24.490.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			19.965.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	0 Dokumen	11.136.840,00	0,00	0,00	-11.136.840,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			11.136.840,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	12.100.000,00	5.424.500,00	5.126.400,00	-6.973.600,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			12.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	4.779.621,00	5.260.000,00	5.260.000,00	480.379,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.257.583,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	25.047.000,00	9.208.993,00	8.489.993,00	-16.557.007,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Bappeda Kabupaten Buton		27.551.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.420.000,00	2.200.000,00	1.481.000,00	-939.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.993.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.993.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.527.000,00	2.808.993,00	2.808.993,00	-7.718.007,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			11.579.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.420.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	1.780.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	2.420.000,00	0,00	0,00	-2.420.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	91.665.970,00	69.496.800,00	27.681.800,00	-63.984.170,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Bappeda Kabupaten Buton		100.832.567,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	0 Unit	3.025.000,00	0,00	0,00	-3.025.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.327.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	0 Paket	30.250.000,00	21.000.000,00	0,00	-30.250.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			33.275.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	6.761.480,00	6.146.800,00	5.854.800,00	-906.680,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.437.628,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	0 Dokumen	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.993.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	0,00	12.150.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			12.869.439,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**5.336.505.827,00**	**3.762.341.491,00**	**3.116.526.518,00**	**-2.219.979.309,00**							**5.850.003.313,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.336.505.827,00**	**3.762.341.491,00**	**3.116.526.518,00**	**-2.219.979.309,00**							**5.850.003.313,00**	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.336.505.827,00**	**3.762.341.491,00**	**3.116.526.518,00**	**-2.219.979.309,00**							**5.850.003.313,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**5.336.505.827,00**	**3.762.341.491,00**	**3.116.526.518,00**	**-2.219.979.309,00**							**5.850.003.313,00**	
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	36.300.000,00	30.200.000,00	16.557.000,00	-19.743.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			39.930.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	521.908.090,00	199.808.600,00	94.339.950,00	-427.568.140,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Bappeda Kabupaten Buton		574.098.899,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	798.600,00	704.000,00	704.000,00	-94.600,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			878.460,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0 Paket	2.420.000,00	0,00	0,00	-2.420.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	0 Paket	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.993.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.324.000,00	4.487.650,00	900.000,00	-4.424.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.856.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	13.296.690,00	11.093.000,00	4.059.000,00	-9.237.690,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			14.626.359,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0 Laporan	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	484.000.000,00	177.889.950,00	83.042.950,00	-400.957.050,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			532.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.388.800,00	5.634.000,00	5.634.000,00	-754.800,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.027.680,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	121.000.000,00	10.504.000,00	0,00	-121.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Bappeda Kabupaten Buton		120.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	23.800.000,00	0,00	0,00	-23.800.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.930.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	48.400.000,00	0,00	0,00	-48.400.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			53.240.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket Unit	0 Unit	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	18.150.000,00	10.504.000,00	0,00	-18.150.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			19.965.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.310.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	**NON URUSAN**							**5.336.505.827,00**	**3.762.341.491,00**	**3.116.526.518,00**	**-2.219.979.309,00**							**5.850.003.313,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.336.505.827,00**	**3.762.341.491,00**	**3.116.526.518,00**	**-2.219.979.309,00**							**5.850.003.313,00**	
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.336.505.827,00**	**3.762.341.491,00**	**3.116.526.518,00**	**-2.219.979.309,00**							**5.850.003.313,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**5.336.505.827,00**	**3.762.341.491,00**	**3.116.526.518,00**	**-2.219.979.309,00**							**5.850.003.313,00**	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	51.642.800,00	25.898.268,00	30.574.374,00	-21.068.426,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Bappeda Kabupaten Buton		56.807.080,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				75 Laporan	75 Laporan	798.600,00	704.000,00	704.000,00	-94.600,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			878.460,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23.958.000,00	20.448.000,00	20.372.000,00	-3.586.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.353.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	9.317.000,00	1.332.200,00	1.300.000,00	-8.017.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.248.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	17.569.200,00	3.414.068,00	8.198.374,00	-9.370.826,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			19.326.120,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	246.553.532,00	127.190.005,00	127.190.005,00	-119.363.527,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Bappeda Kabupaten Buton		271.208.886,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	199.077.833,00	127.190.005,00	127.190.005,00	-71.887.828,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			218.985.617,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	0 Unit	18.435.699,00	0,00	0,00	-18.435.699,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.279.269,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2.420.000,00	0,00	0,00	-2.420.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Paket Unit	0 Unit	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	8.470.000,00	0,00	0,00	-8.470.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.317.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	6.050.000,00	0,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keselarasan program pembangunan daerah dengan program nasional Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai perundang-undangan yang berlaku**				**90 90 % %**	**90 90 % %**	**1.588.293.414,00**	**980.633.550,00**	**629.195.320,00**	**158.829.341,00**							**1.747.122.755,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*				100 %	100 %	543.895.049,00	743.577.800,00	503.819.400,00	-40.075.649,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Bappeda Kabupaten Buton		598.284.553,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	0 Dokumen	64.152.881,00	0,00	0,00	-64.152.881,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			70.568.169,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				30 Dokumen	30 Dokumen	121.000.000,00	61.509.900,00	36.715.950,00	-84.284.050,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			133.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	26.619.335,00	99.314.950,00	37.905.950,00	11.286.615,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			29.281.268,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	49.372.114,00	25.142.000,00	9.312.000,00	-40.060.114,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			54.309.325,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	98.146.609,00	125.344.250,00	89.464.050,00	-8.682.559,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			107.961.270,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				20 Usulan	0 Usulan	9.154.110,00	0,00	0,00	-9.154.110,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.069.521,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				26 Dokumen	26 Dokumen	175.450.000,00	432.266.700,00	330.421.450,00	154.971.450,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			192.995.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Cakupan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Cakupan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase keselarasan program pembangunan daerah dengan program nasional Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai perundang-undangan yang berlaku*				100 % 90 %	100 % 90 %	393.248.669,00	79.413.100,00	65.220.270,00	-328.028.399,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Bappeda Kabupaten Buton		432.573.536,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				5 Dokumen	0 Dokumen	66.548.669,00	0,00	0,00	-66.548.669,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			73.203.536,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				10 Orang	10 Orang	121.000.000,00	63.470.250,00	58.085.470,00	-62.914.530,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			133.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				5 Buku	5 Buku	205.700.000,00	15.942.850,00	7.134.800,00	-198.565.200,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			226.270.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Cakupan Pengendalian ,Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*				100 %	100 %	528.976.335,00	157.642.650,00	60.155.650,00	-468.820.685,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Bappeda Kabupaten Buton		581.873.969,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	217.346.843,00	70.804.650,00	30.148.650,00	-187.198.193,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			239.081.527,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				3 Kerja Sama	0 Kerja Sama	69.629.492,00	0,00	0,00	-69.629.492,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			76.592.442,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	242.000.000,00	86.838.000,00	30.007.000,00	-211.993.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			266.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Cakupan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*				100 %	100 %	122.173.361,00	0,00	0,00	-122.173.361,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Bappeda Kabupaten Buton		134.390.697,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	0 Dokumen	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	40.173.361,00	0,00	0,00	-40.173.361,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			44.390.697,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai perundang-undangan yang berlaku**				**90 %**	**90 %**	**534.775.170,00**	**379.648.232,00**	**235.962.766,00**	**53.477.518,00**							**588.252.688,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Cakupan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*				100 %	100 %	244.582.087,00	200.434.732,00	134.419.766,00	-110.162.321,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Bappeda Kabupaten Buton		267.540.296,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	10.068.908,00	50.084.000,00	23.970.000,00	13.901.092,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			12.075.799,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	5.141.895,00	7.500.000,00	7.500.000,00	2.358.105,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.656.085,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				7 Laporan	7 Laporan	11.698.946,00	7.585.000,00	2.100.000,00	-9.598.946,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			12.868.840,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	13.041.138,00	10.791.000,00	7.020.000,00	-6.021.138,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			14.345.252,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	14.120.000,00	6.820.000,00	-3.180.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				7 Laporan	7 Laporan	7.000.000,00	7.500.000,00	7.540.000,00	540.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				7 Laporan	7 Laporan	8.131.200,00	7.541.200,00	2.100.000,00	-6.031.200,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.944.320,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	179.500.000,00	95.313.532,00	77.369.766,00	-102.130.234,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			195.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Cakupan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*				100 %	100 %	90.466.248,00	80.764.500,00	50.314.500,00	-40.151.748,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Bappeda Kabupaten Buton		101.012.873,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	9.221.900,00	30.523.000,00	13.803.000,00	4.581.100,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.864.090,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	3.472.700,00	7.808.000,00	7.808.000,00	4.335.300,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.819.970,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				7 Laporan	7 Laporan	6.788.100,00	7.546.000,00	3.946.000,00	-2.842.100,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.466.910,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	52.184.638,00	7.281.000,00	6.881.000,00	-45.303.638,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			57.403.102,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	5.040.000,00	10.410.000,00	3.790.000,00	-1.250.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.324.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	4.549.600,00	7.943.000,00	7.943.000,00	3.393.400,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.004.560,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				7 Laporan	0 Laporan	5.578.100,00	0,00	0,00	-5.578.100,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.135.910,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				6 Laporan	6 Laporan	3.631.210,00	9.253.500,00	6.143.500,00	2.512.290,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.994.331,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Cakupan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*				100 %	100 %	199.726.835,00	98.449.000,00	51.228.500,00	-148.498.335,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Bappeda Kabupaten Buton		219.699.519,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	12.100.000,00	4.950.000,00	4.234.000,00	-7.866.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.310.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	11.495.000,00	4.331.000,00	2.999.000,00	-8.496.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			12.644.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				7 Laporan	7 Laporan	12.354.100,00	9.329.000,00	3.626.000,00	-8.728.100,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.589.510,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	83.930.440,00	58.422.000,00	29.661.000,00	-54.269.440,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			92.323.484,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	0 Dokumen	8.857.805,00	0,00	0,00	-8.857.805,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.743.586,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	0 Laporan	4.439.490,00	0,00	0,00	-4.439.490,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.883.439,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	0 Laporan	18.150.000,00	0,00	0,00	-18.150.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			19.965.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	2 Laporan	48.400.000,00	21.417.000,00	10.708.500,00	-37.691.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			53.240.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	J U M L A H								**5.336.505.827,00**	**3.762.341.491,00**	**3.116.526.518,00**	**-2.219.979.309,00**							**5.850.003.313,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**5.197.054.418,00**	**2.638.683.493,00**	**2.444.617.689,00**	**-2.752.436.729,00**							**4.858.222.092,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.197.054.418,00**	**2.638.683.493,00**	**2.444.617.689,00**	**-2.752.436.729,00**							**4.858.222.092,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**5.197.054.418,00**	**2.638.683.493,00**	**2.444.617.689,00**	**-2.752.436.729,00**							**4.858.222.092,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**4.122.271.918,00**	**2.353.740.493,00**	**2.338.607.689,00**	**215.976.174,00**							**4.338.248.092,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	50.578.000,00	28.806.000,00	26.596.000,00	-23.982.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	BAPENDA		38.066.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	0 Dokumen	9.317.000,00	0,00	0,00	-9.317.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	6.655.000,00	5.155.000,00	3.700.000,00	-2.955.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.320.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	6.655.000,00	5.555.000,00	5.310.000,00	-1.345.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.320.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	6.655.000,00	6.655.000,00	6.300.000,00	-355.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.320.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	6.655.000,00	5.055.000,00	4.900.000,00	-1.755.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.320.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	7.986.000,00	6.386.000,00	6.386.000,00	-1.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.784.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	0 Laporan	6.655.000,00	0,00	0,00	-6.655.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.128.447.493,00	1.985.027.553,00	2.126.313.189,00	-1.002.134.304,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	BAPENDA		3.359.043.836,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	2.966.065.493,00	1.914.777.153,00	2.052.897.789,00	-913.167.704,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.190.672.042,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	146.410.000,00	64.895.400,00	68.315.400,00	-78.094.600,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			161.051.294,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	0 Laporan	9.317.000,00	0,00	0,00	-9.317.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	6.655.000,00	5.355.000,00	5.100.000,00	-1.555.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.320.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi barang milik daerah pada perangkat Daerah*				100 %	100 %	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	62.211.925,00	0,00	0,00	-62.211.925,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	BAPENDA		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	0 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	0 Dokumen	6.655.000,00	0,00	0,00	-6.655.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0 Orang	5.556.925,00	0,00	0,00	-5.556.925,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	513.203.160,00	189.627.200,00	107.098.000,00	-406.105.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	BAPENDA		668.610.476,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	6.921.200,00	3.125.200,00	866.000,00	-6.055.200,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.613.320,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	71.543.960,00	35.196.000,00	0,00	-71.543.960,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			81.698.356,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	95.832.000,00	52.500.000,00	54.480.000,00	-41.352.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			105.415.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	7.986.000,00	1.986.000,00	684.000,00	-7.302.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.784.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	330.920.000,00	96.820.000,00	51.068.000,00	-279.852.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			465.099.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	BAPENDA		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	104.558.800,00	86.596.800,00	50.056.000,00	-54.502.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	BAPENDA		109.514.680,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				350 Laporan	350 Laporan	2.662.000,00	2.750.000,00	1.056.000,00	-1.606.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.928.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	83.586.800,00	76.146.800,00	44.000.000,00	-39.586.800,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			91.945.480,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	13.310.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-8.310.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			14.641.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	2.700.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	188.272.540,00	63.682.940,00	28.544.500,00	-159.728.040,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	BAPENDA		163.012.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	40 Unit	158.272.540,00	63.682.940,00	28.544.500,00	-129.728.040,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			163.012.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**1.074.782.500,00**	**284.943.000,00**	**106.010.000,00**	**-554.808.500,00**							**519.974.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jumlah PAD Yang dihasilkan*				48 M (Rp)	48 M (Rp)	1.074.782.500,00	284.943.000,00	106.010.000,00	-968.772.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	PAJAK DAERAH		519.974.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	16.637.500,00	0,00	0,00	-16.637.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				0 0	0 0	90.515.000,00	0,00	0,00	-90.515.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				5 Laporan	5 Laporan	113.100.000,00	48.553.000,00	27.478.000,00	-85.622.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			115.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				5 Laporan	0 Laporan	26.620.000,00	0,00	0,00	-26.620.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				3000 Obyek Pajak	3000 Obyek Pajak	35.000.000,00	13.310.000,00	6.480.000,00	-28.520.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	26.620.000,00	18.583.000,00	12.525.000,00	-14.095.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			29.282.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				12 Layanan	0 Layanan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				5 Dokumen	0 Dokumen	13.310.000,00	0,00	0,00	-13.310.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	160.000.000,00	154.510.000,00	42.202.000,00	-117.798.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			170.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				5 Dokumen	0 Dokumen	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	98.494.000,00	36.243.000,00	17.325.000,00	-81.169.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			100.343.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	4 Laporan	61.386.000,00	13.744.000,00	0,00	-61.386.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			65.348.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	0 Laporan	226.550.000,00	0,00	0,00	-226.550.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H								**5.197.054.418,00**	**2.638.683.493,00**	**2.444.617.689,00**	**-2.752.436.729,00**							**4.858.222.092,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**7.416.240.441,00**	**9.048.989.691,00**	**8.431.001.712,00**	**216.623.165,00**							**7.632.863.606,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	168.500.000,00	78.109.000,00	71.226.000,00	-97.274.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	KEUANGAN		189.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	14.890.000,00	14.640.000,00	14.640.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	21.000.000,00	203.000,00	76.000,00	-20.924.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	21.000.000,00	14.790.000,00	12.635.000,00	-8.365.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	19.000.000,00	196.000,00	112.000,00	-18.888.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	12.983.000,00	-4.017.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			19.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				48 Laporan	48 Laporan	23.700.000,00	14.790.000,00	14.640.000,00	-9.060.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				48 Laporan	48 Laporan	0,00	16.240.000,00	16.140.000,00	16.140.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			45.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.532.753.603,00	6.890.994.306,00	6.554.596.527,00	3.021.842.924,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	KEUANGAN		3.337.968.971,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	2.918.637.632,00	6.692.084.806,00	6.307.694.027,00	3.389.056.395,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.698.853.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	58.000.000,00	89.906.000,00	113.902.000,00	55.902.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			58.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	59.700.000,00	29.156.000,00	28.964.000,00	-30.736.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			59.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	7 Laporan	28.715.971,00	58.500,00	27.500,00	-28.688.471,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			28.715.971,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				10 Dokumen	10 Dokumen	369.200.000,00	43.240.000,00	67.460.000,00	-301.740.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			379.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	36.549.000,00	36.549.000,00	-23.451.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5 Dokumen	0 Dokumen	38.500.000,00	0,00	0,00	-38.500.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			38.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	781.286.838,00	14.892.000,00	14.640.000,00	-766.646.838,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	KEUANGAN		1.021.070.671,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	57.000.000,00	32.000,00	0,00	-57.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			67.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	144.070.671,00	0,00	0,00	-144.070.671,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			144.070.671,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	0 Laporan	60.216.167,00	0,00	0,00	-60.216.167,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	160.000.000,00	14.860.000,00	14.640.000,00	-145.360.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	0 Laporan	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				160 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	549.200.000,00	61.244.000,00	57.716.000,00	-491.484.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	KEUANGAN		550.523.964,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				12 Unit	12 Unit	57.900.000,00	16.020.000,00	14.916.000,00	-42.984.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			57.900.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	0 Paket	97.500.000,00	700.000,00	0,00	-97.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			97.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	39.600.000,00	14.940.000,00	14.640.000,00	-24.960.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			39.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	37.700.000,00	13.670.000,00	13.520.000,00	-24.180.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			38.023.964,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	15.240.000,00	14.640.000,00	-60.360.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	0 Orang	95.000.000,00	74.000,00	0,00	-95.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			96.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	0 Orang	75.000.000,00	600.000,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	0 Orang	71.500.000,00	0,00	0,00	-71.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			71.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.431.000.000,00	281.453.000,00	194.311.000,00	-1.236.689.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	KEUANGAN		1.475.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.920.000,00	4.158.000,00	4.158.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				144 Paket	144 Paket	150.000.000,00	15.000,00	5.000.000,00	-145.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			160.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	37.500.000,00	0,00	0,00	-37.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			37.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	115.000.000,00	63.248.000,00	63.248.000,00	-51.752.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	135.000.000,00	10.890.000,00	5.445.000,00	-129.555.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			145.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	57.500.000,00	14.700.000,00	18.780.000,00	-38.720.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			67.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	780.000.000,00	189.680.000,00	97.680.000,00	-682.320.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			780.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	410.000.000,00	190.909.000,00	113.424.000,00	-296.576.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	KEUANGAN		495.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	100.000.000,00	61.200.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			70.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	75.000.000,00	129.709.000,00	113.424.000,00	38.424.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				96 Unit	0 Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			45.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				50 Unit	0 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			45.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	318.500.000,00	1.261.514.200,00	1.264.368.200,00	945.868.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	KEUANGAN		318.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				45 Laporan	45 Laporan	3.500.000,00	3.480.000,00	2.076.000,00	-1.424.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			3.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				80 Laporan	80 Laporan	90.000.000,00	1.128.852.000,00	1.064.910.000,00	974.910.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			90.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	90.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	-88.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			90.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	135.000.000,00	119.182.200,00	195.382.200,00	60.382.200,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			135.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	225.000.000,00	269.874.185,00	160.719.985,00	-64.280.015,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	KEUANGAN		245.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	0 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	263.874.185,00	157.719.985,00	77.719.985,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			90.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			90.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	
1.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Laporan keuangan daerah sesuai SAP Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD**				**100 102,40 4,37 87,02 % % % %**	**100 102,40 4,37 87,02 % % % %**	**167.420.608.020,00**	**115.464.903.775,00**	**111.041.795.150,00**	**18.479.986.387,00**							**185.900.594.407,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*				100 %	100 %	1.460.408.020,00	696.617.000,00	474.072.750,00	-986.335.270,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	KEUANGAN		1.460.408.020,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				60 Dokumen	60 Dokumen	105.000.000,00	27.172.150,00	27.172.150,00	-77.827.850,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			105.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				60 Dokumen	60 Dokumen	105.000.000,00	31.183.500,00	12.326.250,00	-92.673.750,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			105.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				55 Dokumen	55 Dokumen	72.462.103,00	3.395.000,00	3.395.000,00	-69.067.103,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			72.462.103,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				55 Dokumen	55 Dokumen	72.400.800,00	30.649.000,00	30.649.000,00	-41.751.800,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			72.400.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				55 Dokumen	55 Dokumen	72.069.000,00	26.738.000,00	26.738.000,00	-45.331.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			72.069.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				55 Dokumen	55 Dokumen	72.300.000,00	26.764.000,00	8.924.000,00	-63.376.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			72.300.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				55 Dokumen	55 Dokumen	284.000.000,00	72.122.000,00	70.516.000,00	-213.484.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			284.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				55 Dokumen	55 Dokumen	165.000.000,00	138.099.000,00	52.654.000,00	-112.346.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			165.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				7 Dokumen	7 Dokumen	125.297.117,00	340.272.350,00	241.698.350,00	116.401.233,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			125.297.117,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				20 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	74.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				20 Dokumen	0 Dokumen	110.000.000,00	74.000,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				15 Dokumen	0 Dokumen	76.879.000,00	74.000,00	0,00	-76.879.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			76.879.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*"Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah"*				100 %	100 %	827.800.000,00	227.012.000,00	159.232.000,00	-668.568.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	KEUANGAN		827.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				25 Dokumen	25 Dokumen	150.000.000,00	93.072.000,00	68.632.000,00	-81.368.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				24 Laporan	24 Laporan	125.000.000,00	17.980.000,00	13.540.000,00	-111.460.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				15 Dokumen	15 Dokumen	100.000.000,00	16.240.000,00	15.320.000,00	-84.680.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				25 Dokumen	25 Dokumen	75.000.000,00	130.000,00	80.000,00	-74.920.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				180 Dokumen	180 Dokumen	85.000.000,00	40.970.000,00	19.070.000,00	-65.930.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				7 Dokumen	7 Dokumen	135.000.000,00	27.580.000,00	27.180.000,00	-107.820.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			135.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				120 Orang	120 Orang	157.800.000,00	31.040.000,00	15.410.000,00	-142.390.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			157.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*"Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah"*				100 %	100 %	1.795.600.000,00	248.031.100,00	191.122.900,00	-1.604.477.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	KEUANGAN		1.795.600.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	3.680.000,00	388.000,00	-149.612.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				25 Dokumen	25 Dokumen	100.000.000,00	200.000,00	200.000,00	-99.800.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				31 Laporan	31 Laporan	270.000.000,00	94.133.800,00	76.411.400,00	-193.588.600,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			270.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				20 Laporan	20 Laporan	75.600.000,00	444.000,00	148.000,00	-75.452.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			75.600.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				75 Dokumen	75 Dokumen	350.000.000,00	146.147.800,00	112.443.000,00	-237.557.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				12 Dokumen	12 Dokumen	175.000.000,00	1.459.500,00	834.500,00	-174.165.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			175.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	100.000.000,00	444.000,00	148.000,00	-99.852.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				90 Dokumen	90 Dokumen	75.000.000,00	74.000,00	74.000,00	-74.926.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	75.000.000,00	74.000,00	74.000,00	-74.926.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	250.000.000,00	74.000,00	74.000,00	-249.926.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	1.270.000,00	298.000,00	-99.702.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Laporan	40 Laporan	75.000.000,00	30.000,00	30.000,00	-74.970.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*				100 %	100 %	163.036.800.000,00	114.293.243.675,00	110.217.367.500,00	-52.819.432.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	KEUANGAN		181.516.785.587,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	0 Laporan	620.000.000,00	0,00	0,00	-620.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			620.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				20 Laporan	0 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				15 Laporan	0 Laporan	12.400.000.000,00	0,00	0,00	-12.400.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			12.400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah				1 Laporan	0 Laporan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	140.516.800.000,00	111.916.138.300,00	109.717.367.500,00	-30.799.432.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			158.996.785.587,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000.000,00	2.377.105.375,00	500.000.000,00	-6.500.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			7.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Cakupan Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah*				100 %	100 %	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	KEUANGAN		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				25 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	0 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase aset yang teregistrasi Persentase peningkatan pengelolaan BMD**				**28,4 74,3 % %**	**28,4 74,3 % %**	**838.400.228,00**	**955.575.000,00**	**693.723.550,00**	**83.840.022,00**							**922.240.250,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	838.400.228,00	955.575.000,00	693.723.550,00	-144.676.678,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar	KEUANGAN		922.240.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				50 Dokumen	50 Dokumen	150.000.000,00	50.711.000,00	38.328.500,00	-111.671.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				45 Dokumen	45 Dokumen	57.600.000,00	370.000,00	370.000,00	-57.230.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			67.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				45 Dokumen	45 Dokumen	58.000.000,00	43.385.000,00	34.408.000,00	-23.592.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			63.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				80 Dokumen	80 Dokumen	51.859.800,00	400.000,00	400.000,00	-51.459.800,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			56.859.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				5 Laporan	5 Laporan	58.508.203,00	28.795.000,00	28.795.000,00	-29.713.203,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			65.508.203,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	63.800.000,00	370.000,00	370.000,00	-63.430.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			83.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	60.936.225,00	678.215.000,00	466.541.750,00	405.605.525,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			60.936.225,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	58.760.000,00	370.000,00	370.000,00	-58.390.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			58.760.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	54.900.000,00	250.000,00	250.000,00	-54.650.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			64.900.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	65.000.000,00	49.854.000,00	42.940.000,00	-22.060.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			75.840.022,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	51.800.000,00	30.675.000,00	30.675.000,00	-21.125.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			60.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	50.900.000,00	71.810.000,00	49.905.300,00	-994.700,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			55.900.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				55 Orang	55 Orang	56.336.000,00	370.000,00	370.000,00	-55.966.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			58.336.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H								**175.675.248.689,00**	**125.469.468.466,00**	**120.166.520.412,00**	**-55.508.728.277,00**							**194.455.698.263,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**38.817.507.468,00**	**48.468.680.149,00**	**38.757.939.182,00**	**-59.568.286,00**							**42.294.020.937,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**38.817.507.468,00**	**48.468.680.149,00**	**38.757.939.182,00**	**-59.568.286,00**							**42.294.020.937,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**38.817.507.468,00**	**48.468.680.149,00**	**38.757.939.182,00**	**-59.568.286,00**							**42.294.020.937,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**34.765.134.653,00**	**46.953.422.249,00**	**36.816.724.582,00**	**3.476.513.502,00**							**38.241.648.155,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	51.000.000,00	49.026.250,00	41.902.250,00	-9.097.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	BKPSDM KAB. BUTON		51.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00	11.665.900,00	8.281.900,00	-2.718.100,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.642.000,00	-1.358.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.999.750,00	4.129.750,00	-870.250,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	6.999.850,00	6.699.850,00	-300.150,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	6.999.750,00	5.787.750,00	-1.212.250,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.998.500,00	4.998.500,00	-1.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	11.000.000,00	8.362.500,00	8.362.500,00	-2.637.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	29.646.495.039,00	46.615.098.779,00	36.569.479.112,00	6.922.984.073,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	BKPSDM KAB. BUTON		33.123.007.214,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				700/14 Orang/bulan	700/14 Orang/bulan	29.578.453.745,00	46.576.620.029,00	36.532.560.112,00	6.954.106.367,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			33.054.967.214,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0 Dokumen	9.600.000,00	0,00	0,00	-9.600.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.440.000,00	25.020.000,00	25.020.000,00	-420.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			25.440.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	6.999.750,00	5.440.000,00	-1.560.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	26.001.294,00	6.459.000,00	6.459.000,00	-19.542.294,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	29.975.528,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-21.575.528,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	BKPSDM KAB. BUTON		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-6.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	9.975.528,00	0,00	0,00	-9.975.528,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.329.746.060,00	10.500.000,00	350.000,00	-1.329.396.060,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	BKPSDM KAB. BUTON		1.329.740.941,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0 Unit	24.746.060,00	0,00	0,00	-24.746.060,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			24.740.941,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	10.500.000,00	350.000,00	-99.650.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1 Laporan	0 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0 Orang	440.000.000,00	0,00	0,00	-440.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			440.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	0 Orang	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	0 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.549.512.877,00	167.819.000,00	112.015.000,00	-2.437.497.877,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	BKPSDM KAB. BUTON		2.549.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.800.012.877,00	68.614.000,00	45.415.000,00	-1.754.597.877,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	6.350.000,00	950.000,00	-24.050.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			27.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	72.455.000,00	45.250.000,00	-404.750.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	-34.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	555.000.004,00	0,00	0,00	-555.000.004,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	BKPSDM KAB. BUTON		555.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	105.000.004,00	0,00	0,00	-105.000.004,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	156.405.145,00	43.478.220,00	43.478.220,00	-112.926.925,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		156.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	10.005.145,00	0,00	0,00	-10.005.145,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	128.400.000,00	34.478.220,00	34.478.220,00	-93.921.780,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			128.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	447.000.000,00	59.100.000,00	41.100.000,00	-405.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	BKPSDM KAB. BUTON		447.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	200.000.000,00	59.100.000,00	41.100.000,00	-158.900.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	0 Unit	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**4.052.372.815,00**	**1.515.257.900,00**	**1.941.214.600,00**	**-33,00**							**4.052.372.782,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	1.379.190.260,00	153.513.800,00	93.045.600,00	-1.286.144.660,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN/Stakeholder/Pemerintah Daerah/Masyarakat		1.379.190.260,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000.000,00	92.032.000,00	69.202.000,00	-1.130.798.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	69.000.000,00	20.169.700,00	8.249.700,00	-60.750.300,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			69.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	60.190.260,00	20.686.200,00	6.888.000,00	-53.302.260,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			60.190.260,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	20.625.900,00	8.705.900,00	-41.294.100,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	200.000.000,00	43.109.850,00	20.865.000,00	-179.135.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN/Stakeholder/Pemerintah Daerah/Masyarakat		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	7.377.900,00	5.888.000,00	-4.112.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	35.731.950,00	14.977.000,00	-175.023.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			190.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	2.318.182.555,00	1.300.038.250,00	1.820.628.000,00	-497.554.555,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN/Stakeholder/Pemerintah Daerah/Masyarakat		2.318.182.522,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				20 Orang	0 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	890.000.000,00	1.171.609.000,00	1.236.170.000,00	346.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			890.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	173.182.555,00	29.533.250,00	21.858.000,00	-151.324.555,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			173.182.522,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				20 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN				20 Orang	0 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				100 Orang	100 Orang	125.000.000,00	28.896.000,00	492.600.000,00	367.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	155.000.000,00	18.596.000,00	6.676.000,00	-148.324.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN/Stakeholder/Pemerintah Daerah/Masyarakat		155.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	18.596.000,00	6.676.000,00	-93.324.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				100 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				2 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H								**38.817.507.468,00**	**48.468.680.149,00**	**38.757.939.182,00**	**-59.568.286,00**							**42.294.020.937,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH							**3.141.059.698,00**	**2.088.978.137,00**	**2.006.876.049,00**	**-1.134.183.649,00**							**3.455.165.668,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.141.059.698,00**	**2.088.978.137,00**	**2.006.876.049,00**	**-1.134.183.649,00**							**3.455.165.668,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**3.141.059.698,00**	**2.088.978.137,00**	**2.006.876.049,00**	**-1.134.183.649,00**							**3.455.165.668,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.417.312.148,00**	**1.720.528.137,00**	**1.700.873.932,00**	**262.305.970,00**							**2.679.618.118,00**	
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	32.298.000,00	22.297.000,00	18.222.390,00	-14.075.610,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton		33.548.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	3.400.000,00	2.955.000,00	-1.045.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.250.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	1.174.000,00	1.018.000,00	-2.982.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.250.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	1.774.000,00	1.535.500,00	-2.464.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.250.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.250.000,00	1.350.000,00	1.242.000,00	-3.008.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.250.000,00	1.650.000,00	1.602.890,00	-2.647.110,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.700.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-300.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.700.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	7.098.000,00	8.549.000,00	5.469.000,00	-1.629.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.098.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.510.771.648,00	1.372.162.387,00	1.466.769.892,00	-44.001.756,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton		1.520.771.618,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.453.081.648,00	1.344.706.137,00	1.441.871.892,00	-11.209.756,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.463.081.618,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	43.440.000,00	20.220.000,00	19.920.000,00	-23.520.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			43.440.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	6.750.000,00	3.046.250,00	1.914.000,00	-4.836.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.750.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	4.190.000,00	3.064.000,00	-4.436.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	7.921.000,00	4.321.000,00	4.162.000,00	-3.759.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton		7.921.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	425.000,00	425.000,00	266.000,00	-159.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			425.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.496.000,00	3.896.000,00	3.896.000,00	-3.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.496.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	88.746.500,00	22.590.750,00	14.650.750,00	-74.095.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton		88.746.500,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	28.650.000,00	19.550.000,00	11.900.000,00	-16.750.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			28.650.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	6.081.500,00	3.040.750,00	2.750.750,00	-3.330.750,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.081.500,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	0 Orang	54.015.000,00	0,00	0,00	-54.015.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			54.015.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	218.055.000,00	116.005.000,00	57.946.500,00	-160.108.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton		243.411.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	645.000,00	645.000,00	299.000,00	-346.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			645.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.500.000,00	5.800.000,00	3.587.500,00	-3.912.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	-1.440.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			29.941.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	188.470.000,00	108.120.000,00	54.060.000,00	-134.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			203.325.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	0 %	114.600.000,00	0,00	0,00	-114.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton		342.300.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	44.600.000,00	0,00	0,00	-44.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			42.300.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	390.620.000,00	129.603.000,00	89.473.400,00	-301.146.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buton		390.620.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	960.000,00	-240.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.200.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.720.000,00	19.484.200,00	3.360.000,00	-39.360.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			42.720.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	346.700.000,00	108.918.800,00	85.153.400,00	-261.546.600,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			346.700.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	54.300.000,00	53.549.000,00	49.649.000,00	-4.651.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Badan Riset dan Inovsi Daerah Kabupaten Buton		52.300.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	44.300.000,00	46.549.000,00	43.149.000,00	-1.151.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			44.300.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Lapodi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan**				**100 13.33 % %**	**100 %**	**723.747.550,00**	**368.450.000,00**	**306.002.117,00**	**51.800.000,00**							**775.547.550,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Cakupan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*				100 %	100 %	139.574.000,00	180.694.000,00	26.404.000,00	-113.170.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Stakeholder, PerguruanTinggi, Akademisi, LembagaPenelitian, dan Masyarakat Umum		141.374.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				2 Laporan	2 Laporan	131.020.000,00	180.694.000,00	26.404.000,00	-104.616.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			132.820.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan																		
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	8.554.000,00	0,00	0,00	-8.554.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.554.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Cakupan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*				100 %	100 %	300.000.000,00	150.000.000,00	129.737.559,00	-170.262.441,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Stakeholder, PerguruanTinggi, Akademisi, Lembaga Penelitian, dan Masyarakat Umum		150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	129.737.559,00	-20.262.441,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Cakupan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	129.737.559,00	-20.262.441,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Stakeholder, PerguruanTinggi, Akademisi, Lembaga Penelitian, dan Masyarakat Umum		350.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	129.737.559,00	129.737.559,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Cakupan Pengembangan Inovasi dan Teknologi*				100 %	100 %	134.173.550,00	37.756.000,00	20.122.999,00	-114.050.551,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Stakeholder, PerguruanTinggi, Akademisi, LembagaPenelitian, dan Masyarakat Umum		134.173.550,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	60.645.550,00	37.756.000,00	20.122.999,00	-40.522.551,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			60.645.550,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	0 Laporan	73.528.000,00	0,00	0,00	-73.528.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			73.528.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
3.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**Cakupan Riset dan Inovasi Daerah**				**100 %**	**0 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	*Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan*				100 %	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Stakeholder, PerguruanTinggi, Akademisi, Lembaga Penelitian, dan Masyarakat Umum		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan																		
			Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset																		
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset				0 Naskah	0 Naskah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan																		
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan																		
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				0 Pelatihan	0 Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah																		
			Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	*Cakupan Invensi dan Inovasi*				100 %	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Stakeholder, PerguruanTinggi, Akademisi, Lembaga Penelitian, dan Masyarakat Umum		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.03.2.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0005	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0008	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah																		
			Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0010	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0013	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah																		
			Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah				0 Sistem Informasi	0 Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0014	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0015	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0016	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi																		
			Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0017	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0018	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi																		
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi				0 Pelatihan	0 Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0019	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi																		
			Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi				0 Naskah	0 Naskah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0020	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0021	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi																		
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0022	Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0024	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0026	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	J U M L A H								**3.141.059.698,00**	**2.088.978.137,00**	**2.006.876.049,00**	**-1.134.183.649,00**							**3.455.165.668,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INSPEKTORAT							**5.946.206.290,00**	**4.461.671.384,00**	**2.793.529.379,00**	**-3.152.676.911,00**							**0,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.946.206.290,00**	**4.461.671.384,00**	**2.793.529.379,00**	**-3.152.676.911,00**							**0,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**5.946.206.290,00**	**4.461.671.384,00**	**2.793.529.379,00**	**-3.152.676.911,00**							**0,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**4.230.506.290,00**	**2.844.851.384,00**	**1.918.469.379,00**	**-4.230.506.290,00**							**0,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	49.000.000,00	36.900.000,00	33.800.000,00	-15.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**5.946.206.290,00**	**4.461.671.384,00**	**2.793.529.379,00**	**-3.152.676.911,00**							**0,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.946.206.290,00**	**4.461.671.384,00**	**2.793.529.379,00**	**-3.152.676.911,00**							**0,00**	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.946.206.290,00**	**4.461.671.384,00**	**2.793.529.379,00**	**-3.152.676.911,00**							**0,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**5.946.206.290,00**	**4.461.671.384,00**	**2.793.529.379,00**	**-3.152.676.911,00**							**0,00**	
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	5.200.000,00	4.900.000,00	-1.100.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	5.200.000,00	4.600.000,00	-1.400.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	5.800.000,00	5.800.000,00	4.800.000,00	-1.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	6.200.000,00	5.100.000,00	4.600.000,00	-1.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	7.500.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	-2.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	5.500.000,00	5.500.000,00	4.900.000,00	-600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.841.506.290,00	1.517.975.600,00	1.528.508.149,00	-312.998.141,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.742.084.456,00	1.430.765.600,00	1.432.514.149,00	-309.570.307,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	88.621.834,00	77.410.000,00	87.194.000,00	-1.427.834,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	5.300.000,00	5.300.000,00	4.300.000,00	-1.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	5.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-1.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	770.000.000,00	489.130.000,00	43.650.000,00	-726.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				34 Paket	0 Paket	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				34 Orang	34 Orang	250.000.000,00	226.010.000,00	40.350.000,00	-209.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				34 Orang	34 Orang	100.000.000,00	70.000.000,00	3.300.000,00	-96.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				34 Orang	0 Orang	350.000.000,00	193.120.000,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	498.000.000,00	323.107.184,00	182.729.630,00	-315.270.370,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	3.699.184,00	2.139.330,00	-7.860.670,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	50.000.000,00	59.555.000,00	51.031.000,00	1.031.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	6.000.000,00	2.550.000,00	2.500.300,00	-3.499.700,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	8.113.000,00	1.189.000,00	-10.811.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34 Laporan	34 Laporan	400.000.000,00	230.290.000,00	106.970.000,00	-293.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	700.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	925.000.000,00	331.536.000,00	19.914.000,00	-905.086.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	750.000.000,00	260.000.000,00	0,00	-750.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	37.336.000,00	10.514.000,00	-89.486.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	75.000.000,00	34.200.000,00	9.400.000,00	-65.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	17.000.000,00	13.015.000,00	7.000.000,00	-10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	5.000.000,00	1.015.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	130.000.000,00	133.187.600,00	102.867.600,00	-27.132.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	120.000.000,00	131.187.600,00	100.867.600,00	-19.132.400,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
1.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)**				**100 4,1 % Skor**	**100 4,1 % Skor**	**1.608.300.000,00**	**1.431.120.000,00**	**719.480.000,00**	**-1.608.300.000,00**							**0,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan Internal*				100 %	100 %	1.356.300.000,00	1.162.920.000,00	507.080.000,00	-849.220.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Buton		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.400.000,00	32.400.000,00	10.800.000,00	-39.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				49 Laporan	49 Laporan	693.000.000,00	642.600.000,00	298.800.000,00	-394.200.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				49 Laporan	49 Laporan	149.400.000,00	110.700.000,00	30.600.000,00	-118.800.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				58 Laporan	58 Laporan	103.500.000,00	80.220.000,00	50.780.000,00	-52.720.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				14 Laporan	14 Laporan	252.000.000,00	252.000.000,00	86.400.000,00	-165.600.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	0 Kesepakatan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	4 Dokumen	96.000.000,00	45.000.000,00	29.700.000,00	-66.300.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*				100 %	100 %	252.000.000,00	268.200.000,00	212.400.000,00	-39.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Buton		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				10 Laporan	10 Laporan	54.000.000,00	36.000.000,00	18.000.000,00	-36.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				15 Laporan	15 Laporan	198.000.000,00	232.200.000,00	194.400.000,00	-3.600.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Nilai MCP korsupgah KPK**				**50 %**	**50 %**	**107.400.000,00**	**185.700.000,00**	**155.580.000,00**	**-107.400.000,00**							**0,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*				100 %	100 %	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Inspektorat		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				5 Rekomendasi	0 Rekomendasi	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				5 Rekomendasi	0 Rekomendasi	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Cakupan Pendampingan dan Asistensi*				100 %	100 %	74.400.000,00	185.700.000,00	155.580.000,00	81.180.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Pemerintah Kabupaten Buton		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	17.400.000,00	114.360.000,00	138.600.000,00	121.200.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	17.000.000,00	5.100.000,00	1.200.000,00	-15.800.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	5 Kegiatan	20.000.000,00	56.640.000,00	9.780.000,00	-10.220.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	20.000.000,00	9.600.000,00	6.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Kondowa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	INSPEKTORAT
	J U M L A H								**5.946.206.290,00**	**4.461.671.384,00**	**2.793.529.379,00**	**-3.152.676.911,00**							**0,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PASARWAJO KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PASARWAJO							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.104.688.639,00**	**4.236.202.363,00**	**3.790.726.393,00**	**-122.620.242,00**							**5.982.068.397,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi*				7 Dokumen	7 Dokumen	22.000.000,00	17.414.000,00	6.050.000,00	-15.950.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	9 Kelurahan dan 13 Desa		24.200.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	4.048.000,00	1.260.000,00	-3.740.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	2.683.000,00	1.225.000,00	-1.775.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.300.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	2.683.000,00	1.225.000,00	-1.775.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.300.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2.518.000,00	1.170.000,00	-3.830.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	2.518.000,00	1.170.000,00	-1.830.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.300.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	2.964.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.300.000,00	KECAMATAN PASARWAJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan keuangan yang tersusun*				100 %	100 %	4.512.080.361,00	3.736.577.241,00	3.541.795.221,00	-970.285.140,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	53 orang Pegawai		4.962.368.397,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	4.462.160.361,00	3.690.441.241,00	3.521.335.221,00	-940.825.140,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.908.376.397,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	40.920.000,00	20.460.000,00	20.460.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			44.092.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7	**NON URUSAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	2.668.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	0 Laporan	4.000.000,00	2.548.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.400.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase jumlah dokumen aset yang tercatat*				100 %	100 %	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	9 Kelurahan dan 13 Desa		0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Perasentase aparatur yang disiplin*				100 %	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	53 orang Pegawai		0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi perangkat daerah*				100 %	100 %	673.408.278,00	318.380.922,00	111.277.572,00	-562.130.706,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Pegawai ASN dan Non ASN		687.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7	**NON URUSAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.408.278,00	0,00	0,00	-23.408.278,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	200.000.000,00	29.333.950,00	9.834.000,00	-190.166.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			220.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	5.750.000,00	2.638.600,00	-47.361.400,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			55.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	45 Laporan	150.000.000,00	58.380.000,00	29.190.000,00	-120.810.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			165.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah*				100 %	100 %	560.000.000,00	0,00	0,00	-560.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	9 Kelurahan dan 13 Desa		0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang*				100 %	100 %	180.000.000,00	106.555.200,00	106.555.200,00	-73.444.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Pegawai Non ASN		198.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	36.600.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			44.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7	**NON URUSAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	140.000.000,00	69.955.200,00	69.955.200,00	-70.044.800,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			154.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan kendaraan Dinas milik Daerah*				100 %	100 %	100.000.000,00	57.275.000,00	25.048.400,00	-74.951.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Pegawai ASN dan Non ASN		110.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	75.000.000,00	39.275.000,00	16.048.400,00	-58.951.600,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			82.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	25.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	-16.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			27.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat di wilayah kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**35.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase jumlah desa yang mendapat fasilitasi kemiskinan*				100 %	100 %	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	9 Kelurahan dan 13 Desa		0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN PASARWAJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/pokmas yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan di desa/kel**				**100 %**	**100 %**	**2.922.000.000,00**	**2.777.767.206,00**	**2.775.467.206,00**	**149.200.000,00**							**3.071.200.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan*				3 kegiatan	3 kegiatan	20.000.000,00	6.775.000,00	4.475.000,00	-15.525.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	9 Kelurahan dan 13 Desa		22.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	6.775.000,00	4.475.000,00	-15.525.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			22.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan*				100 %	100 %	972.000.000,00	972.000.000,00	972.000.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	9 Kelurahan dan 13 Desa		1.069.200.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				18 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	972.000.000,00	972.000.000,00	972.000.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.069.200.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan*				100 %	100 %	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	9 Kelurahan dan 13 Desa		0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				90 Keluarga	90 Keluarga	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				50 Keluarga	50 Keluarga	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				50 Keluarga	50 Keluarga	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses pelayanan dasar			0,00	KECAMATAN PASARWAJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**70.000.000,00**	**14.897.000,00**	**14.897.000,00**	**-31.500.000,00**							**38.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	70.000.000,00	14.897.000,00	14.897.000,00	-55.103.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	9 Kelurahan dan 13 Desa		38.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	14.897.000,00	14.897.000,00	-20.103.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			38.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	SISA DANA AKIBAT TIDAK TERCAPAINYA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SISA DANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN PASARWAJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum*				100 %	100 %	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	9 Kelurahan dan 13 Desa		0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN PASARWAJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase program pembinaan dan pengawasan pemerintahan**				**100 %**	**100 %**	**95.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-95.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa/Kelurahan*				6 Kegiatan	6 Kegiatan	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	13 Desa		0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN PASARWAJO
		KELURAHAN TAKIMPO							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.104.688.639,00**	**4.236.202.363,00**	**3.790.726.393,00**	**-122.620.242,00**							**5.982.068.397,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi perangkat daerah*				100 %	100 %	673.408.278,00	318.380.922,00	111.277.572,00	-562.130.706,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kantor Kelurahan		687.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	24.998.000,00	5.656.000,00	-19.344.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Takimpo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			27.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/pokmas yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan di desa/kel**				**100 %**	**100 %**	**2.922.000.000,00**	**2.777.767.206,00**	**2.775.467.206,00**	**149.200.000,00**							**3.071.200.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan kelurahan*				100 %	100 %	1.800.000.000,00	1.798.992.206,00	1.798.992.206,00	-1.007.794,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	10 Pokmas		1.980.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	199.956.000,00	199.956.000,00	-44.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Takimpo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			220.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
		KELURAHAN HOLIMOMBO							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.104.688.639,00**	**4.236.202.363,00**	**3.790.726.393,00**	**-122.620.242,00**							**5.982.068.397,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi perangkat daerah*				100 %	100 %	673.408.278,00	318.380.922,00	111.277.572,00	-562.130.706,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kantor Kelurahan		687.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	24.998.472,00	5.604.472,00	-19.395.528,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Holimombo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			27.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/pokmas yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan di desa/kel**				**100 %**	**100 %**	**2.922.000.000,00**	**2.777.767.206,00**	**2.775.467.206,00**	**149.200.000,00**							**3.071.200.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan kelurahan*				100 %	100 %	1.800.000.000,00	1.798.992.206,00	1.798.992.206,00	-1.007.794,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	10 Pokmas		1.980.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Holimombo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			220.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
		KELURAHAN AWAINULU							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.104.688.639,00**	**4.236.202.363,00**	**3.790.726.393,00**	**-122.620.242,00**							**5.982.068.397,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi perangkat daerah*				100 %	100 %	673.408.278,00	318.380.922,00	111.277.572,00	-562.130.706,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kantor Kelurahan		687.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	2.448.000,00	-22.552.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Awainulu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			27.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/pokmas yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan di desa/kel**				**100 %**	**100 %**	**2.922.000.000,00**	**2.777.767.206,00**	**2.775.467.206,00**	**149.200.000,00**							**3.071.200.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan kelurahan*				100 %	100 %	1.800.000.000,00	1.798.992.206,00	1.798.992.206,00	-1.007.794,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	10 Pokmas		1.980.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	199.768.000,00	199.768.000,00	-232.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Awainulu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			220.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
		KELURAHAN KOMBELI							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.104.688.639,00**	**4.236.202.363,00**	**3.790.726.393,00**	**-122.620.242,00**							**5.982.068.397,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi perangkat daerah*				100 %	100 %	673.408.278,00	318.380.922,00	111.277.572,00	-562.130.706,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kantor Kelurahan		687.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	25.000.000,00	7.231.500,00	7.231.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			27.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7	**NON URUSAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/pokmas yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan di desa/kel**				**100 %**	**100 %**	**2.922.000.000,00**	**2.777.767.206,00**	**2.775.467.206,00**	**149.200.000,00**							**3.071.200.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan kelurahan*				100 %	100 %	1.800.000.000,00	1.798.992.206,00	1.798.992.206,00	-1.007.794,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	10 Pokmas		1.980.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	199.650.000,00	199.650.000,00	-350.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kombeli	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			220.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
		KELURAHAN WASAGA							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.104.688.639,00**	**4.236.202.363,00**	**3.790.726.393,00**	**-122.620.242,00**							**5.982.068.397,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi perangkat daerah*				100 %	100 %	673.408.278,00	318.380.922,00	111.277.572,00	-562.130.706,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kantor Kelurahan		687.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	24.999.750,00	9.001.000,00	-15.999.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Wasaga	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			27.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/pokmas yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan di desa/kel**				**100 %**	**100 %**	**2.922.000.000,00**	**2.777.767.206,00**	**2.775.467.206,00**	**149.200.000,00**							**3.071.200.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan kelurahan*				100 %	100 %	1.800.000.000,00	1.798.992.206,00	1.798.992.206,00	-1.007.794,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	10 Pokmas		1.980.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	199.997.000,00	199.997.000,00	-3.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Pasarwajo, Wasaga	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			220.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
		KELURAHAN KAMBULA-BULANA							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.104.688.639,00**	**4.236.202.363,00**	**3.790.726.393,00**	**-122.620.242,00**							**5.982.068.397,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi perangkat daerah*				100 %	100 %	673.408.278,00	318.380.922,00	111.277.572,00	-562.130.706,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kantor Kelurahan		687.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	24.999.850,00	7.091.000,00	-17.909.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kambulabulana	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			27.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/pokmas yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan di desa/kel**				**100 %**	**100 %**	**2.922.000.000,00**	**2.777.767.206,00**	**2.775.467.206,00**	**149.200.000,00**							**3.071.200.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan kelurahan*				100 %	100 %	1.800.000.000,00	1.798.992.206,00	1.798.992.206,00	-1.007.794,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	10 Pokmas		1.980.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	199.927.080,00	199.927.080,00	-72.920,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Kambulabulana	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			220.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
		KELURAHAN WAKOKO							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.104.688.639,00**	**4.236.202.363,00**	**3.790.726.393,00**	**-122.620.242,00**							**5.982.068.397,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi perangkat daerah*				100 %	100 %	673.408.278,00	318.380.922,00	111.277.572,00	-562.130.706,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kantor Kelurahan		687.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	24.999.900,00	11.647.000,00	-13.353.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Wakoko	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			27.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/pokmas yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan di desa/kel**				**100 %**	**100 %**	**2.922.000.000,00**	**2.777.767.206,00**	**2.775.467.206,00**	**149.200.000,00**							**3.071.200.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan kelurahan*				100 %	100 %	1.800.000.000,00	1.798.992.206,00	1.798.992.206,00	-1.007.794,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	10 Pokmas		1.980.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	199.915.000,00	199.915.000,00	-85.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Wakoko	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			220.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
		KELURAHAN SARAGI							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.104.688.639,00**	**4.236.202.363,00**	**3.790.726.393,00**	**-122.620.242,00**							**5.982.068.397,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi perangkat daerah*				100 %	100 %	673.408.278,00	318.380.922,00	111.277.572,00	-562.130.706,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kantor Kelurahan		687.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	9.814.000,00	-15.186.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Saragi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			27.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/pokmas yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan di desa/kel**				**100 %**	**100 %**	**2.922.000.000,00**	**2.777.767.206,00**	**2.775.467.206,00**	**149.200.000,00**							**3.071.200.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan kelurahan*				100 %	100 %	1.800.000.000,00	1.798.992.206,00	1.798.992.206,00	-1.007.794,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	10 Pokmas		1.980.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	199.958.000,00	199.958.000,00	-42.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Saragi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			220.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
		KELURAHAN PASARWAJO							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.104.688.639,00**	**4.236.202.363,00**	**3.790.726.393,00**	**-122.620.242,00**							**5.982.068.397,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi perangkat daerah*				100 %	100 %	673.408.278,00	318.380.922,00	111.277.572,00	-562.130.706,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Kantor Kelurahan		687.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	24.921.000,00	11.122.000,00	-13.878.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Pasarwajo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			27.500.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase masyarakat/pokmas yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan di desa/kel**				**100 %**	**100 %**	**2.922.000.000,00**	**2.777.767.206,00**	**2.775.467.206,00**	**149.200.000,00**							**3.071.200.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan kelurahan*				100 %	100 %	1.800.000.000,00	1.798.992.206,00	1.798.992.206,00	-1.007.794,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	10 Pokmas		1.980.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	199.821.126,00	199.821.126,00	-178.874,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			220.000.000,00	KECAMATAN PASARWAJO
	J U M L A H								**9.256.688.639,00**	**7.028.866.569,00**	**6.581.090.599,00**	**-2.675.598.040,00**							**9.091.768.397,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN WABULA KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN WABULA							**1.610.254.230,00**	**962.585.493,00**	**846.675.759,00**	**-763.578.471,00**							**1.742.138.454,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.610.254.230,00**	**962.585.493,00**	**846.675.759,00**	**-763.578.471,00**							**1.742.138.454,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.610.254.230,00**	**962.585.493,00**	**846.675.759,00**	**-763.578.471,00**							**1.742.138.454,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Cakupan pelayanan kesekretariatan**				**100 %**	**100 100 % %**	**1.456.644.730,00**	**947.585.493,00**	**846.675.759,00**	**188.197.624,00**							**1.644.842.354,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Proses penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu*				100 %	100 %	5.445.000,00	6.242.000,00	5.030.000,00	-415.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN Kantor Kecamatan Wabula		5.989.500,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	907.500,00	913.000,00	740.000,00	-167.500,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			998.250,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	907.500,00	1.250.000,00	1.155.000,00	247.500,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			998.250,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	907.500,00	923.000,00	860.000,00	-47.500,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			998.250,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	907.500,00	941.000,00	650.000,00	-257.500,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			998.250,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	907.500,00	1.307.500,00	975.000,00	67.500,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			998.250,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	907.500,00	907.500,00	650.000,00	-257.500,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			998.250,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah Tingkat pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	1.214.800.400,00	755.084.293,00	781.496.272,00	-433.304.128,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN Kantor Kecamatan Wabula		1.335.977.940,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.180.025.000,00	719.402.293,00	746.206.272,00	-433.818.728,00	Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.297.725.000,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	32.960.400,00	32.640.000,00	32.640.000,00	-320.400,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			36.256.440,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	907.500,00	1.350.000,00	1.350.000,00	442.500,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			998.250,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	907.500,00	1.692.000,00	1.300.000,00	392.500,00	Kab. Buton, Wabula, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			998.250,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Cakupan pelayanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah* *Tingkat pemenuhan administrasi barang milik daerah*				100 %	100 %	4.356.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-156.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN Kecamatan Wabula, Masyarakat Kecamatan Wabula		47.916.001,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.356.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-156.000,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			47.916.001,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran* *Tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	12.100.000,00	18.200.000,00	0,00	-12.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN Kantor Kecamatan Wabula		13.310.000,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	12.100.000,00	18.200.000,00	0,00	-12.100.000,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.310.000,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	46.270.400,00	49.175.000,00	11.225.887,00	-35.044.513,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN Kantor Kecamatan Wabula, Gedung Bangunan Kantor		50.897.440,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	605.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			665.500,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	605.000,00	1.070.000,00	0,00	-605.000,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			665.500,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	605.000,00	1.000.000,00	360.000,00	-245.000,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			665.500,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	605.000,00	2.000.000,00	2.507.887,00	1.902.887,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			665.500,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	1.742.400,00	0,00	0,00	-1.742.400,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.916.640,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	36.300.000,00	39.700.000,00	7.753.000,00	-28.547.000,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			39.930.000,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	5.808.000,00	4.800.000,00	0,00	-5.808.000,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.388.800,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	11.825.000,00	32.409.000,00	0,00	-11.825.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN Kantor Kecamatan Wabula		12.718.750,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	5.775.000,00	9.000.000,00	0,00	-5.775.000,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.063.750,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	6.050.000,00	23.409.000,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.655.000,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	77.924.000,00	52.775.200,00	34.723.600,00	-43.200.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN dan Non ASN Kantor Kecamatan Wabula , Masyarakat Kecamatan Wabula		85.716.400,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.452.000,00	3.600.000,00	1.298.400,00	-153.600,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.597.200,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.420.000,00	4.766.000,00	4.766.000,00	2.346.000,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	74.052.000,00	44.409.200,00	28.659.200,00	-45.392.800,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			81.457.200,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik*				100 %	100 %	83.923.930,00	29.500.000,00	10.000.000,00	-73.923.930,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN dan Non ASN Kantor Kecamatan Wabula , Masyarakat Kecamatan Wabula		92.316.323,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.115.000,00	29.500.000,00	10.000.000,00	-28.115.000,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			41.926.500,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	45.808.930,00	0,00	0,00	-45.808.930,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			50.389.823,00	KECAMATAN WABULA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat di wilayah kecamatan Persentase pelayanan publik di wilayah kecamatan yang tepat waktu**				**100 %**	**100 100 % %**	**60.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.500.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase peningkatan pembinaan dan layanan kantor kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan*				100 %	100 %	60.500.000,00	0,00	0,00	-60.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Wabula		0,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	0 Laporan	60.500.000,00	0,00	0,00	-60.500.000,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN WABULA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Perentase masyarakat / pokmas yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan di desa Persentase pemberdayaan lembaga kemasyaraatan yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 100 % %**	**4.658.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.658.500,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Persentase peningkatan pembinaan dan layanan kantor kecamatan*				100 %	100 %	4.658.500,00	0,00	0,00	-4.658.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN Kecamatan Wabula, Masyarakat Kecamatan Wabula		0,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	4.658.500,00	0,00	0,00	-4.658.500,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN WABULA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 100 % %**	**9.317.000,00**	**10.800.000,00**	**0,00**	**931.700,00**							**10.248.700,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan persentase peningkatan pembinaan dan layanan kantor kecamatan*				100 %	100 %	9.317.000,00	10.800.000,00	0,00	-9.317.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN Kecamatan Wabula, Masyarakat Kecamatan Wabula		10.248.700,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0 Laporan	4.658.500,00	6.600.000,00	0,00	-4.658.500,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.124.350,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				7 Laporan	0 Laporan	4.658.500,00	4.200.000,00	0,00	-4.658.500,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.124.350,00	KECAMATAN WABULA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 100 % %**	**60.500.000,00**	**4.200.000,00**	**0,00**	**6.050.000,00**							**66.550.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*				100 %	100 %	60.500.000,00	4.200.000,00	0,00	-60.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Wabula		66.550.000,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				7 Orang	0 Orang	24.200.000,00	0,00	0,00	-24.200.000,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.620.000,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				7 Laporan	0 Laporan	24.200.000,00	0,00	0,00	-24.200.000,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.620.000,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	0 Dokumen	12.100.000,00	4.200.000,00	0,00	-12.100.000,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.310.000,00	KECAMATAN WABULA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang telah menerapkan tata kelola desa sesuai peraturan perundang undangan Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**100 100 % %**	**18.634.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.863.400,00**							**20.497.400,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase kegiatan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*				100 %	100 %	18.634.000,00	0,00	0,00	-18.634.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN dan Masyarakat Kecamatan Wabula		20.497.400,00	KECAMATAN WABULA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	0 Dokumen	9.317.000,00	0,00	0,00	-9.317.000,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.248.700,00	KECAMATAN WABULA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	0 Dokumen	9.317.000,00	0,00	0,00	-9.317.000,00	Kab. Buton, Wabula, Wabula	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.248.700,00	KECAMATAN WABULA
	J U M L A H								**1.610.254.230,00**	**962.585.493,00**	**846.675.759,00**	**-763.578.471,00**							**1.742.138.454,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN WOLOWA KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN WOLOWA							**1.483.630.414,00**	**979.632.581,00**	**907.016.826,00**	**-576.613.588,00**							**1.337.524.800,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.483.630.414,00**	**979.632.581,00**	**907.016.826,00**	**-576.613.588,00**							**1.337.524.800,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.483.630.414,00**	**979.632.581,00**	**907.016.826,00**	**-576.613.588,00**							**1.337.524.800,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Kesekretariatan**				**100 %**	**92 %**	**1.430.061.539,00**	**952.986.581,00**	**896.985.826,00**	**-131.198.739,00**							**1.298.862.800,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (OPD)*				100 %	92 %	8.470.000,00	11.792.500,00	5.302.900,00	-3.167.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dokumen, Laporan		12.130.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	11 Dokumen	1.210.000,00	1.914.700,00	1.914.700,00	704.700,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.800.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	11 Dokumen	1.210.000,00	1.696.900,00	1.696.900,00	486.900,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.800.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	11 Dokumen	1.210.000,00	1.700.750,00	0,00	-1.210.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.800.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				9 Dokumen	13 Dokumen	1.210.000,00	1.691.300,00	1.691.300,00	481.300,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.800.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				9 Dokumen	13 Dokumen	1.210.000,00	1.718.950,00	0,00	-1.210.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.800.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	11 Laporan	1.210.000,00	1.583.700,00	0,00	-1.210.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.800.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	11 Laporan	1.210.000,00	1.486.200,00	0,00	-1.210.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.330.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksanya Layanan Administrasi Keuangan*				100 %	92 %	1.116.027.297,00	777.747.331,00	833.084.226,00	-282.943.071,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Pegawai ASN, Dokumen, Laporan		1.009.732.800,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.100.292.699,00	746.243.981,00	806.844.226,00	-293.448.473,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			969.332.800,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	9 Dokumen	6.098.400,00	8.040.000,00	8.040.000,00	1.941.600,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	9 Dokumen	6.534.000,00	20.400.000,00	18.200.000,00	11.666.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			28.400.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	13 Laporan	1.839.322,00	1.619.150,00	0,00	-1.839.322,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	13 Laporan	1.262.876,00	1.444.200,00	0,00	-1.262.876,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	92 %	13.349.242,00	1.406.750,00	1.406.750,00	-11.942.492,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Pegawai ASN, Dokumen, Laporan		19.500.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			18.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**NON URUSAN**							**1.483.630.414,00**	**979.632.581,00**	**907.016.826,00**	**-576.613.588,00**							**1.337.524.800,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.483.630.414,00**	**979.632.581,00**	**907.016.826,00**	**-576.613.588,00**							**1.337.524.800,00**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.483.630.414,00**	**979.632.581,00**	**907.016.826,00**	**-576.613.588,00**							**1.337.524.800,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.483.630.414,00**	**979.632.581,00**	**907.016.826,00**	**-576.613.588,00**							**1.337.524.800,00**	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	11 Dokumen	1.249.242,00	1.406.750,00	1.406.750,00	157.508,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	92 %	152.460.000,00	86.490.450,00	21.212.450,00	-131.247.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dokumen dan Laporan		126.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9 Paket	1.936.000,00	1.934.000,00	0,00	-1.936.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11 Paket	9.680.000,00	9.820.000,00	0,00	-9.680.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			18.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	11 Paket	9.680.000,00	10.228.000,00	6.544.000,00	-3.136.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11 Paket	2.178.000,00	3.138.450,00	3.138.450,00	960.450,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	29 Laporan	117.370.000,00	58.850.000,00	11.530.000,00	-105.840.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			80.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	8 Dokumen	11.616.000,00	2.520.000,00	0,00	-11.616.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD OPD*				100 %	92 %	45.980.000,00	19.087.050,00	0,00	-45.980.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dokumen dan Laporan		66.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	24.200.000,00	0,00	0,00	-24.200.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	14.520.000,00	19.087.050,00	0,00	-14.520.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			18.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	7.260.000,00	0,00	0,00	-7.260.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			18.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan OPD*				100 %	92 %	59.895.000,00	27.556.500,00	22.029.500,00	-37.865.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Laporan		30.500.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				21 Laporan	15 Laporan	3.025.000,00	3.312.700,00	3.312.700,00	287.700,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	11 Laporan	2.420.000,00	2.255.000,00	1.228.000,00	-1.192.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.500.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	11 Laporan	54.450.000,00	21.988.800,00	17.488.800,00	-36.961.200,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			25.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan BMD OPD*				100 %	92 %	33.880.000,00	28.906.000,00	13.950.000,00	-19.930.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Barang Aset Kantor, Dokumen, Laporan		35.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	30.250.000,00	23.500.000,00	13.950.000,00	-16.300.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.420.000,00	3.186.000,00	0,00	-2.420.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.210.000,00	2.220.000,00	0,00	-1.210.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Yang Tepat Waktu**				**-**	**92 %**	**12.719.700,00**	**6.024.000,00**	**738.000,00**	**-3.719.700,00**							**9.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 %	92 %	6.050.000,00	3.738.000,00	738.000,00	-5.312.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat, Unsur Pemerintah		4.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	11 Laporan	6.050.000,00	3.738.000,00	738.000,00	-5.312.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				100 %	92 %	6.669.700,00	2.286.000,00	0,00	-6.669.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat, Unsur Pemerintah		5.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	11 Laporan	6.669.700,00	2.286.000,00	0,00	-6.669.700,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Ditindaklanjuti**				**100 %**	**92 %**	**12.283.200,00**	**4.898.000,00**	**2.372.000,00**	**-4.283.200,00**							**8.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 %	92 %	6.233.200,00	2.372.000,00	2.372.000,00	-3.861.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Unsur Pemerintah, Unsur Lembaga dan Masyarakat Umun		4.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				21 Lembaga Kemasyarakatan	35 Lembaga Kemasyarakatan	6.233.200,00	2.372.000,00	2.372.000,00	-3.861.200,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatann*				100 %	92 %	6.050.000,00	2.526.000,00	0,00	-6.050.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Unsur Pemerintah, Unsur Lembaga dan Masyarakat Umun		4.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				21 Lembaga Kemasyarakatan	35 Lembaga Kemasyarakatan	6.050.000,00	2.526.000,00	0,00	-6.050.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Ditindak Lanjuti**				**100 %**	**92 %**	**6.977.368,00**	**5.102.000,00**	**2.521.000,00**	**22.632,00**							**7.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan*				100 %	92 %	6.977.368,00	5.102.000,00	2.521.000,00	-4.456.368,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Unsur Pemerintah, Masyarakat Lembaga Kemasyarakatan dan Pihak Keamanan/Trantib		7.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	11 Laporan	2.420.000,00	2.521.000,00	2.521.000,00	101.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	11 Laporan	4.557.368,00	2.581.000,00	0,00	-4.557.368,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti**				**100 %**	**92 %**	**14.202.755,00**	**6.000.000,00**	**4.400.000,00**	**-8.202.755,00**							**6.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terseenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan*				100 %	92 %	14.202.755,00	6.000.000,00	4.400.000,00	-9.802.755,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Unsur Pemerintah, Unsur Lembaga dan Masyarakat Umun		6.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	280 Orang	14.202.755,00	6.000.000,00	4.400.000,00	-9.802.755,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang di Tindak Lanjutii**				**100 %**	**92 %**	**7.385.852,00**	**4.622.000,00**	**0,00**	**1.276.148,00**							**8.662.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				100 %	92 %	7.385.852,00	4.622.000,00	0,00	-7.385.852,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat, Unsur Pemerintah, Perangkat Desa, Unsur Bumdes		8.662.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	11 Dokumen	2.420.000,00	2.326.000,00	0,00	-2.420.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	11 Dokumen	2.545.852,00	2.296.000,00	0,00	-2.545.852,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	0 Dokumen	2.420.000,00	0,00	0,00	-2.420.000,00	Kab. Buton, Wolowa, Wolowa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	KECAMATAN WOLOWA
	J U M L A H								**1.483.630.414,00**	**979.632.581,00**	**907.016.826,00**	**-576.613.588,00**							**1.337.524.800,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SIOTAPINA KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN SIOTAPINA							**1.609.080.927,00**	**1.062.486.268,00**	**983.449.117,00**	**-625.631.810,00**							**1.614.671.127,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.609.080.927,00**	**1.062.486.268,00**	**983.449.117,00**	**-625.631.810,00**							**1.614.671.127,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.609.080.927,00**	**1.062.486.268,00**	**983.449.117,00**	**-625.631.810,00**							**1.614.671.127,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuapten/ Kota**				**100 %**	**100 %**	**1.568.372.737,00**	**1.035.042.718,00**	**978.075.317,00**	**11.298.390,00**							**1.579.671.127,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	8.099.498,00	8.007.400,00	1.435.800,00	-6.663.698,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dokumen dan Laporan		12.600.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	8 Dokumen	1.488.300,00	1.321.350,00	344.000,00	-1.144.300,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.800.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	0 Dokumen	878.823,00	878.550,00	0,00	-878.823,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.800.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	0 Dokumen	878.823,00	878.550,00	0,00	-878.823,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.800.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				9 Dokumen	12 Dokumen	1.237.467,00	1.237.350,00	545.900,00	-691.567,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.800.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				9 Dokumen	12 Dokumen	1.237.467,00	1.237.350,00	545.900,00	-691.567,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.800.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	0 Laporan	1.168.618,00	1.318.550,00	0,00	-1.168.618,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.800.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	1.210.000,00	1.135.700,00	0,00	-1.210.000,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.800.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.205.585.031,00	851.783.468,00	900.196.367,00	-305.388.664,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN, Dokumen. Laporan		1.274.980.927,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.183.768.731,00	830.232.968,00	886.495.817,00	-297.272.914,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.233.580.927,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	4 Dokumen	6.098.400,00	6.000.000,00	4.000.000,00	-2.098.400,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	4 Dokumen	12.196.800,00	12.000.000,00	8.000.000,00	-4.196.800,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			28.400.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	6 Laporan	1.641.244,00	1.670.950,00	754.850,00	-886.394,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	6 Laporan	1.879.856,00	1.879.550,00	945.700,00	-934.156,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	5.082.000,00	0,00	0,00	-5.082.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	ASN, Laporan		5.590.200,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	5.082.000,00	0,00	0,00	-5.082.000,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.590.200,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	104.862.230,00	5.931.050,00	981.050,00	-103.881.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dokumen, Laporan, ASN dan Unsur Pemerintah		19.500.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	7.080.920,00	4.950.000,00	0,00	-7.080.920,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			18.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	3 Dokumen	981.310,00	981.050,00	981.050,00	-260,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.500.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	0 Orang	96.800.000,00	0,00	0,00	-96.800.000,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	115.150.860,00	115.992.700,00	40.076.200,00	-75.074.660,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Pegawai ASN, Dokumen, Laporan		138.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	4.325.750,00	2.301.000,00	538.000,00	-3.787.750,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	6.706.425,00	6.704.200,00	6.704.200,00	-2.225,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	9.982.500,00	21.756.000,00	8.160.000,00	-1.822.500,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	2.950.585,00	2.950.500,00	900.000,00	-2.050.585,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	12 Laporan	85.377.600,00	82.281.000,00	23.774.000,00	-61.603.600,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			90.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	5.808.000,00	0,00	0,00	-5.808.000,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	52.487.380,00	5.512.000,00	4.647.000,00	-47.840.380,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	BMD, Dokumen, Laporan		62.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	24.200.000,00	0,00	0,00	-24.200.000,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	11.649.880,00	5.512.000,00	4.647.000,00	-7.002.880,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			12.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	16.637.500,00	0,00	0,00	-16.637.500,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	27.624.300,00	25.936.900,00	13.936.900,00	-13.687.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Unsur Pegawai, Dokumen dan Laporan		29.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4 Laporan	1.546.380,00	1.546.300,00	1.546.300,00	-80,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.500.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	6 Laporan	3.160.520,00	2.937.000,00	2.937.000,00	-223.520,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.500.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	8 Laporan	22.917.400,00	21.453.600,00	9.453.600,00	-13.463.800,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			24.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	49.481.438,00	21.879.200,00	16.802.000,00	-32.679.438,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Asn, Aset Kantor, Dokumen, Laporan		38.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	37.381.438,00	18.000.000,00	14.280.000,00	-23.101.438,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			30.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	8.470.000,00	3.379.200,00	2.022.000,00	-6.448.000,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	3.630.000,00	500.000,00	500.000,00	-3.130.000,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**11.320.155,00**	**6.059.800,00**	**0,00**	**-2.820.155,00**							**8.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*undefined*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.291.050,00	5.030.750,00	0,00	-10.291.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat, Unsur Pemerintah		4.500.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	0 Laporan	10.291.050,00	5.030.750,00	0,00	-10.291.050,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.500.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	1.029.105,00	1.029.050,00	0,00	-1.029.105,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat, Unsur Pemerintah		4.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0 Laporan	1.029.105,00	1.029.050,00	0,00	-1.029.105,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Masyarakat /Pokmas ynag terlibat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa**				**100 %**	**100 %**	**3.704.839,00**	**3.704.800,00**	**3.704.800,00**	**295.161,00**							**4.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Cakupan Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 %	100 %	3.704.839,00	3.704.800,00	3.704.800,00	-39,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat, Unsur Pemerintah		4.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				11 Lembaga Kemasyarakatan	35 Lembaga Kemasyarakatan	3.704.839,00	3.704.800,00	3.704.800,00	-39,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**5.473.072,00**	**5.473.050,00**	**0,00**	**1.526.928,00**							**7.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	5.473.072,00	5.473.050,00	0,00	-5.473.072,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat, Unsur Pemerintah		7.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0 Laporan	2.573.065,00	2.573.050,00	0,00	-2.573.065,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	0 Laporan	2.900.007,00	2.900.000,00	0,00	-2.900.007,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**10.427.274,00**	**4.038.250,00**	**1.669.000,00**	**-3.927.274,00**							**6.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	10.427.274,00	4.038.250,00	1.669.000,00	-8.758.274,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat, Unsur Pemerintah		6.500.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				60 Orang	300 Orang	10.427.274,00	4.038.250,00	1.669.000,00	-8.758.274,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.500.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Telah Menerapkan Tata Kelola Desa Sesuai Peraturan Perundang-undangan**				**100 %**	**100 %**	**9.782.850,00**	**8.167.650,00**	**0,00**	**-782.850,00**							**9.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Cakupan fasilitasi, rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa* *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa*				100 % 1 Dokumen	100 % 1 Dokumen	9.782.850,00	8.167.650,00	0,00	-9.782.850,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat, Unsur Pemerintah		9.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	0 Dokumen	4.813.380,00	3.198.350,00	0,00	-4.813.380,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	0 Dokumen	2.549.470,00	2.549.400,00	0,00	-2.549.470,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	0 Dokumen	2.420.000,00	2.419.900,00	0,00	-2.420.000,00	Kab. Buton, Siotapina, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.000.000,00	KECAMATAN SIOTAPINA
	J U M L A H								**1.609.080.927,00**	**1.062.486.268,00**	**983.449.117,00**	**-625.631.810,00**							**1.614.671.127,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN LASALIMU SELATAN KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN LASALIMU SELATAN							**1.509.698.635,00**	**1.057.528.126,00**	**905.553.139,00**	**-604.145.496,00**							**1.660.668.497,71**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.509.698.635,00**	**1.057.528.126,00**	**905.553.139,00**	**-604.145.496,00**							**1.660.668.497,71**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.509.698.635,00**	**1.057.528.126,00**	**905.553.139,00**	**-604.145.496,00**							**1.660.668.497,71**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.388.698.635,00**	**1.042.399.376,00**	**890.424.389,00**	**138.869.862,71**							**1.527.568.497,71**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	8.470.000,00	8.470.000,00	8.470.000,00	0,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		9.317.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.331.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.331.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.331.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				9 Dokumen	9 Dokumen	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.331.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				9 Dokumen	9 Dokumen	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.331.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.331.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.331.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.113.384.393,00	833.460.036,00	805.305.687,00	-308.078.706,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		1.224.722.832,05	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.099.593.282,50	819.668.926,00	792.330.467,00	-307.262.815,50	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.209.552.610,85	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	4.888.400,00	4.888.400,00	4.890.510,00	2.110,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.377.240,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.292.000,00	6.292.000,00	6.292.000,00	0,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.921.200,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.389.322,00	1.389.322,00	571.322,00	-818.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.528.254,20	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.221.388,50	1.221.388,00	1.221.388,00	-0,50	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.343.527,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	4.356.000,00	4.356.000,00	1.917.000,00	-2.439.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		4.791.600,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.356.000,00	4.356.000,00	1.917.000,00	-2.439.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.791.600,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.249.242,00	1.249.242,00	657.242,00	-592.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		1.374.165,66	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.249.242,00	1.249.242,00	657.242,00	-592.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.374.165,66	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	140.844.000,00	119.054.000,00	39.019.500,00	-101.824.500,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		154.928.400,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.936.000,00	1.936.000,00	1.936.000,00	0,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.129.600,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.680.000,00	9.680.000,00	5.315.500,00	-4.364.500,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.648.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.680.000,00	9.170.000,00	9.170.000,00	-510.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.648.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.178.000,00	2.178.000,00	778.000,00	-1.400.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.395.800,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				116 Laporan	116 Laporan	117.370.000,00	96.090.000,00	21.820.000,00	-95.550.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			129.107.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	44.770.000,00	185.000,00	185.000,00	-44.585.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		49.247.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	14.520.000,00	0,00	0,00	-14.520.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.972.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	13 Unit	30.250.000,00	185.000,00	185.000,00	-30.065.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			33.275.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	59.895.000,00	59.895.098,00	25.388.260,00	-34.506.740,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		65.884.500,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.025.000,00	3.025.000,00	1.198.000,00	-1.827.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			3.327.500,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	54.450.000,00	54.450.098,00	21.770.260,00	-32.679.740,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			59.895.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.730.000,00	15.730.000,00	9.481.700,00	-6.248.300,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		17.303.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	12.100.000,00	12.100.000,00	7.160.000,00	-4.940.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.310.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1 Unit	2.420.000,00	2.420.000,00	1.711.700,00	-708.300,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			2.662.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	4 Unit	1.210.000,00	1.210.000,00	610.000,00	-600.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.331.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**24.200.000,00**	**3.572.000,00**	**3.572.000,00**	**2.420.000,00**							**26.620.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	12.100.000,00	1.786.000,00	1.786.000,00	-10.314.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat, Unsur Pemerintah		13.310.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	3 Laporan	12.100.000,00	1.786.000,00	1.786.000,00	-10.314.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.310.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	12.100.000,00	1.786.000,00	1.786.000,00	-10.314.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		13.310.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	12.100.000,00	1.786.000,00	1.786.000,00	-10.314.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.310.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**24.200.000,00**	**1.936.000,00**	**1.936.000,00**	**2.420.000,00**							**26.620.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	24.200.000,00	1.936.000,00	1.936.000,00	-22.264.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		26.620.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	24.200.000,00	1.936.000,00	1.936.000,00	-22.264.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.620.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**24.200.000,00**	**3.572.000,00**	**3.572.000,00**	**2.420.000,00**							**26.620.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	24.200.000,00	3.572.000,00	3.572.000,00	-20.628.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		26.620.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	12.100.000,00	1.786.000,00	1.786.000,00	-10.314.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.310.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	12.100.000,00	1.786.000,00	1.786.000,00	-10.314.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.310.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**24.200.000,00**	**2.476.750,00**	**2.476.750,00**	**2.420.000,00**							**26.620.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	24.200.000,00	2.476.750,00	2.476.750,00	-21.723.250,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		26.620.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				60 Orang	60 Orang	24.200.000,00	2.476.750,00	2.476.750,00	-21.723.250,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			26.620.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**24.200.000,00**	**3.572.000,00**	**3.572.000,00**	**2.420.000,00**							**26.620.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	24.200.000,00	3.572.000,00	3.572.000,00	-20.628.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		26.620.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	12.100.000,00	1.786.000,00	1.786.000,00	-10.314.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.310.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	12.100.000,00	1.786.000,00	1.786.000,00	-10.314.000,00	Kab. Buton, Lasalimu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan 3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan			13.310.000,00	KECAMATAN LASALIMU SELATAN
	J U M L A H								**1.509.698.635,00**	**1.057.528.126,00**	**905.553.139,00**	**-604.145.496,00**							**1.660.668.497,71**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN LASALIMU KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN LASALIMU							**2.363.394.524,00**	**1.615.360.254,00**	**1.455.829.500,00**	**-907.565.024,00**							**2.057.861.932,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.363.394.524,00**	**1.615.360.254,00**	**1.455.829.500,00**	**-907.565.024,00**							**2.057.861.932,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.363.394.524,00**	**1.615.360.254,00**	**1.455.829.500,00**	**-907.565.024,00**							**2.057.861.932,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.069.741.579,00**	**1.276.961.604,00**	**1.146.836.300,00**	**-91.739.646,00**							**1.978.001.933,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	14.786.200,00	2.876.000,00	0,00	-14.786.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dokumen		0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	0 Dokumen	992.200,00	500.000,00	0,00	-992.200,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	0 Dokumen	2.299.000,00	588.000,00	0,00	-2.299.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	0 Dokumen	2.299.000,00	580.000,00	0,00	-2.299.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				9 Dokumen	0 Dokumen	2.299.000,00	708.000,00	0,00	-2.299.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				9 Dokumen	0 Dokumen	2.299.000,00	500.000,00	0,00	-2.299.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	0 Laporan	2.299.000,00	0,00	0,00	-2.299.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	2.299.000,00	0,00	0,00	-2.299.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.524.217.270,00	1.066.400.254,00	1.032.553.300,00	-491.663.970,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Pegawai ASN, Dokumen, Laporan		1.669.052.296,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.472.106.282,00	1.031.765.854,00	1.020.358.900,00	-451.747.382,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.619.316.910,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	45.213.988,00	34.634.400,00	12.194.400,00	-33.019.588,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			49.735.386,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	2.299.000,00	0,00	0,00	-2.299.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	0 Laporan	2.299.000,00	0,00	0,00	-2.299.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				8 Laporan	0 Laporan	2.299.000,00	0,00	0,00	-2.299.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	5.082.000,00	0,00	0,00	-5.082.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dokumen, laporan		0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	5.082.000,00	0,00	0,00	-5.082.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	61.302.230,00	6.400.000,00	0,00	-61.302.230,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Pegawai ASN, Dokumen, Laporan		0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	0 Paket	11.920.920,00	6.400.000,00	0,00	-11.920.920,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				16 Dokumen	0 Dokumen	981.310,00	0,00	0,00	-981.310,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0 Orang	48.400.000,00	0,00	0,00	-48.400.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	270.197.788,00	126.310.350,00	59.920.000,00	-210.277.788,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dokumen, Laporan		243.912.213,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	8.470.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	-7.130.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.317.000,00	KECAMATAN LASALIMU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	0 Paket	40.223.231,00	6.050.000,00	0,00	-40.223.231,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.089.772,00	9.738.000,00	9.738.000,00	-10.351.772,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			22.089.749,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.580.585,00	1.432.350,00	1.432.000,00	-5.148.585,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.238.644,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	89.128.600,00	39.450.000,00	24.570.000,00	-64.558.600,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			98.041.460,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	97.477.600,00	57.500.000,00	22.840.000,00	-74.637.600,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			107.225.360,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	8.228.000,00	10.800.000,00	0,00	-8.228.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	86.367.380,00	3.992.000,00	0,00	-86.367.380,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Dokumen dan Laporan		0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	60.500.000,00	0,00	0,00	-60.500.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	3.179.880,00	3.142.000,00	0,00	-3.179.880,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	18.150.000,00	0,00	0,00	-18.150.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	4.537.500,00	850.000,00	0,00	-4.537.500,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	22.043.780,00	20.340.000,00	3.720.000,00	-18.323.780,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Laporan		10.648.000,00	KECAMATAN LASALIMU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0 Laporan	1.546.380,00	0,00	0,00	-1.546.380,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.680.000,00	5.940.000,00	3.720.000,00	-5.960.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.648.000,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	0 Laporan	10.817.400,00	14.400.000,00	0,00	-10.817.400,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	85.744.931,00	50.643.000,00	50.643.000,00	-35.101.931,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Barang Aset Kantor, Dokumen, Laporan		54.389.424,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	49.444.931,00	50.643.000,00	50.643.000,00	1.198.069,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			54.389.424,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	18.150.000,00	0,00	0,00	-18.150.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	18.150.000,00	0,00	0,00	-18.150.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Pablik**				**100 %**	**100 %**	**18.580.760,00**	**3.603.000,00**	**0,00**	**-18.580.760,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	17.551.655,00	3.603.000,00	0,00	-17.551.655,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat, Unsur Pemerintah		0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	0 Laporan	17.551.655,00	3.603.000,00	0,00	-17.551.655,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	1.029.105,00	0,00	0,00	-1.029.105,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat, Unsur Pemerintah		0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0 Laporan	1.029.105,00	0,00	0,00	-1.029.105,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**100 %**	**100 %**	**202.472.186,00**	**323.398.800,00**	**308.993.200,00**	**-149.232.186,00**							**53.240.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 %	100 %	140.762.186,00	0,00	0,00	-140.762.186,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Unsur Pemerintah, Unsur Lembaga dan Masyarakat Umum		0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				52 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	140.762.186,00	0,00	0,00	-140.762.186,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**24.200.000,00**	**7.020.000,00**	**0,00**	**-24.200.000,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				100 %	100 %	24.200.000,00	7.020.000,00	0,00	-24.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Unsur Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan dan Pihak Keamanan/Trantib		0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0 Laporan	12.100.000,00	3.444.000,00	0,00	-12.100.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	0 Laporan	12.100.000,00	3.576.000,00	0,00	-12.100.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**24.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.200.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*				100 %	100 %	24.200.000,00	0,00	0,00	-24.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Unsur Pemerintah, Unsur Lembaga dan Masyarakat Umum		0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				5 Orang	0 Orang	24.200.000,00	0,00	0,00	-24.200.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**24.199.999,00**	**4.376.850,00**	**0,00**	**2.420.000,00**							**26.619.999,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa*				100 %	100 %	24.199.999,00	4.376.850,00	0,00	-24.199.999,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Masyarakat, Unsur Pemerintah, Perangkat Desa Unsur Bumdes		26.619.999,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7.199.500,00	0,00	0,00	-7.199.500,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.919.450,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.409.500,00	0,00	0,00	-8.409.500,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.250.450,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.590.999,00	4.376.850,00	0,00	-8.590.999,00	Kab. Buton, Lasalimu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			9.450.099,00	KECAMATAN LASALIMU
		KELURAHAN KAMARU							**2.363.394.524,00**	**1.615.360.254,00**	**1.455.829.500,00**	**-907.565.024,00**							**2.057.861.932,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.363.394.524,00**	**1.615.360.254,00**	**1.455.829.500,00**	**-907.565.024,00**							**2.057.861.932,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.363.394.524,00**	**1.615.360.254,00**	**1.455.829.500,00**	**-907.565.024,00**							**2.057.861.932,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**202.472.186,00**	**323.398.800,00**	**308.993.200,00**	**-149.232.186,00**							**53.240.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				100 %	100 %	61.710.000,00	323.398.800,00	308.993.200,00	247.283.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Unsur Pemerintah, Unsur Lembaga dan Masyarakat Umum		53.240.000,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	13.310.000,00	0,00	0,00	-13.310.000,00	Kab. Buton, Lasalimu, Kamaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			0,00	KECAMATAN LASALIMU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	48.400.000,00	323.398.800,00	308.993.200,00	260.593.200,00	Kab. Buton, Lasalimu, Kamaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			53.240.000,00	KECAMATAN LASALIMU
	J U M L A H								**2.363.394.524,00**	**1.615.360.254,00**	**1.455.829.500,00**	**-907.565.024,00**							**2.057.861.932,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KAPONTORI KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KAPONTORI							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.871.389.562,00**	**1.544.298.998,00**	**1.487.010.830,00**	**-664.918.416,00**							**2.206.471.146,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	38.290.000,00	20.359.100,00	16.749.550,00	-21.540.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		38.290.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	3.334.500,00	2.787.250,00	2.787.250,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.725.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	3.120.500,00	2.680.250,00	2.680.250,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.850.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	3.331.000,00	2.865.500,00	2.865.500,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.725.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				9 Dokumen	9 Dokumen	0,00	3.058.000,00	2.279.000,00	2.279.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.505.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				-	0 0	0,00	2.384.100,00	1.742.050,00	1.742.050,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.985.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	2.883.000,00	2.371.500,00	2.371.500,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			4.200.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.248.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.300.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.006.105.562,00	1.264.501.549,00	1.357.729.821,00	-648.375.741,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		1.402.744.231,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	0,00	1.225.619.049,00	1.320.637.321,00	1.320.637.321,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			1.274.824.231,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	35.488.000,00	35.264.000,00	35.264.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			40.450.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	820.000,00	410.000,00	410.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			68.250.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				8 Laporan	8 Laporan	0,00	1.382.500,00	822.500,00	822.500,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			10.660.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	0,00	1.192.000,00	596.000,00	596.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			8.560.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	6.300.000,00	1.367.900,00	683.950,00	-5.616.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		6.300.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	1.367.900,00	683.950,00	683.950,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.300.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	61.650.000,00	4.948.000,00	2.474.000,00	-59.176.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		61.650.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	11 Paket	0,00	4.948.000,00	2.474.000,00	2.474.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			32.250.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				11 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.650.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			15.750.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	218.444.000,00	143.654.165,00	62.181.525,00	-156.262.475,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		126.886.915,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	0,00	3.743.000,00	3.519.000,00	3.519.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	20.879.165,00	12.891.325,00	12.891.325,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			12.840.015,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	151.200,00	151.200,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.775.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	38.522.000,00	11.272.000,00	11.272.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			60.750.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	0,00	80.510.000,00	34.348.000,00	34.348.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			40.521.900,00	KECAMATAN KAPONTORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	237.500.000,00	0,00	0,00	-237.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		252.500.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			70.000.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			62.500.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			120.000.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	77.850.000,00	78.018.084,00	34.629.084,00	-43.220.916,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		82.850.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.138.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			7.500.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	15.748.000,00	15.524.000,00	15.524.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			19.375.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	60.132.084,00	18.036.084,00	18.036.084,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			55.975.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	225.250.000,00	31.450.200,00	12.562.900,00	-212.687.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		235.250.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			5.250.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	0,00	27.322.100,00	10.644.000,00	10.644.000,00	Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			20.000.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	4.128.100,00	1.918.900,00	1.918.900,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			210.000.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7	**NON URUSAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**36.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**36.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		22.000.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	0 Laporan	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			22.000.000,00	KECAMATAN KAPONTORI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	14.500.000,00	0,00	0,00	-14.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		14.500.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	0 Laporan	14.500.000,00	0,00	0,00	-14.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			14.500.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**670.000.000,00**	**596.768.000,00**	**596.768.000,00**	**32.000.000,00**							**702.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	48.000.000,00	0,00	0,00	-48.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		48.000.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	48.000.000,00	0,00	0,00	-48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			48.000.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	622.000.000,00	596.768.000,00	596.768.000,00	-25.232.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		654.000.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	168.000.000,00	196.768.000,00	196.768.000,00	28.768.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			200.000.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	454.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-54.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Kapontori, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			454.000.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**33.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**33.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00			-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		33.000.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	0 Laporan	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			22.000.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				10 0	0 0	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			11.000.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**21.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**21.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		21.000.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				2 Orang	0 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			21.000.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**39.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**							**41.050.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	39.050.000,00	0,00	0,00	-39.050.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	-		41.050.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				15 Dokumen	0 Dokumen	22.050.000,00	0,00	0,00	-22.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			22.050.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			6.000.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	0 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			13.000.000,00	KECAMATAN KAPONTORI
	J U M L A H								**3.670.939.562,00**	**2.141.066.998,00**	**2.083.778.830,00**	**-1.587.160.732,00**							**3.040.021.146,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK KAB. BUTON
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK							**4.337.773.215,00**	**3.583.350.849,00**	**3.053.214.134,00**	**-1.284.559.081,00**							**4.771.550.537,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**4.337.773.215,00**	**3.583.350.849,00**	**3.053.214.134,00**	**-1.284.559.081,00**							**4.771.550.537,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**4.337.773.215,00**	**3.583.350.849,00**	**3.053.214.134,00**	**-1.284.559.081,00**							**4.771.550.537,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.429.848.679,00**	**1.867.950.849,00**	**1.870.965.361,00**	**228.984.868,00**							**2.658.833.547,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	21.500.000,00	28.589.000,00	19.899.000,00	-1.601.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	Badan Kesbangpol		21.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	2.550.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	2.500.000,00	3.350.000,00	750.000,00	-1.750.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	2.500.000,00	3.350.000,00	750.000,00	-1.750.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	3.500.000,00	4.150.000,00	1.180.000,00	-2.320.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			3.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	3.500.000,00	4.150.000,00	3.710.000,00	210.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			3.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	989.000,00	989.000,00	-1.511.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	6.050.000,00	5.970.000,00	2.970.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	1.962.348.679,00	1.488.226.849,00	1.612.221.361,00	-350.127.318,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	Badan Kesbangpol		2.168.833.547,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.927.348.679,00	1.451.426.849,00	1.591.058.361,00	-336.290.318,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			2.132.833.547,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	15.283.000,00	-14.717.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00	3.650.000,00	550.000,00	-1.950.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	2.500.000,00	3.150.000,00	5.330.000,00	2.830.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	6.305.000,00	6.305.000,00	-3.695.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	Badan Kesbangpol		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00	6.305.000,00	6.305.000,00	1.305.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	69.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-66.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	Badan Kesbangpol		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	0 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	0 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	0 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan administrasi umum perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	189.500.000,00	208.430.000,00	127.770.000,00	-61.730.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	Badan Kesbangpol		194.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	0 Paket	30.000.000,00	6.050.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.000.000,00	1.100.000,00	200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	0 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	150.000.000,00	201.280.000,00	127.570.000,00	-22.430.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik	Badan Kesbangpol		95.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pelayanan publik			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 Persen	100 Persen	51.000.000,00	31.305.000,00	29.590.000,00	-21.410.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	Badan Kesbangpol		51.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	300 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	2.340.000,00	-660.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	6.305.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Buton, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	40.000.000,00	16.000.000,00	12.250.000,00	-27.750.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 Persen	100 Persen	41.000.000,00	102.095.000,00	72.180.000,00	31.180.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	Badan Kesbangpol		43.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	28.000.000,00	102.095.000,00	72.180.000,00	44.180.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	0 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	0 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	0 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan**				**35 Persen**	**35 Persen**	**485.000.000,00**	**700.000.000,00**	**674.920.000,00**	**306.100.000,00**							**791.100.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Cakupan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*				35 Persen	35 Persen	485.000.000,00	700.000.000,00	674.920.000,00	189.920.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	Kelompok Masyarakat, Pelajar		791.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			1.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50 Orang	0 Orang	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				40 Laporan	0 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				75 Orang	75 Orang	400.000.000,00	700.000.000,00	674.920.000,00	274.920.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik**				**50 Persen**	**50 Persen**	**622.133.564,00**	**482.930.000,00**	**421.930.000,00**	**-72.786.644,00**							**549.346.920,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*				50 %	50 %	622.133.564,00	482.930.000,00	421.930.000,00	-200.203.564,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	Partai Politik		549.346.920,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				30 Dokumen	0 Dokumen	45.133.564,00	0,00	0,00	-45.133.564,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			5.346.920,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	0 Orang	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	100 Orang	52.000.000,00	71.330.000,00	10.330.000,00	-41.670.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			59.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				15 Laporan	15 Laporan	470.000.000,00	411.600.000,00	411.600.000,00	-58.400.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	HIBAH PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			430.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase organisasi kemasyarakatan yang dibina dan mendapatkan pengawasan**				**45 Persen**	**45 Persen**	**93.439.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.656.050,00**							**89.783.450,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Cakupan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan*				45 Persen	45 Persen	93.439.500,00	0,00	0,00	-93.439.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	Ormas, LSM		89.783.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			1.783.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	25.439.500,00	0,00	0,00	-25.439.500,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			27.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				90 Orang	0 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Laporan	0 Laporan	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Cakupan penyuluhan P4GN pada generasi muda (pelajar)**				**45 %**	**45 %**	**66.452.760,00**	**75.000.000,00**	**10.330.000,00**	**45.645.276,00**							**112.098.036,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*				45 %	45 %	66.452.760,00	75.000.000,00	10.330.000,00	-56.122.760,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	FKUB, Generasi Muda, Pelajar		112.098.036,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	1.452.760,00	522.000,00	0,00	-1.452.760,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			1.098.036,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			16.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				120 Orang	90 Orang	20.000.000,00	74.478.000,00	10.330.000,00	-9.670.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			61.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				60 Orang	0 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				120 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			16.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase potensi konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi yang ditangani**				**15 Persen**	**15 Persen**	**640.898.712,00**	**457.470.000,00**	**75.068.773,00**	**-70.510.128,00**							**570.388.584,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Cakupan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial*				15 Persen	15 Persen	640.898.712,00	457.470.000,00	75.068.773,00	-565.829.939,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya	FORKOPIMDA, Orang Asing		570.388.584,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	898.712,00	2.443.000,00	0,00	-898.712,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			913.584,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				4 Dokumen	0 Dokumen	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			27.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				60 Orang	0 Orang	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	100 Orang	45.000.000,00	101.842.000,00	8.780.000,00	-36.220.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			47.475.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				48 Laporan	48 Laporan	190.000.000,00	59.035.000,00	10.330.000,00	-179.670.000,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	370.000.000,00	294.150.000,00	55.958.773,00	-314.041.227,00	Kab. Buton, Pasarwajo, Dongkala	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelestarian aset budaya			380.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
	J U M L A H								**4.337.773.215,00**	**3.583.350.849,00**	**3.053.214.134,00**	**-1.284.559.081,00**							**4.771.550.537,00**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2025, ditetapkan target pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang merupakan indikator kinerja sasaran pembangunan terseleksi sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Pada bab ini selain menyajikan Indikator Kinerja Utama Daerah, juga menyajikan Indikator Makro Pembangunan yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator makro pembangunan ini diharapkan mampu menggambarkan pencapaian pembangunan Kabupaten Buton pada tahun 2025. Target capaian kinerja makro pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1.
Penetapan Indikator Kinerja Makro Pembangunan
Kabupaten Buton Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,20	4,84
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,95	2,83
3	Tingkat Kemiskinan	%	13,39	13,04
4	Rasio Gini	Poin	0,328	0,312
5	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,72	70,01
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	16,69	35,00

Pada tabel 6.2 diuraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah di tahap pertama yaitu tahun 2025. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan

daerah yang telah dirumuskan. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kabupaten Buton tahun 2025.

Tabel 6.2.
Target Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Buton Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Base-line 2024	Target 2025
Indikator Tujuan				
1	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	NA	70,00
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	54,60	62,04
3	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,72	70,01
4	PDRB per Kapita	Juta Rupiah/ Kapita	43,41	44,38
5	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	16,69	35,00
6	Indeks Risiko Bencana	Poin	150,30	14,81
7	Indeks Infrastruktur	%	53,97	55,64
8	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,20	4,84
9	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,38	3,46
Indikator Sasaran				
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	87,00**	88,13
2	Crime rate	Per 100.000 Pddk	NA	80,00
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	NA	53,40
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	54,60	55,81
5	Indeks Pendidikan	Poin	67,35	67,80
6	Indeks Kesehatan	Poin	77,65	77,81
7	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	59,9	61,1
8	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,469	0,459
9	Tingkat Kemiskinan	%	13,99	13,04
10	Rasio Gini	Poin	0,328	0,312
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	79,90	83,79
12	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	NA	0,30
13	Indeks Infrasrtuktur Kawasan Permukiman	%	53,97	55,64
14	Indeks Kesenjangan Infrastruktur Perkotaan dan Pedesaan	%	53,85	55,51
15	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB Selain Pertambangan dan Penggalian	%	3.466.850	3.637.685
16	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	NA	80,80
17	Indeks Ekonomi Biru	Poin	NA	49,72
18	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	2,50	2,89
19	Kontribusi PDRB Kabupaten Buton Terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara	%	2,94	3,02
20	Tingkat Inflasi	%		2,9-3,7
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,95	2,83

Selain Indikator Kinrja Utama (IKU), kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang

telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah . Penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buton tahun 2025 diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 6.3.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Base-line	Target
			2024	2025
Aspek Geografi dan Demografi				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	72,59	73,83
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	14,44	13,29
3	Jumlah RT Pengguna Listrik PLN	Ruta	22519	23158
4	Kapasitas air baku	m3/detik	NA	0,47
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	79,90	83,79
6	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	85,50	85,50
7	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum	%	86,07	86,17
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/Kg	44,84	46,68
9	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	33,18	33,50
10	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	31,46	35,00
11	a) Kumulatif	%	NA	9,73
12	b) Tahunan	%	NA	16,69
13	Indeks Risiko Bencana	Poin	150,30	14,81
14	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	NA	0,30
15	Jumlah Penduduk	Jiwa	122,03	123,85
16	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,51	1,49
17	Rasio Penduduk	Poin	101,97	101,87
18	Kepadatan Penduduk	Jiwa/m2	74,05	75,15
Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,20	4,84
2	Tingkat Kemiskinan	%	13,99	13,04

No.	Indikator	Satuan	Base-line	Target
			2024	2025
3	PDRB Per Kapita	Juta Rp./Kapita	43,41	44,38
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,95	2,83
5	Rasio Gini	Poin	0,328	0,312
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,72	70,01
7	Indeks Kesehatan	Poin	77,65	77,81
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69,72	70,58
	Kesehatan Ibu dan Anak:			
9	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	284*	259,91
10	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	21,32	20,78
	Penanganan Tuberkulosis:			
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*)	%	62,90*	65,83
12	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	91,4*	91,81
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	90,96	93,24
14	Indeks Pendidikan	Poin	67,35	67,80
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			
	i) Literasi Membaca			
15	-SD	%	62,83	64,09
16	-SMP	%	63,31	64,26
	ii) Numerasi			
17	-SD	%	42,50	43,35
	-SMP	%	58,55	59,14
19	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,63	8,72
20	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,89	13,95
21	Proporsi angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terhadap total angkatan kerja	%	15,46	15,92
22	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja	%	62,27	62,77
23	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	28,69	31,08
26	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	%	55,33	55,80
27	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Pemerintahan	%	NA	15,00
28	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	59,9	61,1
29	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	NA	53,40
30	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	0,75	1,87

No.	Indikator	Satuan	Base-line	Target
			2024	2025
31	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	87,00**	88,13
32	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	NA	70,00
33	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,469	0,459
34	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	0,30	0,53
Aspek Daya Saing Daerah				
1	Angka Ketergantungan	%	53,88	53,40
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	2,50	2,89
	Pengembangan Pariwisata			
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,16	0,20
4	Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	670	695
	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
5	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	%	NA	11,55
6	Persentase pertumbuhan IKM	%	3,44	3,82
7	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,52	1,53
8	Persentase koperasi aktif	%	72,58	73,31
9	Return on Aset (ROA) BUMD	%	0,00*	2,83
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	57,93	58,51
11	Indeks Inovasi Daerah	Poin	46,98*	51,43
12	Indeks Ekonomi Biru	Poin	NA	49,72
13	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	NA	80,80
14	Indeks Masyarakat Digital	%	38,62*	39,08
15	Persentase ketersediaan jaringan telekomunikasi	%	79,75	80,55
16	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	%	NA	7,91
17	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	32,20	31,89
18	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	0,20	0,21
	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
19	Kontribusi PDRB Kabupaten Buton Terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara	%	2,94	3,02
20	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	71,38	72,09
21	Persentase Desa Mandiri	%	2,41*	4,82
22	Tingkat Inflasi	%	NA	2±1
23	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	%	20,34*	21,27
24	Kontribusi PDRB Subkategori Perikanan	%	2,03	2,17
	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			

No.	Indikator	Satuan	Base-line	Target
			2024	2025
25	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB Selain Pertambangan dan Penggalian	Juta Rp.	3.466.850	3.637.685
26	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,54	1,69
27	Indeks Kualitas Infrastruktur	%	53,97	55,64
Aspek Pelayanan Umum				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	54,60	55,81
2	Indeks Reformasi Hukum	Poin	76,25*	77,32
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	1,94	2,09
4	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,21	3,30
5	Survei Penilaian Integritas	Poin	NA	72,53
6	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	77*	90,00
7	Crime Rate	per 100.000 Pddk	NA	80,00
8	Persentase pemilih pilkada dan pileg	%	78,47	78,94
9	Jumlah Kerjasama Daerah	Kerja sama	11	11
10	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,38	3,46
11	Nilai SAKIP	Poin	63,15*	65,11
12	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	NA	21,40
13	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	NA	0,18
14	Proporsi PDRB Jasa keuangan	%	0,73	0,75